



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Nomor : 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024
Tanggal : 7 Mei 2024**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024
Tanggal : 2 Mei 2024

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023..	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, penerapan SIPD dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat;
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun sebelumnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

1

Dd.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 2 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yayon Hidayanto S.P., M.AccFin., Ak., CA, CSFA
Register Negeri Akuntan No. RNA-3701

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan, Pemeriksaan LKPD dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017, Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar auditing yang dimuat dalam Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang memiliki 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan LKPD Tahun 2023 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Metodologi Pemeriksaan

Tim Pemeriksaan LKPD mengimplementasikan pendekatan audit berbasis risiko (*risk base audit*) secara efektif sehingga pemeriksaan fokus pada akun-akun/transaksi-transaksi berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam rangka audit berbasis risiko, pemeriksa harus memperhatikan diantaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil-hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2023;
- b. Analisis perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan signifikan dan hasil pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKPD Tahun 2022;
- c. Hasil pemeriksaan interim atas LKPD Tahun 2023;
- d. Analisis kebijakan-kebijakan signifikan tahun 2023, diantaranya yaitu:
 - 1) Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun 2022 dan 2023, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Kebijakan pemerintah daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 3) Kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan di BLUD, manajemen kas pada Bendahara Umum Daerah, dan realisasi belanja wajib (*mandatory spending*);
 - 4) Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah atau pinjaman daerah;
 - 5) Kebijakan pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); dan
 - 6) SAP yang berlaku.
- e. Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan tahun 2023; dan
- f. Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 04 Maret s.d. 02 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 39/ST/XVIII.BLP/02/2024 tanggal 29 Februari 2024.

8. Penerapan SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan:

- a. Menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia;
- b. Menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia;
- c. Meminimalisir anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah, dimana ke depan hanya ada satu sistem, yaitu SIPD;
- d. Melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk seluruh Indonesia melalui BPD dan Bank Negara seluruh Indonesia.

SIPD menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung SIPD, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kedua peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *Single Codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Pasal 31 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD antara lain menyatakan bahwa semua sistem terkait informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Dengan demikian penerapan SIPD seharusnya mulai dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2021 oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah mengaplikasikan SIPD dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Pada tahap penganggaran, SIPD digunakan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sampai dengan Perda APBD. Untuk tahap penatausahaan telah menggunakan SIPD dalam penatausahaan keuangan, namun untuk penatausahaan Darang Milik Daerah belum dapat diterapkan karena SIPD belum memiliki fitur penatausahaan Barang Milik Daerah. Pada tahap pelaporan belum sepenuhnya menggunakan SIPD namun pada sistematika penyajian Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

⁶
R.



TAHUN 2023

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT AUDITED

REALISASI ANGGARAN (LRA)
PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)
CA
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
LAPORAN ARUS KAS (LAK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Jalan Raden Intan II No. 01 Way Mengaku
Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat 34874
<https://www.lampungbaratkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dengan status telah diperiksa (*Audited*), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

LKPD Tahun 2023 (*Audited*) disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPD dan pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan upaya perbaikan sepanjang tahun 2023, antara lain:

- a. Menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
- b. Melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah sehingga dapat meminimalkan temuan berulang seperti temuan terkait pengelolaan kas, penatausahaan Barang Milik Daerah, serta terkait penganggaran dan pelaksanaan anggaran.
- c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya, agar secara komprehensif dan efektif dapat mengatasi substansi permasalahan, sehingga tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Liwa, 2 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



8

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Lampiran.....	xi
Pernyataan Tanggungjawab.....	xii
Surat Reprsentasi Manajcmcn.....	xiv
Ringkasan Eksekutif.....	xv
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	1
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	2
III. Neraca.....	3
IV. Laporan Operasional.....	5
V. Laporan Arus Kas.....	6
VI. Laporan Perubahan Ekuitas.....	8
VII. Catatan atas Laporan Keuangan.....	9
Bab 1 Pendahuluan.....	9
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	15
1.4. Profil dan Penjelasan Teknis.....	15
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	20
2.1. Ekonomi Makro.....	20
2.2. Ketenagakerjaan.....	39
2.3. Kebijakan Keuangan.....	48
2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	53
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	58
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	58
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	64
Bab 4 Kebijakan Akuntansi.....	65
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	65
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	66
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	68
4.4. Kebijakan Akuntansi.....	69
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	82
5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	82
5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	171
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	174
5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	246
5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	270
5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	278
5.7. Hubungan antar Komponen Laporan Keuangan.....	280
Bab 6 Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.....	292
6.1. Kegiatan yang Tidak Dapat Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2023....	292
6.2. Kegiatan yang Pencapaiannya Masih Dibawah Target.....	293
Bab 7 Penutup.....	300

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB 2	
Tabel 1	Luas Panen Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023..... 21
Tabel 2	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019–2023..... 21
Tabel 3	Perkembangan Luas Lahan Tanaman Perkebunan 2019–2023..... 24
Tabel 4	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023..... 24
Tabel 5	Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023..... 26
Tabel 6	Potensi Lahan dan Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023..... 27
Tabel 7	Data Kewirausahaan dan Kewiraswastaan Tahun 2019 – 2023..... 28
Tabel 8	Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2019 – 2023..... 28
Tabel 9	Daftar Kawasan Ekowisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 32
Tabel 10	Klasifikasi Zona Pembangunan Objek Wisata Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 34
Tabel 11	PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Barat (Rupiah) Periode 2018-2022 37
Tabel 12	PDRB ADHK, ADHB, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung Barat Tahun 2018 – 2022..... 38
Tabel 13	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022..... 38
Tabel 14	Statistik Ketenagakerjaan Lampung Barat Tahun 2018 – 2022..... 41
Tabel 15	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2023..... 45
Tabel 16	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan..... 45
Tabel 17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab Lampung Barat 2020 – 2022 46
Tabel 18	Gini Ratio Kab. Lampung Barat Tahun 2018 – 2023 46
Tabel 19	Tingkat Kemiskinan Kab Lampung Barat 2018 - 2023 46
Tabel 20	Belanja Mandatory Spending Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 47
Tabel 21	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 – 2023..... 50
Tabel 22	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023..... 51
Tabel 23	Alokasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 52
Tabel 24	Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Lampung Barat..... 52
Tabel 25	Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 53
Tabel 26	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 54
Tabel 27	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 55

BAB 3

Tabel 28	Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	62
----------	--	----

BAB 4

Tabel 29	Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan	72
Tabel 30	Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	79
Tabel 31	Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap.....	80
Tabel 32	Klasifikasi Aset Lainnya.....	80

BAB 5

Tabel 33	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022.....	82
Tabel 34	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 dan 2022	83
Tabel 35	Pajak Daerah TA 2023 dan 2022.....	84
Tabel 36	Pajak Hotel TA 2023 dan 2022.....	85
Tabel 37	Pajak Losmen TA 2023 dan 2022.....	85
Tabel 38	Pajak Restoran dan Sejenisnya dan Restoran TA 2023 dan 2022.....	86
Tabel 39	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2023 dan 2022.....	87
Tabel 40	Pajak Warung Makan dan Sejenisnya TA 2023 dan 2022.....	87
Tabel 41	Pajak Pameran TA 2023 dan 2022.....	88
Tabel 42	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap TA 2023 dan 2022.....	89
Tabel 43	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron TA 2023 dan 2022.....	90
Tabel 44	Pajak Reklame Kain TA 2023 dan 2022.....	90
Tabel 45	Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022	95
Tabel 46	Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022.....	96
Tabel 47	Retribusi Pelataran TA 2023 dan 2022.....	98
Tabel 48	Retribusi Los TA 2023 dan 2022.....	98
Tabel 49	Retribusi Kios TA 2023 dan 2022.....	99
Tabel 50	Rincian Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022.....	102
Tabel 51	Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022.....	103
Tabel 52	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2023 dan 2022.....	104
Tabel 53	Retribusi Penyewaan Tanah TA 2023 dan 2022.....	104
Tabel 54	Retribusi Pemakaian Ruang TA 2023 dan 2022.....	104
Tabel 55	Retribusi Pemakaian Alat TA 2023 dan 2022.....	105
Tabel 56	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman TA 2023 dan 2022.....	109
Tabel 57	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan TA 2023 dan 2022.....	110
Tabel 58	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan TA 2023 dan 2022.....	110
Tabel 59	Rincian Retribusi Jasa Usaha Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022.....	111
Tabel 60	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022.....	113
Tabel 61	Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022.....	115
Tabel 62	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022....	115
Tabel 63	Lain – lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022	116
Tabel 64	Rincian Pendapatan Bunga Tahun 2023.....	118
Tabel 65	Pendapatan BLUD TA 2023 dan 2022.....	120

	Halaman
Tabel 66	Lain – lain PAD yang Sah Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022 121
Tabel 67	Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 122
Tabel 68	Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 123
Tabel 69	Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022 123
Tabel 70	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022..... 124
Tabel 71	Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022 124
Tabel 72	Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022 125
Tabel 73	Dana Alokasi Khusus Per Bidang Kegiatan TA 2023 dan 2022..... 125
Tabel 74	Dana Insentif Daerah TA 2023 dan 2022 127
Tabel 75	Dana Desa / Pekon TA 2023 dan 2022 128
Tabel 76	Insentif Fiskal TA 2023 dan 2022..... 128
Tabel 77	Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 129
Tabel 78	Dasar Hukum Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023.... 129
Tabel 79	Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022 130
Tabel 80	Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022 130
Tabel 81	Belanja dan Transfer Daerah TA 2023 dan 2022..... 131
Tabel 82	Belanja Pegawai ASN (PNS dan PPPK) TA 2023 dan 2022..... 132
Tabel 83	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 dan 2022..... 133
Tabel 84	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 dan 2022..... 134
Tabel 85	Belanja Pegawai BLUD TA 2023 dan 2022..... 135
Tabel 86	Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022 135
Tabel 87	Belanja Barang TA 2023 dan 2022 136
Tabel 88	Belanja Jasa TA 2023 dan 2022 139
Tabel 89	Belanja Pemeliharaan TA 2023 dan 2022..... 143
Tabel 90	Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022..... 146
Tabel 91	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain / Masyarakat TA 2023 dan 2022..... 147
Tabel 92	Belanja Barang & Jasa BOS TA 2023 dan 2022..... 147
Tabel 93	Belanja Barang & Jasa BLUD TA 2023 dan 2022..... 148
Tabel 94	Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022..... 148
Tabel 95	Belanja Bunga TA 2023 dan 2022..... 149
Tabel 96	Belanja Subsidi TA 2023 dan 2022..... 150
Tabel 97	Belanja Hibah TA 2023 dan 2022..... 151
Tabel 98	Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022..... 153
Tabel 99	Belanja Modal TA 2023 dan 2022 154
Tabel 100	Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022..... 154
Tabel 101	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022..... 156
Tabel 102	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022..... 160
Tabel 103	Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022..... 161
Tabel 104	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022..... 163
Tabel 105	Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 dan 2022..... 164
Tabel 106	Belanja Modal Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022..... 164
Tabel 107	Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022 166
Tabel 108	Belanja Transfer TA 2023 dan 2022..... 166
Tabel 109	Belanja Bagi Hasil TA 2023 dan 2022..... 167
Tabel 110	Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022..... 167

	Halaman	
Tabel 111	Surplus/ (Defisit) Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022.....	168
Tabel 112	Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	168
Tabel 113	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022.....	168
Tabel 114	Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022.....	169
Tabel 115	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2023 dan 2022.....	169
Tabel 116	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022.....	170
Tabel 117	SiLPA TA 2023 dan 2022	170
Tabel 118	Saldo Anggaran Lebih TA 2023 dan 2022	171
Tabel 119	Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2023 - 2022	172
Tabel 120	Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022	174
Tabel 121	Aset Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	174
Tabel 122	Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 - 2022.....	175
Tabel 123	Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 - 2022.....	176
Tabel 124	Rincian Komposisi Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	176
Tabel 125	Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	177
Tabel 126	Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	177
Tabel 127	Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	178
Tabel 128	Utang PFK pada Puskesmas Per 31 Desember 2023 disetor Tahun 2024	178
Tabel 129	Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	179
Tabel 130	Utang PFK pada Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 disetor pada Tahun 2024.....	179
Tabel 131	Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	179
Tabel 132	Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	180
Tabel 133	Daftar Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	180
Tabel 134	Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	181
Tabel 135	Piutang Retribusi Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022...	181
Tabel 136	Piutang HKPYD Per 31 Desember 2023 dan 2022	181
Tabel 137	Piutang Lain-lain PAD yang sah Per 31 Desember 2023 dan 2022	182
Tabel 138	Rincian Piutang Jasa Layanan pada UPTD Puskesmas Per 31 Des 2023.....	182
Tabel 139	Rincian Piutang Jasa Layanan pada RSUD Per 31 Desember 2023.....	183
Tabel 140	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2023 - 2022.....	183
Tabel 141	Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2023 - 2022.....	184
Tabel 142	Dasar Hukum Pendapatan dan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2023.....	184
Tabel 143	Dasar Hukum Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2023.....	185
Tabel 144	Kategori Kualitas Penyisihan Piutang.....	185
Tabel 145	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	186
Tabel 146	Penyisihan Piutang Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 - 2022.....	186
Tabel 147	Mutasi Penyisihan Piutang Tiap Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	187
Tabel 148	Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023.....	189
Tabel 149	Beban Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	189
Tabel 150	Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	190
Tabel 151	Perbandingan Persediaan tiap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	190
Tabel 152	Rincian Persediaan Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	192
Tabel 153	Rincian Obat Kedaluwarsa	201

v a

	Halaman
Tabel 154	Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 202
Tabel 155	Investasi Non Permanen Dana Bergulir Netto Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 202
Tabel 156	Rincian Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 203
Tabel 157	Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih dan Kas Per 31 Desember 2023..... 203
Tabel 158	Rincian Investasi Non Permanen Netto Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 204
Tabel 159	Investasi Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 205
Tabel 160	Jumlah Penyertaan, Tingkat Pengendalian dan Metode Penilaian Investasi Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 205
Tabel 161	Nilai Penyertaan pada Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2023 dan 2023..... 206
Tabel 162	Posisi Nilai Ekuitas pada Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2023 dan 2023..... 206
Tabel 163	Proporsi Nilai Penyertaan, laba Ditaham, dan Modal Bersih Akhir Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 206
Tabel 164	Penyertaan Modal pada Pesagi Mandiri Perseroda Per 31 Desember 2021 dan 2023 207
Tabel 165	Posisi Nilai Ekuitas pada Pesagi Mandiri Perseroda Per 31 Desember 2021 dan 2023..... 207
Tabel 166	Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Laba serta Modal Akhir Pesagi Mandiri Perseroda Per 31 Desember 2023 207
Tabel 167	Penyertaan Modal pada PT BPRS Lampung Barat Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 208
Tabel 168	Posisi Nilai Ekuitas pada PT BPRS Lampung Barat Per 31 Desember 2021 dan 2023..... 208
Tabel 169	Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Laba serta Modal Akhir PT BPRS Lampung Barat Per 31 Desember 2023.... 208
Tabel 170	Rincian Bukti Saham pada PT Bank Lampung Per 31 Desember 2023..... 209
Tabel 171	Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2023..... 210
Tabel 172	Mutasi Aset Tetap Tahun 2023 210
Tabel 173	Bukti Kepemilikan Aset Tanah Per 31 Desember 2023..... 213
Tabel 174	Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023..... 214
Tabel 175	Aset Tetap – Kendaraan yang Belum Dilengkapi Naskah Hibah dan BAST 215
Tabel 176	Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023.... 217
Tabel 177	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023..... 218
Tabel 178	Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023... 221
Tabel 179	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023..... 221
Tabel 180	Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Des 2023..... 223
Tabel 181	Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023..... 224
Tabel 182	Aset Tetap Lainnya di Peruntukkan Bagi Sekolah Swasta Tahun 2023..... 226
Tabel 183	Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023..... 226
Tabel 184	Mutasi Aset Tetap Berupa Aset Lainnya Tahun 2023..... 227
Tabel 185	Konstruksi Dalam Pengerjaan di Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023... 228

	Halaman
Tabel 186	Mutasi Aset Berupa Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023..... 228
Tabel 187	Rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023..... 229
Tabel 188	Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023..... 229
Tabel 189	Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023..... 230
Tabel 190	Tagihan Jangka Panjang - TGR Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 230
Tabel 191	Aset Lainnya Berupa Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022..... 231
Tabel 192	Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Tahun 2023..... 231
Tabel 193	Rincian Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Per 31 Des 2023..... 232
Tabel 194	Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Lain-lain Tahun 2023..... 233
Tabel 195	Rincian Aset Lainnya Berupa Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022..... 235
Tabel 196	Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 235
Tabel 197	Nilai Perolehan, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2023..... 235
Tabel 198	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Des 2023 dan 2022.. 236
Tabel 199	Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 237
Tabel 200	Utang PFK Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 237
Tabel 201	Rincian Utang PFK per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022..... 238
Tabel 202	Utang Bunga Per 31 Desember 2023 dan 2024..... 238
Tabel 203	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 238
Tabel 204	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 239
Tabel 205	Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 240
Tabel 206	Rekap Utang Belanja Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023..... 242
Tabel 207	Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2023 dan 2022..... 243
Tabel 208	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 244
Tabel 209	Pendapatan LO TA 2023 dan 2022..... 246
Tabel 210	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2023 dan 2022..... 246
Tabel 211	PAD – Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022..... 247
Tabel 212	Rincian PAD – Pajak Daerah – LO Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022..... 247
Tabel 213	Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022..... 248
Tabel 214	Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022..... 248
Tabel 215	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022..... 248
Tabel 216	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022..... 249
Tabel 217	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022..... 249
Tabel 218	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022..... 250
Tabel 219	Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022..... 251
Tabel 220	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022... 251
Tabel 221	Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2023 dan 2022..... 252
Tabel 222	Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022..... 253
Tabel 223	Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022..... 254
Tabel 224	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022..... 254

	Halaman
Tabel 225	Dana Perimbangan – DBH Pajak TA 2023 dan 2022..... 254
Tabel 226	Dana Perimbangan – DBH Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022..... 255
Tabel 227	Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022..... 255
Tabel 228	Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022..... 256
Tabel 229	Dana Alokasi Khusus Per Bidang Kegiatan TA 2023 dan 2022..... 256
Tabel 230	Dana Insentif Daerah (DID) TA 2023 dan 2022..... 257
Tabel 231	Insentif Fiskal TA 2023 dan 2022..... 258
Tabel 232	Dasar Hukum Penetapan Transfer Antar Daerah..... 258
Tabel 233	Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022..... 258
Tabel 234	Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022..... 258
Tabel 235	Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022..... 259
Tabel 236	Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022..... 259
Tabel 237	Beban Operasi TA 2023 dan 2022..... 259
Tabel 238	Beban Pegawai TA 2023 dan 2022..... 260
Tabel 239	Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022..... 261
Tabel 240	Beban Bunga TA 2023 dan 2022..... 262
Tabel 241	Beban Subsidi TA 2023 dan 2022..... 262
Tabel 242	Beban Hibah TA 2023 dan 2022..... 262
Tabel 243	Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022..... 263
Tabel 244	Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022..... 264
Tabel 245	Beban Penyisihan Piutang Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022..... 264
Tabel 246	Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022..... 265
Tabel 247	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022..... 265
Tabel 248	Beban Bagi Hasil TA 2023 dan 2022..... 266
Tabel 249	Beban Transfer TA 2023 dan 2022..... 267
Tabel 250	Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022..... 268
Tabel 251	Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO 2023 dan 2022..... 268
Tabel 252	Rincian Beban Luar Biasa TA 2023 dan 2022..... 269
Tabel 253	Arus Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 270
Tabel 254	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 270
Tabel 255	Arus Masuk Kas dari PAD Tahun 2023 dan 2022..... 271
Tabel 256	Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022..... 272
Tabel 257	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022..... 273
Tabel 258	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 275
Tabel 259	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 275
Tabel 260	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022..... 277
Tabel 261	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023..... 279
Tabel 262	Penjelasan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran..... 282

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 PDRB Perkapita Lampung Barat Tahun 2018 - 2022.....	39
Grafik 2 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018 - 2022.....	39
Grafik 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 - 2022	42
Grafik 4 Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat Desember 2019	43
Grafik 5 Inflasi Kabupaten Lampung Barat Bulan Januari - Desember Tahun 2019.....	42
Grafik 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat 2018 - 2023.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah TA 2023
- Lampiran 2 Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Per Perangkat Daerah TA 2023
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023
- Lampiran 4 Rekap Pembayaran Bunga TA 2023
- Lampiran 5 Rincian Belanja Hibah TA 2023
- Lampiran 6 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023
- Lampiran 7 Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2023
- Lampiran 8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2023
- Lampiran 9 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2023
- Lampiran 10 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa (DD) TA 2023
- Lampiran 11 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa (ADD) TA 2023
- Lampiran 12 Rincian Sisa Kas pada Bendahara BOS Per 31 Desember 2023
- Lampiran 13 Rincian Sisa Kas pada BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2023
- Lampiran 14 Daftar Piutang Per 31 Desember 2023
- Lampiran 15 Rincian Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang Per 31 Desember 2023
- Lampiran 16 Rincian Utang pada PT Sarana Multi Infrastruktur
- Lampiran 17 Daftar Analisis Umur & Penyisihan Dana Per 31 Desember 2023
- Lampiran 18 Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2023
- Lampiran 19 Daftar Tagihan Jangka Panjang – TGR Per 31 Desember 2023
- Lampiran 20 Aging Schedule Piutang Per 31 Desember 2023
- Lampiran 21 Rincian Aset Tetap Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 22 Data Bidang Tanah Berdasarkan Bukti Kepemilikan
- Lampiran 23 Rincian Aset Tetap Tanah Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 24 Mutasi Kurang Penghentian Aset Tanah
- Lampiran 25 Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 26 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin
- Lampiran 27 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 28 Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Ke Aset Peralatan Dan Mesin
- Lampiran 29 Mutasi Kurang Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Ke Aset Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
- Lampiran 30 Mutasi Kurang Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 31 Mutasi Kurang Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Ke Aset Extra Comptable
- Lampiran 32 Mutasi Tambah Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Ke Aset Gedung Dan Bangunan dan Mutasi Tambah Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Ke Aset Gedung dan Bangunan

x 

Lampiran	33	Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Dari Mutasi Skpd
Lampiran	34	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran	35	Mutasi Tambah Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin Ke Aset Jalan, Irigasi, Dan Bangunan
Lampiran	36	Mutasi Tambah Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Ke Aset Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Lampiran	37	Mutasi Tambah Mutasi SKPD Atas Aset Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Lampiran	38	Mutasi Kurang Penghentian Aset Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Lampiran	39	Mutasi Kurang Mutasi SKPD Atas Aset Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Lampiran	40	Rincian Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran	41	Mutasi Tambah Reklasifikasi/Koreksi I Aset Tetap Lainnya
Lampiran	42	Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023
Lampiran	43	Rincian Aset Tak Berwujud Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran	44	Rincian Aset Lain-Lain Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran	45	Mutasi Tambah Penghentian Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023
Lampiran	46	Daftar Penghapusan Aset Lain-Lain Karena Rusak Berat
Lampiran	47	Daftar Penghapusan Aset Lain-Lain Karena Tidak Dipergunakan Dalam Proses Pemerintahan
Lampiran	48	Mutasi Kurang Mutasi OPD Aset Lain-Lain



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Liwa, 2 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN



BUPATI LAMPUNG BARAT

Nomor : 900/ 441 /IV.01/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen.

Liwa, 2 Mei 2024
Kepada Yth.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI
Perwakilan Provinsi Lampung
Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B
Kelurahan Sumur Putri
Kecamatan Teluk Betung Utara
Bandar Lampung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Pemeriksa BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Pemeriksa BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

9. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Jl. Raden Intan II No. 1 Way Mengaku, Liwa 34811 Telp (0728) 21155 Fax. (0728) 21139

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPD ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan PPKD.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp985.836.203.764,84 atau mencapai 99,69% dari anggaran sebesar Rp988.918.708.180,00 dan realisasi belanja daerah dan transfer daerah sebesar Rp984.409.205.393,80 atau mencapai 96,78% dari anggaran sebesar Rp1.017.174.385.750,00 serta realisasi surplus/ (defisit) sebesar Rp1.426.998.371,04 SILPA TA 2023 sebesar Rp30.683.213.321,08 atau mengalami penurunan sebesar (Rp17.491.126.868,96) atau (36,31%) dari SILPA TA 2022 sebesar Rp48.174.340.190,04.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sebesar Rp48.174.340.190,04. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.174.340.190,04.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp30.683.213.321,08. Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp30.683.213.321,08 yang terdiri atas surplus LRA sebesar Rp1.426.998.371,04 ditambah pembiayaan neto sebesar Rp29.256.214.950,04.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang dilakukan sesuai Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.918.150.470.168,48 mengalami peningkatan sebesar Rp75.002.195.485,07 atau mencapai 2,64% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.843.148.274.683,41. Nilai Aset per 31 Desember 2023, terdiri dari Aset Lancar (netto setelah dikurangi penyisihan piutang) sebesar Rp92.436.350.839,98; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp41.330.213.725,66; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.558.944.191.578,45; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp225.439.714.024,39. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan masing-masing sebesar Rp64.280.885.819,15 dan Rp2.853.869.584.349,33.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp936.480.581.676,54, sedangkan jumlah beban dan transfer adalah sebesar Rp872.633.550.490,49, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp63.847.031.186,05. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp13.245.157,00) dan (Rp5.111.576.537,00), sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat mengalami Surplus-LO sebesar Rp58.722.209.492,05.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp118.233.860.915,04 dan Rp133.427.894.587,23 atau mengalami penurunan sebesar (Rp15.194.033.672,19) atau (11,39%).

Arus kas aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi aset non keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp117.806.862.544,00) dan (Rp192.738.721.531,00) mengalami penurunan defisit sebesar Rp74.931.858.987,00 atau (38,88%).

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto berkaitan dengan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp17.918.125.240,00) dan Rp50.525.811.025,00 mengalami penurunan defisit sebesar (Rp68.443.936.265,00) atau (135,46%).

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp43.007.045,34 dan (Rp253.126.991,03) mengalami peningkatan sebesar Rp296.134.036,37 atau (116,99%).

Saldo akhir kas TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp30.858.681.962,23 dan Rp48.306.801.785,85 atau mengalami penurunan sebesar (Rp17.448.119.823,62) atau (36,12%).

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp2.766.774.873.857,60 ditambah Surplus - LO sebesar Rp58.722.209.492,05; kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi - lain-lain sebesar berupa revaluasi aset tetap Rp0,00 dan lainnya Rp28.372.500.999,68 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.853.869.584.349,33 atau mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp87.094.710.491,73 atau 3,15% dari tahun 2022.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	U R A I A N	Catatan	2023 (Audited)			2022 (Audited)
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	99,12	14.390.450.282,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	95,92	2.237.859.702,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	100,00	5.569.077.716,21
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	108,56	48.117.954.932,57
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 s.d. 6)		65.358.127.413,00	68.748.525.754,84	105,19	70.315.342.633,28
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	850.778.668.525,00	855.646.664.112,00	100,57	870.256.487.463,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	84,42	70.985.312.496,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 10)		923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	99,30	941.241.799.959,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
13	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	0,00	0,00	0,00	12.722.026.000,00
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (13)		0,00	0,00	0,00	12.722.026.000,00
15	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 14)		988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	99,69	1.024.279.168.592,28
16	BELANJA DAERAH	5.1.2.				
17	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
18	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	432.656.812.843,00	413.304.423.702,00	95,53	395.256.776.924,00
19	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	254.637.081.677,00	243.673.449.949,80	95,69	293.591.618.382,05
20	Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	4.469.946.021,00
21	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4.	0,00	0,00	0,00	522.500.000,00
22	Belanja Hibah	5.1.2.1.5.	32.601.367.155,00	32.310.714.788,00	99,11	19.513.941.922,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6.	292.000.000,00	244.550.000,00	83,75	1.926.261.500,00
24	Jumlah Belanja Operasi (18 s.d. 23)		723.908.191.300,00	693.088.637.501,80	95,74	715.281.044.749,05
25	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1.	23.927.641.926,00	23.471.410.062,00	98,09	37.544.778.356,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2.	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27	41.842.220.791,00
28	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.3.	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53	107.650.228.900,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4.	5.995.006.510,00	5.836.651.645,00	97,36	3.821.418.300,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.5.	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	702.641.575,00
31	Jumlah Belanja Modal (26 s.d. 30)		118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91	191.561.287.922,00
32	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.				
33	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1.	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	2.417.830.965,00
34	Jumlah Belanja Tidak Terduga (33)		1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	2.417.830.965,00
35	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
36	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	2.183.360.200,00	1.634.829.400,00	74,88	1.475.794.900,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	170.854.037.000,00
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d. 37)		173.353.540.200,00	172.805.009.400,00	99,68	172.329.831.900,00
39	JUMLAH BELANJA DAERAH (24+31+34+38)		1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78	1.081.589.995.536,05
40	SURPLUS / (DEFISIT) (15 - 39)	5.1.3	(28.255.677.570,00)	1.426.998.371,04	(5,05)	(57.310.826.943,77)
41	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4.				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1.	48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	56.959.356.108,81
44	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2.	0,00	0,00	0,00	57.991.820.750,00
45	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (43 s.d. 44)		48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	114.951.176.858,81
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.				
47	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1.	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2.	17.918.662.620,00	17.918.125.240,00	100,00	7.466.009.725,00
49	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (47 s.d. 48)		19.918.662.620,00	18.918.125.240,00	94,98	9.466.009.725,00
50	PEMBIAYAAN NETO (45 - 49)		28.255.677.570,00	29.256.214.950,04	103,54	105.485.167.133,81
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (40 + 50)	5.1.5	0,00	30.683.213.321,08	0,00	48.174.340.190,04

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,


NUKMAN



LAPORAN PERUBAHAN SAL



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	48.174.340.190,04	56.959.356.108,81
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	48.174.340.190,04	56.959.356.108,81
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3.	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
5	Subtotal (3+4)		30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	5.2.5.	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN



NERACA



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	4
1	ASET	5.3.1.		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85
4	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.	55.285.946,00	38.759.446,00
5	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.	41.882.856,00	32.894.406,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4.	0,00	757.985.400,01
7	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5.	2.501.714.574,80	2.514.816.022,48
8	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6.	112.945.547,00	43.393.785,00
9	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7.	58.541.978.212,00	16.889.268.081,00
10	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8.	(13.464.942.016,30)	(3.286.394.628,18)
11	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.9.	13.081.250,00	83.083.328,00
12	Persediaan	5.3.1.1.10.	13.775.722.508,25	10.819.935.104,05
13	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)		92.436.350.839,98	76.200.542.730,21
14	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
15	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	438.454.309,00	422.564.708,85
16	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.	40.891.759.416,66	41.533.306.105,72
17	Jumlah Investasi Jangka Panjang (15 s.d. 16)		41.330.213.725,66	41.955.870.814,57
18	ASET TETAP	5.3.1.3.		
19	Tanah	5.3.1.3.1.	652.395.963.680,00	653.643.184.930,00
20	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	478.161.840.538,69	459.892.185.651,69
21	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	934.369.585.791,34	905.618.832.827,34
22	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4.	2.064.141.579.802,07	1.981.673.833.979,07
23	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	70.217.802.881,39	64.487.079.796,39
24	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	1.787.455.818,00	1.725.150.408,00
25	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(1.642.130.036.933,04)	(1.526.287.811.742,86)
26	Nilai Buku Aset Tetap (19 s.d. 25)		2.558.944.191.578,45	2.540.752.455.849,63
27	DANA CADANGAN	5.3.1.4.		
28	Dana Cadangan	5.3.1.4.1.	0,00	0,00
29	Jumlah Dana Cadangan (28)		0,00	0,00
30	ASET LAINNYA	5.3.1.5.		
31	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1.	3.508.157.928,39	0,00
32	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2.	3.667.996.371,00	3.465.815.871,00
33	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.	217.471.012.300,00	181.002.788.163,00
34	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4.	(2.870.439.575,00)	(2.592.834.344,00)
35	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.5.	3.662.987.000,00	2.363.635.599,00
36	Jumlah Aset Lainnya (31 s.d. 35)		225.439.714.024,39	184.239.405.289,00
37	JUMLAH ASET (13+17+26+29+36)		2.918.150.470.168,48	2.843.148.274.683,41
38	KEWAJIBAN	5.3.2.		
39	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
40	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.	172.538.202,15	129.102.406,81
41	Utang Bunga	5.3.2.1.2.	49.299.557,00	0,00
42	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3.	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00
43	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4.	3.430.680.684,00	2.513.371.173,00
44	Utang Belanja	5.3.2.1.5.	7.983.610.755,00	3.551.848.971,00
45	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6.	383.741.686,00	0,00
46	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40 s.d. 45)		29.937.934.224,15	24.112.385.890,81
47	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.		
48	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.1.	34.342.951.595,00	52.261.014.935,00
49	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (48)		34.342.951.595,00	52.261.014.935,00
50	JUMLAH KEWAJIBAN (46 + 49)		64.280.885.819,15	76.373.400.825,81

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	4
51	EKUITAS	5.3.3.		
52	EKUITAS	5.3.3.1.		
53	Ekuitas	5.3.3.1.1.	2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60
54	JUMLAH EKUITAS (53)		2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60
55	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (50 + 54)		2.918.150.470.168,48	2.843.148.274.683,41

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN



LAPORAN OPERASIONAL



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	4
1	PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1.		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1.		
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.	14.870.851.762,00	14.411.751.310,00
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2.	2.356.222.250,00	2.288.335.782,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3.	4.895.841.920,94	5.379.691.717,82
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4.	48.965.554.967,60	38.248.628.564,05
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO (3 s.d. 6)		71.088.470.900,54	60.328.407.374,37
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2.		
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1.	739.244.658.525,00	758.238.340.039,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2.	103.093.724.029,00	71.771.371.868,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer - LO (9 s.d. 10)		842.338.382.554,00	830.009.711.907,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.3.		
13	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1.	23.053.728.222,00	16.914.529.726,00
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13)		23.053.728.222,00	16.914.529.726,00
15	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO (7+11+14)		936.480.581.676,54	907.252.649.007,37
16	BEBAN DAERAH	5.4.2.		
17	BEBAN OPERASI	5.4.2.1.		
18	Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	414.097.472.312,00	394.475.604.682,00
19	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2.	245.179.858.903,10	288.628.568.302,10
20	Beban Bunga	5.4.2.1.3.	3.604.736.719,00	4.319.006.596,00
21	Beban Subsidi	5.4.2.1.4.	0,00	522.500.000,00
22	Beban Hibah	5.4.2.1.5.	32.310.714.788,00	22.567.856.176,00
23	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6.	244.550.000,00	2.016.261.500,00
24	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7.	10.408.433.265,21	2.944.437.959,00
25	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8.	111.250.768.130,18	149.529.517.264,71
26	Jumlah Beban Operasi (18 s.d. 25)		817.096.534.117,49	865.003.752.479,81
27	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2.		
28	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1.	1.715.995.373,00	1.645.398.027,00
29	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2.	53.821.021.000,00	53.370.540.000,00
30	Jumlah Beban Transfer (28 s.d. 29)		55.537.016.373,00	55.015.938.027,00
31	JUMLAH BEBAN (26 + 30)		872.633.550.490,49	920.019.690.506,81
32	SURPLUS/ (DEFISIT) DARI OPERASI (15-31)		63.847.031.186,05	(12.767.041.499,44)
33	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.		
34	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.1.		
35	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1.1.	160.196.170,00	286.438.221,00
36	Jumlah Surplus Non Operasional - LO (35)		160.196.170,00	286.438.221,00
37	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.2.		
38	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.2.1.	173.441.327,00	824.764.484,00
39	Jumlah Defisit Non Operasional - LO (38)		173.441.327,00	824.764.484,00
40	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (36 - 39)		(13.245.157,00)	(538.326.263,00)
41	SURPLUS/DEFISIT - LO SEBELUM POS LUAR BIASA (32+40)		63.833.786.029,05	(13.305.367.762,44)
42	POS LUAR BIASA	5.4.4.		
43	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.4.4.1.		
44	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1.1.	0,00	0,00
45	Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO (44)		0,00	0,00
46	BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2.		
47	Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1.	5.111.576.537,00	4.545.745.422,00
48	Jumlah Beban Luar Biasa - LO (47)		5.111.576.537,00	4.545.745.422,00
49	JUMLAH POS LUAR BIASA (45 - 48)		(5.111.576.537,00)	(4.545.745.422,00)
50	SURPLUS/DEFISIT-LO (41 + 49)		58.722.209.492,05	(17.851.113.184,44)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN



LAPORAN ARUS KAS



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1.	14.854.325.262,00	14.390.450.282,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2.	2.305.628.800,00	2.237.859.702,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3.	5.653.827.320,95	5.569.077.716,21
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4.	45.734.180.783,89	47.295.388.541,57
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5.	855.646.664.112,00	870.256.487.463,00
8	Penerimaan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6.	61.441.013.898,00	70.985.312.496,00
9	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.7.	0,00	12.722.026.000,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 9)		985.635.640.176,84	1.023.456.602.201,28
11	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
12	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1.	413.304.423.702,00	395.256.776.924,00
13	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2.	243.673.449.949,80	293.591.618.382,05
14	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3.	3.555.499.062,00	4.469.946.021,00
15	Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.4.	0,00	522.500.000,00
16	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.5.	32.310.714.788,00	19.513.941.922,00
17	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.6.	244.550.000,00	1.926.261.500,00
18	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2.7.	1.634.829.400,00	1.475.794.900,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8.	171.170.180.000,00	170.854.037.000,00
20	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.9.	1.508.132.360,00	2.417.830.965,00
21	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 20)		867.401.779.261,80	890.028.707.614,05
22	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (10 - 21)		118.233.860.915,04	133.427.894.587,23
23	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.		
24	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
25	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1.	200.563.588,00	538.773.904,00
26	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.2.	0,00	283.792.487,00
27	Jumlah Arus Masuk Kas (25 s.d. 26)		200.563.588,00	822.566.391,00
28	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
29	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.1.	23.471.410.062,00	37.544.778.356,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.2.	20.128.517.180,00	41.842.220.791,00
31	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.2.3.	67.418.166.745,00	107.650.228.900,00
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.4.	5.836.651.645,00	3.821.418.300,00
33	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.5.	152.680.500,00	702.641.575,00
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6.	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
35	Jumlah Arus Keluar Kas (29 s.d. 34)		118.007.426.132,00	193.561.287.922,00
36	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (27 - 35)		(117.806.862.544,00)	(192.738.721.531,00)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3.		
38	Arus Masuk Kas	5.5.3.1.		
39	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.1	0,00	57.991.820.750,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas (39)		0,00	57.991.820.750,00
41	Arus Keluar Kas	5.5.3.2.		
42	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2.1.	17.918.125.240,00	7.466.009.725,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas (42)		17.918.125.240,00	7.466.009.725,00
44	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (40 - 43)		(17.918.125.240,00)	50.525.811.025,00
45	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
46	Arus Masuk Kas	5.5.4.1.		
47	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1.	52.760.557.226,15	64.168.462.070,48
48	Jumlah Arus Masuk Kas (47)		52.760.557.226,15	64.168.462.070,48
49	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
50	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1.	52.717.121.430,81	64.399.520.985,66
51	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.2.2.	0,00	668.075,85
52	Pengeluaran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja	5.5.4.2.3.	0,00	21.400.000,00
53	Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja tahun 2022	5.5.4.2.4.	428.750,00	0,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas (50 s.d. 53)		52.717.550.180,81	64.421.589.061,51
55	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (48 - 54)		43.007.045,34	(253.126.991,03)
56	Kenaikan/Penurunan Kas (22 + 36 + 44 + 55)		(17.448.119.823,62)	(9.038.142.909,80)
57	Saldo Awal Kas		48.306.801.785,85	57.344.944.695,65
58	Saldo Akhir Kas (56 + 57)	5.5.5.	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85
59	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		25.819.052.572,19	44.640.582.801,71
60	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	61.075,00
61	Saldo Akhir Kas di BLUD		4.597.603.900,41	3.452.121.126,70
62	Saldo Akhir Kas Dana BOS		281.132.047,63	214.036.782,44
63	Saldo Akhir Kas Lainnya		15.842.200,00	0,00
64	Kas Dana BOK Puskesmas		145.051.242,00	0,00
65	Saldo Akhir Kas (59 s.d. 64)		30.858.681.962,23	48.306.801.785,85

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

P. BUPATI LAMPUNG BARAT,

 NUKMAN




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	2.766.774.873.857,60	2.611.345.909.921,04
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2.	58.722.209.492,05	(17.851.113.184,44)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	5.6.4.	0,00	153.491.968.983,00
6	Lain-lain	5.6.5.	28.372.500.999,68	19.788.108.138,00
7	EKUITAS AKHIR		2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN



BAB I PENDAHULUAN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

BAB 1 PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat yang pada hakikatnya merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial ekonomi daerah, dan juga dikaitkan tolak ukur Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal tersebut sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Menyampaikan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD kepada Lembaga Perwakilan berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Barat yang disusun dan disajikan dengan basis akrual dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel serta memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. CaLK ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri atas LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Informasi yang disajikan dalam keenam laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam CaLK.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Kuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendanai seluruh aktivitasnya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmoni Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 422);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 423);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 442);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 3);

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
 - 1.4. Profil dan Penjelasan Teknis
- Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab 4 Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi
 - 4.3. Dasar Pengukuran
 - 4.4. Kebijakan Akuntansi
- Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab 6 Penjelasan atas Informasi-informasi Nonkeuangan
 - 6.1. Kegiatan yang Tidak Dapat Dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023
 - 6.2. Kegiatan yang Pencapaiannya Masih Dibawah Target
 - 6.3. Kegiatan yang Sumber Dananya Non APBD Kabupaten

1.4. PROFIL DAN PENJELASAN TEKNIS

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 16 Agustus 1991 dengan ibu kota Liwa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka menyusun kewenangan dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat, maka telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja;
3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tersebut tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 11 (Sebelas) Bagian;
2. Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 (tiga) Bagian;
3. Inspektorat;
4. Dinas-Dinas Daerah berjumlah 19 (sembilan belas) Dinas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah berjumlah 1 (satu);
6. Badan berjumlah 6 (enam) Badan;
7. Kecamatan berjumlah 15 (lima belas) Kecamatan;
8. Kelurahan berjumlah 5 (lima) Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Dengan akan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dimana untuk penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2023 perlu disusun suatu acuan guna memastikan proses perencanaan tetap berjalan dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Sejalan dengan itu, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 disebutkan bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat pada minggu ke 2 Bulan Maret Tahun 2022.

RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Gambaran Umum, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Kerangka Pendanaan serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, didalam RPD tidak memuat Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dimana RPD merupakan Tujuan dan Sasaran pada level Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke Renstra sebagai tujuan dan Sasaran Kepala Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah secara sinergis pada periode tahun 2023-2026.

Adapun tujuan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyusun perumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu empat tahun;
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahun berupa program, kegiatan dan subkegiatan beserta target dan pagu sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD);
4. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Susunan Organisasi dan Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pj. Bupati : Drs. NUKMAN MS, M.M.
2. Dua Sekretaris
 - 1) Pj. Sekretaris Daerah : Drs. ADI UTAMA
Kabupaten Lampung Barat
Asisten Bidang Pemerintahan dan : Drs. ADI UTAMA
Kesejahteraan
Asisten Bidang Perekonomian dan : WASISNO SEMBIRING, S.E., M.P.
Pembangunan
Asisten Bidang Administrasi Umum : Drs. ISMET INONI, M.M
 - 2) Sekretaris DPRD : PIRWAN, S.E., M.M
3. Satu Inspektur : Ir. SUDARTO M., M.M.
4. Enam Kepala Badan
 - 1) Kepala Badan Perencanaan : AGUSTANTO BASMAR, S.P., M.Si.
Pembangunan Daerah
 - 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan : Ir. OKMAL, M.Si.
Daerah
 - 3) Kepala Badan Kepegawaian dan : Drs. AHMAD HIKAMI
Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan : PAIJO, SKM., M.Kes.
- 5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah : PADANG PRIYO UTOMO, S.H.
- 6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : BURLIANTO EKA PUTRA, S.H
5. Sembilan Belas Kepala Dinas
- 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : BULKI, S.Pd.
- 2) Kepala Dinas Kesehatan : dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B
- 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Ir. ANSARI
- 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : HAIZA RINSA, S.H.
- 5) Kepala Dinas Sosial : JAIMIN, S.I.P.
- 6) Kepala Dinas Ketahanan Pangan : MAIDAR, S.H., M.Si
- 7) Kepala Dinas Lingkungan Hidup : M. HENRY FAISAL, S.H., M.H.
- 8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : RUSPAN ANWAR, S.H.
- 9) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon : Drs. SYAEKHUDDIN, M.M.
- 10) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA : M. DANANG HARISUSENO, S.Ag., M.H.
- 11) Kepala Dinas Perhubungan : Pj. REZA MAHENDRA, SH.,MH
- 12) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika : MUNANDAR, S.Sos
- 13) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan : TRI UMARYANI, S.P., M.Si.
- 14) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja : Drs. DAMAN NASIR, M.P.
- 15) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata : Drs. DAHLIN, M.Pd.
- 16) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : SYAFARUDDIN, S.Pd.,M.Pd.I
- 17) Kepala Dinas Perikanan : KAMALUDIN, S.T.
- 18) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Ir. NATA DJUDIN AMRAN, M.M.
- 19) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan : YUDHA SETIAWAN, S.IP.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar : dr. IMAN HENDARMAN, M.Kes, Sp.A
7. Lima Belas Camat
- 1) Camat Sumber Jaya : AGUS HADI PURNAMA, S.IP
- 2) Camat Way Tenong : NOWO WIBAWONO, M.Pd
- 3) Camat Sekincau : ANDY CHAHYADI, S.H., M.A
- 4) Camat Belalau : MAT SUHYAR, S.IP.
- 5) Camat Batu Brak : Plt. SRI WIYATMI, ST., MP
- 6) Camat Balik Bukit : M. YONES, S.STP., M.H.
- 7) Camat Sukau : Plt. GALIH JOKO PURNOMO, S.E

- 8) Camat Suoh : DAPET JAKSON, S.Sos
 - 9) Camat Gedung Surian : TATI SULASTRI S.Sos .MM
 - 10) Camat Kebun Tebu : ERNAWATI, S.E.
 - 11) Camat Air Hitam : BAMBANG HERMANTO, S.Pdi., M.M.
 - 12) Camat Pagar Dewa : MAT PATONI, S.Sos,M.Si
 - 13) Camat Batu Ketulis : SRI HANDAYANI, S.H.
 - 14) Camat Bandar Negeri Suoh : MANDALA HARTO, S.IP.
 - 15) Camat Lumbok Seminung : ERWIN ARDIANSYA INDRA GUNA. S.Pdi.
8. Lima Kelurahan
- 1) Lurah Way Mengaku : YUSRIN, S.H.
 - 2) Lurah Pasar Liwa : AGUSRIN, S.Pd.
 - 3) Lurah Tugu Sari : AMIR SYAFARUDIN, S.E.
 - 4) Lurah Pajar Bulan : ERNA RISNAWATI, S.E., M.M.
 - 5) Lurah Sekincau : JUARSAH, S.Kom.

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek pengeluaran belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Ekonomi Makro, mengkaji dan mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel yang juga berdampak atas beragam tindakan pemerintah tersebut, antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbesar kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi, dan menggeliatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1. Potensi Unggulan Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas manusia secara berkelanjutan maka dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada era otonomi saat ini menjadikan daerah secara kreatif berupaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan potensi wilayahnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan nilai tambah pada pendapatan daerah. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang terus menerus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka menarik peluang investasi. Potensi unggulan Kabupaten Lampung Barat sangat beragam berupa sumber daya pertanian, perikanan, pariwisata, industri rumah tangga yang sangat mendukung dalam menciptakan dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Beberapa potensi yang bisa dijadikan komoditas unggulan dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2.1.1.1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu pilar utama dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB. Komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, ubi, sayuran, dan kacang-kacangan

Keragaman tanaman, hasil panen produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023

Komoditi	Luas Panen (Ha)				
	Tahun 2019 (Ha)	Tahun 2020 (Ha)	Tahun 2021 (Ha)	Tahun 2022 (Ha)	Tahun 2023 (Ha)
Padi Sawah	30.780	25.799	21.246	17.368	15.634
Padi Ladang	515	930	0	0	0
Jagung	154	180	150	130	215
Kedelai	478	1.063	320	30	2
Kacang Tanah	195	189	200	158	164
Kacang Hijau	10	28	5	0	0
Ubi Kayu	160	165	175	134	128
Ubi Jalar	385	397	392	352	337
Sayuran	3.443	3.641	3.214	3.027	3.006

Sumber : Survey Pertanian (2019-2023)

Tabel 2. Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019-2023

Komoditi	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)								
Padi Sawah	164.968	5,36	134.051	5,20	104.318	4,91	85.644	4,93	78.169	5,00
Padi Ladang	1.514	2,94	2.733	2,94	0	0	0	0	0	0
Jumlah Padi	166.481	5,32	136.784	5,12	104.318	4,91	85.644	4,93	78.169	5,00
Jagung	676	4,39	791	4,39	629	4,19	544	4,19	899	4,19
Kedelai	.750	1,57	1.667	1,57	413	1,29	46	1,52	2,59	1,29
Kacang Tanah	266	1,37	258	1,37	244	1,22	192	1,22	200	1,22
Kacang Hijau	9	0,89	25	0,89	4	0,89	0	0	0	0
Ubi Kayu	3.827	23,92	3.947	23,92	4.169	23,83	3.188	23,83	3.043	23,83
Ubi Jalar	5.244	13,62	5.407	13,62	4.154	10,60	3.730	10,60	3.570	10,60
Sayuran	54.946	0	58.839	0	45.187	0	42.264	0	49.060	0

Sumber : Survey Pertanian (2019-2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan produksi disebabkan oleh :

1. Dasar data baku lahan sawah sebagai modal utama produksi padi mengalami perubahan. Turunnya lahan baku sawah dari 13.443 ha menjadi 10.464 ha. Penurunan baku lahan dikarenakan adanya Verifikasi luas baku lahan yang sebenarnya melalui pemetaan geospacial yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga pengukuran luas lahan mendekati ukuran yang sebenarnya. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2019 luas baku lahan baku sawah di Kabupaten Lampung Barat 10.464 ha;
2. Terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian seperti: kolam, kebun, perumahan dan lain-lain. Sehingga menyebabkan berkurangnya lahan produksi. Hal yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan diantaranya adalah kurang menguntungkan dari segi pendapatan untuk usaha tani budidaya padi;

3. Kenaikan harga sarana produksi (pupuk dan obat-obatan) yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan minimal sarana produksi dalam rangka mendukung budidaya usaha tani.

Produksi komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) berfluktuasi selama periode 2019-2023. Hal ini dikarenakan komoditas palawija bukan merupakan komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani. Budidaya palawija dilakukan untuk melakukan rotasi tanaman khususnya untuk pertanaman sayuran.

Komoditas sayuran mengalami fluktuasi produksi selama periode 2019-2023. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim dan permodalan usaha petani. Komoditas sayuran yang dibudidayakan sebagian petani di Lampung Barat antara lain Kubis, Wortel, Cabe Merah Besar, Cabai Rawit, Tomat, Sawi, Bawang Daun, kentang, dan Labu Siam. Terdapat komoditas yang sedang digalakkan untuk dikembangkan yaitu bawang merah dimana tujuannya adalah memperluas daerah penghasil dan dapat berpengaruh dalam mengendalikan laju inflasi. Sentra utama sayuran di Lampung Barat adalah kecamatan Balik Bukit dan Sukau. Daerah lain yang menjadi sentra ukuran menengah adalah Lumbok Seminung, Sumberjaya, Batu Brak dan Kebun Tebu.

2.1.1.2. Perkebunan dan Peternakan

2.1.1.2.1. Perkebunan

Pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Lampung Barat. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui peningkatan produksi komoditas perkebunan, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis sub sektor perkebunan dan peternakan dimaksud sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat diantaranya Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan dan Sektor Pariwisata. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita masyarakat dimana fokus pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Hal tersebut juga selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;

Pembangunan perkebunan dan peternakan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan pada dasarnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;

Tantangan pembangunan perkebunan dan peternakan Lampung Barat ke depan antara lain bagaimana terus meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas perkebunan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perkebunan, meningkatkan populasi dan nilai tambah ternak, meningkatkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, memperkuat kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternak, dan mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup;

Mayoritas penduduk Lampung Barat pendapatannya tergantung pada sub sektor perkebunan terutama didominasi oleh beberapa komoditas utama antara lain : Kopi, Kakao, Cengkeh, Lada, Aren dan lainnya. Kabupaten Lampung Barat merupakan produsen kopi robusta terbesar di Propinsi Lampung. Berdasarkan Data Statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung

Barat Angka Sementara Tahun 2023 produksi kopi robusta di Lampung Barat mencapai 52.326 Ton dengan luas budidaya kopi mencapai 54.096 Ha, dan produktivitas mencapai 1.046 Kg/Ha/Tahun;

Kemajuan pembangunan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh adanya Kawasan Klaster Kopi di Kecamatan Air Hitam dan Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditi Kopi di Kecamatan Way Tenong yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Perindustrian, pembangunan Agro Tekno Park Kopi Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla) di Kecamatan Sumber Jaya, pembangunan Desa Wisata “Kampoeng Kopi Rigis Jaya” di Kecamatan Air Hitam serta pembangunan Sekolah Kopi di Kecamatan Sumber Jaya;

Kopi Robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dan budidaya Kopi Robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal 11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat;

Produk Kopi Robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama “KOPI ROBUSTA LAMPUNG”. Selain itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu wilayah pengembangan komoditas kopi yang menunjukkan keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian nasional;

Dengan keberadaan komoditas Kopi Robusta yang menjadi unggulan perkebunan Lampung Barat, telah dilakukan upaya pendaftaran klon-klon produktif lokal dan pada Tahun 2019 telah dilepas Varietas Unggul Tanaman Kopi Robusta melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 35-38/KPTS/KB.020/2/2019 Tanggal 1 Februari 2019, yaitu Korolla (Kopi Robusta Liwa Lampung) 1 s.d 4. Pada Tahun 2022 telah terdaftar 2 (dua) Varietas Lokal Unggul yaitu Varietas CIPTO dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor : 1948/PVL/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dan Varietas IMAM GIHAM dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor : 1961/PVL/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Pada Tahun 2023 telah didaftarkan kembali 2 (dua) Varietas Lokal Unggul yaitu Varietas DARMANI dan ROHIBAT, namun Sertifikat Tanda Daftar Varietas Tanaman masih dalam proses di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI;

Budidaya Kopi Robusta di Lampung Barat tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang dilakukan secara turun temurun dengan pola budidaya yang bervariasi. Sebagian besar petani telah menerapkan pola *mix farming* atau pola diversifikasi dengan komoditas lain, tetapi masih terdapat budidaya dengan pola monokultur di sebagian wilayah. Komoditas kopi robusta telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kabupaten Lampung Barat;

Sesuai dengan kondisi agroklimat Kabupaten Lampung Barat, beberapa petani milenial yang tergabung dalam komunitas KOPISTA INDONESIA telah mengembangkan suatu inovasi yaitu pengembangan komoditas Kopi Arabica dengan pola tanam Sistem Pagar yaitu pola tanam dalam barisan dimana jarak tanam dalam barisan 1 meter dan antar barisan 2,5 meter. Populasi tanaman dalam 1 Ha dapat mencapai 4000 batang. Inovasi ini dikembangkan oleh Sdr. Ahmad

Supriyono, S.T bersama komunitas Kopista Indonesia yang dimulai di kebun Sdr. Ahmad Spriyono, Kebas, Kel, Sekincau. Luas Tanaman Menghasilkan (TM) 0,5 Ha dengan produksi Tahun 2023 sebanyak 800 Kg atau produktivitas 3,2 Ton/Ha. Tahun ini diperkirakan produksi dapat mencapai 1.000 Kg atau produktivitas 4 Ton/Ha. Replanting (peremajaan) Kopi Arabica telah dilakukan seluas 2,5 Ha di Kebun milik Sdr. Ahmad Supriyono serta ± 30 Ha pada kebun masyarakat yang tersebar dari Sumber Jaya sampai Lumbok Semining;

Sistem pagar Kopi Arabica ini telah dilakukan demplot oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Kebun Perbibitan milik Provinsi Lampung, Pekon Hanakau. Sistem ini juga telah diujicobakan di kebun Sekolah Kopi dengan kombinasi naungan;

Selain produk unggulan kopi dan aren, terdapat beberapa komoditas perkebunan penunjang perekonomian masyarakat Lampung Barat diantaranya kakao, lada, cengkeh, dan kelapa dalam. Berikut ini disajikan perkembangan luas lahan dan produksi beberapa komoditas perkebunan secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Perkebunan Tahun 2019 – 2023

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*
1	Kopi Robusta	54.100	54.106	54.104	54.104	54.096,1
2	Lada	7.583	7.582	7.469	7.469	7.488,4
3	Kakao	1.420	1.698	1.689	1.689	1.679,8
4	Kayu Manis	690	694	645	645	646,8
5	Kelapa Dalam	511	511	512	512	511,5
6	Cengkeh	896	897	961	961	963,3
7	Aren	399	398	405	405	406,1
8	Kemiri	96	96	97	97	96,3

Ket : * Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Lampung Barat, 2019 – 2023

Tabel 4. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023

NO	KOMODITI	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022*	
		Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)								
1	Kopi Robusta	57.815,2	1.137,1	51.482,5	1.015,8	54.563,2	1.092,7	56.054,4	1.122,5	52.325,8	1.046,1
2	Lada	3.319,7	599,9	3.021,7	534,9	3.061,6	587,6	3.061,6	587,6	2.646,4	541,4
3	Kakao	1.874,7	1.893,1	696,1	882,2	1.093,7	1.200,2	1.093,7	1.200,2	1.094,6	1.201,1
4	Kayu Manis	711,5	1.487,6	784,2	1.632,1	608,3	1.384,7	608,3	1.384,7	602,3	1.376,0
5	Kelapa Dalam	631,4	1.497,9	630,9	1.515,2	459,4	1.013,3	459,4	1.013,3	445,2	980,4
6	Cengkeh	82,4	278,0	72,0	236,7	125,1	333,9	125,1	333,9	126,1	327,8
7	Aren	495,4	1.754,2	297,3	1.385,8	296,9	1.302,3	296,9	1.302,3	295,6	1.301,1
8	Kemiri	145,0	2.101,8	119,4	2.270,7	109,1	1.717,6	109,1	1.717,6	107,0	1.668,8

Ket : *Angka sementara

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Lampung Barat, 2019 – 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi komoditas unggulan Kopi Robusta setiap tahun mengalami fluktuasi dan belum optimalnya produktivitas rata-rata yang dicapai petani kopi di Lampung Barat merupakan sebagian dari permasalahan dalam pengembangan komoditas Kopi Robusta. Secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Fluktuasi produksi kopi;

2. Pemberian pupuk yang belum sesuai (jenis, dosis dan waktu); Pengenalan kondisi tanah (jenis tanah, PH dll) sangat penting dilakukan untuk dapat memberikan pupuk yang sesuai sehingga memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan tanaman kopi.
3. Pemeliharaan kebun yang belum sesuai dengan GAP (*Good Agricultural Practice*);
4. Penurunan kesuburan tanah;
5. Cuaca ekstrim; Lampung Barat mengalami kemarau basah sehingga sampai dengan bulan Januari 2023 ini, pembungaan kopi masih terjadi yang seharusnya sudah selesai pada bulan September-Oktober tahun lalu. Hal ini berakibat pada panjangnya masa panen yang berimplikasi pada :
 - Tingginya serangan PBKo (Penggerek Buah Kopi) karena tidak terputusnya siklus hidup OPT tersebut.
 - Kurangnya tenaga kerja untuk melakukan pemanenan.
6. Rantai kelembagaan bisnis kopi belum terbangun;
7. Tekanan kebutuhan lahan masyarakat baik untuk pemukiman maupun fungsi lain yang mendesak fungsi lahan kebun kopi.

Peningkatan produksi dan produktivitas produk unggulan Kopi Robusta dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terpadu, antara lain:

1. Melaksanakan pendaftaran pada klon-klon lokal produktif sehingga dapat dilepaskan sebagai sumber benih.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan intensifikasi dan peremajaan tanaman kopi antara lain dengan mengganti tanaman kopi yang sudah berumur tua dan tidak produktif serta penanaman pada lahan-lahan baru;
3. Melaksanakan pengendalian OPT secara terpadu;
4. Meningkatkan kemampuan SDM petani melalui pembinaan dan pendampingan secara kontinu; Mengoptimalkan fungsi SEKOLAH KOPI sebagai wadah pendidikan non formal bagi petani, masyarakat dan pelaku usaha kopi;
5. Peningkatan mutu dan nilai tambah melalui pembinaan pasca panen dan pengolahan serta penyaluran bantuan UPH (Pasca Panen dan Panen) baik dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
6. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung.
7. Memaksimalkan kelompok masyarakat, kelompok tani dan NGO lainnya dalam rangka membantu untuk keluar dari permasalahan baik teknis maupun non teknis (keuangan).

2.1.1.2.2. Peternakan

Subkategori peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas peternakan yang diusahakan di Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 jenis ternak yaitu : Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kuda, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Kelinci, Puyuh, Merpati dan Itik Manila.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Lampung Barat tampak pada populasi beberapa jenis ternak seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak
Pada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*
A	Jenis Ternak					
1.	Sapi (ekor)	7.628	8.063	7.505	7.606	6.804
2.	Kerbau (ekor)	400	375	375	380	336
3.	Kambing (ekor)	81.204	81.780	80.611	80.722	71.945
4.	Domba	6.182	6.413	6.453	6.498	4.787
5.	Ayam buras	2.259.230	2.300.900	2.301.003	2.319.673	2.342.864
6.	Itik	61.137	68.626	68.907	69.192	69.530
B	Produksi					
1.	Daging (kg)	3.088.000	3.127.000	3.132.935	3.132.935	3.105.255
2.	Telur (butir)	2.150.225	2.160.000	2.161.535	2.161.535	2.168.300
3.	Susu (liter)	63.000	25.000	10.000	10.000	7.500

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2019 - 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan populasi ternak besar di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung mengalami peningkatan meskipun terdapat fluktuasi. Di Kabupaten Lampung Barat belum terdapat perusahaan *breeding* maupun *feedloter* yang mengelola ternak besar secara intensif dan profesional. Ternak yang ada merupakan ternak masyarakat yang pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pemerintah diikuti dengan upaya pembinaan yang intensif dari petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat serta pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi yang dapat meningkatkan produktivitas ternak. Pada hakikatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional dan pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan yang meningkat secara optimal.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan hewan adalah dengan membentuk Puskesmas. Disamping pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi yang bersifat individual, Puskesmas juga mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Dalam hal ini Puskesmas merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus dilapangan sehingga dapat melakukan deteksi dini, pelaporan dini dan respon dini (*early warning system*). Diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali. Munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda disebagian besar wilayah Indonesia sangat mengancam populasi ternak, namun dengan kerjasama yang terpadu dari semua pihak, sampai saat ini Lampung Barat masih Nol Kasus atau *Zero Case*.

Kasus terbaru adalah munculnya penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang juga menjangkiti ternak disebagian besar wilayah Indonesia. Di Lampung Barat muncul 174 kasus, namun dengan upaya yang serius, penyakit ini dapat disembuhkan dan ditekan penyebarannya melalui pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi secara menyeluruh dan kontinyu baik vaksin LSD maupun PMK yang telah dilakukan sebelumnya.

Dinas Perkebunan dan Peternakan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) dalam pelayanan kesehatan hewan yang berjumlah 6 (enam) Puskesmas untuk melayani 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat dapat datang membawa hewan ternaknya ke Puskesmas pada jam kerja untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Model pelayanan ini kami sebut sebagai **Pelayanan Pasif**.

Disamping Model Pelayanan Pasif, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melaksanakan Model **Pelayanan Aktif** yaitu mendatangi peternak dan pemilik hewan peliharaan dari kandang ke kandang melalui permohonan masyarakat secara berkelompok maupun melalui komunitas-komunitas pecinta hewan ternak.

Guna mencapai tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan, pemerintah terus berupaya memfasilitasi melalui pelaksanaan program pembangunan yang didanai APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Program pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Perda APBD Kabupaten Lampung Barat, dan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

2.1.1.3. Perikanan

Sektor Perikanan Lampung Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan perairan umum serta penangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan. Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum (KJA) dan mina padi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Potensi Lahan dan Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Perairan Umum (ton)	443,60	475,3	586,2	714,9	750,6
Budidaya (ton)	9.337,50	8.850,84	9.935,41	8.940,04	9.349
Jumlah	9.781,10	9.326,14	10.521,61	9.654,94	10.099,6
Potensi Lahan					
- Kolam	2.349,40	2.349,40	2.429,00	2.429,00	2.429,00
- Mina Padi	412,00	412,00	452,00	452,00	452,00
- Perairan Danau Ranau	40,80	40,80	84,00	84,00	84,00
Budidaya Kolam	3.837,00	3.208,70	3.355,98	2.536,17	2.648,54
Potensi Mina Padi	6.306,00	132,60	370,00	1.010,09	1.130,00

Sumber : Dinas Perikanan

Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam pada Tahun 2023 seluas 2.429,00 Ha, sementara Potensi untuk budidaya mina padi Tahun 2023 seluas 452 Ha,. Potensi pengembangan perikanan budidaya di darat didominasi 4 (empat) kecamatan, yaitu Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, dan Batu Brak.

Terjadi kenaikan produksi budidaya sebesar 4,57% atau 408,96 ton dari tahun sebelumnya dikarenakan produksi pembesaran dan pembenihan di tahun 2023 meningkat, selain itu didukung oleh curah hujan yang merata di sub sektor budidaya sehingga tidak terjadi banjir yang biasanya menyebabkan kerugian pada budidaya dikolam.

Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan Umum Danau Ranau yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak di 3 (tiga) pekon yaitu Kagungan, Sukabanjar dan Tawan Sukamulya.

2.1.1.4. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi

dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multi-dimensi yang pernah melanda Indonesia pada pertengahan 1997. Tetapi, kenyataan lain menunjukkan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan asas otonomi dapat membantu mengembangkan UKM, IKM dan UMKM yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

Pengembangan UMKM di Lampung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lampung Barat tahun 2018-2038 yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Dalam RIPIN 2015-2035, Lampung Barat ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Pengembangan sentra IKM.

Tabel 7. Data Kewirausahaan dan Kewiraswastaan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi (unit)	64	160	165	167	167
2	Jumlah Anggota (orang)	5.147	5.637	7.796	7.379	7.415
3	Jumlah UKM	6.919	7.667	8.747	9.736	12.583
4	Jumlah Industri Kecil (IKM)	758	790	823	863	979

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Lampung Barat, 2023

Tabel 8. Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2019 - 2023

No	JENIS USAHA	JUMLAH					TENAGA KERJA				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tempe tahu	84	84	85	86	61	398	396	398	401	298
2.	Gula merah	27	27	27	27	42	118	118	118	118	143
3.	Pengolahan kopi dan Teh	106	121	131	162	217	590	630	692	795	925
4.	Industri Kain Sulaman	4	5	6	10	11	12	15	15	18	19
5.	Anyaman dari Rotan dan Bambu	62	64	63	63	33	190	192	192	192	94
6.	Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	42	34	52	71	135	229	239	287	354	513
7.	Batu bata/keramik	21	21	21	21	19	69	69	69	69	60
8.	Pengolahan ikan	6	6	6	6	22	28	28	28	28	59
9.	Industri Obat Tradisional	0	0	0	11	17	0	0	0	48	59
10.	Furniture dari kayu	66	69	66	66	43	191	191	191	191	137
11.	Ukiran dari kayu bukan mebel	17	17	22	23	23	39	39	39	40	49
12.	Industri Makanan Lainnya	12	13	13	17	23	78	88	88	99	118
13.	Industri minuman	17	18	18	9	9	87	82	82	38	38
14.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	36	36	36	36	15	121	121	121	121	58
15.	Industri baja dan besi	12	13	13	0	0	24	26	26	0	0
16.	Industri dari kedelai bukan tahu/tempe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Industri pengelasan dan mesin	17	18	18	20	21	56	58	58	62	64
18.	Industri peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Industri kimia dan pupuk	2	2	2	2	2	35	35	35	35	35

No	JENIS USAHA	JUMLAH					TENAGA KERJA				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
20.	Industri pencetakan	54	54	54	7	7	172	172	172	32	32
21.	Industri penggilingan padi dan pembersihan biji-bijian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian	0	0	0	18	9	0	0	0	37	20
23.	Industri lainnya	64	75	75	71	63	201	253	276	271	252
24.	Industri logam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Industri pakaian jadi	14	14	14	15	15	37	37	37	38	38
26.	Sale Pisang	24	26	26	27	37	141	238	238	242	264
27.	Industri Produk Roti dan Kue	18	20	21	35	93	139	144	171	224	355
28.	Industri Barang Plastik lainnya	6	6	6	6	6	18	18	18	18	18
29.	Industri Barang Galian										
	Bukan Logam Lainnya	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9
30.	Kerajinan Aयaman plastik	12	12	12	12	13	15	15	15	15	16
31.	Kerajinan Batu-batuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Industri Pemintalan, Pertenunan	0	0	0	2	2	0	0	0	4	4
34.	Kerajinan Pandai Besi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kerajinan Kerajinan Kain	19	19	20	20	24	47	47	48	45	49
36.	Industri Kerajinan YTDL	0	0	0	3	3	0	0	0	4	4
37.	Kerajinan Al Sintan	9	9	9	10	7	37	37	37	47	31
	Jumlah	758	790	823	863	979	3.081	3297	3460	3595	3761

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Lampung Barat, 2023

Pembangunan ekonomi merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan disegala bidang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dinyatakan bahwa industri merupakan salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Sektor industri khususnya industri kecil dan menengah secara nyata telah terbukti memberikan andil yang cukup tinggi bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sub sektor ini terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat yang menduduki peringkat ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, Pembangunan Industri di Kabupaten Lampung Barat penting untuk disusun guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan industri tersebut. Industri kecil dan menengah di Kabupaten Lampung Barat meliputi : industri aneka makanan olahan, industri tekstil termasuk anyaman dan kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, industri hasil kayu olahan dan rotan, industri pembuatan bahan bangunan, industri pertukangan (*meubelair/furniture*), industri pengolahan besi dan baja, industri jasa dan industri lainnya.

Berbagai produk sektor-sektor perekonomian yang dihasilkan di Lampung Barat masih diperdagangkan dalam bentuk produk primer, sehingga nilai tambah produk belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Lampung Barat. Pembangunan sektor industri yang ditujukan untuk memperluas lapangan/kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal, serta mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi meliputi:

- a. Permasalahan disektor industri meliputi rendahnya inovasi teknologi, ketersediaan bahan baku, rendahnya akses permodalan, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing produk;
- b. Sarana dan prasarana perhubungan dan sistem transportasi masih belum memadai untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang cepat;
- c. Permasalahan pada aspek ketenagakerjaan meliputi penyediaan lapangan kerja, rendahnya kompetensi calon tenaga kerja, sarana dan prasarana latihan kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan;
- d. Permasalahan pada aspek investasi perlu mendapat perhatian besar seperti promosi investasi, perbaikan iklim investasi dan penyediaan lahan usaha.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berupaya dengan mengadakan berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia, memberikan permodalan usaha untuk pengembangan permodalan, bantuan alat produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk Industri Kecil Menengah dilakukan juga upaya fasilitasi sertifikasi produk antara lain sertifikasi P-IRT, Sertifikasi Halal, Sertifikasi P3DN, fasilitasi desain kemasan modern dan fasilitasi sertifikasi – sertifikasi lainnya.

Selanjutnya dalam bidang pemasaran, dilakukan upaya fasilitasi penjualan produk IKM seperti pameran skala lokal, temu bisnis dengan pengusaha besar, maupun upaya promosi ke perusahaan retail modern. Upaya – upaya diatas bukan tanpa kendala. Kendala yang paling utama adalah berasal dari internal pelaku usaha IKM, dimana diperlukan usaha untuk merubah pola pikir dan pola kerja menjadi lebih terbuka terhadap perubahan yang sangat dinamis.

2.1.1.5. Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki banyak area alami yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata berbasis lingkungan mulai dari danau, pegunungan, wisata alam, air terjun, dan wisata petualangan. Dikutip dari Buku Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah sebesar 2.116.59 Km² atau sebesar 6,2% dari luas Provinsi Lampung Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu sebesar 267,23 Km². Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu yaitu sebesar 61,55 Km².

Adapun batas wilayah Kabupaten Lampung Barat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Ogan Komerling Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Way Kanan Lampung, Sebelah Timur berbatasan dengan Lampung Utara, Tanggamus. Sebelah selatan berbatasan dengan Pesisir Barat dan Tanggamus, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 310.990 ribu jiwa yang terdiri dari 161.424 laki-laki dan 149.566 perempuan. Ditinjau dari tingkat usianya, penduduk Kabupaten Lampung Barat didominasi terbanyak oleh penduduk yang berusia 0-4 tahun.

Pembangunan pariwisata menjadi salah satu program unggulan di Lampung Barat, dan dituangkan dalam misi ke-3 Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal industri sektor pariwisata, dengan indikator berupa rata-rata lama tinggal, jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan.

Prospek pariwisata di Lampung Barat cukup baik, dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung tahun 2021 tercatat sebanyak 688.790 kunjungan wisatawan nusantara, pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu berjumlah 1.798.166 terdiri dari 1.798.010 wisatawan nusantara dan 156 wisatawan mancanegara. Di tahun 2023, wisatawan nusantara sebanyak 1.390.601 dan wisatawan mancanegara sebanyak 252 orang.

Wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat menurut tingkat kunjungan yang terdata pada destinasi pariwisata yang setiap tahunnya cukup banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu tujuan wisata utama. Potensi-potensi wisata alami di Kabupaten Lampung Barat diantaranya adalah Arung Jeram Way Besai, Air Terjun Cengkaan, Air Terjun Cipta Mulya, Daerah Wisata Pekon Hujung, Gunung Pesagi, Daerah Agrowisata, Lumbok Seminung Resort, Kawasan Air Panas Gemburak, Taman Nasional Bukit Barisan, Danau Vulkanik Suoh, dan destinasi baru yaitu Sunrise Point Limau Kunci, Sunrise Point Petik Bintang dan Bukit Embun serta masih banyak area alami lainnya yang dapat dijadikan daerah tujuan wisata. Selain itu salah satu wisata yang sedang ramai dikunjungi oleh wisatawan adalah Ekowisata Kebun Raya Liwa yang mengusung

tema pengembangan tanaman hias nusantara dan flora sumatera, lokasinya sangat strategis berada di pusat Kota Liwa dan berlatar belakang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dimana untuk koleksi macam-macam tanaman yang sudah ada saat ini mencapai 6297 dengan berbagai jenis tanaman seperti tanaman obat, buah-buahan, anggrek, dan tanaman hias.

Disamping objek wisata alam, Lampung Barat juga memiliki objek wisata budaya dan sejarah, seperti peninggalan zaman prasejarah, situs-situs megalitik, rumah tradisional Lampung, dan berbagai macam budaya khas daerah Lampung. Kabupaten Lampung Barat memiliki ciri adat budaya yang khas mengingat Lampung Barat merupakan asal usul Lampung atau dikenal dengan *The Origin of Lampung*. Hal ini mengindikasikan bahwa wisatawan yang ingin lebih mengenal adat istiadat dan budaya Lampung harus berkunjung ke daerah Lampung Barat karena masyarakat daerah ini masih menjaga tradisi dan menyimpan aset-aset budaya daerah.

Di Lampung Barat terdapat upacara adat yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Lampung Barat. Upacara Adat tersebut dilakukan pada saat pengangkatan raja, pernikahan, menyambut tamu agung, dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan diantaranya adalah Upacara Adat Pernikahan, Alam Gemisikh, Upacara Pengangkatan Raja, dan Nyambai Agung. Sejalan dengan ini, Lampung Barat juga memiliki acara tahunan yang memperkaya ragam budaya yang ada di daerah ini, seperti Gebyar Pesona Lumbok Ranau, Pesta Sekura, Festival Sekala Brak. Oleh karena banyaknya destinasi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya, maka Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang sangat tepat untuk pengembangan industri ekowisata yang dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Salah satu kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort. Resort ini sudah dilengkapi dengan sejumlah sarana dan fasilitas yang cukup memadai diantaranya hotel, convention hall, dan cottage.

Objek wisata lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan pada tahun 2016 telah dilakukan renovasi dan pengembangan adalah objek wisata Rest Area di Sindang Pagar Sumber Jaya yang merupakan suatu objek wisata yang menampilkan panorama keindahan dari puncak bukit, Selain itu objek Wisata Arung Jeram di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya juga merupakan salah satu wisata minat khusus yang ada di Lampung Barat.

Selain dari objek wisata yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Lampung Barat yang dianugerahi panorama keindahan alam memiliki banyak potensi objek wisata yang beragam dan jumlahnya tersebar di beberapa kecamatan. Beberapa objek wisata tersebut telah dikenal luas bahkan sampai ke mancanegara dan menjadi salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Lampung Barat, diantaranya Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Panas Bumi Suoh.

Untuk wisata kuliner kabupaten Lampung Barat juga tidak kalah dalam menjajakan cita rasanya yang khas, dan makanan bisa menjadi salah satu identitas bagi suatu daerah, Kabupaten Lampung Barat diselimuti dengan begitu banyak kuliner tradisional dan kreasi, baik makanan ringan seperti buak tat (kue tat), cucukh bangik, lemag dan masih banyak lagi. Untuk minuman Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki hasil kopi yang unggul dalam segi kualitas dan rasa, ditambah juga dengan adanya kopi luwak yang masih di kelola secara alami dan menjadi salah satu kuliner wajib yang harus dicoba bagi wisatawan. Untuk makanan berat sendiri yang bisa wisatawan cicipi adalah seperti pupput, pekhos masin, sambol pajak, gulai taboh, dan ratusan panganan lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, dimana Danau Ranau telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang meliputi dua provinsi yaitu Lampung Barat (Provinsi Lampung) dan OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan). Sebagian besar wilayah administrasi Lampung Barat merupakan Kawasan Hutan Negara (sekitar 61,5% dari luas

administrasi) sehingga destinasi wisata yang ditawarkan adalah wisata dengan objek keindahan alam atau wisata minat khusus seperti ekowisata, agrowisata dan wisata tirta (danau) serta wisata religi/wisata budaya.

Kabupaten Lampung Barat memiliki 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan yang terdiri dari:

1. Kebun Raya Liwa
2. Kawasan Seminung Lumbok Resort
3. Ekowisata Suoh
4. Kampung Kopi Rigris Jaya
5. Taman Nasional Bukit Barisan Kubu Perahu
6. Puncak Bawang Bakung
7. Arung Jeram Way Besai
8. Pinusan Rest Area
9. Wisata Festival Budaya Paksi Pak Sekala Bekhak.

Tabel 9. Daftar Kawasan Ekowisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO.	OBJEK WISATA	ALAMAT
I.	Kawasan Ekowisata	
1.	Hutan Kemasyarakatan	Pekon Tribudi Sukur, Kec. Kebun Tebu
2.	TNBBS Kubu Perahu	Kecamatan Balik Bukit
3.	TNBBS Suoh	Kecamatan Suoh
4.	Kebun Kopi Sukau	Kecamatan Sukau
5.	Kebun Raya Liwa	Kecamatan Balik Bukit
6.	Sentra Kopi Organik Air Hitam	Kecamatan Air Hitam
7.	Agrowisata Sekincau	Kecamatan Sekincau
8.	Budidaya Benih Ikan (BBI).	Kecamatan Sumber Jaya
9.	TNBBS Sekincau	Kecamatan Sekincau
10.	Taman Wisata Trihita Karana	Pekon Srinanti Kec. Air Hitam
11.	Agro Wisata Alam Segar Sari	Pekon giham suka maju Kec. Sekincau
12.	Bumi Perkemahan Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Kec. Way Tenong
13.	Puncak Gerday Bawang Bakung	Pekon Negeri ratu Kec. Batu Brak
14.	Puncak Temiangan Hill	Pekon Trimulyo Kec. Gedung Surian
15.	Sunrise Point Limau Kunci	Pekon Padang Cahaya Kec. Balik Bukit
II.	Wisata Danau	
1.	Danau Ranau	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
2.	Danau Asam	Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh
3.	Danau Lebar	Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh
4.	Danau Belibis/Minyak	Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh
III.	Wisata Air Terjun	
1.	Air Terjun Sepapah Kiri dan Sepapah Kanan	TNBBS Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit
2.	Air Terjun Kubu Perahu	Kec. Balik Bukit
3.	Air Terjun Way Tutung	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
4.	Air Terjun Way Sepuga	Pekon Sukarame, Kec. Belalau
5.	Air Terjun Way Pahiton	Pekon Sukarame, Kec. Belalau
6.	Air Terjun Way Semaka	Pekon Sukarame, Kec. Belalau
7.	Air Terjun Purawiwitan	Pekon Purawiwitan, Kec. Kebun Tebu
8.	Air Terjun Cengkaan 1	Pekon Way Petai, Kec. Sumber Jaya
9.	Air Terjun Cengkaan 2	Pekon Way Petai, Kec. Sumber Jaya
10.	Air Terjun Padang Tambak	Pekon Padang Tambak, Kec. Way Tenong
11.	Air Terjun Kedung Lesung	Pekon Tugu Ratu, Kec. Suoh
12.	Air Terjun Mekar Sari	Kecamatan Pagar Dewa

NO.	OBJEK WISATA	ALAMAT
13.	Air Terjun Cipta Mulya	Pekon Cipta Mulya, Kec Kebun Tebu
14.	Air Terjun Way Segening	Pekon Turgak, Kec. Belalau
15.	Air Terjun Padae	Pekon Mutar Alam Kec. Way Tenong
IV.	Wisata Sungai	
1.	Sungai Way Semaka	Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suoh
2.	Sungai Way Besai	Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya
V.	Wisata Air Panas	
1.	Gemburak	Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong
2.	Keramikan	Banding Rejo, Kecamatan Suoh
3.	Pemandian Air Panas Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah, Kec. Balik Bukit
4.	Sumber Air Panas Bumi	Dusun Ujung, Pekon Kagungan, Kec. Lumbok Seminung
VI.	Situs Purbakala	
1.	Situs Batu Andak Way Kenihang	Pekon Sukamulya, Kec. Lumbok Seminung
2.	Situs Si Pahit Lidah	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
3.	Situs Batu Lumpang 1	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
4.	Situs Batu Lumpang 2	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
5.	Situs Johor	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
6.	Situs Way Lumbok	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
7.	Situs Pesiwoan	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
8.	Situs Batin Katung	Pekon Sukamaju, Kec. Lumbok Seminung
9.	Situs Hujung Cumalagi	Dusun Hujung, Pekon Kagungan, Kec. Lumbok Seminung
10.	Situs Langkat	Pekon Hujung, Kec. Lumbok Seminung
11.	Makam Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
12.	Batu Ketulis Hujung di Langit Harakuning	Pekon, Hanakau, Kecamatan Sukau
13.	Batu Tulis/Gores	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
14.	Bambu Buntu Telu Tungku Ajaib	Pekon, Tapak Siring, Kec. Sukau
15.	Makam Bergerak	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
16.	Makam Bergerak Suluh	Pekon, Tapak Siring, Kec. Sukau
17.	Situs Tanjung Raya	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
18.	Batu Asah Taji	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
19.	Batu Muli Sri Kembang	Pekon Sugihan Tuha, Kec. Balik Bukit
20.	Makam Panjang Punetap Imbokh	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
21.	Makam H. Baha Udin	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
22.	Makam Raja Betani	Pekon Kembahang, Kec. Batu Brak
23.	Batu Kenyangan	Pekon Balak, Kec. Batu Brak
24.	Keramat Khatu Majengau	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
25.	Keramat Khekhiya Jadi	Pekon Kedamaian, Kec. Belalau
26.	Keramat Cambay Mak Bejunjung	Pekon Kembahang, Kec. Batu Brak
27.	Keramat Melebui	Pekon Tembelang, Kec. Suoh
28.	Batu Sembilan	Pekon Roworejo, Kec. Suoh
29.	Batu Tulis	Pekon Roworejo, Kec. Suoh
30.	Batu Langgar	Pekon Roworejo, Kec. Suoh
31.	Batu Kepangpang	Pekon Kenali, Kec. Belalau
32.	Situs Megalitik Batu Brak	Pekon Purajaya, Kec. Kebun Tebu
33.	Situs Megalitik Batu Jagur	Pekon Purajaya, Kec. Kebun Tebu
34.	Situs Purbakala Dolmen 8 buah	Pekon Bungin, Kec. Gedung Surian
35.	Situs Megalitik Telaga Mukmin	Pekon Puramekar, Kec. Gedung Surian
36.	Telaga Mukmin	Pekon Muara Jaya, Kec. Kebun Tebu
37.	Situs Cipta Mulya	Pekon Cipta Mulya, Kec. Kebun Tebu
38.	Situs Batu Tameng	Pekon Pura Jaya, Kec. Kebun Tebu

NO.	OBJEK WISATA	ALAMAT
39.	Keramat Batu Kebayan	Pekon Batu Kebayan, Kec. Batu Ketulis
40.	Batu Sehektar	Pekon Pehayu Jaya, Kec. Pagar Dewa
41.	Batu Ikhau	Pekon Hujung, Kec. Belalau
42.	Batu Ngiyu	Pekon Serungkuk, Kec. Belalau
43.	Makam Raja Selalau	Pekon Balak, Kec. Batu Berak
VII.	Rumah Adat	
1.	Rumah Adat Paksi Buay Nyerupa	Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau
2.	Rumah Adat Paksi Buay Bejalan Diway	Pekon Kembahang, Kec. Batu Berak
3.	Rumah Adat Paksi Buay Pernong	Pekon Balak Kecamatan Batu Berak
4.	Rumah Adat Paksi Buay Belunguh	Pekon Kenali, Kec. Belalau
5.	Rumah Tradisional Hujung	Pekon Hujung, Kec. Belalau

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dalam Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membagi zona pengembangan pariwisata menjadi empat zona wisata yaitu Zona Objek Wisata Alam, Zona Ekowisata, Zona Objek Wisata Tirta, dan Zona Objek Wisata Budaya Dan Sejarah. Keempat zona tersebut dijelaskan secara rinci tabel berikut ini:

Tabel 10. Klasifikasi Zona Pembangunan Objek Wisata Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Jenis	Objek Wisata
Alam	<ol style="list-style-type: none"> Objek Wisata Komplek Desa Wisata Kawasan Wisata Terpadu Gunung Pesagi Gunung Seminung Sunrise Point Limau Kunci (dibentuk Tahun 2020)
Ekowisata	<ol style="list-style-type: none"> Kebun Raya Liwa (Launching 2018) Sentra Kopi Organik Air Hitam Agrowisata Sekincau Kebun Kopi AEKI Sukau Pinus Sumber Jaya Budidaya Benih Ikan (BBI) Sumber Jaya Kawasan Hutan Kemasyarakatan Kawasan TNBBS Kubu Perahu Kawasan TNBBS Suoh
Tirta	<ol style="list-style-type: none"> Telaga Mukmin Air Terjun Padang Tambak Air Terjun Cengkaan 1, Way Petai Air Terjun Cengkaan 2, Way Petai Air Terjun Padang Tambak Air Terjun Purawiwitan Waduk Gedung Surian Arung Jeram Sumber Jaya Air Panas Gemburak Way Tenong Taman Kota Ham Tebiu Danau Asam Suoh Danau Lebar Suoh Danau Belibis Suoh Danau Minyak Suoh
Budaya	<ol style="list-style-type: none"> Situs Megalitik Batu Jagur Situs Megalitik Telaga Mukmin Tugu Soekarno, Tugu Sari

Jenis	Objek Wisata
	4. Jembatan Panjang Sukapura 5. Lamban Gedung Buay Pernong 6. Lamban Gedung Buay Nyerupa 7. Buay Bejalan di Way 8. Situs Megalitik Batu Brak 9. Salui Pitu 10. Lamban Gedung Buay Belunguh 11. Batu Kebayan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 2023

2.1.2. Pendapatan Regional

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Dalam menghitung pendapatan regional hanya dipakai konsep Domestik, yang berarti seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu wilayah (baik kabupaten maupun provinsi) dihitung dan dimasukkan ke produk wilayah tersebut tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksi tersebut, dengan kata lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan gambaran “*Product Originated*”.

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistic sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistic yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan untuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memertakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan perkataan lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan dalam publikasi ini tahun 2010.

PDRB adalah salah satu indicator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRB yang disajikan secara berkala, wajar dan komprehensif akan dapat diketahui indicator:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi;
- b. Perkembangan pendapatan per kapita;
- c. Tingkat kemakmuran masyarakat;
- d. Tingkat inflasi dan deflasi;
- e. Struktur perekonomian suatu daerah. (*PDRB hal. 1-2*)

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Barat atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 mencapai 8,28 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,80 triliun rupiah dibandingkan 2021 yang mencapai 7,48 triliun rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi inflasi dan semakin membaiknya perekonomian setelah covid-19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan dari 5,05 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 5,26 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 perekonomian Lampung Barat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan hingga 4,10 persen, tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang tertentu dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Lampung Barat didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Admintrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Lampung Barat.

Peranan terbesar dalam pembentuk PDRB Lampung Barat tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 46,23 persen (angka ini menurun dari 49,12 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,50 persen (naik dari 12,23 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Admintrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,23 persen (turun dari 6,53 persen di tahun 2018).

Diantara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung naik. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan. (*PDRB hal.71-72*)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Lampung Barat pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Lampung Barat atas dasar harga konstan 2022, mencapai 5,26 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,05 triliun rupiah pada

tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 2,58 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2022 dicapai oleh kategori jasa lainnya, yang mampu tumbuh hingga 29,88 persen. Hal tersebut disebabkan oleh dicabutnya aturan PPKM sehingga meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Lampung Barat. Kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki pertumbuhan terendah di tahun 2022, yakni sebesar (2,85) persen. Penurunan ini disebabkan menurunnya jumlah produksi air PDAM dikarenakan ada jaringan pipa yang rusak. (*PDRB hal.73*)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat didaerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 11. PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Barat (Rupiah) Periode 2018 - 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion Rupiah)					
- ADHB/at current price	6.590,61	7.095,65	7.131,89	7.482,74	8.281,93
- ADHK/at 2010 Constant price	4.738,86	4.984,13	4.926,30	5.053,32	5.260,71
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million Rupiah)					
- ADHB/at current price	21,92	23,40	23,61	24,72	27,30
- ADHK/at 2010 Constant price	15,76	16,44	16,31	16,69	17,34
- Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4,24	4,32	(0,78)	2,33	3,88
Jumlah Penduduk (orang)/Population(People)	300.703	303.180	302.011	302.749	303.397
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/Population Growth (Percent)	0,81	0,82	(0,39)	0,24	0,21

*) Angka Sementara/*Preliminary Figures*

***) Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Pada tahun 2022, PDRB Per kapita Lampung Barat ADHB mencapai 27,30 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 10,44 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan PDRB Perkapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Pada tahun 2022 pertumbuhan PDRB per kapita secara riil adalah 3,88 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 terjadi percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya indikator PDRB perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. (*PDRB hal.75-76*)

Hal yang sama juga terlihat pada PDRB atas dasar konstan (PDRB riil). Kenaikan PDRB atas dasar konstan mampu menunjukkan adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Lampung Barat. PDRB riil tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dimana sebelumnya 4,73 triliun rupiah menjadi 4,98 triliun rupiah. Tahun 2020 PDRB riil menjadi 4,92 triliun rupiah. Nilai PDRB Lampung Barat atas dasar harga konstan 2021 mencapai 5,05 triliun rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun 2010. Hal

tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,58 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 1,16 persen. Dengan begitu, terjadi kenaikan PDRB atas dasar harga konstan selama 2018-2022 sedangkan pada tahun 2022 PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. PDRB ADHK, ADHB, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung Barat Tahun 2018 – 2022

Tahun	PDRB ADHK (juta rupiah)	PDRB ADHB (juta rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi %
2018	4.738.863,21	6.590.610,92	5,09
2019	4.984.628,87	7.095.404,99	5,18
2020	4.927.787,55	7.137.814,15	1,16
2021	5.053.320,00	7.482.440,00	2,58
2022	5.260.710,00	8.281.930,00	4,10

Sumber : BPS Lampung Barat 2023.

PDRB Lampung Barat perkapita 2022 mencapai 27.300.000 juta rupiah. Perekonomian Lampung Barat didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 4,23%. Secara lengkap bisa dilihat Distribusi persentase PDRB Lampung Barat 2022, PDRB Perkapita Lampung Barat Tahun 2018-2022, menurut data BPS PDRB menurut lapangan usaha 2018-2022 untuk data tahun 2023 akan disajikan di PDRB 2019-2023 pada tahun 2024 dan Laju pertumbuhan PDRB Lampung Barat Tahun 2013-2022 pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 13. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

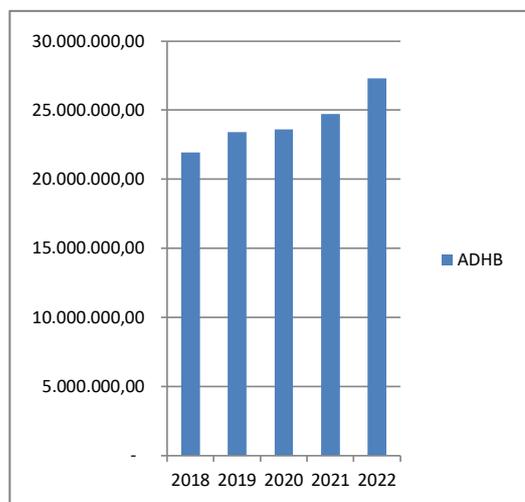
LAPANGAN USAHA / INDUSTRY (%)	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49,97	47,74	48,30	47,19	45,67
Pertambangan dan Penggalian	2,31	2,48	2,38	2,25	2,23
Industri Pengolahan	4,40	5,02	4,83	4,93	4,78
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	4,08	4,34	4,18	4,43	4,52
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,67	13,13	12,40	13,16	14,44
Transportasi dan Pergudangan	2,66	2,76	2,65	2,60	3,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,19	1,14	1,11	1,18
Informasi dan Komunikasi	3,48	3,59	3,93	4,07	4,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,74	1,70	1,77	1,80	1,69
Real Estat	4,80	4,82	4,65	4,60	4,53
Jasa Perusahaan	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,69	5,85	6,10	6,27	5,96
Jasa Pendidikan	4,00	4,12	4,31	4,29	4,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,37	1,52	1,53	1,47
Jasa Lainnya	1,45	1,59	1,53	1,46	1,82

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

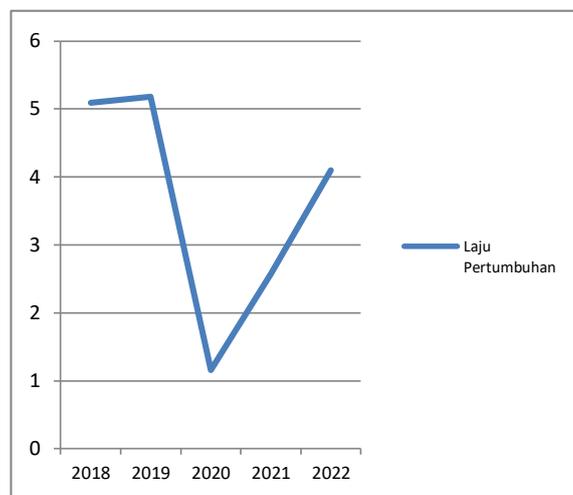
Sumber : BPS Lampung Barat

Grafik 1 PDRB Perkapita Lampung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Lampung Barat

Grafik 2 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Lampung Barat

2.2. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Usaha untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan. Bahkan seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dimungkinkan ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut ditopang oleh sektor sektor usaha yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah. Dudley Seers (1979) dalam BPS (1984) menjelaskan bahwa ada tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan.

Pada hakekatnya, pembangunan yang dilaksanakan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengarah pada suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khususnya di bidang perekonomian, berbagai kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal yang tersedia perlu untuk segera direalisasikan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam proses pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan masalah ketenagakerjaan selalu menengahkan isu-isu tentang pengangguran, kesempatan kerja dan partisipasi angkatan kerja yang tentunya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan memunculkan problematika sosial budaya berupa pengangguran, karena tidak semua tenaga kerja mampu diserap oleh pasar. Meningkatnya angka pengangguran tentu akan berdampak kepada penurunan tingkat kesejahteraan rakyat. Penawaran tenaga kerja sendiri selama ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan penduduk.

Sejalan dengan strategi pembangunan pemerintah pusat yang menitikberatkan pada tiga pendekatan atau triple track strategy yaitu progrowth (pertumbuhan ekonomi), pro-job (kesempatan/lapangan kerja) dan pro-poor (kemiskinan), ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan karena tenaga kerja merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan di daerah. Karena itu, evaluasi tentang sejauh mana pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Barat merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan guna mengetahui hal-hal yang telah dicapai dalam bidang ketenagakerjaan. Data-data dan indikator ketenagakerjaan dalam hal ini juga diperlukan untuk penyusunan perencanaan sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.

Untuk dapat memahami masalah ketenagakerjaan dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci mengenai karakteristik angkatan kerja dan struktur penyerapan tenaga kerja. Ketersediaan data ketenagakerjaan tersebut dapat diperoleh dari beberapa kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Sumber-sumber data ketenagakerjaan tersebut tidak semuanya dapat dibandingkan dalam melihat perkembangan dan perubahan partisipasi angkatan kerja serta penyerapan tenaga kerja. Kenyataan ini disebabkan oleh perbedaan dalam konsep dan definisi, serta ketidakseragaman dalam klasifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian para peneliti dalam menganalisis, menarik kesimpulan tentang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu dan membuat perbandingan antar wilayah. Berbeda dengan indikator komponen demografi lainnya, beberapa konsep pokok ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi, bekerja, pengangguran, sektor, jenis pekerjaan dan status pekerjaan sangat bergantung pada konsep yang dipakai dan penerapannya di lapangan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan ketenagakerjaan lebih dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah dan bukan pada masalah pengangguran terbuka. Rendahnya produktivitas kerja ini berkaitan dengan pendidikan yang rendah dan berakibat pada rendahnya upah yang diterima. Dengan upah yang rendah ini, kesejahteraan akan menjadi rendah atau dengan kata lain, akan timbul masalah kemiskinan.

Pada akhirnya, hubungan penduduk yang bekerja dengan produktivitas rendah, pendidikan rendah, penghasilan rendah, dan kemiskinan akan menjadi sebuah lingkaran setan (viciouscircle). Tenaga kerja yang produktivitas kerjanya rendah dalam ekonomi pembangunan biasa disebut sebagai setengah pengangguran (underemployment).

Menurut Ananta dan Sugiharso (1993), ketersediaan tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia merupakan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk dan transformasi demografi dan bukan akibat adanya pertumbuhan ekonomi. Isu yang menarik adalah window of opportunities yang menyebabkan adanya "Bonus Demografi" yang diramalkan oleh para demografer. Bonus Demografi merupakan fenomena dengan definisi bahwa penduduk di Indonesia mengalami transisi struktur umur dan sebagian besar berada pada kelompok usia produktif (15 – 46). Bila fenomena ini dipersiapkan secara matang maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi tetapi jika tidak dipersiapkan maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai masalah sosial.

Penyediaan data dan indikator ketenagakerjaan didasarkan pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Pendekatan teori ketenagakerjaan dalam Sakernas menggunakan Standard Labour Force Concept yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO). Berdasarkan keputusan Konvensi International Labor Organization (ILO) No.138 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa, batasan minimum umur penduduk yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Dengan demikian, dalam penyusunan indikator ketenagakerjaan ini, digunakan batasan penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ketenagakerjaan yang biasa digunakan dalam evaluasi kebijakan pemerintah

adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur penyerapan tenaga kerja baik berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Berikut ini akan diuraikan masing-masing indikator ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang termasuk angkatan kerja (laborforce) adalah penduduk usia kerja yang bekerja (employed), tidak bekerja, dan mencari pekerjaan (unemployed). Yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja (notinlaborforce) adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, cacat, dan sebagainya).

Pendekatan angkatan kerja memiliki aturan dasar yang harus konsisten. Azas pertama adalah eksklusivitas yang berarti bahwa penduduk usia kerja hanya dapat digolongkan dalam satu kategori dalam komposisi penduduk usia kerja. Seseorang yang dikategorikan bekerja tidak boleh dimasukkan lagi dalam kategori sekolah atau mengurus rumah tangga meskipun dalam kenyataannya orang tersebut melakukan dua aktivitas yang berbeda. Azas kedua adalah prioritas yang berarti bahwa urutan prioritas kategori ditentukan secara pasti, yaitu bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Jika seseorang bekerja tetapi juga sekolah maka orang tersebut digolongkan sebagai penduduk bekerja. Demikian juga, bila seseorang mengurus rumah tangga tetapi juga bekerja maka orang tersebut dikategorikan sebagai bekerja meskipun sebagian besar waktu yang dimiliki digunakan untuk mengurus rumah tangga atau sekolah. Azas ketiga adalah rujukan waktu dan BPS menggunakan konsep seminggu terakhir sebagai rujukan waktu survei. Secara lengkap bisa dilihat Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 - 2022 pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Statistik Ketenagakerjaan Lampung Barat Tahun 2018 – 2022

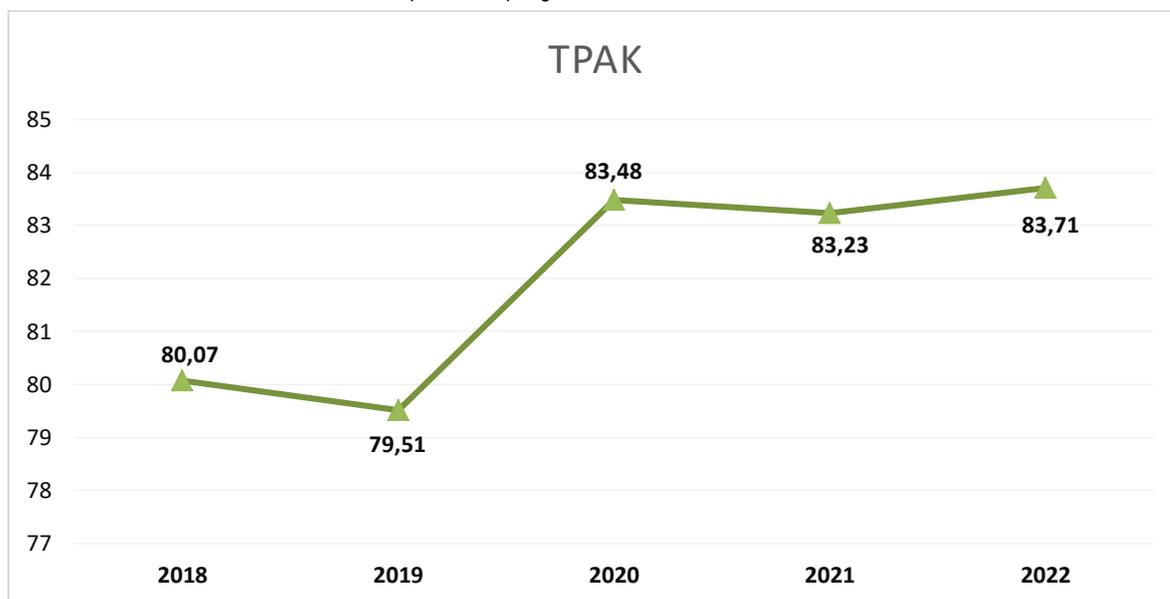
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	80,07	79,51	83,48	83,23	83,71
Tingkat Pengangguran (%)	2,74	1,66	2,13	2,83	2,1
Bekerja (%)	97,26	98,34	97,87	97,17	97,90

Sumber : BPS Lampung Barat, Sakernas 2021

Jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2018-2022, diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat terus meningkat.

Di Kabupaten Lampung Barat, persentase penduduk angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 0,99% ditahun 2019 menjadi 79,51 persen dari sebelumnya yang berjumlah 80,07% sedangkan ditahun 2022 angkatan kerja mengalami kenaikan menjadi 83,71 dari sebelumnya yang berjumlah 83,23 persen atau kenaikan sebesar 1,00%. Kenaikan persentase angkatan kerja ini diikuti dengan kenaikan penduduk yang bekerja dan penurunan penduduk yang menganggur. Jumlah persentase penduduk yang bekerja naik sebesar 1,01% sedangkan penduduk yang menganggur menurun sebesar 0,74%.

Grafik 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Lampung Barat, LBDA 2023

Jika dilihat dari grafik diatas maka tingkat partisipasi angkatan kerja selama kurun waktu tahun 2018-2022. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti dkk. (1995) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jenis kelamin. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin ini disebabkan karena laki-laki lebih memiliki tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi (baik bekerja maupun mencari kerja) sedangkan perempuan cenderung mengurus rumah tangga.

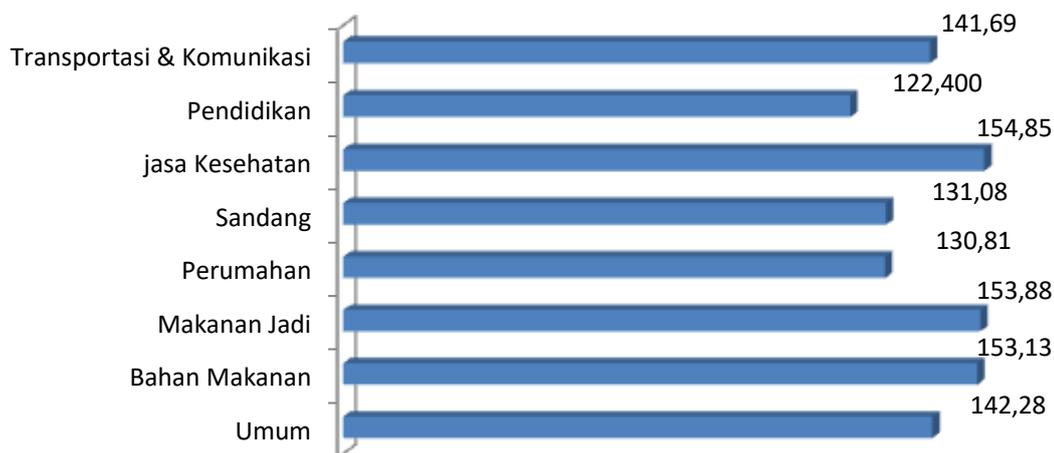
2.2.1. Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen (*Consumer Price Index*) adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (household). Indeks harga barang dan jasa di kota Liwa selama tahun 2019 secara umum terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Indeks harga konsumen pada bulan Januari 2019 sebesar 133,71% dan pada bulan Desember 2019 sebesar 142,28%. Dengan kata lain, selama tahun 2019, terjadi kenaikan harga secara umum 3,53 persen.

Perkembangan Indeks harga konsumen selama tahun 2019 yang mempunyai nilai indeks yang tertinggi adalah pada juli 2019 sebesar 157,75%. Sementara itu, nilai indeks harga yang paling kecil adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada bulan Mei-Juni 2019 sebesar 121,10%. Perkembangan indeks harga konsumen ini selama tahun kalender 2019 secara umum disebabkan antara lain berkaitan dengan harga komoditas, beras, cabai merah, dan cabai rawit yang berfluktuasi sepanjang tahun akibat pengaruh persediaan dan permintaan di pasar serta pengaruh musiman cuaca serta momen lebaran dan tahun baru. Perubahan harga secara umum selama tahun 2019 menunjukkan terjadinya sembilan bulan mengalami inflasi dan tiga bulan mengalami deflasi. Nilai inflasi yang tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 0,81% dan deflasi yang tertinggi terjadi pada bulan Februari 2019 sebesar 0,33%. Inflasi yang terjadi banyak dipengaruhi oleh naiknya harga kelompok bahan makanan: subkelompok sayur-sayuran; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; subkelompok tembakau dan minuman beralkohol; kelompok sandang anak-anak; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga: subkelompok kursus-kursus/pelatihan. Hal ini dikarenakan bersamaan dengan datangnya bulan ramadhan, tahun baru, musim kemarau yang terjadi sepanjang tahun serta kenaikan biaya kursus

pendidikan. Sedangkan deflasi yang terjadi banyak disebabkan oleh turunnya harga subkelompok bumbu-bumbuan hal ini dikarenakan adanya pemerintah yang cukup berfokus untuk menjaga harga-harga komoditas-komoditas strategis. Secara lengkap bisa dilihat Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kabupaten Lampung Barat Januari – Desember Tahun 2019 pada Grafik berikut ini.

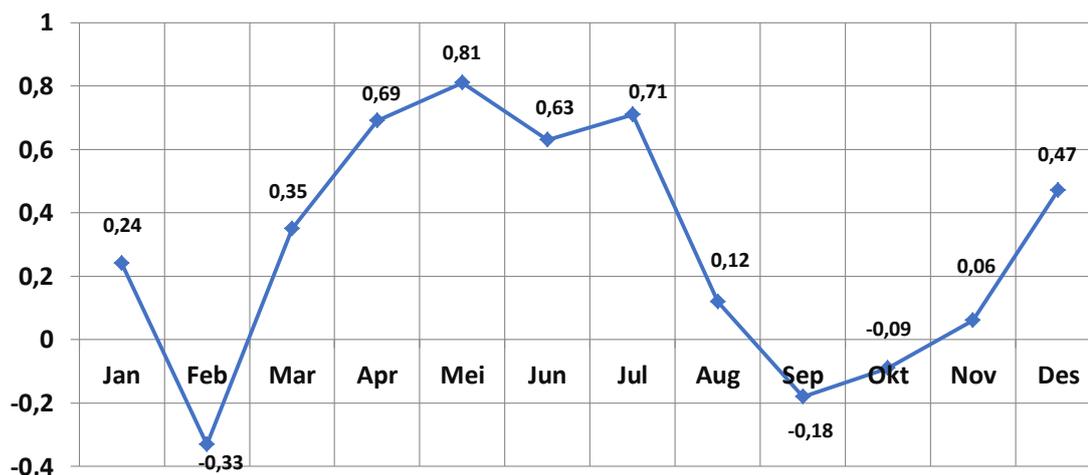
Grafik 4 Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat Desember 2019



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat, IHK 2019

Sakernas BPS sejak tahun 2020 sudah tidak mencetak buku IHK, inflasi sehingga data grafik tidak ada perubahan dari tahun tahun sebelumnya.

Grafik 5 Inflasi Kabupaten Lampung Barat Bulan Januari-Desember Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat, IHK 2019

2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia dapat dinilai dengan

suatu indikator yaitu IPM. IPM atau HDI adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak dapat mengukur semua dimensi pembangunan manusia, IPM dinilai mampu untuk dapat mengukur dimensi pokok pembangunan manusia.

Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah $25 < x > 85$ (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Harapan Lama Sekolah adalah sebagai lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Grafik 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat 2018 - 2023



Sumber: BPS Lampung Barat, IPM 2023

Berdasarkan data, IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Berdasarkan kategori tersebut, IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 yang mencapai angka 69,11 masih termasuk dalam kategori sedang.

Dengan demikian, masih banyak keteringgalan yang harus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat demi kemajuan wilayah dan penduduknya di masa yang akan datang.

Pencapaian IPM Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebesar 69,11 sudah diatas target di RPD untuk tahun 2023 yaitu sebesar 68,95. Namun pencapaian IPM Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung.

Pencapaian IPM Provinsi Lampung pada tahun 2023 adalah sebesar 71,15. Kemudian Jika dibandingkan antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, posisi Kabupaten Lampung Barat berada pada urutan 9 dari 15 kabupaten/kota yang ada. Peringkat ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu upaya percepatan peningkatan pencapaian IPM dari tahun ke tahun guna mengejar target capaian IPM dalam RPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 yang ditargetkan mencapai 68,95 pada tahun 2023.

Tabel 15. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020)	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lampung Barat	66,74	67,50	67,80	67,90	68,39	69,11

Sumber : BPS Lampung Barat, IPM 2023

IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 berdasarkan sensus penduduk 2020 mencapai angka 69,11 poin naik 0,72 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 68,39 poin.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia sekaligus sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Kondisi perumahan di suatu daerah dapat menggambarkan kesejahteraan penduduknya. Salah satu kualitas yang dapat menggambarkan kondisi perumahan adalah kualitas material seperti jenis atap, jenis lantai, dan dinding yang digunakan termasuk fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan.

Tabel 16. Rumah Tangga Menurut beberapa Indikator Kualitas Perumahan

INDIKATOR PERUMAHAN	TAHUN		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah(%)	85,07	85,57	87,05
Atap Beton,Genteng, Sirap, Seng,dan Asbes (%)	100,00	100,00	100,00
Dinding Terluas Tembok dan Kayu (%)	95,04	88,82	91,53

Sumber : BPS Lampung Barat, IPM 2018.

Salah satu indikator kualitas perumahan adalah luas lantai rumah tangga yang bukan tanah. Berdasarkan susenas 2018, persentase rumah tangga yang berlantai bukan tanah adalah 87,05%, angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan adalah jenis atap yang digunakan. Jenis atap yang biasanya dianggap cukup baik adalah jenis beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Berdasarkan susenas 2018, persentase rumah tangga yang menggunakan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes sudah mencapai 100,00%. Jadi semua rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat sudah menggunakan atap yang cukup baik. Selain itu, kualitas perumahan juga dapat dilihat dari jenis dinding yang digunakan. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang sudah menggunakan dinding tembok dan kayu mencapai 91,53%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (88,82). Sakernas BPS sejak tahun 2020 sudah tidak mencetak buku Indikator Perumahan sehingga tabel tidak ada perubahan dari tahun tahun sebelumnya.

2.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Berikut disajikan tabel Tingkat Pengangguran Terbuka periode 2020 s.d. 2022

Tabel 17. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Lampung Barat Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	Tahun (%)		
		2020	2021	2022
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,13	2,83	2,10

Sumber : BPS Lampung Barat, Lampiran 8 TPT.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,10 persen yang artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat 2 hingga 3 orang yang menganggur.

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, semakin tinggi nilai rasio Gini, maka semakin tinggi ketimpangan . Berikut disajikan tabel Indeks Gini.

Tabel 18. Gini Ratio Kab. Lampung Barat Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Gini Ratio	0,314	0,296	0,295	0,281	0,284	0,274

Sumber : BPS Lampung, 2023

Indeks gini Lampung Barat pada Tahun 2023 sebesar 0,274 poin menurun sebesar 0,010 poin dari tahun 2022 sebesar 0,284 yang berarti ketimpangan ini semakin menurun.

2.2.5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah standar hidup minimum yang mencukupi di suatu Negara/ daerah. Berikut disajikan tabel

Tabel 19. Tingkat Kemiskinan Kab. Lampung Barat Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin	40,62	39,05	38,12	39,36	36,2	34,73
2.	Garis Kemiskinan Kapita Perbulan (Rp/Kap/Bulan)	391.444	400.662	443.313	457.478	495.283	530.803
3.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.36	0.38	0.55	0.80	0.45	0.80
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.84	1.86	2.00	2.69	1.89	2.34
5.	Persentase Penduduk Miskin	13,54	12,92	12,51	12,82	11,71	11,17

Sumber : BPS, Tahun 2023

Salah satu indikator yang penting adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 11,17% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 34.700 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 11,71% setara dengan 36.200 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,54%.

2.2.6. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, dengan beberapa ketentuan :

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) dan Permendagri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut rincian capaian realisasi mandatory spending pada Tahun Anggaran 2023

Tabel 20. Belanja Mandatory Spending
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Bidang Pendidikan (20%)			
	Belanja Dinas Pendidikan	298.026.962.078,00	290.457.568.233,00	97,46
	Belanja Dinas Perpustakaan	2.901.157.535,00	2.802.592.573,00	96,60
	Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga	11.311.388.890,00	10.921.144.033,00	96,55
	Jumlah (a)	312.239.508.503,00	304.181.304.839,00	97,42
	Basis Total Belanja Daerah (b)	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78
	% Mandatory Spending (a/b)	30,70	30,90	
2.	Belanja Bidang Kesehatan (10%)			
	a. Total Belanja Daerah	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78
	b. Gaji Pokok ASN	226.084.329.668,00	215.891.248.520,00	95,49
	c. Total Belanja Daerah Dikurangi Gapok ASN (a-b)	791.090.056.082,00	768.517.956.873,80	97,15
	d. Belanja Dinkes + RSUD AU	151.553.511.733,00	145.102.325.516,80	95,74
	% Mandatory Spending (d/c)	19,16	18,88	
3.	Belanja Pengawasan (0,75%), Anggaran Belanja >1 Triliun			
	Belanja pada PD Inspektorat (a)	9.235.390.152,00	8.988.785.887,00	97,33
	Total Belanja Daerah (b)	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78
	% Mandatory Spending (a/b)	0,91	0,91	
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemdes (10%)			
	a. Pendapatan Pajak Daerah	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	99,12
	b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kpd Pemdes	1.846.691.600,00	1.407.134.300,00	76,20
	% Mandatory Spending (b/a)	12,32	9,47	
5.	Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemdes (10%)			
	a. Pendapatan Retribusi Daerah	2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	95,92
	b. Belanja Bg Hasil Retribusi Daerah kpd Pemdes	336.668.600,00	227.695.100,00	67,63
	% Mandatory Spending (b/a)	14,01	9,88	

NO	KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.	Alokasi Dana Desa (10%)			
	Dana Perimbangan	727.115.074.525,00	731.983.070.112,00	100,67
	Dana Alokasi Khusus	(198.015.463.000,00)	(193.772.862.824,00)	97,86
	Basis Dana Perimbangan yang diperhitungkan (a)	529.099.611.525,00	538.210.207.288,00	101,72
	Realisasi Alokasi Dana Desa (b)	53.399.700.000,00	53.399.700.000,00	100,00
	% Mandatory Spending (b/a)	10,09	9,92	
7.	Belanja Infrastruktur Daerah (40%)			
	A. Total Belanja Daerah	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78
	B. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	2.183.360.200,00	1.634.829.400,00	74,88
	b. bantuan keuangan	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00
	Jumlah (a+b)	173.353.540.200,00	172.805.009.400,00	99,68
	C. Selisih (1-2)	843.820.845.550,00	811.604.195.993,80	96,18
	Minimal belanja infrastruktur 40% x Selisih	337.528.338.220,00	324.641.678.397,52	96,18
	D. Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	328.978.480.260,00	327.146.894.530,00	99,44
	% = D/C	38,99	40,31	

Sumber : APBD P Lambar, Tahun 2023

- Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibayarkan ke Pemerintahan Desa sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk tahun 2023 realisasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Triwulan III Tahun 2023, sedangkan untuk DBH pajak daerah dan retribusi daerah TW IV akan dibayarkan sebagai kurang bayar tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024.
- Realisasi Bagi Hasil Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibayarkan ke Pemerintahan Desa sesuai dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus, untuk tahun 2023 realisasi sebesar 9,92% dari penyaluran minimal 10,00%, sedangkan untuk kekurangannya akan dibayarkan sebagai kurang bayar tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024, hal ini dikarenakan realisasi bagi hasil alokasi dana desa (ADD) tidak dapat melebihi dari pagu anggaran yang disediakan.

2.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan dan Belanja secara umum sebagai berikut.

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan menghindari penetapan peraturan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat Lampung Barat merasakan keadilan dan manfaat atas pengenaan pajak dan retribusi daerah.

Namun demi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu mengambil kebijakan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, baik berupa intensifikasi PAD dan/atau ekstensifikasi PAD.

a. Intensifikasi PAD

Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi PAD adalah upaya meningkatkan PAD dengan cara mengintensifkan jenis-jenis pungutan yang sudah ada sehingga didapat hasil yang lebih optimal dari sebelumnya. Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menaikkan tarif, memperbaiki sistem pemungutan, penguatan perpajakan daerah, peningkatan efektivitas pengawasan pungutan daerah, dan penyempurnaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Upaya riil yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hingga kini antara lain: membentuk kelembagaan dalam rangka peningkatan PAD, melakukan revisi beberapa Peraturan Daerah, dan melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengelolaan keuangan.

Dalam mengelola pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengundang peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan, baik pajak daerah maupun retribusi daerah pada tahun 2011 mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB.

Sedangkan dari sisi Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah pula memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sesuai amanat Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peningkatan yang ada memang belum memuaskan dari segi kuantitas, namun paling tidak upaya Pemda untuk meningkatkan pendapatan terus berlangsung. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data pajak daerah dan PBB, pembentukan Tim Intensifikasi PAD dan PBB, Tim Terpadu Perizinan, dan Tim Penagih PAD, melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi PAD dan PBB secara berkala dan perbaikan tata Kelola pemungutan pajak daerah.

Selain melaksanakan penagihan langsung, Pemda juga berupaya untuk meningkatkan PAD dengan perubahan struktur tarif pajak dan retribusi daerah. Hal ini telah dilakukan dengan melakukan upaya Revisi Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang telah disahkan pada akhir Tahun 2020. Untuk memperbaiki tatakelola pemungutan pajak, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya penyetoran pajak langsung oleh wajib pajak ke Bank Persepsi tanpa melalui Bendahara Penerimaan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menjalin Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat juga dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat, untuk mensyaratkan penyelesaian kewajiban perpajakan daerah bagi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan di kedua Instansi tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD TA 2023 menganggarkan penerimaan dari PAD sebesar Rp65.358.127.413,00 dan terealisasi sebesar Rp68.748.525.754,84 atau pencapaian 105,19%.

Secara keseluruhan, perbandingan PAD untuk tahun anggaran 2023 terhadap anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut: target PAD TA 2023 adalah sebesar Rp65.358.127.413,00 target PAD TA. 2022 adalah sebesar Rp74.228.154.471,00 dan penurunan target PAD adalah (Rp8.870.027.058,00) atau (11,95%).

b. Ekstensifikasi PAD

Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi PAD, yaitu suatu cara peningkatan PAD dengan menggali dan mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial dan belum dimanfaatkan namun tidak bertentangan dengan hukum. Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan.

Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bersifat closed list, artinya pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi PAD hanya mungkin dilaksanakan dengan upaya penanaman modal (investasi), pembentukan dan/atau peningkatan kapasitas produksi usaha daerah (dapat dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah), atau pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan.

c. Target dan Realisasi Pendapatan

Secara sederhana perbandingan target dan realisasi PAD ditampilkan dalam jutaan rupiah berikut ini.

Tabel 21. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 – 2023

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN DAERAH			PAD		
		Target (Rpjuta)	Realisasi (Rpjuta)	Realisasi (%)	Target (Rpjuta)	Realisasi (Rpjuta)	Realisasi (%)
1.	2013	853.495,37	854.217,65	100,08	29.390,62	33.829,81	115,10
2.	2014	627.235,48	634.237,10	101,12	37.390,48	40.800,35	109,12
3.	2015	873.853,51	895.544,66	102,48	41.023,96	46.434,65	113,19
4.	2016	1.083.459,00	1.020.799,72	94,22	47.565,00	49.078,91	103,18
5.	2017	1.094.492,57	1.069.132,04	97,68	82.742,62	46.789,23	56,55
6.	2018	1.143.216,49	1.124.189,35	98,34	50.056,05	50.471,54	100,83
7.	2019	1.135.122,89	1.122.307,63	98,87	64.189,79	65.267,42	101,68
8.	2020	1.020.583,35	1.011.011,75	99,06	65.771,30	61.219,46	93,08
9.	2021	1.023.153,91	1.007.143,61	98,44	67.978,32	71.498,89	105,18
10.	2022	1.035.258,10	1.024.279,16	98,94	74.228,15	70.315,34	94,73
11.	2023	988.918,70	985.836,20	99,69	65.358,12	68.748,52	105,19

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2023 hampir seluruh penerimaan yang ditargetkan dapat terpenuhi bahkan melebihi target penerimaan, tetapi pada TA 2017 PAD hanya tercapai 56,55% hal ini disebabkan karena penerimaan dana BOS semula dianggarkan dalam lain-lain PAD yang Sah sementara realisasinya masuk ke dalam Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sedangkan pada TA 2020 PAD hanya tercapai 93,08% hal ini disebabkan adanya penerimaan retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pasar grosir dan pertokoan yang realisasinya jauh dari target yang telah ditetapkan. Retribusi pelayanan Kesehatan tidak mencapai target yang ditetapkan karena sejak Bulan April 2020 sampai Oktober 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menghentikan pungutan retribusi pelayanan Kesehatan dalam rangka membantu masyarakat menghadapi dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar dan retribusi dan volume hari-hari pasaran karena dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Memperhatikan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat hampir selalu tercapai bahkan pada TA 2013 s.d. 2015 melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahun, sedangkan pada TA 2016 s.d. 2023 masih dibawah target.

Secara detail Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 22. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	PAD			
1.	Pajak Daerah	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	99,12
2.	Retribusi Daerah	2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	95,92
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	100,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	108,56
	Jumlah	65.358.127.413,00	68.748.525.754,84	105,19
B.	PENDAPATAN TRANSFER			
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	733.008.188.525,00	737.876.184.112,00	100,66
2.	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
3.	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	100,00
4.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	84,42
	Jumlah	923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	99,30
C.	LAIN-LAIN PEND. YANG SAH			
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	99,69

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan kontribusi antar unsur pendapatan dalam struktur APBD. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lampung Barat masih sangat rendah sekitar 4-6%;
2. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam melakukan kewajiban perpajakannya; dan
3. Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi pegawai perlu di tingkatkan.

Dalam struktur APBD bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana perimbangan merupakan unsur yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2013 hingga tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan melakukan upaya agar terjadi keseimbangan antara PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Lampung Barat. Upaya tersebut telah dilaksanakan dengan penetapan peraturan daerah tentang perpajakan daerah termasuk melakukan perubahan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melaksanakan upaya sosialisasi atas pemberlakuan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, baik melalui media luar ruang maupun sosialisasi secara langsung secara formal dan non formal.

Upaya pendataan potensi PAD juga tetap dilaksanakan secara berkala agar dapat diketahui secara pasti berapa sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat. Dengan diketahuinya potensi PAD yang belum tergal ini diharapkan PAD dapat ditingkatkan sehingga pada akhirnya kontribusi PAD terhadap APBD dapat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditingkatkan untuk memenuhi pelayanan dasar publik serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk, antara lain peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial, fasilitas yang layak, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Mengacu pada peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dasar, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

Pada Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Lampung Barat menganggarkan kegiatan pembangunan melalui alokasi belanja daerah sebesar Rp1.017.174.385.750,00 yang terdiri dari belanja operasi Rp723.908.191.300,00 belanja modal Rp118.299.512.355,00 belanja tidak terduga Rp1.613.141.895,00 dan belanja transfer bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan sebesar Rp173.353.540.200,00. Alokasi belanja tersebut digunakan untuk biaya pembangunan daerah yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan dan infokom, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, koperasi dan usaha kecil menengah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, urusan umum dan administrasi keuangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, dan perikanan dan kelautan.

Alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Alokasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1	Pendapatan	988.918.708.180,00
2	Belanja dan Transfer	1.017.174.385.750,00
3	Pembiayaan a. Penerimaan Rp48.174.340.190,00 b. Pengeluaran (Rp19.918.662.620,00)	28.255.677.570,00
Total Penerimaan Daerah (1 + 3a)		1.037.093.048.370,00
Total Pengeluaran Daerah (2 + 3b)		1.037.093.048.370,00

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan target dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diringkaskan dalam jutaan rupiah, dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2023.

Tabel 24. Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

No	Tahun	Target (juta rupiah)	Realisasi (juta rupiah)	%
1.	2013	911.001	844.853	92,74
2.	2014	693.186	627.029	90,46
3.	2015	938.876	893.361	95,15
4.	2016	1.142.239	999.084	87,47

No	Tahun	Target (juta rupiah)	Realisasi (juta rupiah)	%
5.	2017	1.175.327	1.122.380	95,50
6.	2018	1.169.303	1.109.753	94,91
7.	2019	1.174.086	1.126.019	95,91
8.	2020	1.051.835	984.638	93,61
9.	2021	1.097.181	1.025.317	93,45
10.	2022	1.140.035	1.081.590	94,87
11.	2023	1.017.174	984.409	96,78

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi dan Transfer			
	- Belanja Pegawai	432.656.812.843,00	413.304.423.702,00	95,53
	- Belanja Barang dan Jasa	254.637.081.677,00	243.673.449.949,80	95,69
	- Belanja Bunga	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55
	- Belanja Hibah	32.601.367.155,00	32.310.714.788,00	99,11
	- Belanja Bantuan Sosial	292.000.000,00	244.550.000,00	83,75
	- Belanja Bagi Hasil	2.183.360.200,00	1.634.829.400,00	74,88
	- Belanja Bantuan Keuangan	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00
2	Belanja Modal			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.927.641.926,00	23.471.410.062,00	98,09
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.995.006.510,00	5.836.651.645,00	97,36
	- Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50
3	Belanja Tidak Terduga			
	- Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49
	Jumlah	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78

Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang masih terbatas. Pemerintah Daerah senantiasa melakukan peningkatan sumber daya manusia seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga penatausahaan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual terhitung sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaannya sudah tentu masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan, namun Pimpinan Daerah beserta seluruh jajarannya berupaya mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tema Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pembangunan nasional diarahkan pada 7 (tujuh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
7. Serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);

Sedangkan Tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah “Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Dengan prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. (RKPD – IV-18)

Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah “Penguatan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik”.

1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial;
2. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia;
3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana;
4. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata;
5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas. (RKPD – IV-19-21)

Berikut adalah Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023:

Tabel 26. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan Perkapita	26.786.367
	-	Gni Ratio	0,269
2	Menurutnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,37%
	-	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%
3	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrasktruktur Daerah	69,02
5	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99
6	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	162,21
7	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	57,05
	-	Nilai SAKIP	70,25
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,51
9	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,10
10	Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,30
	-	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	2,40

Sumber : RKPD 2023 (table 6.1 hal. VI-1 s.d VI-2)

Tabel 27. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
1.	Peningkatan Pertumbuhan Sektorsektor Ekonomi Potensial.	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 6. Program Perencanaan Tenaga Kerja 7. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja 9. Program Hubungan Industrial 10. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 11. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 12. Program Penanganan Kerawanan Pangan 13. Program Pengawasan Keamanan Pangan 14. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 15. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 16. Program Pengembangan Umkm 17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 18. Program Promosi Penanaman Modal 19. Program Pelayanan Penanaman Modal 20. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 21. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 22. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 23. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 24. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 25. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 26. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 27. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 28. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 29. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 30. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 31. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 32. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 33. Program Penyuluhan Pertanian 34. Program Penyuluhan Pertanian
2.	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 9. Program Perlindungan Perempuan 10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 12. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 13. Program Perlindungan Khusus Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
		14. Program Pengendalian Penduduk 15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 16. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 17. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 18. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 19. Program Pembinaan Perpustakaan 20. Program Pengelolaan Arsip
3.	Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Pengembangan Permukiman 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program Penyelenggaraan Jalan 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 10. Program Pengembangan Perumahan 11. Program Kawasan Permukiman 12. Program Penanggulangan Bencana 13. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 15. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 16. Program Penetapan Tanah Ulayat 17. Program Pengelolaan Tanah Kosong 18. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 19. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 20. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 21. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 22. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 23. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 24. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 25. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 26. Program Pengelolaan Persampahan 27. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 28. Program Pengelolaan Pelayaran
4.	Meningkatkan nilai tambah produk unggul yang inovatif dan Sektor Pariwisata	1. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 9. Program Pemasaran Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
		10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 11. Program 12. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
5.	Peningkatan Kualitas Aparatur yang professional, tata kelola pemerintahan yang baik dan stabilisasi kamtibmas.	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Pencatatan Sipil 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 6. Program Penataan Desa 7. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 8. Program Administrasi Pemerintahan Desa 9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 10. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 13. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 14. Program Pengembangan Kebudayaan 15. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 16. Program Pembinaan Sejarah 17. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 18. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 19. Program Perekonomian Dan Pembangunan 20. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 21. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 22. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 23. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 24. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 25. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 26. Program Kepegawaian Daerah 27. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 28. Program Penyelenggaraan Pengawasan 29. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 30. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 31. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 32. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 33. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 34. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 36. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 37. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 38. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 39. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 40. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : RKPD Kabupaten Lampung Barat 2023 (hal.IV-25 s.d IV-236)

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 belum sempurna sebagaimana harapan banyak pihak karena belum dapat mencapai angka sempurna yaitu 100%. Namun secara persentase pencapaian target kinerja Tahun 2023 cukup baik. Pencapaian target kinerja Tahun 2023 masih terkendala oleh berbagai hal, diantaranya rentang kendali antar wilayah yang jauh karena Kabupaten Lampung Barat cukup luas, prasarana khususnya infrastruktur yang belum tersedia dengan cukup baik dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

3.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada awal tahun anggaran pemerintah daerah menyusun APBD yang merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, diantaranya apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

1. Rasio Antar Pos Neraca

- Rasio Cair (*Quick Ratio*);
- Rasio Utang terhadap Total Aset;
- Rasio Ekuitas terhadap Total Aset.

2. Rasio Antar Pos Laporan Realisasi APBD

- Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja;
- Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja;
- Rasio PAD terhadap Total Pendapatan;
- Debt Service Ratio* (DSR);
- Debt Service Coverage Ratio* (DSCR);
- Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan.

3. Rasio Antar Pos Neraca

a. Rasio Cair (*Quick Ratio*)

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cair (Quick Ratio)} &= \frac{\text{Aset Lancar - Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}} \\ &= \frac{92.436.350.839,98 - 13.775.722.508,25}{29.937.934.224,15} = 262,75\% \end{aligned}$$

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Angka rasio sebesar 262,75% menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai kemampuan yang relatif sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Utang Terhadap Aset (*Debt Ratio*)

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Utang Terhadap Aset (Debt Ratio)} &= \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \\
 &= \frac{64.280.885.819,15}{2.918.150.470.168,48} = 2,20\%
 \end{aligned}$$

Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kewajiban tersebut terdiri atas utang PFK, utang luar negeri, utang pada pemerintah pusat, utang kepada pihak lain, dan utang bunga. Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari pemerintah pusat/kreditur/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio sebesar 2,20% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kewajiban yang sangat rendah, artinya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat relatif sangat kecil menggunakan fasilitas utang untuk pembiayaan pembangunan.

Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan *debt service ratio*, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Ekuitas terhadap Total Aset} &= \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}} \\
 &= \frac{2.853.869.584.349,33}{2.918.150.470.168,48} = 97,80\%
 \end{aligned}$$

Rasio ekuitas terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sendiri dalam membiayai pembangunan. Pencapaian 97,80% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sangat baik, artinya seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

4. Rasio Antar Pos Laporan Realisasi APBD

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} &= \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \\ &= \frac{693.088.637.501,80}{984.409.205.393,80} = 70,41\% \end{aligned}$$

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50,00% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin.

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} &= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \\ &= \frac{117.007.426.132,00}{984.409.205.393,80} = 11,89\% \end{aligned}$$

Rasio belanja modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri atas belanja modal Aset Tetap dan belanja modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50,00% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebesar 11,89% adalah hal yang tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi dari belanja operasi dan belanja transfer ke desa sebesar 88,11% dari total belanja dan transfer ke desa sebesar Rp984.409.205.393,80.

c. Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned} \text{Rasio PAD terhadap Total Pendapatan} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \\ &= \frac{68.748.525.754,84}{985.836.203.764,84} = 6,97\% \end{aligned}$$

Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. Termasuk di dalam PAD antara lain pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Semakin kecil angka rasio berarti semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain.

d. Debt Service Ratio (DSR)

$$\begin{aligned}
 \text{DSR} &= \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}} \\
 &= \frac{21.473.624.302,00}{985.836.203.764,84} = 2,18\%
 \end{aligned}$$

DSR dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Termasuk dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga, serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam tahun anggaran.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik, dan semakin besar angka rasio maka semakin tidak bagus kondisi keuangan pemerintah daerah atau semakin berat beban APBD.

Angka DSR sebesar 2,18% tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai kemampuan yang sangat tinggi memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR} &= \frac{(\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU}) - \text{Belanja Adum/Wajib}}{\text{Pembayaran Pokok} + \text{Bunga} + \text{Jasa Bank}} \\
 &= \frac{606.958.733.042,84 - 498.514.167.232}{21.473.624.302,00} = 505,01\%
 \end{aligned}$$

DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman. DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas Tanah dan bangunan, penerimaan SDA, dan bagian daerah lainnya seperti PPh Perseorangan, serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar 505.01% atau 5,05 kali menunjukkan masih terbukanya peluang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah jika diperlukan.

f. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan} &= \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \\
 &= \frac{731.983.070.112,00}{985.836.203.764,84} = 74,25\%
 \end{aligned}$$

Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Termasuk di dalam dana perimbangan antara lain pendapatan bagian daerah dari PBB, PPh, sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Rasio ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50,00% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

3.1.2. Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam APBD perubahan pada tabel berikut.

Tabel 28. Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		LEBIH/ (KURANG) (Rp)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
01	Pelayanan Umum	350.705.026.237,00	336.260.518.580,00	95,88	(14.444.507.657,00)
1.1.2.20	Statistik	122.623.100,00	121.914.100,00	99,42	(709.000,00)
1.2.2.24	Kearsipan	59.846.800,00	55.793.700,00	93,23	(4.053.100,00)
1.3.2.16	Komunikasi & Informatika	6.927.584.543,00	6.772.551.923,00	97,76	(155.032.620,00)
1.4.2.21	Persandian	200.579.050,00	198.890.050,00	99,16	(1.689.000,00)
1.5.5.01	Perencanaan Pembangunan	5.987.944.724,00	5.889.110.332,00	98,35	(98.834.392,00)
1.6.5.05	Penelitian dan Pengembangan	3.150.373.100,00	3.088.390.847,00	98,03	(61.982.253,00)
1.8.5.02	Keuangan	205.657.676.561,00	201.569.382.451,00	98,01	(4.088.294.110,00)
1.9.5.03	Kepegawaian	4.416.019.800,00	4.317.302.915,00	97,76	(98.716.885,00)
1.10.4.01	Sekretariat Daerah	64.913.445.233,00	56.105.416.018,00	86,43	(8.808.029.215,00)
1.11.4.02	Sekretariat DPRD	37.360.246.766,00	36.800.091.750,00	98,50	(560.155.016,00)
1.13.6.01	Inspektorat	9.235.390.152,00	8.988.785.887,00	97,33	(246.604.265,00)
1.13.7.01	Kecamatan	12.673.296.408,00	12.352.888.607,00	97,47	(320.407.801,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		LEBIH/ (KURANG) (Rp)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
02	Ketertiban Umum	50.751.162.619,00	50.022.566.798,00	98,56	(728.595.821,00)
2.01.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.415.907.930,00	20.113.787.352,00	98,52	(302.120.578,00)
2.02.1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	30.335.254.689,00	29.908.779.446,00	98,59	(426.475.243,00)
03	Ekonomi	50.031.242.112,00	48.715.345.979,00	97,37	(1.315.896.133,00)
3.1.2.15	Perhubungan	3.024.066.184,00	2.905.338.089,00	96,07	(118.728.095,00)
3.2.2.07	Tenaga Kerja	186.520.500,00	182.288.024,00	97,73	(4.232.476,00)
3.3.2.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	11.091.815.280,00	10.907.427.582,00	98,34	(184.387.698,00)
3.4.2.18	Penanaman Modal	3.154.739.411,00	3.028.714.656,00	96,01	(126.024.755,00)
3.5.2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.784.165.444,00	3.693.726.188,00	97,61	(90.439.256,00)
3.5.2.13	Pertanian	17.317.959.573,00	16.817.468.270,00	97,11	(500.491.303,00)
3.9.3.25	Kelautan dan Perikanan	4.138.799.770,00	4.054.615.183,00	97,97	(84.184.587,00)
3.10.3.30	Perdagangan	495.384.500,00	493.088.114,00	99,54	(2.296.386,00)
3.11.3.31	Perindustrian	6.837.791.450,00	6.632.679.873,00	97,00	(205.111.577,00)
04	Perlindungan Lingkungan Hidup	14.811.501.217,00	14.481.066.244,00	97,77	(330.434.973,00)
4.2.2.11	Lingkungan Hidup	14.317.193.217,00	14.001.071.984,00	97,79	(316.121.233,00)
4.3.2.10	Pertanahan	494.308.000,00	479.994.260,00	97,10	(14.313.740,00)
05	Perumahan dan Fasilitas Umum	65.391.194.099,00	64.777.128.266,00	99,06	(614.065.833,00)
5.1.1.03	Pekerjaan Umum	65.391.194.099,00	64.777.128.266,00	99,06	(614.065.833,00)
06	Kesehatan	159.780.235.077,00	152.927.123.143,80	95,71	(6.853.111.933,20)
6.1.1.02	Kesehatan	151.553.511.733,00	145.102.325.516,80	95,74	(6.451.186.216,20)
6.2.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.226.723.344,00	7.824.797.627,00	95,11	(401.925.717,00)
07	Pariwisata	6.548.931.790,00	6.298.794.323,00	96,18	(250.137.467,00)
7.1.2.22	Kebudayaan	2.001.823.300,00	1.923.012.591,00	96,06	(78.810.709,00)
7.2.3.26	Pariwisata	4.547.108.490,00	4.375.781.732,00	96,23	(171.326.758,00)
08	Pendidikan	305.630.729.913,00	297.826.716.816,00	97,45	(7.804.013.097,00)
8.1.1.01	Pendidikan	296.025.138.778,00	288.534.555.642,00	97,47	(7.490.583.136,00)
8.22.19	Kepemudaan dan Olahraga	6.764.280.400,00	6.545.362.301,00	96,76	(218.918.099,00)
8.3.2.23	Perpustakaan	2.841.310.735,00	2.746.798.873,00	96,67	(94.511.862,00)
09	Perlindungan Sosial	13.524.362.686,00	13.099.945.244,00	96,86	(424.417.442,00)
9.1.2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.208.945.051,00	4.113.206.368,00	97,73	(95.738.683,00)
9.2.2.28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.018.636.000,00	889.617.235,00	87,33	(129.018.765,00)
9.4.1.06	Sosial	5.261.236.326,00	5.165.533.973,00	98,18	(95.702.353,00)
9.5.2.09	Pangan	3.035.545.309,00	2.931.587.668,00	96,58	(103.957.641,00)
	Belanja Daerah	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78	(32.765.180.356,20)
	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	18.918.125.240,00	94,98	(1.000.537.380,00)
	Jumlah	1.037.093.048.370,00	1.003.327.330.633,80	96,74	(33.765.717.736,20)

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 telah mencapai berbagai kemajuan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut sesuai dengan capaian pembangunan pada tahun 2023:

1. Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2022 sebesar Rp27.300.000,00 pertahun, Masih tingginya angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 11,17% Pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan menjadi 4,10% pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi covid19.
2. Belum maksimalnya angka IPM tahun 2023 sebesar 71,72 poin sedangkan untuk komposit perhitungan IPM antara lain : masih Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 12,29 tahun, Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 8,36 tahun dan Usia Harapan Hidup tahun 2023 masih di angka 73,78 tahun.
3. Masih tingginya indeks risiko bencana Lampung Barat tahun 2023 sebesar 176,61 poin.
4. Turunnya predikat SAKIP tahun 2023 yaitu 66,41 poin (B), Masih rendahnya indeks SPBE pada tahun 2023 sebesar 2,76 poin (cukup). Serta Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat, tahun 2023 IKM sebesar 79,8 poin (B)
5. Masih rendahnya Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi tahun 2023 sebesar 11,24% dan Masih rendahnya Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten tahun 2023 sebesar 3,22%.

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah yang melakukan serangkaian kegiatan/proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan suatu entitas itu sendiri. Oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam struktur organisasi Kabupaten Lampung Barat entitas akuntansi merupakan semua Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat meliputi:

1. Dua Sekretariat, yaitu:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Satu Inspektorat Daerah;
3. Lima Badan, yaitu:
 - 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Dua Puluh Dinas, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) RSUD Alimuddin Umar;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - 11) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA
 - 12) Dinas Perhubungan;

- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 14) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 15) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 16) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 18) Dinas Perikanan;
 - 19) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 20) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Satu Kantor, yaitu;
- 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Lima Belas Kecamatan, yaitu:
- 1) Balik Bukit;
 - 2) Sukau;
 - 3) Sumberjaya;
 - 4) Way Tenong;
 - 5) Belalau;
 - 6) Sekincau;
 - 7) Batu Brak;
 - 8) Suoh;
 - 9) Gedung Surian;
 - 10) Kebun Tebu;
 - 11) Air Hitam;
 - 12) Pagar Dewa;
 - 13) Bandar Negeri Suoh;
 - 14) Lumbok Seminung;
 - 15) Batu Ketulis.
7. Lima Kelurahan, yaitu:
- 1) Way Mengaku
 - 2) Pasar Liwa
 - 3) Tugu Sari
 - 4) Sekincau
 - 5) Pajar Bulan

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu semua entitas akuntansi juga merupakan entitas pelaporan sedangkan entitas pelaporan untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Nilai Historis
3. Prinsip Realisasi
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
5. Prinsip Periodisasi
6. Prinsip Konsistensi

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
8. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban-LO, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.2.2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerapkan nilai historis karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

4.2.3. Realisasi (*Realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4.2.4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan

sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2.5. Periodisitas (*Periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CaLK.

4.2.6. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 tidak ada perubahan metode akuntansi.

4.2.7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan yang disajikan diupayakan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna Laporan Keuangan ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

4.2.8. Penyajian Wajar

Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan wajar. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menerapkan kebijakan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

4.4.1. Pendapatan- LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat (a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau (b) Diterima oleh Perangkat Daerah; atau (c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
3. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu) dan pendapatan direalisasi (tanpa didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu).
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.3. Belanja

1. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Belanja diakui pada saat: (a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di Perangkat Daerah dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah dan PPKD; (b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-Perangkat Daerah; (c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
3. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
4. Belanja disajikan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

4.4.4. Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
2. Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat: (a) Timbulnya kewajiban, yaitu saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah; (b) Terjadinya konsumsi aset, terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah; (c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.
3. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
4. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

4.4.5. Aset

1. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan Kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca.
3. Piutang diakui saat timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika: (a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Persediaan diakui : (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pendekatan untuk pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban, dalam pendekatan beban setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama untuk persediaan: Persediaan Bahan Pakai Habis, Persediaan Bahan/ Material (kecuali Persediaan Bahan Obat-obatan, dan Persediaan Bahan Kimia yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat), serta Persediaan Barang Lainnya.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Pembelian Terakhir untuk persediaan: Persediaan Bahan obat-obatan, dan Persediaan Bahan Kimia yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Apabila terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname* yang dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak, dan jika selisih persediaan tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pada akhir periode pelaporan persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

6. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi terhadap pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian serta bibit/benih.

7. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi berlaku untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 29. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
				1. Peralatan Dan Mesin	
a.	Alat Besar				
	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	2	4
			> 45% s.d. 100%	4	8
	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	2	4
			> 45% s.d. 100%	4	8
b.	Alat Angkutan				
	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	6	12
	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	6	12
			> 50% s.d. 75%	9	18
			> 75% s.d. 100%	12	24
c.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur				

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA	
				MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
d.	Alat Pertanian				
Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1	2	
		> 20% s.d. 40%	2	4	
		> 40% s.d. 100%	5	10	
e.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga				
Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0	
		> 25% s.d. 50%	1	2	
		> 50% s.d. 75%	2	4	
		> 75% s.d. 100%	3	6	
Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0	
		> 25% s.d. 50%	1	2	
		> 50% s.d. 75%	2	4	
		> 75% s.d. 100%	3	6	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0	
		> 25% s.d. 50%	1	2	
		> 50% s.d. 75%	2	4	
		> 75% s.d. 100%	3	6	
f.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar				
Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2	
		> 25% s.d. 50%	2	4	
		> 50% s.d. 75%	2	4	
		> 75% s.d. 100%	3	6	
Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2	
		> 25% s.d. 50%	1	2	
		> 50% s.d. 75%	2	4	
		> 75% s.d. 100%	3	6	
Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4	
		> 25% s.d. 50%	3	6	
		> 50% s.d. 75%	4	8	
		> 75% s.d. 100%	5	10	
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4	
		> 25% s.d. 50%	5	10	
		> 50% s.d. 75%	7	14	
		> 75% s.d. 100%	9	18	
g.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan				
Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0	
		> 25% s.d. 50%	1	2	
		> 50% s.d. 75%	2	4	
		> 75% s.d. 100%	3	6	

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA	
				MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
h.	Alat Laboratorium				
	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	6	10
	Destructive Testing Laboratory	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	6	10
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumen	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	4	8
i.	Alat Persenjataan				
	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA	
				MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
j.	Komputer				
	Komputer Unit	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
k.	Alat Eksplorasi				
	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
l.	Alat Pengeboran				
	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
m.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian				
	Sumur	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Produksi	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Pengolahan Dan Pemurnian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
n.	Alat Bantu Eksplorasi				
	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA	
				MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
o.	Alat Keselamatan Kerja				
	Alat Deteksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat Pelindung	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Alat Sar	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	6	12
p.	Alat Peraga				
	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
q.	Peralatan Proses/Produksi				
	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	4	8
r.	Rambu - Rambu				
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	9	18
s.	Peralatan Olah Raga				
	Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
2.	Gedung Dan Bangunan				
a.	Bangunan Gedung				

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA	
				MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5	10
			> 25% s.d. 50%	10	20
			> 50% s.d. 75%	15	30
			> 75% s.d. 100%	50	100
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
b.	Monumen				
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10	
		> 30% s.d. 45%	10	20	
		> 45% s.d. 100%	15	30	
c.	Bangunan Menara				
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10	
		> 30% s.d. 45%	10	20	
		> 45% s.d. 100%	15	30	
d.	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10	
		> 30% s.d. 45%	10	20	
		> 45% s.d. 100%	15	30	
3.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi				
a.	Jalan Dan Jembatan				
Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4	
		> 30% s.d. 45%	5	10	
		> 45% s.d. 100%	10	20	
Jembatan	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5	10	
		> 25% s.d. 50%	10	20	
		> 50% s.d. 75%	15	30	
		> 75% s.d. 100%	15	30	
b.	Bangunan Air				
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2	4	
		> 5% s.d. 10%	5	10	
		> 10% s.d. 100%	10	20	
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2	4	
		> 5% s.d. 10%	5	10	
		> 10% s.d. 100%	10	20	
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2	
		> 5% s.d. 10%	3	6	
		> 10% s.d. 100%	5	10	
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2	
		> 5% s.d. 10%	2	4	
		> 10% s.d. 100%	3	6	
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2	
		> 5% s.d. 10%	2	4	
		> 10% s.d. 100%	3	6	
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10	
		> 30% s.d. 45%	10	20	
		> 45% s.d. 100%	15	30	
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10	
		> 30% s.d. 45%	10	20	
		> 45% s.d. 100%	15	30	
c.	Instalasi				

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA	
				MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 100%	10	20
	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 100%	10	20
	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	1	2
			> 45% s.d. 100%	3	6
	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	1	2
			> 45% s.d. 100%	3	6
d.	Jaringan				
Jaringan Air Minum	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4	
		> 30% s.d. 45%	7	14	
		> 45% s.d. 100%	10	20	
Jaringan Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10	
		> 30% s.d. 45%	10	20	
		> 45% s.d. 100%	15	30	
Jaringan Telepon	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4	
		> 30% s.d. 45%	5	10	
		> 45% s.d. 100%	10	20	
Jaringan Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4	
		> 30% s.d. 45%	7	14	
		> 45% s.d. 100%	10	20	

8. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: (a) Kualitas Piutang Lancar; (b) Kualitas Piutang Kurang Lancar; (c) Kualitas Piutang Diragukan; (d) Kualitas Piutang Macet. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 30. Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,50 %
2	Kurang Lancar	10,00 %
3	Diragukan	50,00 %
4	Macet	100,00 %

9. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan tidak dilakukan terhadap: (a) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah disetujui usulan untuk dilakukan penghapusan; dan (b) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah disetujui usulan untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; (c) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan keatas nilai hasil perhitungan sama dengan atau lebih dari Rp0,50 atas jumlah penyusutan untuk setiap unit aset tetap hingga satuan rupiah terkecil dan penyesuaian hasil pembulatan akumulasi penyusutan pada akhir masa.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat.

Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka perubahan nilai penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Perubahan masa manfaat aset tetap sebagai akibat perbaikan (renovasi, restorasi, atau *overhaul*) aset tetap diperhitungkan dalam penambahan masa manfaat aset tetap pada akhir periode penyusutan berikutnya, serta akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat, tidak dapat melebihi tabel masa manfaat.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan: (a) daya pakai; dan (b) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari aset tetap yang bersangkutan. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Penambahan Masa Manfaat Akibat Perbaikan
1	Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun	1 s.d. 12 tahun
2	Gedung dan Bangunan	7 s.d. 50 tahun	5 s.d. 50 tahun
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d. 50 tahun	5 s.d. 15 tahun
4	Aset Tetap Lainnya	0 s.d. 2 tahun	0 tahun

10. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 32. Klasifikasi Aset Lainnya

Objek Akun	Rincian Objek Akun
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa Kerjasama Pemanfaatan Bangunan
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i> Lisensi dan <i>Franchise</i> Hak Cipta Paten Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-lain

4.4.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

4.4.7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi Perangkat Daerah dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi Perangkat Daerah dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

BAB 5 PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah konsolidasian dari laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Bab XXVIII. Laporan Keuangan Konsolidasian.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp988.918.708.180,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp985.836.203.764,84 atau 99,69% dari target. Nilai realiasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp38.442.964.827,44) atau (3,75%) jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022 yang sebesar Rp1.024.279.168.592,28.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp68.748.525.754,84, Pendapatan Transfer sebesar Rp917.087.678.010,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 33. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	65.358.127.413,00	68.748.525.754,84	105,19	3.390.398.341,84	70.315.342.633,28	(1.566.816.878,44)	(2,23)
2	Pendapatan Transfer	923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	99,30	(6.472.902.757,00)	941.241.799.959,00	(24.154.121.949,00)	(2,57)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722.026.000,00	(12.722.026.000,00)	(100,00)
	Jumlah	988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	99,69	(3.082.504.415,16)	1.024.279.168.592,28	(38.442.964.827,44)	(3,75)

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 mencapai target adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pendapatan yang tidak mencapai target terdapat pada Pendapatan Transfer. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Daerah Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada lampiran 1 dan 2.

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp65.358.127.413,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp68.748.525.754,84 atau 105,19% dari target. Nilai realiasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.566.816.878,44) atau (2,23%) jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022 yang sebesar Rp70.315.342.633,28.

Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp14.854.325.262,00, Retribusi Daerah sebesar Rp2.305.628.800,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.653.827.320,95, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp45.934.744.371,89. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 34. Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1.	Pajak Daerah	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	99,12	(132.122.312,00)	14.390.450.282,00	463.874.980,00	3,22	
2.	Retribusi Daerah	2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	95,92	(98.052.311,00)	2.237.859.702,50	67.769.097,50	3,03	
3.	Hasil Pengelolaan KYD	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	100,00	(0,05)	5.569.077.716,21	84.749.604,74	1,52	
4.	Lain-lain PAD yang Sah	42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	108,56	3.620.572.964,89	48.117.954.932,57	(2.183.210.560,68)	(4,54)	
	Jumlah	65.358.127.413,00	68.748.525.754,84	105,19	3.390.398.341,84	70.315.342.633,28	(1.566.816.878,44)	(2,23)	

Lebih rinci terkait Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan berikut.

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat No. 29 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pengelolaan penerimaan Pajak Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp14.854.325.262,00 atau 99,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.986.447.574,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target sebesar (Rp132.122.312,00) atau (0,88%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp463.874.980,00 atau 3,22% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2022 sebesar

Rp14.390.450.282,00. Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi					Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Hotel	137.313.200,00	153.554.250,00	111,83	16.241.050,00	125.481.434,00	28.072.816,00	22,37
2.	Pajak Restoran	2.021.667.241,00	1.712.757.842,00	84,72	(308.909.399,00)	2.123.745.399,00	(410.987.557,00)	(19,35)
3.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)
4.	Pajak Reklame	113.606.437,00	158.057.616,00	139,13	44.451.179,00	140.040.238,00	18.017.378,00	12,87
5.	Pajak Penerangan Jalan	7.618.355.316,00	7.653.132.882,00	100,46	34.777.566,00	7.156.651.116,00	496.481.766,00	6,94
6.	Pajak Parkir	108.000.000,00	104.350.000,00	96,62	(3.650.000,00)	102.450.000,00	1.900.000,00	1,85
7.	PBB P2	4.682.505.380,00	4.699.447.572,00	100,36	16.942.192,00	4.382.344.229,00	317.103.343,00	7,24
8.	Pajak BPHTB	300.000.000,00	368.025.100,00	122,68	68.025.100,00	352.737.866,00	15.287.234,00	4,33
	Jumlah	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	99,12	(132.122.312,00)	14.390.450.282,00	463.874.980,00	3,22

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 adalah sebesar Rp153.554.250,00 atau 111,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp137.313.200,00, dengan demikian realisasi Pajak Hotel melampaui target sebesar Rp16.241.050,00 atau 11,83%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.072.816,00 atau 22,37% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp125.481.434,00.

Penerimaan Pajak Hotel terdiri atas 2 (dua) sumber yaitu Pajak Hotel dan Pajak Losmen sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Pajak Hotel

Penerimaan Pajak Daerah bersumber dari hotel yang terdapat pada 14 (empat belas) hotel di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp130.386.070,00 dari anggaran sebesar Rp109.713.200,00 mencapai 118,84%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp113.010.526,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.375.544,00 atau 15,38% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 36. Pajak Hotel TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1.	Pajak Hotel	109.713.200,00	130.386.070,00	118,84	20.672.870,00	113.010.526,00	17.375.544,00	15,38	
	Jumlah	109.713.200,00	130.386.070,00	118,84	20.672.870,00	113.010.526,00	17.375.544,00	15,38	

b) Pajak Losmen

Penerimaan Pajak Daerah bersumber dari losmen yang terdapat pada 10 (sepuluh) losmen di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp23.168.180,00 dari anggaran sebesar Rp27.600.000,00 mencapai 83,94%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.470.908,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.697.272,00 atau 85,78% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 37. Pajak Losmen TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1.	Pajak Losmen	27.600.000,00	23.168.180,00	83,94	(4.431.820,00)	12.470.908,00	10.697.272,00	85,78	
	Jumlah	27.600.000,00	23.168.180,00	83,94	(4.431.820,00)	12.470.908,00	10.697.272,00	85,78	

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui media cetak berupa Surat Kabar Harian Umum (SKHU).
- 2) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pembayaran pajak secara elektronik, sehingga mempermudah wajib pajak melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pajak hotel.
- 3) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran pajak hotel.
- 4) Menggunakan alat perekam transaksi elektronik (Tapping Box) kepada wajib pajak yang potensial, sehingga pembayaran pajak hotel diharapkan sesuai dengan transaksi riil.
- 5) Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak hotel secara berkala.
- 6) Melakukan rekonsiliasi data pembayaran pajak dengan wajib pungut untuk memastikan proses pemungutan dan penyetoran pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Walaupun realisasi Pajak Hotel mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya masih perlu untuk ditingkatkan.
- 2) Kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran wajib pajak secara online masih perlu ditingkatkan.

- 3) Kemudahan akses terhadap aplikasi pajak yang masih perlu peningkatan.
- 4) Sistem manajemen hotel sebagian besar masih belum menggunakan pembukuan yang baik, sehingga masih sulit untuk mendapatkan laporan omset secara riil.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.712.757.842,00 atau 84,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.021.667.241,00, dengan demikian realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target sebesar (Rp308.909.399,00) atau (15,28%). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp410.987.557,00) atau (19,35%) jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp2.123.745.399,00.

Penerimaan Pajak Restoran terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Pajak Restoran dan Sejenisnya, Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, dan Pajak Warung Makan dan Sejenisnya sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Pajak Restoran dan Sejenisnya

Penerimaan Pajak Restoran bersumber dari restoran dan sejenisnya yang terdapat pada 14 (empat belas) restoran dan restoran kegiatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp1.603.699.829,00 dari anggaran sebesar Rp1.905.867.241,00 mencapai 84,15%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.030.986.433,00 mengalami penurunan sebesar (Rp427.286.604,00) atau (21,04%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 38. Pajak Restoran dan Sejenisnya dan Restoran TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.905.867.241,00	1.603.699.829,00	84,15	(302.167.412,00)	2.030.986.433,00	(427.286.604,00)	(21,04)
	Jumlah	1.905.867.241,00	1.603.699.829,00	84,15	(302.167.412,00)	2.030.986.433,00	(427.286.604,00)	(21,04)

b) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Penerimaan Pajak Restoran bersumber dari Rumah Makan dan Sejenisnya yang terdapat pada 44 (empat puluh empat) rumah makan dan sejenisnya di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp89.536.453,00 dari anggaran sebesar Rp99.420.000,00 mencapai 90,06%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp76.099.926,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.436.527,00 atau 17,66% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 39. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	99.420.000,00	89.536.453,00	90,06	(9.883.547,00)	76.099.926,00	13.436.527,00	17,66
	Jumlah	99.420.000,00	89.536.453,00	90,06	(9.883.547,00)	76.099.926,00	13.436.527,00	17,66

c) Pajak Warung Makan dan Sejenisnya

Penerimaan Pajak Restoran bersumber dari Warung Makan dan Sejenisnya yang terdapat pada 61 (enam puluh satu) warung makan dan sejenisnya di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp19.521.560,00 dari anggaran sebesar Rp16.380.000,00 mencapai 119,18%, jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2022 sebesar Rp16.659.040,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.862.520,00 atau 17,18% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 40. Pajak Warung Makan dan Sejenisnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Warung Makan dan Sejenisnya	16.380.000,00	19.521.560,00	119,18	3.141.560,00	16.659.040,00	2.862.520,00	17,18
	Jumlah	16.380.000,00	19.521.560,00	119,18	3.141.560,00	16.659.040,00	2.862.520,00	17,18

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui media cetak berupa Surat Kabar Harian Umum (SKHU).
- 2) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pembayaran pajak secara elektronik, sehingga mempermudah wajib pajak melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pajak restoran.
- 3) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran pajak Restoran.
- 4) Menggunakan alat perekam transaksi elektronik (Tapping Box) kepada wajib pajak yang potensial, sehingga pembayaran pajak restoran diharapkan sesuai dengan transaksi riil.
- 5) Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak restoran secara berkala.
- 6) Melakukan rekonsiliasi data pembayaran pajak dengan wajib pungut untuk memastikan proses pemungutan dan penyetoran pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya masih perlu untuk ditingkatkan.
- 2) Kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran wajib pajak secara online masih perlu ditingkatkan.
- 3) Database wajib pajak yang masih kurang memadai, hal ini terlihat dengan masih adanya obyek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
- 4) Adanya beberapa wilayah/kecamatan yang aksesnya cukup jauh, sehingga biaya operasional untuk melakukan penagihan cukup besar.

- 5) Kemudahan akses terhadap aplikasi pajak yang masih perlu peningkatan, khususnya terkait dengan permasalahan sinyal.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Tontonan film;
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) Pameran;
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) Permainan bilyar, golf, dan bowling;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- 10) Pertandingan olahraga.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan karcis atau harga tanda masuk (HTM), tidak dikenakan tarif pajak hiburan.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp2.000.000,00) atau (28,57%) jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2022 sebesar Rp7.000.000,00.

Penerimaan Pajak Hiburan terdiri atas 2 (dua) sumber yaitu Pajak Pameran, dan Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Pajak Pameran

Penerimaan Pajak Hiburan bersumber dari pameran di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp5.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 mencapai 100,00%, jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000,00 atau 100,00% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 41. Pajak Pameran TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	∞
	Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	∞

b) Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap

Penerimaan Pajak Hiburan bersumber dari sirkus/akrobat/sulap di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 mencapai 0,00%, jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2022 sebesar Rp7.000.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp7.000.000,00) atau (100,00%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 42. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Sirkus/Akrobat /Sulap	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)

Walaupun realisasi Pajak Hiburan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolannya, antara lain:

- 1) Potensi wajib pajak hiburan masih sangat kecil, dan saat ini proses pemungutan pajak hiburan masih diberlakukan kepada hiburan yang bersifat insidental.
- 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak hiburan.
- 3) Masih ada beberapa obyek pajak hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- 1) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- 2) Reklame kain/Baliho;
- 3) Reklame melekat, stiker;
- 4) Reklame selebaran;
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame apung;
- 8) Reklame suara;
- 9) Reklame film/slide; dan
- 10) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- 1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 adalah sebesar Rp158.057.616,00 atau 139,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp113.606.437,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melebihi target sebesar Rp44.451.179,00 atau 39,13%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.017.378,00 atau 12,87% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp140.040.238,00.

Penerimaan Pajak Reklame terdiri atas 2 (dua) sumber yaitu Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, dan Pajak Reklame Kain sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

Penerimaan Pajak Reklame bersumber dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp153.057.616,00 dari anggaran sebesar Rp107.756.437,00 mencapai 142,04%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp135.040.238,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.017.378,00 atau 13,34% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 43. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	107.756.437,00	153.057.616,00	142,04	45.301.179,00	135.040.238,00	18.017.378,00	13,34
	Jumlah	107.756.437,00	153.057.616,00	142,04	45.301.179,00	135.040.238,00	18.017.378,00	13,34

b) Pajak Reklame Kain

Penerimaan Pajak Reklame bersumber dari Reklame Kain di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp5.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.850.000,00 mencapai 85,47%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.000.000,00 tidak mengalami perubahan realisasi, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 44. Pajak Reklame Kain TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	5.000.000,00	85,47	(850.000,00)	5.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.850.000,00	5.000.000,00	85,47	(850.000,00)	5.000.000,00	0,00	0,00

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Elektronifikasi pendaftaran dan pembayaran pajak reklame melalui optimalisasi penggunaan aplikasi PM. Santun.
- 2) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran pajak Reklame.
- 3) Melakukan perbaikan tarif pajak reklame dengan peninjauan kembali Nilai Sewa Reklame.
- 4) Mengintensifkan penagihan kepada vendor/penyedia jasa reklame yang melakukan pemasangan pajak reklame di Kabupaten Lampung Barat.
- 5) Melakukan sosialisasi pendaftaran, pembayaran, tarif dan ketentuan pemasangan reklame di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Melakukan perbaikan tatakelola pemungutan pajak reklame, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak.

Walaupun realisasi Pajak Reklame mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Masih banyaknya obyek pajak reklame yang terdaftar sebagai wajib pajak.
- 2) Masih sulitnya menemukan vendor/penyelenggaran pajak reklame yang menyelenggarakan pemasangan reklame khususnya reklame yang bersifat temporer.
- 3) Masih banyak reklame khususnya reklame kain yang menunjukkan identitas usaha dikelola oleh usaha yang bersifat usaha keluarga/sederhana yang tidak memperhitungkan kewajiban pembayaran pajak reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- 1) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- 2) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.653.132.882,00 atau 100,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.618.355.316,00, dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melebihi target sebesar Rp34.777.566,00 atau 0,46%. Realisasi

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp496.481.766,00 atau 6,94% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp7.156.651.116,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Mendorong wajib pajak khususnya perangkat daerah untuk melakukan pembayaran tagihan listrik tepat waktu.
- 2) Melakukan upaya peningkatan jumlah pelanggan listrik baru, khususnya untuk daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau aliran listrik.
- 3) Mendorong transparansi data pelanggan dari PT. PLN Persero.

Walaupun realisasi Pajak Penerangan Jalan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih kesulitan untuk memperoleh data pelanggan dari PT. PLN Persero.
- 2) Masih banyak meteran listrik konvensional (belum menggunakan elektrik) sehingga masih cukup banyak pelanggan yang menunggak pembayaran listrik.
- 3) Perlu adanya perbaikan kontrak untuk penerangan jalan umum antara Pemerintah Daerah dan PT. PLN Persero, karena saat ini penghitungan pembayaran Penerangan Jalan Umum masih bersifat flat tanpa memperhatikan kondisi lapangan.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- 3) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- 4) Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya sebesar 30% (tiga puluh persen).

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 adalah sebesar Rp104.350.000,00 atau 96,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp108.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak mencapai target sebesar (Rp3.650.000,00) atau (3,38%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.900.000,00 atau 1,85% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun 2022 sebesar Rp102.450.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Melakukan komunikasi intensif dengan wajib pajak, sehingga proses pembayaran pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
- 3) Elektronifikasi pendaftaran dan pembayaran pajak parkir melalui optimalisasi penggunaan aplikasi PM. Santun.
- 4) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran pajak parkir.

- 5) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan perlindungan/jaminan tidak akan ada lagi jenis pungutan lain yang serupa.
- 6) Melakukan penagihan pajak parkir kepada wajib pajak tepat waktu .

Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kurangnya potensi pajak parkir yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Masih adanya oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang melakukan pemungutan parkir pada obyek pajak.

g. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.699.447.572,00 atau 100,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.682.505.380,00, dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melebihi target sebesar Rp16.942.192,00 atau 0,36%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp317.103.343,00 atau 7,24% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.382.344.229,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Melakukan kerjasama host to host dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, yang mewajibkan pelunasan PBB-P2 sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Melakukan perbaikan sistem aplikasi PBB-P2 yang terintegrasi dengan Bank Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, untuk memudahkan proses pendaftaran dan pembayaran PBB-P2.
- 3) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran PBB-P2.

- 4) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media cetak Surat Kabar Harian Umum (SKHU).
- 5) Melakukan pendataan untuk dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2, mengingat saat ini masih cukup banyak obyek pajak yang belum terdaftar.
- 6) Melakukan verifikasi dan validasi data obyek pajak yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
- 7) Memberikan bantuan transport kepada penagih PBB-P2 sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 8) Melakukan penagihan secara berkala kepada wajib PBB-P2.

Walaupun realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran PBB-P2.
- 2) Masih banyaknya obyek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
- 3) Ketidaksesuaian data pelaporan PBB-P2 oleh wajib pajak dengan kondisi dilapangan.

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- 1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 2) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- 3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- 4) Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama ;
- 5) orang pribadi atau Badan karena wakaf dan
- 6) orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Realisasi BPHTB Tahun 2023 adalah sebesar Rp368.025.100,00 atau 122,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir melebihi target sebesar Rp68.025.100,00 atau 22,68%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.287.234,00 atau 4,33% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp352.737.866,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Melakukan kerjasama host to host dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, yang mewajibkan pelunasan BPHTB sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Melakukan perbaikan sistem aplikasi BPHTB yang terintegrasi dengan Bank Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, untuk memudahkan proses pendaftaran dan pembayaran BPHTB.

- 3) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran pajak BPHTB.
- 4) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media cetak Surat Kabar Harian Umum (SKHU).
- 5) Melakukan verifikasi dan validasi data obyek pajak yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
- 6) Melakukan Sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 7) Melakukan verifikasi dan validasi data transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai syarat pengajuan sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan.

Walaupun realisasi BPHTB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran BPHTB
- 2) Masih banyaknya obyek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
- 3) Ketidakesuaian data pelaporan transaksi nilai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh wajib pajak/PPAT/Notaris dengan transaksi yang sebenarnya.
- 4) Belum adanya data Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar penetapan harga perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp2.305.628.800,00 atau 95,92% dari target Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.403.681.111,00, dengan demikian realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar (Rp98.052.311,00) atau (4,08%). Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.237.859.702,50 mengalami peningkatan sebesar Rp67.769.097,50 atau 3,03%.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 45. Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Jasa Umum	957.472.611,00	844.193.272,00	88,17	(113.279.339,00)	823.811.970,00	20.381.302,00	2,47
2	Retribusi Jasa Usaha	1.223.658.500,00	1.236.243.800,00	101,03	12.585.300,00	1.255.103.700,00	(18.859.900,00)	(1,50)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	222.550.000	225.191.728,00	101,19	2.641.728,00	158.944.032,50	66.247.695,50	41,68
Jumlah		2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	95,92	(98.052.311,00)	2.237.859.702,50	67.769.097,50	3,03

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun obyeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum pemungutan Retribusi Jasa Umum pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp844.193.272,00 atau 88,17% dari target sebesar Rp957.472.611,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar (Rp113.279.339,00) atau (11,83%). Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp823.811.970,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.381.302,00 atau 2,47%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut.

Tabel 46. Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retr. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	152.840.000,00	134.608.000,00	88,07	(18.232.000,00)	136.265.000,00	(1.657.000,00)	(1,22)
2.	Retr. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	78.020.000,00	75.520.000,00	96,80	(2.500.000,00)	103.200.000,00	(27.680.000,00)	(26,82)
3.	Retr. Pelayanan Pasar	292.512.172,00	199.168.972,00	68,09	(93.343.200,00)	160.527.400,00	38.641.572,00	24,07
4.	Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	0,00	54.000.000,00	1.000.000,00	1,85
5.	Retr. Pengolahan Limbah Cair	756.439,00	1.553.500,00	205,37	797.061,00	776.400,00	777.100,00	100,09
6.	Retr. Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00
7.	Retr. Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.942.800,00	100,00	(1.200,00)	364.643.170,00	9.299.630,00	2,55
	Jumlah	957.472.611,00	844.193.272,00	88,17	(113.279.339,00)	823.811.970,00	20.381.302,00	2,47

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2023 adalah sebesar Rp134.608.000,00 atau 88,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp152.840.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak mencapai

target sebesar (Rp18.232.000,00) atau (11,93%). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.657.000,00) atau (1,22%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2022 sebesar Rp136.265.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi persampahan.
- 2) Melakukan sosialisasi pelayanan dan pemungutan retribusi persampahan.
- 3) Melakukan intensifikasi dengan penambahan jumlah pelanggan yang mendapatkan pelayanan persampahan.
- 4) Melakukan penagihan secara berkala kepada pelanggan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kesadaran wajib retribusi untuk melakukan pengelolaan sampah dan pembayaran retribusi persampahan yang masih perlu ditingkatkan.
- 2) Terbatasnya biaya operasional sehingga pelayanan kepada pelanggan kurang maksimal
- 3) Kurangnya tong sampah yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sehingga banyak pelanggan yang enggan melakukan pembayaran.

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam setiap kali pemakaian tempat parkir.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2023 adalah sebesar Rp75.520.000,00 atau 96,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp78.020.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target sebesar (Rp2.500.000,00) atau (3,20%). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp27.680.000,00) atau (26,82%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022 sebesar Rp103.200.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan penambahan obyek yang menjadi lokasi retribusi parkir tepi jalan umum.
- 2) Perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum.
- 3) Intensifikasi pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, khususnya pada obyek retribusi yang dianggap potensial.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Berkurangnya area parkir tepi jalan umum, khususnya di wilayah sekitar pasar pemda yang banyak digunakan untuk berdagang.
- 2) Keterbatasan jumlah petugas parkir yang bertugas melakukan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.
- 3) Tatakelola sistem pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum masih perlu ditingkatkan.

c. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan retribusi atas penyediaan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan fasilitas pasar

tradisional/ sederhana, berupa pelataran atau amparan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dikecualikan pada pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Retribusi Pelayanan Pasar ini dipungut berdasarkan luas pemakaian fasilitas pasar dan tipe pasar dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah meliputi pasar tipe A, B, C dan D.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 adalah sebesar Rp199.168.972,00 atau 68,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp292.512.172,00, dengan demikian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir tidak mencapai target sebesar (Rp93.343.200,00) atau (31,91%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp38.641.572,00 atau 24,07% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022 sebesar Rp160.527.400,00.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Retribusi Pelataran, Retribusi Los, dan Retribusi Kios sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Retribusi Pelataran

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Pelataran di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp35.648.000,00 dari anggaran sebesar Rp52.800.000,00 mencapai 67,52%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp40.825.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp5.177.000,00) atau (12,68%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 47. Retribusi Pelataran TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pelataran	52.800.000,00	35.648.000,00	67,52	(17.152.000,00)	40.825.000,00	(5.177.000,00)	(12,68)
	Jumlah	52.800.000,00	35.648.000,00	67,52	(17.152.000,00)	40.825.000,00	(5.177.000,00)	(12,68)

b) Retribusi Los

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Los di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp111.176.000,00 dari anggaran sebesar Rp167.251.200,00 mencapai 66,47%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp90.585.600,00 mengalami peningkatan sebesar Rp20.591.200,00 atau 22,73%, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 48. Retribusi Los TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Los	167.251.200,00	111.176.800,00	66,47	(56.074.400,00)	90.585.600,00	20.591.200,00	22,73
	Jumlah	167.251.200,00	111.176.800,00	66,47	(56.074.400,00)	90.585.600,00	20.591.200,00	22,73

c) Retribusi Kios

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Kios di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp52.344.172,00 dari anggaran sebesar Rp72.460.972,00 mencapai 72,24%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

sebesar Rp29.116.800,00 atau tidak mengalami peningkatan sebesar Rp23.227.372,00 atau 79,77%, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 49. Retribusi Kios TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Kios	72.460.972,00	52.344.172,00	72,24	(20.116.800,00)	29.116.800,00	23.227.372,00	79,77
	Jumlah	72.460.972,00	52.344.172,00	72,24	(20.116.800,00)	29.116.800,00	23.227.372,00	79,77

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Proses elektronifikasi pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan bekerjasama dengan perbankan, untuk memperbaiki tatakelola pemungutan retribusi.
- 2) Intensifikasi pemungutan retribusi kepada wajib retribusi.
- 3) Monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petugas pemungut retribusi untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam proses pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Jumlah wajib retribusi pelayanan pasar yang mulai banyak berkurang, hal ini disebabkan karena banyak pedagang lebih memilih berdagang menggunakan kendaraan bak terbuka.
- 2) Pengunjung pasar pemda banyak berkurang, sehingga mengurangi antusiasme para pedagang dalam berdagang. Para pedagang cenderung hanya berdagang pada hari-hari tertentu yang mereka anggap menjanjikan.
- 3) Tatakelola pemungutan retribusi pelayanan pasar perlu ada perbaikan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat.

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya administrasi, jasa uji berkala, kartu uji, tanda uji, operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 adalah sebesar Rp55.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp55.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.000,00 atau 1,85% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sebesar Rp54.000.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat, tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR). Hal ini dilakukan karena selama ini banyak pemilik kendaraan bermotor masih melakukan pengujian diluar Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Perbaikan sistem pelayanan dan pemungutan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR).

- 3) Perbaikan sarana dan prasarana bagi kenyamanan para pemilik kendaraan bermotor dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor (KIR).

Walaupun realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Masyarakat pemilik kendaraan masih banyak yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Lampung Barat sudah bisa melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, sehingga banyak yang masih melakukan pengujian kendaraan bermotor di luar Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Kurangnya sumberdaya manusia yang melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR).
- 3) Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR).
- 4) Perlu adanya perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR).

e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair merupakan retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi ini adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair, diukur berdasarkan pelayanan, volume limbah yang diolah dan jenis perlakuan terhadap limbah.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.553.500,00 atau 205,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp756.439,00, dengan demikian realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair melebihi target sebesar Rp797.061,00 atau 105,37%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp777.100,00 atau 100,09% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tahun 2022 sebesar Rp776.400,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Sosialisasi kepada para wajib retribusi tentang pemungutan dan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair.
- 2) Penagihan secara intensif kepada wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Walaupun realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Potensi wajib retribusi yang masih sangat sedikit.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengolahan limbah cair.
- 3) Industri yang ada di Kabupaten Lampung Barat semuanya masih bersifat home industry yang tidak memerlukan banyak pengelolaan limbah cair.
- 4) Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih sangat terbatas, sehingga belum bisa memperluas jangkauan pelayanan.

f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan sesuai dengan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.400.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.400.000,00. Realisasi tersebut tidak mengalami kenaikan/ penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2022 sebesar Rp4.400.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi pentingnya tera/tera ulang alat ukur dan timbangan kepada masyarakat khususnya pemilik alat.
- 2) Memberikan pelayanan tera/tera ulang secara langsung ke lapangan/lokasi kepada masyarakat.
- 3) Intensifikasi penagihan retribusi tra/tera ulang kepada wajib retribusi sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- 4) Menggali potensi wajib retribusi yang potensial untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan dari tera/tera ulang.

Walaupun realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tera/tera ulang terhadap alat yang mereka miliki masih perlu ditingkatkan.
- 2) Potensi wajib retribusi tera/tera ulang masih sangat terbatas.
- 3) Keterbatasan sumberdaya untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat, khususnya biaya operasional dan sumber daya manusia.

g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum dengan subjek orang pribadi atau badan, diukur berdasarkan jenis dan nilai bangunan menara, zona nilai tanah, luas dan tinggi bangunan menara, serta frekuensi waktu dengan perhitungan tarif 2% (dua persen) dari NJOP. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp373.942.800,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp373.944.000,00, dengan demikian realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar (Rp1.200,00) atau (0,00%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.299.630,00 atau 2,55% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 sebesar Rp364.643.170,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan pendataan terhadap obyek retribusi berupa menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

- 2) Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam rangka melakukan pungutan pajak dan retribusi yang terkait dengan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Barat.
- 3) Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemilik menara telekomunikasi untuk mempermudah akses data menara telekomunikasi yang terpasang.
- 4) Mengintensifkan penagihan retribusi menara telekomunikasi yang ada.
- 5) Memperbaiki tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi menara telekomunikasi.

Walaupun realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kurangnya informasi vendor/perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang terpasang di Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Kesulitan melakukan penagihan karena semua vendor/perusahaan pemilik menara telekomunikasi tidak berdomisili di Kabupaten Lampung Barat.
- 3) Kurangnya ketersediaan data menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
- 4) Keterbatasan sumberdaya untuk melakukan penagihan retribusi menara telekomunikasi.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tabel dibawah ini.

Tabel 50. Rincian Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Perhubungan							
	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.020.000,00	75.520.000,00	96,80	(2.500.000,00)	103.200.000,00	(27.680.000,00)	(26,82)
	Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	0,00	54.000.000,00	1.000.000,00	1,85
	Jumlah	133.020.000,00	130.520.000,00	98,12	(2.500.000,00)	157.200.000,00	(26.680.000,00)	(16,97)
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika							
	Retr. Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.942.800,00	100,00	(1.200,00)	364.643.170,00	9.299.630,00	2,55
	Jumlah	373.944.000,00	373.942.800,00	100,00	(1.200,00)	364.643.170,00	9.299.630,00	2,55
3.	Dinas Lingkungan Hidup							
	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.040.000,00	100.060.000,00	100,02	20.000,00	94.540.000,00	5.520.000,00	5,84
	Retr. Rumah Tangga	756.439,00	1.553.500,00	205,37	797.061,00	776.400,00	777.100,00	100,09
	Jumlah	100.796.439,00	101.613.500,00	100,81	817.061,00	95.316.400,00	6.297.100,00	6,61
4.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag							
	Retr. Pengujian Alat-alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapan	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	Retr. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	52.800.000,00	34.548.000,00	65,43	(18.252.000,00)	41.725.000,00	(7.177.000,00)	(17,20)
	Retr. Pelayanan Pasar	292.512.172,00	199.168.972,00	68,09	(93.343.200,00)	160.527.400,00	38.641.572,00	24,07
	Jumlah	349.712.172,00	238.116.972,00	68,09	(111.595.200,00)	206.652.400,00	31.464.572,00	15,23
	Jumlah Keseluruhan	957.472.611,00	844.193.272,00	88,17	(113.279.339,00)	823.811.970,00	20.381.302,00	2,47

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dasar hukum penarikan Retribusi Jasa Usaha ini adalah Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 12 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.236.243.800,00 atau 101,03% dari target sebesar Rp1.223.658.500,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha melebihi target sebesar Rp12.585.300,00 atau 1,03%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp1.255.103.700,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Usaha di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp18.859.900,00) atau (1,50%).

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut.

Tabel 51. Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	546.695.000,00	574.939.500,00	105,17	28.244.500,00	586.395.000,00	(11.455.500,00)	(1,95)
2.	Retr. Pasar Grosir/ Pertokoan	359.400.000,00	369.046.400,00	102,68	9.646.400,00	335.160.000,00	33.886.400,00	10,11
3.	Retr. Terminal	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00
4.	Retr. Tempat Khusus Parkir	22.848.000,00	25.348.000,00	110,94	2.500.000,00	35.750.000,00	(10.402.000,00)	(29,10)
5.	Retr. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	122.150.000,00	88.894.000,00	72,77	(33.256.000,00)	100.031.000,00	(11.137.000,00)	(11,13)
6.	Retr. Rumah Potong Hewan (RPH)	5.365.500,00	5.376.000,00	100,20	10.500,00	5.056.000,00	320.000,00	6,33
7.	Retr. Tempat Rekreasi dan Olahraga	73.700.000,00	79.033.000,00	107,24	5.333.000,00	78.034.000,00	999.000,00	1,28
8.	Retr. Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.200.000,00	87.306.900,00	100,12	106.900,00	108.377.700,00	(21.070.800,00)	(19,44)
	Jumlah	1.223.658.500,00	1.236.243.800,00	101,03	12.585.300,00	1.255.103.700,00	(18.859.900,00)	(1,50)

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh 12 perangkat daerah yaitu : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4) Dinas Perhubungan; 5) Dinas Lingkungan Hidup; 6) Dinas Komunikasi dan Informatika; 7) Dinas Koperasi, UKM, Perindag; 8) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 9) Dinas Perikanan; 10) Dinas Perkebunan dan Peternakan; 11) BPKD; 12) Sekretariat Daerah.

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp574.939.500,00 atau 105,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp546.695.000,00, dengan demikian realisasi tersebut melebihi target sebesar Rp28.244.500,00 atau 5,17%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp11.455.500,00) atau (1,95%) jika

dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp586.395.000,00.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas 4 (empat) sumber yaitu Penyewaan Tanah dan Bangunan, Penyewaan Tanah, Pemakaian Ruangan, dan Pemakaian Alat sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Penyewaan Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp357.700.000,00 dari anggaran sebesar Rp343.950.000,00 mencapai 104,00%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp387.800.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp30.100.000,00) atau (7,76%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 52. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	343.950.000,00	357.700.000,00	104,00	13.750.000,00	387.800.000,00	(30.100.000,00)	(7,76)
	Jumlah	343.950.000,00	357.700.000,00	104,00	13.750.000,00	387.800.000,00	(30.100.000,00)	(7,76)

b) Retribusi Penyewaan Tanah

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Penyewaan Tanah di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp79.789.500,00 dari anggaran sebesar Rp72.045.000,00 mencapai 110,75%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp72.045.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.744.500,00 atau 10,75% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 53. Retribusi Penyewaan Tanah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Penyewaan Tanah	72.045.000,00	79.789.500,00	110,75	7.744.500,00	72.045.000,00	7.744.500,00	10,75
	Jumlah	72.045.000,00	79.789.500,00	110,75	7.744.500,00	72.045.000,00	7.744.500,00	10,75

c) Retribusi Pemakaian Ruangan

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Pemakaian Ruangan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp34.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp27.500.000,00 mencapai 124,55%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp22.750.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.500.000,00 atau 50,55% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 54. Retribusi Pemakaian Ruangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan	27.500.000,00	34.250.000,00	124,55	6.750.000,00	22.750.000,00	11.500.000,00	50,55
	Jumlah	27.500.000,00	34.250.000,00	124,55	6.750.000,00	22.750.000,00	11.500.000,00	50,55

d) Retribusi Pemakaian Alat

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Pemakaian Alat di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp103.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp103.200.000,00 mencapai 100,00%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp103.800.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp600.000,00) atau (0,58%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 55. Retribusi Pemakaian Alat TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(8=4-7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00	103.800.000,00	(600.000,00)	(0,58)
	Jumlah	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00	103.800.000,00	(600.000,00)	(0,58)

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan pendataan terhadap pemakai kekayaan daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Bekerjasama dengan pengelola gaji untuk melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya penyewaan tanah dan bangunan berupa rumah dinas.
- 3) Membuat Berita Acara Perjanjian Sewa Menyewa khususnya pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, untuk memberikan kepastian hukum penyewaan dan hak atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 4) Mengintensifkan penagihan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Walaupun realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Sering terjadi pemindahtanganan pemakai kekayaan daerah yang tidak dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Kurangnya kesadaran pemakai kekayaan daerah untuk melaksanakan kewajibannya.
- 3) Harga hasil pertanian yang tidak menentu, sehingga menyulitkan penyewa tanah melaksanakan kewajibannya.

b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikecualikan fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta dengan subjek orang pribadi atau badan dengan diukur berdasarkan jenis, tipe dan jangka waktu penggunaan fasilitas. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag.

Realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun 2023 adalah sebesar Rp369.046.400,00 atau 102,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp359.400.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan melebihi target sebesar Rp9.646.400,00 atau 2,68%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.886.400,00 atau 10,11% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun 2022 sebesar Rp335.160.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Mengintensifkan penagihan kepada wajib retribusi pasar grosir dan pertokoan di Pasar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Memperbaiki tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi pasar grosir dan pertokoan
- 3) Memperbaiki struktur tarif penyewaan pasar grosir dan pertokoan dengan memperhatikan kondisi sosial perekonomian masyarakat.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemungutan dan pembayaran retribusi pasar grosir/pertokoan.

Walaupun realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, sehingga masih ada wajib retribusi yang kesulitan melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan.
- 2) Kondisi pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang masih membutuhkan perhatian, sehingga ada beberapa los/kios yang tidak berpenghuni.
- 3) Perlu perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi pasar grosir/pertokoan.

c. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.300.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.300.000,00. Realisasi tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun 2022 sebesar Rp6.300.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan penagihan secara intensif kepada wajib retribusi sesuai dengan jatuh tempo.
- 2) Memperbaiki sarana dan prasarana loket dan kantin di terminal
- 3) Memperbaiki tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi terminal.

Walaupun realisasi Retribusi Terminal mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kondisi bangunan loket dan kantin yang kurang memadai
- 2) Kondisi terminal yang saat ini belum melayani pemberhentian bus/angkutan antar kota/daerah, sehingga pengunjung terminal sangat sedikit

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan subjek orang pribadi atau Badan, diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaannya. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Tempat Khusus Parkir Tahun 2023 adalah sebesar Rp25.348.000,00 atau 110,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.848.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir melebihi target sebesar Rp2.500.000,00 atau 10,94%. Realisasi

tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp10.402.000,00) atau (29,10%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2022 sebesar Rp35.750.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan penagihan secara intensif kepada kendaraan yang terparkir di lingkungan terminal liwa dan sekincau.
- 2) Memperbaiki tatakelola pengelolaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir di lingkungan terminal liwa dan sekincau.

Walaupun realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Terbatasnya jumlah kendaraan yang parkir di Terminal, karena sampai saat ini terminal liwa dan sekincau belum melayani bus/angkutan antar daerah/kota.
- 2) Tidak adanya kendaraan angkutan yang berhenti dan masuk terminal, sehingga wajib retribusi masih terbatas pada pengunjung pasar Pemda Liwa dan Pasar Bandar Betung.
- 3) Perlu perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi terminal.

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan penerapan tarif berdasarkan jenis tempat, tipe kamar, dan jangka waktu penggunaannya. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata.

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2023 adalah sebesar Rp88.894.000,00 atau 72,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp122.150.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak mencapai target sebesar (Rp33.256.000,00) atau (27,23%). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp11.137.000,00) atau (11,13%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi tersebut Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2022 sebesar Rp100.031.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Pemasangan alat perekam elektronik (Tapping Box) pada wisma sindalapai.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung/tamu.
- 3) Perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi penginapan/ pesanggrahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Walaupun realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kurangnya jumlah pengunjung pada Penginapan/Pesanggrahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karena banyaknya pesaing yang mampu memberikan pelayanan dan harga yang lebih menjanjikan.
- 2) Kondisi Penginapan/pesanggrahan yang kurang memadai.
- 3) Terbatasnya jumlah kunjungan wisatawan luar daerah ke Lampung Barat.
- 4) Tatakelola penginapan/pesanggrahan yang masih perlu diperbaiki.

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian dan pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan diukur berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.376.000,00 atau 100,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.365.500,00, dengan demikian realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan melebihi target sebesar Rp10.500,00 atau 0,20%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp320.000,00 atau 6,33% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2022 sebesar Rp5.056.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Pendataan wajib retribusi pemotongan hewan
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat akan pemotongan hewan di rumah potong hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Peningkatan pelayanan kepada wajib retribusi Rumah Potong Hewan
- 4) Mengintensifkan penagihan retribusi Rumah Potong Hewan

Walaupun realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan di rumah Potong Hewan.
- 2) Lokasi Rumah Potong Hewan yang cukup jauh dari pemukiman sehingga menyulitkan masyarakat melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan.
- 3) Kurangnya sumberdaya manusia, khususnya tenaga kesehatan hewan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebesar Rp79.033.000,00 atau 107,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp73.700.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga melebihi target sebesar Rp5.333.000,00 atau 7,24%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp999.000,00 atau 1,28% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2022 sebesar Rp78.034.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang tempat-tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Perbaikan tatakelola pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, diantaranya dengan pemasangan pintu masuk elektronik di Kebun Raya Liwa.
- 3) Perbaikan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Walaupun realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Masih perlu adanya perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 2) Belum adanya dasar hukum/peraturan untuk melakukan pemungutan retribusi di beberapa tempat rekreasi/olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Kurangnya kegiatan-kegiatan perlombaan olahraga yang menggunakan fasilitas tempat olahraga di Kabupaten Lampung Barat.

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau Badan dan diukur berdasarkan jenis dan volume barang usaha daerah.

Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Perikanan. Jasa Produksi Usaha penjualan kompos dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup sedangkan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan dipungut oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp87.306.900,00 atau 100,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp87.200.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi tersebut melebihi target sebesar Rp106.900,00 atau 0,12%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp21.070.800,00) atau (19,44%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2022 sebesar Rp108.377.700,00.

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan, dan Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bersumber dari Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp10.433.400,00 dari anggaran sebesar Rp10.400.000,00 mencapai 100,32%, jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.433.400,00 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 56. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	10.400.000,00	10.433.400,00	100,32	33.400,00	0,00	10.433.400,00	∞
	Jumlah	10.400.000,00	10.433.400,00	100,32	33.400,00	0,00	10.433.400,00	∞

b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bersumber dari Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp64.800.000,00 dari anggaran sebesar Rp64.800.000,00 mencapai 100,00%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp85.050.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.250.000,00) atau (23,81%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 57. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00	85.050.000,00	(20.250.000,00)	(23,81)	
Jumlah		64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00	85.050.000,00	(20.250.000,00)	(23,81)	

c) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp12.073.500,00 dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 mencapai 100,61%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp23.327.700,00 mengalami penurunan sebesar (Rp11.254.200,00) atau (48,24%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 58. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	12.000.000,00	12.073.500,00	100,61	73.500,00	23.327.700,00	(11.254.200,00)	(48,24)	
Jumlah		12.000.000,00	12.073.500,00	100,61	73.500,00	23.327.700,00	(11.254.200,00)	(48,24)	

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi untuk memasarkan hasil produksi usaha daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil usaha daerah sesuai dengan kemampuan dan permintaan pasar.

Walaupun realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Ketersediaan sumber daya untuk memproduksi hasil usaha daerah yang berkualitas.

- 2) Kurangnya sosialisasi/ pemasaran atas hasil produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 3) Banyak pesaing yang memproduksi barang/jasa sejenis dengan harga dan kualitas yang lebih baik.

Rincian Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 59. Rincian Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	171.500.000,00	173.700.000,00	101,28	2.200.000,00	214.350.000,00	(40.650.000,00)	(18,96)
	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.000.000,00	4.750.000,00	237,50	2.750.000,00	0,00	4.750.000,00	∞
	Jumlah	173.500.000,00	178.450.000,00	102,85	4.950.000,00	214.350.000,00	(35.900.000,00)	(16,75)
2.	Dinas Kesehatan							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
3.	Dinas PU PR							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.800.000,00	10.950.000,00	101,39	150.000,00	10.000.000,00	950.000,00	9,50
	Ret. Pemakaian Ruangan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	Ret. Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00	103.800.000,00	(600.000,00)	(0,58)
	Jumlah	122.000.000,00	122.150.000,00	100,12	150.000,00	121.800.000,00	350.000,00	0,29
4.	Dinas Lingkungan Hidup							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	5.700.000,00	1.500.000,00	26,32
	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga							
	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	67.200.000,00	72.258.000,00	107,53	5.058.000,00	68.059.000,00	4.199.000,00	6,17
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	Ret. Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027.700,00	(11.027.700,00)	100,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	10.400.000,00	10.433.400,00	100,32	33.400,00	0,00	10.433.400,00	∞
	Jumlah	84.800.000,00	89.891.400,00	106,00	5.091.400,00	84.786.700,00	5.104.700,00	6,02
5.	Dinas Perhubungan							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00	2.700.000,00	150,00	900.000,00	3.150.000,00	(450.000,00)	(14,29)
	Ret. Terminal							
	Ret. Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00
	Ret. Tempat Khusus Parkir							
	Ret. Pelayanan Tempat Khusus Parkir	22.848.000,00	25.348.000,00	110,94	2.500.000,00	35.750.000,00	(10.402.000,00)	(29,10)
	Jumlah	30.948.000,00	34.348.000,00	110,99	3.400.000,00	45.200.000,00	(10.852.000,00)	(24,01)
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.800.000,00	5.400.000,00	112,50	600.000,00	4.800.000,00	600.000,00	12,50

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Jumlah	4.800.000,00	5.400.000,00	112,50	600.000,00	4.800.000,00	600.000,00	12,50
7.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.400.000,00	5.700.000,00	105,56	300.000,00	5.750.000,00	(50.000,00)	(0,87)
	Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan							
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	359.400.000,00	369.046.400,00	102,68	9.646.400,00	0,00	369.046.400,00	∞
	Ret. Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	0,00	335.160.000,00	(335.160.000,00)	100,00
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	Ret. Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	12.000.000,00	12.073.500,00	100,61	73.500,00	12.300.000,00	(226.500,00)	(1,84)
	Jumlah	376.800.000,00	386.819.900,00	102,66	10.019.900,00	353.210.000,00	33.609.900,00	9,52
8.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	0,00	5.500.000,00	(750.000,00)	(13,64)
	Ret. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila							
	Ret. Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	122.150.000,00	88.894.000,00	72,77	(33.256.000,00)	100.031.000,00	(11.137.000,00)	(11,13)
	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga							
	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000,00	6.775.000,00	104,23	275.000,00	9.975.000,00	(3.200.000,00)	(32,08)
	Jumlah	133.400.000,00	100.419.000,00	75,28	(32.981.000,00)	115.506.000,00	(15.087.000,00)	(13,06)
9.	Dinas Perikanan							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	Ret. Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00	85.050.000,00	(20.250.000,00)	(23,81)
	Jumlah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00	0,00	87.450.000,00	(20.250.000,00)	(23,16)
10.	Dinas Perkebunan dan Peternakan							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	0,00	4.200.000,00	1.200.000,00	28,57
	Ret. Pemakaian Ruangan	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00	∞
	Ret. Rumah Potong Hewan							
	Ret. Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.365.500,00	5.376.000,00	100,20	10.500,00	5.056.000,00	320.000,00	6,33
	Jumlah	11.265.500,00	11.276.000,00	100,09	10.500,00	9.256.000,00	2.020.000,00	21,82
11.	Sekretariat Daerah							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	37.200.000,00	39.350.000,00	105,78	2.150.000,00	39.550.000,00	(200.000,00)	(0,51)
	Ret. Pemakaian Ruangan	11.000.000,00	14.000.000,00	127,27	3.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00
	Jumlah	48.200.000,00	53.350.000,00	110,68	5.150.000,00	47.550.000,00	5.800.000,00	12,20
12.	BPKD							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah:							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	90.900.000,00	98.350.000,00	108,20	7.450.000,00	90.600.000,00	7.750.000,00	8,55
	Ret. Penyewaan Tanah	72.045.000,00	79.789.500,00	110,75	7.744.500,00	72.045.000,00	7.744.500,00	10,75

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)		
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Ret. Pemakaian Ruang	6.000.000,00	7.000.000,00	116,67	1.000.000,00	6.750.000,00	250.000,00	3,70
	Jumlah	168.945.000,00	185.139.500,00	109,59	16.194.500,00	169.395.000,00	15.744.500,00	9,29
	Jumlah Keseluruhan	1.223.658.500,00	1.236.243.800,00	101,03	12.585.300,00	1.255.103.700,00	(18.859.900,00)	(1,50)

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dasar hukum pemungutan retribusi ini adalah Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp225.191.728,00 atau 101,19% dari target sebesar Rp222.550.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha melebihi target sebesar Rp2.641.728,00 atau 1,19%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp158.944.032,50 terlihat penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp66.247.695,50 atau 41,68%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut.

Tabel 60. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)		
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22.550.000,00	22.609.000,00	100,26	59.000,00	8.232.000,00	14.377.000,00	174,65
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	202.582.728,00	101,29	2.582.728,00	150.712.032,50	51.870.695,50	34,42
	Jumlah	222.550.000,00	225.191.728,00	101,19	2.641.728,00	158.944.032,50	66.247.695,50	41,68

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 antara lain:

a. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perikanan.

Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.609.000,00 atau 100,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.550.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi ini melebihi target sebesar Rp59.000,00 atau 0,26%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.377.000,00 atau 174,65 jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp8.232.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya izin usaha perikanan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Melakukan pendataan terhadap wajib retribusi perizinan usaha perikanan yang ada di Kabupaten Lampung Barat
- 3) Mengintensifkan penagihan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Lampung Barat.

Walaupun realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Masih banyak wajib retribusi yang belum memiliki kesadaran memiliki izin usaha perikanan.
- 2) Usaha perikanan yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagian besar dimiliki oleh perorangan/keluarga yang diusahakan di lahan milik pribadi, sehingga masih beranggapan tidak memerlukan izin.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan atas usaha perikanan di Kabupaten Lampung Barat.

b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2023 adalah sebesar Rp202.582.728,00 atau 101,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi ini melebihi target sebesar Rp2.582.728,00 atau 1,29%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp51.870.695,50 atau 34,42% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2022 sebesar Rp150.712.032,50.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang Perizinan Bangunan Gedung dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 2) Perbaiki tarif retribusi perizinan bangunan gedung yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mempermudah pengurusan Perizinan Bangunan Gedung dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 4) Perbaiki tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi bangunan gedung.

Walaupun realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan perizinan bangunan gedung, sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 2) Peraturan Daerah tentang Perizinan Bangunan Gedung masih tergolong baru, sehingga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.
- 3) Kurangnya sanksi atas pelanggaran pendirian bangunan gedung.
- 4) Kurangnya tenaga ahli yang dapat dijadikan tenaga teknis dalam penerbitan Perizinan Bangunan Gedung.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut.

Tabel 61. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dinas PU PR							
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	202.582.728,00	101,29	2.582.728,00	150.712.032,50	51.870.695,50	34,42
	Jumlah	200.000.000,00	202.582.728,00	101,29	2.582.728,00	150.712.032,50	51.870.695,50	34,42
2	Dinas Perikanan							
	Retribusi Izin Usaha Perikanan							
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22.550.000,00	22.609.000,00	100,26	59.000,00	8.232.000,00	14.377.000,00	174,65
	Jumlah	22.550.000,00	22.609.000,00	100,26	59.000,00	8.232.000,00	14.377.000,00	174,65
	Jumlah Seluruhnya	222.550.000,00	225.191.728,00	101,19	2.641.728,00	158.944.032,50	66.247.695,50	41,68

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Tahun Anggaran 2023, pendapatan ini berasal dari hasil penempatan modal pada PT Bank Lampung, pembagian laba ditahan dari PT BPRS Lampung Barat.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp5.653.827.320,95 atau 100,00% dari target sebesar Rp5.653.827.321,00. Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp5.569.077.716,21 terlihat penerimaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp84.749.604,74 atau 1,52%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut.

Tabel 62. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) :							
	PT Bank Lampung	4.895.841.920,99	4.895.841.920,94	100,00	(0,05)	4.621.706.317,81	274.135.603,13	5,93
	PT BPR Syariah Lampung Barat	757.985.400,01	757.985.400,01	100,00	0,00	889.387.194,40	(131.401.794,39)	(14,77)
	Perumda Limau Kunci	0,00	0,00	0,00	0,00	57.984.204,00	(57.984.204,00)	(100,00)
	Jumlah	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	100,00	(0,05)	5.569.077.716,21	84.749.604,74	1,52

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – PT Bank Lampung

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung Tahun Anggaran 2023, ditargetkan sebesar Rp4.895.841.920,99. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.895.841.920,94 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.621.706.317,81 terjadi kenaikan sebesar Rp274.135.603,13 atau 5,93%. Target dan realisasi ini mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Lampung Tahun 2023.

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda).

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Tahun Anggaran 2023, ditargetkan sebesar Rp757.985.400,01 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp757.985.400,01 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp889.387.194,40 terjadi penurunan sebesar (Rp131.401.794,39) atau (14,77%). Target dan realisasi ini mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Tahun 2023. Deviden ini adalah deviden Tahun 2022 yang disetor pada tahun 2023.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan terdapat pada 4 (empat) perangkat daerah yaitu : 1) Dinas Kesehatan; 2) RSUD Alimuddin Umar; 3) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp45.934.048.371,89 atau 108,56% dari target sebesar Rp42.314.171.407,00, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target sebesar Rp3.620.572.964,89 atau 8,56%. Apabila realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp48.117.954.932,57 terlihat penerimaan Lain-lain PAD yang sah di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp2.183.906.560,68) atau (4,54%).

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut

Tabel 63. Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	200.563.588,00	∞	200.563.588,00	822.566.391,00	(622.002.803,00)	(75,62)
2.	Jasa Giro	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	89,78	(166.929.149,54)	1.687.009.599,55	(221.043.718,09)	(13,10)
3.	Pendapatan Bunga	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	123,35	404.200.322,21	1.444.452.054,83	690.617.621,38	47,81

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.850.186.524,00	1.886.726.648,86	101,97	36.540.124,86	1.468.411.311,94	418.315.336,92	28,49
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00	0,00	6.372.100,00	100,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	51.902.219,13	(51.902.219,13)	(100,00)
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	532.866,00	1.376.257,00	258,27	843.391,00	71.216,00	1.305.041,00	1.832,51
8.	Pendapatan dari Pengembalian	452.041.200,00	269.290.804,00	59,57	(182.750.396,00)	773.942.636,70	(504.651.832,70)	(65,21)
9.	Pendapatan BLUD	36.600.699.432,00	39.956.934.804,00	109,17	3.356.235.372,00	41.837.795.716,00	(1.880.860.912,00)	(4,50)
10.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	30,67	(28.130.387,64)	31.803.787,42	(19.359.175,06)	(60,87)
Jumlah		42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	108,56	3.620.572.964,89	48.117.954.932,57	(2.183.210.560,68)	(4,54)

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Dipisahkan.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam merupakan penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp200.563.588,00. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp822.566.391,00, maka realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp622.002.803,00) atau (75,62%).

Berikut rincian Penjualan BMD yang Dipisahkan berupa Peralatan dan Mesin tahun 2023:

1.	Kendaraan Double Cabin	Rp 57.500.000,00
2.	Kendaraan Roda Tiga	Rp 1.745.416,00
3.	Mobil Ambulance	Rp 35.089.023,00
4.	Motor Pengangkut Sampah	Rp 1.076.778,00
5.	Motor Pengangkut Sampah Hidrolik	Rp 1.221.545,00
6.	Sepeda Motor	Rp 76.363.651,00
7.	Truck Tangki Air	Rp 25.121.923,00
8.	Container Sampah	Rp 2.448.707,00
9.	Biaya Kliring atas Penjualan Peralatan dan Mesin	(Rp 3.455,00)
Jumlah		Rp 200.563.588,00

b. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.632.895.031,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.465.965.881,46 atau 89,78%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar (Rp166.929.149,54) atau (10,22%). Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.687.009.599,55, maka realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp221.043.718,09) atau (13,10%).

Berikut rincian sumber penerimaan jasa giro tahun 2023:

1. Jasa Giro sumber RKUD	Rp 1.419.187.108,77
2. Jasa Giro sumber Bendahara OPD	Rp 23.214.527,14
3. Jasa Giro sumber BOS	Rp 4.667.762,72
4. Jasa Giro sumber Lainnya-Lembaga/Organisasi/Badan Hukum	Rp 3.173.509,49
5. Jasa Giro sumber Lainnya-Sekolah	Rp 2.292.511,61
6. Jasa Giro sumber Pekon/Desa	Rp 13.430.461,73
Jumlah	<u>Rp 1.465.965.881,46</u>

c. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.730.869.354,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp2.135.069.676,21 atau 123,35%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga melebihi target sebesar Rp404.200.322,21 atau 23,35%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.444.452.054,83, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp690.617.621,38 atau 47,81%.

Rincian pendapatan bunga tahun 2023 di sajikan pada tabel berikut

Tabel 64. Rincian Pendapatan Bunga Tahun 2023

No	Uraian	Lembaga Keuangan Bank	Rekening	Nominal	Tanggal		Bunga
					Pembukaan	Penutupan	
1.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00574.8	10.000.000.000,00	08 Maret 2023	08 Des 2023	418.493.150,68
2.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00575.2	10.000.000.000,00	10 Maret 2023	10 Des 2023	420.068.493,15
3.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00576.1	10.000.000.000,00	03 April 2023	03 Juli 2023	137.123.287,67
4.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00577.6	10.000.000.000,00	03 April 2023	03 Juli 2023	137.123.287,67
5.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00578.1	10.000.000.000,00	5 Juli 2023	05 Des 2023	241.027.397,26
6.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00579.6	10.000.000.000,00	5 Juli 2023	05 Des 2023	241.027.397,26
7.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00580.4	10.000.000.000,00	5 Juli 2023	05 Des 2023	241.027.397,26
8.	Deposito	PT. Bank Lampung	387.04.01.00581.1	10.000.000.000,00	12 Juli 2023	12 Des 2023	241.027.397,26
9.	Remunerasi TDF	Kantor Pusat Bank Indonesia	519000289980	2.363.635.599,00	31 Des 2022	12 Okt 2023	58.151.868,00
Jumlah				82.363.635.599,00			2.135.069.676,21

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Anggaran 2023 ditargetkan Rp1.850.186.524,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.886.726.648,86 atau 101,97%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah over target sebesar Rp36.540.124,86 atau 1,97%.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp39.300.000,00; dan
- 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp1.847.426.648,86.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.468.411.311,94, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp418.315.336,92 atau 28,49%.

e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Anggaran 2023 ditargetkan Rp6.372.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.372.100,00 atau 100,00%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp6.372.100,00 atau 100,00%.

f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp51.902.219,13, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp51.902.219,13) atau (100,00%).

g. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp532.866,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.376.257,00 atau 258,27%, realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah melebihi target sebesar Rp843.391,00 atau 158,27%.

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp1.376.257,00 terdiri atas:

1. Denda PBB-P2 – (Perusahaan/Badan Hukum/Organisasi) sebesar Rp532.866,42
2. Denda PBB-P2 – (Perorangan/Pribadi) sebesar Rp843.390,58

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp71.216,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.305.041,00 atau 1.832,51%.

h. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp452.041.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp269.290.804,00 atau 59,57%, realisasi Pendapatan dari Pengembalian tidak mencapai target sebesar (Rp182.750.396,00) atau (40,43%).

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp269.290.804,00 terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp264.069.435,00;
- 2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp1.250.000,00;
- 3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa sebesar Rp1.381.369,00; dan
- 4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp2.590.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp773.942.636,70, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp504.651.832,70) atau (65,21%).

i. Pendapatan BLUD

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki 16 (enam belas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri atas : a) BLUD RSUD Alimuddin Umar yang mulai efektif menerapkan Pola Keuangan – BLUD (PPK-BLUD) pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/148/KPTS/03/2012; b) 15 (lima belas) PPK BLUD Puskesmas yang mulai efektif menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah (PPK BLUD) pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/382/KPTS/III.02/2020.

Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja seperti layanan kesehatan.

Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp36.600.699.432,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp39.956.934.804,00 atau 109,17%, realisasi Pendapatan dari Pengembalian melebihi target sebesar Rp3.356.235.372,00 atau 9,17%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BLUD Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp41.837.795.716,00, maka realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.880.860.912,00) atau (4,50%).

Pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 65. Pendapatan BLUD TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	RSUD ALimuddin Umar	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	118,01	3.710.857.661,00	30.966.099.862,00	(6.649.581.201,00)	(21,47)
2.	Puskesmas Sumberjaya	1.142.599.988,00	1.198.733.859,00	104,91	56.133.871,00	761.313.020,00	437.420.839,00	57,46
3.	Puskesmas Kebun Tebu	1.185.876.474,00	1.154.036.576,00	97,32	(31.839.898,00)	789.735.987,00	364.300.589,00	46,13
4.	Puskesmas Gedung Surian	980.324.000,00	980.846.506,00	100,05	522.506,00	581.958.021,00	398.888.485,00	68,54
5.	Puskesmas Air Hitam	513.099.153,00	504.953.499,00	98,41	(8.145.654,00)	290.459.836,00	214.493.663,00	73,85
6.	Puskesmas Fajar Bulan	1.372.557.634,00	1.513.985.675,00	110,30	141.428.041,00	835.240.393,00	678.745.282,00	81,26
7.	Puskesmas Sekincau	1.133.897.347,00	1.151.552.439,00	101,56	17.655.092,00	766.402.090,00	385.150.349,00	50,25
8.	Puskesmas Pagar Dewa	780.128.532,00	679.519.834,00	87,10	(100.608.698,00)	502.221.723,00	177.298.111,00	35,30
9.	Puskesmas Batu Ketulis	977.138.000,00	765.014.279,00	78,29	(212.123.721,00)	565.625.107,00	199.389.172,00	35,25
10.	Puskesmas Kenali	1.179.771.960,00	1.074.891.475,00	91,11	(104.880.485,00)	766.952.103,00	307.939.372,00	40,15
11.	Puskesmas Batu Brak	1.213.770.257,00	983.258.492,00	81,01	(230.511.765,00)	725.851.241,00	257.407.251,00	35,46
12.	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.232.600.000,00	1.164.970.210,00	94,51	(67.629.790,00)	903.093.503,00	261.876.707,00	29,00
13.	Puskesmas Srimulyo	1.030.159.977,00	1.025.885.343,00	99,59	(4.274.634,00)	763.632.886,00	262.252.457,00	34,34
14.	Puskesmas Liwa	1.602.200.000,00	1.602.465.772,00	100,02	265.772,00	1.307.484.904,00	294.980.868,00	22,56

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
15	Puskesmas Buay Nyerupa	1.150.030.000,00	1.364.775.025,00	118,67	214.745.025,00	975.219.319,00	389.555.706,00	39,95
16	Puskesmas Lombok	500.885.110,00	475.527.159,00	94,94	(25.357.951,00)	336.505.721,00	139.021.438,00	41,31
Jumlah		36.600.699.432,00	39.956.934.804,00	109,17	3.356.235.372,00	41.837.795.716,00	(1.880.860.912,00)	(4,50)

j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp40.575.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.444.612,36 atau 30,67%, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak mencapai target sebesar (Rp28.130.387,64) atau (69,33%).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp31.803.787,42, maka realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp19.359.175,06) atau (60,87%).

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 66. Lain-Lain PAD yang Sah Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Kesehatan:							
	Pendapatan BLUD	15.995.038.432,00	15.640.416.143,00	97,78	(354.622.289,00)	10.871.695.854,00	4.768.720.289,00	43,86
	Jumlah	15.995.038.432,00	15.640.416.143,00	97,78	(354.622.289,00)	10.871.695.854,00	4.768.720.289,00	43,86
2.	RSUD Alimuddin Umar:							
	Pendapatan BLUD	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	118,01	3.710.857.661,00	30.966.099.862,00	(6.649.581.201,00)	(21,47)
	Jumlah	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	118,01	3.710.857.661,00	30.966.099.862,00	(6.649.581.201,00)	(21,47)
3.	Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar							
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	30,67	(28.130.387,64)	31.803.787,42	(19.359.175,06)	(60,87)
	Jumlah	40.575.000,00	12.444.612,36	30,67	(28.130.387,64)	31.803.787,42	(19.359.175,06)	(60,87)
4.	BPKD							
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	200.563.588,00	100,00	200.563.588,00	822.566.391,00	(622.002.803,00)	(75,62)
	Jasa Giro	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	89,78	(166.929.149,54)	1.687.009.599,55	(221.043.718,09)	(13,10)
	Pendapatan Bunga	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	123,35	404.200.322,21	1.444.452.054,83	690.617.621,38	47,81
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.850.186.524,00	1.886.726.648,86	101,97	36.540.124,86	1.468.411.311,94	418.315.336,92	28,49
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00	0,00	6.372.100,00	∞
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	51.902.219,13	(51.902.219,13)	(100,00)
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	532.866,00	1.376.257,00	258,27	843.391,00	71.216,00	1.305.041,00	1.832,51
	Pendapatan dari Pengembalian	452.041.200,00	269.290.804,00	59,57	(182.750.396,00)	773.942.636,70	(504.651.832,70)	(65,21)
	Jumlah	5.672.896.975,00	5.965.364.955,53	105,16	292.467.980,53	6.248.355.429,15	(282.990.473,62)	(4,53)
	Jumlah	42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	108,56	3.620.572.964,89	48.117.954.932,57	(2.183.210.560,68)	(4,54)

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa Pemungutan oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok sebagian diberikan kepada Kabupaten/Kota.

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp917.087.678.010,00 atau 99,30% dari target sebesar Rp923.560.580.767,00, dengan demikian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer kurang dari target sebesar (Rp6.472.902.757,00) atau 0,70%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp941.241.799.959,00 terlihat penerimaan Pendapatan Transfer di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp24.154.121.949,00) atau (2,57%).

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer yang Sah Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut.

Tabel 67. Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:	850.778.668.525,00	855.646.664.112,00	100,57	4.867.995.587,00	870.256.487.463,00	(14.609.823.351,00)	(1,68)
	a. Dana Perimbangan	727.115.074.525,00	731.983.070.112,00	100,67	4.867.995.587,00	741.213.510.463,00	(9.230.440.351,00)	(1,25)
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559.480.000,00	(11.559.480.000,00)	(100,00)
	c. Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	100,00	0,00	0,00	5.893.114.000,00	∞
	d. Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	100,00	0,00	117.483.497.000,00	286.983.000,00	0,24
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah:							
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	84,42	(11.340.898.344,00)	70.985.312.496,00	(9.544.298.598,00)	(13,45)
	Jumlah	923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	99,30	(6.472.902.757,00)	941.241.799.959,00	(24.154.121.949,00)	(2,57)

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp855.646.664.112,00 terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp731.983.070.112,00, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp5.893.114.000,00, dan Dana Desa sebesar Rp117.770.480.000,00 masing-masing dijelaskan dibawah ini.

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Kabupaten Lampung Barat untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 68. Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)			
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)				(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	6.852.297.421,00	10.948.460.370,00	159,78	4.096.162.949,00	11.091.178.458,00	(142.718.088,00)	(1,29)	
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	12.618.632.104,00	12.618.632.104,00	100,00	0,00	16.349.151.617,00	(3.730.519.513,00)	(22,82)	
3	Dana Alokasi Umum	509.628.682.000,00	514.643.114.814,00	100,98	5.014.432.814,00	491.022.962.000,00	23.620.152.814,00	4,81	
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	54.384.361.000,00	54.035.898.900,00	99,36	(348.462.100,00)	93.382.823.627,00	(39.346.924.727,00)	(42,14)	
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	143.631.102.000,00	139.736.963.924,00	97,29	(3.894.138.076,00)	129.367.394.761,00	10.369.569.163,00	8,02	
Jumlah		727.115.074.525,00	731.983.070.112,00	100,67	4.867.995.587,00	741.213.510.463,00	(9.230.440.351,00)	(1,25)	

Untuk lebih rinci masing-masing penerimaan Dana Perimbangan pada TA 2023 dan 2022 dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 69. Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)			
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)				(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1.	DBH Pajak Bumi & Bangunan	1.923.733.142,00	6.089.005.142,00	316,52	4.165.272.000,00	6.008.201.797,00	80.803.345,00	1,34	
2.	DBH PPh Pasal 21	4.580.135.674,00	4.580.135.674,00	100,00	0,00	4.770.236.612,00	(190.100.938,00)	(3,99)	
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	167.793.417,00	167.793.417,00	100,00	0,00	231.130.390,00	(63.336.973,00)	(27,40)	
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau	180.635.188,00	111.526.137,00	61,74	(69.109.051,00)	81.609.659,00	29.916.478,00	36,66	
Jumlah		6.852.297.421,00	10.948.460.370,00	159,78	4.096.162.949,00	11.091.178.458,00	(142.718.088,00)	(1,29)	

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp6.852.297.421,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp10.948.460.370,00 atau 159,78%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tahun 2023 telah melebihi target sebesar Rp4.096.162.949,00 atau 59,78%. Adapun penerimaan melebihi target ini karena terdapat penerimaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit sebesar Rp4.165.272.000,00 berdasarkan PMK Nomor 159/2023 tgl 27 Desember 2023 yang belum dianggarkan pada APBD Perubahan dan belum memiliki Kode Rekening Pendapatan pada Aplikasi SIPD.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp142.718.088,00) atau (1,29%) jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp11.091.178.458,00.

5.1.1.2.1.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 70. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		+/-		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.456.819.873,00	7.456.819.873,00	100,00	0,00	9.638.662.372,00	(2.181.842.499,00)	(22,64)
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.083.850.360,00	3.083.850.360,00	100,00	0,00	3.426.815.492,00	(342.965.132,00)	(10,01)
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	253.164.497,00	253.164.497,00	100,00	0,00	386.410.301,00	(133.245.804,00)	(34,48)
4.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	69.384.010,00	69.384.010,00	100,00	0,00	842.900.452,00	(773.516.442,00)	(91,77)
5.	Provisi Sumber Daya Hutan	256.911.153,00	256.911.153,00	100,00	0,00	96.052.000,00	160.859.153,00	167,47
6.	SDA Perikanan	1.498.502.211,00	1.498.502.211,00	100,00	0,00	1.958.311.000,00	(459.808.789,00)	(23,48)
Jumlah		12.618.632.104,00	12.618.632.104,00	100,00	0,00	16.349.151.617,00	(3.730.519.513,00)	(22,82)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp12.618.632.104,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp12.618.632.104,00 atau 100,00%. Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp3.730.519.513,00) atau (22,82%) jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp16.349.151.617,00.

5.1.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, rincian dana DAU kepada Kabupaten Lampung Barat untuk TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 71. Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAU	509.628.682.000,00	514.643.114.814,00	100,98	5.014.432.814,00	491.022.962.000,00	23.620.152.814,00	4,81
Jumlah		509.628.682.000,00	514.643.114.814,00	100,98	5.014.432.814,00	491.022.962.000,00	23.620.152.814,00	4,81

Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp509.628.682.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp514.643.114.814,00 atau 100,98%, dengan demikian Penerimaan Transfer Dana Alokasi Umum tahun 2023 telah melebihi target sebesar Rp5.014.432.814,00 atau 0,98%.

Realisasi Penerimaan DAU Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp514.643.114.814,00 terdiri atas:

- 1) Realisasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp380.756.141.814,00;
- 2) Realisasi DAU untuk Penggajian PPPK sebesar Rp6.989.766.000,00;
- 3) Realisasi DAU untuk Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.000.000.000,00;

- 4) Realisasi DAU untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp56.968.257.000,00;
- 5) Realisasi DAU untuk Bidang Kesehatan sebesar Rp44.853.018.000,00;
- 6) Realisasi DAU untuk Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp24.075.932.000,00

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp23.620.152.814,00 atau 4,81% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp491.022.962.000,00.

5.1.1.2.1.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus diatur dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, DAK yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu jenis DAK Fisik (yaitu jenis DAK Fisik Reguler, Penugasan) dan DAK Non Fisik. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp198.015.463.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp193.772.862.824,00 atau 97,86%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 tidak mencapai target sebesar (Rp4.242.600.176,00) atau (2,14%).

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp28.977.355.564,00) atau (13,01%) jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp222.750.218.388,00.

Rincian penerimaan DAK periode TA. 2023 dan TA. 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 72. Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK Fisik	54.384.361.000,00	54.035.898.900,00	99,36	(348.462.100,00)	93.382.823.627,00	(39.346.924.727,00)	(42,14)
2	DAK Non Fisik	143.631.102.000,00	139.736.963.924,00	97,29	(3.894.138.076,00)	129.367.394.761,00	10.369.569.163,00	8,02
	Jumlah	198.015.463.000,00	193.772.862.824,00	97,86	(4.242.600.176,00)	222.750.218.388,00	(28.977.355.564,00)	(13,01)

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing – masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 73. Dana Alokasi Khusus per Bidang Kegiatan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK FISIK	54.384.361.000,00	54.035.898.900,00	99,36	(348.462.100,00)	93.382.823.627,00	(39.346.924.727,00)	(42,14)
	DAK FISIK REGULER :	54.021.336.000,00	53.675.040.900,00	99,36	(346.295.100,00)	81.117.889.066,00	(27.442.848.166,00)	(33,83)
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.063.229.000,00	1.059.863.000,00	99,68	(3.366.000,00)	43.603.170.553,00	(42.543.307.553,00)	(97,57)
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.328.863.000,00	4.201.354.000,00	97,05	(127.509.000,00)	0,00	4.201.354.000,00	∞
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.530.306.000,00	3.515.858.800,00	99,59	(14.447.200,00)	0,00	3.515.858.800,00	∞
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.615.295,00	(2.382.615.295,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.075.000,00	(1.442.075.000,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.200.000,00	(5.082.200.000,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	10.104.218.000,00	10.019.159.187,00	99,16	(85.058.813,00)	0,00	10.019.159.187,00	100,00
	- DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.319.365.000,00	2.302.102.913,00	99,26	(17.262.087,00)	0,00	2.302.102.913,00	∞
	- DAK Fisik Bidang Jalan	30.941.987.000,00	30.849.503.000,00	99,70	(92.484.000,00)	12.456.533.000,00	18.392.970.000,00	147,66
	- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	796.390.000,00	(796.390.000,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.733.368.000,00	1.727.200.000,00	99,64	(6.168.000,00)	0,00	1.727.200.000,00	∞
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354.905.218,00	(15.354.905.218,00)	(100,00)
	DAK PENUGASAN	363.025.000,00	360.858.000,00	99,40	(2.167.000,00)	12.264.934.561,00	(11.904.076.561,00)	(97,06)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.478.273,00	(10.578.478.273,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	363.025.000,00	360.858.000,00	99,40	(2.167.000,00)	567.038.348,00	(206.180.348,00)	(36,36)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.417.940,00	(1.119.417.940,00)	(100,00)
2	DAK NON FISIK	143.631.102.000,00	139.736.963.924,00	97,29	(3.894.138.076,00)	129.367.394.761,00	10.369.569.163,00	8,02
	- DAK Non Fisik-BOS Reguler	38.148.810.000,00	38.075.219.937,00	99,81	(73.590.063,00)	38.262.329.055,00	(187.109.118,00)	(0,49)
	- DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.550.000.000,00	1.550.428.750,00	100,03	428.750,00	0,00	1.550.428.750,00	∞
	- DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.483.862.000,00	61.436.351.940,00	99,92	(47.510.060,00)	56.873.202.610,00	4.563.149.330,00	8,02
	- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.167.250.000,00	1.430.574.321,00	66,01	(736.675.679,00)	2.167.718.000,00	(737.143.679,00)	(34,01)
	- DAK Non Fisik-TKG PNSD	306.340.000,00	297.750.063,00	97,20	(8.589.937,00)	200.819.588,00	96.930.475,00	48,27
	- DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.319.620.000,00	3.307.420.000,00	99,63	(12.200.000,00)	3.116.612.000,00	190.808.000,00	6,12
	- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.323.690.000,00	1.323.690.000,00	100,00		744.200.000,00	579.490.000,00	77,87
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.272.607.000,00	22.108.085.456,00	91,08	(2.164.521.544,00)	21.709.597.949,00	398.487.507,00	1,84
	- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	0,00	0,00	(338.918.000,00)	0,00	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.927.475.000,00	4.794.125.304,00	97,29	(133.349.696,00)	4.188.628.859,00	605.496.445,00	14,46
	- BOK & BOKB – Akreditasi Puskesmas							
	- DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	417.482.653,00	99,31	(2.887.347,00)	400.800.000,00	16.682.653,00	4,16
	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	991.160.000,00	977.853.000,00	98,66	(13.307.000,00)	0,00	977.853.000,00	∞
	- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.400.000,00	388.358.000,00	93,04	(29.042.000,00)	245.186.700,00	143.171.300,00	58,39
	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	229.205.100,00	52,23	(209.594.900,00)	451.800.000,00	(222.594.900,00)	(49,27)
	- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	774.800.000,00	650.419.400,00	83,95	(124.380.600,00)	1.006.500.000,00	(356.080.600,00)	(35,38)
	- DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	0,00	0,00	2.750.000.000,00	∞
	TOTAL DAK	198.015.463.000,00	193.772.862.824,00	97,86	(4.242.600.176,00)	222.750.218.388,00	(28.977.355.564,00)	(13,01)

Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp38.075.219.937,00 terdiri atas:

- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Negeri	Rp	23.429.457.016,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Negeri	Rp	11.233.854.121,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Swasta	Rp	2.413.898.800,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Swasta	Rp	998.010.000,00

Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp1.550.428.750,00 terdiri atas

- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Negeri	Rp	722.500.000,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Negeri	Rp	680.000.000,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Swasta	Rp	112.500.000,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Swasta	Rp	35.000.000,00
- Penerimaan BOS Kinerja berupa penyesuaian saldo awal tahun sebesar Rp428.750,00 atas Saldo BOS Kinerja tahun lalu tidak dicatat sebagai unsur SILPA tetapi masih dicatat sebagai kas lainnya, hal ini karena tahun lalu BOS Kinerja tidak masuk dalam APBD, sementara pada Tahun 2023 masuk dalam APBD.	Rp	428.750,00

Pendapatan BOS pada Sekolah Negeri akan dibelanjakan berupa belanja Barang dan Jasa Bos, Belanja Modal BOS, sedangkan pendapatan yang diterima oleh Sekolah Swasta langsung dibelanjakan berupa Belanja Hibah Dana BOS senilai jumlah yang diterima dengan bukti belanja yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan Pasal 12 Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu dana transfer umum dari Pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif /penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan / pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp0,00 atau 0,00%.

Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 juga mengalami penurunan sebesar (Rp11.559.480.000,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp11.559.480.000,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 74. Dana Insentif Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	11.559.480.000,00	(11.559.480.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	11.559.480.000,00	(11.559.480.000,00)	(100,00)

5.1.1.2.1.3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah hanya mencatat penerimaan dan langsung mencatat pengeluarannya, adapun uang secara fisik langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa.

Penerimaan Dana Desa diatur dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dan PMK 98 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp117.770.480.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp117.770.480.000,00 atau 100,00%, dengan demikian Penerimaan Dana Desa tahun 2023 telah mencapai target 100%.

Realisasi Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp286.983.000,00 atau 0,24% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp117.483.497.000,00.

Rincian penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 75. Dana Desa/ Pekon TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	100,00	0,00	117.483.497.000,00	286.983.000,00	0,24
	Rincian :							
	- 201/PMK.07/2022	114.000.146.000,00	114.000.146.000,00	100,00	0,00	0,00	114.000.146.000,00	∞
	- PMK 98 Tahun 2023	3.770.334.000,00	3.770.334.000,00	100,00	0,00	0,00	3.770.334.000,00	∞
	- Perpres 104/ 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	117.483.497.000,00	117.483.497.000,00	(100,00)
	Jumlah	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	100,00	0,00	117.483.497.000,00	286.983.000,00	0,24

5.1.1.2.1.4. Insentif Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja berdasarkan kriteria pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan Umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Penerimaan Insentif Fiskal pada Kabupaten Lampung Barat kategori kinerja percepatan belanja daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.893.114.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp5.893.114.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Penerimaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 juga mengalami peningkatan sebesar Rp5.893.114.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 76. Insentif Fiskal TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Insentif Daerah – Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	100,00	0,00	0,00	5.893.114.000,00	100,00
	Jumlah	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	100,00	0,00	0,00	5.893.114.000,00	100,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Transfer Antar Daerah adalah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi dana bantuan untuk pembangunan berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (BH PKB), Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BH BBN KB), Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BH BBKB), Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (BH PAP), dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp72.781.912.242,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp61.441.013.898,00 atau 84,42%, dengan demikian Penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 tidak mencapai sebesar (Rp11.340.898.344,00) atau (15,58%).

Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp9.544.298.598,00) atau (13,45%) jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp70.985.312.496,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung TA 2023 dan 2022 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 77. Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak Provinsi	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	84,42	(11.340.898.344,00)	70.985.312.496,00	(9.544.298.598,00)	(13,45)
	Jumlah	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	84,42	(11.340.898.344,00)	70.985.312.496,00	(9.544.298.598,00)	(13,45)

Berikut disajikan tabel dasar hukum penganggaran Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Tabel 78. Dasar Hukum Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023

No	Keputusan Gubernur Lampung			APBD Perubahan	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)
	Nomor	Uraian	Nominal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 = 5-6
1.	G/475/VI.03/HK/2022	BH Pajak TW II 2022	12.666.107.413,00	3.066.222.677,00	3.066.222.677,00	0,00
2.	G/721/VI.03/HK/2022	BH Pajak TW III 2022	13.823.045.404,00	13.823.045.404,00	13.823.045.404,00	0,00
3.	G/190/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW IV 2022	15.529.863.868,00	15.529.863.868,00	15.529.863.868,00	0,00
4.	G/349/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW I 2023	14.789.537.829,00	14.572.790.165,00	6.306.271.316,00	8.266.518.849,00
5.	G/460/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW II 2023	14.650.377.960,00	0,00	0,00	0,00
6.	G/695/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW III 2023	16.167.655.477,00	0,00	0,00	0,00
7.	G/781/VI.03/HK/2022	Target Pajak Rokok Tahun 2023	25.789.990.128,00	25.789.990.128,00	0,00	25.789.990.128,00
8.	G/15/VI.03/HK/2023	Pajak Rokok TW IV 2022	4.443.781.709,00	0,00	4.443.781.709,00	(4.443.781.709,00)
9.	G/292/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok Desember 2022	2.084.499.278,00	0,00	2.084.499.278,00	(2.084.499.278,00)
10.	G/291/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW I 2023	6.170.964.450,00	0,00	6.170.964.450,00	(6.170.964.450,00)
11.	G/438/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW II 2023	5.298.712.925,00	0,00	5.298.712.925,00	(5.298.712.925,00)
12.	G/696/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW III 2023	4.717.652.271,00	0,00	4.717.652.271,00	(4.717.652.271,00)
13.	G/819/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW IV 2023	3.991.838.697,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	72.781.912.242,00	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	(11.340.898.344,00)

Kekurangan realisasi DBH Pajak Provinsi tersebut yaitu SK Gubernur Nomor G/349/VI.03/HK/2023 Rp8.266.518.849,00 dan DBH Pajak Rokok Rp3.074.379.495,00 (menggunakan SK Gubernur nomor G/781/VI.03/HK/2022, dimana Keputusan Gubernur ini

telah direvisi dengan 5 (lima) SK Gubernur terkait Pajak rokok sebagaimana tercantum pada tabel diatas).

Rincian penerimaan DBH Pajak Daerah masing – masing akun dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 79. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Bagi Hasil PKB	14.291.521.446,00	14.291.521.446,00	100,00	0,00	10.419.109.308,00	3.872.412.138,00	37,17
2.	Bagi Hasil BBN KB	7.910.739.159,00	7.910.739.159,00	100,00	0,00	9.854.119.544,00	(1.943.380.385,00)	(19,72)
3.	Bagi Hasil PBB KB	24.386.081.685,00	16.119.562.836,00	66,10	(8.266.518.849,00)	26.795.254.925,00	(10.675.692.089,00)	(39,84)
4.	Bagi Hasil PAP	403.579.824,00	403.579.824,00	100,00	0,00	460.203.754,00	(56.623.930,00)	(12,30)
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00	22.715.610.633,00	88,08	(3.074.379.495,00)	23.456.624.965,00	(741.014.332,00)	(3,16)
Jumlah		72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	84,42	(11.340.898.344,00)	70.985.312.496,00	(9.544.298.598,00)	(13,45)

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Hibah sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp12.722.026.000,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp12.722.026.000,00.

Rincian Pendapatan Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 80. Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722.026.000,00	(12.722.026.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	12.722.026.000,00	(12.722.026.000,00)	(100,00)

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan

fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.017.174.385.750,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp984.409.205.393,00 atau 96,78%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar (Rp32.765.180.356,20) atau (3,22%). Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp97.180.790.142,25) atau (8,98%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.081.589.995.536,05.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 81. Belanja Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
I.	Belanja Operasi							
1.	Belanja Pegawai	432.656.812.843,00	413.304.423.702,00	95,53	(19.352.389.141,00)	395.256.776.924,00	18.047.646.778,00	4,57
2.	Belanja Barang & Jasa	254.637.081.677,00	243.673.449.949,80	95,69	(10.963.631.727,20)	293.591.618.382,05	(49.918.168.432,25)	(17,00)
3.	Belanja Bunga	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	(165.430.563,00)	4.469.946.021,00	(914.446.959,00)	(20,46)
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500.000,00	(522.500.000,00)	(100,00)
5.	Belanja Hibah	32.601.367.155,00	32.310.714.788,00	99,11	(290.652.367,00)	19.513.941.922,00	12.796.772.866,00	65,58
6.	Belanja Bantuan Sosial	292.000.000,00	244.550.000,00	83,75	(47.450.000,00)	1.926.261.500,00	(1.681.711.500,00)	(87,30)
	Sub Jumlah	723.908.191.300,00	693.088.637.501,80	95,74	(30.819.553.798,20)	715.281.044.749,05	(22.192.407.247,25)	(3,10)
II.	Belanja Modal							
1.	Peralatan dan Mesin	23.927.641.926,00	23.471.410.062,00	98,09	(456.231.864,00)	37.544.778.356,00	(14.073.368.294,00)	(37,48)
2.	Gedung dan Bangunan	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27	(355.273.795,00)	41.842.220.791,00	(21.713.703.611,00)	(51,89)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53	(319.906.199,00)	107.650.228.900,00	(40.232.062.155,00)	(37,37)
4.	Aset Tetap Lainnya	5.995.006.510,00	5.836.651.645,00	97,36	(158.354.865,00)	3.821.418.300,00	2.015.233.345,00	52,74
5.	Aset Lainnya	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	702.641.575,00	(549.961.075,00)	(78,27)
	Sub Jumlah	118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91	(1.292.086.223,00)	191.561.287.922,00	(74.553.861.790,00)	(38,92)
III.	Belanja Tak Terduga							
6.	Belanja Tak Terduga	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	2.417.830.965,00	(909.698.605,00)	(37,62)
	Sub Jumlah	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	2.417.830.965,00	(909.698.605,00)	(37,62)
IV.	Belanja Transfer							
1.	Belanja Transfer	173.353.540.200,00	172.805.009.400,00	99,68	(548.530.800,00)	172.329.831.900,00	475.177.500,00	0,28
	Sub Jumlah	173.353.540.200,00	172.805.009.400,00	99,68	(548.530.800,00)	172.329.831.900,00	475.177.500,00	0,28
	Jumlah	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78	(32.765.180.356,20)	1.081.589.995.536,05	(97.180.790.142,25)	(8,98)

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Anggaran Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut. Rincian realisasi belanja daerah terdapat pada lampiran 3.

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp723.908.191.300,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 mencapai Rp693.088.637.501,80 atau 95,74%. Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif

Belanja Pegawai Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp432.656.812.843,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 sebesar Rp413.304.423.702,00 atau 95,53%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.047.646.778,00 atau 4,57% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp395.256.776.924,00.

Kenaikan belanja pegawai sebesar 4,57% ini dari tahun 2022 disebabkan salah satunya dengan adanya penambahan formasi PPPK dan adanya kenaikan pangkat PNS.

5.1.2.1.1.1. Belanja Pegawai ASN (PNS dan PPPK)

Berikut rincian realisasi belanja pegawai ASN (PNS dan PPPK) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Tabel 82. Belanja Pegawai ASN (PNS dan PPPK) TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi				(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Belanja Pegawai PNS							
1.	Gaji dan Tunjangan PNS	260.419.927.486,00	252.930.273.740,00	97,12	(7.489.653.746,00)	253.564.511.739,00	(634.237.999,00)	(0,25)
	Gaji Pokok PNS	197.418.404.564,00	192.141.748.920,00	97,33	(5.276.655.644,00)	192.119.746.261,00	22.002.659,00	0,01
	Tunjangan Keluarga PNS	18.473.263.364,00	17.988.719.795,00	97,38	(484.543.569,00)	18.223.788.908,00	(235.069.113,00)	(1,29)
	Tunjangan Jabatan PNS	5.504.354.600,00	5.351.270.000,00	97,22	(153.084.600,00)	5.429.210.000,00	(77.940.000,00)	(1,44)
	Tunjangan Fungsional PNS	14.889.772.700,00	14.464.273.000,00	97,14	(425.499.700,00)	14.079.180.000,00	385.093.000,00	2,74
	Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.413.345.200,00	2.358.861.600,00	97,74	(54.483.600,00)	2.545.875.000,00	(187.013.400,00)	(7,35)
	Tunjangan Beras PNS	11.067.761.520,00	10.776.096.000,00	97,36	(291.665.520,00)	11.105.100.060,00	(329.004.060,00)	(2,96)
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	322.222.605,00	313.680.434,00	97,35	(8.542.171,00)	297.370.772,00	16.309.662,00	5,48
	Pembulatan Gaji PNS	2.813.501,00	2.706.390,00	96,19	(107.111,00)	2.734.604,00	(28.214,00)	(1,03)
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.647.531.992,00	7.953.605.237,00	91,98	(693.926.755,00)	8.179.921.161,00	(226.315.924,00)	(2,77)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	478.139.573,00	395.098.088,00	82,63	(83.041.485,00)	395.396.241,00	(298.153,00)	(0,08)
	Iuran Jaminan Kematian PNS	1.202.317.867,00	1.184.214.276,00	98,49	(18.103.591,00)	1.186.188.732,00	(1.974.456,00)	(0,17)
2.	Tambahan Penghasilan PNS	49.631.194.167,00	46.978.746.776,00	94,66	(2.652.447.391,00)	41.984.169.155,00	4.994.577.621,00	11,90
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.614.394.167,00	46.961.946.776,00	94,65	(2.652.447.391,00)	41.516.025.839,00	5.445.920.937,00	13,12
	Tambahan Penghasilan berdasarkan	0,00	0,00	0,00	0,00	451.343.316,00	(451.343.316,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Tempat Bertugas PNS							
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	68.388.884.000,00	66.759.299.747,00	97,62	(1.629.584.253,00)	67.744.215.305,00	(984.915.558,00)	(1,45)
	TPG PNSD	61.483.862.000,00	60.231.760.240,00	97,96	(1.252.101.760,00)	59.496.809.240,00	734.951.000,00	1,24
	TKG PNSD	306.340.000,00	282.931.800,00	92,36	(23.408.200,00)	352.471.800,00	(69.540.000,00)	(19,73)
	Tamsil Guru PNSD	2.167.250.000,00	1.846.900.000,00	85,22	(320.350.000,00)	1.779.787.500,00	67.112.500,00	3,77
	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.535.392.000,00	2.534.925.547,00	99,98	(466.453,00)	910.634.765,00	1.624.290.782,00	178,37
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.885.730.000,00	1.861.020.000,00	98,69	(24.710.000,00)	5.198.760.000,00	(3.337.740.000,00)	(64,20)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	680.000,00	50,00	(680.000,00)	2.512.000,00	(1.832.000,00)	(72,93)
	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.750.000,00	0,00		(1.750.000,00)	3.240.000,00	(3.240.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000,00	1.082.160,00	15,03	(6.117.840,00)	0,00	1.082.160,00	∞
	Sub Jumlah	378.440.005.653,00	366.668.320.263,00	96,89	(11.771.685.390,00)	363.292.896.199,00	3.375.424.064,00	0,93
	Belanja Pegawai PPPK							
1.	Gaji dan Tunjangan PPPK	37.638.822.970,00	30.578.340.177,00	81,24	(7.060.482.793,00)	14.288.294.024,00	16.290.046.153,00	114,01
	Gaji Pokok PPPK	28.665.925.104,00	23.749.499.600,00	82,85	(4.916.425.504,00)	11.356.826.953,00	12.392.672.647,00	109,12
	Tunjangan Keluarga PPPK	3.294.028.804,00	2.408.710.060,00	73,12	(885.318.744,00)	974.634.094,00	1.434.075.966,00	147,14
	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.048.227.802,00	1.496.980.000,00	73,09	(551.247.802,00)	719.075.000,00	777.905.000,00	108,18
	Tunjangan Beras PPPK	1.885.931.804,00	1.773.855.480,00	94,06	(112.076.324,00)	748.533.120,00	1.025.322.360,00	136,98
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	519.554.670,00	0,00		(519.554.670,00)	0,00	0,00	0,00
	Pembulatan Gaji PPPK	448.700,00	426.406,00	95,03	(22.294,00)	98.449,00	327.957,00	333,12
	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	969.522.726,00	952.549.147,00	98,25	(16.973.579,00)	383.580.941,00	568.968.206,00	148,33
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	70.309.838,00	49.079.868,00	69,81	(21.229.970,00)	26.386.364,00	22.693.504,00	86,00
	Iuran Jaminan Kematian PPPK	184.873.522,00	147.239.616,00	79,64	(37.633.906,00)	79.159.103,00	68.080.513,00	86,00
2.	Tambahan Penghasilan PPPK	436.150.000,00	431.925.000,00	99,03	(4.225.000,00)	446.175.000,00	(14.250.000,00)	(3,19)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	436.150.000,00	431.925.000,00	99,03	(4.225.000,00)	446.175.000,00	(14.250.000,00)	(3,19)
	Sub Jumlah	38.074.972.970,00	31.010.265.177,00	81,45	(7.064.707.793,00)	14.734.469.024,00	16.275.796.153,00	110,46
	Jumlah	416.514.978.623,00	397.678.585.440,00	95,48	(18.836.393.183,00)	378.027.365.223,00	19.651.220.217,00	5,20

5.1.2.1.1.2. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Berikut rincian realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Tabel 83. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Gaji dan Tunjangan DPRD							
	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	780.465.000,00	99,80	(1.575.000,00)	769.440.000,00	11.025.000,00	1,43
	Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	62.212.500,00	56,82	(47.273.100,00)	60.385.500,00	1.827.000,00	3,03
	Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00	89.511.120,00	73,57	(32.154.480,00)	86.831.580,00	2.679.540,00	3,09

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Uang Paket DPRD	84.000.000,00	78.046.500,00	92,91	(5.953.500,00)	76.944.000,00	1.102.500,00	1,43
	Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.131.674.250,00	99,80	(2.283.750,00)	1.115.688.000,00	15.986.250,00	1,43
	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	100.119.600,00	80,23	(24.664.500,00)	99.343.125,00	776.475,00	0,78
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000,00	0,00		(20.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.639.700.000,00	99,76	(6.300.000,00)	2.608.200.000,00	31.500.000,00	1,21
	Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00		648.900.000,00	12.600.000,00	1,94
	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	971.465,00	4,86	(19.028.535,00)	555.768,00	415.697,00	74,80
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	108.000.000,00	67.833.360,00	62,81	(40.166.640,00)	66.843.000,00	990.360,00	1,48
	Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	60.000.000,00	1.604.988,00	2,67	(58.395.012,00)	6.344.352,00	(4.739.364,00)	(74,70)
	Jaminan Kematian DPRD	12.000.000,00	4.814.964,00	40,12	(7.185.036,00)	0,00	4.814.964,00	∞
	Tunjangan Perumahan DPRD	3.840.000.000,00	3.717.512.324,00	96,81	(122.487.676,00)	3.610.837.550,00	106.674.774,00	2,95
	Tunjangan Transportasi DPRD	4.685.300.000,00	4.672.612.191,00	99,73	(12.687.809,00)	4.554.582.575,00	118.029.616,00	2,59
	Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	12.600.000,00	63,00	(7.400.000,00)	3.150.000,00	9.450.000,00	300,00
	Sub Jumlah	14.428.733.300,00	14.021.178.262,00	97,18	(407.555.038,00)	13.708.045.450,00	313.132.812,00	0,93
2.	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD							
	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	0,00	110.880.000,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	0,00	110.880.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	14.539.613.300,00	14.132.058.262,00	97,20	(407.555.038,00)	13.818.925.450,00	313.132.812,00	2,27

5.1.2.1.1.3. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Berikut rincian realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Tabel 84. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	74.017.920,00	0,00	0,00	(74.017.920,00)	159.271.462,00	(159.271.462,00)	(100,00)
	Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	0,00	0,00	(55.965.000,00)	54.600.000,00	(54.600.000,00)	(100,00)
	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000,00	0,00	0,00	(2.583.000,00)	2.520.000,00	(2.520.000,00)	(100,00)
	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	8.190.000,00	0,00	0,00	(8.190.000,00)	98.280.000,00	(98.280.000,00)	(100,00)
	Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.700,00	0,00	0,00	(3.117.700,00)	3.041.640,00	(3.041.640,00)	(100,00)
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	848.600,00	0,00	0,00	(848.600,00)	827.862,00	(827.862,00)	(100,00)
	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.100,00	0,00	0,00	(2.100,00)	1.960,00	(1.960,00)	(100,00)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	161.000,00	0,00	0,00	(161.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.669.520,00	0,00	0,00	(2.669.520,00)	0,00	0,00	0,00
	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	481.000,00	0,00	0,00	(481.000,00)	0,00	0,00	0,00
2.	Penerimaan Lainnya Pimpinan KDH/WKDH	400.000.000,00	390.000.000,00	97,50	(10.000.000,00)	400.000.000,00	(10.000.000,00)	(2,50)
	Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	390.000.000,00	97,50	(10.000.000,00)	400.000.000,00	(10.000.000,00)	(2,50)
	Jumlah	474.017.920,00	390.000.000,00	82,28	(84.017.920,00)	559.271.462,00	(169.271.462,00)	(30,27)

5.1.2.1.1.4. Belanja Pegawai BLUD

Berikut rincian realisasi belanja Pegawai BLUD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Tabel 85. Belanja Pegawai BLUD TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Pegawai BLUD							
	Belanja Pegawai BLUD	1.128.203.000,00	1.103.780.000,00	97,84	(24.423.000,00)	2.851.214.789,00	(1.747.434.789,00)	(61,29)
	Jumlah	1.128.203.000,00	1.103.780.000,00	97,84	(24.423.000,00)	2.851.214.789,00	(1.747.434.789,00)	(61,29)

Belanja pegawai untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 86. Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	219.086.539.378,00	213.378.435.941,00	97,39	(5.708.103.437,00)	194.570.496.434,00	18.807.939.507,00	9,67
2.	Dinas Kesehatan	43.213.333.168,00	42.329.680.292,00	97,96	(883.652.876,00)	36.857.441.111,00	5.472.239.181,00	14,85
3.	RSUD Alimuddin Umar	15.216.563.861,00	14.844.272.190,00	97,55	(372.291.671,00)	11.312.174.003,00	3.532.098.187,00	31,22
4.	Dinas PU PR	5.333.580.600,00	5.196.513.075,00	97,43	(137.067.525,00)	4.895.481.080,00	301.031.995,00	6,15
5.	Satpol PP	8.124.430.713,00	7.910.766.245,00	97,37	(213.664.468,00)	8.025.137.855,00	(114.371.610,00)	(1,43)
6.	BPBD	2.080.513.600,00	2.025.205.130,00	97,34	(55.308.470,00)	1.994.113.310,00	31.091.820,00	1,56
7.	Dinas Sosial	2.398.477.286,00	2.336.454.656,00	97,41	(62.022.630,00)	2.368.694.217,00	(32.239.561,00)	(1,36)
8.	Dinas PP, KB PP dan PA	2.578.985.754,00	2.543.217.803,00	98,61	(35.767.951,00)	2.569.749.604,00	(26.531.801,00)	(1,03)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	2.078.184.609,00	2.004.872.645,00	96,47	(73.311.964,00)	2.074.472.243,00	(69.599.598,00)	(3,36)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	3.089.252.513,00	3.003.014.704,00	97,21	(86.237.809,00)	3.104.576.689,00	(101.561.985,00)	(3,27)
11.	Disduk dan Capil	2.914.136.901,00	2.841.904.081,00	97,52	(72.232.820,00)	2.943.323.932,00	(101.419.851,00)	(3,45)
12.	Dinas PMP	2.121.384.844,00	2.038.417.727,00	96,09	(82.967.117,00)	2.017.660.107,00	20.757.620,00	1,03
13.	Dinas Perhubungan	2.065.939.454,00	2.013.050.250,00	97,44	(52.889.204,00)	2.107.274.940,00	(94.224.690,00)	(4,47)
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.547.692.768,00	2.448.657.101,00	96,11	(99.035.667,00)	2.334.312.897,00	114.344.204,00	4,90
15.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2.972.112.402,00	2.886.435.019,00	97,12	(85.677.383,00)	2.988.173.355,00	(101.738.336,00)	(3,40)
16.	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker	1.743.600.761,00	1.667.752.074,00	95,65	(75.848.687,00)	2.050.311.150,00	(382.559.076,00)	(18,66)
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.843.029.100,00	3.660.061.147,00	95,24	(182.967.953,00)	3.878.318.421,00	(218.257.274,00)	(5,63)
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.873.253.465,00	1.819.116.685,00	97,11	(54.136.780,00)	1.752.851.477,00	66.265.208,00	3,78
19.	Dinas Perikanan	2.539.271.050,00	2.472.318.479,00	97,36	(66.952.571,00)	2.576.909.901,00	(104.591.422,00)	(4,06)
20.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.480.018.650,00	7.309.092.537,00	97,71	(170.926.113,00)	7.759.159.580,00	(450.067.043,00)	(5,80)
21.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.285.154.025,00	4.168.910.538,00	97,29	(116.243.487,00)	3.371.106.067,00	797.804.471,00	23,67
22.	Sekretariat Daerah	39.343.933.174,00	32.167.990.258,00	81,76	(7.175.942.916,00)	40.883.667.479,00	(8.715.677.221,00)	(21,32)
23.	Sekretariat DPRD	17.403.150.561,00	16.921.043.395,00	97,23	(482.107.166,00)	16.566.712.530,00	354.330.865,00	2,14
24.	BAPPEDA	2.640.746.100,00	2.573.080.060,00	97,44	(67.666.040,00)	2.597.400.723,00	(24.320.663,00)	(0,94)
25.	BPKD	18.244.357.981,00	15.908.654.167,00	87,20	(2.335.703.814,00)	16.750.130.018,00	(841.475.851,00)	(5,02)
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.278.417.900,00	2.220.960.393,00	97,48	(57.457.507,00)	2.183.953.549,00	37.006.844,00	1,69
27.	Badan Penelitian dan	2.058.029.200,00	2.003.930.109,00	97,37	(54.099.091,00)	1.874.524.256,00	129.405.853,00	6,90

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Pengembangan							
28.	Inspektorat	6.188.606.652,00	5.965.152.927,00	96,39	(223.453.725,00)	5.926.396.730,00	38.756.197,00	0,65
29.	Kec. Sumber Jaya	441.677.500,00	441.240.000,00	99,90	(437.500,00)	391.900.000,00	49.340.000,00	12,59
30.	Kec. Way Tenong	414.358.750,00	391.340.000,00	94,44	(23.018.750,00)	420.032.610,00	(28.692.610,00)	(6,83)
31.	Kec. Sekincau	408.748.500,00	395.383.500,00	96,73	(13.365.000,00)	431.065.000,00	(35.681.500,00)	(8,28)
32.	Kec. Belalau	386.700.000,00	353.720.000,00	91,47	(32.980.000,00)	392.300.000,00	(38.580.000,00)	(9,83)
33.	Kec. Batu Brak	326.640.000,00	300.190.000,00	91,90	(26.450.000,00)	362.718.177,00	(62.528.177,00)	(17,24)
34.	Kec. Balik Bukit	599.736.250,00	598.092.750,00	99,73	(1.643.500,00)	677.743.302,00	(79.650.552,00)	(11,75)
35.	Kec. Sukau	369.847.125,00	357.467.125,00	96,65	(12.380.000,00)	375.779.023,00	(18.311.898,00)	(4,87)
36.	Kec. Suoh	305.338.750,00	292.920.000,00	95,93	(12.418.750,00)	322.850.000,00	(29.930.000,00)	(9,27)
37.	Kec. Gedung Surian	295.825.000,00	274.220.000,00	92,70	(21.605.000,00)	300.810.000,00	(26.590.000,00)	(8,84)
38.	Kec. Kebun Tebu	318.040.000,00	305.490.000,00	96,05	(12.550.000,00)	315.750.000,00	(10.260.000,00)	(3,25)
39.	Kec. Air Hitam	309.096.250,00	289.640.000,00	93,71	(19.456.250,00)	320.250.000,00	(30.610.000,00)	(9,56)
40.	Kec. Pagar Dewa	256.624.926,00	244.781.176,00	95,38	(11.843.750,00)	275.809.058,00	(31.027.882,00)	(11,25)
41.	Kec. Batu Ketulis	342.288.000,00	329.563.000,00	96,28	(12.725.000,00)	359.085.714,00	(29.522.714,00)	(8,22)
42.	Kec. Bandar Negeri Suoh	319.090.000,00	287.920.000,00	90,23	(31.170.000,00)	324.050.000,00	(36.130.000,00)	(11,15)
43.	Kec. Lombok Seminung	280.810.000,00	273.620.000,00	97,44	(7.190.000,00)	310.500.000,00	(36.880.000,00)	(11,88)
44.	Kantor Kesbangpol	1.539.295.322,00	1.509.876.523,00	98,09	(29.418.799,00)	1.341.610.382,00	168.266.141,00	12,54
	Jumlah	432.656.812.843,00	413.304.423.702,00	95,53	(19.352.389.141,00)	395.256.776.924,00	18.047.646.778,00	4,57

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp254.637.081.677,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 sebesar Rp243.673.449.949,80 atau 95,69%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp49.918.168.432,25) atau (17,00%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp293.591.618.382,05. Belanja Barang dan Jasa ini mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 disebabkan antara lain terdapat belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat 2024.

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 87. Belanja Barang TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	53.847.638.388,00	51.478.844.617,00	95,60	(2.368.793.771,00)	79.904.295.370,00	(28.425.450.753,00)	(35,57)
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	948.992.538,00	937.504.570,00	98,79	(11.487.968,00)	1.279.739.810,00	(342.235.240,00)	(26,74)
	Bahan-Bahan Kimia	338.978.500,00	337.451.000,00	99,55	(1.527.500,00)	415.236.900,00	(77.785.900,00)	(18,73)
	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.622.775.715,00	1.439.343.438,00	88,70	(183.432.277,00)	4.860.348.747,00	(3.421.005.309,00)	(70,39)
	Bahan-Bahan Baku	18.169.368,00	18.135.000,00	99,81	(34.368,00)	0,00	18.135.000,00	∞
	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	117.640.900,00	117.640.900,00	100,00	0,00	212.767.500,00	(95.126.600,00)	(44,71)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00	14.500.000,00	8.500.000,00	58,62
	Bahan-Isi Tabung Gas	82.500.000,00	78.225.000,00	94,82	(4.275.000,00)	108.538.000,00	(30.313.000,00)	(27,93)
	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	113.833.000,00	113.833.000,00	100,00	0,00	460.407.000,00	(346.574.000,00)	(75,28)
	Bahan-Bahan Lainnya	3.684.251.412,00	3.395.120.998,00	92,15	(289.130.414,00)	2.085.190.172,00	1.309.930.826,00	62,82
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	125.635.000,00	100.400.000,00	79,91	(25.235.000,00)	1.772.354.000,00	(1.671.954.000,00)	(94,34)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	125.587.494,00	123.860.764,00	98,63	(1.726.730,00)	112.122.500,00	11.738.264,00	10,47
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	299.850.000,00	299.850.000,00	100,00	0,00	0,00	299.850.000,00	∞
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	225.324.000,00	225.302.000,00	99,99	(22.000,00)	467.155.000,00	(241.853.000,00)	(51,77)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.930.000,00	5.930.000,00	100,00	0,00	23.315.000,00	(17.385.000,00)	(74,57)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	14.026.000,00	14.026.000,00	100,00	0,00	30.286.000,00	(16.260.000,00)	(53,69)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	∞
	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.900.000,00	10.600.000,00	66,67	(5.300.000,00)	52.000.000,00	(41.400.000,00)	(79,62)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.154.495.050,00	2.132.264.000,00	98,97	(22.231.050,00)	1.776.134.400,00	356.129.600,00	20,05
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.524.674.800,00	1.513.970.600,00	99,30	(10.704.200,00)	1.877.474.795,00	(363.504.195,00)	(19,36)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.828.755.433,00	7.598.738.715,00	97,06	(230.016.718,00)	11.157.448.835,00	(3.558.710.120,00)	(31,90)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	160.165.000,00	157.129.000,00	98,10	(3.036.000,00)	206.043.500,00	(48.914.500,00)	(23,74)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	9.357.500,00	6.705.000,00	71,65	(2.652.500,00)	4.022.500,00	2.682.500,00	66,69
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.399.533.000,00	1.378.418.750,00	98,49	(21.114.250,00)	1.343.316.590,00	35.102.160,00	2,61
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	363.446.564,00	355.874.424,00	97,92	(7.572.140,00)	36.428.000,00	319.446.424,00	876,93
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	566.818.970,00	566.506.650,00	99,94	(312.320,00)	957.656.250,00	(391.149.600,00)	(40,84)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.130.303.500,00	1.120.267.500,00	99,11	(10.036.000,00)	1.076.769.740,00	43.497.760,00	4,04
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810.000,00	(19.810.000,00)	(100,00)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	930.000,00	930.000,00	100,00	0,00	35.295.000,00	(34.365.000,00)	(97,37)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	199.173.000,00	199.173.000,00	100,00	0,00	365.589.000,00	(166.416.000,00)	(45,52)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	620.360.416,00	619.445.660,00	99,85	(914.756,00)	1.310.273.824,00	(690.828.164,00)	(52,72)
	Obat-Obatan-Obat	3.003.615.076,00	2.835.676.950,00	94,41	(167.938.126,00)	1.879.547.694,00	956.129.256,00	50,87
	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	26.022.000,00	26.022.000,00	100,00	0,00	448.134.940,00	(422.112.940,00)	(94,19)
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	8.112.775.224,00	7.638.029.765,00	94,15	(474.745.459,00)	20.035.274.450,00	(12.397.244.685,00)	(61,88)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat							
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.024.196.388,00	1.981.895.700,00	97,91	(42.300.688,00)	1.874.893.139,00	107.002.561,00	5,71
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	0,00	0,00	30.500.000,00	∞
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	124.000,00	124.000,00	100,00	0,00	0,00	124.000,00	∞
	Natura dan Pakan-Natura	4.271.756.040,00	4.192.017.723,00	98,13	(79.738.317,00)	6.440.059.874,00	(2.248.042.151,00)	(34,91)
	Natura dan Pakan-Pakan	72.918.000,00	72.894.500,00	99,97	(23.500,00)	228.255.000,00	(155.360.500,00)	(68,06)
	Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	(510.000,00)	(100,00)
	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	20.926.000,00	20.926.000,00	100,00	0,00	0,00	20.926.000,00	∞
	Makanan dan Minuman Rapat	9.113.045.000,00	8.701.143.010,00	95,48	(411.901.990,00)	11.293.736.250,00	(2.592.593.240,00)	(22,96)
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.351.102.000,00	1.207.990.500,00	89,41	(143.111.500,00)	1.656.321.500,00	(448.331.000,00)	(27,07)
	Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	(126.000.000,00)	(100,00)
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	62.790.000,00	62.790.000,00	100,00	0,00	135.932.000,00	(73.142.000,00)	(53,81)
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)	1.377.749.500,00	(1.377.749.500,00)	(100,00)
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	507.757.000,00	494.777.000,00	97,44	(12.980.000,00)	1.165.571.000,00	(670.794.000,00)	(57,55)
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.437.602.000,00	1.248.161.500,00	86,82	(189.440.500,00)	681.599.000,00	566.562.500,00	83,12
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.035.000,00	9.900.000,00	98,65	(135.000,00)	137.830.000,00	(127.930.000,00)	(92,82)
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.500.000,00	14.300.000,00	98,62	(200.000,00)	174.830.000,00	(160.530.000,00)	(91,82)
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.000.000,00	17.850.000,00	99,17	(150.000,00)	49.850.000,00	(32.000.000,00)	(64,19)
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.600.000,00	5.400.000,00	96,43	(200.000,00)	9.910.000,00	(4.510.000,00)	(45,51)
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)					87.160.000,00	(87.160.000,00)	(100,00)
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.017.500,00	4.950.000,00	98,65	(67.500,00)	0,00	4.950.000,00	100,00
	Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707.960,00	(13.707.960,00)	(100,00)
	Pakaian Kerja Bengkel	12.950.000,00	12.950.000,00	100,00	0,00	4.200.000,00	8.750.000,00	208,33
	Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	(100.000,00)	6.000.000,00	3.900.000,00	65,00
	Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	22.804.420,00	22.804.420,00	100,00	0,00	146.709.540,00	(123.905.120,00)	(84,46)
	Komponen-Komponen Rambu-Rambu	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00	133.000.000,00	(123.500.000,00)	(92,86)
	Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	12.895.440,00	12.895.440,00	100,00	0,00	13.408.250,00	(512.810,00)	(3,82)
	Pipa-Pipa Lainnya	408.980,00	408.980,00	100,00	0,00	301.290,00	107.690,00	35,74
	Jumlah	53.870.442.808,00	51.501.649.037,00	95,60	(2.368.793.771,00)	80.051.004.910,00	(28.549.355.873,00)	(35,66)

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Belanja Jasa pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 88. Belanja Jasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Jasa Kantor:	54.278.908.896,00	49.929.669.477,00	91,99	(4.349.239.419,00)	64.302.144.109,00	(14.372.474.632,00)	(22,35)
	Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(16.800.000,00)	(100,00)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.926.250.000,00	1.885.510.000,00	97,89	(40.740.000,00)	2.316.855.000,00	(431.345.000,00)	(18,62)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	992.090.046,00	963.840.000,00	97,15	(28.250.046,00)	2.068.815.000,00	(1.104.975.000,00)	(53,41)
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	178.200.000,00	178.200.000,00	100,00	0,00	45.000.000,00	133.200.000,00	296,00
	Honorarium Rohaniwan	5.094.550.000,00	5.088.500.000,00	99,88	(6.050.000,00)	4.993.800.000,00	94.700.000,00	1,90
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550.000,00	(259.550.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	717.460.000,00	649.120.000,00	90,47	(68.340.000,00)	0,00	649.120.000,00	∞
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	187.600.000,00	166.600.000,00	88,81	(21.000.000,00)	0,00	166.600.000,00	∞
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	410.100.000,00	379.200.000,00	92,47	(30.900.000,00)	796.800.000,00	(417.600.000,00)	(52,41)
	Jasa Tenaga Pendidikan	3.731.668.100,00	3.595.239.600,00	96,34	(136.428.500,00)	3.385.800.000,00	209.439.600,00	6,19
	Jasa Tenaga Kesehatan	7.653.081.000,00	5.976.550.000,00	78,09	(1.676.531.000,00)	17.127.720.389,00	(11.151.170.389,00)	(65,11)
	Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233.000,00	(14.233.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.127.534.000,00	4.123.114.000,00	99,89	(4.420.000,00)	1.387.200.132,00	2.735.913.868,00	197,23
	Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	152.400.000,00	152.400.000,00	100,00	0,00	1.786.300.000,00	(1.633.900.000,00)	(91,47)
	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.800.000,00	(1.622.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Penanganan Bencana	160.080.000,00	160.080.000,00	100,00	0,00	224.280.000,00	(64.200.000,00)	(28,62)
	Jasa Tenaga Penanganan Sosial	191.175.000,00	191.164.915,00	99,99	(10.085,00)	177.672.500,00	13.492.415,00	7,59
	Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	626.550.000,00	(626.550.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	(8.050.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Sumber Daya Air	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00	0,00	0,00	132.000.000,00	∞
	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00	42.900.000,00	(20.900.000,00)	(48,72)
	Jasa Tenaga Administrasi	585.400.000,00	545.700.000,00	93,22	(39.700.000,00)	1.038.000.000,00	(492.300.000,00)	(47,43)
	Jasa Tenaga Operator Komputer	215.800.000,00	156.900.000,00	72,71	(58.900.000,00)	666.343.750,00	(509.443.750,00)	(76,45)
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.384.450.000,00	2.357.400.000,00	98,87	(27.050.000,00)	1.738.461.500,00	618.938.500,00	35,60
	Jasa Tenaga Ahli	2.467.730.000,00	2.128.370.000,00	86,25	(339.360.000,00)	2.543.258.000,00	(414.888.000,00)	(16,31)
	Jasa Tenaga Kebersihan	1.153.980.000,00	1.093.940.000,00	94,80	(60.040.000,00)	2.747.870.000,00	(1.653.930.000,00)	(60,19)
	Jasa Tenaga Keamanan	3.500.100.000,00	3.474.600.000,00	99,27	(25.500.000,00)	367.900.000,00	3.106.700.000,00	844,44
	Jasa Tenaga Caraka					2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Supir	450.600.000,00	450.600.000,00	100,00	0,00	438.978.000,00	11.622.000,00	2,65

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	25.000.000,00	24.790.587,00	99,16	(209.413,00)	36.799.357,00	(12.008.770,00)	(32,63)
	Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.890.000,00	(69.890.000,00)	(100,00)
	Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	0,00	26.100.000,00	(12.450.000,00)	(47,70)
	Jasa Tata Rias	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00	525.500.000,00	(525.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	137.160.000,00	103.310.514,00	75,32	(33.849.486,00)	8.368.500,00	94.942.014,00	1.134,52
	Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Pelayanan Perpustakaan	129.600.000,00	126.400.000,00	97,53	(3.200.000,00)	113.400.000,00	13.000.000,00	11,46
	Jasa Pelayanan Kearsipan	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33	(4.000.000,00)	0,00	20.000.000,00	∞
	Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	456.025.000,00	(406.025.000,00)	(89,04)
	Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Kalibrasi	23.767.750,00	23.653.500,00	99,52	(114.250,00)	0,00	23.653.500,00	∞
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengolahan Sampah	184.600.000,00	184.535.090,00	99,96	(64.910,00)	96.363.700,00	88.171.390,00	91,50
	Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	230.250.000,00	(230.250.000,00)	(100,00)
	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.418.200.000,00	5.368.029.000,00	99,07	(50.171.000,00)	5.063.850.000,00	304.179.000,00	6,01
	Tagihan Telepon	584.300.000,00	375.100.934,00	64,20	(209.199.066,00)	452.325.038,00	(77.224.104,00)	(17,07)
	Tagihan Air	251.250.000,00	174.046.416,00	69,27	(77.203.584,00)	211.496.252,00	(37.449.836,00)	(17,71)
	Tagihan Listrik	5.556.040.000,00	5.035.606.660,00	90,63	(520.433.340,00)	4.601.875.552,00	433.731.108,00	9,43
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.109.645.000,00	2.031.045.000,00	96,27	(78.600.000,00)	2.995.745.000,00	(964.700.000,00)	(32,20)
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.290.126.000,00	2.048.012.460,00	89,43	(242.113.540,00)	2.406.283.125,00	(358.270.665,00)	(14,89)
	Paket/Pengiriman	112.449.000,00	48.802.000,00	43,40	(63.647.000,00)	7.646.500,00	41.155.500,00	538,23
	Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.000,00	(1.776.000,00)	(100,00)
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	755.873.000,00	255.659.796,00	33,82	(500.213.204,00)	328.612.814,00	(72.953.018,00)	(22,20)
	Medical Check Up	124.000.000,00	120.999.005,00	97,58	(3.000.995,00)	140.000.000,00	(19.000.995,00)	(13,57)
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.410.561.120,00	11.748.723.654,00	94,67	(661.837.466,00)	7.375.065.268,00	4.373.658.386,00	59,30
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.330.489.720,00	1.867.147.778,00	80,12	(463.341.942,00)	787.523.696,00	1.079.624.082,00	137,09
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487.319.000,00	(6.487.319.000,00)	(100,00)
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.749.209.800,00	9.683.215.876,00	99,32	(65.993.924,00)	7.936.572,00	9.675.279.304,00	121.907,54
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	147.053.633,00	103.360.020,00	70,29	(43.693.613,00)	81.300.000,00	22.060.020,00	27,13
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	183.807.967,00	94.999.980,00	51,68	(88.807.987,00)	0,00	94.999.980,00	∞
	Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986.000,00	(10.986.000,00)	(100,00)
3.	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350.000,00	(16.350.000,00)	(100,00)
	Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350.000,00	(16.350.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.073.538.740,00	1.993.321.500,00	96,13	(80.217.240,00)	1.866.979.000,00	126.342.500,00	6,77
	Sewa Mesin Proses	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	0,00	25.200.000,00	∞
	Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	(24.200.000,00)	(100,00)
	Sewa Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	48.550.000,00	(48.550.000,00)	(100,00)
	Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.120.828.740,00	1.061.604.000,00	94,72	(59.224.740,00)	723.440.000,00	338.164.000,00	46,74
	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	169.120.000,00	(139.120.000,00)	(82,26)
	Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	327.000.000,00	327.000.000,00	100,00	0,00	116.550.000,00	210.450.000,00	180,57
	Sewa Alat Kantor Lainnya	109.000.000,00	103.000.000,00	94,50	(6.000.000,00)	212.710.000,00	(109.710.000,00)	(51,58)
	Sewa Mebel	69.410.000,00	69.217.500,00	99,72	(192.500,00)	235.909.000,00	(166.691.500,00)	(70,66)
	Sewa Alat Pendingin	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	3.150.000,00	∞
	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	262.200.000,00	260.150.000,00	99,22	(2.050.000,00)	4.250.000,00	255.900.000,00	6.021,18
	Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	(34.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	(42.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Alat Studio Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	54.000.000,00	(47.500.000,00)	(87,96)
	Sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	2.500.000,00	∞
	Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	0,00	0,00	52.500.000,00	∞
	Sewa Peralatan Umum	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50	(3.000.000,00)	60.000.000,00	(55.000.000,00)	(91,67)
	Sewa Komputer Jaringan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	∞
	Sewa Peralatan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000.000,00	∞
	Sewa Elektronik/Electric	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	90.000.000,00	(65.000.000,00)	(72,22)
	Sewa Peralatan Olahraga Air	7.500.000,00	3.000.000,00	40,00	(4.500.000,00)	0,00	3.000.000,00	∞
	Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	8.750.000,00	3.500.000,00	40,00	(5.250.000,00)	0,00	3.500.000,00	∞
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.515.185.000,00	1.407.859.999,00	92,92	(107.325.001,00)	2.781.619.500,00	(1.373.759.501,00)	(49,39)
	Sewa Bangunan Gedung Kantor	51.600.000,00	46.600.000,00	90,31	(5.000.000,00)	334.200.000,00	(287.600.000,00)	(86,06)
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	148.550.000,00	122.790.000,00	82,66	(25.760.000,00)	336.870.500,00	(214.080.500,00)	(63,55)
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	(2.450.000,00)	(100,00)
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Sewa Bangunan Terbuka	261.900.000,00	261.900.000,00	100,00	0,00	959.950.000,00	(698.050.000,00)	(72,72)
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00	0,00	0,00	70.800.000,00	∞
	Sewa Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	∞
	Sewa Taman	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00	29.000.000,00	(19.500.000,00)	(67,24)
	Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	(9.450.000,00)	(100,00)
	Sewa Hotel	886.610.000,00	810.044.999,00	91,36	(76.565.001,00)	1.044.199.000,00	(234.154.001,00)	(22,42)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.225.000,00	36.225.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	225.000,00	0,63
6.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	196.250.000,00	182.750.000,00	93,12	(13.500.000,00)	694.700.000,00	(511.950.000,00)	(73,69)
	Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Alat Musik	161.750.000,00	148.250.000,00	91,65	(13.500.000,00)	561.200.000,00	(412.950.000,00)	(73,58)
	Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	17.500.000,00	(15.000.000,00)	(85,71)
	Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00	81.000.000,00	(49.000.000,00)	(60,49)
7.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	652.686.000,00	639.186.400,00	97,93	(13.499.600,00)	5.139.978.800,00	(4.500.792.400,00)	(87,56)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.970.000,00	(1.013.970.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029.000,00	(23.029.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	83.922.000,00	(83.922.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	0,00	70.692.000,00	(70.692.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.992.800,00	(2.287.992.800,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	0,00	96.560.000,00	(96.560.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	154.697.000,00	(154.697.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	378.915.000,00	(378.915.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	141.750.000,00	141.105.600,00	99,55	(644.400,00)	0,00	141.105.600,00	∞
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	252.495.000,00	251.336.800,00	99,54	(1.158.200,00)	1.030.201.000,00	(778.864.200,00)	(75,60)
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	236.341.000,00	235.044.000,00	99,45	(1.297.000,00)	0,00	235.044.000,00	∞
	Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	22.100.000,00	11.700.000,00	52,94	(10.400.000,00)	0,00	11.700.000,00	∞

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
8.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.229.060.000,00	3.207.483.740,00	99,33	(21.576.260,00)	2.166.404.680,00	1.041.079.060,00	48,06
	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	65.000.000,00	64.500.000,00	99,23	(500.000,00)	165.000.000,00	(100.500.000,00)	(60,91)
	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	84.740.000,00	83.520.000,00	98,56	(1.220.000,00)	61.760.000,00	21.760.000,00	35,23
	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	600.000.000,00	597.230.500,00	99,54	(2.769.500,00)	210.680.000,00	386.550.500,00	183,48
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	317.700.000,00	316.172.000,00	99,52	(1.528.000,00)	1.151.694.000,00	(835.522.000,00)	(72,55)
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.161.620.000,00	2.146.061.240,00	99,28	(15.558.760,00)	323.430.680,00	1.822.630.560,00	563,53
	Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	(720.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
9.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.116.766.000,00	3.089.266.000,00	99,12	(27.500.000,00)	2.938.777.000,00	150.489.000,00	5,12
	Kursus Singkat/Pelatihan	2.960.876.000,00	2.933.376.000,00	99,07	(27.500.000,00)	2.012.896.000,00	920.480.000,00	45,73
	Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	∞
	Bimbingan Teknis	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00	925.881.000,00	(820.881.000,00)	(88,66)
	Diklat Kepemimpinan	45.890.000,00	45.890.000,00	100,00	0,00	0,00	45.890.000,00	∞
	Jumlah	77.472.955.756,00	72.198.260.770,00	93,19	(5.274.694.986,00)	87.282.018.357,00	(15.083.757.587,00)	(17,28)

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 89. Belanja Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Pemeliharaan Tanah	123.228.000,00	123.008.500,00	99,82	(219.500,00)	0,00	123.008.500,00	∞
	Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	123.228.000,00	123.008.500,00	99,82	(219.500,00)	0,00	123.008.500,00	∞
2.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5.507.486.750,00	5.309.928.862,00	96,41	(197.557.888,00)	3.315.832.007,00	1.994.096.855,00	60,14

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	dan Mesin							
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350.000,00	(20.350.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	(30.100.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	(3.450.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	133.310.000,00	118.232.500,00	88,69	(15.077.500,00)	4.810.000,00	113.422.500,00	2.358,06
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	(2.000.000,00)	8.500.000,00	(4.500.000,00)	(52,94)
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	(3.660.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.826.932.000,00	3.733.318.365,00	97,55	(93.613.635,00)	631.500.000,00	3.101.818.365,00	491,18
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	1.393.408.044,00	(1.368.408.044,00)	(98,21)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	348.093.000,00	(348.093.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	825.287.500,00	757.810.467,00	91,82	(67.477.033,00)	66.450.000,00	691.360.467,00	1.040,42
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166.680,00	(11.166.680,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	251.395.000,00	(251.395.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	25.500.000,00	16.780.000,00	65,80	(8.720.000,00)	54.960.000,00	(38.180.000,00)	(69,47)
	Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	336.177.250,00	335.610.020,00	99,83	(567.230,00)	25.000.000,00	310.610.020,00	1.242,44
	Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	31.626.400,00	(31.626.400,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	150.000,00	50,00	(150.000,00)	1.200.000,00	(1.050.000,00)	(87,50)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00	14.900.000,00	(4.500.000,00)	(30,20)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	(1.000.000,00)	22.878.900,00	(21.878.900,00)	(95,63)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.950.000,00	27.800.000,00	99,46	(150.000,00)	2.000.000,00	25.800.000,00	1.290,00
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	12.600.000,00	(5.100.000,00)	(40,48)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00	7.200.000,00	(4.400.000,00)	(61,11)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.700.000,00	(700.000,00)	(41,18)
	Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	25.400.000,00	22.280.000,00	87,72	(3.120.000,00)	17.500.000,00	4.780.000,00	27,31
	Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00	(1.529.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	198.950.000,00	193.267.510,00	97,14	(5.682.490,00)	192.614.983,00	652.527,00	0,34
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43.230.000,00	43.230.000,00	100,00	0,00	0,00	43.230.000,00	∞
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	(23.500.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00	(54.500.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00	0,00	9.750.000,00	∞
3.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	423.106.000,00	422.212.248,00	99,79	(893.752,00)	782.279.800,00	(360.067.552,00)	(46,03)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	348.806.000,00	347.925.748,00	99,75	(880.252,00)	437.016.800,00	(89.091.052,00)	(20,39)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	(325.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900.000,00	(54.900.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-	50.000.000,00	49.986.500,00	99,97	(13.500,00)		49.986.500,00	∞

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)		(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan							
	Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	24.300.000,00	24.300.000,00	100,00	0,00	140.338.000,00	(116.038.000,00)	(82,68)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700.000,00	(149.700.000,00)	(100,00)
4.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	561.600.000,00	558.874.000,00	99,51	(2.726.000,00)	0,00	558.874.000,00	∞
	Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	561.600.000,00	558.874.000,00	99,51	(2.726.000,00)	0,00	558.874.000,00	∞
	Jumlah	6.615.420.750,00	6.414.023.610,00	96,96	(201.397.140,00)	4.098.111.807,00	2.315.911.803,00	56,51

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 90. Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)		(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.719.349.060,00	45.284.426.103,00	96,93	(1.434.922.957,00)	54.232.442.157,00	(8.948.016.054,00)	(16,50)
	Perjalanan Dinas Biasa	25.777.806.210,00	25.180.887.364,00	97,68	(596.918.846,00)	24.519.658.546,00	661.228.818,00	2,70
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.911.774.650,00	7.516.032.835,00	95,00	(395.741.815,00)	15.000.877.255,00	(7.484.844.420,00)	(49,90)
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.835.990.000,00	12.423.697.804,00	96,79	(412.292.196,00)	9.885.260.541,00	2.538.437.263,00	25,68
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	193.778.200,00	163.808.100,00	84,53	(29.970.100,00)	4.826.645.815,00	(4.662.837.715,00)	(96,61)
	Jumlah	46.719.349.060,00	45.284.426.103,00	96,93	(1.434.922.957,00)	54.232.442.157,00	(8.948.016.054,00)	(16,50)

5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 91. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain / Masyarakat TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	861.780.000,00	681.341.388,00	79,06	(180.438.612,00)	1.158.300.000,00	(476.958.612,00)	(41,18)
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	(8.800.000,00)	(100,00)
	Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	544.500.000,00	(544.500.000,00)	(100,00)
	Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000.000,00	(605.000.000,00)	(100,00)
	Penghargaan atas Suatu Prestasi	354.750.000,00	284.350.000,00	80,16	(70.400.000,00)		284.350.000,00	∞
	Beasiswa	507.030.000,00	396.991.388,00	78,30	(110.038.612,00)		396.991.388,00	∞
2.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.542.354.500,00	3.459.396.536,00	97,66	(82.957.964,00)	678.879.654,00	2.780.516.882,00	409,57
	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.201.974.500,00	3.176.594.536,00	99,21	(25.379.964,00)	678.879.654,00	2.497.714.882,00	367,92
	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	340.380.000,00	282.802.000,00	83,08	(57.578.000,00)		282.802.000,00	∞
	Jumlah	4.404.134.500,00	4.140.737.924,00	94,02	(263.396.576,00)	1.837.179.654,00	2.303.558.270,00	125,39

5.1.2.1.2.6. Belanja Barang & Jasa Dana BOS

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 92. Belanja Barang & Jasa BOS TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Barang & Jasa Dana BOS	29.342.960.990,00	28.653.558.146,00	97,65	(689.402.844,00)	28.656.158.123,00	(2.599.977,00)	(0,01)
	Barang dan Jasa BOS	29.342.960.990,00	28.653.558.146,00	97,65	(689.402.844,00)	28.656.158.123,00	(2.599.977,00)	(0,01)
	Jumlah	29.342.960.990,00	28.653.558.146,00	97,65	(689.402.844,00)	28.656.158.123,00	(2.599.977,00)	(0,01)

Berikut dijelaskan sumber sumber dana Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2023

a Sumber Dana APBN

- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler SD Negeri | Rp | 17.721.904.367,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler SMP Negeri | Rp | 8.909.447.179,00 |
| 3. Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja SD Negeri | Rp | 620.831.800 |
| 4. Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja SMP Negeri | Rp | 400.681.300 |
| Sub Jumlah | Rp | 27.652.864.646,00 |

b Sumber Dana APBD

- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Belanja Barang dan Jasa BOS Sumber dana BOS Daerah | Rp | 1.000.693.500,00 |
| Sub Jumlah | Rp | 1.000.693.500,00 |
| Jumlah | Rp | 28.653.558.146,00 |

5.1.2.1.2.7. Belanja Barang & Jasa BLUD

Belanja Barang & Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 93. Belanja Barang & Jasa BLUD TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.211.817.813,00	35.480.794.359,80	97,98	(731.023.453,20)	37.434.703.374,05	(1.953.909.014,25)	(5,22)
	Barang dan Jasa BLUD	36.211.817.813,00	35.480.794.359,80	97,98	(731.023.453,20)	37.434.703.374,05	(1.953.909.014,25)	(5,22)
	Jumlah	36.211.817.813,00	35.480.794.359,80	97,98	(731.023.453,20)	37.434.703.374,05	(1.953.909.014,25)	(5,22)

Belanja Barang dan Jasa untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 94. Belanja Barang dan Jasa Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.287.286.678,00	38.786.508.001,00	96,27	(1.500.778.677,00)	42.159.323.654,00	(3.372.815.653,00)	(8,00)
2.	Dinas Kesehatan	59.527.714.639,00	56.113.516.728,80	94,26	(3.414.197.910,20)	59.452.434.343,00	(3.338.917.614,20)	(5,62)
3.	RSUD Alimuddin Umar	27.360.698.971,00	26.103.541.981,00	95,41	(1.257.156.990,00)	37.998.198.930,05	(11.894.656.949,05)	(31,30)
4.	Dinas PU PR	7.575.513.903,00	7.364.337.403,00	97,21	(211.176.500,00)	19.773.794.940,00	(12.409.457.537,00)	(62,76)
5.	Kantor Satpol PP	4.537.177.800,00	4.495.767.852,00	99,09	(41.409.948,00)	4.440.651.573,00	55.116.279,00	1,24
6.	BPBD	1.665.242.300,00	1.636.457.978,00	98,27	(28.784.322,00)	2.085.467.234,00	(449.009.256,00)	(21,53)
7.	Dinas Sosial	2.418.079.040,00	2.386.929.317,00	98,71	(31.149.723,00)	6.091.013.879,00	(3.704.084.562,00)	(60,81)
8.	Dinas Dalduk, KB, PP	6.296.533.590,00	5.801.357.059,00	92,14	(495.176.531,00)	7.788.046.255,00	(1.986.689.196,00)	(25,51)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	957.360.700,00	926.715.023,00	96,80	(30.645.677,00)	2.699.106.368,00	(1.772.391.345,00)	(65,67)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	9.387.177.744,00	9.163.469.280,00	97,62	(223.708.464,00)	9.046.637.551,00	116.831.729,00	1,29
11.	Disduk dan Capil	1.208.902.150,00	1.185.396.287,00	98,06	(23.505.863,00)	1.517.909.350,00	(332.513.063,00)	(21,91)
12.	Dinas PMP	1.322.910.600,00	1.315.438.461,00	99,44	(7.472.139,00)	2.502.836.230,00	(1.187.397.769,00)	(47,44)
13.	Dinas Perhubungan	801.126.730,00	735.687.839,00	91,83	(65.438.891,00)	1.034.313.297,00	(298.625.458,00)	(28,87)
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.181.397.775,00	4.133.002.822,00	98,84	(48.394.953,00)	4.918.111.396,00	(785.108.574,00)	(15,96)
15.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	5.533.433.550,00	5.306.173.146,00	95,89	(227.260.404,00)	2.710.509.873,00	2.595.663.273,00	95,76
16.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Naker	1.407.538.650,00	1.357.362.582,00	96,44	(50.176.068,00)	1.611.967.023,00	(254.604.441,00)	(15,79)
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.199.945.790,00	3.008.424.823,00	94,01	(191.520.967,00)	3.940.161.186,00	(931.736.363,00)	(23,65)
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	809.508.070,00	765.209.888,00	94,53	(44.298.182,00)	744.425.880,00	20.784.008,00	2,79
19.	Dinas Perikanan	1.580.688.720,00	1.563.456.704,00	98,91	(17.232.016,00)	2.822.456.168,00	(1.258.999.464,00)	(44,61)
20.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.892.222.370,00	1.847.867.401,00	97,66	(44.354.969,00)	2.607.452.875,00	(759.585.474,00)	(29,13)
21.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.453.434.528,00	3.293.317.794,00	95,36	(160.116.734,00)	3.413.861.552,00	(120.543.758,00)	(3,53)
22.	Sekretariat Daerah	24.134.633.910,00	22.512.390.975,00	93,28	(1.622.242.935,00)	21.180.146.571,00	1.332.244.404,00	6,29
23.	Sekretariat DPRD	19.738.389.955,00	19.661.515.416,00	99,61	(76.874.539,00)	25.903.981.407,00	(6.242.465.991,00)	(24,10)
24.	BAPPEDA	3.347.198.624,00	3.316.030.272,00	99,07	(31.168.352,00)	4.073.805.890,00	(757.775.618,00)	(18,60)
25.	BPKD	8.326.056.860,00	7.394.756.962,00	88,81	(931.299.898,00)	9.840.532.092,00	(2.445.775.130,00)	(24,85)
26.	Badan Kepegawaian dan	2.062.601.900,00	2.021.342.522,00	98,00	(41.259.378,00)	1.926.571.151,00	94.771.371,00	4,92

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Pengembangan SDM							
27.	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.092.343.900,00	1.084.460.738,00	99,28	(7.883.162,00)	1.274.621.983,00	(190.161.245,00)	(14,92)
28.	Inspektorat	2.937.715.500,00	2.914.564.960,00	99,21	(23.150.540,00)	2.102.065.466,00	812.499.494,00	38,65
29.	Kec. Sumber Jaya	693.237.790,00	691.590.774,00	99,76	(1.647.016,00)	757.134.388,00	(65.543.614,00)	(8,66)
30.	Kec. Way Tenong	688.007.500,00	682.873.233,00	99,25	(5.134.267,00)	772.591.464,00	(89.718.231,00)	(11,61)
31.	Kec. Sekincau	652.488.140,00	652.367.199,00	99,98	(120.941,00)	787.061.382,00	(134.694.183,00)	(17,11)
32.	Kec. Belalau	254.785.600,00	241.345.020,00	94,72	(13.440.580,00)	300.588.960,00	(59.243.940,00)	(19,71)
33.	Kec. Batu Brak	265.395.260,00	262.412.202,00	98,88	(2.983.058,00)	295.040.953,00	(32.628.751,00)	(11,06)
34.	Kec. Balik Bukit	940.307.700,00	925.059.714,00	98,38	(15.247.986,00)	1.065.650.627,00	(140.590.913,00)	(13,19)
35.	Kec. Sukau	234.512.000,00	222.913.885,00	95,05	(11.598.115,00)	303.828.170,00	(80.914.285,00)	(26,63)
36.	Kec. Suoh	273.625.000,00	272.725.000,00	99,67	(900.000,00)	329.325.425,00	(56.600.425,00)	(17,19)
37.	Kec. Gedung Surian	261.190.000,00	258.379.692,00	98,92	(2.810.308,00)	338.607.428,00	(80.227.736,00)	(23,69)
38.	Kec. Kebun Tebu	229.468.000,00	225.522.330,00	98,28	(3.945.670,00)	345.507.220,00	(119.984.890,00)	(34,73)
39.	Kec. Air Hitam	219.245.000,00	216.245.000,00	98,63	(3.000.000,00)	336.243.200,00	(119.998.200,00)	(35,69)
40.	Kec. Pagar Dewa	268.183.200,00	258.695.600,00	96,46	(9.487.600,00)	332.764.500,00	(74.068.900,00)	(22,26)
41.	Kec. Batu Ketulis	247.791.400,00	246.869.400,00	99,63	(922.000,00)	337.725.500,00	(90.856.100,00)	(26,90)
42.	Kec. Bandar Negeri Suoh	253.052.400,00	248.052.400,00	98,02	(5.000.000,00)	314.521.900,00	(66.469.500,00)	(21,13)
43.	Kec. Lumbok Seminung	252.289.600,00	247.353.325,00	98,04	(4.936.275,00)	321.915.130,00	(74.561.805,00)	(23,16)
44.	Kantor Kesbangpol	1.860.668.140,00	1.826.044.961,00	98,14	(34.623.179,00)	992.708.018,00	833.336.943,00	83,95
	Jumlah	254.637.081.677,00	243.673.449.949,80	95,69	(10.963.631.727,20)	293.591.618.382,05	(49.918.168.432,25)	(17,00)

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.720.929.625,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.555.499.062,00 atau 95,55%. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp914.446.959,00) atau (20,46%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp4.469.946.021,00. Belanja bunga pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena perhitungan pembayaran bunga berdasarkan saldo pokok pinjaman yang menurun setiap tahun.

Belanja Bunga untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 95. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.492.596,00	(1.793.492.596,00)	(100,00)
2.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	(165.430.563,00)	2.676.453.425,00	879.045.637,00	32,84
	Jumlah	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	(165.430.563,00)	4.469.946.021,00	(914.446.959,00)	(20,46)

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2023 ini merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) total sebesar Rp3.555.499.062,00. Realisasi belanja tidak tercapai karena pengeluaran telah sesuai dengan tagihan utang bunga yang riil terjadi, apabila dibandingkan dengan tahun lalu belanja bunga mengalami penurunan sebesar (Rp914.446.959,00) atau (20,46%). Untuk lebih rinci belanja bunga disajikan dalam lampiran 4 pada laporan keuangan ini.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi Tahun anggaran 2023 dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp522.500.000,00) atau (100,00%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp522.500.000,00. Pada tahun 2023 belanja subsidi tidak ada realisasi apabila dibandingkan tahun sebelumnya karena tidak memiliki subsidi kepada BUMN/BUMD untuk penanggulangan inflasi daerah.

Belanja Subsidi untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 96. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500.000,00	(522.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500.000,00	(522.500.000,00)	(100,00)

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib sesuai kemampuan keuangan daerah, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp32.601.367.155,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.310.714.788,00 atau 99,11%. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.796.772.866,00 atau 65,58% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp19.513.941.922,00.

Kenaikan belanja hibah secara signifikan Tahun Anggaran 2023 ini karena terdapat hibah kepada KPUD Lampung Barat untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat 2024 sebesar Rp8,9 miliar lebih, Hibah Kepada Bawaslu Rp5,5 miliar lebih sehingga secara total terdapat kenaikan belanja hibah sebesar 65,58%.

Realisasi Belanja Hibah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 97. Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat							
a.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.	15.700.479.971,00	15.473.389.371,00	98,55	(227.090.600,00)	1.150.000.000,00	14.323.389.371,00	1.245,51
b.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.	225.560.912,00	223.545.345,00	99,11	(2.015.567,00)	105.000.000,00	118.545.345,00	112,90
	Sub Jumlah	15.926.040.883,00	15.696.934.716,00	98,56	(229.106.167,00)	1.255.000.000,00	14.441.934.716,00	1.150,75
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia							
a.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.896.252.000,00	6.886.252.000,00	99,85	(10.000.000,00)	8.270.632.000,00	(1.384.380.000,00)	(16,74)
b.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.571.390.000,00	4.529.865.000,00	99,09	(41.525.000,00)	5.324.760.000,00	(794.895.000,00)	(14,93)
c.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	772.000.000,00	762.000.000,00	98,70	(10.000.000,00)	712.393.000,00	49.607.000,00	6,96
d.	Belanja Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
e.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	0,00	0,00	190.000.000,00	∞
	Sub Jumlah	12.444.642.000,00	12.383.117.000,00	99,51	(61.525.000,00)	14.322.785.000,00	(1.939.668.000,00)	(13,54)
3.	Belanja Hibah Dana BOS							
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.559.430.000,00	3.559.408.800,00	100,00	(21.200,00)	3.264.902.650,00	294.506.150,00	9,02
	Sub Jumlah	3.559.430.000,00	3.559.408.800,00	100,00	(21.200,00)	3.264.902.650,00	294.506.150,00	9,02
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik							
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.254.272,00	671.254.272,00	100,00	0,00	671.254.272,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	671.254.272,00	671.254.272,00	100,00	0,00	671.254.272,00	0,00	0,00
	Jumlah	32.601.367.155,00	32.310.714.788,00	99,11	(290.652.367,00)	19.513.941.922,00	12.796.772.866,00	65,58

Realisasi belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Belanja hibah kepada pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp15.926.040.883,00 terealisasi sebesar Rp15.696.934.716,00 atau 98,56%. Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.441.934.716,00 atau 1.150,75% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.255.000.000,00.

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur/ Bupati atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp12.444.642.000,00 terealisasi sebesar Rp12.383.117.000,00 atau 99,51%. Realisasi Belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.939.668.000,00) atau (13,54%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp14.322.785.000,00.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai belanja hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja hibah Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp3.559.430.000,00 terealisasi sebesar Rp3.559.408.800,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp294.506.150,00 atau 9,02% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp3.264.902.650,00.

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp671.254.272,00 terealisasi sebesar Rp671.254.272,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan dari Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp671.254.272,00.

Hibah kepada KPUD Lampung Barat dan Bawaslu berdasarkan Permendagri 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; NPHD Pemkab Lampung Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 900/665/KONTRAK/IV.03/2023 – Nomor 73/HK.02.00/K.LA-01/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp13.980.866.500,00 baru direalisasikan 40% atau sebesar Rp5.592.346.600,00; dan NPHD Pemkab Lampung Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 900/663/KONTRAK/IV.03/2023 – Nomor 589/KU.07-NK/1804/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp22.402.606.928,00 baru direalisasikan 40% atau sebesar Rp8.961.042.771,00.

Untuk lebih rinci realisasi belanja hibah terdapat dalam lampiran 5 pada laporan keuangan ini.

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Penurunan belanja bantuan sosial secara signifikan Tahun Anggaran 2023 ini karena

1. Pada Dinas Kesehatan tahun 2022 terdapat belanja uang yang serahkan kepada individu berupa beasiswa kedokteran dianggarkan pada Belanja Bansos, untuk tahun 2023 dianggarkan di belanja belanja barang dan jasa.
2. Pada Dinas PU PR, pada tahun 2022 terdapat belanja bantuan untuk bedah rumah, tahun 2023 terdapat anggaran belanja bansos khusus untuk belanja bencana alam terkait infrastruktur tidak terealisasi sebesar Rp45.000.000,00.
3. Pada Dinas Koperindag pada tahun 2022 terdapat belanja bantuan kepada UMKM yang terdampak dari Covid-19, pada tahun 2023 tidak dianggarkan lagi belanja tersebut

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp292.000.000,00 terealisasi sebesar Rp244.550.000,00 atau 83,75%. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.681.711.500,00) atau (87,30%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.926.261.500,00, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 98. Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	1.318.456.500,00	(1.318.456.500,00)	(100,00)
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	75.000.000,00	74.550.000,00	99,40	(450.000,00)	0,00	74.550.000,00	∞
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	172.000.000,00	170.000.000,00	98,84	(2.000.000,00)	527.805.000,00	(357.805.000,00)	(67,79)
Jumlah		292.000.000,00	244.550.000,00	83,75	(47.450.000,00)	1.926.261.500,00	(1.681.711.500,00)	(87,30)

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Realisasi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp74.550.000,00 dilaksanakan pada Dinas Sosial, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Sub berupa bantuan kursi roda sebesar Rp74.550.000,00
- b) Realisasi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dilaksanakan pada Dinas Sosial sebesar Rp170.000.000,00.

Realisasi belanja bantuan sosial tercapai 83,75% dan pengeluaran sesuai dengan keadaan riil yang terjadi pada tahun 2023 ini.

Belanja bantuan sosial lebih rinci disajikan pada lampiran 6 pada laporan keuangan ini.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp118.299.512.355,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp117.007.426.132,00 atau 98,91% mengalami penurunan sebesar (Rp74.553.861.790,00) atau (38,92%) bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp191.561.287.922,00. Belanja modal ini mengalami penurunan dari tahun 2022 salah satunya disebabkan oleh adanya penurunan belanja modal yang bersumber dari DAK Fisik dan belanja modal bersumber dari dana PEN (pemulihan ekonomi nasional), dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 99. Belanja Modal TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Peralatan dan Mesin	23.927.641.926,00	23.471.410.062,00	98,09	(456.231.864,00)	37.544.778.356,00	(14.073.368.294,00)	(37,48)
2.	Gedung dan Bangunan	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27	(355.273.795,00)	41.842.220.791,00	(21.713.703.611,00)	(51,89)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53	(319.906.199,00)	107.650.228.900,00	(40.232.062.155,00)	(37,37)
4.	Aset Tetap Lainnya	5.995.006.510,00	5.836.651.645,00	97,36	(158.354.865,00)	3.821.418.300,00	2.015.233.345,00	52,74
5.	Aset Lainnya	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	702.641.575,00	(549.961.075,00)	(78,27)
	Jumlah	118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91	(1.292.086.223,00)	191.561.287.922,00	(74.553.861.790,00)	(38,92)

Berikut tabel rincian belanja modal TA 2023 dan 2022

Tabel 100. Belanja Modal TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Peralatan dan Mesin							
1.	Alat Besar Darat	120.060.100,00	118.259.198,00	98,50	(1.800.902,00)	19.000.000,00	99.259.198,00	522,42
2.	Alat Bantu	340.739.060,00	340.103.854,00	99,81	(635.206,00)	221.437.000,00	118.666.854,00	53,59
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	983.368.000,00	982.800.000,00	99,94	(568.000,00)	1.031.334.868,00	(48.534.868,00)	(4,71)
4.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	452.499.000,00	451.861.515,00	99,86	(637.485,00)	0,00	451.861.515,00	∞
5.	Alat Bengkel Bermesin	73.050.000,00	72.981.000,00	99,91	(69.000,00)	6.000.000,00	66.981.000,00	1.116,35
6.	Alat Bengkel Tak Bermesin	13.223.300,00	13.094.300,00	99,02	(129.000,00)	9.258.000,00	3.836.300,00	41,44
7.	Alat Ukur	4.123.000,00	4.082.500,00	99,02	(40.500,00)	229.440.000,00	(225.357.500,00)	(98,22)
8.	Alat Pengolahan	709.733.500,00	701.119.000,00	98,79	(8.614.500,00)	4.499.500,00	696.619.500,00	15.482,15
9.	Alat Kantor	285.543.000,00	279.850.160,00	98,01	(5.692.840,00)	570.062.000,00	(290.211.840,00)	(50,91)
10.	Alat Rumah Tangga	10.327.188.190,00	10.291.266.322,00	99,65	(35.921.868,00)	1.876.337.173,00	8.414.929.149,00	448,48
11.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	242.049.000,00	235.935.500,00	97,47	(6.113.500,00)	178.900.000,00	57.035.500,00	31,88
12.	Alat Studio	475.542.749,00	471.742.499,00	99,20	(3.800.250,00)	1.129.810.500,00	(658.068.001,00)	(58,25)
13.	Alat Komunikasi	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00	61.400.000,00	17.800.000,00	28,99
14.	Peralatan Pemancar	76.880.000,00	76.880.000,00	100,00	0,00	170.950.000,00	(94.070.000,00)	(55,03)
15.	Alat Kedokteran	1.571.050.064,00	1.496.998.000,00	95,29	(74.052.064,00)	5.316.092.373,00	(3.819.094.373,00)	(71,84)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
16.	Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
17.	Unit Alat Laboratorium	52.136.250,00	44.000.000,00	84,39	(8.136.250,00)	161.222.650,00	(117.222.650,00)	(72,71)
18.	Alat Peraga Praktek Sekolah	20.925.000,00	20.925.000,00	100,00	0,00	18.630.000,00	2.295.000,00	12,32
19.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.399.960,00	6.393.000,00	99,89	(6.960,00)	3.510.000,00	2.883.000,00	82,14
20.	Komputer Unit	1.430.948.000,00	1.423.255.050,00	99,46	(7.692.950,00)	16.064.710.000,00	(14.641.454.950,00)	(91,14)
21.	Peralatan Komputer	252.865.010,00	249.179.220,00	98,54	(3.685.790,00)	203.291.000,00	45.888.220,00	22,57
22.	Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00			22.400.000,00	(22.400.000,00)	(100,00)
23.	Sumur	25.000.000,00	24.780.750,00	99,12	(219.250,00)	888.373.000,00	(863.592.250,00)	(97,21)
24.	Alat Pelindung	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	64.600.000,00	(54.600.000,00)	(84,52)
25.	Alat SAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950.000,00	(38.950.000,00)	(100,00)
26.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
27.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	65.656.129,00	(65.656.129,00)	(100,00)
28.	Peralatan Olahraga	94.530.000,00	93.542.000,00	98,95	(988.000,00)	194.771.853,00	(101.229.853,00)	(51,97)
29.	Peralatan dan Mesin BOS	3.950.264.000,00	3.922.690.700,00	99,30	(27.573.300,00)	4.809.935.250,00	(887.244.550,00)	(18,45)
30.	Peralatan dan Mesin BLUD	2.330.324.743,00	2.060.470.494,00	88,42	(269.854.249,00)	4.177.707.060,00	(2.117.236.566,00)	(50,68)
	Jumlah	23.927.641.926,00	23.471.410.062,00	98,09	(456.231.864,00)	37.544.778.356,00	(14.073.368.294,00)	(37,48)
	Gedung dan Bangunan							
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.080.810.975,00	18.905.915.180,00	99,08	(174.895.795,00)	41.359.009.241,00	(22.453.094.061,00)	(54,29)
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	35.980.000,00	35.900.000,00	99,78	(80.000,00)	56.840.000,00	(20.940.000,00)	(36,84)
3.	Bangunan Menara Perambuan	802.000.000,00	793.711.000,00	98,97	(8.289.000,00)	0,00	793.711.000,00	∞
4.	Tugu/Tanda Batas	165.000.000,00	164.876.000,00	99,92	(124.000,00)	96.371.550,00	68.504.450,00	71,08
5.	Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	228.115.000,00	57,03	(171.885.000,00)	330.000.000,00	(101.885.000,00)	(30,87)
	Jumlah	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27	(355.273.795,00)	41.842.220.791,00	(21.713.703.611,00)	(51,89)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan							
1.	Jalan	49.769.556.469,00	49.555.278.801,00	99,57	(214.277.668,00)	90.364.812.495,00	(40.809.533.694,00)	(45,16)
2.	Jembatan	2.319.000.000,00	2.306.361.920,00	99,46	(12.638.080,00)	640.000.000,00	1.666.361.920,00	260,37
3.	Bangunan Air Irigasi	3.127.619.500,00	3.103.583.000,00	99,23	(24.036.500,00)	3.489.547.000,00	(385.964.000,00)	(11,06)
4.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.354.391.000,00	12.286.443.024,00	99,45	(67.947.976,00)	299.003.405,00	11.987.439.619,00	4.009,13
5.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	75.366.000,00	(75.366.000,00)	(100,00)
6.	Bangunan Air Kotor	167.505.975,00	166.500.000,00	99,40	(1.005.975,00)	0,00	166.500.000,00	∞
7.	Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595.800.000,00	(12.595.800.000,00)	(100,00)
8.	Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(100,00)
9.	Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	158.550.000,00	(158.550.000,00)	(100,00)
10.	Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53	(319.906.199,00)	107.650.228.900,00	(40.232.062.155,00)	(37,37)
	Aset Tetap Lainnya							
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.014.601.500,00	876.491.500,00	86,39	(138.110.000,00)	40.758.500,00	835.733.000,00	2.050,45
2.	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
3.	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	7.500.000,00	6.105.000,00	81,40	(1.395.000,00)	0,00	6.105.000,00	∞
4.	Kartografi, Naskah, dan Lukisan	39.000.000,00	38.628.000,00	99,05	(372.000,00)	0,00	38.628.000,00	∞
5.	Barang Bercorak Kebudayaan	500.351.100,00	498.094.035,00	99,55	(2.257.065,00)	0,00	498.094.035,00	∞
6.	Aset Tetap Lainnya BOS	4.433.553.910,00	4.417.333.110,00	99,63	(16.220.800,00)	3.758.459.800,00	658.873.310,00	17,53
	Jumlah	5.995.006.510,00	5.836.651.645,00	97,36	(158.354.865,00)	3.821.418.300,00	2.015.233.345,00	52,74
	Aset Lainnya							
1.	Aset Tidak Berwujud	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	0,00	152.680.500,00	100,00
2.	Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	702.641.575,00	(702.641.575,00)	(100,00)
	Jumlah	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	702.641.575,00	(549.961.075,00)	(78,27)
	Jumlah	118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91	(1.292.086.223,00)	191.561.287.922,00	(74.553.861.790,00)	(38,92)

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.927.641.926,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.471.410.062,00 atau 98,09% mengalami penurunan sebesar (Rp14.073.368.294,00) atau (37,48%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.544.778.356,00.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagai extracomptable sebesar Rp3.133.416.337,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Belanja modal peralatan dan mesin diantaranya meliputi belanja modal alat besar, alat angkut, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat keselamatan kerja, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS, peralatan dan mesin BLUD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 101. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)	
		(Rp)	(Rp)	(%)				(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	PERALATAN DAN MESIN							
1.	Alat Besar:	460.799.160,00	458.363.052,00	99,47	(2.436.108,00)	240.437.000,00	217.926.052,00	90,64
	Alat Besar Darat	120.060.100,00	118.259.198,00	98,50	(1.800.902,00)	19.000.000,00	99.259.198,00	522,42
	- Mesin Proses	120.060.100,00	118.259.198,00	98,50	(1.800.902,00)	19.000.000,00	99.259.198,00	522,42
	Alat Bantu	340.739.060,00	340.103.854,00	99,81	(635.206,00)	221.437.000,00	118.666.854,00	53,59
	- Electric Generating Set	250.000.000,00	249.400.000,00	99,76	(600.000,00)	99.900.000,00	149.500.000,00	149,65
	- Pompa	48.042.000,00	48.042.000,00	100,00	0,00	93.787.000,00	(45.745.000,00)	(48,78)
	- Mesin Bor	2.347.060,00	2.311.854,00	98,50	(35.206,00)	0,00	2.311.854,00	∞
	- Perlengkapan Kebakaran Hutan	40.350.000,00	40.350.000,00	100,00	0,00	20.250.000,00	20.100.000,00	99,26
	- Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
2.	Alat Angkutan:	1.435.867.000,00	1.434.661.515,00	99,92	(1.205.485,00)	1.031.334.868,00	403.326.647,00	39,11
	Alat Angkutan Darat Bermotor	983.368.000,00	982.800.000,00	99,94	(568.000,00)	1.031.334.868,00	(48.534.868,00)	(4,71)
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	728.368.000,00	727.800.000,00	99,92	(568.000,00)	0,00	727.800.000,00	∞
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	383.516.468,00	(383.516.468,00)	(100,00)
	- Kendaraan Bermotor Khusus	255.000.000,00	255.000.000,00	100,00	0,00	647.818.400,00	(392.818.400,00)	(60,64)
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	452.499.000,00	451.861.515,00	99,86	(637.485,00)	0,00	451.861.515,00	∞
	- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	450.000.000,00	449.400.000,00	99,87	(600.000,00)	0,00	449.400.000,00	∞
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	2.499.000,00	2.461.515,00	98,50	(37.485,00)	0,00	2.461.515,00	∞
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	90.396.300,00	90.157.800,00	99,74	(238.500,00)	244.698.000,00	(154.540.200,00)	(63,16)
	Alat Bengkel Bermesin	73.050.000,00	72.981.000,00	99,91	(69.000,00)	6.000.000,00	66.981.000,00	1.116,35
	- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00	19.200.000,00	∞
	- Perkakas Bengkel Kayu	51.600.000,00	51.531.000,00	99,87	(69.000,00)	4.500.000,00	47.031.000,00	1.045,13
	- Peralatan Las	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	2.250.000,00	∞
	Alat Bengkel Tak Bermesin	13.223.300,00	13.094.300,00	99,02	(129.000,00)	9.258.000,00	3.836.300,00	41,44
	- Perkakas Bengkel Kerja	11.800.000,00	11.671.000,00	98,91	(129.000,00)	0,00	11.671.000,00	∞
	- Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	(528.000,00)	(100,00)
	- Peralatan Tukang Kayu	1.423.300,00	1.423.300,00	100,00	0,00	8.730.000,00	(7.306.700,00)	(83,70)
	Alat Ukur	4.123.000,00	4.082.500,00	99,02	(40.500,00)	229.440.000,00	(225.357.500,00)	(98,22)
	- Alat Timbangan/Biara	4.123.000,00	4.082.500,00	99,02	(40.500,00)	0,00	4.082.500,00	∞
	- Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	(7.700.000,00)	(100,00)
	- Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500.000,00	(197.500.000,00)	(100,00)
	- Alat Pengukur Keadaan Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240.000,00	(21.240.000,00)	(100,00)
4.	Alat Pertanian	709.733.500,00	701.119.000,00	98,79	(8.614.500,00)	4.499.500,00	696.619.500,00	15.482,15
	Alat Pengolahan	709.733.500,00	701.119.000,00	98,79	(8.614.500,00)	4.499.500,00	696.619.500,00	15.482,15
	- Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.220.000,00	3.700.000,00	87,68	(520.000,00)	750.000,00	2.950.000,00	393,33
	- Alat Pemeliharaan Tanaman/lkan/Ternak	1.152.000,00	1.152.000,00	100,00	0,00	2.249.500,00	(1.097.500,00)	(48,79)
	- Alat Panen	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000.000,00	∞
	- Alat Processing	664.361.500,00	656.267.000,00	98,78	(8.094.500,00)	0,00	656.267.000,00	∞
	- Alat-Alat Peternakan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	1.500.000,00	25.500.000,00	1.700,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.854.780.190,00	10.807.051.982,00	99,56	(47.728.208,00)	2.625.299.173,00	8.181.752.809,00	311,65
	Alat Kantor	285.543.000,00	279.850.160,00	98,01	(5.692.840,00)	570.062.000,00	(290.211.840,00)	(50,91)
	- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	102.087.000,00	99.270.000,00	97,24	(2.817.000,00)	173.180.000,00	(73.910.000,00)	(42,68)
	- Alat Kantor Lainnya	183.456.000,00	180.580.160,00	98,43	(2.875.840,00)	396.132.000,00	(215.551.840,00)	(54,41)
	Alat Rumah Tangga	10.327.188.190,00	10.291.266.322,00	99,65	(35.921.868,00)	1.876.337.173,00	8.414.929.149,00	448,48
	- Mebel	9.624.126.000,00	9.594.668.432,00	99,69	(29.457.568,00)	1.404.420.450,00	8.190.247.982,00	583,18
	- Alat Pembersih	23.635.400,00	19.630.400,00	83,06	(4.005.000,00)	41.830.000,00	(22.199.600,00)	(53,07)
	- Alat Pendingin	15.894.000,00	15.655.590,00	98,50	(238.410,00)	16.500.000,00	(844.410,00)	(5,12)
	- Alat Dapur	263.332.890,00	261.477.000,00	99,30	(1.855.890,00)	21.077.773,00	240.399.227,00	1.140,53
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	359.799.900,00	359.434.900,00	99,90	(365.000,00)	387.708.950,00	(28.274.050,00)	(7,29)
	- Alat Pemadam Kebakaran	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	35.600.000,00	741,67
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	242.049.000,00	235.935.500,00	97,47	(6.113.500,00)	178.900.000,00	57.035.500,00	31,88
	- Meja Kerja Pejabat	97.550.000,00	93.084.500,00	95,42	(4.465.500,00)	45.200.000,00	47.884.500,00	105,94
	- Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	7.881.000,00	98,51	(119.000,00)	0,00	7.881.000,00	∞
	- Kursi Kerja Pejabat	40.624.000,00	39.790.000,00	97,95	(834.000,00)	15.200.000,00	24.590.000,00	161,78
	- Kursi Rapat Pejabat	91.000.000,00	90.380.000,00	99,32	(620.000,00)	0,00	90.380.000,00	∞
	- Kursi Tamu di Ruang Pejabat	4.875.000,00	4.800.000,00	98,46	(75.000,00)	0,00	4.800.000,00	∞
	- Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500.000,00	(118.500.000,00)	(100,00)
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	631.622.749,00	627.822.499,00	99,40	(3.800.250,00)	1.362.160.500,00	(734.338.001,00)	(53,91)

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Alat Studio	475.542.749,00	471.742.499,00	99,20	(3.800.250,00)	1.129.810.500,00	(658.068.001,00)	(58,25)
	- Peralatan Studio Audio	133.547.749,00	132.999.999,00	99,59	(547.750,00)	141.880.000,00	(8.880.001,00)	(6,26)
	- Peralatan Studio Video dan Film	166.395.000,00	163.642.500,00	98,35	(2.752.500,00)	976.105.000,00	(812.462.500,00)	(83,24)
	- Peralatan Studio Gambar	163.254.000,00	162.804.000,00	99,72	(450.000,00)	0,00	162.804.000,00	∞
	- Peralatan Cetak	4.450.000,00	4.400.000,00	98,88	(50.000,00)	0,00	4.400.000,00	∞
	- Alat Studio Lainnya	7.896.000,00	7.896.000,00	100,00	0,00	11.825.500,00	(3.929.500,00)	(33,23)
	Alat Komunikasi	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00	61.400.000,00	17.800.000,00	28,99
	- Alat Komunikasi Telephone	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00	17.000.000,00	(3.500.000,00)	(20,59)
	- Alat Komunikasi Radio HF/FM	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	44.400.000,00	(31.200.000,00)	(70,27)
	- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	0,00	0,00	52.500.000,00	∞
	Peralatan Pemancar	76.880.000,00	76.880.000,00	100,00	0,00	170.950.000,00	(94.070.000,00)	(55,03)
	- Peralatan Pemancar UHF	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	4.850.000,00	(3.350.000,00)	(69,07)
	- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
	- Peralatan Perlengkapan Radio	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00	0,00	65.000.000,00	∞
	- Sumber Tenaga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000.000,00	∞
	- Peralatan Pemancar Lainnya	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00	76.100.000,00	(75.720.000,00)	(99,50)
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.571.050.064,00	1.496.998.000,00	95,29	(74.052.064,00)	5.317.592.373,00	(3.820.594.373,00)	(71,85)
	Alat Kedokteran	1.571.050.064,00	1.496.998.000,00	95,29	(74.052.064,00)	5.316.092.373,00	(3.819.094.373,00)	(71,84)
	- Alat Kedokteran Umum	604.471.424,00	530.852.000,00	87,82	(73.619.424,00)	2.404.798.053,00	(1.873.946.053,00)	(77,93)
	- Alat Kedokteran Gigi	151.430.900,00	151.000.000,00	99,72	(430.900,00)	0,00	151.000.000,00	∞
	- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.147.740,00	1.146.000,00	99,85	(1.740,00)	1.695.547.000,00	(1.694.401.000,00)	(99,93)
	- Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904.000,00	(27.904.000,00)	(100,00)
	- Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640.000,00	(6.640.000,00)	(100,00)
	- Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	879.167.800,00	(879.167.800,00)	(100,00)
	- Alat Kedokteran Jantung	113.200.000,00	113.200.000,00	100,00	0,00	168.651.300,00	(55.451.300,00)	(32,88)
	- Alat Kedokteran Anestesi	527.000.000,00	527.000.000,00	100,00	0,00	0,00	527.000.000,00	∞
	- Alat Kedokteran Lainnya	173.800.000,00	173.800.000,00	100,00	0,00	133.384.220,00	40.415.780,00	30,30
	Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
8.	Alat Laboratorium	79.461.210,00	71.318.000,00	89,75	(8.143.210,00)	183.362.650,00	(112.044.650,00)	(61,11)
	Unit Alat Laboratorium	52.136.250,00	44.000.000,00	84,39	(8.136.250,00)	161.222.650,00	(117.222.650,00)	(72,71)
	- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	44.456.250,00	44.000.000,00	98,97	(456.250,00)	0,00	44.000.000,00	∞
	- Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.000,00	(1.179.000,00)	(100,00)
	- Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	0,00	86.297.150,00	(86.297.150,00)	(100,00)
	- Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)	(100,00)
	- Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.000,00	(3.984.000,00)	(100,00)
	- Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250.000,00	(65.250.000,00)	(100,00)
	- Alat Laboratorium Uji Keramik	7.680.000,00	0,00	0,00	(7.680.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Alat Peraga Praktek Sekolah	20.925.000,00	20.925.000,00	100,00	0,00	18.630.000,00	2.295.000,00	12,32
	- Alat Peraga PAUD/TK	20.925.000,00	20.925.000,00	100,00	0,00	18.630.000,00	2.295.000,00	12,32
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.399.960,00	6.393.000,00	99,89	(6.960,00)	3.510.000,00	2.883.000,00	82,14

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	6.399.960,00	6.393.000,00	99,89	(6.960,00)	0,00	6.393.000,00	∞
	- Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	(3.510.000,00)	(100,00)
9.	Komputer	1.683.813.010,00	1.672.434.270,00	99,32	(11.378.740,00)	16.268.001.000,00	(14.595.566.730,00)	(89,72)
	Komputer Unit	1.430.948.000,00	1.423.255.050,00	99,46	(7.692.950,00)	16.064.710.000,00	(14.641.454.950,00)	(91,14)
	- Komputer Jaringan	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	0,00	432.752.400,00	(426.902.400,00)	(98,65)
	- Personal Computer	316.990.000,00	313.233.050,00	98,81	(3.756.950,00)	15.077.191.600,00	(14.763.958.550,00)	(97,92)
	- Komputer Unit Lainnya	1.108.108.000,00	1.104.172.000,00	99,64	(3.936.000,00)	554.766.000,00	549.406.000,00	99,03
	Peralatan Komputer	252.865.010,00	249.179.220,00	98,54	(3.685.790,00)	203.291.000,00	45.888.220,00	22,57
	- Peralatan Mainframe	6.000.000,00	5.938.500,00	98,98	(61.500,00)	0,00	5.938.500,00	∞
	- Peralatan Mini Computer	60.606.000,00	60.606.000,00	100,00	0,00	0,00	60.606.000,00	∞
	- Peralatan Personal Computer	19.794.000,00	16.783.600,00	84,79	(3.010.400,00)	171.527.000,00	(154.743.400,00)	(90,22)
	- Peralatan Jaringan	25.778.260,00	25.714.020,00	99,75	(64.240,00)	0,00	25.714.020,00	∞
	- Peralatan Komputer Lainnya	140.686.750,00	140.137.100,00	99,61	(549.650,00)	31.764.000,00	108.373.100,00	341,18
10.	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	(22.400.000,00)	(100,00)
	Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	(22.400.000,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	(22.400.000,00)	(100,00)
11.	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,00	24.780.750,00	99,12	(219.250,00)	888.373.000,00	(863.592.250,00)	(97,21)
	Sumur	25.000.000,00	24.780.750,00	99,12	(219.250,00)	888.373.000,00	(863.592.250,00)	(97,21)
	- Sumur Pemboran	25.000.000,00	24.780.750,00	99,12	(219.250,00)	888.373.000,00	(863.592.250,00)	(97,21)
12.	Alat Keselamatan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	103.550.000,00	(93.550.000,00)	(90,34)
	Alat Pelindung	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	64.600.000,00	(54.600.000,00)	(84,52)
	- Topi Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000.000,00	∞
	- Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600.000,00	(44.600.000,00)	(100,00)
	Alat SAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950.000,00	(38.950.000,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950.000,00	(38.950.000,00)	(100,00)
13.	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Peraga Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
14.	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	65.656.129,00	(65.656.129,00)	(100,00)
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	65.656.129,00	(65.656.129,00)	(100,00)
	- Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	0,00	65.656.129,00	(65.656.129,00)	(100,00)
15.	Peralatan Olahraga	94.530.000,00	93.542.000,00	98,95	(988.000,00)	194.771.853,00	(101.229.853,00)	(51,97)
	Peralatan Olahraga	94.530.000,00	93.542.000,00	98,95	(988.000,00)	194.771.853,00	(101.229.853,00)	(51,97)
	- Peralatan Permainan	94.530.000,00	93.542.000,00	98,95	(988.000,00)	194.771.853,00	(101.229.853,00)	(51,97)
16.	Peralatan dan Mesin BOS	3.950.264.000,00	3.922.690.700,00	99,30	(27.573.300,00)	4.809.935.250,00	(887.244.550,00)	(18,45)
	Peralatan dan Mesin BOS	3.950.264.000,00	3.922.690.700,00	99,30	(27.573.300,00)	4.809.935.250,00	(887.244.550,00)	(18,45)
	- Peralatan dan Mesin BOS	3.950.264.000,00	3.922.690.700,00	99,30	(27.573.300,00)	4.809.935.250,00	(887.244.550,00)	(18,45)
17.	Peralatan dan Mesin BLUD	2.330.324.743,00	2.060.470.494,00	88,42	(269.854.249,00)	4.177.707.060,00	(2.117.236.566,00)	(50,68)
	Peralatan dan Mesin BLUD	2.330.324.743,00	2.060.470.494,00	88,42	(269.854.249,00)	4.177.707.060,00	(2.117.236.566,00)	(50,68)
	- Peralatan dan Mesin BLUD	2.330.324.743,00	2.060.470.494,00	88,42	(269.854.249,00)	4.177.707.060,00	(2.117.236.566,00)	(50,68)
	Jumlah	23.927.641.926,00	23.471.410.062,00	98,09	(456.231.864,00)	37.544.778.356,00	(14.073.368.294,00)	(37,48)

5.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.483.790.975,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.128.517.180,00 atau 98,27% mengalami penurunan sebesar (Rp21.713.703.611,00) atau (51,89%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.842.220.791,00.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagai extracomptable sebesar Rp28.647.250,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Belanja modal gedung dan bangunan diantaranya meliputi belanja modal bangunan gedung, bangunan menara, tugu titik kontrol/pasti, gedung dan bangunan BLUD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 102. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	GEDUNG DAN BANGUNAN							
1.	Bangunan Gedung	19.116.790.975,00	18.941.815.180,00	99,08	(174.975.795,00)	41.415.849.241,00	(22.474.034.061,00)	(54,26)
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.080.810.975,00	18.905.915.180,00	99,08	(174.895.795,00)	41.359.009.241,00	(22.453.094.061,00)	(54,29)
	- Bangunan Gedung Kantor	7.245.962.363,00	7.199.554.739,00	99,36	(46.407.624,00)	16.543.055.411,00	(9.343.500.672,00)	(56,48)
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000.000,00	(197.000.000,00)	(100,00)
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.475.032.612,00	8.363.493.199,00	98,68	(111.539.413,00)	24.362.271.330,00	(15.998.778.131,00)	(65,67)
	- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	189.000.000,00	188.671.000,00	99,83	(329.000,00)	0,00	188.671.000,00	∞
	- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	40.000.000,00	39.922.887,00	99,81	(77.113,00)	0,00	39.922.887,00	∞
	- Bangunan Fasilitas Umum	511.500.000,00	509.591.000,00	99,63	(1.909.000,00)	0,00	509.591.000,00	∞
	- Bangunan Parkir	300.000.000,00	298.000.000,00	99,33	(2.000.000,00)	0,00	298.000.000,00	∞
	- Taman	639.437.500,00	637.244.500,00	99,66	(2.193.000,00)	0,00	637.244.500,00	∞
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.679.878.500,00	1.669.437.855,00	99,38	(10.440.645,00)	6.352.500,00	1.663.085.355,00	26.180,01
	- Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	250.330.000,00	(250.330.000,00)	(100,00)
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	35.980.000,00	35.900.000,00	99,78	(80.000,00)	56.840.000,00	(20.940.000,00)	(36,84)
	- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	35.980.000,00	35.900.000,00	99,78	(80.000,00)	56.840.000,00	(20.940.000,00)	(36,84)
2.	Bangunan Menara	802.000.000,00	793.711.000,00	98,97	(8.289.000,00)	0,00	793.711.000,00	∞
	Bangunan Menara Perambuan	802.000.000,00	793.711.000,00	98,97	(8.289.000,00)	0,00	793.711.000,00	∞
	- Bangunan Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000.000,00	∞
	- Bangunan Menara Pengawas	702.000.000,00	693.711.000,00	98,82	(8.289.000,00)	0,00	693.711.000,00	∞

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	165.000.000,00	164.876.000,00	99,92	(124.000,00)	96.371.550,00	68.504.450,00	71,08
	Tugu/Tanda Batas	165.000.000,00	164.876.000,00	99,92	(124.000,00)	96.371.550,00	68.504.450,00	71,08
	- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000.000,00	∞
	- Pagar	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00	0,00	105.000.000,00	∞
	- Tugu/Tanda Batas Lainnya	50.000.000,00	49.876.000,00	99,75	(124.000,00)	96.371.550,00	(46.495.550,00)	(48,25)
4.	Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	228.115.000,00	57,03	(171.885.000,00)	330.000.000,00	(101.885.000,00)	(30,87)
	Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	228.115.000,00	57,03	(171.885.000,00)	330.000.000,00	(101.885.000,00)	(30,87)
	- Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	228.115.000,00	57,03	(171.885.000,00)	330.000.000,00	(101.885.000,00)	(30,87)
	Jumlah	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27	(355.273.795,00)	41.842.220.791,00	(21.713.703.611,00)	(51,89)

5.1.2.2.3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp67.738.072.944,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.418.166.745,00 atau 99,53% mengalami penurunan sebesar (Rp40.232.062.155,00) atau (37,37%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp107.650.228.900,00.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut masih terdapat sebesar Rp276.091.410,00 yang masih menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi diantaranya meliputi belanja modal jalan dan jembatan, bangunan air sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 103. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN							
1.	Jalan dan Jembatan	52.088.556.469,00	51.861.640.721,00	99,56	(226.915.748,00)	91.004.812.495,00	(39.143.171.774,00)	(43,01)
	Jalan	49.769.556.469,00	49.555.278.801,00	99,57	(214.277.668,00)	90.364.812.495,00	(40.809.533.694,00)	(45,16)
	- Jalan Kabupaten	42.891.027.976,00	42.696.865.256,00	99,55	(194.162.720,00)	78.475.069.845,00	(35.778.204.589,00)	(45,59)
	- Jalan Desa	6.128.528.493,00	6.113.518.482,00	99,76	(15.010.011,00)	11.889.742.650,00	(5.776.224.168,00)	(48,58)
	- Jalan Lainnya	750.000.000,00	744.895.063,00	99,32	(5.104.937,00)	0,00	744.895.063,00	∞
	Jembatan	2.319.000.000,00	2.306.361.920,00	99,46	(12.638.080,00)	640.000.000,00	1.666.361.920,00	260,37
	- Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.319.000.000,00	2.306.361.920,00	99,46	(12.638.080,00)	640.000.000,00	1.666.361.920,00	260,37
2.	Bangunan Air	15.649.516.475,00	15.556.526.024,00	99,41	(92.990.451,00)	3.863.916.405,00	11.692.609.619,00	302,61
	Bangunan Air Irigasi	3.127.619.500,00	3.103.583.000,00	99,23	(24.036.500,00)	3.489.547.000,00	(385.964.000,00)	(11,06)
	- Bangunan Waduk Irigasi	3.127.619.500,00	3.103.583.000,00	99,23	(24.036.500,00)	1.509.149.000,00	1.594.434.000,00	105,65
	- Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.680.000,00	(1.934.680.000,00)	(100,00)
	- Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718.000,00	(45.718.000,00)	(100,00)
	Bangunan Pengaman	12.354.391.000,00	12.286.443.024,00	99,45	(67.947.976,00)	299.003.405,00	11.987.439.619,00	4.009,13

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam							
	- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	461.384.000,00	459.652.311,00	99,62	(1.731.689,00)	0,00	459.652.311,00	∞
	- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	11.893.007.000,00	11.826.790.713,00	99,44	(66.216.287,00)	299.003.405,00	11.527.787.308,00	3.855,40
	Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	75.366.000,00	(75.366.000,00)	(100,00)
	- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku					75.366.000,00	(75.366.000,00)	(100,00)
	Bangunan Air Kotor	167.505.975,00	166.500.000,00	99,40	(1.005.975,00)	0,00	166.500.000,00	∞
	- Bangunan Pembawa Air Kotor	167.505.975,00	166.500.000,00	99,40	(1.005.975,00)	0,00	166.500.000,00	∞
3.	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607.950.000,00	(12.607.950.000,00)	(100,00)
	Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595.800.000,00	(12.595.800.000,00)	(100,00)
	- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595.800.000,00	(12.595.800.000,00)	(100,00)
	Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(100,00)
	- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(100,00)
4.	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	173.550.000,00	(173.550.000,00)	(100,00)
	Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	158.550.000,00	(158.550.000,00)	(100,00)
	- Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	0,00	158.550.000,00	(158.550.000,00)	(100,00)
	Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53	(319.906.199,00)	107.650.228.900,00	(40.232.062.155,00)	(37,37)

5.1.2.2.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.995.006.510,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.836.651.645,00 atau 97,36% mengalami kenaikan sebesar Rp2.015.233.345,00 atau 52,74% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.821.418.300,00.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagai extracomptable sebesar Rp12.457.475,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Belanja modal Aset Tetap Lainnya diantaranya meliputi belanja modal bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 104. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	ASET TETAP LAINNYA							
1.	Bahan Perpustakaan	1.061.101.500,00	921.224.500,00	86,82	(139.877.000,00)	62.958.500,00	858.266.000,00	1.363,22
	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.014.601.500,00	876.491.500,00	86,39	(138.110.000,00)	40.758.500,00	835.733.000,00	2.050,45
	- Buku Umum	937.288.500,00	799.178.500,00	85,26	(138.110.000,00)	5.400.000,00	793.778.500,00	14.699,60
	- Buku Agama	4.007.500,00	4.007.500,00	100,00	0,00	0,00	4.007.500,00	∞
	- Buku Ilmu Sosial	29.007.500,00	29.007.500,00	100,00	0,00	13.705.000,00	15.302.500,00	111,66
	- Buku Ilmu Bahasa	18.946.500,00	18.946.500,00	100,00	0,00	11.591.500,00	7.355.000,00	63,45
	- Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	18.096.500,00	18.096.500,00	100,00	0,00	10.062.000,00	8.034.500,00	79,85
	- Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00	0,00	0,00	3.520.000,00	∞
	- Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	3.735.000,00	3.735.000,00	100,00	0,00	0,00	3.735.000,00	∞
	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
	- Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	7.500.000,00	6.105.000,00	81,40	(1.395.000,00)	0,00	6.105.000,00	∞
	- Audio Visual	7.500.000,00	6.105.000,00	81,40	(1.395.000,00)	0,00	6.105.000,00	∞
	Kartografi, Naskah, dan Lukisan	39.000.000,00	38.628.000,00	99,05	(372.000,00)	0,00	38.628.000,00	∞
	- Lukisan dan Ukiran	39.000.000,00	38.628.000,00	99,05	(372.000,00)	0,00	38.628.000,00	∞
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.351.100,00	498.094.035,00	99,55	(2.257.065,00)	0,00	498.094.035,00	∞
	Barang Bercorak Kebudayaan	500.351.100,00	498.094.035,00	99,55	(2.257.065,00)	0,00	498.094.035,00	∞
	- Barang Kerajinan	5.351.100,00	5.270.835,00	98,50	(80.265,00)	0,00	5.270.835,00	∞
	- Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	495.000.000,00	492.823.200,00	99,56	(2.176.800,00)	0,00	492.823.200,00	∞
3.	Aset Tetap Lainnya BOS	4.433.553.910,00	4.417.333.110,00	99,63	(16.220.800,00)	3.758.459.800,00	658.873.310,00	17,53
	Aset Tetap Lainnya BOS	4.433.553.910,00	4.417.333.110,00	99,63	(16.220.800,00)	3.758.459.800,00	658.873.310,00	17,53
	- Aset Tetap Lainnya BOS	4.433.553.910,00	4.417.333.110,00	99,63	(16.220.800,00)	3.758.459.800,00	658.873.310,00	17,53
	Jumlah	5.995.006.510,00	5.836.651.645,00	97,36	(158.354.865,00)	3.821.418.300,00	2.015.233.345,00	52,74

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Aset Lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp155.000.000,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp152.680.500,00 atau 98,50% mengalami penurunan sebesar (Rp549.961.075,00) atau (78,27%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp702.641.575,00.

Belanja modal Aset Lainnya diantaranya meliputi belanja modal aset tak berwujud sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 105. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	ASET LAINNYA							
1.	Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	0,00	152.680.500,00	∞
	Aset Tak Berwujud	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	0,00	152.680.500,00	∞
	- Aset Tak Berwujud-Software	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	0,00	152.680.500,00	∞
	Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	702.641.575,00	(702.641.575,00)	(100,00)
	- Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	702.641.575,00	(702.641.575,00)	(100,00)
	Jumlah	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	702.641.575,00	(549.961.075,00)	(78,27)

Berikut tabel rincian belanja modal Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Tabel 106. Belanja Modal Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.511.966.022,00	28.183.000.491,00	98,85	(328.965.531,00)	50.159.457.283,00	(21.976.456.792,00)	(43,81)
2.	Dinas Kesehatan	2.872.415.907,00	2.600.974.916,00	90,55	(271.440.991,00)	25.655.502.709,00	(23.054.527.793,00)	(89,86)
3.	RSUD Alimuddin Umar	3.031.434.500,00	2.780.016.289,00	91,71	(251.418.211,00)	7.292.773.005,00	(4.512.756.716,00)	(61,88)
4.	Dinas PU PR	52.931.407.596,00	52.696.272.048,00	99,56	(235.135.548,00)	101.824.024.500,00	(49.127.752.452,00)	(48,25)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00	20.200.000,00	11.300.000,00	55,94
6.	BPBD	13.896.390.276,00	13.809.082.241,00	99,37	(87.308.035,00)	28.550.000,00	13.780.532.241,00	48.268,06
7.	Dinas Sosial	67.680.000,00	67.600.000,00	99,88	(80.000,00)	265.795.556,00	(198.195.556,00)	(74,57)
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP	44.840.000,00	44.840.000,00	100,00	0,00	94.923.000,00	(50.083.000,00)	(52,76)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970.000,00	(29.970.000,00)	(100,00)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1.840.762.960,00	1.834.588.000,00	99,66	(6.174.960,00)	1.034.308.000,00	800.280.000,00	77,37
11.	Disduk dan Capil	85.906.000,00	85.906.000,00	100,00	0,00	116.000.000,00	(30.094.000,00)	(25,94)
12.	Dinas PMP	234.870.000,00	234.870.000,00	100,00	0,00	503.500.000,00	(268.630.000,00)	(53,35)
13.	Dinas Perhubungan	157.000.000,00	156.600.000,00	99,75	(400.000,00)	306.656.129,00	(150.056.129,00)	(48,93)
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	84.696.150,00	84.696.150,00	100,00	0,00	289.418.450,00	(204.722.300,00)	(70,74)
15.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	9.499.445.278,00	9.420.587.404,00	99,17	(78.857.874,00)	301.748.000,00	9.118.839.404,00	3.022,00
16.	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00	(6.400.000,00)	(64,00)
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.270.012.000,00	2.254.256.063,00	99,31	(15.755.937,00)	225.376.623,00	2.028.879.440,00	900,22
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	68.396.000,00	68.266.000,00	99,81	(130.000,00)	281.796.400,00	(213.530.400,00)	(75,77)
19.	Dinas Perikanan	18.840.000,00	18.840.000,00	100,00	0,00	39.850.000,00	(21.010.000,00)	(52,72)
20.	Dinas Tanaman Pangan	3.650.000,00	2.500.000,00	68,49	(1.150.000,00)	0,00	2.500.000,00	∞

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	dan Hortikultura							
21.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	108.480.000,00	100.780.000,00	92,90	(7.700.000,00)	430.187.000,00	(329.407.000,00)	(76,57)
22.	Sekretariat Daerah	243.898.649,00	239.822.809,00	98,33	(4.075.840,00)	280.014.217,00	(40.191.408,00)	(14,35)
23.	Sekretariat DPRD	218.706.250,00	217.532.939,00	99,46	(1.173.311,00)	219.858.000,00	(2.325.061,00)	(1,06)
24.	BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	61.270.500,00	(61.270.500,00)	(100,00)
25.	BPKD	399.650.000,00	397.330.500,00	99,42	(2.319.500,00)	342.477.500,00	54.853.000,00	16,02
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399.000,00	(24.399.000,00)	(100,00)
27.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867.500,00	(56.867.500,00)	(100,00)
28.	Inspektorat	109.068.000,00	109.068.000,00	100,00	0,00	217.323.000,00	(108.255.000,00)	(49,81)
29.	Kec. Sumber Jaya	208.745.528,00	208.745.528,00	100,00	0,00	212.485.490,00	(3.739.962,00)	(1,76)
30.	Kec. Way Tenong	206.710.633,00	206.710.633,00	100,00	0,00	219.341.200,00	(12.630.567,00)	(5,76)
31.	Kec. Sekincau	271.726.655,00	271.726.655,00	100,00	0,00	218.569.940,00	53.156.715,00	24,32
32.	Kec. Belalau	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	17.834.000,00	1.366.000,00	7,66
33.	Kec. Batu Brak	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	44.630.500,00	(37.630.500,00)	(84,32)
34.	Kec. Balik Bukit	627.013.951,00	627.013.466,00	100,00	(485,00)	566.772.420,00	60.241.046,00	10,63
35.	Kec. Sukau	41.738.000,00	41.738.000,00	100,00	0,00	22.160.000,00	19.578.000,00	88,35
36.	Kec. Suoh	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	(100,00)
37.	Kec. Gedung Surian	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00	14.100.000,00	8.400.000,00	59,57
38.	Kec. Kebun Tebu	39.912.000,00	39.912.000,00	100,00	0,00	6.440.000,00	33.472.000,00	519,75
39.	Kec. Air Hitam	44.900.000,00	44.900.000,00	100,00	0,00	12.100.000,00	32.800.000,00	271,07
40.	Kec. Pagar Dewa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00	(3.200.000,00)	(24,24)
41.	Kec. Batu Ketulis	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	12.334.000,00	5.666.000,00	45,94
42.	Kec. Bandar Negeri Suoh	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	45.790.000,00	(27.790.000,00)	(60,69)
43.	Kec. Lombok Seminung	29.450.000,00	29.450.000,00	100,00	0,00	29.284.000,00	166.000,00	0,57
	Jumlah	118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91	(1.292.086.223,00)	191.561.287.922,00	(74.553.861.790,00)	(38,92)

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.1.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.613.141.895,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.508.132.360,00 atau 93,49% mengalami penurunan sebesar (Rp909.698.605,00) atau (37,62%) bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.417.830.965,00.

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2023 mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terjadi penurunan bencana.

Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk Periode TA 2023 dan 2022, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 107. Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	2.417.830.965,00	(909.698.605,00)	(37,62)
	Jumlah	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	2.417.830.965,00	(909.698.605,00)	(37,62)

Belanja tidak terduga lebih rinci disajikan pada lampiran 7 dalam laporan keuangan ini.

5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp173.353.540.200,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.805.009.400,00 atau 99,68% mengalami kenaikan sebesar Rp475.177.500,00 atau 0,28% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp172.329.831.900,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 108. Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bagi Hasil	2.183.360.200,00	1.634.829.400,00	74,88	(548.530.800,00)	1.475.794.900,00	159.034.500,00	10,78
2.	Belanja Bantuan Keuangan	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	0,00	170.854.037.000,00	316.143.000,00	0,19
	Jumlah	173.353.540.200,00	172.805.009.400,00	99,68	(548.530.800,00)	172.329.831.900,00	475.177.500,00	0,28

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, adapun kedua belanja tersebut dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang dialokasikan dari sebagian pendapatan PAD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintahan Desa, adapun Anggaran Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp2.183.360.200,00 realisasi sebesar Rp1.634.829.400,00 atau 74,88%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.475.794.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp159.034.500,00 atau 10,78%, Realisasi belanja tidak tercapai karena sesuai dengan kondisi penerimaan pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Belanja Bagi Hasil pada tahun 2023 mengalami peningkatan 10,78% dari tahun sebelumnya karena PAD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 109. Belanja Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.846.691.600,00	1.407.134.300,00	76,20	(439.557.300,00)	1.288.238.500,00	118.895.800,00	9,23
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	336.668.600,00	227.695.100,00	67,63	(108.973.500,00)	187.556.400,00	40.138.700,00	21,40
Jumlah		2.183.360.200,00	1.634.829.400,00	74,88	(548.530.800,00)	1.475.794.900,00	159.034.500,00	10,78

Belanja Bagi Hasil lebih rinci disajikan pada lampiran 8 dan 9 pada laporan keuangan ini.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 110. Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	100,00	0,00	117.483.497.000,00	286.983.000,00	0,24
2.	Alokasi Dana Desa	53.399.700.000,00	53.399.700.000,00	100,00	0,00	53.370.540.000,00	29.160.000,00	0,05
Jumlah		171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	0,00	170.854.037.000,00	316.143.000,00	0,19

Tabel diatas menunjukkan anggaran belanja bantuan keuangan TA 2023 sebesar Rp171.170.180.000,00 terealisasi sebesar Rp171.170.180.000,00 atau 100,00%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp170.854.037.000,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp316.143.000,00 atau 0,19%. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu belanja bantuan keuangan mengalami peningkatan karena tahun 2023 secara nasional penerimaan atas Dana Desa yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Pekon mengalami peningkatan, dan Bantuan Keuangan Dana Desa dari Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan sebesar Rp29.160.000,00.

Belanja bantuan keuangan lebih rinci disajikan pada lampiran 10 dan 11 pada laporan keuangan ini.

5.1.3. SURPLUS/ (DEFISIT)

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp985.836.203.764,84 dan belanja daerah sebesar Rp984.409.205.393,80 dihasilkan surplus sebesar Rp1.426.998.371,04 Dibandingkan dengan minus pada tahun 2022 sebesar (Rp57.310.826.943,77) mengalami penurunan defisit sebesar Rp58.737.825.314,81 atau (102,49%), sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 111. Surplus/ (Defisit) Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan Daerah	988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	99,69	(3.082.504.415,16)	1.024.279.168.592,28	(38.442.964.827,44)	(3,75)
2.	Belanja Daerah	(1.017.174.385.750,00)	(984.409.205.393,80)	96,78	32.765.180.356,20	(1.081.589.995.536,05)	97.180.790.142,25	(8,98)
	Surplus/ (Defisit)	(28.255.677.570,00)	1.426.998.371,04	(5,05)	29.682.675.941,04	(57.310.826.943,77)	58.737.825.314,81	(102,49)

5.1.4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 112. Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Penerimaan Pembiayaan	48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	0,04	114.951.176.858,81	(66.776.836.668,77)	(58,09)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	18.918.125.240,00	94,98	(1.000.537.380,00)	9.466.009.725,00	9.452.115.515,00	99,85
	Jumlah Pembiayaan Netto (1-2)	28.255.677.570,00	29.256.214.950,04	103,54	1.000.537.380,04	105.485.167.133,81	(76.228.952.183,77)	(72,27)

Tabel diatas menunjukkan anggaran pembiayaan netto TA 2023 sebesar Rp28.255.677.570,00 terealisasi sebesar Rp29.256.214.950,04 atau 103,54%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp105.485.167.133,81 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp76.228.952.183,77) atau (72,27%). Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.4.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.1.4.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 113. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	0,04	56.959.356.108,81	(8.785.015.918,77)	(15,42)
	Jumlah	48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	0,04	56.959.356.108,81	(8.785.015.918,77)	(15,42)

Tabel diatas menunjukkan anggaran penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp48.174.340.190,00 terealisasi sebesar Rp48.174.340.190,04 atau 100,00%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp56.959.356.108,81 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp8.785.015.918,77) atau (15,42%).

5.1.4.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah berasal dari pinjaman daerah kepada pihak luar dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 114. Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	57.991.820.750,00	(57.991.820.750,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	57.991.820.750,00	(57.991.820.750,00)	(100,00)

Tabel diatas menunjukkan anggaran penerimaan pinjaman daerah TA 2023 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp57.991.820.750,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp57.991.820.750,00) atau (100,00%).

5.1.4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 115. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD :							
	- PT Bank Lampung	1.000.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	- BPRS Lampung Barat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	(1.000.000.000,00)	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 17 Desember 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 9) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Lampung bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 periode TA 2018 s.d. 2022, berdasarkan data yang ada sejak tahun 2018 s.d. 2022 penyertaan modal pada Bank Lampung telah bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 artinya masih ada kekurangan penambahan modal sebesar Rp3.500.000.000,00, namun demikian karena Peraturan Daerah ini masa berlaku hanya sampai dengan 31 Desember 2022 telah berakhir maka penambahan investasi ini tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat bahwa alokasi penambahan modal disetor sebesar Rp6.000.000.000,00 periode TA 2021 s.d. TA 2025, berdasarkan data bahwa penambahan tersebut telah dilakukan pada TA 2022 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan demikian s.d. 31 Desember 2023 masih terdapat kekurangan penambahan modal setor sebesar Rp4.000.000.000,00.

5.1.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 116. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Bukan (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	17.918.662.620,00	17.918.125.240,00	100,00	(537.380,00)	7.466.009.725,00	10.452.115.515,00	140,00
Jumlah		17.918.662.620,00	17.918.125.240,00	100,00	(537.380,00)	7.466.009.725,00	10.452.115.515,00	140,00

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dianggarkan sebesar Rp17.918.662.620,00 terealisasi sebesar Rp17.918.125.240,00 atau 100,00%, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.466.009.725,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.452.115.515,00 atau 140,00%. Pembayaran sebesar ini merupakan cicilan pokok pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara surplus/ (defisit) anggaran dengan pembiayaan netto, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 117. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan	988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	99,69	(3.082.504.415,16)	1.024.279.168.592,28	(38.442.964.827,44)	(3,75)
2.	Belanja dan Transfer	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78	(32.765.180.356,20)	1.081.589.995.536,05	(97.180.790.142,25)	(8,98)
3.	Surplus/ (Defisit) (1-2)	(28.255.677.570,00)	1.426.998.371,04	(5,05)	29.682.675.941,04	(57.310.826.943,77)	58.737.825.314,81	(102,49)
4.	Penerimaan Pembiayaan	48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	0,04	114.951.176.858,81	(66.776.836.668,77)	(58,09)
5.	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	18.918.125.240,00	94,98	(1.000.537.380,00)	9.466.009.725,00	9.452.115.515,00	99,85
6.	Pembiayaan Netto (4-5)	28.255.677.570,00	29.256.214.950,04	103,54	1.000.537.380,04	105.485.167.133,81	(76.228.952.183,77)	(72,27)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) = (3 + 6)		0,00	30.683.213.321,08	(100,00)	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)

Tabel diatas menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 sebesar Rp30.683.213.321,08 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp48.174.340.190,04 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp17.491.126.868,96) atau (36,31%).

Untuk penjelasan lebih lengkap tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat dilihat pada CaLK Laporan Perubahan SAL dan penjelasan aset lancar berupa kas dan setara kas pada CaLK Neraca.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.683.213.321,08 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun – tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2023 sebesar Rp48.174.340.190,04 atau turun (15,42%) yaitu sebesar (Rp8.785.015.918,77) dari Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2022 sebesar Rp56.959.356.108,81.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Tahun 2023 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp48.174.340.190,04 atau turun (15,42%) yaitu sebesar (Rp8.785.015.918,77) dari tahun 2022 sebesar Rp56.959.356.108,81.

5.2.3. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA.

Adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2023 sebesar Rp30.683.213.321,08 atau turun (36,31%) yaitu sebesar (Rp17.491.126.868,96) dari SiLPA tahun 2022 sebesar Rp48.174.340.190,04.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak ada koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2023.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp30.683.213.321,08 Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijabarkan pada tabel - tabel dibawah ini.

Tabel 118. Saldo Anggaran Lebih TA 2023 dan 2022

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas di Kas Daerah	25.819.052.572,19	44.640.582.801,71	(18.821.530.229,52)	(42,16)
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	61.075,00	(61.075,00)	(100,00)
3.	Kas di BLUD – RSUD Alimuddin Umar	3.923.656.017,00	3.391.169.051,00	532.486.966,00	15,70
4.	Kas di BLUD – UMKM Dinas Koperindag	11.354.614,86	18.050.002,50	(6.695.387,64)	(37,09)
5.	Kas di BLUD - Puskesmas	613.330.057,40	42.902.073,20	570.427.984,20	1.329,60
6.	Kas Dana BOS – Dinas Pendidikan	154.926.617,63	81.575.186,63	73.351.431,00	89,92
7.	Kas Lainnya – Dana BOP - Dinas Pendidikan	15.842.200,00	0,00	15.842.200,00	∞
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
	SiLPA	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp30.683.213.321,08 rincian SAL Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 119. Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2023 dan 2022

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	48.174.340.190,04	56.959.356.108,81	(8.785.015.918,77)	(15,42)
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(48.174.340.190,04)	(56.959.356.108,81)	8.785.015.918,77	(15,42)
3.	Sub Total (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SiLPA/ (SiKPA)				
5.	Pendapatan Asli Daerah	68.748.525.754,84	70.315.342.633,28	(1.566.816.878,44)	(2,23)
6.	Pendapatan Transfer	917.087.678.010,00	941.241.799.959,00	(24.154.121.949,00)	(2,57)
7.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	12.722.026.000,00	(12.722.026.000,00)	(100,00)
8.	Jumlah (5 s.d.7)	985.836.203.764,84	1.024.279.168.592,28	(38.442.964.827,44)	(3,75)
9.	Belanja Operasi	693.088.637.501,80	715.281.044.749,05	(22.192.407.247,25)	(3,10)
10.	Belanja Modal	117.007.426.132,00	191.561.287.922,00	(74.553.861.790,00)	(38,92)
11.	Belanja Tak Terduga	1.508.132.360,00	2.417.830.965,00	(909.698.605,00)	(37,62)
12.	Belanja Transfer	172.805.009.400,00	172.329.831.900,00	475.177.500,00	0,28
13.	Jumlah (9 s.d.12)	984.409.205.393,80	1.081.589.995.536,05	(97.180.790.142,25)	(8,98)
14.	Penerimaan Pembiayaan	48.174.340.190,04	114.951.176.858,81	(66.776.836.668,77)	(58,09)
15.	Pengeluaran Pembiayaan	18.918.125.240,00	9.466.009.725,00	9.452.115.515,00	99,85
16.	Jumlah (14 – 15)	29.256.214.950,04	105.485.167.133,81	(76.228.952.183,77)	(72,27)
	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (3+8-13+16)	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)

Dari tabel diatas diketahui jumlah Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA 2023 (SiLPA) sebesar Rp30.683.213.321,08 terdiri dari:

Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja dengan serapan target 100% sebesar Rp30.683.213.321,08 dengan rincian:

Total Pelampauan Pendapatan	=	(Rp 3.082.504.415,16)
Total Penghematan Belanja	=	Rp 32.765.180.356,20
Total Pelampauan Pembiayaan Netto	=	Rp 1.000.537.380,04
Pelampauan dan Penghematan	=	Rp 30.683.213.321,08

Berikut lebih detil rincian SiLPA Per 31 Desember 2023:

1. Kas Sisa Penyerapan Dana DAK Fisik TA. 2023

1.1. DAK Reguler:

DAK Bidang Pendidikan	Rp	1.870.279.676,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp	243.942.413,00
DAK Bidang Infrastrktur, Perumahan dan Air Minum	Rp	8.209.000,00
DAK Bidang Jalan	Rp	369.437.400,00
DAK Bidang Transportasi Perdesaan	Rp	9.968.490,00
DAK Bidang Pertanian	Rp	259.700,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	142.500,00
DAK Bidang Pariwisata	Rp	1.634.000,00
Sub Jumlah	Rp	2.503.873.179,00

1.2. DAK IPD/ Penugasan

Penugasan - Pendidikan	Rp	2.860.850,00
Penugasan - Pasar	Rp	1.729.800,00
Penugasan - Pertanian	Rp	88.782.476,00
Penugasan - Industri Kecil Menengah	Rp	629.600,00
Penugasan - Kelautan dan Perikanan	Rp	163.000,00

Penugasan - Pariwisata	Rp	19.081.985,00
Penugasan - Penurunan Stunting	Rp	3.116.000,00
Penugasan - Jalan	Rp	32.144.322,00
Penugasan - Air Minum	Rp	5.194.700,00
Penugasan - Sanitasi	Rp	118.418.397,00
Penugasan - Perumahan dan Permukiman	Rp	361.000,00
Sub Jumlah	Rp	272.482.130,00
1.3. DAK Afirmasi		
DAK Afirmasi Kesehatan (Penguatan Puskesmas DTPK)	Rp	131.001.982,00
DAK Afirmasi Perumahan dan Permukiman	Rp	234.000,00
DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan	Rp	34.044.770,00
DAK Afirmasi Pendidikan	Rp	223.874.100,00
DAK Afirmasi Air Minum	Rp	578.000,00
DAK Afirmasi Sanitasi	Rp	3.382.906,00
Sub Jumlah	Rp	393.115.758,00
2. Kas sisa Penyerapan Dana DAK Non Fisik		
DAK Tunjangan Profesi Guru (TPG)	Rp	1.394.266.060,00
DAK Tambahan Penghasilan (Tamsil)	Rp	64.749.321,00
DAK Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	Rp	43.557.600,00
DAK Ketahanan Pangan & Pertanian	Rp	96.613.600,00
DAK BOK	Rp	919.808.919,00
DAK Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	14.198.400,00
DAK BOKB	Rp	339.812.635,00
DAK Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp	15.842.200,00
DAK Kepariwisata	Rp	51.201.100,00
DAK Non Fisik – BOS (Reguler & Kinerja)	Rp	154.926.617,63
DAK PK2SIKM	Rp	176.535.106,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	137.775.500,00
Sub Jumlah	Rp	3.409.287.058,63
3. Kas sisa Dana Insentif Fiskal (DIF)	Rp	196.440.070,00
4. Kas sisa Dana Alokasi Umum (DAU) - Specific Grant	Rp	5.957.986.374,00
5. Kas sisa Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana	Rp	82.600.389,00
6. Kas sisa DBH Perkebunan Sawit	Rp	4.165.272.000,00
7. Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	Rp	3.923.656.017,00
8. Kas di BLUD PP-KUKM – Dinas Koperasi UKM Perindag	Rp	11.354.614,86
9. Kas di BLUD Puskesmas - Dinas Kesehatan	Rp	613.330.057,40
10. SiLPA yang bisa digunakan untuk Operasional	Rp	9.153.815.673,19
Jumlah SiLPA	Rp	30.683.213.321,08

5.3 PENJELASAN POS – POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban atau hutang dan ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kekayaan sendiri atau ekuitas. Komposisi Neraca Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 120. Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Aset				
2.	Aset Lancar	105.901.292.856,28	79.486.937.358,39	26.414.355.497,89	33,23
	Penyisihan Piutang	(13.464.942.016,30)	(3.286.394.628,18)	(10.178.547.388,12)	309,72
	Aset Lancar Bersih	92.436.350.839,98	76.200.542.730,21	16.235.808.109,77	21,31
3.	Investasi Jangka Panjang	41.330.213.725,66	41.955.870.814,57	(625.657.088,91)	(1,49)
	Investasi Jangka Panjang Bersih	41.330.213.725,66	41.955.870.814,57	(625.657.088,91)	(1,49)
4.	Aset Tetap	4.201.074.228.511,49	4.067.040.267.592,49	134.033.960.919,00	3,30
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.642.130.036.933,04)	(1.526.287.811.742,86)	(115.842.225.190,18)	7,59
	Aset Tetap Bersih	2.558.944.191.578,45	2.540.752.455.849,63	18.191.735.728,82	0,72
5.	Aset Lainnya	228.310.153.599,39	186.832.239.633,00	41.477.913.966,39	22,20
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.870.439.575,00)	(2.592.834.344,00)	(277.605.231,00)	10,71
	Aset Lainnya Bersih	225.439.714.024,39	184.239.405.289,00	41.200.308.735,39	22,36
6.	Jumlah Aset	2.918.150.470.168,48	2.843.148.274.683,41	75.002.195.485,07	2,64
7.	Kewajiban				
8.	Kewajiban Jangka Pendek	29.937.934.224,15	24.112.385.890,81	5.825.548.333,34	24,16
9.	Kewajiban Jangka Panjang	34.342.951.595,00	52.261.014.935,00	(17.918.063.340,00)	(34,29)
10.	Jumlah Kewajiban	64.280.885.819,15	76.373.400.825,81	(12.092.515.006,66)	(15,83)
11.	Ekuitas				
12.	Ekuitas	2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60	87.094.710.491,73	3,15
13.	Jumlah Ekuitas	2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60	87.094.710.491,73	3,15
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.918.150.470.168,48	2.843.148.274.683,41	75.002.195.485,07	2,64

Untuk lebih jelasnya rincian aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dibawah ini.

5.3.1. ASET

Aset merupakan salah satu pos yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Total aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.918.164.668.268,48 naik sebesar Rp75.016.393.585,07 atau 2,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.843.148.274.683,41 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 121. Aset Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Aset Lancar	105.901.292.856,28	79.486.937.358,39	26.414.355.497,89	33,23
	Penyisihan Piutang	(13.464.942.016,30)	(3.286.394.628,18)	(10.178.547.388,12)	309,72
	Sub Jumlah	92.436.350.839,98	76.200.542.730,21	16.235.808.109,77	21,31
2.	Investasi Jangka Panjang	41.330.213.725,66	41.955.870.814,57	(625.657.088,91)	(1,49)
	Sub Jumlah	41.330.213.725,66	41.955.870.814,57	(625.657.088,91)	(1,49)
3.	Aset Tetap	4.201.074.228.511,49	4.067.040.267.592,49	134.033.960.919,00	3,30
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.642.130.036.933,04)	(1.526.287.811.742,86)	(115.842.225.190,18)	7,59

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Sub Jumlah	2.558.944.191.578,45	2.540.752.455.849,63	18.191.735.728,82	0,72
4.	Aset Lainnya	228.310.153.599,39	186.832.239.633,00	41.477.913.966,39	22,20
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.870.439.575,00)	(2.592.834.344,00)	(277.605.231,00)	10,71
	Sub Jumlah	225.439.714.024,39	184.239.405.289,00	41.200.308.735,39	22,36
	Jumlah Aset	2.918.150.470.168,48	2.843.148.274.683,41	75.002.195.485,07	2,64

Kenaikan sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset tetap akibat dari belanja modal dana APBD murni maupun belanja modal dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah.

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagian besar terdiri atas aset tetap bersih yaitu Rp2.558.944.191.578,45 atau 87,69% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Berikut komposisi aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023.

5.3.1.1. ASET LANCAR

Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel berikut.

Tabel 122. Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas dan Setara Kas	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85	(17.448.119.823,62)	(36,12)
2.	Piutang Pajak Daerah	55.285.946,00	38.759.446,00	16.526.500,00	42,64
3.	Piutang Retribusi Daerah	41.882.856,00	32.894.406,00	8.988.450,00	27,33
4.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	757.985.400,01	(757.985.400,01)	(100,00)
5.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.501.714.574,80	2.514.816.022,48	(13.101.447,68)	(0,52)
6.	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	112.945.547,00	43.393.785,00	69.551.762,00	160,28
7.	Piutang Transfer antar Daerah	58.541.978.212,00	16.889.268.081,00	41.652.710.131,00	246,62
8.	Penyisihan Piutang	(13.464.942.016,30)	(3.286.394.628,18)	(10.178.547.388,12)	309,72
9.	Beban Dibayar Dimuka	13.081.250,00	83.083.328,00	(70.002.078,00)	(84,26)
10.	Persediaan	13.775.722.508,25	10.819.935.104,05	2.955.787.404,20	27,32
	Jumlah Aset Lancar	92.436.350.839,98	76.200.542.730,21	16.235.808.109,77	21,31

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas, secara umum terjadi peningkatan nilai aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.235.808.109,77 atau 21,31% jika dibanding pada 31 Desember 2022 sebesar Rp76.200.542.730,21.

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD Alimuddin Umar, BLUD UMKM Dinas Koperasi UKM dan Perindag, BLUD UPT Puskesmas – Dinas Kesehatan, Bendahara Pada Perangkat Daerah, Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan, baik berupa uang tunai, rekening giro bank yang seluruhnya merupakan Kas Daerah atau Hutang PFK yang belum disetor ke Kas Negara/Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.858.681.962,23 mengalami penurunan sebesar (Rp17.448.119.823,62) atau (36,12%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.306.801.785,85 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 123.Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas di Kas Daerah	25.819.052.572,19	44.640.582.801,71	(18.821.530.229,520)	(42,16)
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	61.075,00	(61.075,000)	(100,00)
3.	Kas di BLUD	4.597.603.900,41	3.452.121.126,70	1.145.482.773,71	33,18
4.	Kas Dana BOS	281.132.047,63	214.036.782,44	67.095.265,19	31,35
5.	Kas Lainnya	15.842.200,00	0,00	15.842.200,00	∞
6.	Kas Dana BOK Puskesmas	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
Jumlah Kas dan Setara Kas		30.858.681.962,23	48.306.801.785,85	(17.448.119.823,62)	(36,12)

Adapun saldo kas pada tabel diatas sebagian merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan sebagian merupakan uang titipan sebagai pajak yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2023 dan sebagian lagi merupakan Kas Lainnya yang bukan merupakan unsur SILPA, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 124. Rincian Komposisi Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas di Kas Daerah	25.819.052.572,19	44.640.582.801,71	(18.821.530.229,520)	(42,16)
	- Kas SILPA	25.819.052.572,19	44.640.582.801,71	(18.821.530.229,520)	(42,16)
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	61.075,00	(61.075,00)	(100,00)
	Kas SILPA	0,00	61.075,00	(61.075,00)	(100,00)
	- Kec. Suoh	0,00	1.075,00	(1.075,00)	(100,00)
	- Kec. Gedung Surian	0,00	60.000,00	(60.000,00)	(100,00)
3.	Kas di BLUD	4.597.603.900,41	3.452.121.126,70	1.145.482.773,71	33,18
	Kas SiLPA	4.548.340.689,26	3.452.121.126,70	1.096.219.562,56	31,75
	- Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	3.923.656.017,00	3.391.169.051,00	532.486.966,00	15,70
	- Kas di BLUD Dinas Koperasi ,UKM, Perindag	11.354.614,86	18.050.002,50	(6.695.387,64)	(37,09)
	- Kas di BLUD Puskesmas – Dinas Kesehatan	613.330.057,40	42.902.073,20	570.427.984,20	1.329,60
	Kas Non SiLPA	49.263.211,15	0,00	49.263.211,15	∞
	- Kas di BLUD Puskesmas – Utang PFK	49.263.211,15	0,00	49.263.211,15	∞
4.	Kas Dana BOS	281.132.047,63	214.036.782,44	67.095.265,19	31,35
	Kas SiLPA	154.926.617,63	81.575.186,63	73.351.431,00	89,92
	Dinas Pendidikan (BOS Reguler)	98.411.867,63	81.575.186,63	16.836.681,00	20,64
	Dinas Pendidikan (BOS Kinerja)	56.514.750,00	0,00	56.514.750,00	100,00
	Kas Non SiLPA	126.205.430,00	132.461.595,81	(6.256.165,81)	(4,72)
	Dinas Pendidikan (BOS Affirmasi)	2.930.439,00	2.930.439,00	0,00	0,00
	Dinas Pendidikan (BOS Kinerja)	0,00	428.750,00	(428.750,00)	(100,00)
	Dinas Pendidikan (BOS Reguler PFK)	114.155.765,00	129.102.406,81	(14.946.641,81)	(11,58)
	Dinas Pendidikan (BOS Kinerja PFK)	9.119.226,00	0,00	9.119.226,00	∞
5.	Kas Lainnya:	15.842.200,00	0,00	15.842.200,00	∞
	Kas SiLPA	15.842.200,00	0,00	15.842.200,00	∞
	Dinas Pendidikan (BOP Kesetaraan Reguler)	2.382.200,00	0,00	2.382.200,00	∞
	Dinas Pendidikan (BOP Kesetaraan Kinerja)	13.460.000,00	0,00	13.460.000,00	∞
6.	Kas Dana BOK Puskesmas	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
	Kas SiLPA	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
	Kas Dana BOK Puskesmas	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
	Kas SiLPA	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)
	Kas Non SiLPA	175.468.641,15	132.461.595,81	43.007.045,34	32,47
	Jumlah	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85	(17.448.119.823,62)	(36,12)

Penjelasan lebih rinci berkaitan dengan SILPA selengkapnya dapat dilihat pada Penjelasan CaLK Laporan Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Penjelasan Utang PFK dapat dilihat pada CaLK Neraca, sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro yang terdapat pada Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nomor 387.00.09.00001.9. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ini digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Pemerintah Provinsi dan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.819.052.572,19 turun sebesar (Rp18.821.530.229,52) atau (42,16%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.640.582.801,71 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 125. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	RKUD SILPA	25.819.052.572,19	44.640.582.801,71	(18.821.530.229,52)	(42,16)
	Jumlah	25.819.052.572,19	44.640.582.801,71	(18.821.530.229,52)	(42,16)

Dari jumlah Kas di Kas Daerah tersebut diatas terdapat senilai Rp16.665.236.899,00 berupa kas yang dibatasi penggunaannya (earmark) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa DAK Reguler	Rp	2.503.873.179,00
b. Sisa DAK Penugasan	Rp	272.482.130,00
c. Sisa DAK Affirmasi	Rp	393.115.758,00
d. Sisa DAK Non Fisik	Rp	3.093.466.999,00
e. Sisa Dana Insentif Fiskal	Rp	196.440.070,00
f. Sisa DAU Spesific Grant (SG)	Rp	5.957.986.374,00
g. Sisa Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonsiliasi Pasca Bencana	Rp	82.600.389,00
h. Kas Sisa DBH Perkebunan Sawit	Rp	4.165.272.000,00
	Jumlah	Rp 16.665.236.899,00

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo uang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berasal dari sisa kas dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Utang PFK berupa pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp61.075,00) atau (100,00%) dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.075,00 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 126. Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas SILPA				
	- Kec. Suoh	0,00	1.075,00	(1.075,00)	(100,00)
	- Kec. Gedung Surian	0,00	60.000,00	(60.000,00)	(100,00)
	Kas SILPA	0,00	61.075,00	(61.075,00)	(100,00)
	Jumlah Seluruhnya	0,00	61.075,00	(61.075,00)	(100,00)

5.3.1.1.1.3. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah saldo kas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD Alimuddin Umar berupa jasa layanan rumah sakit dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa jasa layanan atas pinjaman dana bergulir UMKM dan pendapatan jasa giro bank dan Kas di BLUD Puskesmas.

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.597.603.900,41 atau naik sebesar Rp1.145.482.773,71 atau 33,18% dari tahun 2022 sebesar Rp3.452.121.126,70 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 127. Kas di BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
Kas SILPA					
1.	Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	3.923.656.017,00	3.391.169.051,00	532.486.966,00	15,70
2.	Kas di BLUD Diskop UKM Perindag	11.354.614,86	18.050.002,50	(6.695.387,64)	(37,09)
3.	Kas di BLUD Puskesmas	613.330.057,40	42.902.073,20	570.427.984,20	1.329,60
Kas Non SILPA					
1.	Kas Utang PFK Puskesmas	49.263.211,15	0,00	49.263.211,15	∞
Jumlah Seluruh		4.597.603.900,41	3.452.121.126,70	1.145.482.773,71	33,18

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kas di BLUD berada pada 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu pada:

1. BLUD RSUD Alimuddin Umar total sebesar Rp3.923.656.017,00 terdiri dari:
 - a. Kas Tunai sebesar Rp62.037.221,00 (terdapat uang muka kegiatan/ panjar sebesar Rp48.799.232,00); dan
 - b. Rekening Koran BLUD RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp3.861.618.796,00 yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi ditempatkan pada Bank BNI Rekening a.n. PPK BLUD RSUD Alimuddin Umar Giro Nomor 1237656932.
2. BLUD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp11.354.614,86 terdiri dari:
 - a. Rekening Giro Bank Lampung No. 387.00.05.00308.4 a.n. UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM Rekening Jasa sebesar Rp5.819.277,23 (Digunakan untuk penempatan, pencairan jasa dana pengguliran dana BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM).
 - b. Rekening Giro Bank Lampung No. 387.00.05.00309.3 a.n. BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM Rek. Lain-lain sebesar Rp5.535.337,63.
3. BLUD Puskesmas sebesar Rp662.593.268,55 terdiri atas Dana BLUD Rp613.330.057,40 dan Utang PFK sebesar Rp49.263.211,15.

Berikut disajikan utang PFK pada Puskesmas Per 31 Desember 2023 yang telah dibayarkan pada tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 128. Utang PFK pada Puskesmas Per 31 Desember 2023 disetor pada Tahun 2024

No.	Uraian	Waktu Penyetoran	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Utang PPh Pasal 21	Januari 2024	23.834.711,00
2.	Utang PPh Pasal 22	Januari 2024	2.839.416,89
3.	Utang PPN	Januari 2024	19.494.116,26
4.	Utang Pajak Daerah	Januari 2024	1.897.150,00
5.	Utang Pajak Daerah	April 2024	1.197.817,00
Jumlah			49.263.211,15

Kas di BLUD sebesar Rp4.597.603.900,41 disajikan pada lampiran 13.

5.3.1.1.1.4. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS adalah akun yang berisi saldo - saldo yang menampung sisa kas dana BOS di sekolah – sekolah per 31 Desember 2023 total sebesar Rp281.132.047,63 mengalami peningkatan sebesar Rp67.095.265,19 atau 31,35% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp214.036.782,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 129. Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas Dana BOS				
	Kas SILPA				
	- Dinas Pendidikan; BOS Reguler	98.411.867,63	81.575.186,63	16.836.681,00	20,64
	- Dinas Pendidikan; BOS Kinerja	56.514.750,00	0,00	56.514.750,00	100,00
	Jumlah Kas SILPA	154.926.617,63	81.575.186,63	73.351.431,00	89,92
	Kas Non SILPA				
	- Dinas Pendidikan (BOS Afirmasi)	2.930.439,00	2.930.439,00	0,00	0,00
	- Dinas Pendidikan (BOS Kinerja)	0,00	428.750,00	(428.750,00)	(100,00)
	- Dinas Pendidikan (BOS Reguler PFK)	114.155.765,00	129.102.406,81	(14.946.641,81)	(11,58)
	- Dinas Pendidikan (BOS Kinerja PFK)	9.119.226,00	0,00	9.119.226,00	∞
	Jumlah Kas Non SILPA	126.205.430,00	132.461.595,81	(6.256.165,81)	(4,72)
	Jumlah	281.132.047,63	214.036.782,44	67.095.265,19	31,35

Berikut disajikan utang PFK pada Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 yang telah dibayarkan pada tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 130. Utang PFK pada Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 disetor pada Tahun 2024

No.	Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang PPh Pasal 21	1.307.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	3.706.000,00
2.	Utang PPh Pasal 23	2.000,00	0,00	153.000,00	0,00	155.000,00
3.	Utang PPN	46.682.592,00	45.835.107,00	11.825.242,00	0,00	104.342.941,00
4.	Utang Pajak Daerah	2.280.200,00	3.546.800,00	8.981.550,00	262.500,00	15.071.050,00
	Jumlah	50.271.792,00	51.780.907,00	20.959.792,00	262.500,00	123.274.991,00

Untuk lebih rinci sisa Kas Dana BOS sebesar Rp281.132.047,63 disajikan pada lampiran 12.

5.3.1.1.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah akun yang berisi saldo - saldo yang menampung sisa kas yang tidak memiliki nama akun kas tersendiri, saldo ini berupa sisa kas BOP Kesetaraan dan BOP Reguler pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan per 31 Desember 2023 total sebesar Rp15.842.200,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.842.200,00 atau 100,00% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 131. Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas Lainnya				
	Kas SILPA				
	- Kas BOP Kesetaraan Reguler – Disdik	2.382.200,00	0,00	2.382.200,00	∞
	- Kas BOP Kesetaraan Kinerja - Disdik	13.460.000,00	0,00	13.460.000,00	∞
	Jumlah Kas SILPA	15.842.200,00	0,00	15.842.200,00	∞
	Jumlah	15.842.200,00	0,00	15.842.200,00	∞

5.3.1.1.1.6. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas adalah akun yang berisi saldo - saldo yang menampung sisa kas Dana BOK Puskesmas yang bersumber dari APBN per 31 Desember 2023 total sebesar Rp145.051.242,00 mengalami peningkatan sebesar Rp145.051.242,00 dari saldo tahun 2022 sebesar Rp0,00 sebagaimana disajikan dalam lampiran 13, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 132. Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas Dana BOK Puskesmas				
	Kas SILPA				
	- Kas Dana BOK Puskesmas	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
	Jumlah Kas SILPA	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
	Jumlah	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞

PIUTANG

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap penerimaan kas, baik pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lainnya, saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.253.807.135,80 mengalami kenaikan sebesar Rp40.976.689.995,31 atau 202,08% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.277.117.140,49. Adapun rincian Piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 133. Daftar Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Piutang Pajak Daerah	55.285.946,00	38.759.446,00	16.526.500,00	42,64
2.	Piutang Retribusi	41.882.856,00	32.894.406,00	8.988.450,00	27,33
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	757.985.400,01	(757.985.400,01)	(100,00)
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.501.714.574,80	2.514.816.022,48	(13.101.447,68)	(0,52)
5.	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	112.945.547,00	43.393.785,00	69.551.762,00	160,28
6.	Piutang Transfer Antar Daerah	58.541.978.212,00	16.889.268.081,00	41.652.710.131,00	246,62
	Jumlah	61.253.807.135,80	20.277.117.140,49	40.976.689.995,31	202,08

Adapun lebih rinci rincian piutang disajikan pada lampiran 14 pada laporan keuangan ini. Berikut penjelasan terhadap masing-masing jenis piutang sebagai berikut:

5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), sampai dengan batas waktu tertentu pada tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo Piutang Pajak Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.285.946,00 atau naik sebesar Rp16.526.500,00 atau 42,64% dibandingkan TA. 2022 sebesar Rp38.759.446,00 lebih lengkap rincian piutang pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 134. Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak Hotel	0,00	495.000,00	(495.000,00)	(100,00)
2.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	21.871.896,00	17.122.996,00	4.748.900,00	27,73
3.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	29.864.050,00	16.181.400,00	13.682.650,00	84,56
4.	Pajak Parkir	3.550.000,00	900.000,00	2.650.000,00	294,44
5.	Pajak Bumi dan Bangunan P2	0,00	4.060.050,00	(4.060.050,00)	(100,00)
Jumlah		55.285.946,00	38.759.446,00	16.526.500,00	42,64

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung saldo tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui beberapa Perangkat Daerah pengelola terkait, yang sampai dengan pelaporan neraca belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.882.856,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.988.450,00 atau 27,33% dibandingkan dari tahun 2022 sebesar Rp32.894.406,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 135. Piutang Retribusi Daerah Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Diskominfo				
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.680.356,00	25.679.156,00	1.200,00	0,00
2.	BPKD				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Penyewaan Tanah	16.127.500,00	6.436.250,00	9.691.250,00	150,57
3.	Dinas PU PR				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)
4.	Dinas Lingkungan Hidup				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	54.000,00	(54.000,00)	(100,00)
6.	Sekretariat Daerah				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
Jumlah		41.882.856,00	32.894.406,00	8.988.450,00	27,33

5.3.1.1.4. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang yang timbul akibat dari pengakuan potensi pendapatan atas sebagian laba yang akan dibagikan oleh BUMD berupa deviden. Adapun piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 turun (Rp0,00) atau (100,00%) dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp757.985.400,01, disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 136. Piutang HPKDYD 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – BPRS	0,00	757.985.400,01	(757.985.400,01)	(100,00)
Jumlah		0,00	757.985.400,01	(757.985.400,01)	(100,00)

5.3.1.1.5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah merupakan piutang Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk piutang pendapatan retribusi, piutang pendapatan pajak, piutang pendapatan dari perizinan tertentu dan piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Saldo piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.501.714.574,80 atau mengalami penurunan sebesar (Rp13.101.447,68) atau (0,52%) dari tahun 2022 sebesar Rp2.514.816.022,48 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 137. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Kesehatan				
	- Pendapatan BLUD	265.879.565,00	413.737.897,00	(147.858.332,00)	(35,74)
	Jumlah	265.879.565,00	413.737.897,00	(147.858.332,00)	(35,74)
2.	RSUD Alimuddin Umar				
	- Pendapatan BLUD	2.091.053.809,00	1.946.253.750,00	144.800.059,00	7,44
	Jumlah	2.091.053.809,00	1.946.253.750,00	144.800.059,00	7,44
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.180.349,24	1.550.270,40	(369.921,16)	(23,86)
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		573.253,52	(573.253,52)	(100,00)
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	62.510.851,56	0,00	62.510.851,56	100,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	82.510.851,56	(82.510.851,56)	(100,00)
	Jumlah	80.691.200,80	84.634.375,48	(3.943.174,68)	(4,66)
4.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag				
	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (BLUD)	64.090.000,00	70.190.000,00	(6.100.000,00)	(8,69)
	Jumlah	64.090.000,00	70.190.000,00	(6.100.000,00)	(8,69)
	Jumlah Total	2.501.714.574,80	2.514.816.022,48	(13.101.447,68)	(0,52)

Berikut penjelasan terhadap rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah:

1. Piutang pelayanan kesehatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan – Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPT Puskesmas sebesar Rp265.879.565,00 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 138. Rincian Piutang Jasa Layanan pada PPK-BLUD UPT Puskesmas Per 31 Desember 2023

NO	KETERANGAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Puskesmas Sumberjaya	35.363.530,00
2	Puskesmas Kebun Tebu	16.329.100,00
3	Puskesmas Gedung Surian	25.262.195,00
4	Puskesmas Air Hitam	11.900.000,00
5	Puskesmas Fajar Bulan	40.534.760,00
6	Puskesmas Sekincau	18.669.490,00
7	Puskesmas Pagar Dewa	3.400.000,00
8	Puskesmas Batu Ketulis	18.691.910,00
9	Puskesmas Kenali	30.892.720,00

NO	KETERANGAN	JUMLAH
10	Puskesmas Batu Brak	10.279.180,00
11	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	5.458.000,00
12	Puskesmas Srimulyo	11.697.500,00
13	Puskesmas Buay Nyerupa	30.386.180,00
14	Puskesmas Lombok	7.015.000,00
Jumlah Piutang Pelayanan		265.879.565,00

2. Piutang pelayanan kesehatan pada Perangkat Daerah BLUD RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp2.091.053.809,00 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 139.Rincian Piutang Jasa Layanan pada RSUD Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Desember 2023	2.091.053.809,00
Jumlah Piutang Pelayanan		2.091.053.809,00

3. Piutang Lain-lain PAD yang sah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp80.691.200,80 terdiri atas : a) Pendapatan Denda atas PBB P2 sebesar Rp1.180.349,24; b) Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp62.510.851,56; c) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Taspen) sebesar Rp17.000.000,00.
4. Piutang atas jasa pengguliran dana perkuatan permodalan pada BLUD Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag sebesar Rp64.090.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.100.000,00) atau (8,69%) dari Piutang Tahun 2022 sebesar Rp70.190.000,00

5.3.1.1.6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung saldo tagihan/ piutang transfer dari pemerintah pusat dhi adalah Kementerian Keuangan yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Transfer Pemerintah Pusat terjadi dikarenakan adanya penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang lebih kecil dari Penetapan awal (KMK 38/KM.07/2023, PMK 90/2023, PMK 159/2023), Berdasarkan PMK Nomor 159/2023 tanggal 27 Desember 2023 terdapat Piutang berupa Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp3.662.987.000,00 disajikan sebagai Aset Lainnya – Tagihan Jangka Panjang. Berikut rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 140. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	308,00	0,00	308,00	∞
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.097,00	0,00	1.097,00	∞
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	885,00	0,00	885,00	∞
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.347,00	0,00	1.347,00	∞
5.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	112.941.910,00	43.393.785,00	69.548.125,00	160,27
Jumlah		112.945.547,00	43.393.785,00	69.551.762,00	160,28

5.3.1.1.7. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung saldo tagihan/ piutang transfer dari pemerintah daerah lainnya dhi adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Transfer antar Daerah terjadi dikarenakan adanya beberapa dasar penetapan diantaranya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/349/VI.03/HK/2023 TW I Tahun 2023; G/460/VI.03/HK/2023 DBH TW II Tahun 2023; G/695/VI.03/HK/2023 DBH TW III Tahun 2023; G/155/VI.03/HK/2024 DBH TW IV Tahun 2023; G/819/VI.03/HK/2023 DBH TW IV Pajak Rokok.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebesar Rp58.541.978.212,00 mengalami peningkatan sebesar Rp41.652.710.131,00 atau 246,62% dibandingkan dari tahun 2022 sebesar Rp16.889.268.081,00 Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 141. Piutang Transfer Antar Daerah 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak KB (PKB)	12.340.200.970,00	6.932.522.191,00	5.407.678.779,00	78,00
2.	Bea Balik Nama KB (BBN - KB)	7.028.302.719,00	2.433.188.972,00	4.595.113.747,00	188,85
3.	Pajak Bahan Bakar KB (PBB - KB)	34.812.496.882,00	7.399.535.894,00	27.412.960.988,00	370,47
4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	369.138.944,00	124.021.024,00	245.117.920,00	197,64
5.	Pajak Rokok	3.991.838.697,00	0,00	3.991.838.697,00	∞
Jumlah		58.541.978.212,00	16.889.268.081,00	41.652.710.131,00	246,62

*) KB = Kendaraan Bermotor

Penerimaan Bagi Hasil Pajak berdasarkan dasar hukum Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 142. Dasar Hukum Pendapatan dan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2023

No	Keputusan Gubernur Lampung			Realisasi 2022	Piutang 2022	Realisasi 2023	Piutang 2023
	Nomor	Uraian	Nominal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4-5	(7)	(8)=4-5-7
1.	G/475/VI.03/HK/2022	BH Pajak TW II 2022	12.666.107.413,00	9.599.884.736,00	3.066.222.677,00	3.066.222.677,00	0,00
2.	G/721/VI.03/HK/2022	BH Pajak TW III 2022	13.823.045.404,00	0,00	13.823.045.404,00	13.823.045.404,00	0,00
3.	G/190/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW IV 2022	15.529.863.868,00	0,00	0,00	15.529.863.868,00	0,00
4.	G/349/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW I 2023	14.789.537.829,00	0,00	0,00	6.306.271.316,00	8.483.266.513,00
5.	G/460/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW II 2023	14.650.377.960,00	0,00	0,00	0,00	14.650.377.960,00
6.	G/695/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW III 2023	16.167.655.477,00	0,00	0,00	0,00	16.167.655.477,00
7.	G/155/VI.03/HK/2024	BH Pajak TW IV 2023	15.248.839.565,00	0,00	0,00	0,00	15.248.839.565,00
8.	G/15/VI.03/HK/2023	Pajak Rokok TW IV 2022	4.443.781.709,00	0,00	0,00	4.443.781.709,00	0,00
9.	G/292/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok Desember 2022	2.084.499.278,00	0,00	0,00	2.084.499.278,00	0,00
10.	G/291/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW I 2023	6.170.964.450,00	0,00	0,00	6.170.964.450,00	0,00
11.	G/438/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW II 2023	5.298.712.925,00	0,00	0,00	5.298.712.925,00	0,00
12.	G/696/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW III 2023	4.717.652.271,00	0,00	0,00	4.717.652.271,00	0,00
13.	G/819/VI.03/HK/2023	Pjk Rokok TW IV 2023	3.991.838.697,00	0,00	0,00	0,00	3.991.838.697,00
Jumlah			129.582.876.846,00	9.599.884.736,00	16.889.268.081,00	61.441.013.898,00	58.541.978.212,00

Lebih rinci Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk masing – masing Jenis Piutang berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 143. Dasar Hukum Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Dasar Hukum Penetapan Piutang			31 Desember 2023 (Rp)
		Dasar	Tanggal	Nomor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pajak KB (PKB)				
	Triwulan II TA 2023	Kep.Gub	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	3.679.302.342,00
	Triwulan III TA 2023	Kep.Gub	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	4.820.220.784,00
	Triwulan IV TA 2023	Kep.Gub	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	3.840.677.844,00
2.	Pajak BBN KB				
	Triwulan II TA 2023	Kep.Gub	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	2.460.575.855,00
	Triwulan III TA 2023	Kep.Gub	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	2.399.649.040,00
	Triwulan IV TA 2023	Kep.Gub	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	2.168.077.824,00
3.	Pajak Bahan Bakar KB (PBB - KB)				
	Triwulan I TA 2023	Kep.Gub	26/06/2023	G/349/VI.03/HK/2023	8.483.266.513,00
	Triwulan II TA 2023	Kep.Gub	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	8.361.809.927,00
	Triwulan III TA 2023	Kep.Gub	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	8.835.050.626,00
	Triwulan IV TA 2023	Kep.Gub	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	9.132.369.816,00
4.	Pajak PAP				
	Triwulan II TA 2023	Kep.Gub	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	148.689.836,00
	Triwulan III TA 2023	Kep.Gub	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	112.735.027,00
	Triwulan IV TA 2023	Kep.Gub	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	107.714.081,00
5.	Pajak Rokok				
	Triwulan IV TA 2023	Kep.Gub	28/12/2023	G/819/VI.03/HK/2023	3.991.838.697,00
Jumlah					58.541.978.212,00

5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan/ (*Net Realizable Value*).

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 ini melakukan penyisihan terhadap piutang, untuk penyisihan piutang yang merupakan penyesuaian tahun - tahun sebelumnya menjadi unsur pengurang ekuitas, sedangkan untuk penyisihan piutang pada tahun berkenaan merupakan unsur beban penyisihan piutang.

Berikut disajikan dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang yaitu kualitas piutang, yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori pada tabel dibawah ini.

Tabel 144. Kategori Kualitas Penyisihan Piutang

No	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah			
	Umur Piutang 0 s.d. 1 Tahun dan/atau	Umur Piutang 1 s.d. 2 Tahun dan/atau	Umur Piutang 3 s.d. 5 Tahun dan/atau	Umur Piutang > 5 Tahun dan/atau
	WP menyetujui hasil pemeriksaan dan/atau	WP Menyetujui sebagian hasil pemeriksaan dan/atau	WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan/atau	WP Tidak ditemukan dan/atau
	WP Kooperatif dan/atau	WP Kurang Kooperatif dan/atau	WP Tidak Kooperatif dan/atau	WP Bangkrut/Meninggal Dunia dan/atau
	WP Likuid dan/atau	WP Mengajukan Banding dan/atau	WP mengalami kesulitan likuiditas dan/atau	WP mengalami musibah dan/atau
	WP Tidak melakukan Banding dan/atau	Tarif Penyisihan 10,00%	Tarif Penyisihan 50,00%	Tarif Penyisihan 100,00%
	Tarif Penyisihan 0,5%			
2.	Penyisihan Piutang Selain Pajak Daerah			

No	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umur Piutang 0 s.d. 1 Bulan dan/atau	Umur Piutang 1 s.d. 3 Bulan dan/atau	Umur Piutang 3 s.d. 12 Bulan dan/atau	Umur Piutang > 12 Bulan dan/atau
	Belum dilunasi s.d. tanggal jatuh tempo dan/atau	Jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan
	Tarif Penyisihan 0,5%	Tarif Penyisihan 10,00%	Tarif Penyisihan 50,00%	Tarif Penyisihan 100,00%

adapun rincian penyisihan piutang Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 145. Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak Daerah	5.152.805,00	4.447.812,50	704.992,50	15,85
2.	Retribusi	35.756.006,00	21.596.181,00	14.159.825,00	65,57
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	3.789.927,00	(3.789.927,00)	(100,00)
4.	Lain-lain PAD yang Sah	143.677.302,05	340.927.859,86	(197.250.557,81)	(57,86)
5.	Transfer Pemerintah Pusat	564.727,74	216.968,92	347.758,82	160,28
6.	Transfer Antar Daerah	13.279.791.175,51	2.915.415.878,90	10.364.375.296,61	355,50
	Jumlah	13.464.942.016,30	3.286.394.628,18	10.178.547.388,12	309,72

Tabel 146. Penyisihan Piutang Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Kesehatan				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan BLUD	1.329.397,82	38.629.691,46	(37.300.293,64)	(96,56)
	Jumlah	1.329.397,82	38.629.691,46	(37.300.293,64)	(96,56)
2.	RSUD Alimuddin Umar				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan BLUD	9.381.878,05	196.474.759,25	(187.092.881,20)	(95,22)
	Jumlah	9.381.878,05	196.474.759,25	(187.092.881,20)	(95,22)
3.	Dinas PU PR				
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	75.000,00	(75.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	75.000,00	(75.000,00)	(100,00)
4.	Diskominfo				
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.679.756,00	18.225.556,00	7.454.200,00	40,90
	Jumlah	25.679.756,00	18.225.556,00	7.454.200,00	40,90
5.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Pendapatan dari UPT BLUD Perkuatan Permodalan	62.965.000,00	64.567.500,00	(1.602.500,00)	(2,48)
	Jumlah	62.965.000,00	64.567.500,00	(1.602.500,00)	(2,48)
6.	Sekretariat Daerah				
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	2.500,00	(2.500,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	2.500,00	(2.500,00)	(100,00)
7.	BPKD				
	Pajak Daerah :				

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	- Pajak Hotel	0,00	2.475,00	(2.475,00)	(100,00)
	- Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.985.734,75	4.339.630,25	646.104,50	14,89
	- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	149.320,25	80.907,00	68.413,25	84,56
	- Pajak Parkir	17.750,00	4.500,00	13.250,00	294,44
	- Pajak Bumi dan Bangunan P2		20.300,25	(20.300,25)	(100,00)
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	10.001.250,00	3.218.125,00	6.783.125,00	210,78
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :				
	- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - BPRS	0,00	3.789.927,00	(3.789.927,00)	(100,00)
	Lain-lain PAD yang Sah				
	- Pendapatan Denda PBBP2	590.174,62	7.751,35	582.423,27	7.513,83
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	62.510.851,56	41.248.157,80	21.262.693,76	51,55
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00
	Jumlah	85.230.081,18	52.786.773,65	32.443.307,53	61,46
8.	PPKD				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1,54	0,00	1,54	∞
	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	564.709,55	216.968,92	347.740,63	160,27
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5,48		5,48	∞
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4,43	0,00	4,43	∞
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6,74	0,00	6,74	∞
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.340.876.638,62	1.919.741.289,90	421.135.348,72	21,94
	- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.481.093.220,62	243.318.897,20	1.237.774.323,42	508,70
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.351.705.131,68	739.953.589,40	8.611.751.542,28	1.163,82
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	86.156.991,10	12.402.102,40	73.754.888,70	594,70
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.959.193,49	0,00	19.959.193,49	∞
	Jumlah	13.280.355.903,25	2.915.632.847,82	10.364.723.055,43	355,49
	Jumlah Seluruhnya	13.464.942.016,30	3.286.394.628,18	10.178.547.388,12	309,72

Berikut Saldo Rincian Penyisihan Piutang tiap Perangkat Daerah berdasarkan kronologi penyisihan piutang dari tahun – tahun sebelumnya dan pada tahun berkenaan.

Tabel 147. Mutasi Penyisihan Piutang Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	URAIAN	Penyisihan s.d. Per 31 Des 2022	Penyesuaian Tahun Berkenaan		Penyisihan s.d. Per 31 Des 2023
			Bertambah (Beban Penyisihan)	Berkurang (Ekuitas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
1.	Dinas Kesehatan				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan BLUD	38.629.691,46	0,00	37.300.293,64	1.329.397,82
	Sub Jumlah	38.629.691,46	0,00	37.300.293,64	1.329.397,82
2.	RSUD Alimuddin Umar				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan BLUD	196.474.759,25	0,00	187.092.881,20	9.381.878,05
	Sub Jumlah	196.474.759,25	0,00	187.092.881,20	9.381.878,05

No	URAIAN	Penyisihan s.d. Per 31 Des 2022	Penyesuaian Tahun Berkenaan		Penyisihan s.d. Per 31 Des 2023
			Bertambah (Beban Penyisihan)	Berkurang (Ekuitas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
3.	Dinas PU PR				
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	Sub Jumlah	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
4.	Diskominfo				
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.225.556,00	7.454.200,00	0,00	25.679.756,00
	Sub Jumlah	18.225.556,00	7.454.200,00	0,00	25.679.756,00
5.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Jasas Pengguliran	64.567.500,00	0,00	1.602.500,00	62.965.000,00
	Sub Jumlah	64.567.500,00	0,00	1.602.500,00	62.965.000,00
6.	Sekretariat Daerah				
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	Sub Jumlah	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7.	BPKD				
	Pajak Daerah :				
	- Pajak Hotel	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
	- Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.339.630,25	646.104,50	0,00	4.985.734,75
	- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	80.907,00	68.413,25	0,00	149.320,25
	- Pajak Parkir	4.500,00	13.250,00	0,00	17.750,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan P2	20.300,25	0,00	20.300,25	0,00
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	3.218.125,00	6.783.125,00	0,00	10.001.250,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :				
	- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - BPRS	3.789.927,00	0,00	3.789.927,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah				
	- Pendapatan Denda PBBP2	7.751,35	582.423,27	0,00	590.174,62
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	41.248.157,80	21.262.693,76	0,00	62.510.851,56
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
	Sub Jumlah	52.786.773,65	36.256.009,78	3.812.702,25	85.230.081,18
8.	PPKD				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1,54	0,00	1,54
	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	216.968,92	347.740,63	0,00	564.709,55
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	5,48	0,00	5,48
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	4,43	0,00	4,43
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	6,74	0,00	6,74
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.919.741.289,90	421.135.348,72	0,00	2.340.876.638,62

No	URAIAN	Penyisihan s.d. Per 31 Des 2022	Penyesuaian Tahun Berkenaan		Penyisihan s.d. Per 31 Des 2023
			Bertambah (Beban Penyisihan)	Berkurang (Ekuitas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
	- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	243.318.897,20	1.237.774.323,42	0,00	1.481.093.220,62
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	739.953.589,40	8.611.751.542,28	0,00	9.351.705.131,68
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	12.402.102,40	73.754.888,70	0,00	86.156.991,10
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	19.959.193,49	0,00	19.959.193,49
	Sub Jumlah	2.915.632.847,82	10.364.723.055,43	0,00	13.280.355.903,25
	Jumlah Total	3.286.394.628,18	10.408.433.265,21	229.885.877,09	13.464.942.016,30

Aging schedule penyisihan piutang per 31 Desember 2023 disajikan pada lampiran 20

5.3.1.1.9. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, saldo beban jasa dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.081.250,00 mengalami penurunan sebesar (Rp70.002.078,00) atau (84,26%) dari Tahun 2022 sebesar Rp83.083.328,00 sampai dengan tanggal pelaporan belum dikonsumsi/digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 148. Beban Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	RSUD Alimuddin Umar	13.081.250,00	82.666.665,00	(69.585.415,00)	(84,18)
2	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	0,00	416.663,00	(416.663,00)	(100,00)
	Jumlah	13.081.250,00	83.083.328,00	(70.002.078,00)	(84,26)

Penjelasan lebih rinci beban jasa dibayar dimuka dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 149. Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	RSUD Alimuddin Umar	
	1) Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	13.081.250,00
	Jumlah	13.081.250,00

5.3.1.1.10. Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria pakai habis. kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada pada SKPD. Saldo Persediaan tersebut per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.775.722.508,25 dan Rp10.819.935.104,05. Saldo Persediaan Tahun 2023 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp2.955.787.404,20 atau 27,32% dibandingkan tahun 2022.

Persediaan Bahan Pakai Habis merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional entitas.

Persediaan Bahan/ Material merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi entitas.

Persediaan Barang Lainnya merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang tidak termasuk dalam persediaan bahan pakai habis dan persediaan bahan/material pada entitas.

Rincian Persediaan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 150. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. Persediaan Bahan Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	932.625.736,15	809.052.765,00	123.572.971,15	15,27
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	9.678.250,00	3.921.250,00	5.757.000,00	146,82
- Persediaan Bahan Baku	16.058.100,00	16.858.100,00	(800.000,00)	(4,75)
- Persediaan Isi Tabung Gas	0,00	41.971.288,00	(41.971.288,00)	(100,00)
- Persediaan Alat Tulis Kantor	27.893.700,00	4.990.000,00	22.903.700,00	458,99
- Persediaan Kertas dan Cover	81.428.680,00	69.693.643,00	11.735.037,00	16,84
- Persediaan Benda Pos	568.000,00	540.000,00	28.000,00	5,19
- Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	543.382.307,00	585.039.088,00	(41.656.781,00)	(7,12)
- Persediaan Bahan Komputer	590.543.032,00	808.579.684,00	(218.036.652,00)	(26,97)
- Persediaan Perabot Kantor	191.583.927,04	127.944.919,00	63.639.008,04	49,74
- Persediaan Alat Listrik	8.264.000,00	3.785.696,00	4.478.304,00	118,30
- Persediaan Perlengkapan Dinas	735.083.857,00	609.305.098,20	125.778.758,80	20,64
- Persediaan Suvenir/Cendera Mata	0,00	16.826.800,00	(16.826.800,00)	(100,00)
- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	47.982.025,00	(47.982.025,00)	(100,00)
- Persediaan Obat	4.443.166.727,27	3.741.785.332,30	701.381.394,97	18,74
- Persediaan Obat-obatan lainnya	4.273.320.403,79	2.199.114.483,55	2.074.205.920,24	94,32
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.917.796.038,00	1.728.676.332,00	189.119.706,00	10,94
- Persediaan Natura	4.329.750,00	3.868.600,00	461.150,00	11,92
Jumlah	13.775.722.508,25	10.819.935.104,05	2.955.787.404,20	27,32

Berikut tabel persediaan per Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Tabel 151. Perbandingan Persediaan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Sekretariat Daerah	4.081.000,00	622.000,00	3.459.000,00	556,11
2.	Sekretariat DPRD	55.000,00	23.000,00	32.000,00	139,13
3.	Inspektorat	1.378.000,00	674.000,00	704.000,00	104,45
4.	BPKD	220.911.025,00	222.354.755,00	(1.443.730,00)	(0,65)
5.	Bappeda	325.000,00	470.000,00	(145.000,00)	(30,85)
6.	Balitbang	287.000,00	777.100,00	(490.100,00)	(63,07)
7.	BKPSDM	322.000,00	1.269.000,00	(947.000,00)	(74,63)
8.	BPBD	1.408.000,00	874.000,00	534.000,00	61,10
9.	Badan Kesbangpol	145.000,00	33.000,00	112.000,00	339,39
10.	Sat Pol PP	250.000,00	270.000,00	(20.000,00)	(7,41)
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.299.700,00	720.000,00	47.579.700,00	6.608,29
12.	Dinas Kesehatan	5.958.755.491,00	3.620.660.651,20	2.338.094.839,80	64,58
13.	Dinas PUPR	210.000,00	220.000,00	(10.000,00)	(4,55)

NO	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
14.	Dinas Kepemudaan, OR,&Par.	517.500,00	525.000,00	(7.500,00)	(1,43)
15.	Dinas Koperindag	16.373.100,00	17.173.100,00	(800.000,00)	(4,66)
16.	Dinas PP, KB, PP, dan PA	1.670.000,00	1.234.000,00	436.000,00	35,33
17.	Dinas Ketahanan Pangan	522.193.538,00	332.365.092,00	189.828.446,00	57,11
18.	Dinas Tanaman Pangan&Horti.	297.778.270,00	317.117.770,00	(19.339.500,00)	(6,10)
19.	Dinas Perkebunan & Nak	1.208.000,00	556.000,00	652.000,00	117,27
20.	Dinas Perikanan	372.000,00	382.000,00	(10.000,00)	(2,62)
21.	Dinas Pemberdayaan Masy & Pekon	130.000,00	215.000,00	(85.000,00)	(39,53)
22.	Dinas Lingkungan Hidup	130.086.200,00	149.032.200,00	(18.946.000,00)	(12,71)
23.	Dinas PM, PTSP, & Naker	858.000,00	472.000,00	386.000,00	81,78
24.	Dinas Sosial	264.000,00	149.000,00	115.000,00	77,18
25.	Dinas Perhubungan	1.396.075.000,00	1.396.215.000,00	(140.000,00)	(0,01)
26.	Dinas Kominfo	1.520.000,00	1.965.000,00	(445.000,00)	(22,65)
27.	Dinas Perpustakaan & Karsp.	202.000,00	65.000,00	137.000,00	210,77
28.	Disdukcapil	866.739.764,00	1.121.535.092,00	(254.795.328,00)	(22,72)
29.	RSUD Alimuddin Umar	2.433.751.714,00	2.497.774.776,00	(64.023.062,00)	(2,56)
30.	Kec. Balik Bukit	561.000,00	756.000,00	(195.000,00)	(25,79)
31.	Kec. Belalau	360.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
32.	Kec. Sumberjaya	1.943.000,00	1.958.000,00	(15.000,00)	(0,77)
33.	Kec. Way Tenong	46.000,00	106.000,00	(60.000,00)	(56,60)
34.	Kec. Sekincau	189.000,00	234.000,00	(45.000,00)	(19,23)
35.	Kec. Suoh	156.000,00	270.000,00	(114.000,00)	(42,22)
36.	Kec. Batu Brak	160.000,00	125.000,00	35.000,00	28,00
37.	Kec. Sukau	110.000,00	180.000,00	(70.000,00)	(38,89)
38.	Kec. Gedung Surian	140.000,00	485.000,00	(345.000,00)	(71,13)
39.	Kec. Kebun Tebu	369.000,00	547.000,00	(178.000,00)	(32,54)
40.	Kec. Air Hitam	145.000,00	139.000,00	6.000,00	4,32
41.	Kec. Pagar Dewa	61.000,00	52.000,00	9.000,00	17,31
42.	Kec. Batu Ketulis	470.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
43.	Kec. Bandar Negeri Suoh	520.000,00	555.000,00	(35.000,00)	(6,31)
44.	Kec. Lumbok Seminung	165.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
45.	Kelurahan Pasar Liwa	155.000,00	145.000,00	10.000,00	6,90
46.	Kelurahan Way Mengaku	235.000,00	140.000,00	95.000,00	67,86
47.	Kelurahan Sekincau	189.000,00	105.000,00	84.000,00	80,00
48.	Kelurahan Fajar Bulan	250.000,00	78.000,00	172.000,00	220,51
49.	Kelurahan Tugu Sari	809.000,00	1.128.000,00	(319.000,00)	(28,28)
50.	Puskesmas Liwa	141.310.452,00	128.315.067,00	12.995.385,00	10,13
51.	Puskesmas Kenali	120.695.539,00	72.921.380,60	47.774.158,40	65,51
52.	Puskesmas Sumber Jaya	172.161.405,00	91.194.464,08	80.966.940,92	88,78
53.	Puskesmas Fajar Bulan	140.035.410,00	105.964.865,00	34.070.545,00	32,15
54.	Puskesmas Sekincau	91.400.550,00	54.029.371,40	37.371.178,60	69,17
55.	Puskesmas Sri Mulyo	199.406.168,11	99.820.878,25	99.585.289,86	99,76
56.	Puskesmas Batu Brak	161.342.037,00	47.475.088,80	113.866.948,20	239,85
57.	Puskesmas Buay Nyerupa	91.875.399,00	57.808.814,90	34.066.584,10	58,93
58.	Puskesmas Gedung Surian	32.833.323,31	56.258.692,30	(23.425.368,99)	(41,64)
59.	Puskesmas Kebun Tebu	140.692.609,00	69.515.672,70	71.176.936,30	102,39
60.	Puskesmas Air Hitam	87.761.044,83	36.890.453,58	50.870.591,25	137,90
61.	Puskesmas Pagar Dewa	114.771.048,00	72.206.738,60	42.564.309,40	58,95
62.	Puskesmas Batu Ketulis	178.710.797,00	85.978.122,14	92.732.674,86	107,86
63.	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	74.726.602,00	63.474.079,00	11.252.523,00	17,73
64.	Puskesmas Lumbok Seminung	114.800.822,00	84.814.879,50	29.985.942,50	35,35
JUMLAH		13.775.722.508,25	10.819.935.104,05	2.955.787.404,20	27,32

Rincian Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 152. Rincian Persediaan Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. Setda				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	666.000,00	362.000,00	304.000,00	83,98
- Persediaan Kertas dan Cover	980.000,00	220.000,00	760.000,00	345,45
- Persediaan Benda Pos	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	60.000,00	0,00	60.000,00	∞
- Persediaan Bahan Komputer	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	∞
Jumlah	4.081.000,00	622.000,00	3.459.000,00	556,11
2. Sekretariat DPRD				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	23.000,00	(23.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	0,00	55.000,00	∞
Jumlah	55.000,00	23.000,00	32.000,00	139,13
3. Inspektorat				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	398.000,00	254.000,00	144.000,00	56,69
- Persediaan Kertas dan Cover	355.000,00	170.000,00	185.000,00	108,82
- Persediaan Bahan Komputer	625.000,00	250.000,00	375.000,00	150,00
Jumlah	1.378.000,00	674.000,00	704.000,00	104,45
4. BPKD				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	220.801.025,00	222.244.755,00	(1.443.730,00)	(0,65)
Jumlah	220.911.025,00	222.354.755,00	(1.443.730,00)	(0,65)
5. BAPPEDA				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan alat tulis Kantor	40.000,00	260.000,00	(220.000,00)	(84,62)
- Persediaan kertas dan cover	160.000,00	210.000,00	(50.000,00)	(23,81)
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	0,00	125.000,00	∞
Jumlah	325.000,00	470.000,00	(145.000,00)	(30,85)
6. Badan Penelitian dan Pengembangan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	90.000,00	240.000,00	(150.000,00)	(62,50)
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	165.000,00	(110.000,00)	(66,67)
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	250.000,00	(125.000,00)	(50,00)
- Persediaan Perabot Kantor	17.000,00	122.100,00	(105.100,00)	(86,08)
Jumlah	287.000,00	777.100,00	(490.100,00)	(63,07)
7. BKPSDM				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	202.000,00	424.000,00	(222.000,00)	(52,36)
- Persediaan Kertas dan Cover	120.000,00	845.000,00	(725.000,00)	(85,80)
Jumlah	322.000,00	1.269.000,00	(947.000,00)	(74,63)
8. BPBD				
Persediaan Barang Pakai Habis				

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Alat Tulis Kantor	276.000,00	233.000,00	43.000,00	18,45
- Persediaan Kertas dan Cover	470.000,00	265.000,00	205.000,00	77,36
- Persediaan Benda Pos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Bahan Komputer	500.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
- Persediaan Perabot Kantor	112.000,00	76.000,00	36.000,00	47,37
Jumlah	1.408.000,00	874.000,00	534.000,00	61,10
9. Kantor Kesbangpol				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	25.000,00	33.000,00	(8.000,00)	(24,24)
- Persediaan Kertas dan Cover	120.000,00	0,00	120.000,00	∞
Jumlah	145.000,00	33.000,00	112.000,00	339,39
10. Kantor Satpol PP				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	85.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00
- Persediaan Kertas dan Cover	165.000,00	220.000,00	(55.000,00)	(25,00)
Jumlah	250.000,00	270.000,00	(20.000,00)	(7,41)
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	20.957.700,00	0,00	20.957.700,00	∞
- Persediaan Kertas dan Cover	13.136.000,00	220.000,00	12.916.000,00	5.870,91
- Persediaan Benda Pos	198.000,00	0,00	198.000,00	∞
- Persediaan Bahan Komputer	8.527.000,00	500.000,00	8.027.000,00	1.605,40
- Persediaan Perabot Kantor	77.000,00	0,00	77.000,00	∞
- Persediaan Alat Listrik	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	∞
- Persediaan Obat	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00	∞
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	165.000,00	0,00	165.000,00	∞
Jumlah	48.299.700,00	720.000,00	47.579.700,00	6.608,29
12. Dinas Kesehatan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	383.867.640,00	189.445.317,00	194.422.323,00	102,63
- Persediaan Isi Tabung Gas	0,00	41.971.288,00	(41.971.288,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	50.341.440,00	14.985.000,00	35.356.440,00	235,95
- Persediaan Perabot Kantor	147.226.178,00	102.486.733,00	44.739.445,00	43,65
- Persediaan Perlengkapan Dinas	668.392.015,00	242.820.832,00	425.571.183,00	175,26
- Persediaan Obat	2.750.820.159,00	2.125.886.776,60	624.933.382,40	29,40
- Persediaan Obat-obatan Lainnya	1.958.108.059,00	903.064.704,60	1.055.043.354,40	116,83
Jumlah	5.958.755.491,00	3.620.660.651,20	2.338.094.839,80	64,58
13. Dinas PUPR				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	210.000,00	220.000,00	(10.000,00)	(4,55)
Jumlah	210.000,00	220.000,00	(10.000,00)	(4,55)
14. Dinas Kepemudaan, OR, & Par.				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	110.000,00	(55.000,00)	(50,00)
- Persediaan Bahan Komputer	375.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	77.500,00	155.000,00	(77.500,00)	(50,00)
Jumlah	517.500,00	525.000,00	(7.500,00)	(1,43)

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
15. Dinas Koperasi, UKM, Perindag				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Baku	16.058.100,00	16.858.100,00	(800.000,00)	(4,75)
- Persediaan Kertas dan Cover	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Jumlah	16.373.100,00	17.173.100,00	(800.000,00)	(4,66)
16. Dinas PP, KB, PP, dan PA				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	770.000,00	209.000,00	561.000,00	268,42
- Persediaan Kertas dan Cover	900.000,00	1.025.000,00	(125.000,00)	(12,20)
Jumlah	1.670.000,00	1.234.000,00	436.000,00	35,33
17. Dinas Ketahanan Pangan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	155.000,00	210.000,00	(55.000,00)	(26,19)
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	522.038.538,00	332.155.092,00	189.883.446,00	57,17
- Persediaan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	522.193.538,00	332.365.092,00	189.828.446,00	57,11
18. Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	297.723.270,00	317.062.770,00	(19.339.500,00)	(6,10)
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Jumlah	297.778.270,00	317.117.770,00	(19.339.500,00)	(6,10)
19. Dinas Perkebunan & Peternakan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	0,00	346.000,00	(346.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	110.000,00	(55.000,00)	(50,00)
- Persediaan Benda Pos	50.000,00	100.000,00	(50.000,00)	(50,00)
- Persediaan Obat	656.000,00	0,00	656.000,00	∞
- Persediaan Obat-obatan Lainnya	447.000,00	0,00	447.000,00	∞
Jumlah	1.208.000,00	556.000,00	652.000,00	117,27
20. Dinas Perikanan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	82.000,00	97.000,00	(15.000,00)	(15,46)
- Persediaan Kertas dan Cover	165.000,00	160.000,00	5.000,00	3,13
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Jumlah	372.000,00	382.000,00	(10.000,00)	(2,62)
21. Dinas Pemberdayaan Masy. Pekon				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	20.000,00	50.000,00	(30.000,00)	(60,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	165.000,00	(55.000,00)	(33,33)
Jumlah	130.000,00	215.000,00	(85.000,00)	(39,53)
22. Dinas Lingkungan Hidup				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	130.011.200,00	148.872.200,00	(18.861.000,00)	(12,67)
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	110.000,00	(55.000,00)	(50,00)
- Persediaan Benda Pos	20.000,00	50.000,00	(30.000,00)	(60,00)
Jumlah	130.086.200,00	149.032.200,00	(18.946.000,00)	(12,71)
23. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Naker				

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan alat Tulis Kantor	150.000,00	320.000,00	(170.000,00)	(53,13)
- Persediaan kertas dan cover	210.000,00	152.000,00	58.000,00	38,16
- Persediaan Bahan Komputer	498.000,00	0,00	498.000,00	∞
Jumlah	858.000,00	472.000,00	386.000,00	81,78
24. Dinas Sosial				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	99.000,00	64.000,00	35.000,00	54,69
- Persediaan Kertas dan Cover	165.000,00	55.000,00	110.000,00	200,00
- Persediaan Benda Pos	0,00	30.000,00	(30.000,00)	(100,00)
Jumlah	264.000,00	149.000,00	115.000,00	77,18
25. Dinas Perhubungan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	160.000,00	210.000,00	(50.000,00)	(23,81)
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	235.000,00	285.000,00	(50.000,00)	(17,54)
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.395.680.000,00	1.395.680.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.396.075.000,00	1.396.215.000,00	(140.000,00)	(0,01)
26. Dinas Kominfo				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
- Persediaan Alat Tulis Kantor	75.000,00	105.000,00	(30.000,00)	(28,57)
- Persediaan Kertas dan Cover	390.000,00	570.000,00	(180.000,00)	(31,58)
- Persediaan Benda Pos	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	285.000,00	440.000,00	(155.000,00)	(35,23)
- Persediaan Bahan Komputer	500.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(33,33)
Jumlah	1.520.000,00	1.965.000,00	(445.000,00)	(22,65)
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
- Persediaan Kertas dan Cover	65.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00		125.000,00	100,00
Jumlah	202.000,00	65.000,00	137.000,00	210,77
28. Disduk dan Capil				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	5.375.000,00	1.840.000,00	3.535.000,00	192,12
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	285.846.732,00	314.485.408,00	(28.638.676,00)	(9,11)
- Persediaan Bahan Komputer	574.518.032,00	803.209.684,00	(228.691.652,00)	(28,47)
- Persediaan Perabot Kantor	1.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
Jumlah	866.739.764,00	1.121.535.092,00	(254.795.328,00)	(22,72)
29. RSUD Alimuddin Umar				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	891.000,00	108.846.356,00	(107.955.356,00)	(99,18)
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	9.596.250,00	3.911.250,00	5.685.000,00	145,35
- Persediaan Alat Tulis Kantor	2.661.000,00	966.000,00	1.695.000,00	175,47
- Persediaan Kertas dan Cover	215.000,00	41.690.643,00	(41.475.643,00)	(99,48)
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	36.154.550,00	47.583.925,00	(11.429.375,00)	(24,02)
- Persediaan Bahan Komputer	0,00	125.000,00	(125.000,00)	(100,00)
- Persediaan Perabot Kantor	12.854.275,00	17.242.454,00	(4.388.179,00)	(25,45)

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Alat Listrik	6.098.000,00	3.785.696,00	2.312.304,00	61,08
- Persediaan Perlengkapan Dinas	0,00	352.104.644,00	(352.104.644,00)	(100,00)
- Persediaan Suvenir/Cendera Mata	0,00	16.826.800,00	(16.826.800,00)	(100,00)
- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	47.982.025,00	(47.982.025,00)	(100,00)
- Persediaan Obat	719.380.541,00	1.001.045.133,00	(281.664.592,00)	(28,14)
- Persediaan Obat-obatan Lainnya	1.641.571.348,00	851.110.010,00	790.461.338,00	92,87
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	686.240,00	(686.240,00)	(100,00)
- Persediaan Natura	4.329.750,00	3.868.600,00	461.150,00	11,92
Jumlah	2.433.751.714,00	2.497.774.776,00	(64.023.062,00)	(2,56)
30. Kec. Balik Bukit				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	411.000,00	346.000,00	65.000,00	18,79
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Benda Pos	40.000,00	50.000,00	(10.000,00)	(20,00)
- Persediaan Bahan Komputer	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
Jumlah	561.000,00	756.000,00	(195.000,00)	(25,79)
31. Kec. Belau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
- Persediaan Bahan Komputer	250.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
Jumlah	360.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
32. Kec. Sumberjaya				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Kertas dan Cover	1.270.000,00	1.160.000,00	110.000,00	9,48
- Persediaan Bahan Komputer	625.000,00	750.000,00	(125.000,00)	(16,67)
Jumlah	1.943.000,00	1.958.000,00	(15.000,00)	(0,77)
33. Kec. Way Tenong				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	46.000,00	106.000,00	(60.000,00)	(56,60)
Jumlah	46.000,00	106.000,00	(60.000,00)	(56,60)
34. Kec. Sekincau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00		
- Persediaan Kertas dan Cover	139.000,00	184.000,00	(45.000,00)	(24,46)
Jumlah	189.000,00	234.000,00	(45.000,00)	(19,23)
35. Kec. Suoh				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	46.000,00	40.000,00	6.000,00	15,00
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Bahan Komputer	0,00	120.000,00	(120.000,00)	(100,00)
Jumlah	156.000,00	270.000,00	(114.000,00)	(42,22)
36. Kec. Batu Brak				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	150.000,00	105.000,00	45.000,00	42,86
- Persediaan Benda Pos	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)	(50,00)
Jumlah	160.000,00	125.000,00	35.000,00	28,00

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
37. Kec. Sukau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
- Persediaan Bahan Komputer	0,00	125.000,00	(125.000,00)	(100,00)
- Jumlah	110.000,00	180.000,00	(70.000,00)	(38,89)
Jumlah	110.000,00	180.000,00	(70.000,00)	(38,89)
38. Kec. Gedung Surian				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
- Persediaan Kertas dan Cover	105.000,00	110.000,00	(5.000,00)	(4,55)
- Persediaan Bahan Komputer	0,00	375.000,00	(375.000,00)	(100,00)
Jumlah	140.000,00	485.000,00	(345.000,00)	(71,13)
39. Kec. Kebun Tebu				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	91.000,00	137.000,00	(46.000,00)	(33,58)
- Persediaan Kertas dan Cover	105.000,00	160.000,00	(55.000,00)	(34,38)
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	250.000,00	(125.000,00)	(50,00)
- Persediaan Alat Listrik	48.000,00		48.000,00	0,00
Jumlah	369.000,00	547.000,00	(178.000,00)	(32,54)
40. Kec. Air Hitam				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	40.000,00	34.000,00	6.000,00	17,65
- Persediaan Kertas dan Cover	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
- Jumlah	145.000,00	139.000,00	6.000,00	4,32
Jumlah	145.000,00	139.000,00	6.000,00	4,32
41. Kec. Pagar Dewa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	6.000,00	52.000,00	(46.000,00)	(88,46)
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Jumlah	61.000,00	52.000,00	9.000,00	17,31
42. Kec. Batu Ketulis				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	220.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
- Persediaan bahan komputer	250.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
Jumlah	470.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
43. Kec. Bandar Negeri Suoh				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	410.000,00	296.000,00	114.000,00	38,51
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	84.000,00	26.000,00	30,95
- Persediaan Benda Pos	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
- Persediaan Bahan Komputer	0,00	125.000,00	(125.000,00)	(100,00)
Jumlah	520.000,00	555.000,00	(35.000,00)	(6,31)
44. Kec. Lumbok Seminung				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor				
- Persediaan Kertas dan Cover	165.000,00	55.000,00	110.000,00	200,00
- Persediaan Benda Pos	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
Jumlah	165.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
45. Kelurahan Pasar Liwa				

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	30.000,00	35.000,00	(5.000,00)	(14,29)
- Persediaan Kertas dan Cover	0,00	110.000,00	(110.000,00)	(100,00)
- Persediaan Bahan komputer	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Jumlah	155.000,00	145.000,00	10.000,00	6,90
46. Kelurahan Way Mengaku				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	35.000,00	(35.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	105.000,00	5.000,00	4,76
- Persediaan Bahan komputer	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Jumlah	235.000,00	140.000,00	95.000,00	67,86
47. Kelurahan Sekincau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
- Persediaan Kertas dan Cover	139.000,00	105.000,00	34.000,00	32,38
Jumlah	189.000,00	105.000,00	84.000,00	80,00
48. Kelurahan Fajar Bulan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	23.000,00	(23.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	0,00	55.000,00	(55.000,00)	(100,00)
- Persediaan Bahan komputer	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Jumlah	250.000,00	78.000,00	172.000,00	220,51
49. Kelurahan Tugu Sari				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	24.000,00	48.000,00	(24.000,00)	(50,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	410.000,00	455.000,00	(45.000,00)	(9,89)
- Persediaan Bahan Komputer	375.000,00	625.000,00	(250.000,00)	(40,00)
Jumlah	809.000,00	1.128.000,00	(319.000,00)	(28,28)
50. Puskesmas Liwa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	7.896.184,00	4.699.598,00	3.196.586,00	68,02
- Persediaan Kertas dan Cover	278.760,00	199.800,00	78.960,00	39,52
- Persediaan Perabot Kantor	3.620.196,00	313.868,00	3.306.328,00	1.053,41
- Persediaan Perlengkapan Dinas	7.825.917,00	1.507.834,00	6.318.083,00	419,02
- Persediaan Obat	67.604.790,00	74.486.996,80	(6.882.206,80)	(9,24)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	54.084.605,00	47.106.970,20	6.977.634,80	14,81
Jumlah	141.310.452,00	128.315.067,00	12.995.385,00	10,13
51. Puskesmas Kenali				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	5.527.924,00	1.934.720,00	3.593.204,00	185,72
- Persediaan Perabot Kantor	1.298.838,00	703.496,00	595.342,00	84,63
- Persediaan Perlengkapan Dinas	1.943.570,00	410.000,00	1.533.570,00	374,04
- Persediaan Obat	55.719.784,00	43.576.379,50	12.143.404,50	27,87
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	56.205.423,00	26.296.785,10	29.908.637,90	113,73
Jumlah	120.695.539,00	72.921.380,60	47.774.158,40	65,51
52. Puskesmas Sumber Jaya				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	9.618.290,00	3.455.450,00	6.162.840,00	178,35
- Persediaan Perabot Kantor	1.278.817,00	0,00	1.278.817,00	100,00

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Perlengkapan Dinas	6.635.915,00	2.004.578,28	4.631.336,72	231,04
- Persediaan Obat	100.350.802,00	53.384.840,80	46.965.961,20	87,98
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	54.277.581,00	32.349.595,00	21.927.986,00	67,78
Jumlah	172.161.405,00	91.194.464,08	80.966.940,92	88,78
53. Puskesmas Fajar Bulan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	13.087.989,25	11.335.040,00	1.752.949,25	15,46
- Persediaan Kertas dan Cover	650.440,00	599.400,00	51.040,00	8,52
- Persediaan Perabot Kantor	1.332.245,92	543.855,00	788.390,92	144,96
- Persediaan Perlengkapan Dinas	2.465.579,00	3.606.750,00	(1.141.171,00)	(31,64)
- Persediaan Obat	63.429.093,02	55.448.301,40	7.980.791,62	14,39
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	59.070.062,81	34.431.518,60	24.638.544,21	71,56
Jumlah	140.035.410,00	105.964.865,00	34.070.545,00	32,15
54. Puskesmas Sekincau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	4.716.934,00	1.067.080,00	3.649.854,00	342,04
- Persediaan Kertas dan Cover	278.760,00	0,00	278.760,00	100,00
- Persediaan Perabot Kantor	1.652.867,00	468.095,00	1.184.772,00	253,11
- Persediaan Perlengkapan Dinas	4.893.324,00	1.396.400,00	3.496.924,00	250,42
- Persediaan Obat	50.989.785,00	30.347.793,00	20.641.992,00	68,02
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	28.868.880,00	20.750.003,40	8.118.876,60	39,13
Jumlah	91.400.550,00	54.029.371,40	37.371.178,60	69,17
55. Puskesmas Srimulyo				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	13.415.125,15	2.364.830,00	11.050.295,15	467,28
- Persediaan Kertas dan Cover	557.520,00	399.600,00	157.920,00	39,52
- Persediaan Perabot Kantor	3.851.429,12	119.054,00	3.732.375,12	3.135,03
- Persediaan Perlengkapan Dinas	7.870.024,00	164.560,00	7.705.464,00	4.682,46
- Persediaan Obat	101.875.795,30	60.496.456,80	41.379.338,50	68,40
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	71.836.274,54	36.276.377,45	35.559.897,09	98,02
Jumlah	199.406.168,11	99.820.878,25	99.585.289,86	99,76
56. Puskesmas Batu Brak				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	9.360.863,00	1.542.600,00	7.818.263,00	506,82
- Persediaan Kertas dan Cover	185.840,00	199.800,00	(13.960,00)	(6,99)
- Persediaan Perabot Kantor	3.197.094,00	119.054,00	3.078.040,00	2.585,42
- Persediaan Perlengkapan Dinas	6.974.140,00	250.000,00	6.724.140,00	2.689,66
- Persediaan Obat	88.405.766,00	31.695.196,00	56.710.570,00	178,92
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	53.218.334,00	13.668.438,80	39.549.895,20	289,35
Jumlah	161.342.037,00	47.475.088,80	113.866.948,20	239,85
57. Puskesmas Buay Nyerupa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	5.872.434,00	2.426.748,00	3.445.686,00	141,99
- Persediaan Kertas dan Cover	185.840,00	199.800,00	(13.960,00)	(6,99)
- Persediaan Perlengkapan Dinas	448.885,00	0,00	448.885,00	100,00
- Persediaan Obat	57.009.061,00	32.031.051,00	24.978.010,00	77,98
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	28.359.179,00	23.151.215,90	5.207.963,10	22,50
Jumlah	91.875.399,00	57.808.814,90	34.066.584,10	58,93
58. Puskesmas Gedung Surian				
Persediaan Barang Pakai Habis				

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Bahan Kimia	2.190.667,75	3.565.445,00	-1.374.777,25	(38,56)
- Persediaan Kertas dan Cover	199.800,00	0,00	199.800,00	100,00
- Persediaan Perabot Kantor	885.101,00	649.392,00	235.709,00	36,30
- Persediaan Perlengkapan Dinas	2.918.155,00	938.015,60	1.980.139,40	211,10
- Persediaan Obat	15.735.783,12	24.024.888,00	-8.289.104,88	(34,50)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	10.903.816,44	27.080.951,70	-16.177.135,26	(59,74)
Jumlah	32.833.323,31	56.258.692,30	-23.425.368,99	(41,64)
59. Puskesmas Kebun Tebu				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	8.004.546,00	1.479.100,00	6.525.446,00	441,18
- Persediaan Perabot Kantor	1.745.631,00	1.014.675,00	730.956,00	72,04
- Persediaan Obat	59.459.113,00	29.113.723,00	30.345.390,00	104,23
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	71.483.319,00	37.908.174,70	33.575.144,30	88,57
Jumlah	140.692.609,00	69.515.672,70	71.176.936,30	102,39
60. Puskesmas Air Hitam				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	6.643.645,00	744.301,00	5.899.344,00	792,60
- Persediaan Kertas dan Cover	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
- Persediaan Perabot Kantor	2.412.279,00	238.108,00	2.174.171,00	913,10
- Persediaan Perlengkapan Dinas	4.876.897,00	293.865,88	4.583.031,12	1.559,57
- Persediaan Obat	48.708.891,83	17.570.906,00	31.137.985,83	177,21
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	25.081.832,00	18.043.272,70	7.038.559,30	39,01
Jumlah	87.761.044,83	36.890.453,58	50.870.591,25	137,90
61. Puskesmas Pagar Dewa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	8.333.540,00	1.237.033,00	7.096.507,00	573,67
- Persediaan Kertas dan Cover	185.840,00	0,00	185.840,00	100,00
- Persediaan Perabot Kantor	2.497.802,00	589.856,00	1.907.946,00	323,46
- Persediaan Perlengkapan Dinas	2.690.398,00	1.158.500,00	1.531.898,00	132,23
- Persediaan Obat	57.324.300,00	35.472.694,80	21.851.605,20	61,60
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	43.739.168,00	33.748.654,80	9.990.513,20	29,60
Jumlah	114.771.048,00	72.206.738,60	42.564.309,40	58,95
62. Puskesmas Batu Ketulis				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	12.518.781,00	4.193.110,00	8.325.671,00	198,56
- Persediaan Kertas dan Cover	185.840,00	0,00	185.840,00	100,00
- Persediaan Perabot Kantor	2.804.760,00	395.042,00	2.409.718,00	609,99
- Persediaan Perlengkapan Dinas	7.715.192,00	996.789,64	6.718.402,36	674,00
- Persediaan Obat	99.217.065,00	46.505.721,60	52.711.343,40	113,34
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	56.269.159,00	33.887.458,90	22.381.700,10	66,05
Jumlah	178.710.797,00	85.978.122,14	92.732.674,86	107,86
63. Puskesmas Bandar Negeri Suoh				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	5.999.176,00	1.589.701,00	4.409.475,00	277,38
- Persediaan Kertas dan Cover	437.100,00	399.600,00	37.500,00	9,38
- Persediaan Perabot Kantor	1.582.994,00	313.868,00	1.269.126,00	404,35
- Persediaan Perlengkapan Dinas	3.754.764,00	579.244,80	3.175.519,20	548,22
- Persediaan Obat	36.524.391,00	38.393.246,00	(1.868.855,00)	(4,87)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	26.428.177,00	22.198.419,20	4.229.757,80	19,05
Jumlah	74.726.604,00	63.474.079,00	11.252.525,00	17,73

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
64. Puskesmas Lumbok Seminung				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	6.946.527,00	2.845.366,00	4.101.161,00	144,13
- Persediaan Perabot Kantor	2.137.420,00	549.269,00	1.588.151,00	289,14
- Persediaan Perlengkapan Dinas	5.679.082,00	1.073.084,00	4.605.998,00	429,23
- Persediaan Obat	66.834.607,00	42.305.228,00	24.529.379,00	57,98
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	33.203.186,00	38.041.932,50	(4.838.746,50)	(12,72)
Jumlah	114.800.822,00	84.814.879,50	29.985.942,50	35,35
JUMLAH TOTAL	13.775.722.508,25	10.819.935.104,05	2.955.787.404,20	27,32

Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.775.722.508,25 tersebut tidak termasuk persediaan obat yang telah kedaluwarsa sebesar Rp19.444.727,00 pada RSUD Alimuddin Umar, Puskesmas Batu Ketulis, dan Puskesmas Bandar Negeri Suoh, sesuai dengan rincian berikut:

Tabel 153. Rincian Obat Kedaluwarsa

No	OPD	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Jumlah Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Puskesmas Batu Ketulis	Diazepam Injeksi 5 mg (Kedaluwarsa)	200	ampul	309.000,00
2.	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Erytromysin tab 500 mg (Kedaluwarsa)	300	tab	232.500,00
3.	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Serum Anti Bisa Ular Polivalen Inj 5 ml (ABU I) (Kedaluwarsa)	6	vial	3.103.872,00
4.	RSUD Alimuddin Umar	Ventolin Inhaler	6	Botol	757.104,00
5.	RSUD Alimuddin Umar	Diltiazem	160	Tab	32.800,00
6.	RSUD Alimuddin Umar	Ampicilin Inj	134	Vial	1.995.528,00
7.	RSUD Alimuddin Umar	Propanolol Tab	330	Tab	93.060,00
8.	RSUD Alimuddin Umar	Vit B6 10mg	370	Tab	48.470,00
9.	RSUD Alimuddin Umar	Metyl Prednisolone	9	Vial	93.555,00
10.	RSUD Alimuddin Umar	Fergoxine Inj	1	Vial	55.000,00
11.	RSUD Alimuddin Umar	Otsu Manitol 20%	3	Botol	130.500,00
12.	RSUD Alimuddin Umar	Dumin 250mg	15	Vial	130.680,00
13.	RSUD Alimuddin Umar	Metyl Ergometrine Inj	35	Vial	192.500,00
14.	RSUD Alimuddin Umar	Lidocain Inj	8	Vial	8.576,00
15.	RSUD Alimuddin Umar	OndanCetron	1	Vial	3.850,00
16.	RSUD Alimuddin Umar	Favipiravir	600	Tab	9.000.000,00
17.	RSUD Alimuddin Umar	Oxytetracycline Salep	6	Pcs	12.060,00
18.	RSUD Alimuddin Umar	Proinfark Inj 10ml	3	Vial	39.600,00
19.	RSUD Alimuddin Umar	Guprin Inj	3	Vial	118.800,00
20.	RSUD Alimuddin Umar	Thiampenicol Kapsul	30	Kapsul	29.700,00
21.	RSUD Alimuddin Umar	RyvelDrop 10ml	3	Botol	82.500,00
22.	RSUD Alimuddin Umar	Berry Vision Tab	100	Tab	337.700,00
23.	RSUD Alimuddin Umar	Nucine Tab	90	Tab	303.570,00
24.	RSUD Alimuddin Umar	Cendo Pantocain 0,5%	2	Vial	24.810,00
25.	RSUD Alimuddin Umar	Cendo Pantocain 2%	2	Vial	27.112,00
26.	RSUD Alimuddin Umar	Gentian Violet 1%	24	Vial	88.800,00
27.	RSUD Alimuddin Umar	Pantoprazole	40	Vial	1.496.000,00
28.	RSUD Alimuddin Umar	Alupurinol 100mg	190	Tab	25.080,00
29.	RSUD Alimuddin Umar	Ivermectine Tab 12mg tab	120	Tab	672.000,00
	Jumlah				19.444.727,00

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.330.213.725,66 mengalami penurunan sebesar (Rp625.657.088,91) atau (1,49%) dari Tahun 2022 sebesar Rp41.955.870.814,57 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 154. Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	a. Investasi Non Permanen Bruto	1.318.613.500,00	1.318.613.500,00	0,00	0,00
	b. Penyisihan Investasi Non Permanen	(880.159.191,00)	(896.048.791,15)	15.889.600,15	(1,77)
	c. Investasi Non Permanen Netto (a - b)	438.454.309,00	422.564.708,85	15.889.600,15	3,76
2.	Investasi Permanen	40.891.759.416,66	41.533.306.105,72	(641.546.689,06)	(1,54)
	Jumlah	41.330.213.725,66	41.955.870.814,57	(625.657.088,91)	(1,49)

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan, diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009, dan UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dibawah koordinasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2023.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp438.454.309,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.889.600,15 atau 3,76% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp422.564.708,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 155. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir Netto Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dana Bergulir Bruto	1.318.613.500,00	1.318.613.500,00	0,00	0,00
2.	Penyisihan Dana Dana Bergulir	(880.159.191,00)	(896.048.791,15)	15.889.600,15	(1,77)
	Dana Bergulir Netto	438.454.309,00	422.564.708,85	15.889.600,15	3,76

Saldo investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 156. Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	APBD TA. 2003	400.000.000,00	400.000.000,00	SK Bupati No. B/125/KPTS/IV.09/2003
2.	APBD TA. 2004	300.000.000,00	300.000.000,00	SK Bupati No. B/219/KPTS/IV.09/2004
3.	APBD TA. 2005	305.000.000,00	305.000.000,00	SK Bupati No. B/206/KPTS/IV.09/2005
4.	APBD TA. 2006	250.000.000,00	250.000.000,00	SK Bupati No. B/273/KPTS/IV.09/11/2006
5.	APBD TA. 2007	260.000.000,00	260.000.000,00	SK Bupati No. B/288/KPTS/IV.09/XII/2007
6.	Jumlah (1 s.d. 5)	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00	
7.	Dialihkan ke Kab. Pesisir Barat	(196.386.500,00)	(196.386.500,00)	SK Bupati No. B/433/KPTS/II.14/2014
8.	Dana Bergulir Bruto (6 – 7)	1.318.613.500,00	1.318.613.500,00	
9.	Penyisihan Piutang Tahun 2023 & 2022	(880.159.191,00)	(896.048.791,15)	
10.	Dana Bergulir Netto (8 – 9)	438.454.309,00	422.564.708,85	

Penyisihan Dana Bergulir

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp880.159.191,00 dan Rp896.048.791,15, sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 menjadi sebesar Rp438.454.309,00 dan Rp422.564.708,85. Adapun daftar umur Piutang Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih berdasarkan dana yang masih ada disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 157. Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih dan Kas Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Per 31 Des 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3 s.d.6)
1	Piutang Dana Bergulir UPT BLUD Dana Bergulir	0,00	6.400.000,00	0,00	879.519.191,00	885.919.191,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	640.000,00	0,00	879.519.191,00	880.159.191,00
3	Nilai Bersih Piutang (1-2)	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00
4	Kas Dana Bergulir	432.694.309,00	0,00	0,00	0,00	432.694.309,00
5	Nilai Bersih Dana Bergulir (3+4)	432.694.309,00	5.760.000,00	0,00	0,00	438.454.309,00

Penyisihan Dana Bergulir ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, penyisihan 0,5%
 - a. Pinjaman Dana Bergulir masih dalam tenggang waktu; dan/atau
 - b. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Penerima dana kooperatif;
2. Kualitas Kurang Lancar, penyisihan 10,00%
 - a. Pinjaman Dana Bergulir telah jatuh tempo 1 sampai 3 bulan; dan/atau
 - b. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
3. Kualitas Diragukan, penyisihan 50,00%
 - a. Pinjaman Dana Bergulir telah jatuh tempo 4 sampai 6 bulan; dan/atau
 - b. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
4. Kualitas Macet, penyisihan 100,00%
 - a. Pinjaman Dana Bergulir telah jatuh tempo lebih dari 6 bulan; dan/atau
 - b. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan /atau meninggal dunia

Dari jumlah piutang pokok macet sebesar Rp879.519.191,00 diatas terdapat piutang tidak teridentifikasi berdasarkan Surat Pernyataan Kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tanggal 23 Maret 2015

sebesar Rp81.564.596,00 kemungkinan permasalahannya antara lain: penarikan untuk honor pendamping dipungut dari rekening pokok, target PAD melebihi pembayaran tanpa mengontrol penerimaan jasa dana bergulir yang masuk, tahun 2003-2008 pengelola dana bergulir tidak melihat pengembalian keuntungan pada tahun berjalan sehingga terdapat penarikan pokok ikut terambil. Sementara piutang tidak teridentifikasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp76.119.331,00, terdapat penurunan sebesar Rp5.445.265,00 = (Rp81.564.596,00 - Rp76.119.331,00) disebabkan oleh beberapa angsuran nasabah yang tidak mencantumkan nama nasabah sehingga tidak terpotong dalam daftar angsuran nasabah.

Dari data diatas terdapat penyisihan dana bergulir sebesar Rp880.159.191,00 yang harus ditagih oleh UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM. Adapun dana bergulir netto sebesar Rp438.454.309,00 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 158. Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Netto Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas di RK Bank Lampung	432.694.309,00	352.952.306,00	79.742.003,00	22,59
2.	Piutang Pokok Lancar	0,00	44.452.402,85	(44.452.402,85)	(100,00)
3.	Piutang Pokok Kurang Lancar	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00	∞
4.	Piutang Pokok Diragukan	0,00	25.160.000,00	(25.160.000,00)	(100,00)
Jumlah		438.454.309,00	422.564.708,85	15.889.600,15	3,76

Pada Neraca ditampilkan dana bergulir senilai bersih sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat BAB VI Akuntansi Dana Bergulir paragraf 18 menyatakan bahwa secara periodik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) serta sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 Lampiran I.07 PSAP 06-06 Paragraf 29 menyatakan bahwa investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Walaupun penyajian pada Neraca adalah sebesar nilai bersih, tetapi tidak mengurangi kewajiban UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM untuk menagih sebesar Rp880.159.191,00 penyisihan piutang lancar, diragukan, macet, dan bermasalah tersebut. Adapun lebih rinci dana bergulir disajikan pada lampiran 17 dalam laporan keuangan ini.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/ daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode Biaya (*Cost Method*)

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar harga perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak

mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2. Metode Ekuitas (*Equity Method*)

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Berikut nilai investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.891.759.416,66 mengalami penurunan sebesar (Rp641.546.689,06) atau (1,54%) dari Tahun 2022 sebesar Rp41.533.306.105,72 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 159. Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Perumda Limau Kunci	5.054.200.691,46	5.234.620.134,29	(180.419.442,83)	(3,45)
2.	Pesagi Mandiri (Perseroda)	7.425.224.594,00	8.967.560.459,41	(1.542.335.865,41)	(17,20)
3.	PT BPRS Lampung Barat (Perseroda)	10.704.614.131,20	9.623.405.512,02	1.081.208.619,18	11,24
4.	PT Bank Lampung	17.707.720.000,00	17.707.720.000,00	0,00	0,00
Jumlah		40.891.759.416,66	41.533.306.105,72	(641.546.689,06)	(1,54)

Berikut adalah tabel mengenai jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Tabel 160. Jumlah Penyertaan, Tingkat Pengendalian dan Metode Penilaian Investasi Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Metode Penilaian	Nilai Investasi Per 31 Des 2023 (Rp) dan Prosentase Kepemilikan		Nilai Investasi Per 31 Des 2022 (Rp) dan Prosentase Kepemilikan	
			(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perumda Limau Kunci	Ekuitas	5.054.200.691,46	67,86	5.234.620.134,29	67,89
2.	Pesagi Mandiri (Perseroda)	Ekuitas	7.425.224.594,00	100,00	8.967.560.459,41	100,00
3.	PT BPRS Lampung Barat (Perseroda)	Ekuitas	10.704.614.131,20	95,6250	9.623.405.512,02	95,00
4.	PT Bank Lampung	Biaya (Cost)	17.707.720.000,00	4,11	17.707.720.000,00	4,24
Jumlah			40.891.759.416,66	-	41.533.306.105,72	-

Untuk lebih rinci terhadap investasi jangka panjang permanen Kabupaten Lampung Barat, dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

5.3.1.2.2.1.1. Perumda Air Minum Limau Kunci

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Pasal 10 ayat (1) PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah adalah suatu alat kelengkapan otonomi daerah. Penyertaan tersebut dicatat sebesar investasi awal yaitu seluruh peralihan aset Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ditambah dengan penyeteroran dana/modal serta ditambah atau dikurangi sebesar perubahan yang terjadi pada ekuitas dana PDAM itu sendiri (metode ekuitas). Metode ekuitas mengakui bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan, selain itu bila kenaikan ekuitas karena penerimaan hibah, bantuan atau donasi akan menambah nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dengan terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci maka badan hukum menjadi Perumda.

Nilai penyertaan pada Neraca Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2022 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 161. Nilai Penyertaan pada Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2022		Mutasi +/- Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023	
	Nilai Penyertaan	%		Nilai Penyertaan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemerintah Pusat	3.802.964.051,00	23,72	(1,00)	3.802.964.050,00	23,72
Pemprov Lampung	220.413.600,00	1,38	0,00	220.413.600,00	1,38
Pemda Lampung Barat	11.017.675.906,00	68,75	0,00	11.017.675.906,00	68,75
Pemda Lampung Utara	7.219.556,00	0,05	0,00	7.219.556,00	0,05
Modal Hibah	977.538.700,00	6,10	0,00	977.538.700,00	6,10
Jumlah	16.025.811.813,00	100,00	(1,00)	16.025.811.812,00	100,00

Posisi ekuitas pada Neraca Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2022 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 162. Posisi Nilai Ekuitas pada Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2022 dan 2023

No	Uraian	Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2023	Muasi Tambah/ (Kurang) Tahun 2023				Nilai Ekuitas Netto Tahun 2023
			Koreksi Laba ditahan thn sebelumnya	Laba/ (Rugi) Ditahan Thn Lalu	Pembagian Deviden	Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemerintah Pusat	3.802.964.050,00	(132.546.521,14)	(2.298.008.038,75)	0,00	70.271.259,02	1.442.680.749,13
2	Pemprov Lampung	220.413.600,00	(7.682.180,40)	(133.188.801,69)	0,00	4.072.807,68	83.615.425,59
3	Pemda Lampung Barat	11.017.675.906,00	(384.004.316,95)	(5.783.055.771,71)	0,00	203.584.874,12	5.054.200.691,46
4	Pemda Lampung Utara	7.219.556,00	(251.626,63)	(4.362.543,93)	0,00	133.403,13	2.738.788,57
5	Modal Hibah	977.538.700,00	(34.070.622,88)	(97.173.372,92)	0,00	18.062.983,05	864.357.687,25
	Jumlah	16.025.811.812,00	(558.555.268,00)	(8.315.788.529,00)	0,00	296.125.327,00	7.447.593.342,00

Dalam Laporan Keuangan Perumda Air Minum Limau Kunci (*Audited*) Tahun Buku 2023 disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar (Rp8.874.343.797,00), dan Laba tahun berjalan sebesar Rp296.125.327,00 serta penyertaan Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp11.017.675.906,00. Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Limau Kunci (*Audited*) Laba/(rugi) ditahan s.d. tahun lalu, laba/(rugi) tahun berjalan serta modal akhir *Audited* Tahun Buku 2023 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 163. Proporsi Nilai Penyertaan, Laba ditahan, dan Modal Bersih Akhir Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Penyertaan s.d. 31 Des 2023	Laba/ (Rugi) Ditahan s.d. 31 Desember 2023		Modal Bersih Akhir Per 31 Des 2023	
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemerintah Pusat	3.802.964.050,00	(2.360.283.300,87)	27,74	1.442.680.749,13	19,37
Pemprov Lampung	220.413.600,00	(136.798.174,41)	1,61	83.615.425,59	1,12
Pemda Lampung Barat	11.017.675.906,00	(5.963.475.214,54)	69,56	5.054.200.691,46	67,86
Pemda Lampung Utara	7.219.556,00	(4.480.767,43)	0,05	2.738.788,57	0,04
Modal Hibah	977.538.700,00	(113.181.012,75)	1,04	864.357.687,25	11,61
Jumlah	16.025.811.812,00	(8.578.218.470,00)	100,00	7.447.593.342,00	100,00

5.3.1.2.2.1.2. PD Pesagi Mandiri (Perseroda)

Rincian penyertaan modal pada PD Pesagi Mandiri (Perseroda) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 164. Penyertaan Modal pada PD Pesagi Mandiri (Perseroda)
Per 31 Desember 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2022		Mutasi Penambahan/ (Pengurangan) Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023	
	Nilai Penyertaan (Rp)	(%)		Nilai Penyertaan (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+4)	(6)
Pemda Lampung Barat	10.633.729.000,00	100,00	0,00	10.633.729.000,00	100,00
Jumlah	10.633.729.000,00	100,00	0,00	10.633.729.000,00	100,00

Posisi ekuitas pada Neraca PD Pesagi Mandiri (Perseroda) per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

Tabel 165. Posisi Nilai Ekuitas Pada PD Pesagi Mandiri (Perseroda)

No	Uraian	Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2022	Mutasi Tambah/ (Kurang) Tahun 2023			Nilai Bersih Ekuitas Tahun 2023
			Penambahan/ Pengurangan Penyertaan Modal	Labai/ (Rugi) Ditahan Tahun Lalu	Labai/ (Rugi) Tahun Berjalan dan Koreksi Labai Thn Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3 s.d.6)
1	Pemda Lambar	10.633.729.000,00	0,00	(1.666.168.540,59)	(1.542.335.865,41)	7.425.224.594,00
	Jumlah	10.633.729.000,00	0,00	(1.666.168.540,59)	(1.542.335.865,41)	7.425.224.594,00

Dalam Laporan Keuangan PD Pesagi Mandiri (Perseroda) *Audited* Tahun Buku 2023 disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar (Rp3.277.076.591,00) dan laba tahun berjalan sebesar Rp68.572.185,00. Penyajian penyertaan modal pada PD Pesagi Mandiri (Perseroda) Tahun Buku 2023 sebesar Rp10.633.729.000,00 dikurangi akumulasi kerugian yang ditahan dan ditambah laba tahun berjalan sehingga nilai bersih penyertaan modal sebesar Rp7.425.224.594,00. Sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 Pesagi Mandiri (Perseroda) tidak beroperasi karena perusahaan mengalami kerugian usaha dan terdapat piutang yang tidak tertagih serta belum ada pengurus perusahaan secara definitif. Labai/(rugi) tahun berjalan serta modal akhir tahun 2023 *Audited* terlihat pada tabel berikut.

Tabel 166. Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Labai serta Modal Akhir

Uraian	Nilai Penyertaan Per 31 Desember 2022 (Rp)	Labai/ (Rugi) Ditahan s.d. 31 Desember 2022		Labai/ (Rugi) Tahun Berjalan & Koreksi		Modal Bersih Akhir Per 31 Des 2023 (Rp)
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=2+3+5)
Pemda Lampung Barat	10.633.729.000,00	(1.666.168.540,59)	100,00	(1.542.335.865,41)	100,00	7.425.224.594,00
Jumlah	10.633.729.000,00	(1.666.168.540,59)	100,00	(1.542.335.865,41)	100,00	7.425.224.594,00

5.3.1.2.2.1.3. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) merupakan BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 30 Desember 2014. Jumlah penyertaan modal awal pemerintah daerah sebesar Rp3.650.000.000,00 atau 91,25%; pada TA. 2017 sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 modal pemerintah Kabupaten Lampung Barat di tambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 93,00%, dan pada TA. 2018 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2018 modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ditambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 94,17%. Tahun 2019 - 2021 tidak ada penambahan modal. Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2021 bahwa Kabupaten Lampung Barat akan melakukan penambahan modal sebesar Rp6.000.000.000,00

periode tahun 2021 s.d. 2025, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 dilakukan penambahan modal sebesar masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat kekurangan setor modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) lagi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Audited PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda), tanggal 15 Januari 2024 diketahui bahwa komposisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 167 Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Desember 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2022		Mutasi +/- Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023	
	Nilai penyertaan (Rp)	%		Nilai penyertaan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemda Lampung Barat	6.650.000.000,00	95,00	1.000.000.000,00	7.650.000.000,00	95,625
Dra. Helwiati Komala Dewi	235.000.000,00	3,36	0,00	235.000.000,00	2,938
Drs. Dimiyati Amin	100.000.000,00	1,43	0,00	100.000.000,00	1,250
Ir. Mulyadi Irsan	15.000.000,00	0,21	0,00	15.000.000,00	0,188
Jumlah	7.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00

Posisi ekuitas pada Neraca PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

Tabel 168. Posisi Nilai Ekuitas pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Des 2023

No	Uraian	Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2023	Mutasi Tambah/ (Kurang) Tahun 2023				Nilai Ekuitas Netto Tahun 2023
			Pemakaian Cadangan	Labal/ (Rugi) Ditahan Tahun Lalu	Pembagian Deviden	Labal/ (Rugi) Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3-4+5-6+7)
1	Pemda Lampung Barat	7.650.000.000,00	(349.874.595,75)	2.973.405.512,02	(757.985.400,01)	1.189.068.614,94	10.704.614.131,20
2	Dra. Helwiati Komala Dewi	235.000.000,00	(10.747.781,70)	119.519.205,59	(31.526.826,37)	36.526.944,37	348.771.541,89
3	Drs. Dimiyati Amin	100.000.000,00	(4.573.524,13)	50.859.235,98	(13.415.670,80)	15.543.380,60	148.413.421,65
4	Ir. Mulyadi Irsan	15.000.000,00	(686.028,62)	7.628.885,41	(2.012.350,62)	2.331.507,09	22.262.013,26
	Jumlah	8.000.000.000,00	(365.881.930,20)	3.151.412.839,00	(804.940.247,80)	1.243.470.447,00	11.224.061.108,00

Tabel 169. Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Laba serta Modal Akhir PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai penyertaan s.d. 31 Des 2023 (Rp)	Labal/ (Rugi) Ditahan s.d. 31 Des 2022 (Rp)	Pembagian Deviden & Pemakaian Cadangan (Rp)	Labal/ (Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	Modal Akhir Netto s.d. 31 Des 2023 (Rp)	
					(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2+3-4+5)	(7)
Pemda Lampung Barat	7.650.000.000,00	2.973.405.512,02	(1.107.859.995,76)	1.189.068.614,94	10.704.614.131,20	95,37
Dra. Helwiati Komala Dewi	235.000.000,00	119.519.205,59	(42.274.608,07)	36.526.944,37	348.771.541,89	3,11
Drs. Dimiyati Amin	100.000.000,00	50.859.235,98	(17.989.194,93)	15.543.380,60	148.413.421,65	1,32
Ir. Mulyadi Irsan	15.000.000,00	7.628.885,41	(2.698.379,24)	2.331.507,09	22.262.013,26	0,20
Jumlah	8.000.000.000,00	3.151.412.839,00	(1.170.822.178,00)	1.243.470.447,00	11.224.061.108,00	100,00

5.3.1.2.2.1.4. PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 17 Desember 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 9) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 periode TA 2018 s.d. 2022, berdasarkan data yang ada sejak tahun 2018

s.d. 2022 penyertaan modal pada Bank Lampung telah bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 artinya masih ada kekurangan penambahan modal sebesar Rp3.500.000.000,00, namun demikian karena Peraturan Daerah ini masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 telah berakhir maka penambahan investasi ini tidak bisa dilakukan. Sehingga Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung s.d. 31 Desember 2023 total sebesar Rp17.707.720.000,00 atau sebesar 4,11% atas keseluruhan kepemilikan modal yang ada.

Berikut rincian saham yang telah diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Lampung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 170. Rincian Bukti Saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Tanggal Terbit	Jumlah	
			Lembar	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A. 1849984 s.d. 1897332	10 Januari 2000	47.349	473.490.000,00
2.	A. 2326108 s.d. 2343883	31 Januari 2001	17.776	177.760.000,00
3.	A. 2620283 s.d. 2635738	30 Januari 2003	15.456	154.560.000,00
4.	A. 4500728 s.d. 4515342	31 Desember 2004	14.615	146.150.000,00
5.	A. 6193181 s.d. 6221694	7 Juni 2005	28.514	285.140.000,00
6.	A. 6750395 s.d. 6827598	28 April 2006	77.204	772.040.000,00
7.	A. 8997299 s.d. 9079698	27 Juni 2007	82.400	824.000.000,00
8.	A. 11153699 s.d. 11249698	30 Mei 2008	96.000	960.000.000,00
9.	A. 12757786 s.d. 12798571	10 Juni 2009	40.786	407.860.000,00
10.	A. 12982081 s.d. 13082752	3 Agustus 2011	100.672	1.006.720.000,00
11.	A. 13670153 s.d. 13770152	30 November 2011	100.000	1.000.000.000,00
12.	A. 14691213 s.d. 14791212	31 Desember 2014	100.000	1.000.000.000,00
13.	A. 16075213 s.d. 16175212	31 Desember 2014	100.000	1.000.000.000,00
14.	A. 17374487 s.d. 17424486	31 Desember 2015	50.000	500.000.000,00
15.	A. 19809763 s.d. 19859762	31 Desember 2016	50.000	500.000.000,00
16.	A. 20309763 s.d. 20359762	06 Juli 2017	50.000	500.000.000,00
17.	A. 22481688 s.d. 22531687	31 Desember 2018	50.000	500.000.000,00
18.	A. 24031688 s.d. 24081687	31 Desember 2019	50.000	500.000.000,00
19.	A. 24981688 s.d. 25081687	26 Oktober 2020	100.000	1.000.000.000,00
20.	A. 32455654 s.d. 32755653	31 Desember 2020	300.000	3.000.000.000,00
21.	A. 37735654 s.d. 37835653	31 Desember 2021	100.000	1.000.000.000,00
22.	A. 39654178 s.d. 39754177	31 Desember 2021	100.000	1.000.000.000,00
23.	A. 40690323 s.d. 40790322	30 Desember 2022	100.000	1.000.000.000,00
Jumlah			1.770.772	17.707.720.000,00

5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.201.074.228.511,49 mengalami peningkatan sebesar Rp134.033.960.919,00 atau 3,30% dari saldo aset tetap per 1 Januari 2023 sebesar Rp4.067.040.267.592,49 dengan rincian mutasi Aset Tetap selama tahun anggaran 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 171. Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
		Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3-4)
1. Tanah	653.643.184.930,00	1.093.688.750,00	2.340.910.000,00	652.395.963.680,00
2. Peralatan dan Mesin	459.892.185.651,69	22.282.808.387,00	4.013.153.500,00	478.161.840.538,69
3. Gedung dan Bangunan	905.618.832.827,34	45.139.758.476,82	16.389.005.512,82	934.369.585.791,34
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.981.673.833.979,07	110.131.957.074,00	27.664.211.251,00	2.064.141.579.802,07
5. Aset Tetap Lainnya	64.487.079.796,39	5.730.723.085,00	0,00	70.217.802.881,39
6. KDP	1.725.150.408,00	482.031.410,00	419.726.000,00	1.787.455.818,00
Jumlah	4.067.040.267.592,49	184.860.967.182,82	50.827.006.263,82	4.201.074.228.511,49
7. Akumulasi Penyusutan	(1.526.287.811.742,86)			(1.642.130.036.933,04)
Nilai Buku	2.540.752.455.849,63			2.558.944.191.578,45

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perolehan lain yang sah seperti hibah dan penerimaan fasilitas umum. (2) pengurangan yang merupakan nilai Aset Tetap yang dihapuskan. (3) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan. dan (4) koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya.

Rincian Aset Tetap pada masing-masing SKPD Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 disajikan pada lampiran 21:

Mutasi Aset Tetap Kabupaten Lampung Barat selama Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 172. Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo Per 1 Januari 2023	4.067.040.267.592,49
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	113.060.166.610,00
Belanja Lainnya	87.135.000,00
Penyelesaian KDP	419.726.000,00
Hibah	24.211.898.559,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	971.135.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	185.278.750,00
Mutasi OPD	45.925.627.263,82
Jumlah Mutasi Tambah	184.860.967.182,82
Mutasi Kurang :	

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Belanja Modal Extra Comptable	0,00
Belanja Modal Non Aset	0,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00
Belanja Modal Aset Lain-Lain	0,00
Hibah Non Aset	0,00
Penghapusan/Koreksi Pencatatan	0,00
Penghentian Aset	3.510.518.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	971.135.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Penyelesaian KDP	419.726.000,00
Mutasi OPD	45.925.627.263,82
Jumlah Mutasi Kurang	50.827.006.263,82
Total Mutasi	134.033.960.919,00
Saldo per 31 Desember 2023	4.201.074.228.511,49
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	(1.642.130.036.933,04)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	2.558.944.191.578,45

Perubahan nilai aset tetap adalah sebesar Rp134.033.960.919,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan nilai aset sebesar Rp184.860.967.182,82 terdiri dari:

1. Realisasi belanja modal sebesar Rp113.060.166.610,00 terdiri dari Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp113.075.541.710,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.593.221.262,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.914.032.034,00
 - d. Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan sebesar Rp68.350.846.494,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.720.035.410,00
 - f. Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp482.031.410,00
2. Belanja Lainnya berupa Belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan) sebesar Rp87.135.000,00 pada Dinas PUPR
3. Penyelesaian KDP sebesar Rp419.726.000,00 terdiri dari Penyelesaian KDP Gedung dan Bangunan/Bangunan Musholla pada RSUD Alimuddin Umar.
4. Hibah sebesar Rp24.211.898.559,00 berupa:
 - a. Hibah Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp424.599.300,00
 - b. Hibah Gedung dan Bangunan pada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp9.511.659.930,00
 - c. Hibah Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.000.000,00
 - d. Hibah Gedung dan Bangunan pada RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp54.000.000,00 dan
 - e. Hibah berupa aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada PPKD sebesar Rp14.186.639.329,00.
5. Reklasifikasi/koreksi 1 sebesar Rp971.135.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Batu Brak sebesar Rp159.850.000,00
 - b. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Liwa sebesar Rp481.700.000,00 dan
 - c. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Way Tenong sebesar Rp329.585.000,00.
6. Reklasifikasi/koreksi 2 sebesar Rp185.278.750,00 berupa koreksi nilai perolehan aset Tanah yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terdiri dari:
- a. Koreksi Nilai Tanah SMPN 3 Sumber Jaya sebesar Rp70.820.750,00
 - b. Koreksi Nilai Tanah untuk perluasan SMPN 2 Batu Ketulis sebesar Rp2.970.000,00
 - c. Koreksi Nilai Tanah SMPN Satu Atap 1 Balik Bukit sebesar Rp37.540.000,00
 - d. Koreksi Nilai Tanah Perumahan Puskesmas Mutar Alam Kec. Way Tenong sebesar Rp4.396.000,00
 - e. Koreksi Nilai Tanah Lapangan Puskesmas Kebun Tebu sebesar Rp66.262.000,00 dan
 - f. Koreksi Nilai Tanah Poskesdes Ringin Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh sebesar Rp3.290.000,00.
7. Mutasi Aset sebesar Rp45.925.627.263,82 yang terdapat pada beberapa OPD, terdiri dari:
- a. Mutasi tambah Tanah sebesar Rp908.410.000,00 pada Sekretariat Daerah dan Puskesmas Kenali.
 - b. Mutasi tambah Peralatan dan mesin sebesar Rp1.304.540.500,00 pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.118.205.512,82 pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata, Puskesmas Kenali, Puskesmas Lumbok Seminung, Puskesmas Liwa, Puskesmas Batu Brak, Puskesmas Batu Ketulis, Puskesmas Sekincau, Puskesmas BNS, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kec. Sumber Jaya, dan Kec. Sukau.
 - d. Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp27.594.471.251,00 pada Puskesmas Sekincau, Dinas TPH, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup.

b. Pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp50.827.006.263,82 terdiri dari:

1. Penghentian aset tetap sebesar Rp3.510.518.000,00 terdiri dari:
 - a. Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.432.500.000,00
 - b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.737.478.000,00
 - c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp270.800.000,00
 - d. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp69.740.000,00
2. Reklasifikasi/Koreksi 1 sebesar Rp971.135.000,00 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Batu Brak sebesar Rp159.850.000,00
 - b. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Liwa sebesar Rp481.700.000,00 dan
 - c. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Way Tenong sebesar Rp329.585.000,00.
3. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp419.726.000,00 terdiri dari Penyelesaian KDP Gedung dan Bangunan/Musholla pada RSUD Alimuddin Umar.

4. Mutasi Kurang Aset sebesar Rp45.925.627.263,82 yang terdapat pada beberapa OPD, terdiri dari:
 - a. Mutasi Kurang Tanah sebesar Rp908.410.000,00 pada Dinas Kepemudaan, OR dan Pariwisata, dan Dinas Kesehatan.
 - b. Mutasi Kurang Peralatan dan mesin sebesar Rp1.304.540.500,00 pada Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, NKPSDM, Kec. Lumbok Seminung, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, OR dan PPKD.
 - c. Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.118.205.512,82 pada Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan, OR, dan Pariwisata, Dinas PUPR, dan PPKD.
 - d. Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp27.594.471.251,00 pada Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan PPKD.

5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp652.395.963.680,00 dan Rp653.643.184.930,00 mengalami penurunan nilai sebesar (Rp1.247.221.250,00) atau (0,19%). Terdapat 1 (satu) objek/persil tanah kosong eks. BUMD Pesagi Mandiri (berlokasi di Pasar Lama Kecamatan Sekincau) dengan luas 3.379 m² senilai Rp3.361.996.000,00 merupakan objek tanah bermasalah (dalam sengketa) dengan pihak lain (Umar Jogja, dkk) sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 26/G/2015/PTUN-BL tanggal 22 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan No.54/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 16 Mei 2016. Tercatat juga 1 (satu) objek/persil tanah Bangunan Tempat Pendidikan dan Latihan dengan luas 2.555 m² senilai Rp27.500.000,00 yang masih dipergunakan oleh sekolah swasta (SMP Roworejo Kecamatan Suoh) belum dilengkapi dengan Surat perjanjian pinjam pakai.

Aset Tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 838 bidang/persil. Dari jumlah tersebut belum semua bidang tanah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Pakai, beberapa bidang tanah masih dicatat berdasarkan akta jual beli, akta hibah, dan dalam bentuk penguasaan. Rincian tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 173. Bukti Kepemilikan Aset Tanah Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Bidang/Persil
(1)	(2)	(3)
1.	Sertifikat Hak Pakai	402
2.	Akta Jual Beli	1
3.	Akta Hibah	8
4.	Belum dilengkapi bukti kepemilikan	427
Jumlah		838

Rincian bidang tanah sesuai dengan bukti kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Tanah Per SKPD pada periode TA.2023 dan TA.2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23.

Mutasi Aset Tetap berupa Tanah Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 174. Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo Per 1 Januari 2023	653.643.184.930,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	0,00
Belanja Lainnya	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	0,00
Reklasifikasi/Koreksi 2	185.278.750,00
Mutasi OPD	908.410.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.093.688.750,00
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset	1.432.500.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	908.410.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	2.340.910.000,00
Total Mutasi	(1.247.221.250,00)
Saldo per 31 Desember 2023	652.395.963.680,00

Perubahan nilai aset tetap tanah senilai (Rp1.247.221.250,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah aset tetap tanah sebesar Rp1.093.688.750,00 terdiri dari:
 1. Reklasifikasi/koreksi 2 sebesar Rp185.278.750,00 berasal dari koreksi pencatatan aset tanah yang nilainya disesuaikan dengan NJOP dengan rincian:
 - a. Koreksi Nilai Tanah SMPN 3 Sumber Jaya luas 9.905 M² dengan nilai sebesar Rp70.820.750,00
 - b. Koreksi Nilai Tanah untuk perluasan SMPN 2 Batu Ketulis luas 594 M² dengan nilai sebesar Rp2.970.000,00
 - c. Koreksi Nilai Tanah SMPN Satu Atap 1 Balik Bukit luas 3.754 M² dengan nilai sebesar Rp37.540.000,00
 - d. Koreksi Nilai Tanah Perumahan Puskesmas Mutar Alam Kec. Way Tenong luas 314 M² dengan nilai sebesar Rp4.396.000,00
 - e. Koreksi Nilai Tanah Lapangan Puskesmas Kebun Tebu luas 4.733 M² dengan nilai sebesar Rp66.262.000,00 dan
 - f. Koreksi Nilai Tanah Poskesdes Ringin Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh luas 329 M² dengan nilai sebesar Rp3.290.000,00.
 2. Mutasi Tanah sebesar Rp908.410.000,00 terdiri dari:
 - a. Tanah pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata sebesar Rp638.014.000,00 sebanyak 3 persil.
 - b. Tanah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp252.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Mess Mahasiswa di Bandar Lampung.
 - c. Tanah pada Puskesmas Kenali sebesar Rp18.396.000,00
- b. Mutasi Kurang Aset Tanah Sebesar Rp2.340.910.000,00 terdiri dari:
 1. Penghentian Aset Tanah sebesar Rp1.432.500.000,00 berupa Tanah yang akan dipindahtanggankan melalui proses hibah ke Kwarcab Pramuka Kabupaten Lampung Barat

dan Palang Merah Indonesia. Penghentian aset tanah ini berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 030/713/IV.01/2023 tanggal 21 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Hibah BMD Nomor: 030/714/IV.01/2023 tanggal 21 November 2023 kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Lampung Barat dan Naskah Hibah Nomor: 030/715/IV.01/2023 tanggal 21 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Hibah BMD Nomor: 030/716/IV.01/2023 tanggal 21 November 2023 kepada Palang Merah Indonesia Lampung Barat. Rincian atas aset tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24.

2. Mutasi Tanah sebesar Rp908.410.000,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata sebesar Rp252.000.000,00 sebanyak 1 persil berupa Tanah Asrama Mahasiswa di Bandar Lampung. Mutasi ini dilakukan dikarenakan terjadinya peralihan pengelolaan Aset dimaksud ke Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Mutasi aset berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 030/114/BAST/IV.01/2023 tanggal 26 Januari 2023.
 - b. Sekretariat Daerah sebesar Rp638.014.000,00 sebanyak 3 persil berupa 2 persil Tanah Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort dan 1 persil berupa Tanah Perluasan Motor Cross. Mutasi aset berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 030/004/BAST/IV.01/2023 tanggal 17 Januari 2023
 - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp18.396.000,00 sebanyak 1 persil. Mutasi ini terjadi sebagai dampak penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Mutasi aset berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 900/2088.A/III.02/2023 tanggal 16 November 2023.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp478.161.840.538,69 dan Rp459.892.185.651,69 mengalami peningkatan sebesar Rp18.269.654.887,00 atau 3,97%.

Terdapat aset berupa 69 (enam puluh sembilan) unit kendaraan roda 3, roda 4, dan roda 6 senilai Rp4.892.980.400,00 yang diserahkan oleh Dinas Perhubungan dan dipergunakan oleh kelompok tani di Kabupaten Lampung Barat tetapi belum dilengkapi dengan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan rincian:

Tabel 175. Aset Tetap – Kendaraan yang Belum Dilengkapi Naskah Hibah dan BAST

No (1)	Kode Barang (2)	Nama Barang (3)	Uraian Barang (4)	Tahun Perolehan 5	Nilai Perolehan 6
1.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/Dmax/BE 8078 MZ	2009	323.832.500,00
2.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/Dmax/BE 9054 MZ	2009	323.832.500,00
3.	1.3.2.02.01.03.001.	Truck	Mitsubishi/FE74HD/BE 9357 MZ	2009	295.000.000,00
4.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/TBR 54 Turbo /BE 9361 MZ	2010	145.043.000,00
5.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/TBR 54 Turbo /BE 9363 MZ	2010	145.043.000,00
6.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/TBR 54 Turbo /BE 9364 MZ	2010	145.043.000,00
7.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9366 MZ	2011	149.600.000,00
8.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9367 MZ	2011	149.600.000,00
9.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9368 MZ	2011	149.600.000,00
10.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9369 MZ	2011	149.600.000,00
11.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9370 MZ	2011	149.600.000,00
12.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9372 MZ	2011	149.607.000,00
13.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9373 MZ	2011	149.600.000,00
14.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9374 MZ	2011	149.600.000,00
15.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9375 MZ	2011	149.600.000,00
16.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9376 MZ	2011	149.600.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6
17.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6084 MZ	2012	19.587.750,00
18.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6085 MZ	2012	19.587.750,00
19.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6086 MZ	2012	19.587.950,00
20.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6087 MZ	2012	19.587.750,00
21.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6091 MZ	2012	19.587.750,00
22.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6092 MZ	2012	19.587.750,00
23.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6093 MZ	2012	19.587.750,00
24.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6094 MZ	2012	19.587.750,00
25.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6095 MZ	2012	19.587.750,00
26.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6096 MZ	2012	19.587.950,00
27.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6098 MZ	2012	19.587.750,00
28.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6099 MZ	2012	19.587.750,00
29.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6102 MZ	2012	19.587.750,00
30.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6103 MZ	2012	19.587.750,00
31.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6104 MZ	2012	19.587.750,00
32.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6105 MZ	2012	19.587.750,00
33.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6106 MZ	2012	19.587.750,00
34.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6108 MZ	2012	19.587.750,00
35.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6110 MZ	2012	19.587.750,00
36.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6112 MZ	2012	19.587.750,00
37.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6113 MZ	2012	19.587.750,00
38.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6114 MZ	2012	19.587.750,00
39.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6115 MZ	2012	19.587.750,00
40.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6117 MZ	2012	19.587.750,00
41.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6118 MZ	2012	19.587.750,00
42.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6119 MZ	2012	19.587.750,00
43.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6121 MZ	2012	19.587.750,00
44.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6122 MZ	2012	19.587.750,00
45.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6123 MZ	2012	19.587.750,00
46.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6126 MZ	2012	19.587.750,00
47.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6127 MZ	2012	19.587.750,00
48.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6128 MZ	2012	19.587.750,00
49.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6129 MZ	2012	19.587.750,00
50.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6130 MZ	2012	19.587.750,00
51.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6131 MZ	2012	19.587.750,00
52.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6132 MZ	2012	19.587.750,00
53.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6133 MZ	2012	19.587.750,00
54.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6134 MZ	2012	19.587.750,00
55.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6135 MZ	2012	19.587.750,00
56.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6136 MZ	2012	19.587.750,00
57.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6137 MZ	2012	19.587.750,00
58.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6139 MZ	2012	19.587.750,00
59.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6140 MZ	2012	19.587.750,00
60.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6141 MZ	2012	19.587.750,00
61.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6142 MZ	2012	19.587.750,00
62.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6143 MZ	2012	19.587.750,00
63.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9388 MZ	2013	159.734.600,00
64.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9390 MZ	2013	159.734.600,00
65.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9391 MZ	2013	159.734.600,00
66.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9394 MZ	2013	159.734.600,00
67.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9389 MZ	2013	159.734.600,00
68.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9392 MZ	2013	159.734.600,00
69.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9387 MZ	2013	159.734.900,00
JUMLAH					4.892.980.400,00

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD pada periode TA.2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 25

Perubahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada periode Tahun 2023 dan 2022 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 176. Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (6=3+4-5)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan	Pengurangan		(Rp)	%
1	2	3	4	5		(7=6-3)	(8=7/3)
1	Alat Besar	13.698.343.519,00	550.832.600,00	0,00	14.249.176.119,00	550.832.600,00	4,02
2	Alat Angkutan	87.522.144.289,00	2.215.838.351,00	1.799.466.300,00	87.938.516.340,00	416.372.051,00	0,48
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.603.690.449,00	249.270.604,00	0,00	5.852.961.053,00	249.270.604,00	4,45
4	Alat Pertanian	3.340.046.372,00	29.352.500,00	0,00	3.369.398.872,00	29.352.500,00	0,88
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	122.528.804.018,08	11.927.285.591,00	502.532.000,00	133.953.557.609,08	11.424.753.591,00	9,33
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	14.520.132.107,00	864.483.699,00	1.000.000,00	15.383.615.806,00	863.483.699,00	5,95
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	101.911.860.199,94	2.029.252.830,00	683.020.200,00	103.258.092.829,94	1.346.232.630,00	1,32
8	Alat Laboratorium	34.068.286.926,67	954.513.073,00	971.135.000,00	34.051.664.999,67	-16.621.927,00	-0,05
9	Alat Persenjataan	456.447.260,00	6.900.000,00	0,00	463.347.260,00	6.900.000,00	1,51
10	Komputer	62.570.605.639,00	3.071.542.389,00	56.000.000,00	65.586.148.028,00	3.015.542.389,00	4,82
11	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	2.263.311.380,00	57.990.750,00	0,00	2.321.302.130,00	57.990.750,00	2,56
12	Alat Keselamatan Kerja	2.771.686.539,00	171.460.000,00	0,00	2.943.146.539,00	171.460.000,00	6,19
13	Alat Peraga	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00
14	Peralatan Proses/Produksi	138.439.985,00	0,00	0,00	138.439.985,00	0,00	0,00
15	Rambu Rambu	4.610.874.706,00	75.076.000,00	0,00	4.685.950.706,00	75.076.000,00	1,63
16	Peralatan Olah Raga	3.886.451.262,00	79.010.000,00	0,00	3.965.461.262,00	79.010.000,00	2,03
	JUMLAH	459.892.185.651,69	22.282.808.387,00	4.013.153.500,00	478.161.840.538,69	18.269.654.887,00	3,97

Mutasi Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 177. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal sesuai LRA	23.471.410.062,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(49.173.000,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(513.765.500,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(118.622.000,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
Belanja Modal Non Aset	(3.132.916.337,00)
Belanja Modal Extra Comptable	(482.406.200,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi asset KIB B	19.174.527.025,00
Belanja Modal direklasifikasi dari aset:	418.694.237,00
- Belanja Modal Tanah Rp0,00	

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp372.693.237,00	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp46.001.000,00	
Belanja Modal yang menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin	19.600.501.262,00
Saldo per 1 Januari 2023	459.892.185.651,69
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	19.593.221.262,00
Belanja Modal di Reklasifikasi	
Belanja Lainnya	0,00
Hibah	424.599.300,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	960.447.325,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	1.304.540.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	22.282.808.387,00
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal Non-Aset	
Penghapusan	
Penghentian Aset	1.737.478.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	971.135.000,00
Mutasi OPD	1.304.540.500,00
Jumlah Mutasi Kurang	4.013.153.500,00
Total Mutasi 2023	18.269.654.887,00
Saldo per 31 Desember 2023	478.161.840.538,69
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(401.364.827.559,04)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	76.797.012.979,65

Perubahan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.269.654.887,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.282.808.387,00 terdiri dari:
 1. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp19.593.221.262,00 terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Aset Alat Besar sebesar Rp550.007.600,00
 - b. Belanja Modal Aset Alat Angkutan sebesar Rp1.013.986.551,00
 - c. Belanja Modal Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp249.270.604,00
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp29.352.500,00
 - e. Belanja Modal Aset Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga sebesar Rp11.125.216.266,00
 - f. Belanja Modal Aset Alat Studio dan Alat Komunikasi sebesar Rp864.483.699,00
 - g. Belanja Modal Aset Alat Kedokteran sebesar Rp2.007.496.830,00
 - h. Belanja Modal Aset Alat Laboratorium sebesar Rp552.128.073,00
 - i. Belanja Modal Alat Persenjataan sebesar Rp6.900.000,00
 - j. Belanja Modal Aset Komputer sebesar Rp2.810.842.389,00
 - k. Belanja Modal Aset Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp57.990.750,00
 - l. Belanja Modal Aset Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp171.460.000,00
 - m. Belanja Modal Aset Rambu-Rambu sebesar Rp75.076.000,00
 - n. Belanja Modal Aset Peralatan Olah Raga sebesar Rp79.010.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp23.471.410.062,00 sementara penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal adalah sebesar Rp19.593.221.262,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp3.878.188.800,00) yang disebabkan oleh reklasifikasi ke jenis aset lain sesuai dengan Tabel di atas. Reklasifikasi terjadi karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp49.173.000,00)
 - b) Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp513.765.500,00).
 - c) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp118.622.000,00).
 - d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi aset ekstrakontabel sebesar (Rp3.132.916.337,00).
 - e) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi aset sebesar (Rp482.406.200,00).
 - f) Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp372.693.237,00
 - g) Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp46.001.000,00.
2. Hibah sebesar Rp424.599.300,00 berupa kendaraan roda 6 dengan Nopol B 9356 TQU sebesar Rp388.699.300,00 berdasarkan Naskah Hibah Nomor: PRJ-152/BNPB/SU/RT.03.03/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan kendaraan roda 2 dengan Nopol B 3590 PJQ sebesar Rp35.900.000,00 berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 000.3.3.2/8183/BAK tanggal 20 Desember 2022.
3. Reklasifikasi/Koreksi 1 sebesar Rp960.447.325,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
- a. Kurang catat aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Batu Brak sebesar Rp149.162.325,00
 - b. Kurang catat aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Liwa sebesar Rp481.700.000,00 dan
 - c. Kurang catat aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Way Tenong sebesar Rp329.585.000,00.
4. Mutasi Tambah OPD sebesar Rp1.304.540.500,00 pada 15 OPD Pemerintah Kab. Lampung Barat.
- b. Pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.013.153.500,00 terdiri dari:
1. Penghentian Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.737.478.000,00 yang terdapat pada 8 OPD se-kabupaten Lampung Barat. Penghentian aset ini dilakukan karena barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan akan dilakukan penghapusan melalui mekanisme pemindahtanganan/lelang dan dimusnahkan dengan cara dikubur. Penghentian aset ini berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: B/337/KPTS/IV.01/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp30.494.800,00
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.300.000,00
 - c. Dinas PP, KB, PP, dan PA sebesar Rp76.960.000,00
 - d. Dinas PUPR sebesar Rp265.000.000,00
 - e. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp240.568.000,00
 - f. Kelurahan Way Mengaku sebesar Rp16.476.000,00

- g. RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp1.082.329.200,00 dan
 - h. Sekretariat DPRD sebesar Rp10.350.000,00
2. Reklasifikasi/Koreksi 1 yang disebabkan oleh pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara kumulatif menjadi pencatatan terinci sesuai dengan Sub Rincian Objek asetnya masing-masing sebesar Rp971.135.000,00 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Batu Brak sebesar Rp159.850.000,00
 - b. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Liwa sebesar Rp481.700.000,00 dan
 - c. Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin pada SMPN 1 Way Tenong sebesar Rp329.585.000,00.
 3. Mutasi Kurang Aset sebesar Rp1.304.540.500,00 yang terdapat pada 7 OPD se-Kabupaten Lampung Barat. dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 26.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp934.369.585.791,34 dan Rp905.618.832.827,34 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp28.750.752.964,00 atau 3,17%.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD pada periode TA.2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 27.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD pada periode TA.2023. Mutasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Perubahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada periode Tahun 2023 dan 2022 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 178. Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (6=3+4-5)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan	Pengurangan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Bangunan Gedung	876.910.501.988,43	44.838.549.476,82	16.339.005.512,82	905.410.045.952,43	28.499.543.964,00	3,25
2	Monumen	10.722.611.845,00	14.534.000,00	0,00	10.737.145.845,00	14.534.000,00	0,14
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	17.985.718.993,91	286.675.000,00	50.000.000,00	18.222.393.993,91	236.675.000,00	1,32
	JUMLAH	905.618.832.827,34	45.139.758.476,82	16.389.005.512,82	934.369.585.791,34	28.750.752.964,00	3,17

Tabel 179. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal sesuai LRA	20.128.517.180,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(372.693.237,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(695.005.659,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	(205.940.000,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal Extra Comptable	(28.647.250,00)
Belanja Modal Non Aset	0,00
Belanja Modal yang menjadi asset Gedung dan Bangunan	18.826.231.034,00
Belanja Modal direklasifikasi dari jenis asset lainnya:	87.801.000,00
- Belanja Modal Tanah Rp0,00	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp49.173.000,00	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp38.628.000,00	
Saldo Per 1 Januari 2023	905.618.832.827,34
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	18.914.032.034,00
Belanja Lainnya	87.135.000,00
Penyelesaian KDP	419.726.000,00
Hibah	9.600.659.930,00
Reklasifikasi/koreksi 1	0,00
Reklasifikasi/koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	16.118.205.512,82
Jumlah Mutasi Tambah	45.139.758.476,82
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset	270.800.000,00
Koreksi/Reklasifikasi 2	0,00
Penghapusan	0,00
Mutasi OPD	16.118.205.512,82
Jumlah Mutasi Kurang	16.389.005.512,82
Total Mutasi 2023	28.750.752.964,00
Saldo per 31 Desember 2023	934.369.585.791,34
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(170.968.053.036,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	763.401.532.755,34

Nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp28.750.752.964,00 terdiri dari:

a. Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp45.139.758.476,82 terdiri dari:

1. Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp18.914.032.034,00 terdiri dari:

- a) Bangunan Gedung (C1) sebesar Rp18.697.823.034,00
- b) Bangunan Monumen (C2) sebesar Rp14.534.000,00
- c) Tugu Titik Kontrol/Pasti (C4) sebesar Rp201.675.000,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp20.128.517.180,00 sementara penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan dari belanja modal sebesar Rp18.914.032.034,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.214.485.146,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke jenis aset lain sebesar Rp1.302.286.146,00 Reklasifikasi terjadi karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, terdiri daridengan rincian:

- 1) Direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar (Rp372.693.237,00) sesuai dengan lampiran 28

- 2) Direklasifikasi ke Aset Jalan. Irigasi. dan Jaringan sebesar (Rp695.005.659,00) sesuai dengan lampiran 29
- 3) Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp205.940.000,00) sesuai dengan lampiran 30
- 4) Direklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel sebesar (Rp28.647.250,00) sesuai dengan lampiran 31
- b. Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp87.801.000,00) sesuai dengan lampiran 32
2. Belanja Lainnya berupa Belanja Barang dan Jasa (belanja pemeliharaan) sebesar Rp87.135.000,00 pada Dinas PUPR berupa Tempat Parkir Semi Permanen.
3. Penyelesaian KDP sebesar Rp419.726.000,00 pada RSUD Alimuddin Umar berupa penyelesaian Bangunan Tempat Ibadah (Musholla), dengan rincian:
 - a. Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Gedung Musholla sebesar Rp13.986.000,00
 - b. Pembangunan Musholla sebesar Rp199.800.000,00
 - c. Pembangunan Musholla Tahap 2 sebesar Rp205.940.000,00
4. Hibah sebesar Rp9.600.659.930,00, dengan rincian:
 - a. Hibah Penataan Kebun Raya Liwa sebesar Rp5.254.713.930,00 pada PPKD Lampung Barat sesuai Naskah Hibah Nomor: 1349/BA/DC/2022 tanggal 22 Desember 2022.
 - b. Hibah Bangunan Pendidikan dan Latihan (SDN 3 Fajar Bulan dan SMPN Satap 2 Balik Bukit) sebesar Rp4.256.946.000,00 pada PPKD Lampung Barat sesuai Naskah Hibah Nomor:030/473.a/IV.01/2023 tanggal 22 Desember 2023.
 - c. Hibah Rehabilitasi Pagar SDN Tanjung Raya sebesar Rp35.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Naskah Hibah Nomor: 23255/2/A2/KU.07.00/2023 tanggal 10 Juli 2023.
 - d. Hibah Bangunan Tempat Ibadah (Musholla) sebesar Rp54.000.000,00 pada RSUD Alimuddin Umar sesuai Berita Acara Hibah Nomor: 000/1433/III.02/2023 tanggal 31 Juli 2023.
5. Mutasi Tambah SKPD sebesar Rp16.118.205.512,82 pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata, DLH, Dinas Dikbud, Sekretariat Daerah, Kec. Sukau, Kec. Sumber Jaya, Puskesmas Kenali, Puskesmas Lumbok Seminung, Puskesmas Liwa, Puskesmas Batu Brak, Puskesmas Sekincau, dan Puskesmas BNS, dengan rincian sesuai Lampiran 33
- b. Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.389.005.512,82 terdiri dari:
 1. Penghentian aset sebesar Rp270.800.000,00 dengan rincian :
 - a. Penghentian aset berupa Gedung rumah jabatan dan mess pegawai eks. Dinas Kehutanan sebesar Rp104.000.000,00 pada Sekretariat Daerah. Penghentian aset ini sebagai akibat pemindahtanganan aset ke Pemerintah Provinsi Lampung melalui proses hibah sesuai dengan Naskah Hibah Nomor: 030/490/IV.01/2023 tanggal 1 Agustus 2023.
 - b. Penghentian aset berupa bangunan gedung pertemuan/kwarcab pramuka sebesar Rp166.800.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penghentian aset ini sebagai akibat pemindahtanganan aset ke Palang Merah Indonesia Lampung Barat melalui proses hibah sesuai dengan Naskah Hibah Nomor: 030/713/IV.01/2023 tanggal 21 November 2023.

2. Berasal dari mutasi antar OPD sebesar Rp16.118.205.512,82 pada Dinas PUPR, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata, dan PPKD Lampung Barat, sesuai Lampiran 33.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.064.141.579.802,07 dan Rp1.981.673.833.979,07 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp82.467.745.823,00 atau 4,16%.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 34.

Berikut disajikan tabel Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Tahun 2023 :

Tabel 180. Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023

No	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (6=3+4-5)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan 4	Pengurangan 5		(Rp) (7=6-3)	% (8=7/3)
1	2	3					
1	Jalan dan Jembatan	1.497.852.819.295,40	68.941.856.539,00	9.760.972.563,00	1.557.033.703.271,40	59.180.883.976,00	3,95
2	Bangunan Air	395.282.485.572,67	40.732.020.535,00	17.833.498.688,00	418.181.007.419,67	22.898.521.847,00	5,79
3	Instalasi	47.120.277.991,00	458.080.000,00	69.740.000,00	47.508.617.991,00	388.340.000,00	0,82
4	Jaringan	41.418.251.120,00	0,00	0,00	41.418.251.120,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.981.673.833.979,07	110.131.957.074,00	27.664.211.251,00	2.064.141.579.802,07	82.467.745.823,00	4,16

Mutasi Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 181. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Belanja Modal sesuai LRA	67.418.166.745,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Non Aset	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset KDP	(276.091.410,00)
Belanja Modal Non Aset	0,00
Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.142.075.335,00
Belanja Modal direklasifikasi dari aset:	1.208.771.159,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp513,765,500,00	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp695,005,659,00	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0,00	
Saldo Per 1 Januari 2023	1.981.673.833.979,07
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	68.350.846.494,00
Belanja Lainnya	0,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Penyelesaian KDP	0,00
Hibah	14.186.639.329,00
Mutasi OPD	27.594.471.251,00
Jumlah Mutasi Tambah	110.131.957.074,00
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset	69.740.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	27.594.471.251,00
Jumlah Mutasi Kurang	27.664.211.251,00
Total Mutasi 2023	82.467.745.823,00
Saldo per 31 Desember 2023	2.064.141.579.802,07
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.067.135.729.638,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	997.005.850.164,07

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp82.467.745.823,00 terdiri dari:

- a. Penambahan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp110.131.957.074,00 terdiri dari:
 1. Realisasi belanja modal sebesar Rp68.350.846.494,00
 - Belanja Modal Jalan dan Jembatan (D1) sebesar Rp49.419.911.413,00
 - Belanja Modal Bangunan Air/Irigasi (D2) sebesar Rp18.472.855.081,00
 - Belanja Modal Instalasi (D3) sebesar Rp458.080.000,00.

Realisasi Belanja Modal sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp67.418.166.745,00 sementara penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Belanja Modal sebesar Rp68.350.846.494,00 sehingga terjadi selisih lebih sebesar Rp932.679.749,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal JIJ yang direklasifikasi ke jenis aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp276.091.410,00):
- b. Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset JIJ sebesar Rp1.208.771.159,00 Reklasifikasi terjadi karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, dengan rincian:
 - Direklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp513.765.500,00, sesuai Lampiran 35.
 - Direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp695.005.659,00, sesuai Lampiran 36.
2. Hibah dari Kementerian PUPR Republik Indonesia sebesar Rp14.186.639.329,00 sesuai dengan Naskah Hibah Nomor: 1349/BA/DC/2022 tanggal 22 Desember 2022, terdiri dari:
 - a. Hibah Penataan Kebun Raya Liwa sebesar Rp11.814.795.329,00 pada PPKD Lampung Barat.
 - b. Hibah berupa Jalan Usaha Tani sebesar Rp2.371.844.000,00 pada PPKD Lampung Barat
3. Mutasi OPD sebesar Rp27.594.471.251,00 yang terdapat pada Dinas TPH, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Puskesmas Sekincau. Mutasi dilakukan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing OPD. Rincian aset yang dimutasikan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran 37.

- b. Pengurangan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp27.664.211.251,00 terdiri dari:
1. Penghentian Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp69.740.000,00 berupa 2 unit Container sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Penghentian aset ini dilakukan karena barang tersebut dipindahtangankan melalui proses lelang sesuai dengan Surat Bupati Nomor: 030/1215/IV.01/2023 tanggal 1 September 2023 hal Persetujuan Pemindahtanganan BMD Melalui Penjualan dan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/320/KPTS/IV.01/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Nilai Limit BMD Dalam Pelaksanaan Lelang. Rincian aset dimaksud tercantum dalam Lampiran 38.
 2. Mutasi OPD sebesar Rp27.594.471.251,00 pada Dinas Kesehatan, BPBD, dan PPKD Lampung Barat. Mutasi dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing OPD. Rincian aset yang dimutasikan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran 39.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp70.217.802.881,39 dan Rp64.487.079.796,39 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp5.730.723.085,00 atau 8,89%.

Terdapat aset tetap lainnya berupa buku pelajaran SD, Multimedia pembelajaran interaktif, buku mewarnai TK, dan sarana penunjang pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan bagi beberapa sekolah swasta senilai Rp155.989.786,00 dengan rincian:

Tabel 182. Aset Tetap Lainnya Diperuntukkan Bagi Sekolah Swasta Tahun 2023

No	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1.3.5.01.01.01.006.	Buku Pelajaran SD	SDS Karya Bakti	2010	51.638.393,00
2.	1.3.5.01.01.01.006.	Buku Pelajaran SD	SDS Kartini	2010	51.638.393,00
3.	1.3.5.01.01.07.002.	Multimedia Pemb Interaktif	SDS Selandau Tengah	2011	6.435.000,00
4.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Sai Betik	2011	1.977.000,00
5.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Dharma Wanita	2011	1.977.000,00
6.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK DW Pura Jaya	2011	1.977.000,00
7.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Miftahul Janah	2011	1.977.000,00
8.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Tunas Bangsa	2011	1.977.000,00
9.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Citra Darma	2011	1.977.000,00
10.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Nurul Islam	2011	1.977.000,00
11.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK DW Giham Sukamaju	2011	1.977.000,00
12.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Nurul Islam	2011	1.977.000,00
13.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Roudhatul Ulum	2011	1.977.000,00
14.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK ABA Sukarame	2011	1.977.000,00
15.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Kartika II	2011	1.977.000,00
16.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Bunda Khotijah	2011	1.977.000,00
17.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK DW Tanjung Raya	2011	1.977.000,00
18.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Nusantara	2011	1.977.000,00
19.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK Bhakti Mulya	2011	1.977.000,00
20.	1.3.5.01.01.08.005.	Buku Mewarnai TK	TK DW BN Suoh	2011	1.977.000,00
21.	1.3.5.01.01.01.006.	Buku TK	TK Dharma Wanita	2011	1.977.000,00
22.	1.3.5.01.01.01.006.	Sarana Penunjang Pmblijr	SDS Selandau Tengah	2011	10.692.000,00
				JUMLAH	155.989.786,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 40.

Berikut disajikan tabel Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 :

Tabel 183. Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan	Pengurangan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Bahan Perpustakaan	57.333.610.461,39	4.987.423.385,00	0,00	62.321.033.846,39	4.987.423.385,00	8,70
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	6.984.464.335,00	743.299.700,00	0,00	7.727.764.035,00	743.299.700,00	10,64
3	Hewan	36.800.000,00	0,00	0,00	36.800.000,00	0,00	0,00
4	Tanaman	132.205.000,00	0,00	0,00	132.205.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	64.487.079.796,39	5.730.723.085,00	0,00	70.217.802.881,39	5.730.723.085,00	8,89

Mutasi Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Kabupaten Lampung Barat tahun selama 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 184. Mutasi Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sesuai LRA	5.836.651.645,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(46.001.000,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(38.628.000,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Ekstrakomtable	(12.457.475,00)
Belanja Modal Non Aset	(138.151.760,00)
Belanja Modal ATL yang menjadi ATL	5.601.413.410,00
Belanja Modal direklasifikasi dari aset:	118.622.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp118.622.000,00	
Saldo Per 1 Januari 2023	64.487.079.796,39
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	5.720.035.410,00
Belanja Lainnya	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	10.687.675,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	5.730.723.085,00
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal Non Aset	0,00
Belanja Modal Yang Direklasifikasi	0,00
Reklasifikasi/Koreksi 1	0,00
Penghentian Aset	0,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi 2023	5.730.723.085,00
Saldo per 31 Desember 2023	70.217.802.881,39
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	(2.661.426.700,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	67.556.376.181,39

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp5.730.723.085,00 terdiri dari:

- a. Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp5.730.723.085,00 terdiri dari:
 1. Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.720.035.410,00 terdiri dari:
 - a) Bahan Perpustakaan (E1) sebesar Rp4.956.721.710,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b) Bahan Perpustakaan (E1) sebesar Rp20.014.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
 - c) Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan (E2) sebesar Rp723.299.700,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d) Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan (E2) sebesar Rp20.000.000,00 pada Kelurahan Way Mengaku.
 2. Reklasifikasi/Koreksi 1 sebesar Rp10.687.675,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.. Reklasifikasi ini disebabkan oleh pencatatan kembali aset sesuai dengan kode barangnya yang mana sebelumnya aset tersebut tercatat secara kumulatif di Aset Peralatan dan Mesin. Rincian aset dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 41.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.787.455.818,00 dan Rp1.725.150.408,00 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp62.305.410,00 atau 3,61%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah. Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan. jalan. irigasi dan jaringan. dan Aset Tetap Lainnya. yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan hanya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berikut tabel perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD pada periode TA. 2023:

Tabel 185. Konstruksi Dalam Pengerjaan di Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	SKPD	Jumlah	Jumlah	Lebih/ (Kurang)	
		31 Desember 2023	1 Januari 2023	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas PU	1.511.364.408,00	1.511.364.408,00	0,00	0,00
2	BPBD	276.091.410,00	0,00	276.091.410,00	100,00
3	RSUD Alimuddin Umar	0,00	213.786.000,00	(213.786.000,00)	(100,00)
JUMLAH		1.787.455.818,00	1.725.150.408,00	62.305.410,00	3,61

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran 42.

Mutasi Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 186. Mutasi Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo Per 1 Januari 2023	1.725.150.408,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	482.031.410,00
Reklasifikasi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	482.031.410,00
Mutasi Kurang :	
Penyelesaian KDP	419.726.000,00
Penghentian Aset KDP	0,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	419.726.000,00
Total Mutasi 2023	62.305.410,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.787.455.818,00

Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp62.305.410,00 terdiri dari:

- Mutasi tambah Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp482.031.410,00 berasal dari:
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp205.940.000,00 pada RSUD Alimuddin Umar.
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp276.091.410,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mutasi kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp419.726.000,00 berasal dari penyelesaian KDP berupa pembangunan tempat ibadah/Musholla pada RSUD Alimuddin Umar.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.642.130.036.933,04 dan Rp1.526.287.811.742,86 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp115.842.225.190,18 atau 7,59%.

Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 187. Rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023

Uraian (1)	31 Desember 2023 (Rp) (2)	1 Januari 2023 (Rp) (3)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp) (4=2-3)	% (5=4/3)
Peralatan dan Mesin	401.364.827.559,04	366.501.009.935,86	34.863.817.623,18	9,51
Gedung dan Bangunan	170.968.053.036,00	152.168.008.289,00	18.800.044.747,00	12,35
Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.067.135.729.638,00	1.005.184.883.568,00	61.950.846.070,00	6,16
Aset Tetap Lainnya	2.661.426.700,00	2.433.909.950,00	227.516.750,00	9,35
Jumlah	1.642.130.036.933,04	1.526.287.811.742,86	115.842.225.190,18	7,59

Nilai perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.201.074.228.511,49 dan apabila disandingkan dengan Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp1.642.130.036.933,04) maka nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.558.944.191.578,45

Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan dan nilai buku kelompok Aset Tetap tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 188. Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Tanah	652.395.963.680,00	0,00	0,00	652.395.963.680,00	100,00
Peralatan dan Mesin	478.161.840.538,69	401.364.827.559,04	83,94	76.797.012.979,65	16,06
Gedung dan Bangunan	934.369.585.791,34	170.968.053.036,00	18,30	763.401.532.755,34	81,70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.064.141.579.802,07	1.067.135.729.638,00	51,70	997.005.850.164,07	48,30
Aset Tetap Lainnya	70.217.802.881,39	2.661.426.700,00	3,79	67.556.376.181,39	96,21
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.787.455.818,00	0,00	0,00	1.787.455.818,00	100,00
Jumlah	4.201.074.228.511,49	1.642.130.036.933,04	39,09	2.558.944.191.578,45	60,91

5.3.1.4. DANA CADANGAN

5.3.1.4.1. Dana Cadangan

Pada Tahun 2023 dan 2022 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki saldo dana cadangan.

5.3.1.5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya Bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp225.439.714.024,39 mengalami peningkatan sebesar Rp41.200.308.735,39 atau 22,36% dari saldo aset lainnya per 1 Januari 2023 sebesar Rp184.239.405.289,00 dengan rincian komposisi kelompok Aset Lainnya dan mutasi selama tahun anggaran 2023 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 189. Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023

Jenis Aset	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi				31 Desember 2023 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	Koreksi		
				Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=2+3-4+5-6)
1. Tagihan Jangka Panjang - TGR	0,00	3.508.157.928,39	0,00	0,00	0,00	3.508.157.928,39
2. Aset Tidak Berwujud (ATB)	3.465.815.871,00	152.680.500,00	0,00	49.500.000,00	0,00	3.667.996.371,00
3. Aset Lain-lain	181.002.788.163,00	41.828.869.987,00	5.360.645.850,00	0,00	0,00	217.471.012.300,00
4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.363.635.599,00	3.662.987.000,00	2.363.635.599,00	0,00	0,00	3.662.987.000,00
Nilai Perolehan	186.832.239.633,00	49.152.695.415,39	7.724.281.449,00	49.500.000,00	0,00	228.310.153.599,39
1. Amortisasi ATB	(2.592.834.344,00)	(277.605.231,00)	0,00	0,00	0,00	(2.870.439.575,00)
Sub Jumlah	(2.592.834.344,00)	(277.605.231,00)	0,00	0,00	0,00	(2.870.439.575,00)
Nilai Netto	184.239.405.289,00	48.875.090.184,39	7.724.281.449,00	49.500.000,00	0,00	225.439.714.024,39

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (UU 15 Tahun 2006 tentang BPK). Penyajian Piutang Ganti Rugi pada aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Berikut Piutang Tagihan Jangka Panjang disajikan pada lampiran 19 dan tabel berikut.

Tabel 190. Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.508.157.928,39	0,00	3.508.157.928,39	∞
Jumlah	3.508.157.928,39	0,00	3.508.157.928,39	∞

Saldo Tagihan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.508.157.928,39 dan Rp0,00 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp3.508.157.928,39. Tuntutan Ganti Kerugian ini merupakan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

5.3.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.667.996.371,00 dan Rp3.465.815.871,00 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp202.180.500,00 atau 5,83%. Nilai tersebut adalah nilai sebelum memperhitungkan amortisasi aset tak berwujud senilai (Rp2.870.439.575,00) sehingga nilai buku aset tetap tak berwujud adalah sebesar Rp797.556.796,00.

Aset Tidak Berwujud adalah aset *non-moneter* yang tidak mempunyai wujud fisik. dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Aset Tidak Berwujud menggunakan metode amortisasi garis lurus. Masa manfaat atau umur ekonomis aset tak berwujud ditentukan sesuai objeknya, yang mana untuk Software ditetapkan selama 5 tahun (10 semester) sedangkan untuk Lisensi/frenchise, hak cipta, hak paten, dan kajian ditetapkan selama 10 tahun (20 semester).

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 191. Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. Aset Tidak Berwujud	3.667.996.371,00	3.465.815.871,00	202.180.500,00	5,83
2. Akumulasi Amortisasi ATB	(2.870.439.575,00)	(2.592.834.344,00)	(277.605.231,00)	10,71
Nilai Buku	797.556.796,00	872.981.527,00	(75.424.731,00)	(8,64)

Nilai Aset Tidak Berwujud per OPD tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 43.

Mutasi Aset Lainnya berupa aset tidak berwujud Kabupaten Lampung Barat tahun selama 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 192. Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 1 Januari 2023	3.465.815.871,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	152.680.500,00
Belanja Lainnya	49.500.000,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi	0,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	202.180.500,00
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0,00
Penghentian Aset	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi	0,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi 2022	202.180.500,00
Saldo per 31 Desember 2023	3.667.996.371,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(2.870.439.575,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	797.556.796,00

Nilai Aset Tidak Berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp202.180.500,00 bersumber dari belanja modal aset lainnya dan belanja barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. berupa:

1. Aplikasi *E-Ticketing* Kebun Raya Liwa sebesar Rp152.680.500,00
2. Aplikasi Oracle Database standart-license dan Oracle database ATS sebesar Rp49.500.000,00

Daftar Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 193. Rincian Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Per 31 Des 2023

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	5=(4/3)
1. Software PKMG	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2. Software Pelayanan Rujukan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
3. Software Manajemen RS	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
4. Software BPRS	165.660.000,00	165.660.000,00	0,00	0,00
5. Vmware vSphere 6 Essentials	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00
6. Devloy Vmware vSphere 6	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
7. Web Hosting ISP Config	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
8. Zimbra Mail Server	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
9. Aplikasi SIPPD	344.069.091,00	344.069.091,00	0,00	0,00
10. Aplikasi SIG Kawasan Kopi	168.367.000,00	168.367.000,00	0,00	0,00
11. Software Zimbra (Diskominfo)	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00
12. Design Web (Diskominfo)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
13. Software/ Aplikasi Komputer (Dinas Perpustakaan&Arsip)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
14. Software/ Aplikasi Perpustakaan (Dinas Perpustakaan&Arsip)	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
15. Aplikasi Software Sistem Pelaporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
16. Aplikasi SiAP Online	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00
17. Design Web (BLHKP)	49.526.900,00	49.526.900,00	0,00	0,00
18. Software Weight Bridge	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
19. Aplikasi Software SAPK	29.875.000,00	29.875.000,00	0,00	0,00
20. Software SIMPEG	321.250.000,00	321.250.000,00	0,00	0,00
21. Software Gaji	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
22. Windows Server	28.820.000,00	28.820.000,00	0,00	0,00
23. Oracle Database standart-license dan Oracle database ATS	133.485.000,00	83.985.000,00	49.500.000,00	58,94
24. Internet developer suite-license dan IDS ATS	83.957.500,00	83.957.500,00	0,00	0,00
25. Microsoft Visual Studio Pro	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00
26. Mafinpo Profesional	34.375.000,00	34.375.000,00	0,00	0,00
27. Design Software PSE (KP3M)	122.732.000,00	122.732.000,00	0,00	0,00
28. Software GIS	168.800.000,00	168.800.000,00	0,00	0,00
29. Software Managemen dan Scurity (Dinas Kominfo)	112.350.000,00	112.350.000,00	0,00	0,00
30. Aplikasi Sip-Online	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
31. Software Kohort	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
32. Digital Library System (DLS)	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00
33. Lisensi Mesin Absensi	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	0,00
34. Software Pembelajaran	1.677.290,00	1.677.290,00	0,00	0,00
35. Operating System	8.764.850,00	8.764.850,00	0,00	0,00
36. Office	28.693.650,00	28.693.650,00	0,00	0,00
37. Operating System	8.764.850,00	8.764.850,00	0,00	0,00
38. Office	28.693.650,00	28.693.650,00	0,00	0,00
39. Operating System	8.764.850,00	8.764.850,00	0,00	0,00
40. Office	28.693.650,00	28.693.650,00	0,00	0,00
41. MICROSOFT	4.894.350,00	4.894.350,00	0,00	0,00
42. Sistem Aplikasi Web	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
43. Shutdown Software	2.601.040,00	2.601.040,00	0,00	0,00
44. Sistem Aplikasi Web	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00
45. Software SIM PKB	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	0,00
46. Kajian Tunjangan Transportasi DPRD	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
47. Kajian Tunjangan Perumahan DPRD	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
48. install Aplikasi SIM RS	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00	0,00
49. Digital Library System (DLS)	14.940.200,00	14.940.200,00	0,00	0,00

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	5=(4/3)
50. Aplikasi Pajak Non-Tunai "PM_SANTUN)	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00
51. Aplikasi Inventarisasi Aset Daerah	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	0,00
52. Aplikasi SIMASET	199.900.000,00	199.900.000,00	0,00	0,00
53. Aplikasi MARKETPLACE (UMKM)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
54. Aplikasi E-Ticketing Kebun Raya Liwa	152.680.500,00		152.680.500,00	100,00
Harga Perolehan	3.667.996.371,00	3.465.815.871,00	202.180.500,00	5,83
Akumulasi Amortisasi	(2.870.439.575,00)	(2.592.834.344,00)	(277.605.231,00)	10,71
Nilai Buku	797.556.796,00	872.981.527,00	(75.424.731,00)	(8,64)

5.3.1.5.3. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp217.471.012.300,00 dan Rp181.002.788.163,00 mengalami peningkatan sebesar Rp36.468.224.137,00 atau 20,15%.

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat. usang. dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan. sewa beli. penghibahan. penyertaan modal). Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Rincian Aset Lain-Lain Per OPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 44.

Mutasi Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 194. Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Lain-lain Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 1 Januari 2023	181.002.788.163,00
Mutasi Tambah:	
Hibah	38.318.351.987,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	38.318.351.987,00
Penghentian Aset	3.510.518.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	80.147.221.974,00
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	5.360.645.850,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	38.318.351.987,00
Jumlah Mutasi Kurang	43.678.997.837,00
Total Mutasi 2023	36.468.224.137,00
Saldo per 31 Desember 2023	217.471.012.300,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	217.471.012.300,00

Perubahan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp36.468.224.137,00 terdiri dari :

1. Mutasi Tambah Aset lain-Lain sebesar Rp80.147.221.974,00 terdiri dari:
 - a. Hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp38.318.351.987,00 berupa SPAM IKK pada PPKD Lampung Barat. Pencatatan aset yang berasal dari Hibah Kementerian PUPR Republik Indonesia ke dalam Jenis Aset Lain-Lain dikarenakan aset tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hibah ke masyarakat dan penyertaan modal ke BUMD PDAM Limau Kunci.
 - b. Penghentian Aset sebesar Rp3.510.518.000,00 dikarenakan aset tersebut dalam proses penghapusan sesuai dengan Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 030/1147/IV.01/2023 tanggal 14 November 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 45 dengan rincian:
 - a) BPKD sebesar Rp30.494.800,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp182.100.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin serta Aset Gedung dan Bangunan.
 - c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB, PP, dan PA sebesar Rp76.960.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
 - d) Dinas PUPR sebesar Rp265.000.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
 - e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp310.308.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin serta Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - f) Kelurahan Way Mengaku sebesar Rp16.476.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
 - g) PPKD Lampung Barat sebesar Rp1.311.000.000,00 berupa Aset Tanah.
 - h) RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp1.082.329.200,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
 - i) Sekretariat Daerah sebesar Rp225.500.000,00 berupa Aset Gedung dan Bangunan.
 - j) Sekretariat DPRD sebesar Rp10.350.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
 - c. Mutasi antar OPD sebesar Rp38.318.351.987,00 berupa SPAM IKK pada Dinas PUPR.
2. Pengurangan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp43.678.997.837,00 terdiri dari:
 - a. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp5.360.645.850,00. Penghapusan aset ini didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/337/KPTS/IV.01/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan daftar Inventarisasi BMD Berupa Gedung dan Kendaraan, Kontainer Sampah, Peralatan dan Mesin dengan rincian:
 - a) Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp4.490.068.250,00 pada Bappeda, BPKD, Dinas Dikbud, Dinas PP,KB,PP,PA, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kel. Way Mengaku, PPKD, RSUD Alimuddin Umar, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 46.
 - b) Penghapusan Aset tetap yang tidak dipergunakan pada proses pemerintahan sebesar Rp870.577.600,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 47.
 - b. Mutasi antar OPD sebesar Rp38.318.351.987,00 SPAM IKK pada PPKD Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 48

Rincian Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 195. Rincian Aset Lain-lain Berupa Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Peralatan dan Mesin rusak berat	12.213.773.873,00	12.984.969.663,00	(771.195.790,00)	(5,94)
Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam proses operasional pemerintahan	3.943.582.136,00	4.543.359.736,00	(599.777.600,00)	(13,20)
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	1.623.613.000,00	2.065.484.000,00	(441.871.000,00)	(21,39)
Gedung dan Bangunan yang tidak dipergunakan	18.610.654.170,00	18.610.654.170,00	0,00	0,00
Jalan. Irigasi dan Jaringan rusak berat	6.028.165.710,00	6.028.165.710,00	0,00	0,00
Jalan. Irigasi dan Jaringan yang tidak dipergunakan dalam proses operasional pemerintahan	171.643.266.320,00	133.324.914.333,00	38.318.351.987,00	28,74
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	974.556.396,00	1.011.839.856,00	(37.283.460,00)	(3,68)
Aset Tetap Lainnya yang tidak dipergunakan dalam proses operasional pemerintahan	2.433.400.695,00	2.433.400.695,00	0,00	0,00
Jumlah	217.471.012.300,00	181.002.788.163,00	36.468.224.137,00	20,15

5.3.1.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.870.439.575,00 dan Rp2.592.834.344,00 mengalami peningkatan sebesar Rp277.605.231,00 atau 10,71%.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan kontra akun Aset Tidak Berwujud yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tidak Berwujud.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 196. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	1 Januari 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.870.439.575,00	2.592.834.344,00	277.605.231,00	10,71
Jumlah	2.870.439.575,00	2.592.834.344,00	277.605.231,00	10,71

Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.667.996.371,00 dan apabila disandingkan dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp2.870.439.575,00) maka nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp797.556.796,00.

Rincian nilai perolehan Aset Tidak Berwujud dan nilai buku Aset Tidak Berwujud tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 197. Nilai Perolehan, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2023

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Aset Tidak Berwujud	3.667.996.371,00	2.870.439.575,00	78,26	797.556.796,00	21,74
Jumlah	3.667.996.371,00	2.870.439.575,00	78,26	797.556.796,00	21,74

5.3.1.5.5. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Untuk meningkatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sehat, efisien, dan efektif dalam rangka pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, terdapat Dana Bagi Hasil yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Treasury Deposit Facility. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF yang pada pokoknya mengatur penyesuaian kebijakan akuntansi terkait TDF tersebut yaitu : (a) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-DTU DBH/DAU (LO); (b) Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi atas DBH/DBU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga Lain-lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

Pada tanggal pelaporan Neraca 31 Desember 2023 terdapat Dana TDF Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah disetorkan oleh RKUN ke Rekening Nomor 519000289980 TDF Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp2.643.569.000,00 sesuai PMK Nomor 159 Tahun 2023 dan KMK Nomor KMK 38/KM.07/2023 sebesar Rp 1.019.418.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 198. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. DBH PBB (Bagi Rata)	0,00	472.605.805,00	(472.605.805,00)	(100,00)
2. DBH PBB (Bagian Daerah) - Migas	102.745.000,00	104.563.170,00	(1.818.170,00)	(1,74)
3. DBH PBB (Bagian Daerah) – Perkebunan	68.703.000,00	0,00	68.703.000,00	∞
4. DBH PBB (Bagian Daerah) – Perhutanan	6.276.000,00	0,00	6.276.000,00	∞
5. DBH PBB (Bagian Daerah) – Panas Bumi	36.444.000,00	0,00	36.444.000,00	∞
6. DBH PBB (Bagian Daerah) – Minerba	3.267.000,00	0,00	3.267.000,00	∞
7. DBH PBB (Bagian Daerah) – Lainnya	12.453.000,00	0,00	12.453.000,00	∞
8. DBH PBB (Bagian Daerah) – Sektor Lainnya	0,00	12.356.755,00	(12.356.755,00)	(100,00)
9. DBH PBB (BP Pertambangan Migas)	0,00	3.485.492,00	(3.485.492,00)	(100,00)
10. DBH PBB (BP Sektor Lainnya)	0,00	411.920,00	(411.920,00)	(100,00)
11. DBH PPh Pasal 21	787.967.000,00	559.666.674,00	228.300.326,00	40,79
12. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.193.000,00	18.704.417,00	(14.511.417,00)	(77,58)
13. DBH SDA Minyak Bumi	477.977.000,00	0,00	477.977.000,00	∞
14. DBH SDA Minyak Bumi 15%	0,00	636.224.914,00	(636.224.914,00)	(100,00)
15. DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	0,00	21.046.959,00	(21.046.959,00)	(100,00)
16. DBH SDA Panas Bumi Set. Bagian Pemerintah	2.002.641.000,00	193.004.998,00	1.809.636.002,00	937,61
17. DBH SDA Panas Bumi Iuran Tetap	19.072.000,00	9.830.362,00	9.241.638,00	94,01
18. DBH SDA Minerba Iuran Tetap	75.879.000,00	25.856.497,00	50.022.503,00	193,46
19. DBH SDA Minerba Royalti	0,00	69.384.010,00	(69.384.010,00)	(100,00)
20. DBH SDA Kehutanan PSDH	65.370.000,00	10.386.153,00	54.983.847,00	529,40
21. DBH SDA Perikanan	0,00	211.753.211,00	(211.753.211,00)	(100,00)
22. DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	14.354.262,00	(14.354.262,00)	(100,00)
Jumlah	3.662.987.000,00	2.363.635.599,00	1.299.351.401,00	54,97

TDF berdasarkan PMK Nomor 159 Tahun 2023 sebesar Rp2.643.569.000,00 :

1. DBH Pajak Penghasilan Rp792.160.000,00
2. DBH PBB Rp229.888.000,00
3. DBH SDA Minyak Bumi Rp 412.880.000,00
4. DBH SDA Minerba Rp 75.879.000,00
5. DBH SDA Panas Bumi Rp 1.132.762.000,00

TDF berdasarkan PMK Nomor KMK 38/KM.07/2023 sebesar Rp1.019.418.000,00 :

1. DBH SDA Minyak Bumi Rp 65.097.000,00
2. DBH SDA Panas Bumi Rp 888.951.000,00
3. DBH SDA Kehutanan Rp 65.370.000,00.

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kewajiban atau tagihan yang harus diselesaikan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 199. Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Pendek				
	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	172.538.202,15	129.102.406,81	43.435.795,34	33,64
	2. Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah	49.299.557,00	0,00	49.299.557,00	∞
	3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00	0,00	0,00
	4. Pendapatan Diterima Dimuka	3.430.680.684,00	2.513.371.173,00	917.309.511,00	36,50
	5. Utang Belanja	7.983.610.755,00	3.551.848.971,00	4.431.761.784,00	124,77
	6. Utang Jangka Pendek Lainnya	383.741.686,00	0,00	383.741.686,00	100,00
	Sub Jumlah	29.937.934.224,15	24.112.385.890,81	5.825.548.333,34	24,16
2	Kewajiban Jangka Panjang				
	1. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	34.342.951.595,00	52.261.014.935,00	(17.918.063.340,00)	(34,29)
	Sub Jumlah	34.342.951.595,00	52.261.014.935,00	(17.918.063.340,00)	(34,29)
	Jumlah	64.280.885.819,15	76.373.400.825,81	(12.092.515.006,66)	(15,83)

Kewajiban sebesar Rp64.280.885.819,15 lebih rinci disajikan pada lampiran 15.

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga merupakan pos untuk mencatat kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Utang PFK 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel berikut.

Tabel 200. Utang PFK Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	123.274.991,00	129.102.406,81	(5.827.415,81)	(4,51)
2	Dinas Kesehatan	49.263.211,15	0,00	49.263.211,15	∞
	Jumlah	172.538.202,15	129.102.406,81	43.435.795,34	33,64

Berdasarkan tabel Utang PFK di atas, diketahui utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp172.538.202,15 atau naik sebesar Rp43.435.795,34 atau 33,64% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp129.102.406,81.

Rincian Utang PFK Per Perangkat Daerah tahun 2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 201. Rincian Utang PFK per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	PPH			PPN	Pajak Daerah	Jumlah
		Ps1 21	Ps1 22	Ps1 23			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6=3 s.d.5)	
1.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	3.706.000,00	0,00	155.000,00	104.342.941,00	15.071.050,00	123.274.991,00
2.	Dinas Kesehatan	23.834.711,00	2.839.416,89	0,00	19.494.116,26	3.094.967,00	49.263.211,15
Jumlah		27.540.711,00	2.839.416,89	155.000,00	123.837.057,26	18.166.017,00	172.538.202,15

5.3.2.1.2. Utang Bunga

Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Adapun akun ini merupakan utang bunga atas pinjaman kepada PT SMI periode 25 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp49.299.557,00, apabila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp0,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp49.299.557,00 tabel dibawah ini.

Tabel 202. Utang Bunga Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah	49.299.557,00	0,00	49.299.557,00	∞
Jumlah		49.299.557,00	0,00	49.299.557,00	∞

5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan sebagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi pelaporan. Adapun akun ini pada TA 2023 merupakan bagian lancar terhadap utang kepada PT SMI sebesar Rp17.918.063.340,00, apabila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp17.918.063.340,00 maka tidak mengalami perubahan, adapun akun tersebut adalah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah (Utang yang akan jatuh Tempo Januari s.d. Desember 2024 (Rp1.493.171.945 x 12 Bulan = Rp17.918.063.340,00), rincian bagian lancar utang jangka panjang disajikan pada lampiran 16 dan tabel dibawah ini.

Tabel 203. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	Bagian lancar utang kepada PT SMI	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00	0,00	0,00
Jumlah		17.918.063.340,00	17.918.063.340,00	0,00	0,00

5.3.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pos untuk mencatat pendapatan yang seharusnya belum diterima sampai dengan tanggal neraca tetapi sudah diterima didepan/ dimuka, pada Tahun 2023 ini terdapat pendapatan diterima dimuka total senilai Rp3.430.680.684,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp917.309.511,00 atau 36,50% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.513.371.173,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 204. Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	PPKD/ BPKD				
	1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan:				
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan - Pertambangan Migas TA 2021	358.085.000,00	0,00	358.085.000,00	100,00
	- Alokasi LB DBH PBB Bagi Rata TA 2022	69.373.552,00	0,00	69.373.552,00	100,00
	- Alokasi LB DBH PBB Bagian Daerah Pertambangan Migas TA 2022	489.168.909,00	0,00	489.168.909,00	100,00
	- Alokasi LB DBH PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya TA 2022	91.213.407,00	0,00	91.213.407,00	100,00
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan BP- Pertambangan Migas TA 2021	11.936.000,00	0,00	11.936.000,00	100,00
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan BP- Pertambangan Migas TA 2022	16.306.117,00	0,00	16.306.117,00	100,00
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan BP- Sek Lainnya TA 2022	3.040.708,00	0,00	3.040.708,00	100,00
	- DBH PBB Untuk Kab./ Kota	0,00	390.136.544,00	(390.136.544,00)	(100,00)
	- DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab/Kota	0,00	13.043.224,00	(13.043.224,00)	(100,00)
	2) DBH PPh Pasal 21:				
	- Alokasi LB DBH PPh Pasal 21 TA 2021	93.879.292,00	0,00	93.879.292,00	100,00
	3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT):				
	- LB DBH CHT TA 2022	4.231.146,00	0,00	4.231.146,00	100,00
	4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi				
	- LB DBH SDA Gas Bumi TA 2021 30%	420.369.609,00	0,00	420.369.609,00	100,00
	- LB DBH SDA Gas Bumi TA 2021 0,5%	2.665.827,00	0,00	2.665.827,00	100,00
	- DBH Pertambangan Gas Bumi	0,00	623.525.744,00	(623.525.744,00)	(100,00)
	5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
	- Alokasi LB DBH SDA Panas Bumi TA 2021 Iuran Tetap	20.745.906,00	20.745.906,00	0,00	0,00
	- Alokasi LB DBH SDA Panas Bumi TA 2022 Iuran Tetap	30.489.698,00	0,00	30.489.698,00	100,00
	6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara				
	- LB DBH SDA Minerba TA 2022 Iuran Tetap	209.668.694,00	0,00	209.668.694,00	100,00
	- LB DBH SDA Minerba TA 2021 Royalti	102.951.312,00	102.951.312,00		
	- LB DBH SDA Minerba TA 2022 Royalti	910.508.929,00	0,00	910.508.929,00	100,00
	7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	- Alokasi LB DBH SDA Kehutanan TA 2021	28.488.308,00	28.488.308,00	0,00	0,00
	8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	- Alokasi LB DBH SDA Perikanan TA 2021	97.877.649,00	97.877.649,00	0,00	0,00
	- Alokasi LB DBH SDA Perikanan TA 2022	295.260.621,00	0,00	295.260.621,00	100,00
	9) DAK Non Fisik				
	- Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	919.008.000,00	(919.008.000,00)	(100,00)
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	83.262.486,00	(83.262.486,00)	(100,00)
	- Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	13.307.000,00	(13.307.000,00)	(100,00)
	10) Lainnya				
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
	Sub Jumlah	3.256.260.684,00	2.292.446.173,00	963.814.511,00	42,04
2.	Dinas Koperasi, UMK, Perindag				
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	166.920.000,00	208.425.000,00	(41.505.000,00)	(19,91)
	Sub Jumlah	166.920.000,00	208.425.000,00	(41.505.000,00)	(19,91)
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.500.000,00	12.500.000,00	(5.000.000,00)	(40,00)
	Sub Jumlah	7.500.000,00	12.500.000,00	(5.000.000,00)	(40,00)
	Jumlah	3.430.680.684,00	2.513.371.173,00	917.309.511,00	36,50

- Pendapatan diterima dimuka (Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak ke III) sampai dengan 31 Desember 2023 pada PPKD sebesar Rp3.256.260.684,00 merupakan pencatatan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang lebih bayar kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berdasarkan PMK No 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 dan KMK 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, yang masih menjadi lebih bayar oleh pemerintah pusat sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2023 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp166.920.000,00 merupakan pencatatan pendapatan sewa ruko pada lokasi Hamtebiu sebanyak 12 orang penyewa total sebesar Rp67.620.000,00, pada Kecamatan Way Tenong sebanyak 4 orang sebesar total Rp29.700.000,00, lokasi Pasar Liwa sebanyak 3 orang penyewa total sebesar Rp69.600.000,00.
- Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2023 pada BPKD sebesar Rp7.500.000,00 merupakan pendapatan sewa atas gedung Kantor Kas Bank Lampung di BPKD Kabupaten Lampung Barat.

5.3.2.1.5. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan pos untuk mencatat kewajiban atas beban yang sudah terpakai tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 belum dibayar/ yang harus diselesaikan senilai Rp7.983.610.755,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.431.761.784,00 atau 124,77% dari tahun 2022 sebesar Rp3.551.848.971,00 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 205. Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Pendidikan				
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	699.642.600,00	0,00	699.642.600,00	∞
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	30.313.800,00	(30.313.800,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang & Jasa	2.304.956,00	510.365,00	1.794.591,00	351,63
2.	Dinas Kesehatan				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	9.559.440,00	(9.559.440,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang & Jasa	5.452.034,00	822.836.348,00	(817.384.314,00)	(99,34)
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	346.504.540,00	0,00	346.504.540,00	∞
3.	RSUD Alimuddin Umar				
	Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	124.110.925,00	(124.110.925,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang & Jasa	26.724.147,00	26.503.587,00	220.560,00	0,83
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.427.307.852,00	1.703.325.738,00	3.723.982.114,00	218,63
4.	Dinas PU PR				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	76.079.250,00	0,00	76.079.250,00	∞
5.	Satpol PP				
	Utang Belanja Barang & Jasa	4.387.262,00	3.306.717,00	1.080.545,00	32,68
6.	BPBD				
	Utang Belanja Barang & Jasa	45.460,00	46.140,00	(680,00)	(1,47)
7.	Dinas Sosial				
	Utang Belanja Barang & Jasa	3.088.654,00	3.302.057,00	(213.403,00)	(6,46)
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA				
	Utang Belanja Barang & Jasa	7.120.994,00	1.723.599,00	5.397.395,00	313,15
9.	Dinas Ketahanan Pangan				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.068.126,00	1.159.234,00	(91.108,00)	(7,86)
10.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)				

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	3.105.000,00	(3.105.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang & Jasa	300.728.539,00	301.034.887,00	(306.348,00)	(0,10)
11.	Disdukcapil				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	540.000,00	(540.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang & Jasa	3.637.939,00	3.329.317,00	308.622,00	9,27
12.	Dinas PMP				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.641.326,00	136.223,00	1.505.103,00	1.104,88
13.	Dinas Perhubungan				
	Utang Belanja Barang & Jasa	4.349.200,00	4.141.653,00	207.547,00	5,01
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.592.136,00	1.527.605,00	64.531,00	4,22
15.	Dinas Koperasi, Perindag				
	Utang Belanja Barang & Jasa	4.298.753,00	3.382.121,00	916.632,00	27,10
16.	DINAS PM, PTSP DAN NAKER				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.213.929,00	999.891,00	214.038,00	21,41
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga				
	Utang Belanja Barang & Jasa	543.785,00	389.585,00	154.200,00	39,58
18.	Dinas Perpustakaan & KD				
	Utang Belanja Barang & Jasa	2.410.234,00	2.736.698,00	(326.464,00)	(11,93)
19.	Dinas Perikanan				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.934.202,00	2.168.439,00	(234.237,00)	(10,80)
20.	Dinas TPH				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.461.983,00	1.875.479,00	(413.496,00)	(22,05)
21.	Dinas BUNNAK				
	Utang Belanja Barang & Jasa	6.082.060,00	4.541.380,00	1.540.680,00	33,93
22.	Sekretariat Daerah				
	Utang Belanja Barang & Jasa	25.075.313,00	30.299.852,00	(5.224.539,00)	(17,24)
23.	Sekretariat DPRD				
	Utang Belanja Barang & Jasa	11.384.075,00	11.607.666,00	(223.591,00)	(1,93)
24.	BAPPEDA				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.094.843,00	1.162.827,00	(67.984,00)	(5,85)
25.	BUD (PPKD)				
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	426.345.100,00	348.046.827	78.298.273,00	22,50
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	99.168.200,00	96.300.500	2.867.700,00	2,98
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	421.321.000,00	0,00	421.321.000,00	∞
26.	BPKD				
	Utang Belanja Barang & Jasa	4.927.204,00	5.181.674,00	(254.470,00)	(4,91)
27.	BKPSDM				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.504.611,00	489.560,00	1.015.051,00	207,34
28.	BALITBANG				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.012.444,00	1.091.337,00	(78.893,00)	(7,23)
29.	Inspektorat				
	Utang Belanja Barang & Jasa	91.980,00	983.300,00	(891.320,00)	(90,65)
30.	Kec. Balik Bukit				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	100,00
31.	Kec. Lumbock Seminung				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	100,00
32.	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	18.875.000,00	0,00	18.875.000,00	100,00
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.221.024,00	79.200,00	1.141.824,00	1.441,70
	Jumlah	7.983.610.755,00	3.551.848.971,00	4.431.761.784,00	124,77

Rekap utang belanja per Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 206. Rekap Utang Belanja Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Belanja Jasa	Barang dan Jasa BLUD	BH Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	BH Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	Bantuan Keuangan Umum kepada Desa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)				(7=3 s.d.6)
1.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	0,00	699.642.600,00	2.304.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.947.556,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	5.452.034,00	346.504.540,00	0,00	0,00	0,00	351.956.574,00
3.	RSUD Alimuddin Umar	0,00	0,00	26.724.147,00	5.427.307.852,00	0,00	0,00	0,00	5.454.031.999,00
4.	Dinas PU PR	76.079.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.079.250,00
5.	Satpol PP	0,00	0,00	4.387.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.262,00
6.	BPBD	0,00	0,00	45.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.460,00
7.	Dinas Sosial	0,00	0,00	3.088.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.654,00
8.	Dinas KB, PP & PA	0,00	0,00	7.120.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120.994,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	1.068.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.126,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	300.728.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.728.539,00
11.	Disdukcapil	0,00	0,00	3.637.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.939,00
12.	Dinas PMP	0,00	0,00	1.641.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.326,00
13.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	4.349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.200,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.592.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.136,00
15.	Dinas Koperasi Perindag	0,00	0,00	4.298.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.753,00
16.	Dinas PM, PTSP dan Naker	0,00	0,00	1.213.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.929,00
17.	Dinas Pemuda OR	0,00	0,00	543.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.785,00
18.	Dinas Perpustakaan & KD	0,00	0,00	2.410.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.234,00
19.	Dinas Perikanan	0,00	0,00	1.934.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.202,00
20.	Dinas TPH	0,00	0,00	1.461.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.983,00
21.	Dinas Perkebunan & Peternakan	0,00	0,00	6.082.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082.060,00
22.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	25.075.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075.313,00
23.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	11.384.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384.075,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	1.094.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.843,00
25.	PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	426.345.100,00	99.168.200,00	421.321.000,00	946.834.300,00
26.	BPKD	0,00	0,00	4.927.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927.204,00
27.	BKPSDM	0,00	0,00	1.504.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.611,00
28.	Balitbang	0,00	0,00	1.012.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.444,00
29.	Inspektorat	0,00	0,00	91.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.980,00
30.	Kec. Balik Bukit	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
31.	Kec. Lumbo Semunung	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00
32.	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	18.875.000,00	0,00	1.221.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096.024,00
	Jumlah	136.924.250,00	699.642.600,00	426.397.213,00	5.773.812.392,00	426.345.100,00	99.168.200,00	421.321.000,00	7.983.610.755,00

Berikut penjelasan lebih rinci dari tabel rekap utang belanja diatas.

- Utang belanja gaji dan tunjangan serta sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp836.566.850,00 terdapat pada:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp699.642.600,00 terdiri atas TPG PNSD Rp58.884.000,00; TKG PNSD Rp25.758.600; dan Tamsil Guru PNSD Rp15.000.000,00 tahun 2023

- Dinas PU PR berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2023 Rp76.079.250,00
 - Kecamatan Balik Bukit berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2023 Rp29.500.000,00
 - Kecamatan Lumbok Seminung berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2023 Rp12.470.000,00
 - Kantor Kesbangpol berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2023 Rp18.875.000,00.
2. Utang belanja jasa merupakan kewajiban kepada pihak ketiga/ lainnya berupa jasa yang telah dikonsumsi tetapi sampai dengan 31 Desember 2023 belum terbayarkan sebesar Rp426.397.213,00 tersebar pada 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah terdiri atas : Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Rp20.648.469,00; Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air Rp7.570.878,00; Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik Rp365.484.288,00; Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp32.693.578,00.
3. Utang belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp5.773.812.392,00 merupakan utang belanja barang/ jasa kepada pihak ketiga/ lainnya terdapat pada BLUD RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp5.427.307.852,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp346.504.540,00.
4. Utang belanja bagi hasil di PPKD kepada Pemerintahan Pekon terdiri atas :
- Utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp426.345.100,00, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/198/KPTS/IV.02/2024
 - Utang belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp99.168.200,00, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/198/KPTS/IV.02/2024
 - Utang belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Alokasi Dana Pekon) sebesar Rp421.321.000,00, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/189/KPTS/III.12/2024

5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pos untuk mencatat kewajiban atas beban yang sudah terpakai tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 belum dibayar/ yang harus diselesaikan dan uang titipan dari pihak lain yang belum didistribusikan kepada yang berhak menerima, senilai Rp383.741.686,00 mengalami peningkatan sebesar Rp383.741.686,00 atau 100,00% dari tahun 2022 sebesar Rp0,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 207. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	PPKD				
	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	301.141.297,00	0,00	301.141.297,00	100,00
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	82.600.389,00	0,00	82.600.389,00	100,00
	Jumlah	383.741.686,00	0,00	383.741.686,00	100,00

- Utang kelebihan pembayaran atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah berupa utang atas LHP BPK Nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 atas LKPD Tahun 2022 berupa penggunaan Dana BOS sumber dana APBN sebesar Rp301.141.297,00 terdiri atas : a) SDN 1 Liwa Rp2.890.909,00; b) SDN 3 Liwa Rp12.762.636,00; c) SDN 3 Way Empulau Ulu

Rp16.528.482,00; d) SDN 3 Way Mengaku Rp900.000,00; e) SDN 3 Kali Pasir Rp17.569.500,00; f) SMPN 1 BNS Rp178.963.870,00; g) SMPN 1 Sukau Rp57.651.900,00; h) SMPN 2 BNS Rp10.176.000,00; i) SMPN 3 BNS Rp3.698.000,00. Uang tersebut telah disetor oleh masing-masing sekolah ke RKUD namun Pemkab Lampung Barat belum menyetorkan ke RKUN.

- Utang kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebesar Rp82.600.389,00, yang diterima pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.722.026.000,00 dan di belanjakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.639.425.611,00.

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.3.2.2.1. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak lain yang melebihi satu periode akuntansi yaitu kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.342.951.595,00 mengalami penurunan sebesar (Rp17.918.063.340,00) atau (34,28%) dibandingkan dari saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.261.014.935,00.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang ini yang akan jatuh tempo periode lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yaitu periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2026 dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Pembayaran periode Januari 2025 – November 2026
(22 Bulan x Rp1.493.171.945,00) | = Rp32.849.782.790,00 |
| 2. Pembayaran periode Desember 2026 | = Rp 1.493.168.805,00 |
| Jumlah | = Rp34.342.951.595,00 |

Adapun rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) disajikan pada lampiran 16 dan pada tabel berikut ini.

Tabel 208. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	PPKD				
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah – Utang Pokok Pinjaman PEN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	34.342.951.595,00	52.261.014.935,00	(17.918.063.340,00)	(34,28)
	Jumlah	34.342.951.595,00	52.261.014.935,00	(17.918.063.340,00)	(34,28)

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1. EKUITAS

5.3.3.1.1. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Total saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.853.869.584.349,33 mengalami peningkatan kekayaan bersih sebesar Rp87.094.710.491,73 atau 3,15% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.766.774.873.857,60.

Peningkatan ekuitas tahun 2023 tersebut disebabkan adanya surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp58.722.209.492,05 dan dampak kumulatif karena perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar dan antara lain selisih revaluasi aktiva tetap sebesar lain-lain sebesar Rp0,00 dan transaksi lain-lain yang mengakibatkan penambahan ekuitas sebesar Rp28.372.500.999,68 secara rinci tentang peningkatan ekuitas tahun 2023 dapat dilihat dalam penjelasan CaLK tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos – Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional.

5.4.1. PENDAPATAN DAERAH – LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 209. Pendapatan LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	71.088.470.900,54	60.328.407.374,37	10.760.063.526,17	17,84
2	Pendapatan Transfer	842.338.382.554,00	830.009.711.907,00	12.328.670.647,00	1,49
3	Lain – Lain Pendapatan yang Sah	23.053.728.222,00	16.914.529.726,00	6.139.198.496,00	36,30
Pendapatan – LO		936.480.581.676,54	907.252.649.007,37	29.227.932.669,17	3,22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan – LO TA. 2023 sebesar Rp936.480.581.676,54 mengalami peningkatan sebesar Rp29.227.932.669,17 atau 3,22% dibandingkan Pendapatan – LO TA. 2022 sebesar Rp907.252.649.007,37.

5.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 210. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak Daerah - LO	14.870.851.762,00	14.411.751.310,00	459.100.452,00	3,19
2.	Retribusi Daerah - LO	2.356.222.250,00	2.288.335.782,50	67.886.467,50	2,97
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.895.841.920,94	5.379.691.717,82	(483.849.796,88)	(8,99)
4.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO	48.965.554.967,60	38.248.628.564,05	10.716.926.403,55	28,02
Jumlah		71.088.470.900,54	60.328.407.374,37	10.760.063.526,17	17,84

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah – LO TA. 2023 sebesar Rp71.088.470.900,54 mengalami peningkatan sebesar Rp10.760.063.526,17 atau 17,84% dari Pendapatan – LO TA. 2022 sebesar Rp60.328.407.374,37.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang ditetapkan pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 211. PAD – Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak Hotel	153.059.250,00	125.976.434,00	27.082.816,00	21,50
2.	Pajak Restoran	1.731.189.392,00	2.139.591.377,00	(408.401.985,00)	(19,09)
3.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)
4.	Pajak Reklame	158.057.616,00	140.040.238,00	18.017.378,00	12,87
5.	Pajak Penerangan Jalan	7.653.132.882,00	7.156.651.116,00	496.481.766,00	6,94
6.	Pajak Parkir	107.000.000,00	103.350.000,00	3.650.000,00	3,53
7.	PBB P2	4.695.387.522,00	4.386.404.279,00	308.983.243,00	7,04
8.	Pajak BPHTB	368.025.100,00	352.737.866,00	15.287.234,00	4,33
Jumlah		14.870.851.762,00	14.411.751.310,00	459.100.452,00	3,19

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PAD Pajak Daerah – LO TA 2023 sebesar Rp14.870.851.762,00 mengalami peningkatan sebesar Rp459.100.452,00 atau 3,19% dari PAD Pajak Daerah – LO TA 2022 sebesar Rp14.411.751.310,00.

Berikut rincian PAD - Pajak Daerah per Perangkat Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 212. Rincian PAD – Pajak Daerah – LO Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	BPKD				
a.	Pajak Hotel	153.059.250,00	125.976.434,00	27.082.816,00	21,50
b.	Pajak Restoran	1.731.189.392,00	2.139.591.377,00	(408.401.985,00)	(19,09)
c.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)
d.	Pajak Reklame	158.057.616,00	140.040.238,00	18.017.378,00	12,87
e.	Pajak Penerangan Jalan	7.653.132.882,00	7.156.651.116,00	496.481.766,00	6,94
f.	Pajak Parkir	107.000.000,00	103.350.000,00	3.650.000,00	3,53
g.	PBB P2	4.695.387.522,00	4.386.404.279,00	308.983.243,00	7,04
h.	Pajak BPHTB	368.025.100,00	352.737.866,00	15.287.234,00	4,33
Jumlah		14.870.851.762,00	14.411.751.310,00	459.100.452,00	3,19

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah - LO dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah penghasil retribusi yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat didasarkan atas Perda tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 213. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Jasa Umum	844.194.472,00	833.112.800,00	11.081.672,00	1,33
2	Retribusi Jasa Usaha	1.286.836.050,00	1.296.278.950,00	(9.442.900,00)	(0,73)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	225.191.728,00	158.944.032,50	66.247.695,50	41,68
Jumlah		2.356.222.250,00	2.288.335.782,50	67.886.467,50	2,97

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA.2023 sebesar Rp2.356.222.250,00 mengalami peningkatan sebesar Rp67.886.467,50 atau 2,97% dari PAD Retribusi Daerah – LO TA. 2022 sebesar Rp2.288.335.782,50.

5.4.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 214. Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	134.608.000,00	136.265.000,00	(1.657.000,00)	(1,22)
2.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.520.000,00	103.200.000,00	(27.680.000,00)	(26,82)
3.	Pelayanan Pasar	199.168.972,00	160.527.400,00	38.641.572,00	24,07
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	54.000.000,00	1.000.000,00	1,85
5.	Pengolahan Limbah Cair	1.553.500,00	776.400,00	777.100,00	100,09
6.	Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
7.	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.944.000,00	0,00	0,00
Jumlah		844.194.472,00	833.112.800,00	11.081.672,00	1,33

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO TA 2023 sebesar Rp844.194.472,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.081.672,00 atau 1,33% dari PAD Retribusi Jasa Umum – LO TA. 2022 sebesar Rp833.112.800,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 215. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Perhubungan				
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.520.000,00	103.200.000,00	(27.680.000,00)	(26,82)
	Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	54.000.000,00	1.000.000,00	1,85
	Jumlah	130.520.000,00	157.200.000,00	(26.680.000,00)	(16,97)
2.	Dinas Lingkungan Hidup				
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.060.000,00	94.540.000,00	5.520.000,00	5,84
	Pengolahan Limbah Cair	1.553.500,00	776.400,00	777.100,00	100,09

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Jumlah	101.613.500,00	95.316.400,00	6.297.100,00	6,61
3.	Dinas Koperindag dan Pasar				
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	34.548.000,00	41.725.000,00	(7.177.000,00)	(17,20)
	Pelayanan Pasar	199.168.972,00	160.527.400,00	38.641.572,00	24,07
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.400.000,00	4.400.000,00		
	Jumlah	238.116.972,00	206.652.400,00	31.464.572,00	15,23
4.	Dinas KOMINFO				
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.944.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	373.944.000,00	373.944.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	844.194.472,00	833.112.800,00	11.081.672,00	1,33

5.4.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah Kabupaten Lampung Barat, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 216. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	584.080.750,00	593.281.250,00	(9.200.500,00)	(1,55)
2.	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	410.551.400,00	369.395.000,00	41.156.400,00	11,14
3.	Terminal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
4.	Tempat Khusus Parkir	25.348.000,00	35.750.000,00	(10.402.000,00)	(29,10)
5.	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	88.894.000,00	100.031.000,00	(11.137.000,00)	(11,13)
6.	Rumah Potong Hewan	5.376.000,00	5.056.000,00	320.000,00	6,33
7.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	78.979.000,00	78.088.000,00	891.000,00	1,14
8.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.306.900,00	108.377.700,00	(21.070.800,00)	(19,44)
	Jumlah	1.286.836.050,00	1.296.278.950,00	(9.442.900,00)	(0,73)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha – LO TA. 2023 sebesar Rp1.286.836.050,00 mengalami penurunan sebesar (Rp9.442.900,00) atau (0,73%) dari PAD Retribusi Jasa Usaha – LO TA. 2022 sebesar Rp1.296.278.950,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 217. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	178.450.000,00	214.350.000,00	(35.900.000,00)	(16,75)
	Jumlah	178.450.000,00	214.350.000,00	(35.900.000,00)	(16,75)
2.	Dinas Kesehatan				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
3.	Dinas PU PR				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	122.000.000,00	121.850.000,00	150.000,00	0,12
	Jumlah	122.000.000,00	121.850.000,00	150.000,00	0,12
4.	Dinas Perhubungan				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.700.000,00	3.150.000,00	(450.000,00)	(14,29)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Terminal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
	Tempat Khusus Parkir	25.348.000,00	35.750.000,00	(10.402.000,00)	(29,10)
	Jumlah	34.348.000,00	45.200.000,00	(10.852.000,00)	(24,01)
5.	Dinas Lingkungan Hidup				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	7.200.000,00	5.700.000,00	1.500.000,00	26,32
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	72.204.000,00	68.113.000,00	4.091.000,00	6,01
	Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.433.400,00	11.027.700,00	(594.300,00)	(5,39)
	Jumlah	89.837.400,00	84.840.700,00	4.996.700,00	5,89
6.	Dinas Koperindag dan Pasar				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	5.700.000,00	5.750.000,00	(50.000,00)	(0,87)
	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	410.551.400,00	369.395.000,00	41.156.400,00	11,14
	Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.073.500,00	12.300.000,00	(226.500,00)	(1,84)
	Jumlah	428.324.900,00	387.445.000,00	40.879.900,00	10,55
7.	Sekretariat Daerah				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	52.850.000,00	48.050.000,00	4.800.000,00	9,99
	Jumlah	52.850.000,00	48.050.000,00	4.800.000,00	9,99
8.	BPKD				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	194.930.750,00	175.731.250,00	19.199.500,00	10,93
	Jumlah	194.930.750,00	175.731.250,00	19.199.500,00	10,93
9.	Dinas Komunikasi dan Informasi				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00	4.800.000,00	600.000,00	12,50
	Jumlah	5.400.000,00	4.800.000,00	600.000,00	12,50
10.	Dinas Peternakan dan Perkebunan				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	5.900.000,00	4.200.000,00	1.700.000,00	40,48
	Rumah Potong Hewan	5.376.000,00	5.056.000,00	320.000,00	6,33
	Jumlah	11.276.000,00	9.256.000,00	2.020.000,00	21,82
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	4.750.000,00	5.500.000,00	(750.000,00)	(13,64)
	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	88.894.000,00	100.031.000,00	(11.137.000,00)	(11,13)
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.775.000,00	9.975.000,00	(3.200.000,00)	(32,08)
	Jumlah	100.419.000,00	115.506.000,00	(15.087.000,00)	(13,06)
12.	Dinas Perikanan				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Penjualan Produksi Usaha Daerah	64.800.000,00	85.050.000,00	(20.250.000,00)	(23,81)
	Jumlah	67.200.000,00	87.450.000,00	(20.250.000,00)	(23,16)
	Jumlah Keseluruhan	1.286.836.050,00	1.296.278.950,00	(9.442.900,00)	(0,73)

5.4.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai Regulator dan Otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 218. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22.609.000,00	8.232.000,00	14.377.000,00	174,65
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	202.582.728,00	150.712.032,50	51.870.695,50	34,42
	Jumlah	225.191.728,00	158.944.032,50	66.247.695,50	41,68

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu – LO TA 2023 sebesar Rp225.191.728,00 mengalami peningkatan sebesar Rp66.247.695,50 atau 41,68% dari PAD Retribusi Perizinan Tertentu – LO TA 2022 sebesar Rp158.944.032,50.

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 219. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	202.582.728,00	150.712.032,50	51.870.695,50	34,42
	Jumlah	202.582.728,00	150.712.032,50	51.870.695,50	34,42
2.	Dinas Perikanan				
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22.609.000,00	8.232.000,00	14.377.000,00	174,65
	Jumlah	22.609.000,00	8.232.000,00	14.377.000,00	174,65
	Jumlah	225.191.728,00	158.944.032,50	66.247.695,50	41,68

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan realisasi TA 2023 dan 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 220. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Deviden Bank Lampung	4.895.841.920,94	4.621.706.317,81	274.135.603,13	5,93
2	Deviden BPRS	0,00	757.985.400,01	(757.985.400,01)	(100,00)
	Jumlah	4.895.841.920,94	5.379.691.717,82	(483.849.796,88)	(8,99)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2023 sebesar Rp4.895.841.920,94 mengalami penurunan sebesar (Rp483.849.796,88) atau (8,99%) dari PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2022 sebesar Rp5.379.691.717,82.

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri atas 7 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Alimuddin Umar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperindag Pasar, BPKD, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dengan realisasi TA 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 221. Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Hasil Sewa BMD-LO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.465.965.881,46	1.687.009.599,55	(221.043.718,09)	(13,10)
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	2.134.496.422,69	1.445.025.308,35	689.471.114,34	47,71
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	39.300.000,00	1.812.258,00	37.487.742,00	2.068,57
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	5.034.443.280,25	1.549.109.905,50	3.485.333.374,75	224,99
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	6.372.100,00	0,00	6.372.100,00	∞
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	51.902.219,13	(51.902.219,13)	(100,00)
8.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.006.335,84	1.621.486,40	(615.150,56)	(37,94)
9.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	281.069.435,00	535.956.599,00	(254.887.164,00)	(47,56)
10.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.250.000,00	2.310.000,00	(1.060.000,00)	(45,89)
11.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	0,00	62.725.405,00	(62.725.405,00)	(100,00)
12.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	1.381.369,00	159.767.969,00	(158.386.600,00)	(99,14)
13.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	0,00	4.925.053,70	(4.925.053,70)	(100,00)
14.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	16.610,00	(16.610,00)	(100,00)
15.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
16.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	2.590.000,00	1.801.000,00	789.000,00	43,81
17.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	0,00	5.440.000,00	(5.440.000,00)	(100,00)
18.	Pendapatan dari BLUD-LO	39.986.335.531,00	32.722.840.363,00	7.263.495.168,00	22,20
19.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	6.344.612,36	10.364.787,42	(4.020.175,06)	(38,79)
	Jumlah	48.965.554.967,60	38.248.628.564,05	10.716.926.403,55	28,02

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp48.965.554.967,60 mengalami peningkatan sebesar Rp10.716.926.403,55 atau 28,02% dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp38.248.628.564,05.

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 222. Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Kesehatan				
a)	Pendapatan dari BLUD-LO	15.492.557.811,00	11.304.337.751,00	4.188.220.060,00	37,05
	Jumlah	15.492.557.811,00	11.304.337.751,00	4.188.220.060,00	37,05
2.	RSUD Alimuddin Umar				
a)	Pendapatan dari BLUD-LO	24.493.777.720,00	21.418.502.612,00	3.075.275.108,00	14,36
	Jumlah	24.493.777.720,00	21.418.502.612,00	3.075.275.108,00	14,36
3.	Dinas Koperindag Pasar				
a)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	6.344.612,36	10.364.787,42	(4.020.175,06)	(38,79)
	Jumlah	6.344.612,36	10.364.787,42	(4.020.175,06)	(38,79)
4.	BPKD				
a)	Hasil Sewa BMD-LO	5.000.000,00	5.000.000	0,00	0,00
b)	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.465.965.881,46	1.687.009.599,55	(221.043.718,09)	(13,10)
c)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	2.134.496.422,69	1.445.025.308,35	689.471.114,34	47,71
d)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	39.300.000,00	1.812.258,00	37.487.742,00	2.068,57
e)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	5.034.443.280,25	1.549.109.905,50	3.485.333.374,75	224,99
f)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	6.372.100,00	0,00	6.372.100,00	100,00
g)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	51.902.219,13	(51.902.219,13)	(100,00)
h)	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.006.335,84	1.621.486,40	(615.150,56)	(37,94)
i)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	281.069.435,00	535.956.599,00	(254.887.164,00)	(47,56)
j)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.250.000,00	2.310.000,00	(1.060.000,00)	(45,89)
k)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	0,00	62.725.405,00	(62.725.405,00)	(100,00)
l)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	1.381.369,00	159.767.969,00	(158.386.600,00)	(99,14)
m)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	0,00	4.925.053,70	(4.925.053,70)	(100,00)
n)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	16.610,00	(16.610,00)	(100,00)
o)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
p)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	2.590.000,00	1.801.000,00	789.000,00	43,81
q)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah	0,00	5.440.000,00	(5.440.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
	BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO				
	Jumlah	8.972.874.824,24	5.515.423.413,63	3.457.451.410,61	62,69
	Jumlah	48.965.554.967,60	38.248.628.564,05	10.716.926.403,55	28,02

5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat – lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Tabel 223. Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	- Dana Perimbangan	733.351.544.525,00	746.678.860.039,00	(13.327.315.514,00)	(1,78)
	- Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	0,00	5.893.114.000,00	∞
	- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.559.480.000,00	(11.559.480.000,00)	(100,00)
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	- Pendapatan Bagi Hasil	103.093.724.029,00	71.771.371.868,00	31.322.352.161,00	43,64
	Jumlah	842.338.382.554,00	830.009.711.907,00	12.328.670.647,00	1,49

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer TA. 2023 sebesar Rp842.338.382.554,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.328.670.647,00 atau 1,49% dari Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp830.009.711.907,00. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

5.4.1.2.1.1. Transfer Pemerintah Pusat – LO (Dana Perimbangan)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Periode TA.2023 dan TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 224. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.853.908.308,00	12.320.720.738,00	(1.466.812.430,00)	(11,91)
2	Dana Bagi Hasil SDA	14.082.087.329,00	17.526.638.721,00	(3.444.551.392,00)	(19,65)
3	Dana Alokasi Umum	514.643.114.814,00	491.022.962.000,00	23.620.152.814,00	4,81
4	DAK Fisik	54.035.898.900,00	93.382.823.627,00	(39.346.924.727,00)	(42,14)
5	DAK Non Fisik	139.736.535.174,00	132.425.714.953,00	7.310.820.221,00	5,52
	Jumlah	733.351.544.525,00	746.678.860.039,00	(13.327.315.514,00)	(1,78)

5.4.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 225. Dana Perimbangan – DBH Pajak TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	5.725.470.000,00	6.601.624.939,00	(876.154.939,00)	(13,27)
2.	PPh Psl 21, 25, 29	4.961.718.308,00	5.579.738.093,00	(618.019.785,00)	(11,08)
3.	Cukai Hasil Tembakau	166.720.000,00	139.357.706,00	27.362.294,00	19,63
Jumlah		10.853.908.308,00	12.320.720.738,00	(1.466.812.430,00)	(11,91)

5.4.1.2.1.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 226. Dana Perimbangan – DBH Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pertambangan Minyak Bumi	7.277.526.097,00	10.295.934.245,00	(3.018.408.148,00)	(29,32)
2.	Pertambangan Panas Bumi	4.902.728.885,00	3.629.650.852,00	1.273.078.033,00	35,07
3.	Pertambangan Umum	303.187.000,00	1.324.551.260,00	(1.021.364.260,00)	(77,11)
4.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	311.896.347,00	106.438.153,00	205.458.194,00	193,03
5.	Pungutan Hasil Perikanan	1.286.749.000,00	2.170.064.211,00	(883.315.211,00)	(40,70)
Jumlah		14.082.087.329,00	17.526.638.721,00	(3.444.551.392,00)	(19,65)

5.4.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 227. Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Umum	514.643.114.814,00	491.022.962.000,00	23.620.152.814,00	4,81
Jumlah		514.643.114.814,00	491.022.962.000,00	23.620.152.814,00	4,81

5.4.1.2.1.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – DAK kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2023 dan TA 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 228. Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	54.035.898.900,00	93.382.823.627,00	(39.346.924.727,00)	(42,14)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	139.736.535.174,00	132.425.714.953,00	7.310.820.221,00	5,52
	Jumlah	193.772.434.074,00	225.808.538.580,00	(32.036.104.506,00)	(14,19)

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing – masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 229. Dana Alokasi Khusus Per Bidang Kegiatan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DAK FISIK				
	DAK FISIK REGULER :				
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.059.863.000,00	940.361.853,00	119.501.147,00	12,71
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	4.201.354.000,00	24.434.561.965,00	(20.233.207.965,00)	(82,81)
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	3.515.858.800,00	17.946.450.335,00	(14.430.591.535,00)	(80,41)
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	0,00	281.796.400,00	(281.796.400,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	2.382.615.295,00	(2.382.615.295,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	10.578.478.273,00	(10.578.478.273,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	360.858.000,00	567.038.348,00	(206.180.348,00)	(36,36)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB- LO	0,00	1.442.075.000,00	(1.442.075.000,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	1.119.417.940,00	(1.119.417.940,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	30.849.503.000,00	12.456.533.000,00	18.392.970.000,00	147,66
	- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	796.390.000,00	(796.390.000,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	5.082.200.000,00	(5.082.200.000,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	0,00	15.354.905.218,00	(15.354.905.218,00)	(100,00)
	Jumlah DAK Fisik Reguler	39.987.436.800,00	93.382.823.627,00	(53.395.386.827,00)	(57,18)
	DAK PENUGASAN				
	- DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	3.394.868.945,00	0,00	3.394.868.945,00	100,00
	- DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah- Penugasan-LO	6.624.290.242,00	0,00	6.624.290.242,00	100,00
	- DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.302.102.913,00	0,00	2.302.102.913,00	100,00
	- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup	1.727.200.000,00		1.727.200.000,00	100,00
	Jumlah DAK Fisik Penugasan	14.048.462.100,00	0,00	14.048.462.100,00	100,00
	JUMLAH DAK FISIK	54.035.898.900,00	93.382.823.627,00	(39.346.924.727,00)	(42,14)
2	DAK NON FISIK				
	- DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	38.075.219.937,00	38.262.329.055,00	(187.109.118,00)	(0,49)
	- DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.550.000.000,00	0,00	1.550.000.000,00	100,00
	- DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	61.436.351.940,00	56.873.202.610,00	4.563.149.330,00	8,02

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.430.574.321,00	2.167.718.000,00	(737.143.679,00)	(34,01)
	- DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	297.750.063,00	200.819.588,00	96.930.475,00	48,27
	- DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.307.420.000,00	3.116.612.000,00	190.808.000,00	6,12
	- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.323.690.000,00	744.200.000,00	579.490.000,00	77,87
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	22.108.085.456,00	24.723.840.000,00	(2.615.754.544,00)	(10,58)
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.794.125.304,00	4.232.707.000,00	561.418.304,00	13,26
	- DAK Non Fisik-PK2UKM-(Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)-LO	417.482.653,00	400.800.000,00	16.682.653,00	4,16
	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	977.853.000,00	0,00	977.853.000,00	
	- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	388.358.000,00	245.186.700,00	143.171.300,00	58,39
	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	229.205.100,00	451.800.000,00	(222.594.900,00)	(49,27)
	- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	650.419.400,00	1.006.500.000,00	(356.080.600,00)	(35,38)
	- DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	0,00	2.750.000.000,00	∞
	Jumlah DAK Non Fisik	139.736.535.174,00	132.425.714.953,00	7.310.820.221,00	5,52
	JUMLAH DAK	193.772.434.074,00	225.808.538.580,00	(32.036.104.506,00)	(14,19)

5.4.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah karena memiliki prestasi dalam berbagai bidang seperti ketepatan penyampaian laporan, peningkatan IPM dan capaian-capaian lainnya yang dimiliki oleh daerah, adapun penerimaan DID TA 2023 posisinya diletakkan pada kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat, Pendapatan Dana Insentif Daerah Tahun 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00%) dari Tahun 2022 sebesar Rp11.559.480.000,00. Penurunan ini disebabkan oleh Penetapan Pendapatan DID oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2023. Rincian DID ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 230. Dana Insentif Daerah (DID) TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.559.480.000,00	(11.559.480.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	11.559.480.000,00	(11.559.480.000,00)	(100,00)

5.4.1.2.1.3. Insentif Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja berdasarkan kriteria pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan Umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Penerimaan Insentif Fiskal pada Kabupaten Lampung Barat kategori kinerja percepatan belanja daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Realisasi Penerimaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 juga mengalami peningkatan sebesar Rp5.893.114.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 231. Insentif Fiskal TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	0,00	5.893.114.000,00	100,00
Jumlah		5.893.114.000,00	0,00	5.893.114.000,00	100,00

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Penerimaan Transfer Antar Daerah merupakan transfer Pemerintah Provinsi Lampung yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi dana bantuan untuk pembangunan yang didasarkan pada SK Gubernur Lampung dan rincian Transfer Pemerintah Provinsi Lampung tersaji pada tabel berikut.

Tabel 232. Dasar Hukum Penetapan Transfer Antar Daerah

No	Nomor Dokumen	Tentang	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK Gubernur Nomor G/190/VI.03/HK/2023	DBH Pajak TW IV 2022	15.529.863.868,00
2.	SK Gubernur Nomor G/349/VI.03/HK/2023	DBH Pajak TW I 2023	14.789.537.829,00
3.	SK Gubernur Nomor G/460/VI.03/HK/2023	DBH Pajak TW II 2023	14.650.377.960,00
4.	SK Gubernur Nomor G/695/VI.03/HK/2023	DBH Pajak TW III 2023	16.167.655.477,00
5.	SK Gubernur Nomor G/155/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW IV 2023	15.248.839.565,00
6.	SK Gubernur Nomor G/15/VI.03/HK/2023	DBH Pajak Rokok TW IV TA 2022	4.443.781.709,00
7.	SK Gubernur Nomor G/292/VI.03/HK/2023	DBH Pajak Rokok Desember 2022	2.084.499.278,00
8.	SK Gubernur Nomor G/291/VI.03/HK/2023	DBH Pajak Rokok TW I TA 2023	6.170.964.450,00
9.	SK Gubernur Nomor G/438/VI.03/HK/2023	DBH Pajak Rokok TW II TA 2023	5.298.712.925,00
10.	SK Gubernur Nomor G/696/VI.03/HK/2023	DBH Pajak Rokok TW III TA 2023	4.717.652.271,00
11.	SK Gubernur Nomor G/819/VI.03/HK/2023	DBH Pajak Rokok TW IV TA 2023	3.991.838.697,00
Jumlah			103.093.724.029,00

Tabel 233. Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	103.093.724.029,00	71.771.371.868,00	31.322.352.161,00	43,64
Jumlah		103.093.724.029,00	71.771.371.868,00	31.322.352.161,00	43,64

Rincian transfer bagi hasil dari provinsi pada masing – masing akun dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 234. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.699.200.225,00	13.299.553.927,00	6.399.646.298,00	48,12
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	12.505.852.906,00	10.030.759.623,00	2.475.093.283,00	24,68
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	43.532.523.824,00	28.410.574.872,00	15.121.948.952,00	53,23
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah	648.697.744,00	504.480.471,00	144.217.273,00	28,59
5	Pajak Rokok	26.707.449.330,00	19.526.002.975,00	7.181.446.355,00	36,78
Jumlah		103.093.724.029,00	71.771.371.868,00	31.322.352.161,00	43,64

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2023 sebesar Rp103.093.724.029,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.322.352.161,00 atau 43,64% dari Pendapatan – LO TA 2022 sebesar Rp71.771.371.868,00.

5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

Penerimaan Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 235. Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah	23.053.728.222,00	16.914.529.726,00	6.139.198.496,00	36,30
Jumlah		23.053.728.222,00	16.914.529.726,00	6.139.198.496,00	36,30

Rincian Pendapatan Hibah – LO dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 236. Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Hibah dari Pemerintah Pusat	22.999.728.222,00	15.322.854.726,00	7.676.873.496,00	50,10
2.	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.591.675.000,00	(1.591.675.000,00)	(100,00)
3.	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	∞
Jumlah		23.053.728.222,00	16.914.529.726,00	6.139.198.496,00	36,30

Pendapatan Hibah – LO lebih rinci disajikan pada Lampiran 18 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4.2. BEBAN DAERAH

5.4.2.1. BEBAN OPERASI

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan realisasi pada TA. 2023 dan 2022 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 237. Beban Operasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Pegawai	414.097.472.312,00	394.475.604.682,00	19.621.867.630,00	4,97
2.	Beban Barang dan Jasa	245.179.858.903,10	288.628.568.302,10	(43.448.709.399,00)	(15,05)
3.	Beban Bunga	3.604.736.719,00	4.319.006.596,00	(714.269.877,00)	(16,54)
4.	Beban Subsidi	0,00	522.500.000,00	(522.500.000,00)	(100,00)
5.	Beban Hibah	32.310.714.788,00	22.567.856.176,00	9.742.858.612,00	43,17
6.	Beban Bantuan Sosial	244.550.000,00	2.016.261.500,00	(1.771.711.500,00)	(87,87)
7.	Beban Penyisihan Piutang	10.408.433.265,21	2.944.437.959,00	7.463.995.306,21	253,49
8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	111.250.768.130,18	149.529.517.264,71	(38.278.749.134,53)	(25,60)
Jumlah		817.096.534.117,49	865.003.752.479,81	(47.907.218.362,32)	(5,54)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Beban Operasi - LO TA 2023 sebesar Rp817.096.534.117,49 mengalami penurunan sebesar (Rp47.907.218.362,32) atau (5,54%) jika dibandingkan dari Beban Operasi – LO TA. 2022 sebesar Rp865.003.752.479,81.

Berikut penjelasan rincian masing masing Beban Operasi.

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Kabupaten Lampung Barat TA 2023 sebesar Rp414.097.472.312,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.621.867.630,00 atau 4,97% dari TA 2022 sebesar Rp394.475.604.682,00 atau 50,72% jika dibandingkan dengan seluruh beban operasi TA.2023 sebesar Rp816.385.901.976,49 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 238. Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Gaji Pokok ASN	215.891.248.520,00	203.476.573.214,00	12.414.675.306,00	6,10
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	20.397.429.855,00	19.198.423.002,00	1.199.006.853,00	6,25
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.348.165.000,00	5.432.315.000,00	(84.150.000,00)	(1,55)
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.463.733.000,00	14.079.720.000,00	384.013.000,00	2,73
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.855.841.600,00	3.264.950.000,00	590.891.600,00	18,10
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	12.540.392.040,00	11.863.192.620,00	677.199.420,00	5,71
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	313.680.434,00	297.370.772,00	16.309.662,00	5,48
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.132.796,00	2.833.053,00	299.743,00	10,58
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.906.154.384,00	8.359.811.620,00	546.342.764,00	6,54
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	444.177.956,00	421.782.605,00	22.395.351,00	5,31
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.331.453.892,00	1.265.347.835,00	66.106.057,00	5,22
12.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	47.530.796.026,00	41.962.200.839,00	5.568.595.187,00	13,27
13.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	451.343.316,00	(451.343.316,00)	(100,00)
14.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
15.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	60.260.330.440,00	59.527.123.040,00	733.207.400,00	1,23
16.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	308.690.400,00	352.471.800,00	(43.781.400,00)	(12,42)
17.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.461.900.000,00	1.158.787.500,00	1.303.112.500,00	112,45
18.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.534.925.547,00	910.634.765,00	1.624.290.782,00	178,37
19.	Beban Honorarium	1.861.700.000,00	5.204.512.000,00	(3.342.812.000,00)	(64,23)
20.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	1.082.160,00	0,00	1.082.160,00	∞
21.	Beban Uang Representasi DPRD	780.465.000,00	769.440.000,00	11.025.000,00	1,43
22.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	62.212.500,00	60.385.500,00	1.827.000,00	3,03
23.	Beban Tunjangan Beras DPRD	89.511.120,00	86.831.580,00	2.679.540,00	3,09
24.	Beban Uang Paket DPRD	78.046.500,00	76.944.000,00	1.102.500,00	1,43
25.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.131.674.250,00	1.115.688.000,00	15.986.250,00	1,43
26.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.119.600,00	99.343.125,00	776.475,00	0,78
27.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.639.700.000,00	2.608.200.000,00	31.500.000,00	1,21
28.	Beban Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	648.900.000,00	12.600.000,00	1,94
29.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	971.465,00	555.768,00	415.697,00	74,80

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Anggota DPRD				
30.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.791.765.636,00	3.684.024.902,00	107.740.734,00	2,92
31.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.672.612.191,00	4.554.582.575,00	118.029.616,00	2,59
32.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00	3.150.000,00	9.450.000,00	300,00
33.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	54.600.000,00	(54.600.000,00)	(100,00)
34.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	(100,00)
35.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	98.280.000,00	(98.280.000,00)	(100,00)
36.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	3.041.640,00	(3.041.640,00)	(100,00)
37.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	827.862,00	(827.862,00)	(100,00)
38.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	1.960,00	(1.960,00)	(100,00)
39.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00
40.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	390.000.000,00	400.000.000,00	(10.000.000,00)	(2,50)
41.	Beban Pegawai BLUD	1.103.780.000,00	2.851.214.789,00	(1.747.434.789,00)	(61,29)
	Jumlah	414.097.472.312,00	394.475.604.682,00	19.621.867.630,00	4,97

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah beban pemakaian persediaan barang atau pemakaian/pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, pada TA 2023 terdapat Beban Barang dan Jasa sebesar Rp245.179.858.903,10 atau 30,01% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa TA 2022 sebesar Rp288.628.568.302,10 maka mengalami penurunan sebesar (Rp43.448.709.399,00) atau (15,05%).

Tabel 239. Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	50.089.309.809,80	80.399.349.213,05	(30.310.039.403,25)	(37,70)
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	22.804.420,00	146.709.540,00	(123.905.120,00)	(84,46)
3.	Beban Jasa Kantor	49.933.743.661,50	64.344.439.971,00	(14.410.696.309,50)	(22,40)
4.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	11.122.566.654,00	8.001.222.268,00	3.121.344.386,00	39,01
5.	Beban Sewa Tanah	0,00	16.350.000,00	(16.350.000,00)	(100,00)
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.993.321.500,00	1.866.979.000,00	126.342.500,00	6,77
7.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.400.195.412,00	2.776.619.500,00	(1.376.424.088,00)	(49,57)
8.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	182.750.000,00	694.700.000,00	(511.950.000,00)	(73,69)
9.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	639.186.400,00	5.139.978.800,00	(4.500.792.400,00)	(87,56)
10.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.157.983.740,00	1.718.704.680,00	1.439.279.060,00	83,74
11.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.089.266.000,00	2.938.777.000,00	150.489.000,00	5,12
12.	Beban Pemeliharaan Tanah	123.008.500,00	0,00	123.008.500,00	∞
13.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.309.928.862,00	3.299.332.007,00	2.010.596.855,00	60,94
14.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	335.077.248,00	765.909.800,00	(430.832.552,00)	(56,25)
15.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.874.000,00	0,00	558.874.000,00	∞
16.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.284.426.103,00	54.232.442.157,00	(8.948.016.054,00)	(16,50)
17.	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	681.341.388,00	1.158.300.000,00	(476.958.612,00)	(41,18)
18.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.459.396.536,00	678.879.654,00	2.780.516.882,00	409,57
19.	Beban Barang dan Jasa BOS	28.653.558.146,00	28.656.158.123,00	(2.599.977,00)	(0,01)
20.	Beban Barang dan Jasa BLUD	39.143.120.522,80	31.793.716.589,05	7.349.403.933,75	23,12
	Jumlah	245.179.858.903,10	288.628.568.302,10	(43.448.709.399,00)	(15,05)

5.4.2.1.3. Beban Bunga

Beban ini merupakan Beban Bunga yang harus dibayarkan/ dikeluarkan akibat dari peminjaman uang kepada pihak lain, pada TA 2023 terdapat Beban Bunga sebesar Rp3.604.736.719,00 atau 0,44% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan Beban Bunga TA 2022 sebesar Rp4.319.006.596,00 maka mengalami penurunan (Rp714.269.877,00) atau (16,54%), disajikan pada tabel berikut.

Tabel 240. Beban Bunga TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah (yang telah dibayarkan)	0,00	2.541.047.094,00	(2.541.047.094,00)	(100,00)
2.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	3.604.736.719,00	1.777.959.502,00	1.826.777.217,00	102,75
Jumlah		3.604.736.719,00	4.319.006.596,00	(714.269.877,00)	(16,54)

5.4.2.1.4. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan beban yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harganya dapat dijangkau oleh masyarakat, pada TA 2023 beban subsidi senilai Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp522.500.000,00) dari TA 2022 sebesar Rp522.500.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 241. Beban Subsidi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	522.500.000,00	(522.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	522.500.000,00	(522.500.000,00)	(100,00)

5.4.2.1.5. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya/ masyarakat yang timbul karena adanya perikatan, pada TA 2023 terdapat beban hibah sebesar Rp32.310.714.788,00 atau 3,95% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan beban hibah TA 2022 sebesar Rp22.567.856.176,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.742.858.612,00 atau 43,17%, beban hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 242. Beban Hibah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.473.389.371,00	1.150.000.000,00	14.323.389.371,00	1.245,51
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	223.545.345,00	2.522.666.754,00	(2.299.121.409,00)	(91,14)
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.886.252.000,00	8.270.632.000,00	(1.384.380.000,00)	(16,74)
4.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan	0,00	636.247.500,00	(636.247.500,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Perundang-Undangan				
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.529.865.000,00	5.324.760.000,00	(794.895.000,00)	(14,93)
6.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	762.000.000,00	712.393.000,00	49.607.000,00	6,96
7.	Beban Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
8.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	100,00
9.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.559.408.800,00	3.264.902.650,00	294.506.150,00	9,02
10.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	671.254.272,00	671.254.272,00	0,00	0,00
Jumlah		32.310.714.788,00	22.567.856.176,00	9.742.858.612,00	43,17

Total Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp32.310.714.788,00 dapat dilihat pada Lampiran 5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan CaLK ini.

5.4.2.1.6. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, pada TA 2023 beban bantuan sosial sebesar Rp244.550.000,00 atau 0,03% dari seluruh beban operasi, apabila dibandingkan TA 2022 sebesar Rp2.016.261.500,00 mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.771.711.500,00) atau (87,87%), disajikan pada tabel berikut.

Tabel 243. Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	1.318.456.500,00	(1.318.456.500,00)	(100,00)
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	74.550.000,00	0,00	74.550.000,00	100,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
4.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	170.000.000,00	617.805.000,00	(447.805.000,00)	(72,48)
Jumlah		244.550.000,00	2.016.261.500,00	(1.771.711.500,00)	(87,87)

Total Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp244.550.000,00 dapat dilihat pada Lampiran 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.4.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain, penghitungan beban penyisihan piutang tergantung jenis piutang dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lampung Barat tentang Akuntansi Piutang. Tahun 2023 beban penyisihan piutang sebesar Rp10.408.433.265,21 atau 1,27% dari seluruh beban operasi. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan pada TA 2022 sebesar Rp2.944.437.959,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp7.463.995.306,21 atau 253,49%.

Beban penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 244. Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	727.767,75	87.865,75	639.902,00	728,27
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	14.237.325,00	9.694.578,42	4.542.746,58	46,86
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	28.745.117,03	38.637.442,81	(9.892.325,78)	(25,60)
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	347.758,82	216.968,92	130.789,90	60,28
5.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	10.364.375.296,61	2.854.552.945,30	7.509.822.351,31	263,08
6.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	41.248.157,80	(41.248.157,80)	(100,00)
Jumlah		10.408.433.265,21	2.944.437.959,00	7.463.995.306,21	253,49

Tabel 245. Beban Penyisihan Piutang Per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	OPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
					Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)	(7=6/5)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah					
	BPKD	Pajak Hotel	0,00	2.475,00	(2.475,00)	(100,00)
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	646.104,50	0,00	646.104,50	100,00
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	68.413,25	60.590,50	7.822,75	12,91
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	13.250,00	4.500,00	8.750,00	194,44
	BPKD	PBBP2	0,00	20.300,25	(20.300,25)	(100,00)
		Jumlah	727.767,75	87.865,75	639.902,00	728,27
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah					
	Diskom info	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.454.200,00	6.473.953,42	980.246,58	15,14
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	6.783.125,00	3.218.125,00	3.565.000,00	110,78
	Setda	Retribusi Pemakaian Ruang	0,00	2.500,00	(2.500,00)	(100,00)
		Jumlah	14.237.325,00	9.694.578,42	4.542.746,58	46,86
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah					
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	21.262.693,76	0,00	21.262.693,76	∞
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	582.423,27	7.751,35	574.671,92	7.413,83
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	∞
	Dinkes	Pendapatan BLUD		38.629.691,46	(38.629.691,46)	(100,00)
		Jumlah	28.745.117,03	38.637.442,81	(9.892.325,78)	(25,60)
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat					
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1,54	0,00	1,54	∞
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	347.740,63	216.968,92	130.771,71	60,27
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	5,48	0,00	5,48	∞
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	4,43	0,00	4,43	∞
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH	6,74	0,00	6,74	∞

No	OPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
					Rp	%
		SDA Kehutanan-PSDH				
		Jumlah	347.758,82	216.968,92	130.789,90	60,28
5.		Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah				
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	421.135.348,72	1.899.480.902,04	(1.478.345.553,32)	(77,83)
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.237.774.323,42	232.036.152,73	1.005.738.170,69	433,44
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.611.751.542,28	711.032.509,66	7.900.719.032,62	1.111,16
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	73.754.888,70	12.003.380,87	61.751.507,83	514,45
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	19.959.193,49	0,00	19.959.193,49	∞
		Jumlah	10.364.375.296,61	2.854.552.945,30	7.509.822.351,31	263,08
6.		Piutang Lainnya				
	BPKD	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	41.248.157,80	(41.248.157,80)	(100,00)
		Jumlah	0,00	41.248.157,80	(41.248.157,80)	(100,00)
		Jumlah	10.408.433.265,21	2.944.437.959,00	7.463.995.306,21	253,49

5.4.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama manfaat aset yang ada pada Kabupaten Lampung Barat. Beban penyusutan TA 2023 sebesar Rp111.250.768.130,18 atau 13,62% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan beban penyusutan TA. 2022 sebesar Rp149.529.517.264,71 maka mengalami penurunan sebesar (Rp38.278.749.134,53) atau (25,60%). Beban Penyusutan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 246. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.415.019.360,18	37.805.766.451,71	(1.390.747.091,53)	(3,68)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.395.379.336,00	19.787.843.850,00	(1.392.464.514,00)	(7,04)
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.935.247.453,00	91.526.868.303,00	(35.591.620.850,00)	(38,89)
4.	Beban Amortisasi Aset Tetap lainnya	227.516.750,00	188.229.754,00	39.286.996,00	20,87
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	277.605.231,00	220.808.906,00	56.796.325,00	25,72
	Jumlah	111.250.768.130,18	149.529.517.264,71	(38.278.749.134,53)	(25,60)

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 247. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

No	Keterangan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
	Beban Penyusutan Alat Besar	621.594.628,00	917.024.152,00	(295.429.524,00)	(32,22)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.110.046.541,00	5.210.946.598,00	(1.100.900.057,00)	(21,13)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	694.780.939,00	692.297.429,00	2.483.510,00	0,36
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	65.485.630,00	65.955.918,00	(470.288,00)	(0,71)

No	Keterangan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.861.698.486,35	8.928.644.939,90	(66.946.453,55)	(0,75)
	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.495.377.787,00	1.643.853.849,00	(148.476.062,00)	(9,03)
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.219.893.823,83	9.398.430.827,81	(1.178.537.003,98)	(12,54)
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.194.680.512,00	2.518.363.435,00	(323.682.923,00)	(12,85)
	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	3.325.000,00	1.600.000,00	1.725.000,00	107,81
	Beban Penyusutan Komputer	9.136.399.066,00	7.571.204.417,00	1.565.194.649,00	20,67
	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	290.794.206,00	140.256.776,00	150.537.430,00	107,33
	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	166.621.000,00	198.630.500,00	(32.009.500,00)	(16,12)
	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	16.851.746,00	16.851.750,00	(4,00)	
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	333.960.020,00	156.963.006,00	176.997.014,00	112,76
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	203.509.975,00	344.742.854,00	(141.232.879,00)	(40,97)
	Jumlah	36.415.019.360,18	37.805.766.451,71	(1.390.747.091,53)	(3,68)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.802.036.955,00	19.198.822.312,00	(1.396.785.357,00)	(7,28)
	Beban Penyusutan Monumen	213.397.064,00	212.664.862,00	732.202,00	0,34
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	379.945.317,00	376.356.676,00	3.588.641,00	0,95
	Jumlah	18.395.379.336,00	19.787.843.850,00	(1.392.464.514,00)	(7,04)
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	39.835.500.233,00	76.035.305.450,00	(36.199.805.217,00)	(47,61)
	Beban Penyusutan Bangunan Air	13.163.981.618,00	12.515.193.225,00	648.788.393,00	5,18
	Beban Penyusutan Instalasi	1.631.415.614,00	1.671.940.758,00	(40.525.144,00)	(2,42)
	Beban Penyusutan Jaringan	1.304.349.988,00	1.304.428.870,00	(78.882,00)	(0,01)
	Jumlah	55.935.247.453,00	91.526.868.303,00	(35.591.620.850,00)	(38,89)
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	227.516.750,00	188.229.754,00	39.286.996,00	20,87
	Jumlah	227.516.750,00	188.229.754,00	39.286.996,00	20,87
5.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud				
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	277.605.231,00	220.808.906,00	56.796.325,00	25,72
	Jumlah	277.605.231,00	220.808.906,00	56.796.325,00	25,72
	Jumlah	111.250.768.130,18	149.529.517.264,71	(38.278.749.134,53)	(25,60)

5.4.2.2. BEBAN TRANSFER

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil adalah merupakan sebagian dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang diatribusikan kepada 131 Pemerintah Desa/ Pekon Kabupaten Lampung Barat, pada TA 2023 beban bagi hasil sebesar Rp1.715.995.373,00 atau 0,21% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil TA. 2022 sebesar Rp1.645.398.027,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp70.597.346,00 atau 4,29%. Beban Bagi Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 248. Beban Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.485.432.573,00	1.439.052.427,00	46.380.146,00	3,22
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	230.562.800,00	206.345.600,00	24.217.200,00	11,74
	Jumlah	1.715.995.373,00	1.645.398.027,00	70.597.346,00	4,29

Adapun rincian beban transfer sebesar Rp1.715.995.373,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa terdiri atas
- Realisasi Transfer Pajak Daerah Tahun 2023 Rp1.407.134.300,00
 - Ditambah, Kurang Bayar Transfer Pajak Daerah Tahun 2023 Rp 426.345.100,00
 - Dikurangi, Kurang Bayar Transfer Pajak Daerah Tahun 2022 (yang telah dibayarkan pada tahun 2023) (Rp 348.046.827,00)
- Jumlah Rp1.485.432.573,00
- b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa terdiri atas
- Realisasi Transfer Retribusi Daerah Tahun 2023 Rp 227.695.100,00
 - Ditambah, Kurang Bayar Transfer Retribusi Daerah Tahun 2023 Rp 99.168.200,00
 - Dikurangi, Kurang Bayar Transfer Retribusi Daerah Tahun 2022 (yang telah dibayarkan pada tahun 2023) (Rp 96.300.500,00)
- Jumlah Rp 230.562.800,00

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan adalah berupa Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada 131 pekon di Kabupaten Lampung Barat, pada TA 2023 Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp53.821.021.000,00 atau 6,59% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan TA. 2022 sebesar Rp53.370.540.000,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp450.481.000,00 atau 0,84%. Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 249. Beban Transfer TA 2023 dan 2022

No	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	53.821.021.000,00	53.370.540.000,00	450.481.000,00	0,84
	Jumlah	53.821.021.000,00	53.370.540.000,00	450.481.000,00	0,84

Adapun rincian Beban Bantuan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Bantuan Keuangan (ADP) Kepada Pemerintah Desa terdiri atas

- Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 Rp53.399.700.000,00
 - Ditambah, Kurang Bayar Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 Rp 421.321.000,00
- Jumlah Rp53.821.021.000,00

Adapun beban transfer lebih rinci disajikan pada lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan CaLK ini.

5.4.3. SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.3.1. SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

5.4.3.1.1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Surplus dari kegiatan penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar – LO Tahun 2023 sebesar Rp160.196.170,00 mengalami penurunan sebesar (Rp126.242.051,00) atau (44,07%) dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp286.438.221,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 250. Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	160.196.170,00	286.438.221,00	(126.242.051,00)	(44,07)
	Jumlah	160.196.170,00	286.438.221,00	(126.242.051,00)	(44,07)

Adapun rincian surplus dari penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar berdasarkan SK Bupati No. B/337/KPTS/IV.01/2023 tanggal 29 Desember 2023 yaitu berupa Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp160.196.170,00.

5.4.3.2. DESIFIT NON OPERASIONAL – LO

5.4.3.2.1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya – LO Tahun 2023 sebesar Rp173.441.327,00 mengalami penurunan (Rp651.323.157,00) atau (78,97%) dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp824.764.484,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 251. Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	173.441.327,00	824.764.484,00	(651.323.157,00)	(78,97)
	Jumlah	173.441.327,00	824.764.484,00	(651.323.157,00)	(78,97)

Adapun rincian defisit dari penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar berdasarkan SK Bupati No. B/337/KPTS/IV.01/2023 tanggal 29 Desember 2023 yaitu berupa Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp173.441.327,00.

5.4.4. POS LUAR BIASA

5.4.4.1. PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

5.4.4.1.1. Pendapatan Luar Biasa – LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2023 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki pendapatan luar biasa - LO

5.4.4.2. BEBAN LUAR BIASA

5.4.4.2.1. Beban Luar Biasa

Penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban luar biasa ini terdiri atas beban tidak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp5.111.576.537,00 mengalami peningkatan Rp565.831.115,00 atau 12,45% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.545.745.422,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 252. Rincian Beban Luar Biasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Bantuan kepada korban bencana alam dan perbaikan jalan pasca kejadian longsor – beban tak terduga (total)	1.316.870.260,00	2.417.830.965,00	(1.100.960.705,00)	(45,54)
2.	Beban Luar Biasa Lainnya	3.794.706.277,00	2.127.914.457,00	1.666.791.820,00	78,33
	Jumlah	5.111.576.537,00	4.545.745.422,00	565.831.115,00	12,45

Beban luar biasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjelasan lebih rinci terhadap beban luar biasa berupa Beban Tidak Terduga sebesar Rp1.316.870.260,00 pada lampiran 7 berupa Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.508.132.360,00 dikurangi Pembayaran Utang Jaminan Persalinan Tahun 2020 yang telah dicatat sebagai utang pada Tahun 2022 sebesar Rp191.262.100,00 pada PD Dinas Kesehatan, (Rp1.508.132.360,00 - Rp191.262.100,00 = Rp1.316.870.260,00) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan ini.
2. Beban Luar Biasa Lainnya sebesar Rp 3.794.706.277,00 terdiri atas:
 - a. Reklas Belanja Modal yang dibawah nilai kapitalisasi aset sebesar Rp3.779.203.922,00 menjadi barang Extra Comptable pada perangkat daerah:

a)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	3.522.809.939,00
b)	Dinas Kesehatan	Rp	52.566.248,00
c)	RSUD Alimuddin Umar	Rp	47.172.600,00
d)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1.423.300,00
e)	Dinas Sosial	Rp	9.613.000,00
f)	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	40.450.000,00
g)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Rp	195.000,00
h)	Dinas Koperindag	Rp	47.846.185,00
i)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp	675.000,00
j)	Dinas Perpustakaan	Rp	3.480.000,00
k)	Dinas Perikanan	Rp	18.840.000,00
l)	Sekretariat Daerah	Rp	5.581.000,00
m)	Sekretariat DPRD	Rp	194.250,00
n)	Kec. Sumber Jaya	Rp	1.082.400,00
o)	Kec. Way Tenong	Rp	7.500.000,00
p)	Kec. Kebun Tebu	Rp	825.000,00
q)	Kec. Air Hitam	Rp	12.500.000,00
r)	Kec. Lumbok Seminung	Rp	6.450.000,00
 - b. Biaya Administrasi Belanja Bunga Utang Pinjaman LKBB pada PPKD Rp123.800,00
 - c. Penyesuaian Biaya Transfer Hasil Lelang KP NL pada PPKD Rp3.455,00
 - d. Penyesuaian Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, berupa Peralatan dan mesin Rp7.280.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.095.100,00.

5.5. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN ARUS KAS

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023, berikut disajikan secara rinci Laporan Arus sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 253. Arus Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	118.233.860.915,04	133.427.894.587,23	(15.194.033.672,19)	(11,39)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(117.806.862.544,00)	(192.738.721.531,00)	74.931.858.987,00	(38,88)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(17.918.125.240,00)	50.525.811.025,00	(68.443.936.265,00)	(135,46)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	43.007.045,34	(253.126.991,03)	296.134.036,37	(116,99)
Kenaikan (Penurunan) Kas		(17.448.119.823,62)	(9.038.142.909,80)	(8.409.976.913,82)	93,05

Arus Kas Bersih Per 31 Desember 2023 terjadi sebesar (Rp17.448.119.823,62) mengalami penurunan sebesar (Rp8.409.976.913,82) atau 93,05% dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp9.038.142.909,80) Kas bersih yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk membiayai aktivitas pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus Kas bersih atas aktifitas operasi dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 254. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Masuk Kas	985.635.640.176,84	1.023.456.602.201,28	(37.820.962.024,44)	(3,70)
2	Arus Keluar Kas	867.401.779.261,80	890.028.707.614,05	(22.626.928.352,25)	(2,54)
Jumlah (1-2)		118.233.860.915,04	133.427.894.587,23	(15.194.033.672,19)	(11,39)

Arus Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp118.233.860.915,04 mengalami penurunan sebesar (Rp15.194.033.672,19) atau (11,39%) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp133.427.894.587,23. Arus Kas aktivitas operasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1.1. Arus Masuk Kas

Merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah telah diterima selama tahun pelaporan pada tabel berikut.

Tabel 255. Arus Masuk Kas dari PAD Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1)	Penerimaan Pajak Daerah	14.854.325.262,00	14.390.450.282,00	463.874.980,00	3,22
2)	Penerimaan Retribusi Daerah	2.305.628.800,00	2.237.859.702,50	67.769.097,50	3,03
3)	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.320,95	5.569.077.716,21	84.749.604,74	1,52
4)	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	45.734.180.783,89	47.295.388.541,57	(1.561.207.757,68)	(3,30)
5)	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	855.646.664.112,00	870.256.487.463,00	(14.609.823.351,00)	(1,68)
6)	Penerimaan Transfer Antar Daerah	61.441.013.898,00	70.985.312.496,00	(9.544.298.598,00)	(13,45)
7)	Penerimaan Hibah	0,00	12.722.026.000,00	(12.722.026.000,00)	(100,00)
	Jumlah	985.635.640.176,84	1.023.456.602.201,28	(37.820.962.024,44)	(3,70)

5.5.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 sebesar Rp14.854.325.262,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp14.390.450.282,00 mengalami peningkatan sebesar Rp463.874.980,00 atau 3,22%.

5.5.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah merupakan salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 sebesar Rp2.305.628.800,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp2.237.859.702,50 mengalami peningkatan sebesar Rp67.769.097,50 atau 3,03%.

5.5.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk atas Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 sebesar Rp5.653.827.320,95 dibanding tahun 2022 sebesar Rp5.569.077.716,21 mengalami peningkatan sebesar Rp84.749.604,74 atau 1,52%.

5.5.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Arus kas masuk atas Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 sebesar Rp45.734.180.783,89 dibanding tahun 2022 sebesar Rp47.295.388.541,57 mengalami penurunan sebesar (Rp1.561.207.757,68) atau (3,30%).

5.5.1.1.5. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat

Arus kas masuk atas Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Penerimaan Transfer, pada tahun 2023 sebesar Rp855.646.664.112,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp870.256.487.463,00 mengalami penurunan sebesar (Rp14.609.823.351,00) atau (1,68%).

5.5.1.1.6. Penerimaan Transfer Antar Daerah

Arus kas masuk atas Penerimaan Transfer Antar Daerah salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Transfer, pada tahun 2023 sebesar Rp61.441.013.898,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp70.985.312.496,00 mengalami penurunan sebesar (Rp9.544.298.598,00) atau (13,45%).

5.5.1.1.7. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk atas Penerimaan Hibah merupakan salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp12.722.026.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp12.722.026.000,00) atau (100,00%).

5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Merupakan pengeluaran kas yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 256. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pembayaran Pegawai	413.304.423.702,00	395.256.776.924,00	18.047.646.778,00	4,57
2.	Pembayaran Barang dan Jasa	243.673.449.949,80	293.591.618.382,05	(49.918.168.432,25)	(17,00)
3.	Pembayaran Bunga	3.555.499.062,00	4.469.946.021,00	(914.446.959,00)	(20,46)
4.	Pembayaran Subsidi	0,00	522.500.000,00	(522.500.000,00)	(100,00)
5.	Pembayaran Hibah	32.310.714.788,00	19.513.941.922,00	12.796.772.866,00	65,58
6.	Pembayaran Bantuan Sosial	244.550.000,00	1.926.261.500,00	(1.681.711.500,00)	(87,30)
7.	Pembayaran Bagi Hasil	1.634.829.400,00	1.475.794.900,00	159.034.500,00	10,78
8.	Pembayaran Bantuan Keuangan	171.170.180.000,00	170.854.037.000,00	316.143.000,00	0,19
9.	Pembayaran Tidak Terduga	1.508.132.360,00	2.417.830.965,00	(909.698.605,00)	(37,62)
	Jumlah	867.401.779.261,80	890.028.707.614,05	(22.626.928.352,25)	(2,54)

5.5.1.2.1. Pembayaran Pegawai

Merupakan pengeluaran yang berasal dari belanja pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan Belanja selain dana APBD selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp413.304.423.702,00 pengeluaran kas pada pos ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan anggota DPRD, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif, Beban penunjang operasional KDH/WDH, biaya pemungutan pajak dan honorarium kegiatan, honorarium pengawas/ pegawai tenaga teknis, belanja pegawai BLUD.

5.5.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Beban Barang dan Jasa yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun 2023 senilai Rp243.673.449.949,80. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai dan bahan/material, pembayaran jasa kantor, biaya pemeliharaan, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, biaya perjalanan dinas, Beban pakaian dinas, biaya jasa konsultasi, premi asuransi kesehatan dan belanja barang dan jasa lainnya.

5.5.1.2.3. Pembayaran Bunga

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Bunga yang telah dikeluarkan dari kas daerah, selama tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.555.499.062,00 untuk pembayaran bunga pinjaman pada PT. PEN.

5.5.1.2.4. Pembayaran Subsidi

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Subsidi yang telah dikeluarkan dari kas daerah, selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp522.500.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp522.500.000,00) atau (100,00%). Pengeluaran pos ini untuk belanja subsidi dalam rangka mengantisipasi inflasi daerah.

5.5.1.2.5. Pembayaran Hibah

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Hibah yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun 2023 sebesar Rp32.310.714.788,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp19.513.941.922,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.796.772.866,00 atau 65,58%. Pengeluaran pos ini diantaranya hibah pemerintah lainnya, BUMD, badan/lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat/perorangan.

5.5.1.2.6. Pembayaran Bantuan Sosial

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Beban bantuan sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp244.550.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.926.261.500,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.681.711.500,00) atau (87,30%). Pengeluaran pos ini diperuntukkan bagi pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti anak yatim, bantuan bansos kepada UMKM, bantuan bansos bedah rumah dan lain lain.

5.5.1.2.7. Pembayaran Bagi Hasil

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Beban Bagi Hasil yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp1.634.829.400,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.475.794.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp159.034.500,00 atau 10,78% berupa sharing belanja bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada 131 pekon.

5.5.1.2.8. Pembayaran Bantuan Keuangan

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp171.170.180.000,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp170.854.037.000,00 mengalami peningkatan Rp316.143.000,00 atau 0,19%, berupa bantuan keuangan kepada 131 pekon baik dari Dana Desa bersumber dari APBN yang ditransfer langsung ke RK Desa maupun Alokasi Dana Pekon yang bersumber dari dana APBD.

5.5.1.2.9. Pembayaran Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun 2023 sebesar Rp1.508.132.360,00 dibandingkan tahun 2022 Rp2.417.830.965,00 mengalami penurunan sebesar (Rp909.698.605,00) atau (37,62%). Pengeluaran pos ini diantaranya untuk bantuan bencana alam dan perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana alam seperti perbaikan jembatan atau jalan di desa yang rusak.

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Berikut disajikan tabel arus kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan 2022

Tabel 257. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Arus Kas Masuk				
	- Penjualan atas Peralatan dan Mesin	200.563.588,00	538.773.904,00	(338.210.316,00)	(62,77)
	- Penjualan Aset Lainnya	0,00	283.792.487,00	(283.792.487,00)	(100,00)
	Jumlah	200.563.588,00	822.566.391,00	(622.002.803,00)	(75,62)
2.	Arus Kas Keluar				
	- Perolehan Peralatan dan Mesin	23.471.410.062,00	37.544.778.356,00	(14.073.368.294,00)	(37,48)
	- Perolehan Gedung dan Bangunan	20.128.517.180,00	41.842.220.791,00	(21.713.703.611,00)	(51,89)
	- Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.418.166.745,00	107.650.228.900,00	(40.232.062.155,00)	(37,37)
	- Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.836.651.645,00	3.821.418.300,00	2.015.233.345,00	52,74
	- Perolehan Aset Lainnya	152.680.500,00	702.641.575,00	(549.961.075,00)	(78,27)
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)
	Jumlah	118.007.426.132,00	193.561.287.922,00	(75.553.861.790,00)	(39,03)
	Jumlah (1-2)	(117.806.862.544,00)	(192.738.721.531,00)	74.931.858.987,00	(38,88)

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini sebesar (Rp117.806.862.544,00)

Rincian Arus Kas ini terdiri atas:

5.5.2.1. Arus Kas Masuk

Pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat memiliki arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan antara lain:

1. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Rp200.563.588,00

5.5.2.2. Arus Kas Keluar

5.5.2.2.1. Perolehan Peralatan dan Mesin

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal peralatan dan mesin dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun 2023 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp23.471.410.062,00.

5.5.2.2.2. Perolehan Gedung dan Bangunan

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal gedung dan bangunan dalam rangka memperoleh Aset Tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun 2023 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp20.128.517.180,00.

5.5.2.2.3. Perolehan Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam rangka memperoleh Aset Tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan. Selama tahun 2023 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp67.418.166.745,00.

5.5.2.2.4. Perolehan Aset Tetap Lainnya

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal aset tetap lainnya dalam rangka memperoleh Aset Tetap berupa buku, barang bercorak seni dan hewan ternak. Selama tahun 2023 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp5.836.651.645,00.

5.5.2.2.5. Perolehan Belanja Aset Lainnya

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja aset lainnya sebesar Rp152.680.500,00.

5.5.2.2.6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Merupakan pengeluaran untuk menambahkan nilai investai Kabupaten Lampung Barat kepada pada BUMD BPRS Lampung Barat sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Berikut disajikan tabel arus kas dari aktivitas pendanaan Tahun 2023 dan 2022

Tabel 258. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Kas Masuk				
	- Pinjaman pada PT SMI	0,00	57.991.820.750,00	(57.991.820.750,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	57.991.820.750,00	(57.991.820.750,00)	(100,00)
2	Arus Kas Keluar :				
	- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank (Biaya Pengelolaan)	17.918.125.240,00	7.466.009.725,00	10.452.115.515,00	140,00
	Jumlah	17.918.125.240,00	7.466.009.725,00	10.452.115.515,00	140,00
	Jumlah (1-2)	(17.918.125.240,00)	50.525.811.025,00	(68.443.936.265,00)	(135,46)

5.5.3.1. Arus Masuk Kas

Pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki arus kas masuk atas aktivitas pembiayaan.

5.5.3.1. Arus Keluar Kas

5.5.3.1.1. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar 17.918.125.240,00 berupa biaya pengelolaan pinjaman pada PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD. Arus Kas bersih dari aktivitas ini per 31 Desember 2023 adalah Rp43.007.045,34.

Tabel 259. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Masuk Kas :				
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52.760.557.226,15	64.168.462.070,48	(11.407.904.844,33)	(17,78)
	Jumlah	52.760.557.226,15	64.168.462.070,48	(11.407.904.844,33)	(17,78)
2	Arus Keluar Kas :				
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52.717.121.430,81	64.399.520.985,66	(11.682.399.554,85)	(18,14)
	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	668.075,85	(668.075,85)	(100,00)
	Pengeluaran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja	0,00	21.400.000,00	(21.400.000,00)	(100,00)
	Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja tahun 2022	428.750,00	0,00	428.750,00	∞
	Jumlah	52.717.550.180,81	64.421.589.061,51	(11.704.038.880,70)	(18,17)
	Jumlah (1 – 2)	43.007.045,34	(253.126.991,03)	296.134.036,37	(116,99)

5.5.4.1. Arus Masuk Kas

5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan penerimaan dari aktivitas non anggaran yang berasal dari pos Penerimaan PFK selama tahun 2023 sebesar Rp52.760.557.226,15 apabila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp64.168.462.070,48 mengalami penurunan sebesar (Rp11.407.904.844,33) atau (17,78%).

5.5.4.2. Arus Keluar Kas

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan pengeluaran dari aktivitas non anggaran yang berasal dari pos Penerimaan PFK selama tahun 2023 sebesar Rp52.717.121.430,81 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp64.399.520.985,66 mengalami penurunan sebesar (Rp11.682.399.554,85) atau (18,14%).

5.5.4.2.2. Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan pengeluaran dari aktivitas non anggaran yang berasal dari hutang jangka pendek lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp668.075,85 mengalami penurunan sebesar (Rp668.075,85) atau (100,00%).

5.5.4.2.3. Pengeluaran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Merupakan pengeluaran dari aktivitas non anggaran yang berasal dari pengeluaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp21.400.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp21.400.000,00) atau (100,00%).

5.5.4.2.4. Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja Tahun 2022

Merupakan arus kas keluar berupa koreksi pencatatan saldo akhir 31 Desember 2022 kas BOS Kinerja sebesar Rp428.750,00, semula pada tahun 2022 BOS Kinerja tidak masuk dalam unsur SILPA saldo ini menjadi Kas di BOS Non SILPA, tetapi pada tahun 2023 BOS Kinerja ini menjadi unsur SiLPA dan dianggarkan dalam APBD oleh karena itu perlu dilakukan koreksi terhadap akun tersebut. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp428.750,00 atau 100,00%.

5.5.5. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel berikut.

Tabel 260. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Saldo Awal Kas	48.306.801.785,85	57.344.944.695,65	(9.038.142.909,80)	(15,76)
2.	Kenaikan/ (Penurunan Kas)	(17.448.119.823,62)	(9.038.142.909,80)	(8.409.976.913,82)	93,05
3.	Saldo Akhir Kas (1 + 2)	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85	(17.448.119.823,62)	(36,12)
	Rincian Saldo Akhir Kas :				
4.	Kas di Kas Daerah	25.819.052.572,19	44.640.582.801,71	(18.821.530.229,52)	(42,16)
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	61.075,00	(61.075,00)	(100,00)
6.	Kas di BLUD	4.597.603.900,41	3.452.121.126,70	1.145.482.773,71	33,18
7.	Kas Dana BOS	281.132.047,63	214.036.782,44	67.095.265,19	31,35
8.	Kas Lainnya	15.842.200,00	0,00	15.842.200,00	∞
9.	Kas Dana BOK Puskesmas	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	∞
	Saldo Akhir Kas (4 s.d. 11)	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85	(17.448.119.823,62)	(36,12)

5.6. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ (defisit) – LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/ dikurang dengan Surplus/ (Defisit) LO dan Perubahan ekuitas lainnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo awal ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp2.766.774.873.857,60, Surplus/ (Defisit) – LO sebesar Rp58.736.407.592,05 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar antara lain Selisih Revaluasi Aktiva Tetap 0,00 dan lain-lain sebesar Rp28.372.500.999,68 sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.853.883.782,449,33, dapat dirinci sbb:

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal TA 2023 sebesar Rp2.766.774.873.857,60 bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.611.345.909.921,04 mengalami peningkatan sebesar Rp155.428.963.936,56 atau 5,95%.

5.6.2. Surplus/ (Defisit) - LO

Surplus/ (Defisit) - LO TA 2023 sebesar Rp58.722.209.492,05 bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar (Rp17.851.113.184,44) mengalami peningkatan surplus sebesar Rp76.573.322.676,49 atau (428,96%).

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Koreksi Nilai Persediaan

Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak memiliki saldo koreksi nilai persediaan.

5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Selisih Revaluasi Aktiva Tetap

Selisih revaluasi aktiva tetap sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp153.491.968.983,00 mengalami penurunan sebesar (Rp153.491.968.983,00) atau (100,00%).

5.6.5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Lain lain

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar – lain lain TA 2023 sebesar Rp28.372.500.999,68 bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp19.788.108.138,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.584.392.861,67 atau 43,38%.

Tabel 261. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Dampak Kumulatif/ Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain-lain	Ekuitas Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo Awal Ekuitas	0,00	2.766.774.873.857,60
2	Surplus-LO Tahun Berjalan	0,00	58.722.209.492,05
3	Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
4	Lain-lain		
	Penambahan:		
	1) Penambahan Ekuitas karena Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022	41.114.795.287,00	
	2) Penambahan Ekuitas dari Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Rusak Berat (Usang) / tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah untuk dimusnahkan	806.087.149,00	
	3) Penambahan Ekuitas dari Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Rusak Berat (Usang) untuk dilelang	1.022.213.800,00	
	4) Penambahan Ekuitas karena Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak	185.278.750,00	
	5) Penambahan Ekuitas karena Penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	193.263.572,66	
	6) Penambahan Ekuitas karena Koreksi Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pemerintah Pusat	1.811.400.607,00	
	7) Penambahan Ekuitas karena Koreksi Penambahan Penyesuaian Penyisihan Piutang	3.890.202,25	
	8) Penambahan Ekuitas karena Koreksi Penyesuaian Penambahan Piutang Jasa Dana Bergulir	17.492.100,15	
	9) Penambahan Ekuitas dari akumulasi Penyusutan Aset karena Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak	971.135.000,00	
	10) Penambahan Ekuitas karena Penyesuaian Koreksi Pembayaran Hutang Tahun Lalu	2.278.225,50	
	11) Penambahan Ekuitas karena Penambahan dari Laba BUMD	1.461.225.674,06	
	12) Penambahan Ekuitas karena Penyesuaian Koreksi Pembulatan Laba Ditahan BUMD	1,00	
	Jumlah Penambahan	47.589.060.368,62	47.589.060.368,62
	Pengurang :		
	1) Pengurangan Ekuitas karena Akumulasi Penyusutan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022	6.739.433.915,00	
	2) Pengurangan Ekuitas karena Penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.329.397,82	
	3) Pengurangan Ekuitas karena Penghapusan Aset Lain-lain Rusak Berat (Usang) / tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah untuk dimusnahkan	4.093.236.850,00	
	4) Pengurangan Ekuitas karena Penghapusan Aset Lain-lain yang Rusak Berat (Usang) untuk dilelang	1.022.213.800,00	
	5) Pengurangan Ekuitas karena (Penilaian) Aset	960.447.325,00	
	6) Pengurangan Ekuitas karena Pemakaian Dana Cadangan pada BPRS	349.874.595,75	
	7) Pengurangan Ekuitas karena Bagian Laba/Dividen yang dibagikan ke Pemerintah Daerah	757.985.400,01	
	8) Pengurangan Ekuitas karena Koreksi Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pemerintah Pusat yang diakibatkan oleh Munculnya Penetapan Besaran Transfer ke Daerah	2.775.315.118,00	
	9) Pengurangan Ekuitas karena Koreksi Laba ditahan Tahun Sebelumnya atas BUMD	1.994.912.368,36	
	10) Pengurangan Ekuitas karena Penyesuaian Atas Pembayaran Hutang Tahun Lalu	439.210.210,00	
	11) Pengurangan Ekuitas karena Kelebihan Pendapatan Hibah Tahun 2022	82.600.389,00	
	Jumlah Pengurangan	19.216.559.368,94	(19.216.559.368,94)
	Jumlah Keseluruhan	0,00	28.372.500.999,68
	Jumlah Ekuitas Akhir (1+2+3+4)		2.853.869.584.349,33

5.7. HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Hubungan/ keterkaitan antara beberapa jenis laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2023 antara lain.

5.7.1. Hubungan antara Laporan Arus Kas dengan Saldo Kas pada Neraca

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas dan saldo kas pada laporan Neraca per 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp30.858.681.962,23 dan Rp30.858.681.962,23 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo Kas berdasarkan Laporan Arus Kas	Rp 30.858.681.962,23
2. Saldo Kas pada akun Neraca	<u>Rp 30.858.681.962,23</u>
3. Selisih	<u>Rp 0,00</u>

Rincian Saldo Kas pada akun Neraca sbb:

1. Kas di Kas Daerah	Rp 25.819.052.572,19
2. Kas di BLUD	Rp 4.597.603.900,41
3. Kas Dana BOS	Rp 281.132.047,63
4. Kas Lainnya	Rp 15.842.200,00
5. Kas Dana BOK Puskesmas	<u>Rp 145.051.242,00</u>
Jumlah	<u>Rp 30.858.681.962,23</u>

5.7.2. Hubungan antara Laporan Arus Kas dengan Laporan Realisasi Anggaran

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas dengan saldo kas pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp30.858.681.962,23 dan Rp30.683.213.321,08 selisih sebesar Rp175.468.641,15 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan antara saldo Laporan Arus Kas dengan Saldo Laporan Realisasi Anggaran dapat dirinci sebagai berikut:	
1. Saldo Kas berdasarkan Laporan Arus Kas	Rp 30.858.681.962,23
2. SILPA Tahun Anggaran	<u>Rp 30.683.213.321,08</u>
3. Selisih	<u>Rp 175.468.641,15</u>

Rincian perbedaan antara Laporan Arus Kas dengan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sbb:

1. Kas Dana BOS Utang PFK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 123.274.991,00
2. Kas Di BLUD Puskesmas – Utang PFK	Rp 49.263.211,15
3. Kas Dana BOS Afirmasi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022	Rp 2.930.439,00
Jumlah	Rp 175.468.641,15

5.7.3. Hubungan antara Laporan Perubahan SAL dengan Laporan Realisasi Anggaran

Tidak terdapat perbedaan antara saldo akhir Laporan Perubahan SAL dengan Saldo Laporan Realisasi Anggaran, masing-masing sebesar Rp30.683.213.321,08.

5.7.4. Hubungan antara Laporan Perubahan Ekuitas dengan Neraca dan Laporan Operasional

Nilai Surplus/ (Defisit) - LO pada Laporan Ekuitas tidak memiliki perbedaan dengan dengan nilai Surplus / (Defisit) – LO pada Laporan Operasional masing-masing sebesar Rp58.722.209.492,05.

Nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Ekuitas tidak memiliki perbedaan dengan nilai Ekuitas pada Neraca masing-masing sebesar Rp2.853.869.584.349,33.

5.7.5. Hubungan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran

Perbedaan antara pendapatan pada laporan operasional dan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 262. Penjelasan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
1.	PENDAPATAN					
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH					1.
3.	Pendapatan Pajak Daerah	14.854.325.262,00	14.870.851.762,00	(16.526.500,00)	495.000,00	2. Penyesuaian Piutang Pajak Hotel yang hanya dicatat pada LRA
					(4.748.900,00)	3. Kenaikan Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya yang hanya dicatat pada LO
					(13.682.650,00)	4. Kenaikan Piutang Rumah Makan dan Sejenisnya yang hanya dicatat pada LO
					(2.650.000,00)	5. Kenaikan Piutang Pajak Parkir yang hanya dicatat pada LO
					4.060.050,00	6. Penyesuaian Piutang PBBP2 yang hanya dicatat pada LRA
4.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.305.628.800,00	2.356.222.250,00	(50.593.450,00)	(1.200,00)	1. Pembayaran atas 1 Menara Telekomunikasi PT. Tower Bersama Group (TBG)
					150.000,00	2. Penyesuaian Piutang Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2022 yang hanya dicatat pada LO
					500.000,00	3. Penyesuaian Piutang Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan yang hanya dicatat pada LO
					166.920.000,00	4. Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Tahun 2023 yang hanya dicatat pada LO
					(208.425.000,00)	5. Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Tahun 2022 yang hanya dicatat pada LO
					54.000,00	6. Penyesuaian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang hanya dicatat pada LO
					(14.041.250,00)	7. Penyesuaian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah yang hanya dicatat pada LO
					4.250.000	8. Koreksi Piutang retribusi yang hanya dicatat pada LO penyewaan tanah a.n Azwar Efendi, karena berita acara perjanjian sewa menyewanya belum ditandatangani
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.320,95	4.895.841.920,94	757.985.400,01	757.985.400,01	1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
6.	Lain-lain PAD yang Sah	45.934.744.371,89	48.965.554.967,60	(3.030.810.595,71)	185.277.473,00	1. Penyesuaian Piutang Pendapatan BLUD yang hanya dicatat pada LO
					(214.678.200,00)	2. Koreksi KAP atas Piutang JKN pending bulan Desember tahun 2023, yang belum dicatat oleh RSUD Alimuddin Umar yang hanya dicatat pada LO

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					127.230.694,00	3. Hasil Lelang Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang yang hanya dicatat di LRA, sedangkan pada LO dicatat sebagai Surplus/Defisit di PPKD
					73.332.894,00	4. Hasil Lelang Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang hanya dicatat di LRA, sedangkan pada LO dicatat sebagai Surplus/Defisit di PPKD
					(5.000.000,00)	5. Penyesuaian pendapatan Sewa Bangunan yang hanya dicatat pada LO
					573.253,52	6. Pendapatan Bunga atas Deposito yang hanya dicatat pada LRA
					(3.218.937.629,97)	7. Piutang TGR yang belum direalisasikan
					31.920.998,58	8. Koreksi Penerimaan Pendapatan TGR CV. Manunggal Sulthon Raya (MSR) yang ketika uang masuk kasda dicatat mengurangi piutang TGR/Aset lain-lain TGR malah di catat sebagai pendapatan TGR yang hanya dicatat pada LO
					369.921,16	9. Penyesuaian Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang hanya dicatat pada LRA
					(17.000.000,00)	10. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang hanya dicatat pada LO
					6.100.000,00	11. Penyesuaian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang hanya dicatat pada LRA
7.	Sub Jumlah (3 s.d. 6)	68.748.525.754,84	71.088.470.900,54	(2.339.945.145,70)		
8.	PENDAPATAN TRANSFER					
9.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.646.664.112,00	739.244.658.525,00	116.402.005.587,00	(229.888.000,00)	1. Pencatatan DBH Pajak Bumi dan Bangunan yang masih menjadi Piutang Perpres 130/2022, 159 Tahun 2023
					593.423.142,00	2. Pencatatan Penerimaan TDF DBH PBB , awal tahun.
					(787.967.000,00)	3. Pencatatan DBH PPh Psl 21 yang masih menjadi Piutang Perpres 130/2022, 159 Tahun 2023
					559.666.674,00	4. Pencatatan Penerimaan TDF DBH PPh Pasal 21 , awal tahun
					(4.193.308)	5. Pencatatan DBH PPh Psl 21 yang masih menjadi Piutang PMK 159 Tahun 2023
					18.704.417,00	6. Pencatatan Penerimaan TDF DBH PPh Pasal 25 , awal tahun
					(69.548.125)	7. Pencatatan PMK No 3/PMK.07/2023 dan PMK 159/2023 CH Tembakau yang masih menjadi piutang s.d. 31 Des 2023
					14.354.262,00	8. Pencatatan Penerimaan TDF CHT Tembakau , awal tahun
					(477.978.097,00)	9. Pencatatan Perpres 130/2022, PMK 159/2023, PMK 90/2023, KMK 38/KM.07/2023 atas DBH Minyak Bumi yang masih menjadi piutang akhir
					657.271.873,00	10. Pencatatan Penerimaan DBH Minyak Bumi , awal tahun

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH (5=3-4)	RINCIAN (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					(2.021.713.885,00)	11. Pencatatan Perpres 130/2022, PMK 159/2023, PMK 90/2023, KMK 38/KM.07/2023 atas DBH Panas Bumi yang masih menjadi piutang akhir
					202.835.360,00	12. Pencatatan Penerimaan DBH Panas Bumi, awal tahun
					(75.879.000)	13. Pencatatan Perpres 130/2022, PMK 159/2023, atas DBH Minerba Batu Bara Landrent yang masih menjadi piutang akhir
					25.856.497	14. Pencatatan Penerimaan DBH Minerba Batu Bara Landrent, awal tahun
					69.384.010,00	15. Pencatatan Penerimaan DBH Minerba Batu Bara Royalti, awal tahun
					(65.371.347)	16. Pencatatan Perpres 130/2022, PMK 159/2023, PMK 90/2023, KMK 38/KM.07/2023 atas DBH SDA PSDH Kehutanan yang masih menjadi piutang akhir
					10.386.153,00	17. Pencatatan Penerimaan DBH PSDH Kehutanan, awal tahun
					211.753.211,00	18. Pencatatan Penerimaan DBH SDA Perikanan, awal tahun
					117.770.480.000,00	19. Penerimaan Dana Desa, hanya dicatat pada LRA, tidak dicatat pada LO
					428.750,00	20. DAK Non Fisik-BOS Kinerja yang hanya dicatat pada LRA
10.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.441.013.898,00	103.093.724.029,00	(41.652.710.131,00)	(3.991.838.697,00)	1. Pencatatan SK Gub G/819/VI.03/HK/2023 Pjk Rokok TW IV 2023 yg masih menjadi piutang akhir
					(15.248.839.565,00)	2. Pencatatan SK Gub No G/155/VI.03/HK/2024 DBH Pajak Pemrov TW IV 2023 yang masih menjadi Piutang akhir
					(16.167.655.477,00)	3. Pencatatan SK Gub No G/695/VI.03/HK/2023 DBH Pajak Pemrov TW III 2023 yang masih menjadi Piutang akhir
					(14.650.377.960,00)	4. Pencatatan SK Gub No G/460/VI.03/HK/2023 DBH Pajak Pemrov TW II 2023 yang masih menjadi Piutang akhir
					(8.483.266.513,00)	5. Pencatatan SK Gub No G/349/VI.03/HK/2023 DBH Pajak Pemrov TW I 2023 PBB KB, yang masih menjadi Piutang akhir
					6.932.522.191,00	6. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor saldo awal
					2.433.188.972,00	7. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
					7.399.535.894,00	8. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
					124.021.024,00	9. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
11.	Sub Jumlah (9 s.d. 10)	917.087.678.010,00	842.338.382.554,00	74.749.295.456,00		
12.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
13.	Pendapatan Hibah	0,00	23.053.728.222,00	(23.053.728.222,00)	(21.326.455.259,00)	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana SMP Satap 2 Balik Bukit, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana SDn 3

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
						Fajar Bulan, dan Penataan Kebun Raya Liwa (KRL) yang hanya dicatat pada LO
					(201.077.500,00)	2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Blangko KTP-el sebanyak 21.000 Keping yang hanya dicatat pada LO
					(35.000.000,00)	3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang Rp35.000.000,00 untuk Bantuan Rehabilitasi Pagar yang hanya dicatat pada LO
					(289.524.725,00)	4. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa berupa Obat-obatan yang hanya dicatat pada LO
					(1.147.670.738,00)	5. Koreksi Pendapatan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berupa Persediaan Obat-Obatan (obat program) yang hanya dicatat pada LO
					(54.000.000,00)	6. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan dari Pengurus Mushola As-Syifa berupa Bangunan Mushola (Pemasangan Jaringan Listrik, Instalasi Air, Pembuatan Tangga Tempat Wudhu, Pmlasteran Dinding Mushola Luar Dalam, dan Pemasangan Kusen Pintu & b Jendela Stainless) yang hanya dicatat pada LO
14.	Sub Jumlah (13)	0,00	23.053.728.222,00	(23.053.728.222,00)		
15.	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+11+14)	985.836.203.764,84	936.480.581.676,54	49.355.622.088,30		
16.	BELANJA					
17.	BELANJA OPERASI					
18.	Belanja/ Beban Pegawai	413.304.423.702,00	414.097.472.312,00	(793.048.610,00)	3.105.000,00	1. Pembayaran Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					540.000,00	2. Pembayaran utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA.
					9.559.440,00	3. Pembayaran Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(136.924.250,00)	4. Pengakuan Utang atas Kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					9.124.200,00	5. Senilai Rp9.124.200,00 Merupakan Pembayaran Carry Over Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD TA.2022 dan Senilai (Rp 21.189.600,00) Pembayaran Carry Over Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD TA.2023
					(37.694.400,00)	6. Senilai Rp37.694.400,00 Merupakan Tambahan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tahun 2023 a.n Arian (SDN I Sukajadi) dan Hendra Cahyono (SDN 2 Pekon Balak

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
						Sesuai Nota Dinas 841/279/III.01/2024
					(25.758.600,00)	7. Pengakuan Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					(615.000.000,00)	8. Pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
19.	Belanja/ Beban Barang dan Jasa	243.673.449.949,80	245.179.858.903,10	(1.506.408.953,30)	(38.546.500,00)	1. Beban Pemakaian Persediaan Bahan-Bahan Kimia yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					5.757.000,00	2. Penyesuaian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(800.000,00)	3. Beban Pemakaian Persediaan Bahan-Bahan Baku yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					2.343.269.492,23	4. Penyesuaian Persediaan Bahan-Bahan Lainnya yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(570.684.320,00)	5. Koreksi Audited atas Penyesuaian Persediaan Obat dan alat kesehatan per 31 Desember 2023 Puskesmas Buay Nyerupa yang hanya dicatat pada LO
					22.315.700,00	6. Penyesuaian Persediaan Alat Tulis Kantor yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(1.107.000,00)	7. Beban Pemakaian Persediaan Alat Tulis Kantor yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					18.480.000,00	8. Penyesuaian Persediaan Kertas dan Cover yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(1.756.000,00)	9. Beban Pemakaian Persediaan Kertas dan Cover yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					185.000,00	10. Penyesuaian Persediaan Bahan Cetak yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(1.498.730,00)	11. Beban Pemakaian Persediaan Bahan Cetak yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					(220.000,00)	12. Beban Pemakaian Persediaan Benda Pos yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					298.000,00	13. Penyesuaian Persediaan Benda Pos yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(229.921.176,00)	14. Beban Pemakaian Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender yang Menambah Beban (LO) tetapi

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
						tidak Menambah LRA
					(218.036.652,00)	15. Beban Pemakaian Persediaan Bahan Komputer yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					(1.105.100,00)	16. Beban Pemakaian Persediaan Perabot Kantor yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					77.000,00	17. Penyesuaian Persediaan Perabot Kantor yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					4.478.304,00	18. Penyesuaian Persediaan Alat Listrik yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					36.000,00	19. Penyesuaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(50.000,00)	20. Beban Pemakaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					(289.524.725,00)	21. Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					980.371.986,97	22. Penyesuaian Persediaan Obat yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(576.986.429,00)	23. Koreksi Audit atas Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					3.286.000,00	24. Penyesuaian Persediaan Obat-Obatan Lainnya yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(248.588.990,00)	25. Koreksi Audited atas Penyesuaian Persediaan Obat -obatan lainnya per 31 Desember 2023 Puskesmas Buay Nyerupa yang hanya dicatat pada LO
					(77.500,00)	26. Beban Pemakaian Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang Menambah Beban (LO) tetapi tidak Menambah LRA
					189.883.446,00	27. Penyesuaian Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					2.982.965,00	28. Pembayaran Utang Tagihan Telepon yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(545.681,00)	29. Beban Pemakaian Utang Tagihan Telepon yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					3.587.021,00	30. Pembayaran Utang Tagihan Air yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(1.229.095,00)	31. Beban Pemakaian Utang Tagihan Air yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					6.065.153,00	32. Pembayaran Utang Tagihan Listrik yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					(7.512.290,00)	33. Beban Pemakaian Utang Tagihan Listrik yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					1.819.566,50	34. Pembayaran Utang Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(9.241.824,00)	35. Beban Pemakaian Utang Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					626.157.000,00	36. Pembayaran Utang Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(416.663,00)	37. Beban Pemakaian Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					8.081.250,00	38. Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					49.500.000,00	39. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultasi (Pengadaan Implementasi Modul Aplikasi Integrasi Qris Pada Sistem Pembayaran dan Pencetakan Sistem PBB) menjadi Aset Software
					87.135.000,00	40. Penyesuaian Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang mengurangi beban (LO) tetapi menambah LRA
					(3.518.293.473,00)	41. Beban Pemakaian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					(81.577.716,00)	42. Koreksi KAP atas beban jasa layanan pasien JKN pending bulan Desember 2023 yang belum dicatat oleh RSUD Alimuddin Umar yang hanya dicatat pada LO
					87.232.057,00	43. Koreksi audited hutang jasa pada BLUD Puskesmas tahun 2023 Rp346.504.540,00 dan Koreksi atas hutang jasa pelayanan puskesmas tahun 2022 berdasarkan koreksi audit KAP Rp433.736.597,00 yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					(66.000.000,00)	44. Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Beban Barang dan Jasa BLUD yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(11.666.665,00)	45. Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I Beban Barang dan Jasa BLUD yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(72.020.366,00)	46. Senilai merupakan Penyesuaian Persediaan dari Beban Barang dan Jasa BLUD yang

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
						mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
20.	Belanja/ Beban Bunga	3.555.499.062,00	3.604.736.719,00	(49.237.657,00)	61.900,00	1. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah Tahun 2022 yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					(49.299.557,00)	2. Hutang Bunga periode 26 s.d 31 Desember 2023 PT. Sarana Multi Infrastruktur sesuai skema pembayaran Bunga
21.	Belanja/ Belanja Hibah	32.310.714.788,00	32.310.714.788,00	0,00		
22.	Belanja/ Belanja Bantuan Sosial	244.550.000,00	244.550.000,00	0,00		
23.	Belanja/ Beban Penyisihan Piutang	0,00	10.408.433.265,21	(10.408.433.265,21)		Beban Penyisihan Hanya dicatat pada Laporan Operasional
					(714.517,75)	1. Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak Restoran yang hanya dicatat pada LO
					(13.250,00)	2. Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak Parkir yang hanya dicatat pada LO
					(7.454.200,00)	3. Penyesuaian Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum yang hanya dicatat pada LO
					(6.783.125,00)	4. Penyesuaian Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha yang hanya dicatat pada LO
					(21.262.693,76)	5. Penyesuaian Penyisihan Piutang TGR yang hanya dicatat pada LO
					(582.423,27)	6. Penyesuaian Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah yang hanya dicatat pada LO
					(6.900.000,00)	7. Penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang hanya dicatat pada LO
					(347.758,82)	8. Penyesuaian Penyisihan Piutang Dana Perimbangan yang hanya dicatat pada LO
					(10.364.375.296,61)	9. Penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi yang hanya dicatat pada LO
24.	Belanja/ Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	111.250.768.130,18	(111.250.768.130,18)		Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya di catat pada LO
					(36.415.019.360,18)	1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
					(18.395.379.336,00)	2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
					(55.935.247.453,00)	3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
					(227.516.750,00)	4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
					(277.605.231,00)	5. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
25.	Jumlah Belanja/ Beban Operasi (18 s.d. 24)	693.088.637.501,80	817.096.534.117,49	(124.007.896.615,69)		
26.	BELANJA MODAL					Belanja Modal hanya dicatat pada LRA tidak dicatat pada LO, tetapi langsung menambah nilai Aset Tetap
27.	Belanja Peralatan dan Mesin	23.471.410.062,00	0,00	23.471.410.062,00		1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hanya dicatat pada LRA
28.	Belanja Gedung dan Bangunan	20.128.517.180,00	0,00	20.128.517.180,00		2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya dicatat pada LRA
29.	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	67.418.166.745,00	0,00	67.418.166.745,00		3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang hanya dicatat pada LRA

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
30.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.836.651.645,00	0,00	5.836.651.645,00		4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang hanya dicatat pada LRA
31.	Belanja Aset Lainnya	152.680.500,00	0,00	152.680.500,00		5. Belanja Modal Aset Lainnya yang hanya dicatat pada LRA
32.	Jumlah Belanja Modal (27 s/d 31)	117.007.426.132,00	0,00	117.007.426.132,00		
33.	BELANJA TIDAK TERDUGA					
34.	Belanja Tidak Terduga	1.508.132.360,00	0,00	1.508.132.360,00		Belanja Tidak Terduga yg dicatat pada LO sebagai Beban Tidak Terduga
35.	Jumlah Belanja Tak Terduga (34)	1.508.132.360,00	0,00	1.508.132.360,00		
36.	BELANJA TRANSFER					
37.	Belanja Bagi Hasil	1.634.829.400,00	1.715.995.373,00	(81.165.973,00)	348.046.827,00	1. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa hanya dicatat pada LRA
					(426.345.100,00)	2. Kurang Bayar atau Utang beban bagi hasil Pajak Daerah ke Pemerintahan Desa TA 2023 yang hanya dicatat pada LO
					96.300.500,00	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa hanya dicatat pada LRA
					(99.168.200,00)	4. Koreksi Kurang Bayar atau Utang beban bagi hasil Retribusi Daerah ke Pemerintahan Desa TA 2023 yang hanya dicatat pada LO
38.	Belanja Bantuan Keuangan	171.170.180.000,00	53.821.021.000,00	117.349.159.000,00	117.770.480.000,00	1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dari Pusat DD yang hanya dicatat pada LRA
					(421.321.000,00)	2. Koreksi pengakuan hutang atas kekurangan beban bantuan keuangan ke pekon/desa (Alokaasi Dana Desa) yang hanya dicatat pada LO
39.	Jumlah Belanja Transfer (37 s.d. 38)	172.805.009.400,00	55.537.016.373,00	117.267.993.027,00		
40.	JUMLAH BELANJA	984.409.205.393,80	872.633.550.490,49	111.775.654.903,31		
41.	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (15-40)	1.426.998.371,04	63.847.031.186,05	(62.420.032.815,01)		
42.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
43.	Surplus Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	160.196.170,00	(160.196.170,00)		1. Surplus Hasil Penjualan Lelang Aset Rusak Berat/Usang Mobil yang hanya dicatat pada LO
44.	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO					
45.	Defisit Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	173.441.327,00	(173.441.327,00)		1. Defisit Hasil Penjualan Lelang Aset Rusak Berat/Usang Mobil yang hanya dicatat pada LO

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
46.	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL(43 - 45)	0,00	(13.245.157,00)	13.245.157,00		
47.	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (41+46)	0,00	63.833.786.029,05	(63.833.786.029,05)		
48.	POS LUAR BIASA					
49.	Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00		
50.	Beban Luar Biasa	0,00	5.111.576.537,00	(5.111.576.537,00)	(1.316.870.260,00)	1. Beban Luar Biasa sedangkan pada LRA Belanja Tidak Terduga
					(123.800,00)	2. Biaya Administrasi Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah yang hanya dicatat LO
					(3.455,00)	3. Penyesuaian Biaya Administrasi (By Transfer) Hasil Lelang dari KPKNL ke Bank Lampung yang hanya dicatat pada LO
					(3.779.203.922,00)	4. Extracompatible dari Belanja Modal yang hanya dicatat pada LO sebagai Beban Luar Biasa
					(15.375.100,00)	5. Belanja Peralatan Mesin Rp7.280.000,00 dan Aset Tetap Lainnya Rp8.095.000,00 yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.
51.	POS LUAR BIASA (49 -50)	0,00	(5.111.576.537,00)	(5.111.576.537,00)		
52.	SURPLUS/DEFISIT LO (47 - 51)	0,00	58.722.209.492,05	(58.722.209.492,05)		
53.	PEMBIAYAAN					
54.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
55.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	48.174.340.190,04	0,00	48.174.340.190,04		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang hanya dicatat pada LRA
56.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (56)	48.174.340.190,04	0,00	48.174.340.190,04		
57.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
58.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00		Penyertaan Modal Daerah yang hanya dicatat pada LRA, sedangkan di LO dicatat pada investasi
59.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.125.240,00	0,00	17.918.125.240,00		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang hanya dicatat pada LRA
60.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (58 s.d. 59)	18.918.125.240,00	0,00	18.918.125.240,00		
61.	PEMBIAYAAN NETO (56 –60)	29.256.214.950,04	0,00	29.256.214.950,04		
62.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (41 - 61)	30.683.213.321,08	0,00	30.683.213.321,08		

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

1. Dinas Kesehatan

Realisasi Belanja Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.850.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak ada kasus perdarahan pada ibu bersalin yang memerlukan calon pendonor darah, biaya tersebut adalah transport calon pendonor darah dari dan/ke UPT pada beberapa UPT Puskesmas berikut;

- 1) Puskesmas Air Hitam Anggaran Rp400.000,00
- 2) Puskesmas Sumber Jaya Anggaran Rp800.000,00
- 3) Puskesmas Kebun Tebu Anggaran Rp1.400.000,00
- 4) Puskesmas Bandar Negeri Suoh Rp750.000,00
- 5) Puskesmas Gedung Surian Rp900.000,00
- 6) Puskesmas Pagar Dewa Rp1.000.000,00
- 7) Puskesmas Sri Mulyo Rp600.000,00

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Realisasi Belanja Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi pada Program Penataan Bangunan Gedung TA 2023 sebesar Rp0,00 atau (0,00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp74.999.846,00. Hal tersebut disebabkan :

- 1) Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bertujuan untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, yaitu berupa Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana alam (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 14, kecuali kebakaran), Jumlah Bantuan Rumah Bencana sebanyak 3 (tiga) Unit Rumah.
- 2) Kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dikarenakan :
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM dapat dilaksanakan setelah terbit Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada rumah.
 - b. Tidak terjadi Bencana alam di Kabupaten Lampung Barat sejak Januari - November Tahun 2023 yang mengakibatkan kerusakan berat pada rumah.
- 3) SPM Perumahan Rakyat sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan tidak dapat terealisasi, penilaian yang diberikan oleh Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 penilaiannya N/A (Not Available) yaitu tidak tersedia.

3. Sekretariat Daerah

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp0,00 atau (0,00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp70.706.400,00. Hal tersebut disebabkan gaji dan tunjangan yang diambil oleh pj bupati adalah gaji dan tunjangan PNS.

4. Kecamatan Belalau

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp0,00 atau (0,00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan belum ada undangan pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

5. Kecamatan Suoh

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp0,00 atau (0,00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp900.000,00. Hal tersebut disebabkan Karena STNK Randis Belum ditemukan.

6.2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN REALISASI DIBAWAH TARGET PADA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp665.000,00 atau (50,00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.330.000,00. Hal tersebut disebabkan sesuai dengan jumlah kebutuhan;
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp71.610.788,00 atau (47,44%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp150.960.000,00. Hal tersebut disebabkan sesuai dengan jumlah tagihan;
- 3) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp143.950.000,00 atau (69,76%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp206.350.000,00. Hal tersebut disebabkan pembayaran atas Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sesuai dengan jumlah tagihan UKT masing-masing mahasiswa.

2. Dinas Kesehatan

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2023 sebesar Rp258.278.100,00 atau (73,75%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp350.209.900,00. Hal tersebut disebabkan sisa pagu dari perjalanan dinas dalam kota yang bersumber dana BOK tidak dapat di realisasikan karena memiliki ketentuan khusus untuk pegawai yang dapat menggunakan dana;
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2023 sebesar Rp660.207.940,00 atau (51,69%) dari

anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.277.153.200,00. Hal tersebut disebabkan dari Sisa Pagu kegiatan penanggulangan KLB dan pelaksanaan vaksinasi covid, tetapi pelaksanaan vaksinasi covid sudah tidak ada sehingga realisasi dana tidak dapat terserap seluruhnya;

- 3) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2023 sebesar Rp6.160.000,00 atau (20,53%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00. Hal tersebut disebabkan di karenakan Kabupaten Lampung Barat tidak Masuk Kwalifikasi Kabupaten Kota Sehat;
- 4) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2023 sebesar Rp77.225.000,00 atau (73,72%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp104.750.000,00. Hal tersebut disebabkan Sisa perjalanan dinas tidak dapat direalisasikan dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di seksi PTM dan penggunaan dana DAK BOK tidak dapat dibayar kan jika kegiatan dilaksanakan oleh tenaga selain ASN.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan TA 2023 sebesar Rp2.269.525.000,00 atau (68,81%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.298.225.000,00. Hal tersebut disebabkan. Belum terpenuhi target kebutuhan 1dokter umum, 1 dokter spesialis syaraf/neurologi, & dokter spesialis fisik & rehabilitasi;
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan TA 2023 sebesar Rp212.072.815,00 atau (56,55%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp375.000.000,00. Hal tersebut disebabkan. Telah sesuai dengan kunjungan pasien JKN PBI yang dirawat yang berhak mendapatkan makanan bagi pendamping pasien.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengembangan Permukiman TA 2023 sebesar Rp56.602.000,00 atau (69,24%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp81.748.200,00. Hal tersebut disebabkan pembinaan terhadap pekerja konstruksi di lokasi pembangunan konstruksi terkait Keamanan, Keselamatan Kerja dilakukan oleh pengawas pekerjaan dan konsultan. Tidak ada kegiatan koordinasi terkait jasa konstruksi yg dilakukan di luar daerah;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp14.958.564,00 atau (71,44%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp20.940.000,00. Hal tersebut disebabkan dibayarkan sesuai dengan tagihan kebutuhan.

6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan Perempuan TA 2023 sebesar Rp21.275.500,00 atau (31,40%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp67.761.900,00. Hal tersebut disebabkan. berdasarkan Kasus yang di Layani;

- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan Khusus Anak TA 2023 sebesar Rp116.551.500,00 atau (62,41%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp186.741.700,00. Hal tersebut disebabkan berdasarkan Kasus yang di Layanin;
- 3) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) TA 2023 sebesar Rp362.000.000,00 atau (71,60%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp505.600.000,00. Hal tersebut disebabkan karna data Transferan Tahap ke Dua masuk di pertengahan November sehingga tidak ada lagi waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

7. Dinas Ketahanan Pangan

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp13.331.963 atau (74,31%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp17.940.000,00. Hal tersebut disebabkan dibayarkan sesuai dengan tagihan kebutuhan.

8. Dinas Lingkungan Hidup

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp85.833.650,00 atau (72,71%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp118.050.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak di bayarkan pajak tahunan terdapat 1 unit kendaraan roda 2 (tidak ada surat menyurat(STNK), 1 unit kendaraan roda 3 (tidak terealisasi pajak), 3 unit kendaraan roda 4 (tidak ada surat menyurat (STNK hilang) dan 2 unit kendaraan roda 6 tidak di bayarkan pajak (tidak ada surat menyurat STNK).

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Disdukcapil Way Tenong) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp8.972.870,00 atau (55,39%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp16.200.000,00. Hal tersebut disebabkan pengeluaran disesuaikan dengan real cost/bukti pembayaran.

10. Dinas Perhubungan

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp56.786.034,00 atau (48,22%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp117.770.000,00. Hal tersebut disebabkan beban tagihan saat ini sudah menjadi satu dengan beban biaya telekomunikasi telkom (internet) sesuai dengan pemakaian tagihan listrik dan air.

11. Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp18.359.842,00 atau (62,88%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp29.200.000,00. Hal tersebut disebabkan nominal realisasi berdasarkan nilai realisasi belanja tahun 2023;
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp17.207.510,00 atau (62,95%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp27.335.860,00. Hal tersebut disebabkan nominal realisasi berdasarkan nilai realisasi belanja tahun 2023.

12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp19.140.000,00 atau (53,80%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp35.575.000,00. Hal tersebut disebabkan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pembuatan laporan keuangan dan monitoring dana bergulir.

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp16.210.859,00 atau (71,86%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp22.560.000,00. Hal tersebut disebabkan karena realisasi belanja air, belanja listrik, belanja Telepon dan belanja Internet sesuai dengan pemakaian dan dibayar sesuai dengan nilai yang tertera pada rekening pembayaran setiap bulannya.

14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp2.546.000,00 atau (33,72%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.550.000,00. Hal tersebut disebabkan belum adanya diklat terkait tupoksi perpustakaan dan kearsipan yang berbayar.
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp33.226.962,00 atau 73,87% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp44.980.000,00. Hal tersebut disebabkan nominal realisasi berdasarkan nilai realisasi belanja tahun 2023.

15. Dinas Perikanan

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp23.923.119,00 atau (68,35%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Hal tersebut disebabkan pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan/Kwitansi Pembayaran (Tagihan).

16. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp2.500.000,00 atau (68,49%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.650.000,00. Hal tersebut disebabkan harga pembelian mesin potong rumput sesuai dengan harga yang ada dipasaran dan jumlah unit mesin potong rumput yang dibeli sesuai dengan jumlah unit pada DPA;
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp42.772.874,00 atau (72,30%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp59.160.000,00. Hal tersebut disebabkan karena realisasi sesuai dengan jumlah tagihan telepon, pdam, listrik dan wifi yang tercantum di lembar bukti bayar per bulan.

17. Sekretariat Daerah

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp582.395.258,00 atau (59,60%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp977.116.600,00. Hal tersebut disebabkan kebutuhan atas air listrik dan telepon yang disesuaikan tagihan. tagihan lebih kecil daripada perkiraan kenaikan harga dan volume;

- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp773.441.268,00 atau (66,71%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.159.325.000,00. Hal tersebut disebabkan pos anggaran plat PS pejabat tidak bisa dikarenakan perundang-undangan yang terbaru, dan pajak kendaraan dinas disesuaikan dengan tagihan pajak jatuh tempo masing-masing kendaraan;
- 3) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp83.332.922,00 atau (74,74%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp111.490.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak terserapnya anggaran untuk pemeliharaan genset pada rumah dinas wakil Bupati, karena disesuaikan dengan kebutuhan BBM dan pemeliharaan servis genset tersebut;
- 4) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Program Perekonomian Dan Pembangunan TA 2023 sebesar Rp58.975.250,00 atau (72,55%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp81.286.000,00. Hal tersebut disebabkan terdapat belanja jasa berupa Honorarium Tim Penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website senilai Rp. 22.050.000,- tidak dapat direalisasikan berdasarkan aturan yang berlaku.

18. Sekretariat DPRD

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD TA 2023 sebesar Rp24.310.000,00 atau (52,69%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp46.140.000,00. Hal tersebut disebabkan Penghematan Anggaran.

19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp1.495.000,00 atau (26,02%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.745.000,00. Hal tersebut disebabkan Tidak ada undangan dari luar Kabupaten Lampung Barat dan Permasalahan yang ada bisa di selesaikan dengan koordinasi dengan Satker yang ada di tingkat Kabupaten, jadi dana SPPD tidak di gunakan;
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp4.261.567.935,00 atau (74,45%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.723.912.463,00. Hal tersebut disebabkan Yang tidak terserap adalah TPP di karenakan Peraturan Bupati tentang kenaikan TPP tidak di setujui oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga dana tersebut tidak terealisasi;
- 3) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp5.1015.000,00 atau (54,13%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp9.265.000,00. Hal tersebut disebabkan Realisasi sesuai dengan Kebutuhan;
- 4) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp10.000.000,00 atau (66,67%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Tidak ada undangan untuk Kursus Singkat sehingga dana tersebut tidak terealisasi;
- 5) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2023 sebesar Rp74.943.000,00 atau (53,21%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp140.838.000,00. Hal tersebut disebabkan Realisasi sesuai dengan Kebutuhan;

- 6) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2023 sebesar Rp13.163.000,00 atau (63,17%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp20.838.000,00. Hal tersebut disebabkan Realisasi sesuai dengan Kebutuhan;
- 7) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2023 sebesar Rp56.905.000,00 atau (50,51%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp112.667.000,00. Hal tersebut disebabkan Realisasi telah sesuai dengan Kebutuhan.

20. Badan Penelitian dan Pengembangan

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp13.762.394,00 atau (72,41%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp19.005.000,00. Hal tersebut disebabkan karena biaya pemakaian jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disesuaikan dengan pemakaian.

21. Inspektorat Daerah

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp1.226.000,00 atau (68,11%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000,00. Hal tersebut disebabkan Anggaran telah diserap sesuai dengan kebutuhan, anggaran yang tersisa pada belanja Paket/Pengiriman telah disesuaikan dengan penggunaan.

22. Kecamatan Belalau

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp8.624.100,00 atau (67,91%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp12.700.000,00. Hal tersebut disebabkan sesuai dengan kebutuhan/pemakaian perbulan;
- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik TA 2023 sebesar Rp6.699.800,00 atau (65,69%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.199.800,00. Hal tersebut disebabkan terbitnya surat edaran tidak diperkenankannya membayar honor operator terhitung sejak bulan Juni TA 2023.

23. Kecamatan Batu Brak

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp3.060.302,00 atau (68,01%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp4.500.000,00. Hal tersebut disebabkan karna Pembayaran rekening listrik sesuai dengan jumlah pembayaran di kode rekening listrik tersebut.

24. Kecamatan Balik Bukit

- 1) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp14.906.238,00 atau (59,96%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp24.860.000,00. Hal tersebut disebabkan Karena Pembayaran Belanja berdasarkan Pemakaian dan untuk belanja Air khususnya tidak terealisasi karena PAM yang ada di kecamatan Balik Bukit tidak Bisa dipakai karena megalami kerusakan sehingga anggaran yang ada tidak terealisasi;

- 2) Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Way Mengaku) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp5.425.600,00 atau (67,99%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.980.000,00. Hal tersebut disebabkan Pembayaran sesuai dengan tagihan dan pemakaian.

25. Kecamatan Sukau

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp5.520.885,00 atau (46,24%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp11.940.000,00. Hal tersebut disebabkan kabel dan jaringan internet yang melintas di Kecamatan Sukau belum ada, sehingga mengakibatkan penyediaan jasa komunikasi untuk paket internet tidak bisa digunakan.

26. Kecamatan Gedung Surian

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp613.380,00 atau (61,34%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor Kecamatan Gedung Surian Tahun Ajaran 2023 sudah cukup.

27. Kecamatan Kebun Tebu

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp1.112.380,00 atau (58,55%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.900.000,00. Hal tersebut disebabkan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas besarnya kurang dari Anggaran yang tersedia di DPA.

28. Kecamatan Bandar Negeri Suoh

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp2.500.000,00 atau (33,33%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.500.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak terdapat undangan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan tidak terdapat pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

29. Kecamatan Lombok Seminung

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp994.925,00 atau (49,75%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Karna Satu Unit Kendaraan Bermotor yang diperuntukan untuk mantan Camat Lombok Seminung telah dipindah asetkan ke Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terjadilah tidak dapat terialisasi.

30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realiasi Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp11.400.535,00 atau (71,70%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp15.900.000,00. Hal tersebut disebabkan realisasi belanja berdasarkan jumlah tagihan atas pemakaian belanja jasa listrik, telepon, air dan internet kantor.



BAB 7

PENUTUP



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

BAB 7 PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Dan para pemangku kepentingan kiranya berkenan untuk memberikan umpan balik atas informasi yang disajikan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 2 Mei 2024

Pj. BURATH LAMPUNG BARAT,



NUKMAN



LAMPIRAN

1

PENDAPATAN DAERAH



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAP REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = 4/3
4	PENDAPATAN	988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	(3.082.504.415,16)	99,69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.358.127.413,00	68.748.525.754,84	3.390.398.341,84	105,19
4.1.01	PAJAK DAERAH	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	(132.122.312,00)	99,12
4.1.01.06	Pajak Hotel	137.313.200,00	153.554.250,00	16.241.050,00	111,83
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	109.713.200,00	130.386.070,00	20.672.870,00	118,84
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	27.600.000,00	23.168.180,00	(4.431.820,00)	83,94
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.021.667.241,00	1.712.757.842,00	(308.909.399,00)	84,72
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.905.867.241,00	1.603.699.829,00	(302.167.412,00)	84,15
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	99.420.000,00	89.536.453,00	(9.883.547,00)	90,06
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	16.380.000,00	19.521.560,00	3.141.560,00	119,18
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	113.606.437,00	158.057.616,00	44.451.179,00	139,13
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	107.756.437,00	153.057.616,00	45.301.179,00	142,04
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	5.000.000,00	(850.000,00)	85,47
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.618.355.316,00	7.653.132.882,00	34.777.566,00	100,46
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.618.355.316,00	7.653.132.882,00	34.777.566,00	100,46
4.1.01.11	Pajak Parkir	108.000.000,00	104.350.000,00	(3.650.000,00)	96,62
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	108.000.000,00	104.350.000,00	(3.650.000,00)	96,62
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.682.505.380,00	4.699.447.572,00	16.942.192,00	100,36
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.682.505.380,00	4.699.447.572,00	16.942.192,00	100,36
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	368.025.100,00	68.025.100,00	122,68
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00	368.025.100,00	68.025.100,00	122,68
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	(98.052.311,00)	95,92
4.1.02.01	RETRIBUSI JASA UMUM	844.193.272,00	844.193.272,00	(113.279.339,00)	88,17
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	152.840.000,00	134.608.000,00	(18.232.000,00)	88,07
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	152.840.000,00	134.608.000,00	(18.232.000,00)	88,07
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.020.000,00	75.520.000,00	(2.500.000,00)	96,80
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.020.000,00	75.520.000,00	(2.500.000,00)	96,80
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	292.512.172,00	199.168.972,00	(93.343.200,00)	68,09
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	52.800.000,00	35.648.000,00	(17.152.000,00)	67,52
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	167.251.200,00	111.176.800,00	(56.074.400,00)	66,47
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	72.460.972,00	52.344.172,00	(20.116.800,00)	72,24
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	756.439,00	1.553.500,00	797.061,00	205,37
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	756.439,00	1.553.500,00	797.061,00	205,37
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.942.800,00	(1.200,00)	100,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.942.800,00	(1.200,00)	100,00
4.1.02.02	RETRIBUSI JASA USAHA	1.223.658.500,00	1.236.243.800,00	12.585.300,00	101,03
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	546.695.000,00	574.939.500,00	28.244.500,00	105,17
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	343.950.000,00	357.700.000,00	13.750.000,00	104,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	72.045.000,00	79.789.500,00	7.744.500,00	110,75
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	27.500.000,00	34.250.000,00	6.750.000,00	124,55
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	359.400.000,00	369.046.400,00	9.646.400,00	102,68
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	359.400.000,00	369.046.400,00	9.646.400,00	102,68
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	22.848.000,00	25.348.000,00	2.500.000,00	110,94
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	22.848.000,00	25.348.000,00	2.500.000,00	110,94
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	122.150.000,00	88.894.000,00	(33.256.000,00)	72,77
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	122.150.000,00	88.894.000,00	(33.256.000,00)	72,77
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.365.500,00	5.376.000,00	10.500,00	100,20
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.365.500,00	5.376.000,00	10.500,00	100,20
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	73.700.000,00	79.033.000,00	5.333.000,00	107,24
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	73.700.000,00	79.033.000,00	5.333.000,00	107,24
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.200.000,00	87.306.900,00	106.900,00	100,12
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	10.400.000,00	10.433.400,00	33.400,00	100,32
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	12.000.000,00	12.073.500,00	73.500,00	100,61
4.1.02.03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	222.550.000,00	225.191.728,00	2.641.728,00	101,19
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22.550.000,00	22.609.000,00	59.000,00	100,26
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	22.550.000,00	22.609.000,00	59.000,00	100,26
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	202.582.728,00	2.582.728,00	101,29
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	202.582.728,00	2.582.728,00	101,29

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = 4/3
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	3.620.572.964,89	108,56
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	200.563.588,00	200.563.588,00	100,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	200.563.588,00	200.563.588,00	100,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	127.230.694,00	127.230.694,00	100,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	73.332.894,00	73.332.894,00	100,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	(166.929.149,54)	89,78
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	(166.929.149,54)	89,78
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	(166.929.149,54)	89,78
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	404.200.322,21	123,35
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	404.200.322,21	123,35
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	404.200.322,21	123,35
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.850.186.524,00	1.886.726.648,86	36.540.124,86	101,97
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.186.524,00	39.300.000,00	(60.886.524,00)	39,23
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.186.524,00	39.300.000,00	(60.886.524,00)	39,23
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.750.000.000,00	1.847.426.648,86	97.426.648,86	105,57
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.750.000.000,00	1.847.426.648,86	97.426.648,86	105,57
4.1.04.9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00
4.1.04.9.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00
4.1.04.9.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	532.866,00	1.376.257,00	843.391,00	258,27
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	532.866,00	1.376.257,00	843.391,00	258,27
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	532.866,00	1.376.257,00	843.391,00	258,27
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	452.041.200,00	269.290.804,00	(182.750.396,00)	59,57
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000,00	264.069.435,00	(35.930.565,00)	88,02
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000,00	264.069.435,00	(35.930.565,00)	88,02
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	41.200,00	1.381.369,00	1.340.169,00	3.352,84
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	41.200,00	1.381.369,00	1.340.169,00	3.352,84
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	2.590.000,00	(147.410.000,00)	1,73
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	150.000.000,00	2.590.000,00	(147.410.000,00)	1,73
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	36.600.699.432,00	39.956.934.804,00	3.356.235.372,00	109,17
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	36.600.699.432,00	39.956.934.804,00	3.356.235.372,00	109,17
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	36.600.699.432,00	39.956.934.804,00	3.356.235.372,00	109,17
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	(28.130.387,64)	30,67
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	(28.130.387,64)	30,67
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	(28.130.387,64)	30,67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	(6.472.902.757,00)	99,30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	850.778.668.525,00	855.646.664.112,00	4.867.995.587,00	100,57
4.2.01.01	Dana Perimbangan	727.115.074.525,00	731.983.070.112,00	4.867.995.587,00	100,67
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.470.929.525,00	23.567.092.474,00	4.096.162.949,00	121,04
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.923.733.142,00	6.089.005.142,00	4.165.272.000,00	316,52
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.580.135.674,00	4.580.135.674,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN	167.793.417,00	167.793.417,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	180.635.188,00	111.526.137,00	(69.109.051,00)	61,74
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.456.819.873,00	7.456.819.873,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.083.850.360,00	3.083.850.360,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	253.164.497,00	253.164.497,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	69.384.010,00	69.384.010,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	256.911.153,00	256.911.153,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.498.502.211,00	1.498.502.211,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	509.628.682.000,00	514.643.114.814,00	5.014.432.814,00	100,98
4.2.01.01.02.0001	DAU	509.628.682.000,00	514.643.114.814,00	5.014.432.814,00	100,98
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.384.361.000,00	54.035.898.900,00	(348.462.100,00)	99,36
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.063.229.000,00	1.059.863.000,00	(3.366.000,00)	99,68
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.328.863.000,00	4.201.354.000,00	(127.509.000,00)	97,05
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.530.306.000,00	3.515.858.800,00	(14.447.200,00)	99,59
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	363.025.000,00	360.858.000,00	(2.167.000,00)	99,40

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = 4/3
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	10.104.218.000,00	10.019.159.187,00	(85.058.813,00)	99,16
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.319.365.000,00	2.302.102.913,00	(17.262.087,00)	99,26
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	30.941.987.000,00	30.849.503.000,00	(92.484.000,00)	99,70
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.733.368.000,00	1.727.200.000,00	(6.168.000,00)	99,64
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	143.631.102.000,00	139.736.963.924,00	(3.894.138.076,00)	97,29
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	38.148.810.000,00	38.075.219.937,00	(73.590.063,00)	99,81
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.550.000.000,00	1.550.428.750,00	428.750,00	100,03
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.483.862.000,00	61.436.351.940,00	(47.510.060,00)	99,92
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.167.250.000,00	1.430.574.321,00	(736.675.679,00)	66,01
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	306.340.000,00	297.750.063,00	(8.589.937,00)	97,20
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.319.620.000,00	3.307.420.000,00	(12.200.000,00)	99,63
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.323.690.000,00	1.323.690.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.272.607.000,00	22.108.085.456,00	(2.164.521.544,00)	91,08
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	0,00	(338.918.000,00)	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.927.475.000,00	4.794.125.304,00	(133.349.696,00)	97,29
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	417.482.653,00	(2.887.347,00)	99,31
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	991.160.000,00	977.853.000,00	(13.307.000,00)	98,66
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.400.000,00	388.358.000,00	(29.042.000,00)	93,04
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	229.205.100,00	(209.594.900,00)	52,23
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	774.800.000,00	650.419.400,00	(124.380.600,00)	83,95
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	0,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	(11.340.898.344,00)	84,42
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	(11.340.898.344,00)	84,42
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	(11.340.898.344,00)	84,42
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.291.521.446,00	14.291.521.446,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.910.739.159,00	7.910.739.159,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.386.081.685,00	16.119.562.836,00	(8.266.518.849,00)	66,10
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	403.579.824,00	403.579.824,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00	22.715.610.633,00	(3.074.379.495,00)	88,08
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.358.127.413,00	68.748.525.754,84	3.390.398.341,84	105,19
	JUMLAH BAGI HASIL	923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	(6.472.902.757,00)	99,30
	JUMLAH PENDAPATAN	988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	(3.082.504.415,16)	99,69



LAMPIRAN

2

PENDAPATAN DAERAH PER PERANGKAT DAERAH



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAP REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
Organisasi	1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
4	PENDAPATAN DAERAH	173.500.000,00	178.450.000,00	4.950.000,00	102,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.500.000,00	178.450.000,00	4.950.000,00	102,85
4.1.02	Retribusi Daerah	173.500.000,00	178.450.000,00	4.950.000,00	102,85
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	173.500.000,00	178.450.000,00	4.950.000,00	102,85
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	173.500.000,00	178.450.000,00	4.950.000,00	102,85
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	171.500.000,00	173.700.000,00	2.200.000,00	101,28
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.000.000,00	4.750.000,00	2.750.000,00	237,50
	Sub Jumlah	173.500.000,00	178.450.000,00	4.950.000,00	102,85
Organisasi	1-02.0-00.0-00.02.0000 Dinas Kesehatan				
4	PENDAPATAN DAERAH	15.996.838.432,00	15.642.216.143,00	(354.622.289,00)	97,78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.996.838.432,00	15.642.216.143,00	(354.622.289,00)	97,78
4.1.02	Retribusi Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.995.038.432,00	15.640.416.143,00	(354.622.289,00)	97,78
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	15.995.038.432,00	15.640.416.143,00	(354.622.289,00)	97,78
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	15.995.038.432,00	15.640.416.143,00	(354.622.289,00)	97,78
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	15.995.038.432,00	15.640.416.143,00	(354.622.289,00)	97,78
	Sub Jumlah	15.996.838.432,00	15.642.216.143,00	(354.622.289,00)	97,78
Organisasi	1-02.0-00.0-00.02.0001 RSUD Alimuddin Umar				
4	PENDAPATAN DAERAH	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	3.710.857.661,00	118,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	3.710.857.661,00	118,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	3.710.857.661,00	118,01
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	3.710.857.661,00	118,01
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	3.710.857.661,00	118,01
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	3.710.857.661,00	118,01
	Sub Jumlah	20.605.661.000,00	24.316.518.661,00	3.710.857.661,00	118,01
Organisasi	1-03.1-04.2-10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
4	PENDAPATAN DAERAH	322.000.000,00	324.732.728,00	2.732.728,00	100,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	322.000.000,00	324.732.728,00	2.732.728,00	100,85
4.1.02	Retribusi Daerah	322.000.000,00	324.732.728,00	2.732.728,00	100,85
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	122.000.000,00	122.150.000,00	150.000,00	100,12
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	122.000.000,00	122.150.000,00	150.000,00	100,12
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.800.000,00	10.950.000,00	150.000,00	101,39
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	100,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	202.582.728,00	2.582.728,00	101,29
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	202.582.728,00	2.582.728,00	101,29
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	202.582.728,00	2.582.728,00	101,29
	Sub Jumlah	322.000.000,00	324.732.728,00	2.732.728,00	100,85
Organisasi	2-11.0-00.0-00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup				
4	PENDAPATAN DAERAH	185.596.439,00	191.504.900,00	5.908.461,00	103,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.596.439,00	191.504.900,00	5.908.461,00	103,18
4.1.02	Retribusi Daerah	185.596.439,00	191.504.900,00	5.908.461,00	103,18
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	100.796.439,00	101.613.500,00	817.061,00	100,81
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.040.000,00	100.060.000,00	20.000,00	100,02
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.040.000,00	100.060.000,00	20.000,00	100,02
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	756.439,00	1.553.500,00	797.061,00	205,37
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	756.439,00	1.553.500,00	797.061,00	205,37
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	84.800.000,00	89.891.400,00	5.091.400,00	106,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	67.200.000,00	72.258.000,00	5.058.000,00	107,53
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	67.200.000,00	72.258.000,00	5.058.000,00	107,53
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.400.000,00	10.433.400,00	33.400,00	100,32
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	10.400.000,00	10.433.400,00	33.400,00	100,32
	Sub Jumlah	185.596.439,00	191.504.900,00	5.908.461,00	103,18

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
Organisasi	2-15.0-00.0-00.12.0000 Dinas Perhubungan				
4	PENDAPATAN DAERAH	163.968.000,00	164.868.000,00	900.000,00	100,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	163.968.000,00	164.868.000,00	900.000,00	100,55
4.1.02	Retribusi Daerah	163.968.000,00	164.868.000,00	900.000,00	100,55
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	133.020.000,00	130.520.000,00	(2.500.000,00)	98,12
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.020.000,00	75.520.000,00	(2.500.000,00)	96,80
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.020.000,00	75.520.000,00	(2.500.000,00)	96,80
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	30.948.000,00	34.348.000,00	3.400.000,00	110,99
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	150,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	150,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	22.848.000,00	25.348.000,00	2.500.000,00	110,94
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	22.848.000,00	25.348.000,00	2.500.000,00	110,94
	Sub Jumlah	163.968.000,00	164.868.000,00	900.000,00	100,55
Organisasi	2-16.2-20.2-21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika				
4	PENDAPATAN DAERAH	378.744.000,00	379.342.800,00	598.800,00	100,16
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	378.744.000,00	379.342.800,00	598.800,00	100,16
4.1.02	Retribusi Daerah	378.744.000,00	379.342.800,00	598.800,00	100,16
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	373.944.000,00	373.942.800,00	(1.200,00)	100,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.942.800,00	(1.200,00)	100,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	373.944.000,00	373.942.800,00	(1.200,00)	100,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	112,50
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	112,50
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	112,50
	Sub Jumlah	378.744.000,00	379.342.800,00	598.800,00	100,16
Organisasi	2-17.3-30.3-31.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
4	PENDAPATAN DAERAH	767.087.172,00	637.381.484,36	(129.705.687,64)	83,09
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	767.087.172,00	637.381.484,36	(129.705.687,64)	83,09
4.1.02	Retribusi Daerah	726.512.172,00	624.936.872,00	(101.575.300,00)	86,02
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	349.712.172,00	238.116.972,00	(111.595.200,00)	68,09
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	52.800.000,00	34.548.000,00	(18.252.000,00)	65,43
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	52.800.000,00	34.548.000,00	(18.252.000,00)	65,43
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	292.512.172,00	199.168.972,00	(93.343.200,00)	68,09
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	52.800.000,00	35.648.000,00	(17.152.000,00)	67,52
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	167.251.200,00	111.176.800,00	(56.074.400,00)	66,47
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	72.460.972,00	52.344.172,00	(20.116.800,00)	72,24
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	376.800.000,00	386.819.900,00	10.019.900,00	102,66
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00	5.700.000,00	300.000,00	105,56
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.400.000,00	5.700.000,00	300.000,00	105,56
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	359.400.000,00	369.046.400,00	9.646.400,00	102,68
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	359.400.000,00	369.046.400,00	9.646.400,00	102,68
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.000.000,00	12.073.500,00	73.500,00	100,61
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	12.000.000,00	12.073.500,00	73.500,00	100,61
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.575.000,00	12.444.612,36	(28.130.387,64)	30,67
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	(28.130.387,64)	30,67
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	(28.130.387,64)	30,67
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	12.444.612,36	(28.130.387,64)	30,67
	Sub Jumlah	767.087.172,00	637.381.484,36	(129.705.687,64)	83,09
Organisasi	2-19.3-26.0-00.16.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
4	PENDAPATAN DAERAH	133.400.000,00	100.419.000,00	(32.981.000,00)	75,28
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.400.000,00	100.419.000,00	(32.981.000,00)	75,28
4.1.02	Retribusi Daerah	133.400.000,00	100.419.000,00	(32.981.000,00)	75,28
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	133.400.000,00	100.419.000,00	(32.981.000,00)	75,28
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	122.150.000,00	88.894.000,00	(33.256.000,00)	72,77
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	122.150.000,00	88.894.000,00	(33.256.000,00)	72,77
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000,00	6.775.000,00	275.000,00	104,23
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000,00	6.775.000,00	275.000,00	104,23
	Sub Jumlah	133.400.000,00	100.419.000,00	(32.981.000,00)	75,28
Organisasi	3-25.0-00.0-00.18.0000 Dinas Perikanan				
4	PENDAPATAN DAERAH	89.750.000,00	89.809.000,00	59.000,00	100,07

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.750.000,00	89.809.000,00	59.000,00	100,07
4.1.02	Retribusi Daerah	89.750.000,00	89.809.000,00	59.000,00	100,07
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	22.550.000,00	22.609.000,00	59.000,00	100,26
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22.550.000,00	22.609.000,00	59.000,00	100,26
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	22.550.000,00	22.609.000,00	59.000,00	100,26
	Sub Jumlah	89.750.000,00	89.809.000,00	59.000,00	100,07
Organisasi	3-27.0-00.0-00.20.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan				
4	PENDAPATAN DAERAH	11.265.500,00	11.276.000,00	10.500,00	100,09
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.265.500,00	11.276.000,00	10.500,00	100,09
4.1.02	Retribusi Daerah	11.265.500,00	11.276.000,00	10.500,00	100,09
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.265.500,00	11.276.000,00	10.500,00	100,09
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.365.500,00	5.376.000,00	10.500,00	100,20
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.365.500,00	5.376.000,00	10.500,00	100,20
	Sub Jumlah	11.265.500,00	11.276.000,00	10.500,00	100,09
Organisasi	4-01.2-07.0-00.28.0000 Sekretariat Daerah				
4	PENDAPATAN DAERAH	48.200.000,00	53.350.000,00	5.150.000,00	110,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.200.000,00	53.350.000,00	5.150.000,00	110,68
4.1.02	Retribusi Daerah	48.200.000,00	53.350.000,00	5.150.000,00	110,68
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	48.200.000,00	53.350.000,00	5.150.000,00	110,68
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.200.000,00	53.350.000,00	5.150.000,00	110,68
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	37.200.000,00	39.350.000,00	2.150.000,00	105,78
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	11.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	127,27
	Sub Jumlah	48.200.000,00	53.350.000,00	5.150.000,00	110,68
Organisasi	5-02.0-00.0-00.22.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
4	PENDAPATAN DAERAH	950.042.697.637,00	943.746.335.048,48	(6.296.362.588,52)	99,34
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.482.116.870,00	26.658.657.038,48	176.540.168,48	100,67
4.1.01	Pajak Daerah	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	(132.122.312,00)	99,12
4.1.01.06	Pajak Hotel	137.313.200,00	153.554.250,00	16.241.050,00	111,83
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	109.713.200,00	130.386.070,00	20.672.870,00	118,84
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	109.713.200,00	130.386.070,00	20.672.870,00	118,84
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	27.600.000,00	23.168.180,00	(4.431.820,00)	83,94
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	27.600.000,00	23.168.180,00	(4.431.820,00)	83,94
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.021.667.241,00	1.712.757.842,00	(308.909.399,00)	84,72
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.905.867.241,00	1.603.699.829,00	(302.167.412,00)	84,15
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.905.867.241,00	1.603.699.829,00	(302.167.412,00)	84,15
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	99.420.000,00	89.536.453,00	(9.883.547,00)	90,06
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	99.420.000,00	89.536.453,00	(9.883.547,00)	90,06
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	16.380.000,00	19.521.560,00	3.141.560,00	119,18
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	16.380.000,00	19.521.560,00	3.141.560,00	119,18
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	113.606.437,00	158.057.616,00	44.451.179,00	139,13
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	107.756.437,00	153.057.616,00	45.301.179,00	142,04
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	107.756.437,00	153.057.616,00	45.301.179,00	142,04
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	5.000.000,00	(850.000,00)	85,47
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	5.000.000,00	(850.000,00)	85,47
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.618.355.316,00	7.653.132.882,00	34.777.566,00	100,46
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.618.355.316,00	7.653.132.882,00	34.777.566,00	100,46
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.618.355.316,00	7.653.132.882,00	34.777.566,00	100,46
4.1.01.11	Pajak Parkir	108.000.000,00	104.350.000,00	(3.650.000,00)	96,62
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	108.000.000,00	104.350.000,00	(3.650.000,00)	96,62
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	108.000.000,00	104.350.000,00	(3.650.000,00)	96,62
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.682.505.380,00	4.699.447.572,00	16.942.192,00	100,36
4.1.01.15.01	PBBP2	4.682.505.380,00	4.699.447.572,00	16.942.192,00	100,36
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.682.505.380,00	4.699.447.572,00	16.942.192,00	100,36
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas	300.000.000,00	368.025.100,00	68.025.100,00	122,68
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00	368.025.100,00	68.025.100,00	122,68
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00	368.025.100,00	68.025.100,00	122,68
4.1.02	Retribusi Daerah	168.945.000,00	185.139.500,00	16.194.500,00	109,59
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	168.945.000,00	185.139.500,00	16.194.500,00	109,59
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	168.945.000,00	185.139.500,00	16.194.500,00	109,59
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	90.900.000,00	98.350.000,00	7.450.000,00	108,20
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	72.045.000,00	79.789.500,00	7.744.500,00	110,75
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	116,67

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)		(Rp)	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	(0,05)	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.672.896.975,00	5.965.364.955,53	292.467.980,53	105,16
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	200.563.588,00	200.563.588,00	100,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	200.563.588,00	200.563.588,00	100,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	127.230.694,00	127.230.694,00	100,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	73.332.894,00	73.332.894,00	100,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	(166.929.149,54)	89,78
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	(166.929.149,54)	89,78
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.632.895.031,00	1.465.965.881,46	(166.929.149,54)	89,78
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	404.200.322,21	123,35
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	404.200.322,21	123,35
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.730.869.354,00	2.135.069.676,21	404.200.322,21	123,35
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.850.186.524,00	1.886.726.648,86	36.540.124,86	101,97
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.186.524,00	39.300.000,00	(60.886.524,00)	39,23
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.186.524,00	39.300.000,00	(60.886.524,00)	39,23
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.750.000.000,00	1.847.426.648,86	97.426.648,86	105,57
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.750.000.000,00	1.847.426.648,86	97.426.648,86	105,57
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.372.000,00	6.372.100,00	100,00	100,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	532.866,00	1.376.257,00	843.391,00	258,27
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	532.866,00	1.376.257,00	843.391,00	258,27
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	532.866,00	1.376.257,00	843.391,00	258,27
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	452.041.200,00	269.290.804,00	(182.750.396,00)	59,57
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000,00	264.069.435,00	(35.930.565,00)	88,02
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000,00	264.069.435,00	(35.930.565,00)	88,02
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	41.200,00	1.381.369,00	1.340.169,00	3.352,84
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	41.200,00	1.381.369,00	1.340.169,00	3.352,84
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	2.590.000,00	(147.410.000,00)	1,73
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	150.000.000,00	2.590.000,00	(147.410.000,00)	1,73
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	(6.472.902.757,00)	99,30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	850.778.668.525,00	855.646.664.112,00	4.867.995.587,00	100,57
4.2.01.01	Dana Perimbangan	727.115.074.525,00	731.983.070.112,00	4.867.995.587,00	100,67
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.470.929.525,00	23.567.092.474,00	4.096.162.949,00	121,04
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.923.733.142,00	6.089.005.142,00	4.165.272.000,00	316,52
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.580.135.674,00	4.580.135.674,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	167.793.417,00	167.793.417,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	180.635.188,00	111.526.137,00	(69.109.051,00)	61,74
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.456.819.873,00	7.456.819.873,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.083.850.360,00	3.083.850.360,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	253.164.497,00	253.164.497,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	69.384.010,00	69.384.010,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	256.911.153,00	256.911.153,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.498.502.211,00	1.498.502.211,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	509.628.682.000,00	514.643.114.814,00	5.014.432.814,00	100,98
4.2.01.01.02.0001	DAU	509.628.682.000,00	514.643.114.814,00	5.014.432.814,00	100,98
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.384.361.000,00	54.035.898.900,00	(348.462.100,00)	99,36
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.063.229.000,00	1.059.863.000,00	(3.366.000,00)	99,68
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.328.863.000,00	4.201.354.000,00	(127.509.000,00)	97,05
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.530.306.000,00	3.515.858.800,00	(14.447.200,00)	99,59

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	363.025.000,00	360.858.000,00	(2.167.000,00)	99,40
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	10.104.218.000,00	10.019.159.187,00	(85.058.813,00)	99,16
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.319.365.000,00	2.302.102.913,00	(17.262.087,00)	99,26
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	30.941.987.000,00	30.849.503.000,00	(92.484.000,00)	99,70
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.733.368.000,00	1.727.200.000,00	(6.168.000,00)	99,64
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	143.631.102.000,00	139.736.963.924,00	(3.894.138.076,00)	97,29
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	38.148.810.000,00	38.075.219.937,00	(73.590.063,00)	99,81
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.550.000.000,00	1.550.428.750,00	428.750,00	100,03
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.483.862.000,00	61.436.351.940,00	(47.510.060,00)	99,92
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.167.250.000,00	1.430.574.321,00	(736.675.679,00)	66,01
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	306.340.000,00	297.750.063,00	(8.589.937,00)	97,20
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.319.620.000,00	3.307.420.000,00	(12.200.000,00)	99,63
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.323.690.000,00	1.323.690.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.272.607.000,00	22.108.085.456,00	(2.164.521.544,00)	91,08
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	0,00	(338.918.000,00)	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.927.475.000,00	4.794.125.304,00	(133.349.696,00)	97,29
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	417.482.653,00	(2.887.347,00)	99,31
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	991.160.000,00	977.853.000,00	(13.307.000,00)	98,66
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000,00	388.358.000,00	(29.042.000,00)	93,04
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	229.205.100,00	(209.594.900,00)	52,23
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	774.800.000,00	650.419.400,00	(124.380.600,00)	83,95
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	5.893.114.000,00	5.893.114.000,00	0,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	(11.340.898.344,00)	84,42
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	(11.340.898.344,00)	84,42
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.781.912.242,00	61.441.013.898,00	(11.340.898.344,00)	84,42
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.291.521.446,00	14.291.521.446,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.910.739.159,00	7.910.739.159,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.386.081.685,00	16.119.562.836,00	(8.266.518.849,00)	66,10
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	403.579.824,00	403.579.824,00	0,00	100,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00	22.715.610.633,00	(3.074.379.495,00)	88,08
	Sub Jumlah	950.042.697.637,00	943.746.335.048,84	(6.296.362.588,52)	99,34
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		988.918.708.180,00	985.836.203.764,84	(3.082.504.415,16)	99,69



LAMPIRAN

3

BELANJA DAERAH



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78	(32.765.180.356,20)	(3,33)
5.1	BELANJA OPERASI	723.908.191.300,00	693.088.637.501,80	95,74	(30.819.553.798,20)	(4,45)
5.1.01	Belanja Pegawai	432.656.812.843,00	413.304.423.702,00	95,53	(19.352.389.141,00)	(4,68)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	298.058.750.456,00	283.508.613.917,00	95,12	(14.550.136.539,00)	(5,13)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	226.084.329.668,00	215.891.248.520,00	95,49	(10.193.081.148,00)	(4,72)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	197.418.404.564,00	192.141.748.920,00	97,33	(5.276.655.644,00)	(2,75)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	28.665.925.104,00	23.749.499.600,00	82,85	(4.916.425.504,00)	(20,70)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.767.292.168,00	20.397.429.855,00	93,71	(1.369.862.313,00)	(6,72)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.473.263.364,00	17.988.719.795,00	97,38	(484.543.569,00)	(2,69)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.294.028.804,00	2.408.710.060,00	73,12	(885.318.744,00)	(36,75)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.504.354.600,00	5.351.270.000,00	97,22	(153.084.600,00)	(2,86)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.504.354.600,00	5.351.270.000,00	97,22	(153.084.600,00)	(2,86)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.889.772.700,00	14.464.273.000,00	97,14	(425.499.700,00)	(2,94)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.889.772.700,00	14.464.273.000,00	97,14	(425.499.700,00)	(2,94)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.461.573.002,00	3.855.841.600,00	86,42	(605.731.402,00)	(15,71)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.413.345.200,00	2.358.861.600,00	97,74	(54.483.600,00)	(2,31)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.048.227.802,00	1.496.980.000,00	73,09	(551.247.802,00)	(36,82)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.953.693.324,00	12.549.951.480,00	96,88	(403.741.844,00)	(3,22)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.067.761.520,00	10.776.096.000,00	97,36	(291.665.520,00)	(2,71)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.885.931.804,00	1.773.855.480,00	94,06	(112.076.324,00)	(6,32)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	841.777.275,00	313.680.434,00	37,26	(528.096.841,00)	(168,36)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	322.222.605,00	313.680.434,00	97,35	(8.542.171,00)	(2,72)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	519.554.670,00	0,00	0,00	(519.554.670,00)	(100,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.262.201,00	3.132.796,00	96,03	(129.405,00)	(4,13)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.813.501,00	2.706.390,00	96,19	(107.111,00)	(3,96)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	448.700,00	426.406,00	95,03	(22.294,00)	(5,23)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.617.054.718,00	8.906.154.384,00	92,61	(710.900.334,00)	(7,98)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.647.531.992,00	7.953.605.237,00	91,98	(693.926.755,00)	(8,72)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	969.522.726,00	952.549.147,00	98,25	(16.973.579,00)	(1,78)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	548.449.411,00	444.177.956,00	80,99	(104.271.455,00)	(23,48)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	478.139.573,00	395.098.088,00	82,63	(83.041.485,00)	(21,02)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	70.309.838,00	49.079.868,00	69,81	(21.229.970,00)	(43,26)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.387.191.389,00	1.331.453.892,00	95,98	(55.737.497,00)	(4,19)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.202.317.867,00	1.184.214.276,00	98,49	(18.103.591,00)	(1,53)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	184.873.522,00	147.239.616,00	79,64	(37.633.906,00)	(25,56)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.067.344.167,00	47.410.671.776,00	94,69	(2.656.672.391,00)	(5,60)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	50.050.544.167,00	47.393.871.776,00	94,69	(2.656.672.391,00)	(5,61)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.614.394.167,00	46.961.946.776,00	94,65	(2.652.447.391,00)	(5,65)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	436.150.000,00	431.925.000,00	99,03	(4.225.000,00)	(0,98)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.388.884.000,00	66.759.299.747,00	97,62	(1.629.584.253,00)	(2,44)
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	61.483.862.000,00	60.231.760.240,00	97,96	(1.252.101.760,00)	(2,08)
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	61.483.862.000,00	60.231.760.240,00	97,96	(1.252.101.760,00)	(2,08)
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	306.340.000,00	282.931.800,00	92,36	(23.408.200,00)	(8,27)
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	306.340.000,00	282.931.800,00	92,36	(23.408.200,00)	(8,27)
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.167.250.000,00	1.846.900.000,00	85,22	(320.350.000,00)	(17,35)
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.167.250.000,00	1.846.900.000,00	85,22	(320.350.000,00)	(17,35)
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.535.392.000,00	2.534.925.547,00	99,98	(466.453,00)	(0,02)
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.535.392.000,00	2.534.925.547,00	99,98	(466.453,00)	(0,02)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.888.840.000,00	1.861.700.000,00	98,56	(27.140.000,00)	(1,46)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.885.730.000,00	1.861.020.000,00	98,69	(24.710.000,00)	(1,33)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	680.000,00	50,00	(680.000,00)	(100,00)
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.750.000,00	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000,00	1.082.160,00	15,03	(6.117.840,00)	(565,34)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000,00	1.082.160,00	15,03	(6.117.840,00)	(565,34)
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.428.733.300,00	14.021.178.262,00	97,18	(407.555.038,00)	(2,91)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	780.465.000,00	99,80	(1.575.000,00)	(0,20)
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	780.465.000,00	99,80	(1.575.000,00)	(0,20)
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	62.212.500,00	56,82	(47.273.100,00)	(75,99)
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	62.212.500,00	56,82	(47.273.100,00)	(75,99)
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00	89.511.120,00	73,57	(32.154.480,00)	(35,92)
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00	89.511.120,00	73,57	(32.154.480,00)	(35,92)
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	84.000.000,00	78.046.500,00	92,91	(5.953.500,00)	(7,63)
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	84.000.000,00	78.046.500,00	92,91	(5.953.500,00)	(7,63)
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.131.674.250,00	99,80	(2.283.750,00)	(0,20)
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.131.674.250,00	99,80	(2.283.750,00)	(0,20)
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	100.119.600,00	80,23	(24.664.500,00)	(24,64)
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	100.119.600,00	80,23	(24.664.500,00)	(24,64)
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.639.700.000,00	99,76	(6.300.000,00)	(0,24)
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.639.700.000,00	99,76	(6.300.000,00)	(0,24)
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	971.465,00	4,86	(19.028.535,00)	#####
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	971.465,00	4,86	(19.028.535,00)	#####
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.020.000.000,00	3.791.765.636,00	94,32	(228.234.364,00)	(6,02)
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	108.000.000,00	67.833.360,00	62,81	(40.166.640,00)	(59,21)
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	60.000.000,00	1.604.988,00	2,67	(58.395.012,00)	#####
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.000.000,00	4.814.964,00	40,12	(7.185.036,00)	(149,22)
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.840.000.000,00	3.717.512.324,00	96,81	(122.487.676,00)	(3,29)
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.685.300.000,00	4.672.612.191,00	99,73	(12.687.809,00)	(0,27)
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.685.300.000,00	4.672.612.191,00	99,73	(12.687.809,00)	(0,27)
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	12.600.000,00	63,00	(7.400.000,00)	(58,73)
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	12.600.000,00	63,00	(7.400.000,00)	(58,73)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	74.017.920,00	0,00	0,00	(74.017.920,00)	(100,00)
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	0,00	0,00	(55.965.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	0,00	0,00	(55.965.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000,00	0,00	0,00	(2.583.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000,00	0,00	0,00	(2.583.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	8.190.000,00	0,00	0,00	(8.190.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	8.190.000,00	0,00	0,00	(8.190.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.700,00	0,00	0,00	(3.117.700,00)	(100,00)
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.700,00	0,00	0,00	(3.117.700,00)	(100,00)
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	848.600,00	0,00	0,00	(848.600,00)	(100,00)
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	848.600,00	0,00	0,00	(848.600,00)	(100,00)
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.100,00	0,00	0,00	(2.100,00)	(100,00)
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.100,00	0,00	0,00	(2.100,00)	(100,00)
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.669.520,00	0,00	0,00	(2.669.520,00)	(100,00)
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.669.520,00	0,00	0,00	(2.669.520,00)	(100,00)
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	161.000,00	0,00	0,00	(161.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	161.000,00	0,00	0,00	(161.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	481.000,00	0,00	0,00	(481.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	481.000,00	0,00	0,00	(481.000,00)	(100,00)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	500.880.000,00	98,04	(10.000.000,00)	(2,00)
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	390.000.000,00	97,50	(10.000.000,00)	(2,56)
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	390.000.000,00	97,50	(10.000.000,00)	(2,56)
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.128.203.000,00	1.103.780.000,00	97,84	(24.423.000,00)	(2,21)
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.128.203.000,00	1.103.780.000,00	97,84	(24.423.000,00)	(2,21)
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.128.203.000,00	1.103.780.000,00	97,84	(24.423.000,00)	(2,21)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.637.081.677,00	243.673.449.949,80	95,69	(10.963.631.727,20)	(4,50)
5.1.02.01	Belanja Barang	53.870.442.808,00	51.501.649.037,00	95,60	(2.368.793.771,00)	(4,60)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.847.638.388,00	51.478.844.617,00	95,60	(2.368.793.771,00)	(4,60)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	948.992.538,00	937.504.570,00	98,79	(11.487.968,00)	(1,23)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	338.978.500,00	337.451.000,00	99,55	(1.527.500,00)	(0,45)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.622.775.715,00	1.439.343.438,00	88,70	(183.432.277,00)	(12,74)
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	18.169.368,00	18.135.000,00	99,81	(34.368,00)	(0,19)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	117.640.900,00	117.640.900,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	82.500.000,00	78.225.000,00	94,82	(4.275.000,00)	(5,47)
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	113.833.000,00	113.833.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.684.251.412,00	3.395.120.998,00	92,15	(289.130.414,00)	(8,52)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	125.635.000,00	100.400.000,00	79,91	(25.235.000,00)	(25,13)
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	125.587.494,00	123.860.764,00	98,63	(1.726.730,00)	(1,39)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	299.850.000,00	299.850.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	225.324.000,00	225.302.000,00	99,99	(22.000,00)	(0,01)
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.930.000,00	5.930.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	14.026.000,00	14.026.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.900.000,00	10.600.000,00	66,67	(5.300.000,00)	(50,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.154.495.050,00	2.132.264.000,00	98,97	(22.231.050,00)	(1,04)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.524.674.800,00	1.513.970.600,00	99,30	(10.704.200,00)	(0,71)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.828.755.433,00	7.598.738.715,00	97,06	(230.016.718,00)	(3,03)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	160.165.000,00	157.129.000,00	98,10	(3.036.000,00)	(1,93)
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	9.357.500,00	6.705.000,00	71,65	(2.652.500,00)	(39,56)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.399.533.000,00	1.378.418.750,00	98,49	(21.114.250,00)	(1,53)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	363.446.564,00	355.874.424,00	97,92	(7.572.140,00)	(2,13)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	566.818.970,00	566.506.650,00	99,94	(312.320,00)	(0,06)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.130.303.500,00	1.120.267.500,00	99,11	(10.036.000,00)	(0,90)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	930.000,00	930.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	199.173.000,00	199.173.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	620.360.416,00	619.445.660,00	99,85	(914.756,00)	(0,15)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.003.615.076,00	2.835.676.950,00	94,41	(167.938.126,00)	(5,92)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	26.022.000,00	26.022.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.112.775.224,00	7.638.029.765,00	94,15	(474.745.459,00)	(6,22)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.024.196.388,00	1.981.895.700,00	97,91	(42.300.688,00)	(2,13)
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	124.000,00	124.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.271.756.040,00	4.192.017.723,00	98,13	(79.738.317,00)	(1,90)
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	72.918.000,00	72.894.500,00	99,97	(23.500,00)	(0,03)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	20.926.000,00	20.926.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.113.045.000,00	8.701.143.010,00	95,48	(411.901.990,00)	(4,73)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.351.102.000,00	1.207.990.500,00	89,41	(143.111.500,00)	(11,85)
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	62.790.000,00	62.790.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	507.757.000,00	494.777.000,00	97,44	(12.980.000,00)	(2,62)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.437.602.000,00	1.248.161.500,00	86,82	(189.440.500,00)	(15,18)
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.035.000,00	9.900.000,00	98,65	(135.000,00)	(1,36)
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.500.000,00	14.300.000,00	98,62	(200.000,00)	(1,40)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.000.000,00	17.850.000,00	99,17	(150.000,00)	(0,84)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.600.000,00	5.400.000,00	96,43	(200.000,00)	(3,70)
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.017.500,00	4.950.000,00	98,65	(67.500,00)	(1,36)
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	12.950.000,00	12.950.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	(100.000,00)	(1,01)
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	22.804.420,00	22.804.420,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	12.895.440,00	12.895.440,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	408.980,00	408.980,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	77.472.955.756,00	72.198.260.770,00	93,19	(5.274.694.986,00)	(7,31)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.278.908.896,00	49.929.669.477,00	91,99	(4.349.239.419,00)	(8,71)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.926.250.000,00	1.885.510.000,00	97,89	(40.740.000,00)	(2,16)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	992.090.046,00	963.840.000,00	97,15	(28.250.046,00)	(2,93)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	178.200.000,00	178.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.094.550.000,00	5.088.500.000,00	99,88	(6.050.000,00)	(0,12)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	717.460.000,00	649.120.000,00	90,47	(68.340.000,00)	(10,53)
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	187.600.000,00	166.600.000,00	88,81	(21.000.000,00)	(12,61)
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	410.100.000,00	379.200.000,00	92,47	(30.900.000,00)	(8,15)
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.731.668.100,00	3.595.239.600,00	96,34	(136.428.500,00)	(3,79)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.653.081.000,00	5.976.550.000,00	78,09	(1.676.531.000,00)	(28,05)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.127.534.000,00	4.123.114.000,00	99,89	(4.420.000,00)	(0,11)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	152.400.000,00	152.400.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	160.080.000,00	160.080.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	191.175.000,00	191.164.915,00	99,99	(10.085,00)	(0,01)
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	585.400.000,00	545.700.000,00	93,22	(39.700.000,00)	(7,28)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	215.800.000,00	156.900.000,00	72,71	(58.900.000,00)	(37,54)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.384.450.000,00	2.357.400.000,00	98,87	(27.050.000,00)	(1,15)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.467.730.000,00	2.128.370.000,00	86,25	(339.360.000,00)	(15,94)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.153.980.000,00	1.093.940.000,00	94,80	(60.040.000,00)	(5,49)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.500.100.000,00	3.474.600.000,00	99,27	(25.500.000,00)	(0,73)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	450.600.000,00	450.600.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	25.000.000,00	24.790.587,00	99,16	(209.413,00)	(0,84)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	137.160.000,00	103.310.514,00	75,32	(33.849.486,00)	(32,76)
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	129.600.000,00	126.400.000,00	97,53	(3.200.000,00)	(2,53)
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33	(4.000.000,00)	(20,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	23.767.750,00	23.653.500,00	99,52	(114.250,00)	(0,48)
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	184.600.000,00	184.535.090,00	99,96	(64.910,00)	(0,04)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.418.200.000,00	5.368.029.000,00	99,07	(50.171.000,00)	(0,93)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	584.300.000,00	375.100.934,00	64,20	(209.199.066,00)	(55,77)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	251.250.000,00	174.046.416,00	69,27	(77.203.584,00)	(44,36)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.556.040.000,00	5.035.606.660,00	90,63	(520.433.340,00)	(10,34)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.109.645.000,00	2.031.045.000,00	96,27	(78.600.000,00)	(3,87)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.290.126.000,00	2.048.012.460,00	89,43	(242.113.540,00)	(11,82)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	112.449.000,00	48.802.000,00	43,40	(63.647.000,00)	(130,42)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	755.873.000,00	255.659.796,00	33,82	(500.213.204,00)	(195,66)
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	124.000.000,00	120.999.005,00	97,58	(3.000.995,00)	(2,48)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.410.561.120,00	11.748.723.654,00	94,67	(661.837.466,00)	(5,63)
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.330.489.720,00	1.867.147.778,00	80,12	(463.341.942,00)	(24,82)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.749.209.800,00	9.683.215.876,00	99,32	(65.993.924,00)	(0,68)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	147.053.633,00	103.360.020,00	70,29	(43.693.613,00)	(42,27)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	183.807.967,00	94.999.980,00	51,68	(88.807.987,00)	(93,48)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.073.538.740,00	1.993.321.500,00	96,13	(80.217.240,00)	(4,02)
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.120.828.740,00	1.061.604.000,00	94,72	(59.224.740,00)	(5,58)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	327.000.000,00	327.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	109.000.000,00	103.000.000,00	94,50	(6.000.000,00)	(5,83)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	69.410.000,00	69.217.500,00	99,72	(192.500,00)	(0,28)
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	262.200.000,00	260.150.000,00	99,22	(2.050.000,00)	(0,79)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0198	Belanja Sewa Very High Frequency Omni Range (VOR)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0246	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cokok Tanam	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50	(3.000.000,00)	(60,00)
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	7.500.000,00	3.000.000,00	40,00	(4.500.000,00)	(150,00)
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	8.750.000,00	3.500.000,00	40,00	(5.250.000,00)	(150,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.515.185.000,00	1.407.859.999,00	92,92	(107.325.001,00)	(7,62)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	51.600.000,00	46.600.000,00	90,31	(5.000.000,00)	(10,73)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	148.550.000,00	122.790.000,00	82,66	(25.760.000,00)	(20,98)
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	261.900.000,00	261.900.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	886.610.000,00	810.044.999,00	91,36	(76.565.001,00)	(9,45)
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.225.000,00	36.225.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	196.250.000,00	182.750.000,00	93,12	(13.500.000,00)	(7,39)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	161.750.000,00	148.250.000,00	91,65	(13.500.000,00)	(9,11)
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	652.686.000,00	639.186.400,00	97,93	(13.499.600,00)	(2,11)
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	141.750.000,00	141.105.600,00	99,55	(644.400,00)	(0,46)
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	252.495.000,00	251.336.800,00	99,54	(1.158.200,00)	(0,46)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	236.341.000,00	235.044.000,00	99,45	(1.297.000,00)	(0,55)
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	22.100.000,00	11.700.000,00	52,94	(10.400.000,00)	(88,89)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.229.060.000,00	3.207.483.740,00	99,33	(21.576.260,00)	(0,67)
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	65.000.000,00	64.500.000,00	99,23	(500.000,00)	(0,78)
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	84.740.000,00	83.520.000,00	98,56	(1.220.000,00)	(1,46)
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	600.000.000,00	597.230.500,00	99,54	(2.769.500,00)	(0,46)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	317.700.000,00	316.172.000,00	99,52	(1.528.000,00)	(0,48)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.161.620.000,00	2.146.061.240,00	99,28	(15.558.760,00)	(0,72)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.116.766.000,00	3.089.266.000,00	99,12	(27.500.000,00)	(0,89)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.960.876.000,00	2.933.376.000,00	99,07	(27.500.000,00)	(0,94)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	45.890.000,00	45.890.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.615.420.750,00	6.414.023.610,00	96,96	(201.397.140,00)	(3,14)
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	123.228.000,00	123.008.500,00	99,82	(219.500,00)	(0,18)
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	123.228.000,00	123.008.500,00	99,82	(219.500,00)	(0,18)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.507.486.750,00	5.309.928.862,00	96,41	(197.557.888,00)	(3,72)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	133.310.000,00	118.232.500,00	88,69	(15.077.500,00)	(12,75)
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	(2.000.000,00)	(50,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.826.932.000,00	3.733.318.365,00	97,55	(93.613.635,00)	(2,51)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	825.287.500,00	757.810.467,00	91,82	(67.477.033,00)	(8,90)
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	25.500.000,00	16.780.000,00	65,80	(8.720.000,00)	(51,97)
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	336.177.250,00	335.610.020,00	99,83	(567.230,00)	(0,17)
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	150.000,00	50,00	(150.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.950.000,00	27.800.000,00	99,46	(150.000,00)	(0,54)
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	25.400.000,00	22.280.000,00	87,72	(3.120.000,00)	(14,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	198.950.000,00	193.267.510,00	97,14	(5.682.490,00)	(2,94)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43.230.000,00	43.230.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	423.106.000,00	422.212.248,00	99,79	(893.752,00)	(0,21)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	348.806.000,00	347.925.748,00	99,75	(880.252,00)	(0,25)
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50.000.000,00	49.986.500,00	99,97	(13.500,00)	(0,03)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	24.300.000,00	24.300.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	561.600.000,00	558.874.000,00	99,51	(2.726.000,00)	(0,49)
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	561.600.000,00	558.874.000,00	99,51	(2.726.000,00)	(0,49)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.719.349.060,00	45.284.426.103,00	96,93	(1.434.922.957,00)	(3,17)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.719.349.060,00	45.284.426.103,00	96,93	(1.434.922.957,00)	(3,17)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.777.806.210,00	25.180.887.364,00	97,68	(596.918.846,00)	(2,37)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.911.774.650,00	7.516.032.835,00	95,00	(395.741.815,00)	(5,27)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.835.990.000,00	12.423.697.804,00	96,79	(412.292.196,00)	(3,32)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	193.778.200,00	163.808.100,00	84,53	(29.970.100,00)	(18,30)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.404.134.500,00	4.140.737.924,00	94,02	(263.396.576,00)	(6,36)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	861.780.000,00	681.341.388,00	79,06	(180.438.612,00)	(26,48)
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	354.750.000,00	284.350.000,00	80,16	(70.400.000,00)	(24,76)
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	507.030.000,00	396.991.388,00	78,30	(110.038.612,00)	(27,72)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.542.354.500,00	3.459.396.536,00	97,66	(82.957.964,00)	(2,40)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.201.974.500,00	3.176.594.536,00	99,21	(25.379.964,00)	(0,80)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	340.380.000,00	282.802.000,00	83,08	(57.578.000,00)	(20,36)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.342.960.990,00	28.653.558.146,00	97,65	(689.402.844,00)	(2,41)
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.342.960.990,00	28.653.558.146,00	97,65	(689.402.844,00)	(2,41)
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.342.960.990,00	28.653.558.146,00	97,65	(689.402.844,00)	(2,41)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.211.817.813,00	35.480.794.359,80	97,98	(731.023.453,20)	(2,06)
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.211.817.813,00	35.480.794.359,80	97,98	(731.023.453,20)	(2,06)
5.1.02.99.99.99999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.211.817.813,00	35.480.794.359,80	97,98	(731.023.453,20)	(2,06)
5.1.03	Belanja Bunga	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	(165.430.563,00)	(4,65)
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	(165.430.563,00)	(4,65)
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	(165.430.563,00)	(4,65)
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	(165.430.563,00)	(4,65)
5.1.05	Belanja Hibah	32.601.367.155,00	32.310.714.788,00	99,11	(290.652.367,00)	(0,90)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.926.040.883,00	15.696.934.716,00	98,56	(229.106.167,00)	(1,46)
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.700.479.971,00	15.473.389.371,00	98,55	(227.090.600,00)	(1,47)
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.700.479.971,00	15.473.389.371,00	98,55	(227.090.600,00)	(1,47)
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	225.560.912,00	223.545.345,00	99,11	(2.015.567,00)	(0,90)
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	225.560.912,00	223.545.345,00	99,11	(2.015.567,00)	(0,90)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.444.642.000,00	12.383.117.000,00	99,51	(61.525.000,00)	(0,50)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.896.252.000,00	6.886.252.000,00	99,85	(10.000.000,00)	(0,15)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.896.252.000,00	6.886.252.000,00	99,85	(10.000.000,00)	(0,15)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.571.390.000,00	4.529.865.000,00	99,09	(41.525.000,00)	(0,92)
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.571.390.000,00	4.529.865.000,00	99,09	(41.525.000,00)	(0,92)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	772.000.000,00	762.000.000,00	98,70	(10.000.000,00)	(1,31)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	772.000.000,00	762.000.000,00	98,70	(10.000.000,00)	(1,31)
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.559.430.000,00	3.559.408.800,00	100,00	(21.200,00)	(0,00)
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.559.430.000,00	3.559.408.800,00	100,00	(21.200,00)	(0,00)
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.559.430.000,00	3.559.408.800,00	100,00	(21.200,00)	(0,00)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.254.272,00	671.254.272,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.254.272,00	671.254.272,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.254.272,00	671.254.272,00	100,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	292.000.000,00	244.550.000,00	83,75	(47.450.000,00)	(19,40)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	120.000.000,00	74.550.000,00	62,13	(45.450.000,00)	(60,97)
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	75.000.000,00	74.550.000,00	99,40	(450.000,00)	(0,60)
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	75.000.000,00	74.550.000,00	99,40	(450.000,00)	(0,60)
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	172.000.000,00	170.000.000,00	98,84	(2.000.000,00)	(1,18)
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	172.000.000,00	170.000.000,00	98,84	(2.000.000,00)	(1,18)
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	172.000.000,00	170.000.000,00	98,84	(2.000.000,00)	(1,18)
5.2	BELANJA MODAL	118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91	(1.292.086.223,00)	(1,10)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.927.641.926,00	23.471.410.062,00	98,09	(456.231.864,00)	(1,94)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	460.799.160,00	458.363.052,00	99,47	(2.436.108,00)	(0,53)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	120.060.100,00	118.259.198,00	98,50	(1.800.902,00)	(1,52)
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	120.060.100,00	118.259.198,00	98,50	(1.800.902,00)	(1,52)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	340.739.060,00	340.103.854,00	99,81	(635.206,00)	(0,19)
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	250.000.000,00	249.400.000,00	99,76	(600.000,00)	(0,24)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	48.042.000,00	48.042.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	2.347.060,00	2.311.854,00	98,50	(35.206,00)	(1,52)
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	40.350.000,00	40.350.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.435.867.000,00	1.434.661.515,00	99,92	(1.205.485,00)	(0,08)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	983.368.000,00	982.800.000,00	99,94	(568.000,00)	(0,06)
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	728.368.000,00	727.800.000,00	99,92	(568.000,00)	(0,08)
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	255.000.000,00	255.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	452.499.000,00	451.861.515,00	99,86	(637.485,00)	(0,14)
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	450.000.000,00	449.400.000,00	99,87	(600.000,00)	(0,13)
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	2.499.000,00	2.461.515,00	98,50	(37.485,00)	(1,52)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	90.396.300,00	90.157.800,00	99,74	(238.500,00)	(0,26)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	73.050.000,00	72.981.000,00	99,91	(69.000,00)	(0,09)
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	51.600.000,00	51.531.000,00	99,87	(69.000,00)	(0,13)
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	13.223.300,00	13.094.300,00	99,02	(129.000,00)	(0,99)
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	11.800.000,00	11.671.000,00	98,91	(129.000,00)	(1,11)
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.423.300,00	1.423.300,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4.123.000,00	4.082.500,00	99,02	(40.500,00)	(0,99)
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.123.000,00	4.082.500,00	99,02	(40.500,00)	(0,99)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	709.733.500,00	701.119.000,00	98,79	(8.614.500,00)	(1,23)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	709.733.500,00	701.119.000,00	98,79	(8.614.500,00)	(1,23)
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.220.000,00	3.700.000,00	87,68	(520.000,00)	(14,05)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.152.000,00	1.152.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	664.361.500,00	656.267.000,00	98,78	(8.094.500,00)	(1,23)
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.854.780.190,00	10.807.051.982,00	99,56	(47.728.208,00)	(0,44)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	285.543.000,00	279.850.160,00	98,01	(5.692.840,00)	(2,03)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	102.087.000,00	99.270.000,00	97,24	(2.817.000,00)	(2,84)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	183.456.000,00	180.580.160,00	98,43	(2.875.840,00)	(1,59)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.327.188.190,00	10.291.266.322,00	99,65	(35.921.868,00)	(0,35)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.624.126.000,00	9.594.668.432,00	99,69	(29.457.568,00)	(0,31)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	23.635.400,00	19.630.400,00	83,06	(4.005.000,00)	(20,40)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.894.000,00	15.655.590,00	98,50	(238.410,00)	(1,52)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	263.332.890,00	261.477.000,00	99,30	(1.855.890,00)	(0,71)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	359.799.900,00	359.434.900,00	99,90	(365.000,00)	(0,10)
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	242.049.000,00	235.935.500,00	97,47	(6.113.500,00)	(2,59)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	97.550.000,00	93.084.500,00	95,42	(4.465.500,00)	(4,80)
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	7.881.000,00	98,51	(119.000,00)	(1,51)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	40.624.000,00	39.790.000,00	97,95	(834.000,00)	(2,10)
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	91.000.000,00	90.380.000,00	99,32	(620.000,00)	(0,69)
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.875.000,00	4.800.000,00	98,46	(75.000,00)	(1,56)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	631.622.749,00	627.822.499,00	99,40	(3.800.250,00)	(0,61)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	475.542.749,00	471.742.499,00	99,20	(3.800.250,00)	(0,81)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	133.547.749,00	132.999.999,00	99,59	(547.750,00)	(0,41)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	166.395.000,00	163.642.500,00	98,35	(2.752.500,00)	(1,68)
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	163.254.000,00	162.804.000,00	99,72	(450.000,00)	(0,28)
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	4.450.000,00	4.400.000,00	98,88	(50.000,00)	(1,14)
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	7.896.000,00	7.896.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	76.880.000,00	76.880.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	380.000,00	380.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.571.050.064,00	1.496.998.000,00	95,29	(74.052.064,00)	(4,95)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.571.050.064,00	1.496.998.000,00	95,29	(74.052.064,00)	(4,95)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	604.471.424,00	530.852.000,00	87,82	(73.619.424,00)	(13,87)
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	151.430.900,00	151.000.000,00	99,72	(430.900,00)	(0,29)
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.147.740,00	1.146.000,00	99,85	(1.740,00)	(0,15)
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	113.200.000,00	113.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	527.000.000,00	527.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	173.800.000,00	173.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	79.461.210,00	71.318.000,00	89,75	(8.143.210,00)	(11,42)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	52.136.250,00	44.000.000,00	84,39	(8.136.250,00)	(18,49)
5.2.02.08.01.0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	44.456.250,00	44.000.000,00	98,97	(456.250,00)	(1,04)
5.2.02.08.01.0039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik	7.680.000,00	0,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	20.925.000,00	20.925.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	20.925.000,00	20.925.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.399.960,00	6.393.000,00	99,89	(6.960,00)	(0,11)
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	6.399.960,00	6.393.000,00	99,89	(6.960,00)	(0,11)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.683.813.010,00	1.672.434.270,00	99,32	(11.378.740,00)	(0,68)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.430.948.000,00	1.423.255.050,00	99,46	(7.692.950,00)	(0,54)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	316.990.000,00	313.233.050,00	98,81	(3.756.950,00)	(1,20)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.108.108.000,00	1.104.172.000,00	99,64	(3.936.000,00)	(0,36)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	252.865.010,00	249.179.220,00	98,54	(3.685.790,00)	(1,48)
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	6.000.000,00	5.938.500,00	98,98	(61.500,00)	(1,04)
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	60.606.000,00	60.606.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.794.000,00	16.783.600,00	84,79	(3.010.400,00)	(17,94)
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	25.778.260,00	25.714.020,00	99,75	(64.240,00)	(0,25)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	140.686.750,00	140.137.100,00	99,61	(549.650,00)	(0,39)
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,00	24.780.750,00	99,12	(219.250,00)	(0,88)
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	25.000.000,00	24.780.750,00	99,12	(219.250,00)	(0,88)
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	25.000.000,00	24.780.750,00	99,12	(219.250,00)	(0,88)
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	94.530.000,00	93.542.000,00	98,95	(988.000,00)	(1,06)
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	94.530.000,00	93.542.000,00	98,95	(988.000,00)	(1,06)
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	94.530.000,00	93.542.000,00	98,95	(988.000,00)	(1,06)
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.950.264.000,00	3.922.690.700,00	99,30	(27.573.300,00)	(0,70)
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.950.264.000,00	3.922.690.700,00	99,30	(27.573.300,00)	(0,70)
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.950.264.000,00	3.922.690.700,00	99,30	(27.573.300,00)	(0,70)
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.330.324.743,00	2.060.470.494,00	88,42	(269.854.249,00)	(13,10)
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.330.324.743,00	2.060.470.494,00	88,42	(269.854.249,00)	(13,10)
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.330.324.743,00	2.060.470.494,00	88,42	(269.854.249,00)	(13,10)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27	(355.273.795,00)	(1,77)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.116.790.975,00	18.941.815.180,00	99,08	(174.975.795,00)	(0,92)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.080.810.975,00	18.905.915.180,00	99,08	(174.895.795,00)	(0,93)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.245.962.363,00	7.199.554.739,00	99,36	(46.407.624,00)	(0,64)
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.475.032.612,00	8.363.493.199,00	98,68	(111.539.413,00)	(1,33)
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	189.000.000,00	188.671.000,00	99,83	(329.000,00)	(0,17)
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	40.000.000,00	39.922.887,00	99,81	(77.113,00)	(0,19)
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	511.500.000,00	509.591.000,00	99,63	(1.909.000,00)	(0,37)
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	300.000.000,00	298.000.000,00	99,33	(2.000.000,00)	(0,67)
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	639.437.500,00	637.244.500,00	99,66	(2.193.000,00)	(0,34)
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.679.878.500,00	1.669.437.855,00	99,38	(10.440.645,00)	(0,63)
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	35.980.000,00	35.900.000,00	99,78	(80.000,00)	(0,22)
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	35.980.000,00	35.900.000,00	99,78	(80.000,00)	(0,22)
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	802.000.000,00	793.711.000,00	98,97	(8.289.000,00)	(1,04)
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	802.000.000,00	793.711.000,00	98,97	(8.289.000,00)	(1,04)
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.03.03.01.0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	702.000.000,00	693.711.000,00	98,82	(8.289.000,00)	(1,19)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	165.000.000,00	164.876.000,00	99,92	(124.000,00)	(0,08)
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	165.000.000,00	164.876.000,00	99,92	(124.000,00)	(0,08)
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagur	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	50.000.000,00	49.876.000,00	99,75	(124.000,00)	(0,25)
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	228.115.000,00	57,03	(171.885.000,00)	(75,35)
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	228.115.000,00	57,03	(171.885.000,00)	(75,35)
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	228.115.000,00	57,03	(171.885.000,00)	(75,35)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53	(319.906.199,00)	(0,47)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	52.088.556.469,00	51.861.640.721,00	99,56	(226.915.748,00)	(0,44)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	49.769.556.469,00	49.555.278.801,00	99,57	(214.277.668,00)	(0,43)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.891.027.976,00	42.696.865.256,00	99,55	(194.162.720,00)	(0,45)
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	6.128.528.493,00	6.113.518.482,00	99,76	(15.010.011,00)	(0,25)
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	740.000.000,00	744.895.063,00	99,32	(5.104.937,00)	(0,69)
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.319.000.000,00	2.306.361.920,00	99,46	(12.638.080,00)	(0,55)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.319.000.000,00	2.306.361.920,00	99,46	(12.638.080,00)	(0,55)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.649.516.475,00	15.556.526.024,00	99,41	(92.990.451,00)	(0,60)
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.127.619.500,00	3.103.583.000,00	99,23	(24.036.500,00)	(0,77)
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.127.619.500,00	3.103.583.000,00	99,23	(24.036.500,00)	(0,77)
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.354.391.000,00	12.286.443.024,00	99,45	(67.947.976,00)	(0,55)
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	461.384.000,00	459.652.311,00	99,62	(1.731.689,00)	(0,38)
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	11.893.007.000,00	11.826.790.713,00	99,44	(66.216.287,00)	(0,56)
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	167.505.975,00	166.500.000,00	99,40	(1.005.975,00)	(0,60)
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	167.505.975,00	166.500.000,00	99,40	(1.005.975,00)	(0,60)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.995.006.510,00	5.836.651.645,00	97,36	(158.354.865,00)	(2,71)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.061.101.500,00	921.224.500,00	86,82	(139.877.000,00)	(15,18)
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.014.601.500,00	876.491.500,00	86,39	(138.110.000,00)	(15,76)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	937.288.500,00	799.178.500,00	85,26	(138.110.000,00)	(17,28)
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	4.007.500,00	4.007.500,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	29.007.500,00	29.007.500,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	18.946.500,00	18.946.500,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	18.096.500,00	18.096.500,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	3.735.000,00	3.735.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	7.500.000,00	6.105.000,00	81,40	(1.395.000,00)	(22,85)
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	7.500.000,00	6.105.000,00	81,40	(1.395.000,00)	(22,85)
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	39.000.000,00	38.628.000,00	99,05	(372.000,00)	(0,96)
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	39.000.000,00	38.628.000,00	99,05	(372.000,00)	(0,96)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.351.100,00	498.094.035,00	99,55	(2.257.065,00)	(0,45)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	500.351.100,00	498.094.035,00	99,55	(2.257.065,00)	(0,45)
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	5.351.100,00	5.270.835,00	98,50	(80.265,00)	(1,52)
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	495.000.000,00	492.823.200,00	99,56	(2.176.800,00)	(0,44)
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.433.553.910,00	4.417.333.110,00	99,63	(16.220.800,00)	(0,37)
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.433.553.910,00	4.417.333.110,00	99,63	(16.220.800,00)	(0,37)
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.433.553.910,00	4.417.333.110,00	99,63	(16.220.800,00)	(0,37)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	(1,52)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	(1,52)
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	(1,52)
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	(2.319.500,00)	(1,52)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	(6,96)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	(6,96)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	(6,96)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	(6,96)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	(105.009.535,00)	(6,96)
5.4	BELANJA TRANSFER	173.353.540.200,00	172.805.009.400,00	99,68	(548.530.800,00)	(0,32)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.183.360.200,00	1.634.829.400,00	74,88	(548.530.800,00)	(33,55)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.846.691.600,00	1.407.134.300,00	76,20	(439.557.300,00)	(31,24)
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.846.691.600,00	1.407.134.300,00	76,20	(439.557.300,00)	(31,24)
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.846.691.600,00	1.407.134.300,00	76,20	(439.557.300,00)	(31,24)
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	336.668.600,00	227.695.100,00	67,63	(108.973.500,00)	(47,86)
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	336.668.600,00	227.695.100,00	67,63	(108.973.500,00)	(47,86)
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	336.668.600,00	227.695.100,00	67,63	(108.973.500,00)	(47,86)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	0,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	0,00	0,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	0,00	0,00



LAMPIRAN

4

BELANJA BUNGA



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**REKAP PEMBAYARAN BUNGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TANGGAL	NOMOR SP2D	KODE REKENING	URAIAN	BUNGA			
					BUNGA	BIAYA ADMINISTRASI BANK	DENDA	JUMLAH
1	24/01/2023	12.01/04.0/000002/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/M/1/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	342.045.030,00	30.000,00		342.075.030,00
2	20-Feb-23	12.01/02.0/000020/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/M/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	334.767.476,00	2.900,00		334.770.376,00
3	21-Mar-23	12.01/04.0/000035/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/M/3/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	295.797.348,00	2.900,00		295.800.248,00
4	14-Apr-23	12.01/04.0/000049/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/4/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	320.212.367,00	2.900,00		320.215.267,00
5	23-May-23	12.01/04.0/000191/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/5/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	302.840.142,00	2.900,00		302.843.042,00
6	21-Jun-23	12.01/04.0/000212/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/6/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	305.657.259,00	2.900,00		305.660.159,00
7	24-Jul-23	12.01/04.0/000358/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/7/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	288.754.553,00	2.900,00		288.757.453,00
8	10-Aug-23	12.01/04.0/000371/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/8/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	291.102.150,00	2.900,00		291.105.050,00
9	22-Sep-23	12.01/04.0/000476/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/9/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	283.824.596,00	2.900,00		283.827.496,00
10	24-Oct-23	12.01/04.0/000531/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/10/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	267.626.170,00	2.900,00		267.629.070,00
11	21-Nov-23	12.01/04.0/000565/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	269.269.489,00	2.900,00		269.272.389,00
12	20-Dec-23	12.01/04.0/000701/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	253.540.582,00	2.900,00		253.543.482,00
				Sub Jumlah	3.555.437.162,00	61.900,00	-	3.555.499.062,00



LAMPIRAN

5

BELANJA HIBAH



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN	REALISASI
32.601.367.155,00	32.310.714.788,00

I	5.1.05.01	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	15.926.040.883,00	15.696.934.716,00
	5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		
	5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		
	5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	12.01/04.0/000044/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/16/2023	KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	200.000.000,00	200.000.000,00
2	12.01/04.0/000048/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Polres Lampung Barat	350.000.000,00	350.000.000,00
3	12.01/04.0/000060/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.02/8/2023	POLDA LAMPUNG	300.000.000,00	300.000.000,00
4	12.01/04.0/000061/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.02/8/2023	POLRES LAMPUNG BARAT (POLISI CILIK)	70.000.000,00	70.000.000,00
5	12.01/04.0/000077/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.03/12/2023	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LAMPUNG BARAT	9.188.133.371,00	8.961.042.771,00
6	12.01/04.0/000078/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.03/12/2023	BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	5.592.346.600,00	5.592.346.600,00
		Sub Jumlah	15.700.479.971,00	15.473.389.371,00
		JUMLAH	15.700.479.971,00	15.473.389.371,00

5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS KESEHATAN			
		Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)	81.350.687,00	
		Sub kegiatan Pengadaan Alat kesehatan /Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan		
1	12.01/04.0/000166/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		5.850.000,00
2	12.01/04.0/000165/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		1.300.000,00
3	12.01/04.0/000164/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		1.700.000,00
4	12.01/04.0/000185/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		18.795.720,00
5	12.01/04.0/000183/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		364.000,00
6	12.01/04.0/000182/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		838.000,00
7	12.01/04.0/000181/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		1.840.400,00
8	12.01/04.0/000180/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		42.055.000,00
9	12.01/04.0/000206/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		7.000.000,00
10	12.01/04.0/000213/L/S/1.02.0.00.0.0.00.26.0000/P.01/17/2023	Belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Alkes ke Polres)		580.000,00
		Sub Jumlah	81.350.687,00	80.323.120,00
B	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	12.01/04.0/000050/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/17/2023	PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA	20.000.000,00	19.300.000,00
2	12.01/04.0/000051/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/17/2023	PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA	9.000.000,00	9.000.000,00
3	12.01/04.0/000054/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/17/2023	KEJAKSAAN NEGERI LIWA	74.978.000,00	74.690.000,00
4	12.01/04.0/000054/L/S/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.03/11/2023	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN LAMPUNG BARAT	40.232.225,00	40.232.225,00
		Sub Jumlah	144.210.225,00	143.222.225,00
		JUMLAH	225.560.912,00	223.545.345,00

II	5.1.05.05	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA	12.444.642.000,00	12.383.117.000,00
-----------	------------------	---	--------------------------	--------------------------

5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan pendidikan Sekolah Dasar		
1	No.12.01/04.0/000406/L/S/1.01.2.2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Hibah Kemenag Insentif Pendidik dan Tenaga kependidikan Jenjang MI Bulan Januari-Juni, Sub Keg. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan pendidikan Sekolah Dasar	90.000.000,00	45.000.000,00
2	No.12.01/04.0/000981/L/S/1.01.2.2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Hibah Kemenag Insentif Pendidik dan Tenaga kependidikan Jenjang MI Bulan Juli-Desember, Sub Keg. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan pendidikan Sekolah Dasar		45.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
3	No.12.01/04.0/000407/L/S/1.01.2.2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Hibah Kemenag Insentif Pendidik dan Tenaga kependidikan Jenjang MTs Bulan Januari-Juni, Sub Keg. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.000.000,00	45.000.000,00
4	No.12.01/04.0/000980/L/S/1.01.2.2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Hibah Kemenag Insentif Pendidik dan Tenaga kependidikan Jenjang MTs Bulan Juli-Desember, Sub Keg. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		45.000.000,00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD		
5		KB KENCANA INDAH	3.660.000,00	3.660.000,00
6		TK NUSANTARA	14.640.000,00	14.640.000,00
7		KB KARTINI G. SURIAN	9.150.000,00	9.150.000,00
8		KB SINAR CIPTA	10.370.000,00	10.370.000,00
9		KB TUNAS BANGSA	10.980.000,00	10.980.000,00
10		KB HARAPAN BANGSA	15.860.000,00	15.860.000,00
11		TK ISLAM ALIF	30.500.000,00	30.500.000,00
12		KB TUNAS MEKAR	18.300.000,00	18.300.000,00
13		KB ALBAROKAH	17.080.000,00	17.080.000,00
14		TK ISLAM DARUL QOLAM	18.910.000,00	18.910.000,00
15		KB MUTIARA BUNDA	16.470.000,00	16.470.000,00
16		KB MUTIARA BUNDA LUMBOK	10.370.000,00	10.370.000,00
17		KB HIDRO SMART	26.230.000,00	26.230.000,00
18		TK NURUL IMAN	10.980.000,00	10.980.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
19		TK BUDI ASIH	17.690.000,00	17.690.000,00
20		KB KASIH BUNDA AN NUR	10.980.000,00	10.980.000,00
21		TK MAZAYATUL INSAAN	14.640.000,00	14.640.000,00
22		KB BUNDA NUR	14.030.000,00	14.030.000,00
23		TK DEWI SARTIKA	18.300.000,00	18.300.000,00
24		TK MIFTAH ALISTIQLALIYAH	15.250.000,00	15.250.000,00
25		KB DARMA PERTIWI SIDODADI	20.130.000,00	20.130.000,00
26		TK MUTIARA YALIMA	23.790.000,00	23.790.000,00
27		SPS HARAPAN BANGSA	6.100.000,00	6.100.000,00
28		KB MIFTAHUL HUDA	20.130.000,00	20.130.000,00
29		KB MUTIARA	15.250.000,00	15.250.000,00
30		TK MUTIARA BUNDA	31.720.000,00	31.720.000,00
31		KB ISLAM ALIF	12.200.000,00	12.200.000,00
32		KB TUNAS HARAPAN	17.080.000,00	17.080.000,00
33		KB AL HIDAYAH SEKINCAU	25.620.000,00	25.620.000,00
34		TK NURUL ISLAM	69.540.000,00	69.540.000,00
35		KB MULIA LESTARI	11.590.000,00	11.590.000,00
36		TK BHAKTI MULYA TUGU RATU	29.890.000,00	29.890.000,00
37		TK ALMAARIF SUMBER AGUNG	28.670.000,00	28.670.000,00
38		TK KARTINI	21.350.000,00	21.350.000,00
39		TK CITRA DHARMA FAJAR BULAN	12.200.000,00	12.200.000,00
40		TK BHAKTI KARTIKA	29.280.000,00	29.280.000,00
41		TK DHARMA WANITA TRIMULYO	26.230.000,00	26.230.000,00
42		TK ISLAM NURUL HUDA	51.850.000,00	51.850.000,00
43		TK ACITYA INDRU	27.450.000,00	27.450.000,00
44		KB AZ ZAHRA	28.670.000,00	28.670.000,00
45		KB DHARMA WANITA	35.990.000,00	35.990.000,00
46		SPS BUNDA	18.910.000,00	18.910.000,00
47		KB KARTINI	17.080.000,00	17.080.000,00
48		TK DHARMA WANITA BAHWAY	18.910.000,00	18.910.000,00
49		KB MAZAYATUL INSAAN	6.710.000,00	6.710.000,00
50		KB AL HUDA	28.670.000,00	28.670.000,00
51		TK MIFTAHUL ULUM	13.420.000,00	13.420.000,00
52		TK AL HIDAYAH	15.250.000,00	15.250.000,00
53		KB HARAPAN BANGSA K.TEBU	12.810.000,00	12.810.000,00
54		KB CEMARA	23.790.000,00	23.790.000,00
55		KB MUTIARA BUNDA	21.350.000,00	21.350.000,00
56		TK AL HIDAYAH	28.060.000,00	28.060.000,00
57		KB IT AR RAUDHOH	3.050.000,00	3.050.000,00
58		TK ISLAM MUTIARA BUNDA	24.400.000,00	24.400.000,00
59		TK TUNAS NUSANTARA	42.700.000,00	42.700.000,00
60		TK ANAK BANGSA	12.200.000,00	12.200.000,00
61		TK BUNDA NUR	18.300.000,00	18.300.000,00
62		KB HARAPAN IBU	11.590.000,00	11.590.000,00
63		SPS KASIH IBU	14.640.000,00	14.640.000,00
64		TK BANU ISMAIL	23.790.000,00	23.790.000,00
65		KB AL MUTTAQIN	25.620.000,00	25.620.000,00
66		KB SEHAT CERIA	18.910.000,00	18.910.000,00
67		KB RAMADHAN	30.500.000,00	30.500.000,00
68		KB TAMAN INSANI	26.230.000,00	26.230.000,00
69		TK ISLAM IQRO	28.060.000,00	28.060.000,00
70		TK RUMAH QURAN	12.200.000,00	12.200.000,00
71		TK TUNAS BANGSA	12.200.000,00	12.200.000,00
72		TK IT KHOIRU UMMAH	32.330.000,00	32.330.000,00
73		TK PRAJA KASIH BUNDA	17.080.000,00	17.080.000,00
74		KB MAYA PUTRA	29.280.000,00	29.280.000,00
75		TK SAKINAH	14.640.000,00	14.640.000,00
76		TK HARAPAN IBU	7.320.000,00	7.320.000,00
77		TK CENDIKIA	7.320.000,00	7.320.000,00
78		TK PERMATA BUNDA 2	32.940.000,00	32.940.000,00
79		KB KESUMA MULYA	8.540.000,00	8.540.000,00
80		TK IT AR RAUDHOH	32.940.000,00	32.940.000,00
81		KB RUMAH QURAN	12.810.000,00	12.810.000,00
82		TK TARBIYATUL ISLAMI	13.420.000,00	13.420.000,00
83		TK BHAKTI SINAR PERSADA	22.570.000,00	22.570.000,00
84		TK ISLAM MAMBAUL ULUM SIDODADI	12.200.000,00	12.200.000,00
85		TK DARMA WANITA PURAJAYA	43.920.000,00	43.920.000,00
86		TK GELORA MEKAR	28.060.000,00	28.060.000,00
87		TK ANGGUN	17.690.000,00	17.690.000,00
88		TK AZ ZAHRA GEDUNG SURIAN	17.690.000,00	17.690.000,00
89		TK SIMPANG LUAS	30.500.000,00	30.500.000,00
90		TK KARTIKA 11-42	24.400.000,00	24.400.000,00
91		TK PERTIWI AIR HITAM	19.520.000,00	19.520.000,00
92		TK AL HUDA	25.620.000,00	25.620.000,00
93		KB DHARMA PERTIWI	26.230.000,00	26.230.000,00
94		KB AL HIDAYAH BALIK BUKIT	15.860.000,00	15.860.000,00
95		KB ANAK BANGSA	12.810.000,00	12.810.000,00
96		TK TUNAS BANGSA	15.860.000,00	15.860.000,00
97		KB KASIH BUNDA	12.810.000,00	12.810.000,00
98		TK KETILANG BEDUDU	14.030.000,00	14.030.000,00
99		TK ISLAM AZ ZAHRA	31.720.000,00	31.720.000,00
100		SPS PERINTIS TUNAS BANGSA	20.130.000,00	20.130.000,00
101		KB NUSA INDAH	14.030.000,00	14.030.000,00
102		TK HARAPAN BANGSA B.KETULIS	15.860.000,00	15.860.000,00
103		KB ACITYA INDRU	7.320.000,00	7.320.000,00
104		TK KARTINI G. SURIAN	26.230.000,00	26.230.000,00
105		TK SATU ATAP PURAJAYA	9.760.000,00	9.760.000,00
106		KB PRAJA KASIH BUNDA	18.910.000,00	18.910.000,00
107		SPS AL IKHLAS	12.810.000,00	12.810.000,00
108		TK AMANDA	18.910.000,00	18.910.000,00
109		TK DW ARGOMULYO	10.980.000,00	10.980.000,00
110		TK SATU ATAP AN NUR PADANG TAMBAK	18.910.000,00	18.910.000,00
111		TK SIDOMAKMUR	10.980.000,00	10.980.000,00
112		KB KASIH IBU	7.320.000,00	7.320.000,00
113		TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	54.900.000,00	54.900.000,00
114		TK SAI BETIK	41.480.000,00	41.480.000,00
115		TK SARTIKA TEMBELANG	8.540.000,00	8.540.000,00
116		KB PERMATA BUNDA	16.470.000,00	16.470.000,00
117		SPS KASIH BUNDA	35.380.000,00	35.380.000,00
118		TK SATU ATAP RUA JURAI	30.500.000,00	30.500.000,00
119		TK DW SIMPANG SARI	22.570.000,00	22.570.000,00
120		TK KARTIKA GUNUNG RATU	6.710.000,00	6.710.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
121		TK HARAPAN BANGSA K.TEBU	24.400.000,00	24.400.000,00
122		TK HARAPAN BUNDA	35.990.000,00	35.990.000,00
123		TK MIFTAHUL HUDA	14.640.000,00	14.640.000,00
124		TK DHARMA WANITA	39.040.000,00	39.040.000,00
125		TK DARMA PERTIWI	12.810.000,00	12.810.000,00
126		TK AISYAH MARGA JAYA	23.790.000,00	23.790.000,00
127		TK BANDA MULYA	15.250.000,00	15.250.000,00
128		KB TUNAS HARAPAN PAGAR DEWA	24.400.000,00	24.400.000,00
129		KB RIYADHUL JANNAH	22.570.000,00	22.570.000,00
130		TK MABAR JAYA	9.150.000,00	9.150.000,00
131		TK TUNAS MANDIRI	25.620.000,00	25.620.000,00
132		TPA ISLAM IQRO	12.200.000,00	12.200.000,00
133		TK DW PERSATUAN	18.300.000,00	18.300.000,00
134		SPS TUNAS MANDIRI	9.150.000,00	9.150.000,00
135		KB SINAR MULYA	12.200.000,00	12.200.000,00
136		TK DHARMA WJAYA	7.320.000,00	7.320.000,00
137		TK IT SABILUL HIDAYAH	22.570.000,00	22.570.000,00
138		TK NUSA INDAH	12.810.000,00	12.810.000,00
139		TK IT DAR EL FATH SCHOOL	4.880.000,00	4.880.000,00
140		KB BUDI ASIH	5.490.000,00	5.490.000,00
141		TK PERINTIS TUNAS BANGSA	16.470.000,00	16.470.000,00
142		TK PERMATA BUNDA 3	28.670.000,00	28.670.000,00
143		TK HARAPAN MEKAR	7.320.000,00	7.320.000,00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
		BOP Reguler		
144		PKBM BUAY NYERUPA	296.650.000,00	296.650.000,00
145		PKBM SETIA BUDI	59.720.000,00	59.720.000,00
146		PKBM BUNGA TANJUNG	205.380.000,00	205.380.000,00
147		PKBM HARAPAN BANGSA	110.070.000,00	110.070.000,00
148		PKBM MAJU BERSAMA	135.840.000,00	135.840.000,00
149		PKBM INSAN MANDIRI	109.660.000,00	109.660.000,00
150		PKBM KARYA MAJU	19.710.000,00	19.710.000,00
151		PKBM ARRIZQI BINA BERSAMA	5.460.000,00	5.460.000,00
152		PONPES AL- HASYIMIYAH	23.040.000,00	23.040.000,00
		BOP Kinerja		
153		PKBM HARAPAN BANGSA	45.000.000,00	45.000.000,00
154		PKBM MAJU BERSAMA	45.000.000,00	45.000.000,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
155	No.12.01/04.0/000003/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/03/2023	Belanja Hibah Kepada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Beghak Kepaksian Pernong dalam rangka Festival Adat Keraton Nusanlara , Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	125.000.000,00	125.000.000,00
156	No.12.01/04.0/000013/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Kepada Sekretariat Gedung Dalam Kepaksian Pernong , Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	190.000.000,00	50.000.000,00
157	No.12.01/04.0/000741/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/11/2023	Hibah Uang Kepada Sekretariat Kepaksian Pernong, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		140.000.000,00
158	No.12.01/04.0/000014/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Kepada Anjau Silau (Kepaksian Pernong) , Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	150.000.000,00	150.000.000,00
159	No.12.01/04.0/000015/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Kepada Pagelaran Kesenian (Kepaksian Pernong) , Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	35.000.000,00	35.000.000,00
160	No.12.01/04.0/000015/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Kepada Operasional Sekretariat (Kepaksian Pernong), Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	20.000.000,00	20.000.000,00
161	No.12.01/04.0/000029/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Operasional Kepaksian Buay Nyerupa, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	20.000.000,00	20.000.000,00
162	No.12.01/04.0/000030/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Operasional Kepaksian Buay Belunguh, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	20.000.000,00	20.000.000,00
163	No.12.01/04.0/000031/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Anjau Silau Kepaksian Buay Belunguh, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	25.000.000,00	25.000.000,00
164	No.12.01/04.0/000277/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah Kepada Marga Liwa, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	20.000.000,00	20.000.000,00
165	No.12.01/04.0/000481/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Operasional Kepaksian Bejalan Di Way, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	20.000.000,00	20.000.000,00
166	No.12.01/04.0/000482/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Anjau Silau Kepaksian Bejalan Di Way, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	25.000.000,00	25.000.000,00
167	No.12.01/04.0/000610/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Hibah Uang Kepada Anjau Silau Kepaksian Buay Nyerupa, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	25.000.000,00	25.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
168	No.12.01/04.0/000016/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Kepada Sanggar Setiwang, Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	125.000.000,00	75.000.000,00
169	No.12.01/04.0/000740/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/11/2023	Hibah Uang Kepada Sanggar Seni Setiwang, Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		50.000.000,00
170	No.12.01/04.0/000028/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAI), Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00
171	No.12.01/04.0/000561/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Belanja Hibah Lembaga Seni dan Qasidah (LASQI), Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	40.000.000,00	40.000.000,00
172	No.12.01/04.0/000777/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Hibah Uang Kepada Sanggar Way Spuga, Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00
173		Kesenian Kuda Kepang Wahyu Suranoga Asih	5.000.000,00	
174		Sanggar Kesenian Wawang Chandra Kirana	5.000.000,00	
		Sub Jumlah	4.855.350.000,00	4.845.350.000,00
B	DINAS KESEHATAN			
1	12.01/04.0/000037/LS/1.02.0.00.0.0	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.000.000,00	20.000.000,00
2	12.01/04.0/000021/LS/1.02.0.00.0.0	Diterima dan dibayar SP2D L\$Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Lembaga Organisasi Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.000.000,00	30.000.000,00
3	12.01/04.0/000136/LS/1.02.0.00.0.0	Diterima dan di bayar Sp2d Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Lembaga organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	50.000.000,00	50.000.000,00
		Sub Jumlah	100.000.000,00	100.000.000,00
C	DINAS SOSIAL			
1	12.01.04/00028/LS/1.06.0.0.00/05/000/P.01/08/2022	Hibah diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Lampung Barat	100.000.000,00	100.000.000,00
2	12.01/04.0/000026/LS/1.06.0.00.0.00.05.0000/P.02/9/2023	Hibah diberikan kepada PEPABRI	15.000.000,00	15.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
3	12.01/04.0/000025/LS/1.06.0.00.0.00.05.0000/P.02/9/2023	Hibah diberikan kepada LVRI	15.000.000,00	15.000.000,00
Sub Jumlah			130.000.000,00	130.000.000,00
D	DINAS PMP			
1	12.01/04.0/000023/LS/2.13.0.00.0.00.10.0000/P.02/8/2023	Belanja Hibah Uang Kepada HIBAH DPD LPM KABUPATEN LAMPUNG BARAT	50.000.000,00	50.000.000,00
Sub Jumlah			50.000.000,00	50.000.000,00
E	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	12.01/04.0/00003/LS/2.17.3.30.3.3.1.14.0000/M/2/2023	Hibah Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Sub. Kegiatan Koordinasi, Sikronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	130.000.000,00	130.000.000,00
2	12.01/04.0/000012/LS/2.17.3.30.3.3.1.14.0000/P.01/4/2023	Hibah Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Sub. Kegiatan Koordinasi, Sikronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00
3	12.01/04.0/000051/LS/2.17.3.30.3.3.1.14.0000/P.03/11/2023	Hibah Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Sub. Kegiatan Koordinasi, Sikronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00
4	12.01/04.0/000031/LS/2.17.3.30.3.3.1.14.0000/P.02/8/2023	Hibah Kepada Forum UMMK Lampung Barat Sub. Kegiatan Koordinasi, Sikronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00
5	12.01/04.0/00006/LS/2.17.3.30.3.3.1.14.0000/M/3/2023	Hibah Kepada RUMAH KREATIF Lampung Barat Sub. Kegiatan Koordinasi, Sikronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00
6	12.01/04.0/000060/LS/2.17.3.30.3.3.1.14.0000/P.01/11/2023	Hibah kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00
Sub Jumlah			405.000.000,00	405.000.000,00
F	DINAS KEPEMUDAAN			
1	12.01/04.0/000010/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Kepada IKPM Jogyakarta Lampung Barat	40.000.000,00	40.000.000,00
2	12.01/04.0/000024/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/7/2023	Belanja Hibah Kepada Sakura Bird Lampung Barat	30.000.000,00	30.000.000,00
3	12.01/04.0/000031/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah Kepada DPC HARPI Melati Lampung Barat	10.000.000,00	10.000.000,00
4	12.01/04.0/000047/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Kepada Ikatan Muhi Mekhanai Kabupaten Lampung Barat	28.402.000,00	28.402.000,00
5	12.01/04.0/000048/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Kepada IKPM Jogyakarta Lampung Barat	10.000.000,00	10.000.000,00
Sub Jumlah			118.402.000,00	118.402.000,00
G	DINAS PERPUSTAKAAN			
1	12.01/04.0/00004/LS/2.23.2.24.0.00.17.0000/M/3/2023 tanggal 13 Maret 2023	Hibah kepada Tim Gerakan Literasi Daerah (Tim GLD) Kabupaten Lampung Barat	150.000.000,00	50.000.000,00
2	12.01/04.0/000020/LS/2.23.2.24.0.00.17.0000/P.01/7/2023 tanggal 6 Juli 2023	Hibah kepada Tim Gerakan Literasi Daerah (Tim GLD) Kabupaten Lampung Barat		100.000.000,00
Sub Jumlah			150.000.000,00	150.000.000,00
H	SEKRETARIAT DAERAH			
1	12.01/04.0/000023/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/5/2023	Hibah kepada Majelis Buddhayana Indonesia	10.000.000,00	10.000.000,00
2	12.01/04.0/000024/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/5/2023	Hibah kepada Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU)	70.000.000,00	70.000.000,00
3	12.01/04.0/000029/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/5/2023	Hibah kepada Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Pekon Wates Kec. Balik Bukit	20.000.000,00	20.000.000,00
4	12.01/04.0/000028/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/5/2023	Hibah Kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Barat	71.500.000,00	71.500.000,00
5	12.01/04.0/000037/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/6/2023	Hibah Uang kepada PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA	10.000.000,00	10.000.000,00
6	12.01/04.0/000039/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/6/2023	Hibah kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	10.000.000,00	10.000.000,00
7	12.01/04.0/000042/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/7/2023	Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Barat	25.000.000,00	25.000.000,00
8	12.01/04.0/000043/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/7/2023	Hibah Kepada Fatayat Nahdhatul Ulama	10.000.000,00	10.000.000,00
9	12.01/04.0/000047/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/7/2023	Hibah uang kepada PERSAUDARAAN MUSLIMAH	10.000.000,00	10.000.000,00
10	12.01/04.0/000045/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/7/2023	Hibah uang kepada AISYIAH LAMPUNG BARAT	15.000.000,00	15.000.000,00
11	12.01/04.0/000057/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/9/2023	Hibah uang kepada Mathlaul Anwar Lampung Barat	10.000.000,00	10.000.000,00
12	12.01/04.0/000058/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/9/2023	Hibah Uang kepada LPTQ Kabupaten Lampung Barat	124.760.500,00	124.760.500,00
13	12.01/04.0/000059/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/9/2023	Hibah uang Kepada LPTQ Kabupaten Lampung Barat	19.934.000,00	19.934.000,00
14	12.01/04.0/000056/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/9/2023	Hibah Uang kepada Muhammadiyah Kabupaten Lampung Barat	20.000.000,00	20.000.000,00
15	12.01/04.0/000077/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang Kepada LPTQ Kabupaten Lampung Barat	287.739.500,00	287.739.500,00
16	12.01/04.0/000080/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang kepada Masjid Nurul Ihsan Pekon Balak Kecamatan Balik Bukit	10.000.000,00	10.000.000,00
17	12.01/04.0/000092/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/11/2023	Hibah uang Kepada Pengurus Persekutuan Gereja Gereja Kristen PGGK	10.000.000,00	10.000.000,00
18	12.01/04.0/000104/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada LPTQ Kecamatan Suoh	5.000.000,00	5.000.000,00
19	12.01/04.0/000105/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada LPTQ Kecamatan Batu Ketulis	5.000.000,00	5.000.000,00
20	12.01/04.0/000106/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada LPTQ Kecamatan Sekincau	5.000.000,00	5.000.000,00
21	12.01/04.0/000107/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Lumbok Seminung	5.000.000,00	5.000.000,00
22	12.01/04.0/000108/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Belatau	5.000.000,00	5.000.000,00
23	12.01/04.0/000109/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Way Tenong	5.000.000,00	5.000.000,00
24	12.01/04.0/000110/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Bandar Negeri Suoh	5.000.000,00	5.000.000,00
25	12.01/04.0/000111/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Gedung Surian	5.000.000,00	5.000.000,00
26	12.01/04.0/000112/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Batu Brak	5.000.000,00	5.000.000,00
27	12.01/04.0/000113/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Kebun Tebu	5.000.000,00	5.000.000,00
28	12.01/04.0/000114/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Pagar Dewa	5.000.000,00	5.000.000,00
29	12.01/04.0/000115/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Sumber Jaya	5.000.000,00	5.000.000,00
30	12.01/04.0/000116/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah uang Kepada BAZNAS	53.500.000,00	53.500.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
31	12.01/04.0/000119/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Balik Bukit	5.000.000,00	5.000.000,00
32	12.01/04.0/000118/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Air Hitam	5.000.000,00	5.000.000,00
33	12.01/03.0/000012/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah kepada Posbakmadin Liwa	20.000.000,00	20.000.000,00
34	12.01/03.0/000013/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah kepada LBH Lampung Barat	20.000.000,00	20.000.000,00
35	12.01/04.0/000125/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/12/2023	Hibah Uang Kepada LPTQ Kabupaten Lampung Barat	10.066.000,00	10.066.000,00
36	12.01/04.0/000122/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/12/2023	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus LPTQ Kecamatan Sukau	5.000.000,00	5.000.000,00
		Sub Jumlah	912.500.000,00	912.500.000,00
I	BADAN KEPEGAWAIAN SDM			
1	12.01/04.0/000030/LS/5.03.5.04.0.00.23.0000/P.03/12/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.000.000,00	50.000.000,00
2	12.01/04.0/000018/LS/5.03.5.04.0.00.23.0000/P.01/7/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000,00	10.000.000,00
3	12.01/04.0/000025/LS/5.03.5.04.0.00.23.0000/P.02/10/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15.000.000,00	15.000.000,00
		Sub Jumlah	75.000.000,00	75.000.000,00
I	BADAN KESBAGNPOL			
1	12.01/04.0/000034/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/5/2023	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) LAMPUNG BARAT	100.000.000,00	100.000.000,00
		Sub Jumlah	100.000.000,00	100.000.000,00
		JUMLAH	6.896.252.000,00	6.886.252.000,00

5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
1	No.12.01/04.0/000467/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Talang Ciamis, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.750.000,00	4.750.000,00
2	No.12.01/04.0/000468/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Tegal Rejo, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.450.000,00	3.450.000,00
3	No.12.01/04.0/000469/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Sinar Harapan, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.950.000,00	1.950.000,00
4	No.12.01/04.0/000470/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Pertemuan Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.150.000,00	2.150.000,00
5	No.12.01/04.0/000471/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Kartini, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.950.000,00	3.950.000,00
6	No.12.01/04.0/000472/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Daarul Mustofa, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.350.000,00	7.350.000,00
7	No.12.01/04.0/000473/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al-Irsyad Darussalam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	16.050.000,00	16.050.000,00
8	No.12.01/04.0/000474/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Miftahul Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	8.000.000,00	8.000.000,00
9	No.12.01/04.0/000475/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Riyadhol Jannah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.450.000,00	6.450.000,00
10	No.12.01/04.0/000512/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al Furqon, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.350.000,00	4.350.000,00
11	No.12.01/04.0/000513/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Harahafiah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.550.000,00	2.550.000,00
12	No.12.01/04.0/000514/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Nurul Iman, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	17.000.000,00	17.000.000,00
13	No.12.01/04.0/000515/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Sinar Galuh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.400.000,00	4.400.000,00
14	No.12.01/04.0/000517/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Rejo Mulyo, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.650.000,00	5.650.000,00
15	No.12.01/04.0/000518/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Darussalam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.150.000,00	7.150.000,00
16	No.12.01/04.0/000519/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Selandau Tengah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.850.000,00	2.850.000,00
17	No.12.01/04.0/000520/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIN 3 Lampung Barat, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.000.000,00	12.000.000,00
18	No.12.01/04.0/000521/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Baitul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.500.000,00	7.500.000,00
19	No.12.01/04.0/000522/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al Hidayah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.400.000,00	2.400.000,00
20	No.12.01/04.0/000523/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Nurul Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.000.000,00	4.000.000,00
21	No.12.01/04.0/000525/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al Maarif, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.900.000,00	4.900.000,00
22	No.12.01/04.0/000526/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Bhakti Mulya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.100.000,00	6.100.000,00
23	No.12.01/04.0/000532/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIN 1 Lampung Barat, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	28.350.000,00	28.350.000,00
24	No.12.01/04.0/000533/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Tirto Luhur, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.900.000,00	1.900.000,00
25	No.12.01/04.0/000534/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Pagar Dewa, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.800.000,00	1.800.000,00
26	No.12.01/04.0/000535/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al Hasyimiah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.500.000,00	4.500.000,00
27	No.12.01/04.0/000536/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Kisam Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.700.000,00	1.700.000,00
28	No.12.01/04.0/000537/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Muhammadiyah Sukau, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.300.000,00	5.300.000,00
29	No.12.01/04.0/000538/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Roworejo, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.100.000,00	5.100.000,00
30	No.12.01/04.0/000540/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al Ikhlas, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.700.000,00	7.700.000,00
31	No.12.01/04.0/000542/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Darul Qolam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.900.000,00	7.900.000,00
32	No.12.01/04.0/000543/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Roudhotus Sholihin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.050.000,00	7.050.000,00
33	No.12.01/04.0/000660/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Nurul Hidayah BNS, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.250.000,00	3.250.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
34	No.12.01/04.0/000661/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Marga Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.800.000,00	1.800.000,00
35	No.12.01/04.0/000663/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIS Al Hikmah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.250.000,00	6.250.000,00
36	No.12.01/04.0/000664/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al Istiqomah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.300.000,00	5.300.000,00
37	No.12.01/04.0/000665/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Atar Lebar, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.150.000,00	2.150.000,00
38	No.12.01/04.0/000666/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SD Muara Dua, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.600.000,00	2.600.000,00
39	No.12.01/04.0/000667/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIS Nahdatut Tholabah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.100.000,00	6.100.000,00
40	No.12.01/04.0/000668/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Kayu Are, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	900.000,00	900.000,00
41	No.12.01/04.0/000669/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Beringin Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.650.000,00	4.650.000,00
42	No.12.01/04.0/000670/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIS Al Istiqomah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.250.000,00	3.250.000,00
43	No.12.01/04.0/000672/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDIT Daarul Qudwah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.150.000,00	7.150.000,00
44	No.12.01/04.0/000673/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Nurul Iman, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.550.000,00	4.550.000,00
45	No.12.01/04.0/000676/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Kartika II-11, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.450.000,00	7.450.000,00
46	No.12.01/04.0/000678/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Tanjung Kurung, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.650.000,00	5.650.000,00
47	No.12.01/04.0/000679/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MI Al Karomah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.900.000,00	5.900.000,00
48	No.12.01/04.0/000680/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Tungkus Tiga, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.800.000,00	4.800.000,00
49	No.12.01/04.0/000683/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIS Al Ma'arif, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.350.000,00	6.350.000,00
50	No.12.01/04.0/000684/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Lebuey, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.650.000,00	1.650.000,00
51	No.12.01/04.0/000687/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Way Haru, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.450.000,00	1.450.000,00
52	No.12.01/04.0/000688/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SD Islam Miftah Al Istiqoliah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.450.000,00	1.450.000,00
53	No.12.01/04.0/000690/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Bandar Teledan, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.300.000,00	2.300.000,00
54	No.12.01/04.0/000691/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Sinar Harapan, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.550.000,00	1.550.000,00
55	No.12.01/04.0/000692/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Bumi Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.550.000,00	6.550.000,00
56	No.12.01/04.0/000766/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Talang Semarang, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.150.000,00	3.150.000,00
57	No.12.01/04.0/000769/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Mekar Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.850.000,00	3.850.000,00
58	No.12.01/04.0/000770/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDIT Smart Qurani, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.800.000,00	3.800.000,00
59	No.12.01/04.0/000773/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIN 2 Lampung Barat, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	30.950.000,00	30.950.000,00
60	No.12.01/04.0/000959/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Karya Bhakti, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.950.000,00	4.950.000,00
61	No.12.01/04.0/000964/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDIT Al Fath, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	8.100.000,00	8.100.000,00
62	No.12.01/04.0/000974/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SDS Sinar Umpu, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.250.000,00	5.250.000,00
63	No.12.01/04.0/001120/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIS Darul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.100.000,00	4.100.000,00
64	No.12.01/04.0/001122/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MIS Nurul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.500.000,00	1.500.000,00
65		SDS MARGA JAYA	500.000,00	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
66	No.12.01/04.0/000464/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Darul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.960.000,00	6.960.000,00
67	No.12.01/04.0/000465/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Baitul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.320.000,00	8.320.000,00
68	No.12.01/04.0/000466/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Darut Tholbin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.240.000,00	8.240.000,00
69	No.12.01/04.0/000476/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Riyadhoh Jannah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.600.000,00	9.600.000,00
70	No.12.01/04.0/000477/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Yapsi, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	36.720.000,00	36.720.000,00
71	No.12.01/04.0/000516/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Furqon, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.600.000,00	5.600.000,00
72	No.12.01/04.0/000524/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs SA Darussalam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.640.000,00	4.640.000,00
73	No.12.01/04.0/000527/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Nurul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.240.000,00	4.240.000,00
74	No.12.01/04.0/000528/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Hidayah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.560.000,00	4.560.000,00
75	No.12.01/04.0/000529/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Darus Sholihin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.280.000,00	9.280.000,00
76	No.12.01/04.0/000530/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Darul Qolam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.920.000,00	3.920.000,00
77	No.12.01/04.0/000531/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs N 1 Lampung Barat, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	52.880.000,00	52.880.000,00
78	No.12.01/04.0/000539/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Bhakti Mulya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	10.000.000,00	10.000.000,00
79	No.12.01/04.0/000541/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Roudhotus Sholihin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	42.400.000,00	42.400.000,00
80	No.12.01/04.0/000656/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Ikhlas Fajar Bulan, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	16.720.000,00	16.720.000,00
81	No.12.01/04.0/000657/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Yatimas, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.600.000,00	3.600.000,00
82	No.12.01/04.0/000659/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Falah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.560.000,00	8.560.000,00
83	No.12.01/04.0/000662/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Hikmah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.960.000,00	8.960.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
84	No.12.01/04.0/000671/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Nusantara, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.360.000,00	1.360.000,00
85	No.12.01/04.0/000674/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Hasyimiah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	10.960.000,00	10.960.000,00
86	No.12.01/04.0/000675/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Sukajadi, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.320.000,00	2.320.000,00
87	No.12.01/04.0/000677/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Islam Miftah Al Istiqiyah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.520.000,00	1.520.000,00
88	No.12.01/04.0/000681/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Roworejo, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.640.000,00	6.640.000,00
89	No.12.01/04.0/000682/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Nahdatut Tholabah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.360.000,00	3.360.000,00
90	No.12.01/04.0/000685/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Muhajirin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.920.000,00	9.920.000,00
91	No.12.01/04.0/000689/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Falah Sidomulyo, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.680.000,00	9.680.000,00
92	No.12.01/04.0/000693/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Islamiyah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	10.160.000,00	10.160.000,00
93	No.12.01/04.0/000694/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Nurul Iman, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.760.000,00	19.760.000,00
94	No.12.01/04.0/000771/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Miftahul Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	12.720.000,00	12.720.000,00
95	No.12.01/04.0/000772/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP KHM Supi, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.200.000,00	5.200.000,00
96	No.12.01/04.0/000818/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Miftahul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.600.000,00	9.600.000,00
97	No.12.01/04.0/001073/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) MTs Al Karomah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.600.000,00	7.600.000,00
98	No.12.01/04.0/001075/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Plus Darul Qur'an, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.280.000,00	7.280.000,00
99	No.12.01/04.0/001076/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Muhammadiyah Sukau, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.520.000,00	5.520.000,00
100	No.12.01/04.0/001107/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) SMP Ashriyah Roudhotus Sholihin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.800.000,00	8.800.000,00
101		SMP Q MIFTAHUL ULUM	4.640.000,00	
102		MTs AL-MAARIF	8.080.000,00	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
103	No.12.01/04.0/000285/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islami Alif, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.550.000,00	2.550.000,00
104	No.12.01/04.0/000286/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Sakinah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.300.000,00	1.300.000,00
105	No.12.01/04.0/000287/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Satu Atap Purajaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	800.000,00	800.000,00
106	No.12.01/04.0/000288/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Miftah Istiqiyah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.300.000,00	1.300.000,00
107	No.12.01/04.0/000289/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK IT Khoirul Ummah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.650.000,00	2.650.000,00
108	No.12.01/04.0/000290/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Aisyah Bushtanul Ahtfal Sebarus, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.500.000,00	4.500.000,00
109	No.12.01/04.0/000291/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Sartika Tembelang, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	650.000,00	650.000,00
110	No.12.01/04.0/000292/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Kartika II-42, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.050.000,00	2.050.000,00
111	No.12.01/04.0/000293/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Budi Asih, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.500.000,00	1.500.000,00
112	No.12.01/04.0/000294/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Miftahul Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.250.000,00	1.250.000,00
113	No.12.01/04.0/000295/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Mazayatul Insaan, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.250.000,00	1.250.000,00
114	No.12.01/04.0/000296/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK DW Argomulyo, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
115	No.12.01/04.0/000297/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Tunas Bangsa Way Tenong, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.350.000,00	1.350.000,00
116	No.12.01/04.0/000298/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Praja Kasih Bunda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.400.000,00	1.400.000,00
117	No.12.01/04.0/000299/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islam Rumah Quran, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
118	No.12.01/04.0/000300/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Anggun, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.450.000,00	1.450.000,00
119	No.12.01/04.0/000302/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islam Nurul Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.250.000,00	4.250.000,00
120	No.12.01/04.0/000303/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Harapan Ibu, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.800.000,00	1.800.000,00
121	No.12.01/04.0/000304/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Bunda Khodijah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.000.000,00	3.000.000,00
122	No.12.01/04.0/000307/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Cendikia, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.350.000,00	1.350.000,00
123	No.12.01/04.0/000308/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Harapan Bangsa, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.300.000,00	1.300.000,00
124	No.12.01/04.0/000310/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Permata Bunda 2, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.700.000,00	2.700.000,00
125	No.12.01/04.0/000311/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Bhakti Mulya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.600.000,00	2.600.000,00
126	No.12.01/04.0/000312/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islam Darul Qolam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.600.000,00	1.600.000,00
127	No.12.01/04.0/000313/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Dewi Sartika Such, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.750.000,00	1.750.000,00
128	No.12.01/04.0/000314/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Al-Hidayah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.300.000,00	2.300.000,00
129	No.12.01/04.0/000345/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Dharma Wanita Trimulyo, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.150.000,00	2.150.000,00
130	No.12.01/04.0/000346/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Harapan Mekar, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	600.000,00	600.000,00
131	No.12.01/04.0/000347/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Kartini, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.150.000,00	2.150.000,00
132	No.12.01/04.0/000348/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/8/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Nurul Iman, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
133	No.12.01/04.0/000356/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Satu Atap Rua Jurai, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.500.000,00	2.500.000,00
134	No.12.01/04.0/000363/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Merah Putih Air Hitam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
135	No.12.01/04.0/000378/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islam Mambaul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
136	No.12.01/04.0/000379/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Harapan Bunda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.000.000,00	3.000.000,00
137	No.12.01/04.0/000380/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) Raudhotul Athfal As Syifa, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.650.000,00	4.650.000,00
138	No.12.01/04.0/000381/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Nusa Indah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.050.000,00	1.050.000,00
139	No.12.01/04.0/000382/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Huda Belalau, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	700.000,00	700.000,00
140	No.12.01/04.0/000383/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Simpang Luas, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.650.000,00	2.650.000,00
141	No.12.01/04.0/000384/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Bhakti Sinar Persada, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.850.000,00	1.850.000,00
142	No.12.01/04.0/000385/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK DW Bahway, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.650.000,00	1.650.000,00
143	No.12.01/04.0/000386/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Nurul Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.300.000,00	3.300.000,00
144	No.12.01/04.0/000387/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Al Maarif Suoh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.350.000,00	2.350.000,00
145	No.12.01/04.0/000388/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Bani Ismail, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.050.000,00	2.050.000,00
146	No.12.01/04.0/000389/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Harapan Bangsa Kebun Tebu, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.000.000,00	2.000.000,00
147	No.12.01/04.0/000390/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TKIT Ar Raudhoh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.700.000,00	2.700.000,00
148	No.12.01/04.0/000391/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islam Iqro, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.350.000,00	2.350.000,00
149	No.12.01/04.0/000392/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Satu Atap An Nur Padang Tambak, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.750.000,00	1.750.000,00
150	No.12.01/04.0/000393/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Az Zahra, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.450.000,00	1.450.000,00
151	No.12.01/04.0/000394/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Nurul Islam Balk Bukit, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5.650.000,00	5.650.000,00
152	No.12.01/04.0/000395/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Dharma Peristiwa Way Tenong, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.100.000,00	1.100.000,00
153	No.12.01/04.0/000396/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Amanda Way Tenong, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.600.000,00	1.600.000,00
154	No.12.01/04.0/000397/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Bhakti Kartika, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.900.000,00	2.900.000,00
155	No.12.01/04.0/000398/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Sidomakmur, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
156	No.12.01/04.0/000399/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Dharma Wanita Sekincau, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.200.000,00	3.200.000,00
157	No.12.01/04.0/000400/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Permata Bunda III Suoh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.500.000,00	2.500.000,00
158	No.12.01/04.0/000401/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Tunas Nusantara, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.500.000,00	3.500.000,00
159	No.12.01/04.0/000402/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA ABA Sukarame, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.800.000,00	1.800.000,00
160	No.12.01/04.0/000403/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Amrah Jaili, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
161	No.12.01/04.0/000404/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TKIT Sabulil Hidayah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.900.000,00	1.900.000,00
162	No.12.01/04.0/000405/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Tunas Bangsa Balk Bukit, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.250.000,00	1.250.000,00
163	No.12.01/04.0/000483/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Gelora Mekar, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.300.000,00	2.300.000,00
164	No.12.01/04.0/000484/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Mabur Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	750.000,00	750.000,00
165	No.12.01/04.0/000485/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Al Hidayah Tigajaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.250.000,00	1.250.000,00
166	No.12.01/04.0/000486/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Mutiara Yalima, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.950.000,00	1.950.000,00
167	No.12.01/04.0/000487/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Munawaroh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.000.000,00	2.000.000,00
168	No.12.01/04.0/000488/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Tarbiyatul Athfal, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.350.000,00	2.350.000,00
169	No.12.01/04.0/000489/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Nahdatul Tholabah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.600.000,00	3.600.000,00
170	No.12.01/04.0/000490/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Actiya Indri, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.250.000,00	2.250.000,00
171	No.12.01/04.0/000491/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Banda Mulya Way Petai, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.300.000,00	1.300.000,00
172	No.12.01/04.0/000492/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Kartini, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.000.000,00	2.000.000,00
173	No.12.01/04.0/000493/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Darussalam Suoh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.250.000,00	2.250.000,00
174	No.12.01/04.0/000494/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Peristiwa Suoh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.300.000,00	2.300.000,00
175	No.12.01/04.0/000495/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islam Mutiara Bunda Way Tenong, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.100.000,00	2.100.000,00
176	No.12.01/04.0/000496/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Islam Azzahra Way Tenong, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.500.000,00	2.500.000,00
177	No.12.01/04.0/000497/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Nusantara BNS, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.200.000,00	1.200.000,00
178	No.12.01/04.0/000498/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Yapsi, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.250.000,00	2.250.000,00
179	No.12.01/04.0/000499/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Muttaqin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.700.000,00	3.700.000,00
180	No.12.01/04.0/000500/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Nurul Iman, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.050.000,00	1.050.000,00
181	No.12.01/04.0/000501/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Furqon, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	950.000,00	950.000,00
182	No.12.01/04.0/000502/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Irsyad Darussalam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.500.000,00	3.500.000,00
183	No.12.01/04.0/000503/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Furqon II, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.600.000,00	1.600.000,00
184	No.12.01/04.0/000504/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Darussalam Way Tenong, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.500.000,00	2.500.000,00
185	No.12.01/04.0/000505/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Qodriyah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.950.000,00	3.950.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
186	No.12.01/04.0/000506/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Sinar Galuh, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.550.000,00	2.550.000,00
187	No.12.01/04.0/000507/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Ikhlas, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.450.000,00	4.450.000,00
188	No.12.01/04.0/000508/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Miftahul Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.700.000,00	2.700.000,00
189	No.12.01/04.0/000509/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Az Zahra, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.500.000,00	1.500.000,00
190	No.12.01/04.0/000510/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Darul Ulum, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
191	No.12.01/04.0/000511/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Roudlotus Sholihin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
192	No.12.01/04.0/000517/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Tunas Mandiri, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.100.000,00	2.100.000,00
193	No.12.01/04.0/000578/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Mutiara Bunda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.550.000,00	2.550.000,00
194	No.12.01/04.0/000579/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Kauman, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.900.000,00	1.900.000,00
195	No.12.01/04.0/000580/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Darussholihin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.000.000,00	3.000.000,00
196	No.12.01/04.0/000581/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Nurul Iman Sekincau, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.400.000,00	1.400.000,00
197	No.12.01/04.0/000582/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Darul Ashkiya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.550.000,00	1.550.000,00
198	No.12.01/04.0/000583/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al-Amin, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.200.000,00	2.200.000,00
199	No.12.01/04.0/000584/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Aisyiyah Marga Jaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.950.000,00	1.950.000,00
200	No.12.01/04.0/000585/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Al-Huda, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.250.000,00	2.250.000,00
201	No.12.01/04.0/000589/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) RA Al Hasmyiyah, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.300.000,00	3.300.000,00
202	No.12.01/04.0/000591/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK DW Citra Dharma, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00
203	No.12.01/04.0/000592/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Dharma Wijaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	600.000,00	600.000,00
204	No.12.01/04.0/000593/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Periwati Air Hitam, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.600.000,00	1.600.000,00
205	No.12.01/04.0/000594/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Kutilang Bedudu, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.200.000,00	1.200.000,00
206	No.12.01/04.0/000595/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Miftahul Ulum Sekincau, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.100.000,00	1.100.000,00
207	No.12.01/04.0/000596/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Bunda Nur, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.500.000,00	1.500.000,00
208	No.12.01/04.0/000696/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Sai Betik, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.550.000,00	3.550.000,00
209	No.12.01/04.0/000697/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK DW Persatuan, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.550.000,00	1.550.000,00
210	No.12.01/04.0/000698/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK DW Purajaya, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.600.000,00	3.600.000,00
211	No.12.01/04.0/000699/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Perintis Tunas Bangsa, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.350.000,00	1.350.000,00
212	No.12.01/04.0/000700/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK Anak Bangsa, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.150.000,00	1.150.000,00
213	No.12.01/04.0/000701/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) TK DW Sempang Sari, Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.850.000,00	1.850.000,00
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
214	No.12.01/04.0/000055/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah Uang Kepada HIMPAUDI, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	40.000.000,00	40.000.000,00
215	No.12.01/04.0/000212/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah TPQ Azzahra, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.000.000,00	6.000.000,00
216	No.12.01/04.0/000213/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah TPQ Darul Qur'an Fathussalam, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.000.000,00	6.000.000,00
217	No.12.01/04.0/000214/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah TPQ Miftahul Khoer, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.000.000,00	6.000.000,00
218	No.12.01/04.0/000215/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah TPQ Nurul Ma'rifah, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.000.000,00	6.000.000,00
219	No.12.01/04.0/000224/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah Pramuka, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	75.000.000,00	50.000.000,00
220	No.12.01/04.0/000756/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/11/2023	Hibah Uang Kepada Pramuka, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		25.000.000,00
221	No.12.01/04.0/000225/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah TPQ Rumah Qur'an BEC, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	10.000.000,00	10.000.000,00
222	No.12.01/04.0/000251/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah TPQ Harakatu At Taqwa, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16.000.000,00	16.000.000,00
223	No.12.01/04.0/000586/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/9/2023	Hibah Uang Kepada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	30.000.000,00	30.000.000,00
224	No.12.01/04.0/000603/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Insan Mandiri, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	38.920.000,00	38.920.000,00
225	No.12.01/04.0/000604/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Ar Rizqi Bina Bersama, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	39.760.000,00	39.760.000,00
226	No.12.01/04.0/000605/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Maju Bersama, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	102.990.000,00	98.630.000,00
227	No.12.01/04.0/000606/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Buay Nyerupa, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	33.810.000,00	33.810.000,00
228	No.12.01/04.0/000607/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Bunga Tanjung, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	68.705.000,00	65.030.000,00
229	No.12.01/04.0/000608/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Setia Budi, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	69.615.000,00	69.615.000,00
230	No.12.01/04.0/000609/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Ponges Al Hasmyiah, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	35.210.000,00	35.210.000,00
231	No.12.01/04.0/000611/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Harapan Bangsa, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	78.970.000,00	78.970.000,00
232	No.12.01/04.0/000612/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Biaya Penyelenggara Pendidikan Merata (BPPM) PKBM Karya Maju, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	17.640.000,00	17.640.000,00
233	No.12.01/04.0/000979/LS/1.01.2.2 2.0.00.01.0000/P.03/12/2023	Belanja Hibah Uang Kepada PGRI, Sub Keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	25.000.000,00	25.000.000,00
		Sub Jumlah	1.686.390.000,00	1.664.865.000,00
B	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB PP DAN PA			
1	12.01/04.0/000016/LS/2.08.2.14.0. 00.11.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah KPAl Tahap 1 TA 2023 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
2	12.01/04.0/000019/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah LPAl Tahap 1 TA 2023 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00
3	12.01/04.0/000024/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/P.01/7/2023	Belanja Hibah PWKI TA 2023 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00
4	12.01/04.0/000039/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/2/2023	Belanja Hibah LPAl TAHAP II Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00
5	12.01/04.0/000040/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/2/2023	Belanja Hibah KPAl TAHAP II Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00
6	12.01/04.0/000032/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/2/2023	Belanja HIBAH PKBI Kabupaten Lampung Barat Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20.000.000,00	20.000.000,00
7	12.01/04.0/000034/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/2/2023	Belanja Hibah Wanita Katolik Indonesia (WKRl) TA 2023 Kab. Lampung Barat Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00
		Sub Jumlah	75.000.000,00	75.000.000,00
C	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
1	12.01/04.0/000009/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Kepada IPNU Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
2	12.01/04.0/000011/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Kepada Purna Pasikbra Lampung Barat PPI 2023	15.000.000,00	15.000.000,00
3	12.01/04.0/000012/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Kepada GP Ansor Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
4	12.01/04.0/000013/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Kepada Pemuda Muhammadiyah Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
5	12.01/04.0/000017/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Kepada KONI Lampung Barat	1.241.948.000,00	1.241.948.000,00
6	12.01/04.0/000033/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.02/8/2023	Belanja Hibah Kepada PERWOSI Lampung Barat	50.000.000,00	50.000.000,00
7	12.01/04.0/000037/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.02/9/2023	Belanja Hibah Kepada KONI Lampung Barat	458.052.000,00	458.052.000,00
8	12.01/04.0/000038/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.02/9/2023	Belanja Hibah Kepada Komunitas Gowes Suka-suka	10.000.000,00	10.000.000,00
9	12.01/04.0/000049/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Kepada Ikatan Muhammadiyah Lampung Barat	10.000.000,00	10.000.000,00
10	12.01/04.0/000050/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Kepada Komunitas Goweser LGC Lampung Barat	50.000.000,00	50.000.000,00
		Sub Jumlah	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00
C	DINAS TPH			
1	12.01/04.0/000019/LS/3.27.0.00.0.00.19.0000/P.01/7/2023	HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT	20.000.000,00	20.000.000,00
2	12.01/04.0/000018/LS/3.27.0.00.0.00.19.0000/P.01/7/2023	HIBAH KEPADA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) KABUPATEN LAMPUNG BARAT	75.000.000,00	75.000.000,00
3				
		Sub Jumlah	95.000.000,00	95.000.000,00
E	SEKRETARIAT DAERAH			
1	12.01/03.0/000016/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/4/2023	Hibah Kepada Majelis Ta'lim Baitul Mukhlisin Islamiyah	100.000.000,00	100.000.000,00
2	12.01/04.0/000036/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/6/2023	Hibah Uang kepada Laskar Santri Nusantara	10.000.000,00	10.000.000,00
3	12.01/04.0/000046/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/7/2023	Hibah Uang kepada HARI SANTRI NASIONAL	40.000.000,00	40.000.000,00
4	12.01/04.0/000052/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.01/8/2023	HIBAH MUSABAQAH QIRO'ATIL KUTUB (MQK) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TA. 2023	10.000.000,00	10.000.000,00
5	12.01/04.0/000053/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/8/2023	Hibah uang kepada DPD BKPRMI LAMPUNG BARAT	20.000.000,00	20.000.000,00
6	12.01/04.0/000065/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/9/2023	Hibah kepada Masjid Nurul Huda Simpang Serdang Kec. Baik Bukit	15.000.000,00	15.000.000,00
7	12.01/04.0/000066/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/9/2023	Hibah kepada Musholla Ilman Nasir Way Mengaku, Kec. Baik Bukit	5.000.000,00	5.000.000,00
8	12.01/04.0/000068/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah kepada Masjid Al Jihad Pekon Kembahang Kec. Batu Brak	10.000.000,00	10.000.000,00
9	12.01/04.0/000076/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah kepada Masjid AR-RAHMAN, Pekon Way Empulau Ulu, Kecamatan Baik Bukit	10.000.000,00	10.000.000,00
10	12.01/04.0/000069/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah Kepada Masjid Al-Ikhlash Pekon Puralaksana kec Way Tenong	10.000.000,00	10.000.000,00
11	12.01/04.0/000070/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah Kepada MASJID BAITUROHMAN Pekon Sukamarga kec Suoh	10.000.000,00	10.000.000,00
12	12.01/04.0/000071/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah Kepada MASJID HIDAYATUL QUR'AN Pekon Tiga Jaya.	10.000.000,00	10.000.000,00
13	12.01/04.0/000072/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah ke MUSHOLLA MIFTAHUL JANNAH Kelurahan Tugusari kecamatan Sumber Jaya	10.000.000,00	10.000.000,00
14	12.01/04.0/000073/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah Kepada MUSHOLLA NURUL IMAN Pekon Muarajaya II, Kecamatan Kebun Tebu	25.000.000,00	25.000.000,00
15	12.01/04.0/000074/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah kepada Masjid AL-IKHLAS, Pekon Srimenanti, Kecamatan Air Hitam	10.000.000,00	10.000.000,00
16	12.01/04.0/000075/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah kepada Masjid NURUL IMAN, Pekon Sukamaju, Kecamatan Lumbok Semingung	10.000.000,00	10.000.000,00
17	12.01/04.0/000079/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang Kepada Dewan Pastoral Agama Katolik	10.000.000,00	10.000.000,00
18	12.01/04.0/000081/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang Kepada Dewan Pastoral Agama Katolik	7.500.000,00	7.500.000,00
19	12.01/04.0/000085/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang Kepada Masjid Al Muhajirin Pekon Luas Kec. Batu Ketulis	5.000.000,00	5.000.000,00
20	12.01/04.0/000086/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang Kepada Masjid Al-Mabrur Pekon Campang Tiga Kec. Batu Ketulis	5.000.000,00	5.000.000,00
21	12.01/04.0/000082/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah kepada Masjid Agung Al-Ishlah Kec. Air Hitam	10.000.000,00	10.000.000,00
22	12.01/04.0/000083/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang kepada Masjid Jami Al Falah Way Tenong	10.000.000,00	10.000.000,00
23	12.01/04.0/000084/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/10/2023	Hibah uang Kepada Gereja Pantekosta Indonesia	5.000.000,00	5.000.000,00
24	12.01/04.0/000088/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/11/2023	Hibah uang Kepada Pengurus Badan Kerjasama Antar Gereja (BKSAG)	10.000.000,00	10.000.000,00
25	12.01/04.0/000089/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/11/2023	Hibah uang Kepada Pengurus persekutuan Gereja Gereja Kristen PGGK	7.500.000,00	7.500.000,00
26	12.01/04.0/000090/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/11/2023	Hibah kepada Masjid Al Ikhlas Pemangku I Pekon Kembahang Kec. Batu Brak	5.000.000,00	5.000.000,00
27	12.01/04.0/000091/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/11/2023	Hibah uang Kepada Masjid Baiturrohman Kec. Batu Ketulis	5.000.000,00	5.000.000,00
28	12.01/04.0/000093/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.02/11/2023	Hibah uang Kepada Masjid An Nasir	10.000.000,00	10.000.000,00
29	12.01/04.0/000097/LS/4.01.2.07.0.00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah uang Kepada Pengurus Masjid Albarokatus Salafiyah Pekon Pura Mekar Gedung Surian	10.000.000,00	10.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
30	12.01/04.0/000098/L/S/4.01.2.07.0. 00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah uang Kepada Pure Puseh	5.000.000,00	5.000.000,00
31	12.01/04.0/000099/L/S/4.01.2.07.0. 00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah uang Kepada Pengurus Masjid Miftahul Huda PMK Sido Makmur Pekon Bakhu Batu Ketulis	5.000.000,00	5.000.000,00
32	12.01/04.0/000100/L/S/4.01.2.07.0. 00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah uang Kepada Pengurus Masjid Al-Istiqomah Pekon Sebarus	5.000.000,00	5.000.000,00
33	12.01/04.0/000096/L/S/4.01.2.07.0. 00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah uang Kepada Masjid Uswatun Hasanah Pekon Pahayu Jaya Kec. Pagar Dewa	10.000.000,00	10.000.000,00
34	12.01/04.0/000095/L/S/4.01.2.07.0. 00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah uang Kepada Musholla Nurul Huda Ciptasari II Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu	10.000.000,00	10.000.000,00
35	12.01/04.0/000101/L/S/4.01.2.07.0. 00.28.0000/P.03/11/2023	Hibah Kepada Pengurus Masjid Jami Darussalam Lingkungan Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit	10.000.000,00	10.000.000,00
36	12.01/04.0/000123/L/S/4.01.2.07.0. 00.28.0000/P.03/12/2023	Hibah uang Kepada Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) "Karunia"	5.000.000,00	5.000.000,00
37		hibah kepada majelis alhidayah indonesia lambar	10.000.000,00	
		Sub Jumlah	465.000.000,00	455.000.000,00
E	KESBANGPOL			
1	12.01/04.0/000021/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	BARISAN PATRIOT BELA NEGARA	10.000.000,00	10.000.000,00
2	12.01/04.0/000022/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	PSHT PUSAT MADIUN KABUPATEN LAMPUNG BARAT	25.000.000,00	25.000.000,00
3	12.01/04.0/000023/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	IKB BUMI BASWAY LAMPUNG BARAT	30.000.000,00	30.000.000,00
4	12.01/04.0/000024/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	Paguyuban Lampung Barat Bersatu	30.000.000,00	30.000.000,00
5	12.01/04.0/000025/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	PO PENCAK DAN SENI KILU ANDAN	5.000.000,00	5.000.000,00
6	12.01/04.0/000026/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	GARUDA BAKTI NUSANTARA	10.000.000,00	10.000.000,00
7	12.01/04.0/000027/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	PERADI	20.000.000,00	20.000.000,00
8	12.01/04.0/000028/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP)	10.000.000,00	10.000.000,00
9	12.01/04.0/000029/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	POSPERA CABANG LAMPUNG BARAT	5.000.000,00	5.000.000,00
10	12.01/04.0/000030/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	LASKAR MERAH PUTIH	10.000.000,00	10.000.000,00
11	12.01/04.0/000031/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	BIDIK	10.000.000,00	10.000.000,00
12	12.01/04.0/000032/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	FORUM MASYARAKAT PEDULI LAMPUNG BARAT (FMPLB)	10.000.000,00	10.000.000,00
13	12.01/04.0/000033/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	KERA SAKTI	5.000.000,00	5.000.000,00
14	12.01/04.0/000035/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/5/2023	PEMUDA PANCASILA	40.000.000,00	40.000.000,00
15	12.01/04.0/000038/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/6/2023	SENKOM MITRA POLRI	5.000.000,00	5.000.000,00
16	12.01/04.0/000039/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/6/2023	PO Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Lampung Barat	10.000.000,00	10.000.000,00
17	12.01/04.0/000043/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/6/2023	LEMBAGA TRANSPARANSI KEBIJAKAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00
18	12.01/04.0/000046/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/7/2023	TTKKDH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	10.000.000,00	10.000.000,00
19	12.01/04.0/000052/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/7/2023	KBBS Lampung Barat	10.000.000,00	10.000.000,00
20	12.01/04.0/000055/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/8/2023	PEJUANG SILIWANGI	50.000.000,00	50.000.000,00
21	12.01/04.0/000058/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.01/8/2023	Perguruan Paku Banten	10.000.000,00	10.000.000,00
22	12.01/04.0/000070/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.03/11/2023	BADAN KOORDINASI DAERAH (BAKORDA) FORUM KADER BELA NEGARA LAMPUNG BARAT	5.000.000,00	5.000.000,00
23	12.01/04.0/000071/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.03/11/2023	PEMUDA BATAK BERSATU	5.000.000,00	5.000.000,00
24	12.01/04.0/000072/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.03/11/2023	Lembaga Komunitas Peduli Rakyat	5.000.000,00	5.000.000,00
25	12.01/04.0/000073/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.03/11/2023	Bumi Sekala Conservation (BSC)	5.000.000,00	5.000.000,00
26	12.01/04.0/000074/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.03/11/2023	YAYASAN DKM PEDULI INDONESIA	5.000.000,00	5.000.000,00
27	12.01/04.0/000081/L/S/8.01.0.00.0. 00.26.0000/P.03/12/2023	KBBS Lampung Barat	10.000.000,00	10.000.000,00
28		Laskar Merah Putih Indonesia	10.000.000,00	
		Sub Jumlah	370.000.000,00	360.000.000,00
		JUMLAH	4.571.390.000,00	4.529.865.000,00

5.1.05.05.03

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

5.1.05.05.03.0001

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
a	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB PP DAN PA			
1	12.01/04.0/000017/L/S/2.08.2.14.0. 00.11.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah FKAD TA 2023 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.977.500,00	24.977.500,00
2	12.01/04.0/000018/L/S/2.08.2.14.0. 00.11.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah DWP Kab. Lampung Barat TW 1 TA 2023 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00
3	12.01/04.0/000020/L/S/2.08.2.14.0. 00.11.0000/P.01/6/2023	Belanja Hibah PERSIT KARTIKA TA 2023 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00
4	12.01/04.0/000025/L/S/2.08.2.14.0. 00.11.0000/P.01/7/2023	Belanja Hibah GOW TA 2023 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00
5	12.01/04.0/000026/L/S/2.08.2.14.0. 00.11.0000/P.01/7/2023	Belanja Hibah Organisasi Koalisi Kependudukan dan Pembangunan TA 2023 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00
6	12.01/04.0/000030/L/S/2.08.2.14.0.0. 01.11.0000/M/2/2023	Belanja Hibah DWP TAHAP II Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00
7	12.01/04.0/000041/L/S/2.08.2.14.0.0. 01.11.0000/M/2/2023	Belanja Hibah KPAI TAHAP II Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.022.500,00	35.022.500,00
8	12.01/04.0/000042/L/S/2.08.2.14.0.0. 01.11.0000/M/2/2023	Belanja Hibah DWP TAHAP 3 dan 4 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00
9	12.01/04.0/000045/L/S/2.08.2.14.0.0. 01.11.0000/M/2/2023	Belanja Hibah LPPI TAHAP II Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00
		Sub Jumlah	250.000.000,00	250.000.000,00
c	DINAS PMP			
1	12.01/04.0/000012/L/S/2.13.0.00.0. 00.10.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Uang Kepada PERKUMPULAN BERSATU BEGUAI JEJAMA	25.000.000,00	25.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
2	12.01/04.0/000013/LS/2.13.0.00.0.00.10.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Uang epada DPC ASOSIASI PERANGKAT DESA SELURUH INDONESIA LAMPUNG BARAT	20.000.000,00	20.000.000,00
3	12.01/04.0/000033/LS/2.13.0.00.0.00.10.0000/P.03/12/2023	Belanja Hibah Uang Kepada PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA LAMPUNG BARAT	10.000.000,00	10.000.000,00
Sub Jumlah			55.000.000,00	55.000.000,00
C DINAS KOMINFO				
1	12.01/04.0/000010/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (Forkowap)	20.000.000,00	20.000.000,00
2	12.01/04.0/000011/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (PWI)	150.000.000,00	150.000.000,00
3	12.01/04.0/000012/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (PWRI)	20.000.000,00	20.000.000,00
4	12.01/04.0/000013/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (IWO)	30.000.000,00	30.000.000,00
5	12.01/04.0/000014/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/4/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (AJOI)	20.000.000,00	20.000.000,00
6	12.01/04.0/000017/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (SMSI)	15.000.000,00	15.000.000,00
7	12.01/04.0/000018/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/5/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (AWPI)	20.000.000,00	20.000.000,00
8	12.01/04.0/000029/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (RAPJ)	25.000.000,00	25.000.000,00
9	12.01/04.0/000030/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.01/8/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (FPJII)	15.000.000,00	15.000.000,00
10	12.01/04.0/000038/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (PWI)	50.000.000,00	50.000.000,00
11	12.01/04.0/000039/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (IWO)	15.000.000,00	15.000.000,00
12	12.01/04.0/000040/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (SPJI)	10.000.000,00	10.000.000,00
13	12.01/04.0/000041/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (PWRI)	10.000.000,00	10.000.000,00
14	12.01/04.0/000042/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (Forkowap)	7.000.000,00	7.000.000,00
15	12.01/04.0/000043/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.03/11/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (SMSI)	10.000.000,00	10.000.000,00
16	12.01/04.0/000045/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/P.03/12/2023	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (PWRI)	10.000.000,00	10.000.000,00
17		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lambaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja Hibah (FPPI)	10.000.000,00	0,00
Sub Jumlah			437.000.000,00	427.000.000,00
D KESBANGPOL				
1	12.01/04.0/000042/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/6/2023	Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat)	30.000.000,00	30.000.000,00
2				
Sub Jumlah			30.000.000,00	30.000.000,00
JUMLAH			772.000.000,00	762.000.000,00

5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi
5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
1	12.01/04.0/000022/LS/2.17.3.30.3.31.14.0000/P.01/6/2023	Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA) Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan ,penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00
JUMLAH			15.000.000,00	15.000.000,00

5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	No.12.01/04.0/000597/LS/1.01.2.2.2.0.00.01.0000/P.02/10/2023	Hibah Uang Kepada Dewan Kesenian Lampung Barat (DKLB), Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	40.000.000,00	40.000.000,00
JUMLAH			40.000.000,00	40.000.000,00
A DINAS KESEHATAN				
1	12.01/04.0/00121/LS/1.02.0.00.0.00.00.0000/P.01/12/2023	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kepada PMI (Palang Merah Indonesia) Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00
JUMLAH			150.000.000,00	150.000.000,00
JUMLAH			190.000.000,00	190.000.000,00

III 5.1.05.06 BELANJA HIBAH DANA BOS 3.559.430.000,00 3.559.408.800,00
5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS
5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar BOS Reguler		
1		SD IT KHOIRU UMMAH	160.740.000,00	160.740.000,00
2		SD KARTIKA II-11	143.820.000,00	143.820.000,00
3		SD IT DAARUL QUDWAH	134.420.000,00	134.420.000,00
4		SD IT SMART QURANI	71.440.000,00	71.440.000,00
5		SDS KAYU ARE	16.920.000,00	16.920.000,00
6		SD SINAR HARAPAN	30.080.000,00	30.080.000,00
7		SDS MARGA JAYA	33.840.000,00	33.840.000,00
8		SDS ATAR LEBAR	37.600.000,00	37.600.000,00
9		SD BUMI JAYA	120.320.000,00	120.320.000,00
10		SD BANDAR TELADAN	44.180.000,00	44.158.800,00
11		SD WAY HARU	27.260.000,00	27.260.000,00
12		SDS MUARA DUA	46.060.000,00	46.060.000,00
13		SDS BERINGIN JAYA	87.420.000,00	87.420.000,00
14		SD TRISAKTI	28.200.000,00	28.200.000,00
15		SD LEBUJAY	31.960.000,00	31.960.000,00
16		SD ISLAM MIFTAH AL ISTIQLALIYAH	26.320.000,00	26.320.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
17		SDS MARGA JAYA	9.400.000,00	9.400.000,00
18		SDS SINAR HARAPAN	36.660.000,00	36.660.000,00
19		SD MEKAR JAYA	66.740.000,00	66.740.000,00
20		SDS BATU HITAM	41.360.000,00	41.360.000,00
21		SDS PAGAR DEWA	31.960.000,00	31.960.000,00
22		SDS TANJUNG KURUNG	0,00	0,00
23		SDS SINAR UMPU	94.000.000,00	94.000.000,00
24		SDS SELANDAU TENGAH	53.580.000,00	53.580.000,00
25		SDS KARYA BHAKTI	88.360.000,00	88.360.000,00
26		SDS TUNGKUS TIGA	89.300.000,00	89.300.000,00
27		SD TALANG CIAMIS	87.420.000,00	87.420.000,00
28		SDS TALANG SEMARANG	58.280.000,00	58.280.000,00
29		SD TEGAL REJO	64.860.000,00	64.860.000,00
30		SD ROWO REJO	94.940.000,00	94.940.000,00
31		SD TIRTO LUHUR	35.720.000,00	35.720.000,00
32		SD PERTEMUAN JAYA	43.240.000,00	43.240.000,00
33		SD REJO MULYO	104.340.000,00	104.340.000,00
34		SD BHAKTI MULYA	115.620.000,00	115.620.000,00
35		SD KARTINI	74.260.000,00	74.260.000,00
36		SD KISAM JAYA	31.960.000,00	31.960.000,00
37		SD IT AL FATIH	151.340.000,00	151.340.000,00
		BOS Kinerja		
38		SDS PAGAR DEWA	22.500.000,00	22.500.000,00
39		SDS ROWOREJO	22.500.000,00	22.500.000,00
40		SDS KISAM JAYA	22.500.000,00	22.500.000,00
41		SDS SELANDAU TENGAH	22.500.000,00	22.500.000,00
42		SDS PERTEMUAN JAYA	22.500.000,00	22.500.000,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
		BOS Reguler		
43		SMP KHM SUPI	74.880.000,00	74.880.000,00
44		SMP YATRIMAS BERINGIN	52.650.000,00	52.650.000,00
45		SMP SUKAJADI	29.250.000,00	29.250.000,00
46		SMP PLUS DARUL QUR AN	127.530.000,00	127.530.000,00
47		SMP NUSANTARA	21.060.000,00	21.060.000,00
48		SMP ISLAM MIFTAH AL ISTIQLALIYAH	24.570.000,00	24.570.000,00
49		SMP MUHAMMADIYAH 1 SUKAU	77.220.000,00	77.220.000,00
50		SMP MIFTAHUL ULUM	139.230.000,00	139.230.000,00
51		SMP BHAKTI MULYA SUOH	145.080.000,00	145.080.000,00
52		SMP ROWOREJO	87.750.000,00	87.750.000,00
53		SMP AH-IRSYAD DARUSSALAM	22.230.000,00	22.230.000,00
54		SMP AL ASHRIYAH ROUDLOTUS SHOLIHIN	127.530.000,00	127.530.000,00
55		SMP Q MIFTAHUL ULUM	69.030.000,00	69.030.000,00
		BOS Kinerja		
56		SMP Q MIFTAHUL ULUM	35.000.000,00	35.000.000,00
		JUMLAH	3.559.430.000,00	3.559.408.800,00
		JUMLAH	3.559.430.000,00	3.559.408.800,00

IV 5.1.05.07	BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	671.254.272,00	671.254.272,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	12.01/04.0/000010/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/4/2023	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	37.411.634,00	37.411.634,00
2	12.01/04.0/000011/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/4/2023	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	103.406.810,00	103.406.810,00
3	12.01/04.0/000012/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/4/2023	Partai NASDEM	32.766.110,00	32.766.110,00
4	12.01/04.0/000013/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/4/2023	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	36.605.452,00	36.605.452,00
5	12.01/04.0/000014/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/4/2023	Partai Demokrat	95.744.090,00	95.744.090,00
6	12.01/04.0/000015/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/4/2023	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	17.269.057,00	17.269.057,00
7	12.01/04.0/000017/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/4/2023	Partai Golongan Karya (Golkar)	78.339.339,00	78.339.339,00
8	12.01/04.0/000018/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/5/2023	Partai Amanat Nasional (PAN)	25.286.976,00	25.286.976,00
9	12.01/04.0/000020/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/5/2023	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	38.145.978,00	38.145.978,00
10	12.01/04.0/000053/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/P.01/7/2023	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	206.278.826,00	206.278.826,00
		JUMLAH	671.254.272,00	671.254.272,00
		JUMLAH	671.254.272,00	671.254.272,00



LAMPIRAN

6

BELANJA BANTUAN SOSIAL



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

ANGGARAN	REALISASI
292.000.000,00	244.550.000,00

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

			45.000.000,00	0,00
			JUMLAH (Rp)	
No	No. SP2D	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
		Belanja Bantuan Sosial tidak terserap	45.000.000,00	
		Sub Jumlah	45.000.000,00	0,00

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu

			75.000.000,00	74.550.000,00
			JUMLAH (Rp)	
No	No. SP2D	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS SOSIAL			
1	12.01/04.0/000032/LS/1.06.0.0 0.0.00.05.0000/P.03/11/2023	Belanja bantuan sosial barang kepada individu berupa kursi roda	75.000.000,00	74.550.000,00
		Sub Jumlah	75.000.000,00	74.550.000,00

5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

			172.000.000,00	170.000.000,00
			JUMLAH (Rp)	
No	No. SP2D	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS SOSIAL			
1	12.01/04.0/000019/LS/1.06.0.0 0.0.00.05.0000/P.01/7/2023	Belanja bantuan sosial barang berupa alat prasmana kepada kelompok masyarakat	172.000.000,00	170.000.000,00
		Sub Jumlah	172.000.000,00	170.000.000,00



LAMPIRAN

7

BELANJA TIDAK TERDUGA



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

OPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.3.01.01.

Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01.

Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01.0001.

Belanja Tidak Terduga

No	No. SP2D	URAIAN	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00
			JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
1	12.01/04.0/000025/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/M/2/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembuatan 3 (Tiga) Unit Gorong-gorong Di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Tahun Anggaran 2023	131.540.000,00	131.540.000,00
2	12.01/04.0/000024/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/M/2/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pekerjaan Kontruksi Bronjong dan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase di Pekon Batu Kebavan Kecamatan Batu Ketulis Tahun Anggaran 2023	113.900.000,00	113.900.000,00
3	12.01/04.0/000023/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/M/2/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembuatan Jembatan Gantung di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau Tahun Anggaran 2023	149.110.000,00	149.110.000,00
4	12.01/04.0/000200/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/5/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembersihan Material Longsor Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa Tahun Anggaran 2023	66.656.000,00	66.656.000,00
5	12.01/04.0/000201/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/5/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Normalisasi Sungai Way Kelahok di Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung Tahun Anggaran 2023	54.648.000,00	54.648.000,00
6	12.01/04.0/000319/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/7/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pemasangan Bronjong, Penimbunan Bahu Jalan dan Pembuatan Siring Beton Di Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Tahun Anggaran 2023	164.875.000,00	164.875.000,00
7	12.01/04.0/000339/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.01/7/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pemasangan Bronjong, Penimbunan Bahu Jalan dan Pembuatan Siring Beton Di Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Tahun Anggaran 2023	98.100.000,00	98.100.000,00
8	12.01/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/8/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam an. Sulastrri Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
9	12.01/04.0/000376/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/8/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Suber Rejo Kecamatan Batu Ketulis an. Suvatmini Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
10	12.01/04.0/000377/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/8/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit an. Ujang Suryanak Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
11	12.01/04.0/000475/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/10/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Perbaikan Longsor/Amblasnya Garasi/Parkiran Polisi Resort Lampung Barat Tahun Anggaran 2023	180.053.460,00	180.053.460,00
12	12.01/04.0/000504/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/10/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembayaran Utang Jaminan Persalinan Tahun 2020	191.262.100,00	191.262.100,00
13	12.01/04.0/000521/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.02/10/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Wasnada Kecamatan Sekincau An. Saipudin Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
14	12.01/04.0/000556/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit An. Hazami Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
15	12.01/04.0/000557/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Desa Tuosari Kecamatan Sumberiava An. Husen Ashari Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
16	12.01/04.0/000558/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong An. Suhirman Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
17	12.01/04.0/000559/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Taniung Raya Kecamatan Way Tenong An. Imron Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
18	12.01/04.0/000563/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong An. Ahmadi Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
19	12.01/04.0/000564/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong An. Rudi Iskandar Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
20	12.01/04.0/000560/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong An. Samsidar Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
21	12.01/04.0/000561/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong An. Sapri Yanto Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
22	12.01/04.0/000562/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Perbaikan dan Rehabilitasi Ruas Jalan Sukananti-Sidomakmur di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Tahun Anggaran 2023	142.750.000,00	142.750.000,00
23	12.01/04.0/000622/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Untuk Bantuan Transportasi Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah di Kecamatan Suoh Dan Kecamatan bandar Negeri Suoh Tahun Anggaran 2023	2.512.800,00	2.512.800,00
24	12.01/04.0/000698/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Perbaikan/Pembuatan Jembatan Way Uluhan di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Tahun Anggaran 2023	142.725.000,00	142.725.000,00
25	12.01/04.0/000699/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit an. Janu Iswoyo Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
26	12.01/04.0/000700/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Kenali Kecamatan Belalau an. Sulvanti Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2023	5.000.000,00	5.000.000,00
27		Anggaran Belanja Tidak Terduga tidak terserap s.d. 31 Desember 2023	105.009.535,00	0,00
		JUMLAH	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00



LAMPIRAN

8

BELANJA BAGI HASIL PAJAK KE PEKON



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

OPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.4.01.01.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

5.4.01.01.03

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

5.4.01.01.03.0001

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

1.846.691.600,00

1.407.134.300,00

439.557.300,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	11.616.300,00	8.633.100,00	2.983.200,00
2	BALIK BUKIT	WAY EMPULAU ULU	12.048.600,00	9.197.300,00	2.851.300,00
3	BALIK BUKIT	WATAS	14.422.600,00	11.010.000,00	3.412.600,00
4	BALIK BUKIT	PADANG DALOM	12.249.000,00	9.541.700,00	2.707.300,00
5	BALIK BUKIT	GUNUNG SUGIH	13.157.600,00	11.134.800,00	2.022.800,00
6	BALIK BUKIT	SEBARUS	19.058.000,00	16.957.600,00	2.100.400,00
7	BALIK BUKIT	PADANG CAHYA	18.033.600,00	13.693.500,00	4.340.100,00
8	BALIK BUKIT	SUKARAME	16.418.600,00	12.717.200,00	3.701.400,00
9	BALIK BUKIT	BAHWAY	14.198.900,00	10.718.700,00	3.480.200,00
10	BALIK BUKIT	SEDAMPAH INDAH	13.212.900,00	10.066.200,00	3.146.700,00
11	SUKAU	TANJUNG RAYA	16.841.000,00	13.275.200,00	3.565.800,00
12	SUKAU	HANAKAU	14.169.900,00	11.211.600,00	2.958.300,00
13	SUKAU	BUAY NYERUPA	16.244.400,00	11.948.700,00	4.295.700,00
14	SUKAU	TAPAK SIRING	11.883.900,00	8.973.200,00	2.910.700,00
15	SUKAU	PAGAR DEWA	15.038.000,00	11.867.700,00	3.170.300,00
16	SUKAU	JAGA RAGA	13.293.200,00	10.132.500,00	3.160.700,00
17	SUKAU	SUKA MULYA	11.681.700,00	8.864.700,00	2.817.000,00
18	SUKAU	BANDAR BARU	12.255.700,00	9.474.000,00	2.781.700,00
19	SUKAU	BUMI JAYA	9.994.800,00	7.645.800,00	2.349.000,00
20	SUKAU	TEBA PERING RAYA	10.120.100,00	7.658.900,00	2.461.200,00
21	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK	15.953.600,00	11.242.900,00	4.710.700,00
22	LOMBOK SEMINUNG	HENI ARONG	11.086.700,00	8.418.300,00	2.668.400,00
23	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR	10.021.800,00	7.596.500,00	2.425.300,00
24	LOMBOK SEMINUNG	LUMBOK TIMUR	10.524.700,00	8.022.000,00	2.502.700,00
25	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	11.551.700,00	8.807.100,00	2.744.600,00
26	LOMBOK SEMINUNG	SUKA MAJU	10.127.400,00	7.778.700,00	2.348.700,00
27	LOMBOK SEMINUNG	UJUNG	10.153.900,00	7.323.600,00	2.830.300,00
28	LOMBOK SEMINUNG	KEAGUNGAN	10.786.700,00	8.747.900,00	2.038.800,00
29	LOMBOK SEMINUNG	TAWAN SUKA MULYA	9.440.800,00	7.003.900,00	2.436.900,00
30	LOMBOK SEMINUNG	PANCUR MAS	9.292.200,00	7.063.200,00	2.229.000,00
31	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK SELATAN	10.386.100,00	7.912.700,00	2.473.400,00
32	SUMBERJAYA	SIMPANG SARI	14.906.500,00	11.570.600,00	3.335.900,00
33	SUMBERJAYA	SUKA JAYA	17.697.400,00	13.921.600,00	3.775.800,00
34	SUMBERJAYA	SINDANG PAGAR	16.947.000,00	13.152.200,00	3.794.800,00
35	SUMBERJAYA	SUKA PURA	25.601.100,00	14.683.000,00	10.918.100,00
36	SUMBERJAYA	WAY PETAY	19.059.800,00	14.729.700,00	4.330.100,00
37	KEBUN TEBU	PURA JAYA	15.309.700,00	12.486.200,00	2.823.500,00
38	KEBUN TEBU	PURA WIWITAN	17.312.900,00	13.073.100,00	4.239.800,00
39	KEBUN TEBU	TRIBUDI SYUKUR	15.283.700,00	11.421.700,00	3.862.000,00
40	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	12.503.100,00	9.519.900,00	2.983.200,00
41	KEBUN TEBU	MUARA JAYA II	11.984.000,00	9.133.200,00	2.850.800,00
42	KEBUN TEBU	TRIBUDI MAKMUR	14.358.400,00	10.997.100,00	3.361.300,00
43	KEBUN TEBU	TUGU MULYA	11.601.000,00	8.959.400,00	2.641.600,00
44	KEBUN TEBU	CIPTA MULYA	11.054.400,00	8.430.100,00	2.624.300,00
45	KEBUN TEBU	MUARA BARU	10.607.300,00	8.069.300,00	2.538.000,00
46	KEBUN TEBU	SINAR LUAS	10.625.900,00	7.620.400,00	3.005.500,00
47	WAY TENONG	MUTAR ALAM	15.437.700,00	10.278.500,00	5.159.200,00
48	WAY TENONG	KARANG AGUNG	14.577.700,00	11.189.800,00	3.387.900,00
49	WAY TENONG	PURA LAKSANA	16.477.900,00	12.204.000,00	4.273.900,00
50	WAY TENONG	TANJUNG RAYA	13.535.100,00	10.327.200,00	3.207.900,00
51	WAY TENONG	SUKANANTI	13.688.700,00	10.240.900,00	3.447.800,00
52	WAY TENONG	SUKA RAJA	13.927.500,00	10.540.700,00	3.386.800,00
53	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	15.403.600,00	11.663.400,00	3.740.200,00
54	WAY TENONG	TAMBAK JAYA	15.284.600,00	11.764.300,00	3.520.300,00
55	AIR HITAM	SIDODADI	10.851.300,00	8.260.400,00	2.590.900,00
56	AIR HITAM	SEMARANG JAYA	13.146.700,00	9.687.400,00	3.459.300,00
57	AIR HITAM	SUMBER ALAM	13.288.900,00	10.429.200,00	2.859.700,00
58	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	12.485.600,00	9.507.300,00	2.978.300,00
59	AIR HITAM	SUKA JADI	11.362.000,00	8.615.700,00	2.746.300,00
60	AIR HITAM	SRI MENANTI	12.850.900,00	9.665.800,00	3.185.100,00
61	AIR HITAM	SINAR JAYA	11.939.500,00	9.082.900,00	2.856.600,00
62	AIR HITAM	RIGIS JAYA	11.810.400,00	8.950.600,00	2.859.800,00
63	AIR HITAM	SUKA DAMAI	10.290.200,00	7.823.800,00	2.466.400,00
64	AIR HITAM	MANGGARAI	10.447.000,00	7.956.800,00	2.490.200,00
65	BELALAU	KENALI	13.174.600,00	10.103.400,00	3.071.200,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
66	BELALAU	KEJADIAN	10.468.800,00	7.544.400,00	2.924.400,00
67	BELALAU	BUMI AGUNG	10.939.500,00	8.330.500,00	2.609.000,00
68	BELALAU	TURGAK	9.989.200,00	7.580.200,00	2.409.000,00
69	BELALAU	BEDUDU	12.011.000,00	9.080.900,00	2.930.100,00
70	BELALAU	SUKARAME	11.598.000,00	8.791.500,00	2.806.500,00
71	BELALAU	HUJUNG	15.178.000,00	11.560.700,00	3.617.300,00
72	BELALAU	SERUNGKUK	9.756.800,00	7.412.000,00	2.344.800,00
73	BELALAU	SUKA MAKMUR	9.785.300,00	7.489.700,00	2.295.600,00
74	BELALAU	PAJAR AGUNG	9.278.400,00	7.060.000,00	2.218.400,00
75	BELALAU	ARGO MULYO	16.313.600,00	12.578.900,00	3.734.700,00
76	BATU KETULIS	BATU KEBAYAN	11.438.100,00	8.684.100,00	2.754.000,00
77	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	14.596.300,00	10.808.400,00	3.787.900,00
78	BATU KETULIS	CAMPANG TIGA	12.353.500,00	9.504.500,00	2.849.000,00
79	BATU KETULIS	LUAS	11.503.300,00	8.345.500,00	3.157.800,00
80	BATU KETULIS	BAKHU	16.820.900,00	13.635.800,00	3.185.100,00
81	BATU KETULIS	WAY NGISON	11.100.000,00	8.467.800,00	2.632.200,00
82	BATU KETULIS	KUBU LIKU JAYA	13.500.200,00	10.201.200,00	3.299.000,00
83	BATU KETULIS	SUMBER REJO	10.180.100,00	7.791.100,00	2.389.000,00
84	BATU KETULIS	ATAR KUWAU	11.267.900,00	8.595.800,00	2.672.100,00
85	SEKINCAU	PAMPANGAN	16.576.300,00	12.637.100,00	3.939.200,00
86	SEKINCAU	WASPADA	16.684.000,00	12.452.200,00	4.231.800,00
87	SEKINCAU	TIGA JAYA	14.865.500,00	11.067.100,00	3.798.400,00
88	SEKINCAU	GIHAM SUKA MAJU	22.591.500,00	17.865.900,00	4.725.600,00
89	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	14.653.800,00	12.092.400,00	2.561.400,00
90	PAGAR DEWA	BASUNGAN	14.961.900,00	12.047.700,00	2.914.200,00
91	PAGAR DEWA	MEKAR SARI	13.433.500,00	10.708.000,00	2.725.500,00
92	PAGAR DEWA	SIDO MULYO	24.661.900,00	20.680.300,00	3.981.600,00
93	PAGAR DEWA	SIDO DADI	10.202.900,00	8.249.700,00	1.953.200,00
94	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	12.935.000,00	10.071.100,00	2.863.900,00
95	PAGAR DEWA	SUKA JAYA	12.316.000,00	9.938.500,00	2.377.500,00
96	PAGAR DEWA	BATU API	9.899.700,00	7.629.400,00	2.270.300,00
97	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	16.875.800,00	11.732.900,00	5.142.900,00
98	PAGAR DEWA	SUKA MULYA	14.700.800,00	11.739.400,00	2.961.400,00
99	BATU BRAK	PEKON BALAK	15.388.300,00	11.681.400,00	3.706.900,00
100	BATU BRAK	KEGERINGAN	19.446.100,00	14.588.200,00	4.857.900,00
101	BATU BRAK	KEMBAHANG	13.964.000,00	10.526.600,00	3.437.400,00
102	BATU BRAK	NEGERI RATU	12.368.300,00	8.340.700,00	4.027.600,00
103	BATU BRAK	KOTA BESI	16.954.400,00	13.375.100,00	3.579.300,00
104	BATU BRAK	SUKA BUMI	12.887.900,00	9.902.300,00	2.985.600,00
105	BATU BRAK	GUNUNG SUGIH	10.377.200,00	7.511.800,00	2.865.400,00
106	BATU BRAK	SUKA RAJA	9.475.600,00	7.197.600,00	2.278.000,00
107	BATU BRAK	CANGGU	12.370.500,00	9.372.200,00	2.998.300,00
108	BATU BRAK	KERANG	9.996.300,00	7.571.000,00	2.425.300,00
109	BATU BRAK	TEBA LIOKH	10.832.900,00	8.144.600,00	2.688.300,00
110	SUOH	SUMBER AGUNG	14.600.800,00	11.008.000,00	3.592.800,00
111	SUOH	TUGU RATU	17.576.200,00	13.359.000,00	4.217.200,00
112	SUOH	SUKA MARGA	16.453.800,00	12.095.500,00	4.358.300,00
113	SUOH	BANDING AGUNG	15.250.300,00	11.609.700,00	3.640.600,00
114	SUOH	ROWO REJO	19.229.200,00	14.674.000,00	4.555.200,00
115	SUOH	SIDO REJO	18.793.100,00	14.933.500,00	3.859.600,00
116	SUOH	RINGIN SARI	12.142.900,00	9.296.500,00	2.846.400,00
117	BANDAR NEGERI SUOH	SUOH	23.922.100,00	18.531.000,00	5.391.100,00
118	BANDAR NEGERI SUOH	SRI MULYO	11.337.400,00	8.560.900,00	2.776.500,00
119	BANDAR NEGERI SUOH	BANDAR AGUNG	42.837.400,00	32.557.100,00	10.280.300,00
120	BANDAR NEGERI SUOH	RINGIN JAYA	13.104.500,00	10.012.000,00	3.092.500,00
121	BANDAR NEGERI SUOH	BUMI HANTATAI	23.590.900,00	15.538.500,00	8.052.400,00
122	BANDAR NEGERI SUOH	GUNUNG RATU	13.663.000,00	10.315.500,00	3.347.500,00
123	BANDAR NEGERI SUOH	TANJUNG SARI	13.210.700,00	10.657.300,00	2.553.400,00
124	BANDAR NEGERI SUOH	NEGERI JAYA	17.606.100,00	13.852.800,00	3.753.300,00
125	BANDAR NEGERI SUOH	TEMBELANG	13.068.200,00	10.284.800,00	2.783.400,00
126	BANDAR NEGERI SUOH	TRI MEKAR JAYA	12.692.000,00	9.567.500,00	3.124.500,00
127	GEDUNG SURIAN	CIPTA WARAS	17.377.300,00	13.433.000,00	3.944.300,00
128	GEDUNG SURIAN	GEDUNG SURIAN	21.551.000,00	16.897.300,00	4.653.700,00
129	GEDUNG SURIAN	PURA MEKAR	16.795.300,00	12.647.000,00	4.148.300,00
130	GEDUNG SURIAN	TRI MULYO	17.342.500,00	13.198.900,00	4.143.600,00
131	GEDUNG SURIAN	MEKAR JAYA	16.951.400,00	12.819.500,00	4.131.900,00
		JUMLAH	1.846.691.600,00	1.407.134.300,00	439.557.300,00



LAMPIRAN

9

BELANJA TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI KE PEKON



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

OPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.4.01.02

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

5.4.01.02.01

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

5.4.01.02.01.0001

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

			336.668.600,00	227.695.100,00	108.973.500,00
No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	15.265.700,00	10.279.900,00	4.985.800,00
2	BALIK BUKIT	WAY EMPULAU ULU	2.664.000,00	1.799.500,00	864.500,00
3	BALIK BUKIT	WATAS	2.641.100,00	1.784.000,00	857.100,00
4	BALIK BUKIT	PADANG DALOM	2.414.200,00	1.631.100,00	783.100,00
5	BALIK BUKIT	GUNUNG SUGIH	2.624.800,00	1.772.600,00	852.200,00
6	BALIK BUKIT	SEBARUS	4.955.800,00	3.342.400,00	1.613.400,00
7	BALIK BUKIT	PADANG CAHYA	2.679.900,00	1.812.500,00	867.400,00
8	BALIK BUKIT	SUKARAME	2.851.900,00	1.927.200,00	924.700,00
9	BALIK BUKIT	BAHWAY	3.430.700,00	2.316.100,00	1.114.600,00
10	BALIK BUKIT	SEDAMPAH INDAH	2.342.200,00	1.583.000,00	759.200,00
11	SUKAU	TANJUNG RAYA	5.656.100,00	3.814.700,00	1.841.400,00
12	SUKAU	HANAKAU	2.587.700,00	1.748.700,00	839.000,00
13	SUKAU	BUAY NYERUPA	3.495.500,00	2.360.500,00	1.135.000,00
14	SUKAU	TAPAK SIRING	3.020.300,00	2.039.100,00	981.200,00
15	SUKAU	PAGAR DEWA	4.497.700,00	3.034.600,00	1.463.100,00
16	SUKAU	JAGA RAGA	2.436.400,00	1.646.800,00	789.600,00
17	SUKAU	SUKA MULYA	2.122.400,00	1.434.900,00	687.500,00
18	SUKAU	BANDAR BARU	3.163.300,00	2.135.300,00	1.028.000,00
19	SUKAU	BUMI JAYA	2.089.900,00	1.412.200,00	677.700,00
20	SUKAU	TEBA PERING RAYA	2.588.700,00	1.747.900,00	840.800,00
21	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK	8.429.900,00	5.680.400,00	2.749.500,00
22	LOMBOK SEMINUNG	HENI ARONG	1.589.200,00	1.075.700,00	513.500,00
23	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR	1.712.300,00	1.158.200,00	554.100,00
24	LOMBOK SEMINUNG	LUMBOK TIMUR	1.576.200,00	1.066.800,00	509.400,00
25	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	1.595.100,00	1.079.900,00	515.200,00
26	LOMBOK SEMINUNG	SUKA MAJU	1.708.000,00	1.155.100,00	552.900,00
27	LOMBOK SEMINUNG	UJUNG	1.571.500,00	1.063.400,00	508.100,00
28	LOMBOK SEMINUNG	KEAGUNGAN	1.719.000,00	1.162.900,00	556.100,00
29	LOMBOK SEMINUNG	TAWAN SUKA MULYA	1.560.700,00	1.055.900,00	504.800,00
30	LOMBOK SEMINUNG	PANCUR MAS	1.558.000,00	1.054.100,00	503.900,00
31	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK SELATAN	1.864.000,00	1.260.300,00	603.700,00
32	SUMBERJAYA	SIMPANG SARI	20.264.700,00	13.845.700,00	6.419.000,00
33	SUMBERJAYA	SUKA JAYA	2.247.800,00	1.520.600,00	727.200,00
34	SUMBERJAYA	SINDANG PAGAR	2.242.100,00	1.516.700,00	725.400,00
35	SUMBERJAYA	SUKA PURA	2.840.800,00	1.921.400,00	919.400,00
36	SUMBERJAYA	WAY PETAY	3.146.000,00	2.126.100,00	1.019.900,00
37	KEBUN TEBU	PURA JAYA	9.217.700,00	6.210.700,00	3.007.000,00
38	KEBUN TEBU	PURA WIWITAN	2.865.100,00	1.935.400,00	929.700,00
39	KEBUN TEBU	TRIBUDI SYUKUR	2.123.600,00	1.436.700,00	686.900,00
40	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	1.877.800,00	1.270.400,00	607.400,00
41	KEBUN TEBU	MUARA JAYA II	2.619.800,00	1.769.500,00	850.300,00
42	KEBUN TEBU	TRIBUDI MAKMUR	1.839.000,00	1.245.200,00	593.800,00
43	KEBUN TEBU	TUGU MULYA	1.764.000,00	1.193.000,00	571.000,00
44	KEBUN TEBU	CIPTA MULYA	1.780.600,00	1.204.500,00	576.100,00
45	KEBUN TEBU	MUARA BARU	1.913.600,00	1.293.800,00	619.800,00
46	KEBUN TEBU	SINAR LUAS	1.848.800,00	1.250.300,00	598.500,00
47	WAY TENONG	MUTAR ALAM	2.003.000,00	1.355.500,00	647.500,00
48	WAY TENONG	KARANG AGUNG	3.990.000,00	2.692.400,00	1.297.600,00
49	WAY TENONG	PURA LAKSANA	1.979.200,00	1.339.000,00	640.200,00
50	WAY TENONG	TANJUNG RAYA	1.982.000,00	1.340.800,00	641.200,00
51	WAY TENONG	SUKANANTI	2.630.200,00	1.777.200,00	853.000,00
52	WAY TENONG	SUKA RAJA	2.359.000,00	1.595.000,00	764.000,00
53	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	2.681.800,00	1.812.600,00	869.200,00
54	WAY TENONG	TAMBAK JAYA	2.053.400,00	1.389.100,00	664.300,00
55	AIR HITAM	SIDODADI	1.796.600,00	1.215.200,00	581.400,00
56	AIR HITAM	SEMARANG JAYA	2.063.900,00	1.395.800,00	668.100,00
57	AIR HITAM	SUMBER ALAM	2.117.400,00	1.431.500,00	685.900,00
58	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	2.558.300,00	1.728.300,00	830.000,00
59	AIR HITAM	SUKA JADI	1.734.000,00	1.173.400,00	560.600,00
60	AIR HITAM	SRI MENANTI	2.344.200,00	1.584.400,00	759.800,00
61	AIR HITAM	SINAR JAYA	1.600.700,00	1.083.700,00	517.000,00
62	AIR HITAM	RIGIS JAYA	1.599.800,00	1.083.200,00	516.600,00
63	AIR HITAM	SUKA DAMAI	1.573.800,00	1.065.000,00	508.800,00
64	AIR HITAM	MANGGARAI	1.574.400,00	1.065.500,00	508.900,00
65	BELALAU	KENALI	5.839.600,00	3.936.700,00	1.902.900,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
66	BELALAU	KEJADIAN	1.651.500,00	1.117.500,00	534.000,00
67	BELALAU	BUMI AGUNG	1.583.200,00	1.071.600,00	511.600,00
68	BELALAU	TURGAK	1.713.000,00	1.158.700,00	554.300,00
69	BELALAU	BEDUDU	1.897.000,00	1.283.400,00	613.600,00
70	BELALAU	SUKARAME	1.673.200,00	1.132.600,00	540.600,00
71	BELALAU	HUJUNG	1.652.300,00	1.119.700,00	532.600,00
72	BELALAU	SERUNGKUK	1.566.400,00	1.059.900,00	506.500,00
73	BELALAU	SUKA MAKMUR	1.560.900,00	1.056.100,00	504.800,00
74	BELALAU	PAJAR AGUNG	1.556.800,00	1.053.200,00	503.600,00
75	BELALAU	ARGO MULYO	1.800.500,00	1.219.700,00	580.800,00
76	BATU KETULIS	BATU KEBAYAN	2.249.300,00	1.519.800,00	729.500,00
77	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	2.131.300,00	1.441.200,00	690.100,00
78	BATU KETULIS	CAMPANG TIGA	1.600.100,00	1.083.300,00	516.800,00
79	BATU KETULIS	LUAS	1.656.900,00	1.121.200,00	535.700,00
80	BATU KETULIS	BAKHU	2.503.200,00	1.691.700,00	811.500,00
81	BATU KETULIS	WAY NGISON	1.662.700,00	1.125.200,00	537.500,00
82	BATU KETULIS	KUBU LIKU JAYA	2.013.600,00	1.362.000,00	651.600,00
83	BATU KETULIS	SUMBER REJO	1.565.100,00	1.059.000,00	506.100,00
84	BATU KETULIS	ATAR KUWAU	1.587.100,00	1.074.300,00	512.800,00
85	SEKINCAU	PAMPANGAN	2.574.800,00	1.741.100,00	833.700,00
86	SEKINCAU	WASPADA	2.053.000,00	1.389.800,00	663.200,00
87	SEKINCAU	TIGA JAYA	2.620.500,00	1.771.200,00	849.300,00
88	SEKINCAU	GIHAM SUKA MAJU	4.051.500,00	2.735.700,00	1.315.800,00
89	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	2.346.300,00	1.586.200,00	760.100,00
90	PAGAR DEWA	BASUNGAN	2.208.400,00	1.492.900,00	715.500,00
91	PAGAR DEWA	MEKAR SARI	1.755.300,00	1.188.100,00	567.200,00
92	PAGAR DEWA	SIDO MULYO	2.451.500,00	1.659.200,00	792.300,00
93	PAGAR DEWA	SIDO DADI	1.703.000,00	1.151.700,00	551.300,00
94	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	1.743.700,00	1.180.100,00	563.600,00
95	PAGAR DEWA	SUKA JAYA	1.597.400,00	1.081.400,00	516.000,00
96	PAGAR DEWA	BATU API	1.560.200,00	1.055.500,00	504.700,00
97	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	2.005.600,00	1.356.500,00	649.100,00
98	PAGAR DEWA	SUKA MULYA	1.636.900,00	1.109.000,00	527.900,00
99	BATU BRAK	PEKON BALAK	2.308.200,00	1.559.500,00	748.700,00
100	BATU BRAK	KEGERINGAN	2.454.400,00	1.658.900,00	795.500,00
101	BATU BRAK	KEMBAHANG	2.389.400,00	1.615.400,00	774.000,00
102	BATU BRAK	NEGERI RATU	1.747.000,00	1.182.300,00	564.700,00
103	BATU BRAK	KOTA BESI	3.116.000,00	2.104.900,00	1.011.100,00
104	BATU BRAK	SUKA BUMI	1.830.100,00	1.238.400,00	591.700,00
105	BATU BRAK	GUNUNG SUGIH	1.578.000,00	1.067.900,00	510.100,00
106	BATU BRAK	SUKA RAJA	1.635.700,00	1.106.400,00	529.300,00
107	BATU BRAK	CANGGU	2.186.500,00	1.477.700,00	708.800,00
108	BATU BRAK	KERANG	1.565.400,00	1.059.200,00	506.200,00
109	BATU BRAK	TEBA LIOKH	1.576.000,00	1.066.600,00	509.400,00
110	SUOH	SUMBER AGUNG	2.578.800,00	1.742.900,00	835.900,00
111	SUOH	TUGU RATU	2.709.800,00	1.832.700,00	877.100,00
112	SUOH	SUKA MARGA	1.952.800,00	1.322.200,00	630.600,00
113	SUOH	BANDING AGUNG	2.445.300,00	1.653.400,00	791.900,00
114	SUOH	ROWO REJO	1.788.500,00	1.212.900,00	575.600,00
115	SUOH	SIDO REJO	1.658.300,00	1.124.000,00	534.300,00
116	SUOH	RINGIN SARI	1.603.200,00	1.085.400,00	517.800,00
117	BANDAR NEGERI SUOH	SUOH	3.099.300,00	2.096.800,00	1.002.500,00
118	BANDAR NEGERI SUOH	SRI MULYO	2.003.100,00	1.354.200,00	648.900,00
119	BANDAR NEGERI SUOH	BANDAR AGUNG	3.554.400,00	2.410.100,00	1.144.300,00
120	BANDAR NEGERI SUOH	RINGIN JAYA	1.906.300,00	1.289.900,00	616.400,00
121	BANDAR NEGERI SUOH	BUMI HANTATAI	1.865.900,00	1.265.100,00	600.800,00
122	BANDAR NEGERI SUOH	GUNUNG RATU	1.989.400,00	1.346.000,00	643.400,00
123	BANDAR NEGERI SUOH	TANJUNG SARI	1.580.200,00	1.069.500,00	510.700,00
124	BANDAR NEGERI SUOH	NEGERI JAYA	1.663.100,00	1.127.200,00	535.900,00
125	BANDAR NEGERI SUOH	TEMBELANG	1.820.900,00	1.232.100,00	588.800,00
126	BANDAR NEGERI SUOH	TRI MEKAR JAYA	2.200.900,00	1.487.900,00	713.000,00
127	GEDUNG SURIAN	CIPTA WARAS	2.256.700,00	1.526.700,00	730.000,00
128	GEDUNG SURIAN	GEDUNG SURIAN	2.574.100,00	1.741.000,00	833.100,00
129	GEDUNG SURIAN	PURA MEKAR	3.724.700,00	2.514.800,00	1.209.900,00
130	GEDUNG SURIAN	TRI MULYO	1.905.900,00	1.291.300,00	614.600,00
131	GEDUNG SURIAN	MEKAR JAYA	1.983.200,00	1.343.300,00	639.900,00
		JUMLAH	336.668.600,00	227.695.100,00	108.973.500,00



LAMPIRAN

10

BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEKON (DD)



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

OPD

5.4.02.05

5.4.02.05.01

5.4.02.05.01.0001

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

117.770.480.000,00

117.770.480.000,00

0,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	972.165.000,00	972.165.000,00	0,00
2	Balik Bukit	Padang Cahya	1.474.457.000,00	1.474.457.000,00	0,00
3	Balik Bukit	Sebarus	919.691.000,00	919.691.000,00	0,00
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	855.570.000,00	855.570.000,00	0,00
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	888.804.000,00	888.804.000,00	0,00
6	Balik Bukit	Wates	774.689.000,00	774.689.000,00	0,00
7	Balik Bukit	Padang Dalom	743.596.000,00	743.596.000,00	0,00
8	Balik Bukit	Sukarame	1.031.294.000,00	1.031.294.000,00	0,00
9	Balik Bukit	Bahway	1.097.514.000,00	1.097.514.000,00	0,00
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	983.658.000,00	983.658.000,00	0,00
11	Sumber Jaya	Simpang Sari	1.169.843.000,00	1.169.843.000,00	0,00
12	Sumber Jaya	Sukajaya	843.265.000,00	843.265.000,00	0,00
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	849.411.000,00	849.411.000,00	0,00
14	Sumber Jaya	Sukapura	889.325.000,00	889.325.000,00	0,00
15	Sumber Jaya	Way Petai	1.369.985.000,00	1.369.985.000,00	0,00
16	Belalau	Kenali	1.059.374.000,00	1.059.374.000,00	0,00
17	Belalau	Kejadian	724.105.000,00	724.105.000,00	0,00
18	Belalau	Bumi Agung	812.480.000,00	812.480.000,00	0,00
19	Belalau	Turgak	714.139.000,00	714.139.000,00	0,00
20	Belalau	Bedudu	806.451.000,00	806.451.000,00	0,00
21	Belalau	Sukarame	837.142.000,00	837.142.000,00	0,00
22	Belalau	Hujung	1.137.242.000,00	1.137.242.000,00	0,00
23	Belalau	Serungkuk	777.853.000,00	777.853.000,00	0,00
24	Belalau	Suka Makmur	790.927.000,00	790.927.000,00	0,00
25	Belalau	Fajar Agung	717.160.000,00	717.160.000,00	0,00
26	Way Tenong	Puralaksana	1.015.984.000,00	1.015.984.000,00	0,00
27	Way Tenong	Karang Agung	1.131.576.000,00	1.131.576.000,00	0,00
28	Way Tenong	Mutar Alam	906.491.000,00	906.491.000,00	0,00
29	Way Tenong	Tanjung Raya	1.070.962.000,00	1.070.962.000,00	0,00
30	Way Tenong	Sukananti	1.081.833.000,00	1.081.833.000,00	0,00
31	Way Tenong	Sukaraja	1.205.294.000,00	1.205.294.000,00	0,00
32	Way Tenong	Padang Tambak	1.047.660.000,00	1.047.660.000,00	0,00
33	Way Tenong	Tambak Jaya	908.124.000,00	908.124.000,00	0,00
34	Sekincau	Pampangan	1.386.761.000,00	1.386.761.000,00	0,00
35	Sekincau	Waspada	831.951.000,00	831.951.000,00	0,00
36	Sekincau	Tiga Jaya	1.094.224.000,00	1.094.224.000,00	0,00
37	Sekincau	Giham Sukamaju	918.877.000,00	918.877.000,00	0,00
38	Sekincau	Suka Marga	1.043.141.000,00	1.043.141.000,00	0,00
39	Suoh	Sumber Agung	835.763.000,00	835.763.000,00	0,00
40	Suoh	Tuguratu	1.005.470.000,00	1.005.470.000,00	0,00
41	Suoh	Banding Agung	840.149.000,00	840.149.000,00	0,00
42	Suoh	Roworejo	1.074.075.000,00	1.074.075.000,00	0,00
43	Suoh	Sidorejo	871.858.000,00	871.858.000,00	0,00
44	Suoh	Ringin Sari	785.832.000,00	785.832.000,00	0,00
45	Batu Brak	Kembahang	781.956.000,00	781.956.000,00	0,00
46	Batu Brak	Negeri Ratu	709.037.000,00	709.037.000,00	0,00
47	Batu Brak	Kegeringan	853.953.000,00	853.953.000,00	0,00
48	Batu Brak	Gunung Sugih	684.623.000,00	684.623.000,00	0,00
49	Batu Brak	Pekon Balak	746.939.000,00	746.939.000,00	0,00
50	Batu Brak	Sukabumi	880.626.000,00	880.626.000,00	0,00
51	Batu Brak	Canggu	735.952.000,00	735.952.000,00	0,00
52	Batu Brak	Kota Besi	1.009.842.000,00	1.009.842.000,00	0,00
53	Batu Brak	Sukaraja	675.040.000,00	675.040.000,00	0,00
54	Batu Brak	Kerang	670.318.000,00	670.318.000,00	0,00
55	Batu Brak	Teba Liyokh	750.072.000,00	750.072.000,00	0,00
56	Sukau	Tanjung Raya	1.072.084.000,00	1.072.084.000,00	0,00
57	Sukau	Hanakau	1.106.222.000,00	1.106.222.000,00	0,00
58	Sukau	Buay Nyerupa	1.065.221.000,00	1.065.221.000,00	0,00
59	Sukau	Tapak Siring	735.751.000,00	735.751.000,00	0,00
60	Sukau	Jaga Raga	888.721.000,00	888.721.000,00	0,00
61	Sukau	Pagar Dewa	858.792.000,00	858.792.000,00	0,00
62	Sukau	Suka Mulya	688.694.000,00	688.694.000,00	0,00
63	Sukau	Bandar Baru	800.884.000,00	800.884.000,00	0,00
64	Sukau	Bumi Jaya	909.875.000,00	909.875.000,00	0,00
65	Sukau	Teba Pering Jaya	873.081.000,00	873.081.000,00	0,00
66	Gedung Surian	Gedung Surian	824.859.000,00	824.859.000,00	0,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
67	Gedung Surian	Pura Mekar	1.057.253.000,00	1.057.253.000,00	0,00
68	Gedung Surian	Cipta Waras	974.590.000,00	974.590.000,00	0,00
69	Gedung Surian	Tri Mulyo	1.176.024.000,00	1.176.024.000,00	0,00
70	Gedung Surian	Mekar Jaya	883.791.000,00	883.791.000,00	0,00
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	1.060.093.000,00	1.060.093.000,00	0,00
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	968.230.000,00	968.230.000,00	0,00
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	825.168.000,00	825.168.000,00	0,00
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	1.055.430.000,00	1.055.430.000,00	0,00
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	1.166.037.000,00	1.166.037.000,00	0,00
76	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	744.893.000,00	744.893.000,00	0,00
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	842.964.000,00	842.964.000,00	0,00
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	802.637.000,00	802.637.000,00	0,00
79	Kebun Tebu	Muara Baru	1.118.074.000,00	1.118.074.000,00	0,00
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	978.235.000,00	978.235.000,00	0,00
81	Air Hitam	Sidodadi	698.533.000,00	698.533.000,00	0,00
82	Air Hitam	Semarang Jaya	866.513.000,00	866.513.000,00	0,00
83	Air Hitam	Sumber Alam	974.693.000,00	974.693.000,00	0,00
84	Air Hitam	Gunung Terang	1.010.711.000,00	1.010.711.000,00	0,00
85	Air Hitam	Suka Jadi	1.000.855.000,00	1.000.855.000,00	0,00
86	Air Hitam	Sri Menanti	812.296.000,00	812.296.000,00	0,00
87	Air Hitam	Sinar Jaya	935.687.000,00	935.687.000,00	0,00
88	Air Hitam	Rigis Jaya	708.428.000,00	708.428.000,00	0,00
89	Air Hitam	Suka Damai	729.888.000,00	729.888.000,00	0,00
90	Air Hitam	Manggarai	741.270.000,00	741.270.000,00	0,00
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	820.123.000,00	820.123.000,00	0,00
92	Pagar Dewa	Basungan	840.793.000,00	840.793.000,00	0,00
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	773.516.000,00	773.516.000,00	0,00
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	930.188.000,00	930.188.000,00	0,00
95	Pagar Dewa	Sidodadi	804.694.000,00	804.694.000,00	0,00
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	810.618.000,00	810.618.000,00	0,00
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	892.766.000,00	892.766.000,00	0,00
98	Pagar Dewa	Batu Api	746.134.000,00	746.134.000,00	0,00
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	935.381.000,00	935.381.000,00	0,00
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	984.650.000,00	984.650.000,00	0,00
101	Battu Ketulis	Argomulyo	869.905.000,00	869.905.000,00	0,00
102	Battu Ketulis	Batu Kebayan	961.107.000,00	961.107.000,00	0,00
103	Battu Ketulis	Atar Bawang	898.153.000,00	898.153.000,00	0,00
104	Battu Ketulis	Campang Tiga	784.451.000,00	784.451.000,00	0,00
105	Battu Ketulis	Luas	1.042.882.000,00	1.042.882.000,00	0,00
106	Battu Ketulis	Bakhu	844.022.000,00	844.022.000,00	0,00
107	Battu Ketulis	Way Ngison	717.485.000,00	717.485.000,00	0,00
108	Battu Ketulis	Kubu Liku Jaya	815.868.000,00	815.868.000,00	0,00
109	Battu Ketulis	Sumber Rejo	646.474.000,00	646.474.000,00	0,00
110	Battu Ketulis	Atar Kuwau	763.272.000,00	763.272.000,00	0,00
111	Lombok Seminung	Lombok	951.165.000,00	951.165.000,00	0,00
112	Lombok Seminung	Heni Arong	696.676.000,00	696.676.000,00	0,00
113	Lombok Seminung	Suka Banjar	673.189.000,00	673.189.000,00	0,00
114	Lombok Seminung	Lombok Timur	760.963.000,00	760.963.000,00	0,00
115	Lombok Seminung	Suka Banjar II Ujung Rembun	705.523.000,00	705.523.000,00	0,00
116	Lombok Seminung	Suka Maju	674.202.000,00	674.202.000,00	0,00
117	Lombok Seminung	Ujung	789.408.000,00	789.408.000,00	0,00
118	Lombok Seminung	Keagungan	1.093.964.000,00	1.093.964.000,00	0,00
119	Lombok Seminung	Tawan Suka Mulya	789.493.000,00	789.493.000,00	0,00
120	Lombok Seminung	Pancur Mas	657.097.000,00	657.097.000,00	0,00
121	Lombok Seminung	Lombok Selatan	628.418.000,00	628.418.000,00	0,00
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1.479.757.000,00	1.479.757.000,00	0,00
123	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	867.898.000,00	867.898.000,00	0,00
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	1.313.729.000,00	1.313.729.000,00	0,00
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	832.888.000,00	832.888.000,00	0,00
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	947.731.000,00	947.731.000,00	0,00
127	Bandar Negeri Suoh	Gunungratu	869.589.000,00	869.589.000,00	0,00
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjungsari	681.424.000,00	681.424.000,00	0,00
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	901.774.000,00	901.774.000,00	0,00
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	928.719.000,00	928.719.000,00	0,00
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	893.391.000,00	893.391.000,00	0,00
		JUMLAH	117.770.480.000,00	117.770.480.000,00	0,00



LAMPIRAN

11

BELANJA TRANSFER
BANTUAN KEUANGAN
KE PEKON (ADP)



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

OPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.4.02.05

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

5.4.02.05.01

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

5.4.02.05.01.0001

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

			53.399.700.000,00	53.399.700.000,00	0,00
No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
2	Balik Bukit	Padang Cahya	624.453.500,00	624.453.500,00	0,00
3	Balik Bukit	Sebarus	478.653.500,00	478.653.500,00	0,00
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	469.053.500,00	469.053.500,00	0,00
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
6	Balik Bukit	Wates	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
7	Balik Bukit	Padang Dalom	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
8	Balik Bukit	Sukarame	502.953.500,00	502.953.500,00	0,00
9	Balik Bukit	Bahway	527.253.500,00	527.253.500,00	0,00
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
11	Sumber Jaya	Simpangsari	469.053.500,00	469.053.500,00	0,00
12	Sumber Jaya	Sukajaya	399.828.500,00	399.828.500,00	0,00
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
14	Sumber Jaya	Sukapura	493.353.500,00	493.353.500,00	0,00
15	Sumber Jaya	Way Petai	551.553.500,00	551.553.500,00	0,00
16	Belalau	Kenali	371.853.500,00	371.853.500,00	0,00
17	Belalau	Kejadian	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
18	Belalau	Bumi Agung	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
19	Belalau	Turgak	313.653.500,00	313.653.500,00	0,00
20	Belalau	Bedudu	313.653.500,00	313.653.500,00	0,00
21	Belalau	Sukarame	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
22	Belalau	Hujung	405.753.500,00	405.753.500,00	0,00
23	Belalau	Serungkuk	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
24	Belalau	Suka Makmur	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
25	Belalau	Fajar Agung	289.353.500,00	289.353.500,00	0,00
26	Way Tenong	Puralaksana	430.053.500,00	430.053.500,00	0,00
27	Way Tenong	Karang Agung	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
28	Way Tenong	Mutar Alam	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
29	Way Tenong	Tanjungraya	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
30	Way Tenong	Sukananti	405.753.500,00	405.753.500,00	0,00
31	Way Tenong	Sukaraja	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
32	Way Tenong	Padang Tambak	430.053.500,00	430.053.500,00	0,00
33	Way Tenong	Tambak Jaya	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
34	Sekincau	Pampangan	527.253.500,00	527.253.500,00	0,00
35	Sekincau	Waspada	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
36	Sekincau	Tigajaya	469.053.500,00	469.053.500,00	0,00
37	Sekincau	Giham Sukamaju	502.953.500,00	502.953.500,00	0,00
38	Suoh	Suka Marga	444.753.500,00	444.753.500,00	0,00
39	Suoh	Sumber Agung	396.153.500,00	396.153.500,00	0,00
40	Suoh	Tugu Ratu	502.953.500,00	502.953.500,00	0,00
41	Suoh	Banding Agung	396.153.500,00	396.153.500,00	0,00
42	Suoh	Rowo Rejo	444.753.500,00	444.753.500,00	0,00
43	Suoh	Sido Rejo	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
44	Suoh	Ringin Sari	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
45	Batu Brak	Kembahang	444.753.500,00	444.753.500,00	0,00
46	Batu Brak	Negeri Ratu	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
47	Batu Brak	Kegeringan	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
48	Batu Brak	Gunung Sugih	313.653.500,00	313.653.500,00	0,00
49	Batu Brak	Pekon Balak	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
50	Batu Brak	Sukabumi	435.153.500,00	435.153.500,00	0,00
51	Batu Brak	Canggu	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
52	Batu Brak	Kotabesi	469.053.500,00	469.053.500,00	0,00
53	Batu Brak	Sukaraja	289.353.500,00	289.353.500,00	0,00
54	Batu Brak	Kerang	313.653.500,00	313.653.500,00	0,00
55	Batu Brak	Teba Liokh	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
56	Sukau	Tanjung Raya	600.153.500,00	600.153.500,00	0,00
57	Sukau	Hanakau	541.953.500,00	541.953.500,00	0,00
58	Sukau	Buay Nyerupa	551.553.500,00	551.553.500,00	0,00
59	Sukau	Tapak Siring	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
60	Sukau	Jaga Raga	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
61	Sukau	Pagar Dewa	493.353.500,00	493.353.500,00	0,00
62	Sukau	Suka Mulya	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
63	Sukau	Bandar Baru	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
64	Sukau	Bumi Jaya	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
65	Sukau	Teba Pering Jaya	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
66	Gedung Surian	Gedung Surian	517.653.500,00	517.653.500,00	0,00
67	Gedung Surian	Puramekar	502.953.500,00	502.953.500,00	0,00
68	Gedung Surian	Ciptawaras	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
69	Gedung Surian	Trimulyo	527.253.500,00	527.253.500,00	0,00
70	Gedung Surian	Mekarjaya	575.853.500,00	575.853.500,00	0,00
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	405.753.500,00	405.753.500,00	0,00
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	381.453.500,00	381.453.500,00	0,00
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	313.653.500,00	313.653.500,00	0,00
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	313.653.500,00	313.653.500,00	0,00
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
79	Kebun Tebu	Muara Baru	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
81	Air Hitam	Sidodadi	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
82	Air Hitam	Semarang Jaya	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
83	Air Hitam	Sumber Alam	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
84	Air Hitam	Gunungterang	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
85	Air Hitam	Suka Jadi	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
86	Air Hitam	Sri Menanti	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
87	Air Hitam	Sinar Jaya	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
88	Air Hitam	Riqis Jaya	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
89	Air Hitam	Suka Damai	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
90	Air Hitam	Manggarai	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	396.153.500,00	396.153.500,00	0,00
92	Pagar Dewa	Basungan	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	527.253.500,00	527.253.500,00	0,00
95	Pagar Dewa	Sidodadi	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	407.178.500,00	407.178.500,00	0,00
98	Pagar Dewa	Batu Api	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
101	Batu Ketulis	Argomulyo	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
105	Batu Ketulis	Luas	454.353.500,00	454.353.500,00	0,00
106	Batu Ketulis	Bakhu	444.753.500,00	444.753.500,00	0,00
107	Batu Ketulis	Way Ngison	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	410.853.500,00	410.853.500,00	0,00
111	Lumbok Seminung	Lombok	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar II Ujung Rembun	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
117	Lumbok Seminung	Ujung	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
118	Lumbok Seminung	Keagungan	386.553.500,00	386.553.500,00	0,00
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	600.153.500,00	600.153.500,00	0,00
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	721.645.000,00	721.645.000,00	0,00
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	444.753.500,00	444.753.500,00	0,00
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	541.953.500,00	541.953.500,00	0,00
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	420.453.500,00	420.453.500,00	0,00
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	337.953.500,00	337.953.500,00	0,00
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	469.053.500,00	469.053.500,00	0,00
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	362.253.500,00	362.253.500,00	0,00
		JUMLAH	53.399.700.000,00	53.399.700.000,00	0,00



LAMPIRAN

12

RINCIAN SISA KAS PADA BENDAHARA BOS



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN SISA KAS PADA BENDAHARA BOS
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER				SISA DANA BOS AFFIRMASI				SISA DANA BOS KINERJA				JUMLAH				
		SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	TOTAL
		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		
3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15=3+7+11	16=4+8+12	17=15+16	18=6+10+14	19=17+18		
A	SEKOLAH NEGERI - SD																	
1	SD NEGERI SIDODADI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
2	SD NEGERI SEMARANG JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SD NEGERI SRIMENANTI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
4	SD NEGERI 1 SUMBER ALAM	0,00	0,00	0,00	3.195.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.780,00	3.195.780,00	
5	SD NEGERI 2 SUMBER ALAM	0,00	8.947.000,00	8.947.000,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951.600,00	8.951.600,00	0,00	8.951.600,00	
6	SD NEGERI 1 GUNUNG TERANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	SD NEGERI 2 GUNUNG TERANG	0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00	849.000,00	
8	SD NEGERI 1 WAY EMPULAU ULU	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
9	SD NEGERI 3 WAY EMPULAU ULU	168.287,00	0,00	168.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.287,00	0,00	168.287,00	0,00	168.287,00	
10	SD NEGERI 1 LIWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	SD NEGERI 2 LIWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SD NEGERI 3 LIWA	0,00	207.799,00	207.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.799,00	207.799,00	0,00	207.799,00	
13	SD NEGERI 4 LIWA	170.000,00	800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	800,00	170.800,00	0,00	170.800,00	
14	SD NEGERI 1 SEBARUS	513,33	20.866,67	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	20.866,67	21.380,00	0,00	21.380,00	
15	SD NEGERI 2 SEBARUS	0,00	225.660,00	225.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.660,00	225.660,00	0,00	225.660,00	
16	SD NEGERI 1 SUKARAMI	0,00	701.481,00	701.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.481,00	701.481,00	0,00	701.481,00	
17	SD NEGERI 2 SUKARAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SD NEGERI 1 WAY MENGAKU	0,00	2.886.868,00	2.886.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.868,00	2.886.868,00	0,00	2.886.868,00	
19	SD NEGERI 2 WAY MENGAKU	0,00	3.295.331,00	3.295.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.331,00	3.295.331,00	0,00	3.295.331,00	
20	SD NEGERI 3 WAY MENGAKU	0,00	189.333,00	189.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.333,00	189.333,00	0,00	189.333,00	
21	SD NEGERI 1 PADANG CAHYA	502.870,00	0,00	502.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.870,00	0,00	502.870,00	0,00	502.870,00	
22	SD NEGERI 2 PADANG CAHYA	0,00	165.176,00	165.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.176,00	165.176,00	0,00	165.176,00	
23	SD NEGERI 3 PADANG CAHYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	SD NEGERI 4 PADANG CAHYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	SD NEGERI 1 BAHWAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	SD NEGERI 2 BAHWAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	SD NEGERI WATES	244,00	219.873,00	220.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	219.873,00	220.117,00	0,00	220.117,00	
28	SD NEGERI SEDAMPAH INDAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	SD NEGERI PADANG DALOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	SD NEGERI KUBU PERAHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SD NEGERI GUNUNG SUGIH	0,00	118.584,00	118.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.584,00	118.584,00	0,00	118.584,00	
32	SD NEGERI TRI MEKAR JAYA	0,00	0,00	0,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	316.800,00	
33	SD NEGERI NEGERI JAYA	0,00	0,00	0,00	663.740,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	663.740,00	679.740,00	
34	SD NEGERI KALI PASIR	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.700.000,00	2.720.000,00	
35	SD NEGERI PALANG MERAH	0,00	0,00	0,00	299.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.297,00	299.297,00	
36	SD NEGERI SUKAMAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	178.200,00	
37	SD NEGERI HANTATAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
38	SD NEGERI TEMBELANG	400,00	100,00	500,00	557.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	500,00	557.150,00	557.650,00	
39	SD NEGERI BANDAR AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	SD NEGERI GUNUNG RATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	SD NEGERI 1 SUKAJADI	0,00	0,00	0,00	4.519.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.185,00	4.519.185,00	
42	SD NEGERI 2 SUKAJADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SD NEGERI CANGGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SD NEGERI SUKARAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	SD NEGERI TEBA LIOKH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	SD NEGERI SUKABUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	SD NEGERI NEGERI RATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	SD NEGERI KEGERINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	SD NEGERI 1 KEMBAHANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SD NEGERI 2 KEMBAHANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	SD NEGERI 1 KOTA BESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	SD NEGERI 2 KOTA BESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER				SISA DANA BOS AFFIRMASI				SISA DANA BOS KINERJA				JUMLAH				
		SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	TOTAL
		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		
3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15=3+7+11	16=4+8+12	17=15+16	18=6+10+14	19=17+18		
53	SD NEGERI 3 KOTA BESI	0,00	0,00	0,00	5.900.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.532,00	5.900.532,00	
54	SD NEGERI 1 PEKON BALAK	0,00	0,00	0,00	954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.800,00	954.800,00	
55	SD NEGERI 2 PEKON BALAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	SD NEGERI ARGOMULYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	SD NEGERI ATAR BAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SD NEGERI BATU KEBAYAN	0,00	0,00	0,00	2.770.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.270,00	2.770.270,00	
59	SD NEGERI KUBULIKU JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	SD NEGERI 1 BAKHU	0,00	0,00	0,00	1.096.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.260,00	1.096.260,00	
61	SD NEGERI 2 BAKHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	SD NEGERI 1 LUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SD NEGERI ATAR KUWAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	SD NEGERI CAMPANG TIGA	5.000,00	0,00	5.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	160.000,00	165.000,00	
65	SD NEGERI WAY NGISON	0,00	0,00	0,00	2.789.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.985,00	2.789.985,00	
66	SD NEGERI 1 BEDUDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	SD NEGERI 2 BEDUDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	SD NEGERI 1 KENALI	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	
69	SD NEGERI 2 KENALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	SD NEGERI 1 BUMI AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	
71	SD NEGERI SUKARAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	SD NEGERI SUKA MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	SD NEGERI TURGAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	SD NEGERI FAJAR AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	SD NEGERI PAPAHAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	SD NEGERI KEJADIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	SD NEGERI HUJUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	SD NEGERI 1 PURAMEKAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	SD NEGERI 2 PURAMEKAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	SD NEGERI 1 MEKAR JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SD NEGERI 2 MEKAR JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	SD NEGERI 1 TRIMULYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	SD NEGERI 2 TRIMULYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	SD NEGERI 1 GEDUNG SURIAN	0,00	0,00	0,00	2.261.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.361,00	2.261.361,00	
85	SD NEGERI 1 CIPTAWARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	SD NEGERI 1 PURAJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	SD NEGERI 2 PURAJAYA	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
88	SD NEGERI 1 TRIBUDISYUKUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	SD NEGERI 2 TRIBUDISYUKUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	SD NEGERI 1 CIPTAMULYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
91	SD NEGERI 1 SINAR LUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	SD NEGERI 1 PURAWIWITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	SD NEGERI 1 MUARA BARU	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
94	SD NEGERI 1 MUARA JAYA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	SD NEGERI MUARAJAYA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	SD NEGERI 1 TAWAN SUKA MULYA	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	
97	SD NEGERI 1 KAGUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	SD NEGERI 1 SUKABANJAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	SD NEGERI 1 SB II UJUNG REMBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	SD NEGERI HENI ARONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	SD NEGERI 1 LOMBOK TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	SD NEGERI 1 UJUNG	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00	
103	SD NEGERI 1 LOMBOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	SD NEGERI SUKAJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	SD NEGERI PAHAYU JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	SD NEGERI SIDODADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	SD NEGERI SIDOMULYO	0,00	0,00	0,00	8.160.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160.388,00	8.160.388,00	
108	SD NEGERI SUKA MULYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	SD NEGERI 1 BASUNGAN	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	
110	SD NEGERI MARGA JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER				SISA DANA BOS AFFIRMASI				SISA DANA BOS KINERJA				JUMLAH				
		SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	TOTAL
		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		
3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15=3+7+11	16=4+8+12	17=15+16	18=6+10+14	19=17+18		
111	SD NEGERI 1 PAMPANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	SD NEGERI 2 PAMPANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	SD NEGERI 1 GIHAM SUKAMAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	SD NEGERI 2 GIHAM SUKAMAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	SD NEGERI 1 SEKINCAU	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	460.000,00	
116	SD NEGERI 2 SEKINCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	SD NEGERI TIGA JAYA	0,00	0,00	0,00	927.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.027,00	927.027,00	
118	SD NEGERI WASPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	SD NEGERI 1 TANJUNG RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	SD NEGERI 2 TANJUNG RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	SD NEGERI 1 BUAY NYERUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	SD NEGERI 2 BUAY NYERUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	SD NEGERI 3 BUAY NYERUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	SD NEGERI 1 BANDAR BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	
125	SD NEGERI 2 BANDAR BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	SD NEGERI 3 BANDAR BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	SD NEGERI 1 HANAKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	SD NEGERI 2 HANAKAU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
129	SD NEGERI 3 HANAKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	SD NEGERI 1 PAGAR DEWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	SD NEGERI 2 PAGAR DEWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	SD NEGERI 1 JAGARAGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	500,00	500,00	1.140.000,00	1.140.500,00	
133	SD NEGERI 2 JAGARAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	SD NEGERI 1 TAPAK SIRING	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
135	SD NEGERI 2 TAPAK SIRING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	SD NEGERI 1 SUKA MULYA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
137	SD NEGERI TEBA PERING RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	SD NEGERI 1 SUKA PURA	0,00	0,00	0,00	952.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.245,00	952.245,00	
139	SD NEGERI 2 SUKAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	SD NEGERI 1 WAY PETAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	SD NEGERI 2 WAY PETAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	SD NEGERI 3 WAY PETAI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
143	SD NEGERI 4 WAY PETAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	SD NEGERI 1 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
145	SD NEGERI 2 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	SD NEGERI 3 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	SD NEGERI 4 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	SD NEGERI 1 SINDANG PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	SD NEGERI 1 SIMPANG SARI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
150	SD NEGERI 1 SUKAJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	SD NEGERI 1 BANDING AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
152	SD NEGERI 2 BANDING AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	SD NEGERI 3 BANDING AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
154	SD NEGERI SUKAMARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
155	SD NEGERI WAY SULUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
156	SD NEGERI SUMBER AGUNG	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00	
157	SD NEGERI TUGU RATU	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00	
158	SD NEGERI 1 KARANG AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	SD NEGERI 2 KARANG AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	SD NEGERI 3 KARANG AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	SD NEGERI 1 SUKANANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	SD NEGERI 2 SUKANANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	SD NEGERI 1 FAJAR BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	SD NEGERI 2 FAJAR BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	SD NEGERI 3 FAJAR BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	SD NEGERI 4 FAJAR BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	SD NEGERI 1 PADANG TAMBAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	SD NEGERI 2 PADANG TAMBAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER				SISA DANA BOS AFFIRMASI				SISA DANA BOS KINERJA				JUMLAH				
		SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	SILPA BOS			PFK	TOTAL
		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		
3	4	5 = 3+4	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 11+12	14	15 = 3+7+11	16 = 4+8+12	17 = 15+16	18 = 6+10+14	19 = 17+18		
45	SMP NEGERI 1 WAY TENONG	0,00	103.960,00	103.960,00	17.898.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	103.960,00	103.960,00	19.006.377,00	19.110.337,00
46	SMP NEGERI 2 WAY TENONG	0,00	0,00	0,00	9.995.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986.000,00	0,00	19.986.000,00	2.700.126,00	19.986.000,00	0,00	19.986.000,00	12.695.203,00	32.681.203,00
47	SMP NEGERI 3 WAY TENONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SMP NEGERI SATU ATAP 1 WAY TENONG	0,00	0,00	0,00	379.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.100,00	379.100,00
SUB JUMLAH		35.287.933,00	38.073.708,63	73.361.641,63	72.893.545,00	0,00	2.731.129,00	2.731.129,00	0,00	56.086.000,00	428.750,00	56.514.750,00	5.110.526,00	91.373.933,00	41.233.587,63	132.607.520,63	78.004.071,00	210.611.591,63
JUMLAH		36.238.747,33	62.173.120,30	98.411.867,63	114.155.765,00	57.500,00	2.872.939,00	2.930.439,00	0,00	56.086.000,00	428.750,00	56.514.750,00	9.119.226,00	92.382.247,33	65.474.809,30	157.857.056,63	123.274.991,00	281.132.047,63



LAMPIRAN

13

RINCIAN SISA KAS BLUD PUSKESMAS



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**1 RINCIAN SISA KAS DI BLUD & KAS DANA BOK PUSKESMAS
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD			KAS DANA BOK PUSKESMAS			JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH
		3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	SUMBER JAYA	56.134.678,80	0,00	56.134.678,80	3.012.026,00	0,00	3.012.026,00	59.146.704,80	0,00	59.146.704,80
2	KEBUN TEBU	23.486.634,60	0,00	23.486.634,60	3.411.504,00	0,00	3.411.504,00	26.898.138,60	0,00	26.898.138,60
3	GEDUNG SURIAN	8.803.343,00	0,00	8.803.343,00	7.676.814,00	0,00	7.676.814,00	16.480.157,00	0,00	16.480.157,00
4	AIR HITAM	44.808,00	0,00	44.808,00	5.558.268,00	0,00	5.558.268,00	5.603.076,00	0,00	5.603.076,00
5	PAJAR BULAN	141.926.808,00	0,00	141.926.808,00	3.251.844,00	0,00	3.251.844,00	145.178.652,00	0,00	145.178.652,00
6	SEKINCAU	103.553.837,80	0,00	103.553.837,80	12.355.719,00	0,00	12.355.719,00	115.909.556,80	0,00	115.909.556,80
7	PAGAR DEWA	111.771,00	0,00	111.771,00	1.407.814,00	0,00	1.407.814,00	1.519.585,00	0,00	1.519.585,00
8	BATU KETULIS	634.795,80	0,00	634.795,80	605.514,00	0,00	605.514,00	1.240.309,80	0,00	1.240.309,80
9	KENALI	266.188,00	0,00	266.188,00	2.163.884,00	0,00	2.163.884,00	2.430.072,00	0,00	2.430.072,00
10	BATU BRAK	732.234,80	0,00	732.234,80	21.942.596,00	0,00	21.942.596,00	22.674.830,80	0,00	22.674.830,80
11	BANDAR NEGERI SUOH	278.164,00	49.263.211,15	49.541.375,15	2.535.036,00	0,00	2.535.036,00	2.813.200,00	49.263.211,15	52.076.411,15
12	SRIMULYO	403.064,60	0,00	403.064,60	2.403.806,00	0,00	2.403.806,00	2.806.870,60	0,00	2.806.870,60
13	LIWA	45.080.447,00	0,00	45.080.447,00	2.913.825,00	0,00	2.913.825,00	47.994.272,00	0,00	47.994.272,00
14	BUAY NYERUPA	231.839.527,00	0,00	231.839.527,00	61.048.664,00	0,00	61.048.664,00	292.888.191,00	0,00	292.888.191,00
15	LOMBOK	33.755,00	0,00	33.755,00	14.763.928,00	0,00	14.763.928,00	14.797.683,00	0,00	14.797.683,00
	JUMLAH	613.330.057,40	49.263.211,15	662.593.268,55	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	758.381.299,40	49.263.211,15	807.644.510,55

**2 RINCIAN SISA KAS DI UPTD PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UKM - DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD			KAS DANA BOK PUSKESMAS			JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH
		3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	Bank Lampung Rek 387.00.05.00308.4 (Rekening Jasa)	5.819.277,23	0,00	5.819.277,23	0,00	0,00	0,00	5.819.277,23	0,00	5.819.277,23
2	Bank Lampung Rek 387.00.05.00309.3 (Rekening Lain-lain)	5.535.337,63	0,00	5.535.337,63	0,00	0,00	0,00	5.535.337,63	0,00	5.535.337,63
	JUMLAH	11.354.614,86	0,00	11.354.614,86	0,00	0,00	0,00	11.354.614,86	0,00	11.354.614,86

**3 RINCIAN SISA KAS BLUD RSUD ALIMUDDIN UMAR
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD			KAS DANA BOK PUSKESMAS			JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH
		3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	BNI Rek 1237656932 (PPK BLUD RSUD ALIMUDDIN UMAR)	3.861.618.796,00	0,00	3.861.618.796,00	0,00	0,00	0,00	3.861.618.796,00	0,00	3.861.618.796,00
2	Kas Tunai	62.037.221,00	0,00	62.037.221,00	0,00	0,00	0,00	62.037.221,00	0,00	62.037.221,00
	JUMLAH	3.923.656.017,00	0,00	3.923.656.017,00	0,00	0,00	0,00	3.923.656.017,00	0,00	3.923.656.017,00

4 JUMLAH

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD			KAS DANA BOK PUSKESMAS			JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH
		3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	Kas di Puskesmas	613.330.057,40	49.263.211,15	662.593.268,55	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	758.381.299,40	49.263.211,15	807.644.510,55
2	Kas di UPTD PPK & UKM- Dana Bergulir	11.354.614,86	0,00	11.354.614,86	0,00	0,00	0,00	11.354.614,86	0,00	11.354.614,86
3	Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	3.923.656.017,00	0,00	3.923.656.017,00	0,00	0,00	0,00	3.923.656.017,00	0,00	3.923.656.017,00
	JUMLAH	4.548.340.689,26	49.263.211,15	4.597.603.900,41	145.051.242,00	0,00	145.051.242,00	4.693.391.931,26	49.263.211,15	4.742.655.142,41



LAMPIRAN

14

DAFTAR PIUTANG



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**DAFTAR PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
PIUTANG DAERAH					61.253.807.135,80
I	PIUTANG PAJAK DAERAH				55.285.946,00
a)	PIUTANG RESTORAN DAN SEJENISNYA				21.871.896,00
1	BPKD	17/12/2018	06280/Rest/2018	Pajak Restoran Kegiatan Konsumsi SDN 1 Luas	130.000,00
2	BPKD	17/12/2018	06281/Rest/2018	Pajak Restoran Kegiatan Konsumsi SDN 1 Luas	40.000,00
3	BPKD	24/01/2019	00184/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	52.500,00
4	BPKD	24/01/2019	00185/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	40.000,00
5	BPKD	24/01/2019	00186/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	92.500,00
6	BPKD	24/01/2019	00187/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	267.500,00
7	BPKD	24/01/2019	00188/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	54.000,00
8	BPKD	24/01/2019	00189/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	280.000,00
9	BPKD	17/05/2019	02285/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan SDN Argo Mulyo Kec Batu Ketulis	35.000,00
10	BPKD	20/05/2019	02321/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu kec Batu ketulis	153.000,00
11	BPKD	20/05/2019	02322/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu kec Batu ketulis	27.500,00
12	BPKD	18/07/2019	03108/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
13	BPKD	18/07/2019	03109/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
14	BPKD	18/07/2019	03110/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
15	BPKD	18/07/2019	03111/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
16	BPKD	18/07/2019	03112/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
17	BPKD	18/07/2019	03113/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
18	BPKD	18/07/2019	03114/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
19	BPKD	18/07/2019	03115/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
20	BPKD	18/07/2019	03116/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
21	BPKD	29/07/2019	03408/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau	17.500,00
22	BPKD	29/07/2019	03424/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kecamatan Belalau	90.000,00
23	BPKD	29/07/2019	03429/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kecamatan Belalau	90.000,00
24	BPKD	29/07/2019	03434/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kecamatan Belalau	90.000,00
25	BPKD	29/07/2019	03439/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kecamatan Belalau	90.000,00
26	BPKD	29/07/2019	03444/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kecamatan Belalau	90.000,00
27	BPKD	29/07/2019	03449/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kecamatan Belalau	90.000,00
28	BPKD	20/08/2019	03835/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Rigin Jaya Kec Air Hitam	181.818,00
29	BPKD	21/08/2019	03843/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Partai Gerindra	1.866.878,00
30	BPKD	21/08/2019	03844/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Partai Gerindra	530.000,00
31	BPKD	21/08/2019	03981/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Kelurahan Tugu Sari	420.000,00
32	BPKD	21/08/2019	03987/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan UPT Puskesmas Lombok Seminung	100.000,00
33	BPKD	08/11/2019	05530/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Puskesmas Batu Ketulis	132.500,00
34	BPKD	08/11/2019	05531/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Puskesmas Batu Ketulis	60.000,00
35	BPKD	20/11/2019	05797/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Ringin Jaya Kec. BNS	465.250,00
36	BPKD	04/12/2019	06241/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Tugu Ratu	100.000,00
37	BPKD	04/12/2019	06242/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Tugu Ratu	80.000,00
38	BPKD	04/12/2019	06243/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Tugu Ratu	24.000,00
39	BPKD	19/12/2019	06824/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan SDN SIDODADI Kec. Pagar Dewa	420.000,00
40	BPKD	19/12/2019	06862/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan SMPN 1 Sukau	500.000,00
41	BPKD	30/12/2019	07373/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan TPID Kecamatan Batu Brak	53.200,00
42	BPKD	30/12/2019	07442/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan TPID Kecamatan Kebun Tebu	65.000,00
43	BPKD	30/12/2019	07506/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Pancur Mas Kec.Lombok Seminung	300.000,00
44	BPKD	30/12/2019	07507/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Pancur Mas Kec.Lombok Seminung	100.000,00
45	BPKD	30/12/2019	07508/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Pancur Mas Kec.Lombok Seminung	100.000,00
46	BPKD	30/12/2019	07509/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Pancur Mas Kec.Lombok Seminung	125.000,00
47	BPKD	30/12/2019	07510/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Pancur Mas Kec.Lombok Seminung	50.000,00
48	BPKD	30/12/2019	07576/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Gunung Sugh	430.500,00
49	BPKD	30/12/2019	07749/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau	90.000,00
50	BPKD	30/12/2019	07750/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau	180.000,00
51	BPKD	07/02/2020	00264/Rest/2020	Pajak restoran pada .SMP Satu Atap Lombok Seminung.	45.000,00
52	BPKD	12/03/2020	00581/Rest/2020	Pajak restoran pada .Kec Air Hitam.	120.000,00
53	BPKD	12/03/2020	00582/Rest/2020	Pajak restoran pada .Kec Air Hitam.	140.000,00
54	BPKD	28/04/2020	01184/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 1 Heniarong Kec Lombok Seminung.	150.000,00
55	BPKD	28/04/2020	00916/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	100.000,00
56	BPKD	28/04/2020	00917/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	100.000,00
57	BPKD	28/04/2020	00918/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	100.000,00
58	BPKD	28/04/2020	00919/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	46.200,00
59	BPKD	05/05/2020	01288/Rest/2020	Pajak restoran pada .SD Negeri I Mekar Jaya Kec. Gedung Surian .	274.600,00
60	BPKD	24/06/2020	01525/Rest/2020	Pajak restoran pada .SD Negeri Pahayu Jaya kecamatan Pagar Dewa.	27.600,00
61	BPKD	27/07/2020	01657/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pekon Tawan Sukamulya Kecamatan Lombok Semin	18.000,00
62	BPKD	27/07/2020	01658/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pekon Tawan Sukamulya Kecamatan Lombok Semin	45.000,00
63	BPKD	27/07/2020	01659/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pekon Tawan Sukamulya Kecamatan Lombok Semin	60.000,00
64	BPKD	27/07/2020	01660/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pekon Tawan Sukamulya Kecamatan Lombok Semin	60.000,00
65	BPKD	27/07/2020	01661/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pekon Tawan Sukamulya Kecamatan Lombok Semin	42.000,00
66	BPKD	29-12-2023	00029514/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
67	BPKD	13-05-2023	00022398/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukarame	316.350,00
68	BPKD	10-07-2023	00023903/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Jagaraga Sukau	7.750,00
69	BPKD	11-07-2023	00023968/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Kota Besi	150.000,00
70	BPKD	13-07-2023	00024006/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Negeri Jaya Kec. BNS	530.000,00
71	BPKD	13-07-2023	00024011/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Kenali Kec. Belalau	273.750,00
72	BPKD	13-07-2023	00024012/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Kenali Kec. Belalau	91.250,00
73	BPKD	13-07-2023	00024013/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Kenali Kec. Belalau	547.500,00
74	BPKD	25-07-2023	00024252/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Puskesmas Buay Nyerupa	113.150,00
75	BPKD	31-07-2023	00024434/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Kec. BNS	175.200,00
76	BPKD	16-08-2023	00024629/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan TK Kecamatan Pagar Dewa	375.000,00
77	BPKD	16-08-2023	00024630/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan TK Kecamatan Pagar Dewa	172.500,00
78	BPKD	21-08-2023	00024692/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Padang Dalom Kec. Balik Bukit	41.400,00
79	BPKD	29-08-2023	00024978/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Puramekar	109.500,00
80	BPKD	30-08-2023	00024991/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Puramekar	73.000,00
81	BPKD	31-08-2023	00025022/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Kec. BNS	219.000,00
82	BPKD	04-09-2023	00025036/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Kec. BNS	241.500,00
83	BPKD	06-09-2023	00025136/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Ringin Jaya Kec. BNS	258.450,00
84	BPKD	07-09-2023	00025188/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 2 Gunung Terang	562.800,00
85	BPKD	08-09-2023	00025226/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Buay Nyerupa	187.500,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
86	BPKD	12-09-2023	00025272/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Puramekar	109.500,00
87	BPKD	26-09-2023	00025766/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Suka Mulya Sukau	250.000,00
88	BPKD	26-09-2023	00025771/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Suka Mulya Sukau	125.000,00
89	BPKD	26-09-2023	00025775/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Suka Mulya Sukau	50.000,00
90	BPKD	02-10-2023	00025922/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SMPN 2 Sekincau	62.500,00
91	BPKD	03-10-2023	00026012/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Giham Sukamaju	104.000,00
92	BPKD	13-10-2023	00026295/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Bandar Baru Sukau	86.400,00
93	BPKD	17-10-2023	00026328/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukarame	75.000,00
94	BPKD	17-10-2023	00026329/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukarame	75.000,00
95	BPKD	17-10-2023	00026368/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Trimekar Jaya BNS	273.750,00
96	BPKD	17-10-2023	00026371/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Trimekar Jaya BNS	86.250,00
97	BPKD	18-10-2023	00026459/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 4 Liwa	37.500,00
98	BPKD	23-10-2023	00026546/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan TK Satu Atap Rua Jurai Gedung Surian	120.000,00
99	BPKD	06-12-2023	00027891/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian	150.000,00
100	BPKD	14-12-2023	00028270/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Padang Cahya	236.500,00
101	BPKD	27-12-2023	00028977/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	250.000,00
102	BPKD	27-12-2023	00028978/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	105.000,00
103	BPKD	27-12-2023	00028979/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	105.000,00
104	BPKD	27-12-2023	00028980/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	105.000,00
105	BPKD	27-12-2023	00028981/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	335.000,00
106	BPKD	27-12-2023	00028982/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	228.000,00
107	BPKD	27-12-2023	00028984/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Tebaliokh	17.500,00
108	BPKD	27-12-2023	00029072/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan TKN 1 Pagar Dewa	87.975,00
109	BPKD	27-12-2023	00029073/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan TKN 1 Pagar Dewa	87.975,00
110	BPKD	27-12-2023	00029074/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan TKN 1 Pagar Dewa	186.150,00
111	BPKD	28-12-2023	00029155/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Kecamatan Pagar Dewa	98.550,00
112	BPKD	28-12-2023	00029272/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Campang Tiga	160.000,00
113	BPKD	29-12-2023	00029381/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Batu Kebayan	253.000,00
114	BPKD	29-12-2023	00029383/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	79.700,00
115	BPKD	29-12-2023	00029384/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	112.500,00
116	BPKD	29-12-2023	00029385/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	797.000,00
117	BPKD	29-12-2023	00029455/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	797.000,00
118	BPKD	29-12-2023	00029459/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	112.500,00
119	BPKD	29-12-2023	00029475/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Way Ngison	80.000,00
120	BPKD	29-12-2023	00029543/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
121	BPKD	29-12-2023	00029549/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
122	BPKD	29-12-2023	00029550/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	150.000,00
123	BPKD	29-12-2023	00029552/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
124	BPKD	29-12-2023	00029554/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
125	BPKD	29-12-2023	00029555/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	35.000,00
126	BPKD	29-12-2023	00029556/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
127	BPKD	29-12-2023	00029559/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	35.000,00
128	BPKD	29-12-2023	00029584/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pekon Tapak Siring	182.500,00
129	BPKD	29-12-2023	00029615/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan PKBM Harapan Bangsa	490.000,00
130	BPKD	29-12-2023	00029616/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan PKBM Harapan Bangsa	490.000,00
b) PIUTANG PAJAK RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA					29.864.050,00
1	BPKD	08/05/2023	SPTPD Mei 2023	RM. Madani Alas Godong	2.174.300,00
2	BPKD	06/06/2023	SPTPD Juni 2023	RM. Madani Alas Godong	4.078.550,00
3	BPKD	06/07/2023	SPTPD Juli 2023	RM. Madani Alas Godong	2.799.600,00
4	BPKD	09/08/2023	SPTPD Agustus 2023	RM. Madani Alas Godong	3.832.400,00
5	BPKD	07/09/2023	SPTPD September 2023	RM. Madani Alas Godong	3.318.950,00
6	BPKD	09/10/2023	SPTPD Oktober 2023	RM. Madani Alas Godong	3.717.800,00
7	BPKD	01/11/2023	SPTPD November 2023	RM. Madani Alas Godong	3.185.350,00
8	BPKD	08/12/2023	SPTPD Desember 2023	RM. Madani Alas Godong	3.056.150,00
9	BPKD	29/12/2023	SPTPD Desember 2023	RM. Madani Alas Godong	3.700.950,00
c) PIUTANG PAJAK PARKIR					3.550.000,00
1	BPKD	01/02/2023	00002621/PKR/23	Pajak Parkir Pegadaian Tbk. Bulan Januari	100.000,00
2	BPKD	13/09/2023	00002684/PKR/23	Pajak Parkir Bank Syariah Indonesia Bulan Agustus	150.000,00
3	BPKD	08/03/2023	00002603/PKR/23	Pajak Parkir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Kekurangan Bulan Januari	300.000,00
4	BPKD	21/12/2023	00002725/PKR/23	Pajak Parkir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Bulan Desember	2.850.000,00
5	BPKD	27/12/2023	00002730/PKR/23	Pajak Parkir Bank BNI 46 Bulan Desember	150.000,00
II PIUTANG RETRIBUSI DAERAH					41.882.856,00
a) RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI					25.680.356,00
1	DISKOMINFO	08/02/2021		ERA BANGUN TOWERINDO (EBT)	2.910,00
2	DISKOMINFO	08/02/2021		XL	2.669.700,00
3	DISKOMINFO	06/01/2017		MITRATEL	5.000,00
4	DISKOMINFO	25/02/2019		STP	2.402.730,00
5	DISKOMINFO	08/02/2021		TBG	1.067.936,00
6	DISKOMINFO	06/01/2017		TBG	1.685.930,00
7	DISKOMINFO	25/02/2022		TBG	14.907.200,00
8	DISKOMINFO	15/03/2023		TBG	1.200,00
9	DISKOMINFO	06/01/2017		TELKOMSEL	2.936.670,00
10	DISKOMINFO	25/02/2019		GIHON	1.080,00
b) RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN					75.000,00
1	BPKD	01/12/2021	00778/06/SKP/1.20.05/2018	Piutang Sewa Rumdin Vegayanti Bulan Juni	25.000,00
2	BPKD	2 July 2018	00871/07/SKP/1.20.05/2018	Piutang Sewa Rumdin Vegayanti Bulan Juli	25.000,00
3	BPKD	01/08/2018	01052/08/SKP/1.20.05/2018	Piutang Sewa Rumdin Vegayanti Bulan Agustus	25.000,00
c) RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH					16.127.500,00
1	BPKD	04/11/2021	Berita Acara Perjanjian Sewa	Mashuri	1.500.000,00
2	BPKD	04/11/2021	Berita Acara Perjanjian Sewa	Andre Pratama	1.000.000,00
3	BPKD	04/11/2021	Berita Acara Perjanjian Sewa	Sutrisno	1.000.000,00
4	BPKD	28/10/2021	Berita Acara Perjanjian Sewa	Marsudi	375.000,00
5	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Suganda	1.750.000,00
6	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Rizal	1.000.000,00
7	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Junaidi	750.000,00
8	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Nurdin	2.000.000,00
9	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Arsyad	1.750.000,00
10	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Subandi	1.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
11	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Arsaman	2.250.000,00
12	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Doni	37.500,00
13	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Rohman	500.000,00
14	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Tatang	375.000,00
15	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Mizan	15.000,00
16	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Ipzon	12.500,00
17	BPKD	03/02/2023	Berita Acara Perjanjian Sewa	Herman Effendi	812.500,00
III PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					2.501.714.574,80
a) PIUTANG PENDAPATAN BLUD					2.356.933.374,00
BLUD DINKES					265.879.565,00
	DINKES-PKM SUMB	18/12/2023	010/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	1.143.830,00
	DINKES-PKM SUMB	18/12/2023	011/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	1.465.930,00
	DINKES-PKM SUMB	20/12/2023	012/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	2.803.770,00
	DINKES-PKM SUMB	18/12/2023	013/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	1.120.000,00
	DINKES-PKM SUMB	18/12/2023	014/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	1.440.000,00
	DINKES-PKM SUMB	20/12/2023	015/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	1.500.000,00
	DINKES-PKM SUMB	18/12/2023	016/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	1.000.000,00
	DINKES-PKM SUMB	19/12/2023	017/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	2.000.000,00
	DINKES-PKM SUMB	20/12/2023	018/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	7.290.000,00
	DINKES-PKM SUMB	18/12/2023	019/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	12.000.000,00
	DINKES-PKM SUMB	18/12/2023	020/12/SKR/PKM.SBY/2023	Non Kapitasi	3.600.000,00
	DINKES-PKM KEBUJ	08/12/2023	1974/11/SKR/JKN.RI/PKM	Non Kapitasi	3.679.100,00
	DINKES-PKM KEBUJ	19/12/2023	1975/11/SKR/JKN.RI/PKM	Non Kapitasi	3.520.000,00
	DINKES-PKM KEBUJ	19/12/2023	1976/11/SKR/JKN.RI/PKM	Non Kapitasi	4.000.000,00
	DINKES-PKM KEBUJ	19/12/2023	1977/11/SKR/JKN.RI/PKM	Non Kapitasi	5.130.000,00
	DINKES-PKM GEDU	15/12/2023	1401/12/SKR/PKM.GESU/2023	Non Kapitasi	5.614.825,00
	DINKES-PKM GEDU	15/12/2023	1402/12/SKR/PKM.GESU/2023	Non Kapitasi	420.000,00
	DINKES-PKM GEDU	15/12/2023	1403/12/SKR/PKM.GESU/2023	Non Kapitasi	5.927.370,00
	DINKES-PKM GEDU	15/12/2023	1404/12/SKR/PKM.GESU/2023	Non Kapitasi	2.000.000,00
	DINKES-PKM GEDU	15/12/2023	1405/12/SKR/PKM.GESU/2023	Non Kapitasi	10.500.000,00
	DINKES-PKM GEDU	20/12/2023	1406/12/SKR/PKM.GESU/2023	Prolanis	800.000,00
	DINKES-PKM AIR HI	15/12/2023	636/XII/TBP/PKM.AH/2023	Non Kapitasi	2.000.000,00
	DINKES-PKM AIR HI	15/12/2023	637/XII/TBP/PKM.AH/2023	Non Kapitasi	9.900.000,00
	DINKES-PKM FAJAR	15/12/2023	109/10/SKR/PKM.F.BULAN/2023	Non Kapitasi	9.874.760,00
	DINKES-PKM FAJAR	15/12/2023	110/10/SKR/PKM.F.BULAN/2023	Non Kapitasi	2.600.000,00
	DINKES-PKM FAJAR	15/12/2023	11/11/SKR/PKM.F.BULAN/2023	Non Kapitasi	11.000.000,00
	DINKES-PKM FAJAR	15/12/2023	12/12/SKR/PKM.F.BULAN/2023	Non Kapitasi	11.340.000,00
	DINKES-PKM FAJAR	20/12/2023	10/09/SKR/PKM.BULAN/2023	Prolanis	2.860.000,00
	DINKES-PKM FAJAR	22/12/2023	11/09/SKR/PKM.BULAN/2023	Prolanis	2.860.000,00
	DINKES-PKM SEKIN	18/12/2023	74/12/SKR/PKM-SEKINCAU/2023	Non Kapitasi	8.446.490,00
	DINKES-PKM SEKIN	18/12/2023	75/12/SKR/PKM-SEKINCAU/2023	Non Kapitasi	1.020.000,00
	DINKES-PKM SEKIN	18/12/2023	76/12/SKR/PKM-SEKINCAU/2023	Non Kapitasi	1.000.000,00
	DINKES-PKM SEKIN	18/12/2023	77/12/SKR/PKM-SEKINCAU/2023	Non Kapitasi	4.860.000,00
	DINKES-PKM SEKIN	20/12/2023	145/10/SKR/PKM-SEKINCAU/2023	Prolanis	975.000,00
	DINKES-PKM SEKIN	20/12/2023	146/10/SKR/PKM-SEKINCAU/2023	Prolanis	2.368.000,00
	DINKES-PKM PAGAR	19/12/2023	1139/11/SKR/PKM.PAGAR	Non Kapitasi	3.400.000,00
	DINKES-PKM BATU	15/12/2023	208/11/SKR/PKM.BK/2023	Non Kapitasi	6.843.910,00
	DINKES-PKM BATU	15/12/2023	209/11/SKR/PKM.BK/2023	Non Kapitasi	2.000.000,00
	DINKES-PKM BATU	15/12/2023	210/11/SKR/PKM.BK/2023	Non Kapitasi	6.975.000,00
	DINKES-PKM BATU	14/12/2023	230/12/SKR/PKM.BK/2023	Prolanis	2.873.000,00
	DINKES-PKM KENAI	15/12/2023	258/12/SKR/PKM-KNL/2023	Non Kapitasi	5.183.720,00
	DINKES-PKM KENAI	15/12/2023	259/12/SKR/PKM-KNL/2023	Non Kapitasi	1.720.000,00
	DINKES-PKM KENAI	15/12/2023	260/12/SKR/PKM-KNL/2023	Non Kapitasi	4.860.000,00
	DINKES-PKM KENAI	15/12/2023	261/12/SKR/PKM-KNL/2023	Non Kapitasi	2.600.000,00
	DINKES-PKM KENAI	15/12/2023	262/12/SKR/PKM-KNL/2023	Non Kapitasi	4.800.000,00
	DINKES-PKM KENAI	15/12/2023	244/12/SKR/PKM-KNL/2023	Prolanis	5.446.000,00
	DINKES-PKM KENAI	15/12/2023	245/12/SKR/PKM-KNL/2023	Prolanis	6.283.000,00
	DINKES-PKM BATU	20/12/2023	10063/12/TBP/PKM-BATUBRAK/2023	Non Kapitasi	2.119.180,00
	DINKES-PKM BATU	20/12/2023	10064/12/TBP/PKM-BATUBRAK/2023	Non Kapitasi	340.000,00
	DINKES-PKM BATU	20/12/2023	10065/12/TBP/PKM-BATUBRAK/2023	Non Kapitasi	800.000,00
	DINKES-PKM BATU	20/12/2023	10066/12/TBP/PKM-BATUBRAK/2023	Non Kapitasi	6.750.000,00
	DINKES-PKM BATU	21/12/2023	10067/12/TBP/PKM-BATUBRAK/2023	Non Kapitasi	270.000,00
	DINKES-PKM BNS	20/12/2023	29/12/SKR/PKM.BNS/2023	Non Kapitasi	3.240.000,00
	DINKES-PKM BNS	14/12/2023	209/12/SKR/PKM.BNS/2023	Prolanis	2.218.000,00
	DINKES-PKM SRIML	19/12/2023	802/12/SKR/PKM-SM/2023	Non Kapitasi	617.500,00
	DINKES-PKM SRIML	19/12/2023	801/12/SKR/PKM-SM/2023	Non Kapitasi	9.180.000,00
	DINKES-PKM SRIML	14/12/2023	50/12/SKR/PKM-SM/2023	Prolanis	1.900.000,00
	DINKES-PKM BUAY	19/12/2023	170/12/SKR/PKM-Buay Nyerupa/2023	Non Kapitasi	5.161.180,00
	DINKES-PKM BUAY	19/12/2023	171/12/SKR/PKM-Buay Nyerupa/2023	Non Kapitasi	105.000,00
	DINKES-PKM BUAY	19/12/2023	172/12/SKR/PKM-Buay Nyerupa/2023	Non Kapitasi	10.000.000,00
	DINKES-PKM BUAY	19/12/2023	173/12/SKR/PKM-Buay Nyerupa/2023	Non Kapitasi	15.120.000,00
	DINKES-PKM LOMB	15/12/2023	0066/04/SKR/PKM.LBK/2022	Non Kapitasi	1.530.000,00
	DINKES-PKM LOMB	15/12/2023	0077/05/SKR/PKM.LBK/2022	Non Kapitasi	4.590.000,00
	DINKES-PKM LOMB	16/12/2023	0078/012/SKR/PKM.LBK/2022	Prolanis	895.000,00
BLUD RSUD AU					2.091.053.809,00
	RSUD AU	31/12/2023	00561.a/12/SKR/1.02.02/2023	Pelayanan Kesehatan JKN 2023	43.630.000,00
	RSUD AU	31/12/2023	00561.b/12/SKR/1.02.02/2023	Pelayanan Kesehatan JKN 2023	2.107.009,00
	RSUD AU	31/12/2023	00561.c/12/SKR/1.02.02/2023	Pelayanan Kesehatan JKN 2023	4.318.600,00
	RSUD AU	31/12/2023	00561.d/12/SKR/1.02.02/2023	Pelayanan Kesehatan JKN 2023	178.260.200,00
	RSUD AU	31/12/2023	00561.e/12/SKR/1.02.02/2023	Pelayanan Kesehatan JKN 2023	1.648.059.800,00
	RSUD AU	31/12/2023	00561.f/12/SKR/1.02.02/2023	Pelayanan Kesehatan JKN 2023	214.678.200,00
b) PIUTANG PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR					64.090.000,00
1	Koperindag	31/12/2003		PK Mat Nuri	2.695.000,00
2	Koperindag	31/12/2003		PK lin Sukmiasih	1.000.000,00
3	Koperindag	31/12/2004		LKM. PURWAMANDIRI	750.000,00
4	Koperindag	31/12/2004		LKM. SUTRA PESAGI	8.250.000,00
5	Koperindag	31/12/2004		PK. SUROSO	3.825.000,00
6	Koperindag	31/12/2004		PK. KASTUMI	2.025.000,00
7	Koperindag	31/12/2005		PK Zururi	2.150.000,00
8	Koperindag	31/12/2005		PK Sarjak	2.450.000,00
9	Koperindag	31/12/2006		KOP. SINAR TERATE	6.125.000,00
10	Koperindag	31/12/2006		LKM BINA USAHA TERAMPIL	4.625.000,00
11	Koperindag	31/12/2006		PK WATI AYU	200.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
12	Koperindag	31/12/2007		LKM Tunggal Jaya	1.675.000,00
13	Koperindag	31/12/2008		PK Siti Maisyaroh	3.200.000,00
14	Koperindag	18/07/2011		EDI SRIANTO	500.000,00
15	Koperindag	18/07/2011		APRINA	400.000,00
16	Koperindag	15/02/2013		IRIANTO	1.800.000,00
17	Koperindag	02/07/2014		Ratna Hayani/Pangku	1.575.000,00
18	Koperindag	16/03/2016		Masyati	775.000,00
19	Koperindag	29/03/2016		Noverawati	800.000,00
20	Koperindag	29/03/2016		Cundra Wati	400.000,00
21	Koperindag	29/03/2016		Ernawati	50.000,00
22	Koperindag	17/11/2016		Sopian Mujahidin	650.000,00
23	Koperindag	01/04/2017		Idawati	1.200.000,00
24	Koperindag	01/09/2017		Ermia	1.100.000,00
25	Koperindag	07/03/2018		Ida Yuliza	1.500.000,00
26	Koperindag	07/03/2018		Selamatton	1.600.000,00
27	Koperindag	26/07/2018		Rindawanah	1.075.000,00
28	Koperindag	13/12/2018		Lasmi	1.050.000,00
29	Koperindag	07/05/2019		Ahmadi	1.000.000,00
30	Koperindag	18/09/2019		Mujiyanto	200.000,00
31	Koperindag	16/12/2019		Supriyadi	1.200.000,00
32	Koperindag	16/12/2019		Rizky Saputra	1.800.000,00
33	Koperindag	16/12/2019		Busairi/Edi Bubuk Kopi	725.000,00
34	Koperindag	18/06/2020		Wahyu Anggoro w	700.000,00
35	Koperindag	18/06/2020		Arnawati	450.000,00
36	Koperindag	18/06/2020		Maysaroh	420.000,00
37	Koperindag	18/06/2020		Yudi Suryanto	1.200.000,00
38	Koperindag	18/06/2020		Ahmad Masykur	1.200.000,00
39	Koperindag	18/06/2020		Duwi Yanto	500.000,00
40	Koperindag	15/11/2021		Linda Astuti	900.000,00
41	Koperindag	15/11/2021		Mad Husni	350.000,00
c) PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN					62.510.851,56
1	BPKD	01/03/2022	LHP BPK-RI Nomor : 23/Terinci.LKPD.2021.Lambar/04/2022	CV. Ujung Tanjung	0,48
2	BPKD	01/03/2022	LHP BPK-RI Nomor : 23/Terinci.LKPD.2021.Lambar/04/2022	CV Bukit Pesagi	37.176.695,34
3	BPKD	01/03/2022	LHP BPK-RI Nomor : 23/Terinci.LKPD.2021.Lambar/04/2022	CV Nanda	6.729.210,52
4	BPKD	01/03/2022	LHP BPK-RI Nomor : 23/Terinci.LKPD.2021.Lambar/04/2022	CV Sinar Jaya	18.604.945,22
d) PIUTANG DENDA PBB P2					1.180.349,24
1	BPKD	31/12/2022	Denda Keterlambatan PBB	Pencatatan Piutang Denda Keterlambatan PBB PT. TBG	1.180.349,24
e) PIUTANG PENDAPATAN PENGEMBALIAN GAJI DAN TUNJANGAN					17.000.000,00
1	BPKD	02/01/2023	SKPP No. 991/140/IV.01/2022	Pencatatan Piutang Pendapatan Pengembalian Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 49.711.076,- An. Sdr. Muhammad Yusman, NIP. 196311102014071003	13.000.000,00
2	BPKD	03/10/2023	SKPP No. 991/116/IV.01/2022	Pencatatan Piutang Pendapatan Pengembalian Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 6.988.074,- An. Sdr. Pauzan NIP. 196510301988011001	4.000.000,00
IV PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					112.945.547,00
1	PPKD	19/12/2023	KMK 38/KM.07/2023	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	308,00
2	PPKD	27/12/2023	PMK 159/2023	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	112.941.910,00
3	PPKD	08/09/2023	KMK 38/KM.07/2023 & PMK	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.097,00
4	PPKD	08/09/2023	KMK 38/KM.07/2023 & PMK	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	885,00
5	PPKD	08/09/2023	KMK 38/KM.07/2023 & PMK	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (F	1.347,00
V PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH					58.541.978.212,00
1	PPKD	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor SK Gub -TW II 2023	3.679.302.342,00
2	PPKD	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor SK Gub -TW III 2023	4.820.220.784,00
3	PPKD	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor SK Gub -TW IV 2023	3.840.677.844,00
4	PPKD	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor SK Gub -TW II 2023	2.460.575.855,00
5	PPKD	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor SK Gub -TW III 2023	2.399.649.040,00
6	PPKD	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor SK Gub -TW IV 2023	2.168.077.824,00
7	PPKD	26/06/2023	G/349/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor SK Gub -TW I 2023	8.483.266.513,00
8	PPKD	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor SK Gub -TW II 2023	8.361.809.927,00
9	PPKD	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor SK Gub -TW III 2023	8.835.050.626,00
10	PPKD	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor SK Gub -TW IV 2023	9.132.369.816,00
11	PPKD	22/08/2023	G/460/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan SK Gub -TW II 2023	148.689.836,00
12	PPKD	21/11/2023	G/695/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan SK Gub -TW III 2023	112.735.027,00
13	PPKD	06/02/2024	G/155/VI.03/HK/2024	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan SK Gub -TW IV 2023	107.714.081,00
14	PPKD	28/12/2023	G/819/VI.03/HK/2023	Bagi Hasil Pajak Rokok - Pjk Rokok TW IV 2023	3.991.838.697,00



LAMPIRAN

15

RINCIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A		2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29.937.934.224,15	172.538.202,15	49.299.557,00	17.918.063.340,00	3.430.680.684,00	7.983.610.755,00	383.741.686,00	-	29.937.934.224,15
1		2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	172.538.202,15	172.538.202,15	-	-	-	-	-	-	172.538.202,15
		2.1.01.05.01.0001.	Utang PPh 21	27.515.711,00	27.515.711,00	-	-	-	-	-	-	27.515.711,00
	Disdikbud	2.1.01.05.01.0001.	Utang PPh 21	3.681.000,00	3.681.000,00							3.681.000,00
	Dinkes	2.1.01.05.01.0001.	Utang PPh 21	23.834.711,00	23.834.711,00							23.834.711,00
		2.1.01.05.02.0001.	Utang PPh 22	2.839.416,89	2.839.416,89	-	-	-	-	-	-	2.839.416,89
	Dinkes	2.1.01.05.02.0001.	Utang PPh 22	2.839.416,89	2.839.416,89							2.839.416,89
		2.1.01.05.03.0001.	Utang PPh 23	155.000,00	155.000,00	-	-	-	-	-	-	155.000,00
	Disdikbud	2.1.01.05.03.0001.	Utang PPh 23	155.000,00	155.000,00							155.000,00
		2.1.01.06.01.0001.	Utang PPN Pusat	128.765.057,26	128.765.057,26	-	-	-	-	-	-	128.765.057,26
	Disdikbud	2.1.01.06.01.0001.	Utang PPN Pusat	109.270.941,00	109.270.941,00							109.270.941,00
	Dinkes	2.1.01.06.01.0001.	Utang PPN Pusat	19.494.116,26	19.494.116,26							19.494.116,26
			Utang Pajak Daerah	13.263.017,00	13.263.017,00	-	-	-	-	-	-	13.263.017,00
	Disdikbud	2.1.01.09.01.0001.	Utang Pajak Daerah	10.168.050,00	10.168.050,00							10.168.050,00
	Dinkes	2.1.01.09.01.0001.	Utang Pajak Daerah	3.094.967,00	3.094.967,00							3.094.967,00
2		2.1.02.	Utang Bunga	49.299.557,00	-	49.299.557,00	-	-	-	-	-	49.299.557,00
		2.1.02.04.02.	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN- Jangka Menengah	49.299.557,00	-	49.299.557,00	-	-	-	-	-	49.299.557,00
		2.1.02.04.02.0001.	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	49.299.557,00	-	49.299.557,00						49.299.557,00
3		2.1.04.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	17.918.063.340,00	-	-	17.918.063.340,00	-	-	-	-	17.918.063.340,00
		2.1.04.03.01.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah	17.918.063.340,00	-	-	17.918.063.340,00	-	-	-	-	17.918.063.340,00
	PPKD	2.1.04.03.01.0001.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah (Utang yang akan jatuh Tempo Januari s.d. Desember 2024 (Rp1.493.171.945 x 12 Bulan = Rp17.918.063.340,00)	17.918.063.340,00			17.918.063.340,00					17.918.063.340,00
4		2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	3.430.680.684,00	-	-	-	3.430.680.684,00	-	-	-	3.430.680.684,00
		2.1.05.01.01.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	3.256.260.684,00	-	-	-	3.256.260.684,00	-	-	-	3.256.260.684,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.039.123.693,00				1.039.123.693,00				1.039.123.693,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH PPh Pasal 21	93.879.292,00				93.879.292,00				93.879.292,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.231.146,00				4.231.146,00				4.231.146,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	423.035.436,00				423.035.436,00				423.035.436,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	51.235.604,00				51.235.604,00				51.235.604,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	209.668.694,00				209.668.694,00				209.668.694,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.013.460.241,00				1.013.460.241,00				1.013.460.241,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	28.488.308,00				28.488.308,00				28.488.308,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	393.138.270,00				393.138.270,00				393.138.270,00
		2.1.05.04.03.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	174.420.000,00	-	-	-	174.420.000,00	-	-	-	174.420.000,00
	Diskoperindag	2.1.05.04.03.0012.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	166.920.000,00				166.920.000,00				166.920.000,00
	BPKD	2.1.05.04.03.0012.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.500.000,00				7.500.000,00				7.500.000,00
												-
5		2.1.06.	Utang Belanja	7.983.610.755,00	-	-	-	-	7.983.610.755,00	-	-	7.983.610.755,00
		2.1.06.01.02.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	136.924.250,00	-	-	-	-	136.924.250,00	-	-	136.924.250,00
	Dinas PU PR	2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	76.079.250,00					76.079.250,00			76.079.250,00
	Kec. Balik Bukit	2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	29.500.000,00					29.500.000,00			29.500.000,00
	Kec. Lumbok Semining	2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.470.000,00					12.470.000,00			12.470.000,00
	Kesbangpol	2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.875.000,00					18.875.000,00			18.875.000,00
												-
		2.1.06.01.03.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	699.642.600,00	-	-	-	-	699.642.600,00	-	-	699.642.600,00
	Disdikbud	2.1.06.01.03.0047.	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.884.000,00					58.884.000,00			58.884.000,00
	Disdikbud	2.1.06.01.03.0048.	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	25.758.600,00					25.758.600,00			25.758.600,00
	Disdikbud	2.1.06.01.03.0049.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	615.000.000,00					615.000.000,00			615.000.000,00
												-
		2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	426.397.213,00	-	-	-	-	426.397.213,00	-	-	426.397.213,00
	Dinkes	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	45.407,00					45.407,00			45.407,00
	RSUD AU	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	525.257,00					525.257,00			525.257,00
	Satpol PP	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	45.180,00					45.180,00			45.180,00
	Dinas KB PP dan PA	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	45.407,00					45.407,00			45.407,00
	Dinas Ketahanan Pangan	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	34.357,00					34.357,00			34.357,00
	Dinas PMP	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	419.250,00					419.250,00			419.250,00
	Dinas Kominfo	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	588.417,00					588.417,00			588.417,00
	Dinas Koperindag	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	191.741,00					191.741,00			191.741,00
	PTSP Naker	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	69.600,00					69.600,00			69.600,00
	Dinas TPH	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	39.907,00					39.907,00			39.907,00
	Dinas Perkebunan	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	46.224,00					46.224,00			46.224,00
	Selda	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	10.653.493,00					10.653.493,00			10.653.493,00
	Setwan	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	7.478.161,00					7.478.161,00			7.478.161,00
	Bappeda	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	39.907,00					39.907,00			39.907,00
	BPKD	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	310.547,00					310.547,00			310.547,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BKPSDM	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	74.264,00					74.264,00			74.264,00
	Kesbangpol	2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	41.350,00					41.350,00			41.350,00
	Disdikbud	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	28.270,00					28.270,00			28.270,00
	BPBD	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	45.460,00					45.460,00			45.460,00
	Dinas Perhubungan	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	197.885,00					197.885,00			197.885,00
	Dinas Kepemudaan	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	543.785,00					543.785,00			543.785,00
	Dinas Perkebunan	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	358.320,00					358.320,00			358.320,00
	Balitbang	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	301.400,00					301.400,00			301.400,00
	Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	89.480,00					89.480,00			89.480,00
	Dinas KB PP dan PA	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	89.480,00					89.480,00			89.480,00
	Dinas Kominfo	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	50.825,00					50.825,00			50.825,00
	Dinas Perpustakaan	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	159.000,00					159.000,00			159.000,00
	Setda	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	2.699.228,00					2.699.228,00			2.699.228,00
	Inspektorat Daerah	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	91.980,00					91.980,00			91.980,00
	RSUD Alimuddin Umar	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	914.600,00					914.600,00			914.600,00
	Dinas Pencatatan Sipil	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	114.595,00					114.595,00			114.595,00
	Dinas Koperindag	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	45.595,00					45.595,00			45.595,00
	Dinas Perikanan	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	301.400,00					301.400,00			301.400,00
	Bappeda	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	56.920,00					56.920,00			56.920,00
	Kesbangpol	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	87.480,00					87.480,00			87.480,00
	Satpol PP	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	952.320,00					952.320,00			952.320,00
	Dinas PMP	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	151.100,00					151.100,00			151.100,00
	PTSP Naker	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	42.595,00					42.595,00			42.595,00
	Dinas TPH	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	102.760,00					102.760,00			102.760,00
	BPKD	2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	146.400,00					146.400,00			146.400,00
	Dinas Sosial	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	295.904,00					295.904,00			295.904,00
	Dinas KB PP dan PA	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.199.517,00					2.199.517,00			2.199.517,00
	Dinas Perhubungan	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.720.724,00					2.720.724,00			2.720.724,00
	Dinas Perikanan	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	545.665,00					545.665,00			545.665,00
	Bappeda	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	278.456,00					278.456,00			278.456,00
	Disdikbud	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.276.686,00					2.276.686,00			2.276.686,00
	Dinas Ketahanan Pangan	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	225.409,00					225.409,00			225.409,00
	Dinas Kominfo	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	952.894,00					952.894,00			952.894,00
	Dinas TPH	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	262.316,00					262.316,00			262.316,00
	BPKD	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.753.747,00					2.753.747,00			2.753.747,00
	Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.199.517,00					2.199.517,00			2.199.517,00
	Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	300.728.539,00					300.728.539,00			300.728.539,00
	Dinas Koperindag	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.809.307,00					1.809.307,00			1.809.307,00
	Dinas Perkebunan	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.650.316,00					4.650.316,00			4.650.316,00
	BKPSDM	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	207.447,00					207.447,00			207.447,00
	RSUD Alimuddin Umar	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	25.284.290,00					25.284.290,00			25.284.290,00
	Dinas Pencatatan Sipil	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	897.384,00					897.384,00			897.384,00
	PTSP Naker	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	227.384,00					227.384,00			227.384,00
	Setda	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.722.592,00					11.722.592,00			11.722.592,00
	Balitbang	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	124.184,00					124.184,00			124.184,00
	Satpol PP	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	849.492,00					849.492,00			849.492,00
	Dinas PMP	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	132.576,00					132.576,00			132.576,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Perpustakaan	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	78.124,00					78.124,00			78.124,00
	Setwan	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.905.914,00					3.905.914,00			3.905.914,00
	Kesbangpol	2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	155.904,00					155.904,00			155.904,00
	Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.117.630,00					3.117.630,00			3.117.630,00
	Dinas Pencatatan Sipil	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.625.960,00					2.625.960,00			2.625.960,00
	Dinas Perikanan	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.087.137,00					1.087.137,00			1.087.137,00
	BKPSDM	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.222.900,00					1.222.900,00			1.222.900,00
	Satpol PP	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.540.270,00					2.540.270,00			2.540.270,00
	Dinas PMP	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	938.400,00					938.400,00			938.400,00
	Dinas TPH	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.057.000,00					1.057.000,00			1.057.000,00
	Balitbang	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	586.860,00					586.860,00			586.860,00
	Dinas Sosial	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.792.750,00					2.792.750,00			2.792.750,00
	Dinas Perhubungan	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.430.591,00					1.430.591,00			1.430.591,00
	Dinas Perkebunan	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.027.200,00					1.027.200,00			1.027.200,00
	Kesbangpol	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	936.290,00					936.290,00			936.290,00
	Dinas KB PP dan PA	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.786.590,00					4.786.590,00			4.786.590,00
	Dinas Koperindag	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.252.110,00					2.252.110,00			2.252.110,00
	Bappeda	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	719.560,00					719.560,00			719.560,00
	Dinas Ketahanan Pangan	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	808.360,00					808.360,00			808.360,00
	PTSP Naker	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	874.350,00					874.350,00			874.350,00
	BPKD	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.716.510,00					1.716.510,00			1.716.510,00
	Dinas Perpustakaan	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.173.110,00					2.173.110,00			2.173.110,00
		2.1.06.02.99.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.773.812.392,00	-	-	-	-	5.773.812.392,00	-	-	5.773.812.392,00
	RSUD AU	2.1.06.02.99.9999.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.427.307.852,00					5.427.307.852,00			5.427.307.852,00
	Dinkes	2.1.06.02.99.9999.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	346.504.540,00					346.504.540,00			346.504.540,00
		2.1.06.12.	Utang Belanja Bagi Hasil	525.513.300,00	-	-	-	-	525.513.300,00	-	-	525.513.300,00
	PPKD	2.1.06.12.03.0001.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	426.345.100,00					426.345.100,00			426.345.100,00
	PPKD	2.1.06.12.04.0001.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	99.168.200,00					99.168.200,00			99.168.200,00
		2.1.06.13.	Utang Belanja Bantuan Keuangan	421.321.000,00	-	-	-	-	421.321.000,00	-	-	421.321.000,00
	PPKD	2.1.06.13.03.0001.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	421.321.000,00					421.321.000,00			421.321.000,00
6		2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	383.741.686,00	-	-	-	-	-	383.741.686,00	-	383.741.686,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2.1.07.01.04.	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	301.141.297,00	-	-	-	-	-	301.141.297,00	-	301.141.297,00
	PPKD	2.1.07.01.04.0008.	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	301.141.297					-	301.141.297,00		301.141.297,00
		2.1.07.03.01.	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	82.600.389,00	-	-	-	-	-	82.600.389,00	-	82.600.389,00
	PPKD	2.1.07.03.01.0001.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	82.600.389					-	82.600.389,00		82.600.389,00
									-			-
B		2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	34.342.951.595,00	-	-	-	-	-	-	34.342.951.595,00	34.342.951.595,00
1		2.2.03.	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	34.342.951.595,00	-	-	-	-	-	-	34.342.951.595,00	34.342.951.595,00
	PPKD	2.2.03.01.01.0001.	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	34.342.951.595,00							34.342.951.595,00	34.342.951.595,00
												-
			JUMLAH KEWAJIBAN	64.280.885.819,15	172.538.202,15	49.299.557,00	17.918.063.340,00	3.430.680.684,00	7.983.610.755,00	383.741.686,00	34.342.951.595,00	64.280.885.819,15



LAMPIRAN

16

RINCIAN UTANG KEPADA PT SMI



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

RINCIAN HUTANG PADA PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

NO	URAIAN	PENERIMAAN PINJAMAN	RENCANA ANGGSURAN		REALISASI ANGGSURAN			SISA ANGGSURAN		
			WAKTU	JUMLAH	WAKTU	JUMLAH (Rp)	AKUMULASI (Rp)	TOTAL (Rp)	JK PENDEK	JK PANJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penerimaan Tahun 2021	19.653.117.250,00								
2	Penerimaan Tahun 2022	57.991.820.750,00								
3			31-Aug-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	1.493.171.945,00	76.151.766.055,00		
4			30-Sep-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	2.986.343.890,00	74.658.594.110,00		
5			31-Oct-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	4.479.515.835,00	73.165.422.165,00		
6			30-Nov-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	5.972.687.780,00	71.672.250.220,00		
7			31-Dec-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	7.465.859.725,00	70.179.078.275,00		
8			31-Jan-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	8.959.031.670,00	68.685.906.330,00		
9			28-Feb-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	10.452.203.615,00	67.192.734.385,00		
10			31-Mar-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	11.945.375.560,00	65.699.562.440,00		
11			30-Apr-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	13.438.547.505,00	64.206.390.495,00		
12			31-May-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	14.931.719.450,00	62.713.218.550,00		
13			30-Jun-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	16.424.891.395,00	61.220.046.605,00		
14			31-Jul-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	17.918.063.340,00	59.726.874.660,00		
15			31-Aug-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	19.411.235.285,00	58.233.702.715,00		
16			30-Sep-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	20.904.407.230,00	56.740.530.770,00		
17			31-Oct-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	22.397.579.175,00	55.247.358.825,00		
18			30-Nov-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	23.890.751.120,00	53.754.186.880,00		
19			31-Dec-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		
20			31-Jan-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
21			29-Feb-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
22			31-Mar-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
23			30-Apr-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
24			31-May-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
25			30-Jun-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
26			31-Jul-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
27			31-Aug-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
28			30-Sep-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
29			31-Oct-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
30			30-Nov-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
31			31-Dec-24	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	1.493.171.945,00	
32			31-Jan-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
33			28-Feb-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
34			31-Mar-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
35			30-Apr-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
36			31-May-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
37			30-Jun-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
38			31-Jul-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
39			31-Aug-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
40			30-Sep-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
41			31-Oct-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
42			30-Nov-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
43			31-Dec-25	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
44			31-Jan-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
45			28-Feb-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
46			31-Mar-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
47			30-Apr-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
48			31-May-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
49			30-Jun-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
50			31-Jul-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
51			31-Aug-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
52			30-Sep-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
53			31-Oct-26	1.493.171.945,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.171.945,00
54			20-Dec-26	1.493.168.805,00			25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		1.493.168.805,00
	JUMLAH	77.644.938.000,00		77.644.938.000,00		25.383.923.065,00	25.383.923.065,00	52.261.014.935,00	17.918.063.340,00	34.342.951.595,00



LAMPIRAN

17

DAFTAR ANALISIS UMUR PIUTANG & PENYISIHAN DANA BERGULIR



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

Pada UPTD PP-KUKM Dinas Koperindag
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR ANALISIS UMUR DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2023

No	NASABAH	TAHUN PENG GULIR AN	PIUTANG POKOK PENGGULIRAN			PIUTANG S.D. 31 DES 2022			ANGSURAN TAHUN 2023			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023		
			POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL
1	2	3	8	9	10	20 = (14-17)	21 = (15-18)	22 = (20+21)	23	24	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)
1	LKM Cempaka	2003	50.000.000,00	12.750.000,00	62.750.000,00	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00				7.125.000,00	0,00	7.125.000,00
2	PK Rasyid	2003	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	PK Mat Nuri	2003	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	11.300.000,00	2.695.000,00	13.995.000,00				11.300.000,00	2.695.000,00	13.995.000,00
4	PK lin Sukmiasih	2003	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	PK Yanto	2003	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00				9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
6	LKM. PURWAMANDIRI	2004	50.000.000,00	12.750.000,00	62.750.000,00	15.500.000,00	750.000,00	16.250.000,00				15.500.000,00	750.000,00	16.250.000,00
7	LKM. SUTRA PESAGI	2004	50.000.000,00	12.750.000,00	62.750.000,00	5.000.000,00	8.250.000,00	13.250.000,00				5.000.000,00	8.250.000,00	13.250.000,00
8	PK. SUROSO	2004	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	14.000.000,00	3.825.000,00	17.825.000,00				14.000.000,00	3.825.000,00	17.825.000,00
9	PK. KASTUMI	2004	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	15.000.000,00	2.025.000,00	17.025.000,00				15.000.000,00	2.025.000,00	17.025.000,00
10	PK Zururi	2005	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	9.100.000,00	2.150.000,00	11.250.000,00				9.100.000,00	2.150.000,00	11.250.000,00
11	PK Sarjak	2005	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00				10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00
12	PK AHMAD TOHIR	2006	5.000.000,00	1.225.000,00	6.225.000,00	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00				4.225.000,00	0,00	4.225.000,00
13	KOP. SINAR TERATE	2006	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00				25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00
14	LKM BINA USAHA TERAMPIL	2006	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	25.000.000,00	4.625.000,00	29.625.000,00				25.000.000,00	4.625.000,00	29.625.000,00
15	PK GUSTAM	2006	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00				8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
16	PK WATI AYU	2006	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	6.650.000,00	200.000,00	6.850.000,00				6.650.000,00	200.000,00	6.850.000,00
17	LKM Tunggal Java	2007	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	24.000.000,00	1.675.000,00	25.675.000,00				24.000.000,00	1.675.000,00	25.675.000,00
18	PK Dihan Maryanto	2007	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
19	Koperasi Wanita Delima	2008	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	1.583.331,00	0,00	1.583.331,00				1.583.331,00	0,00	1.583.331,00
20	PK Siti Maisyarah	2008	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	12.125.000,00	3.200.000,00	15.325.000,00				12.125.000,00	3.200.000,00	15.325.000,00
21	PK PD Latansa	2008	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	13.125.000,00	0,00	13.125.000,00				13.125.000,00	0,00	13.125.000,00
22	PK Suseno	2008	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
23	PK Gatot Sukoco	2008	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
24	SRI YUNI	2010	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	794.000,00	0,00	794.000,00				794.000,00	0,00	794.000,00
25	DARWIN	2010	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
26	AKSAHADI	2010	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	1.564.666,00	0,00	1.564.666,00				1.564.666,00	0,00	1.564.666,00
27	EDI SRIANTO	2011	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	3.671.668,00	500.000,00	4.171.668,00				3.671.668,00	500.000,00	4.171.668,00
28	SUKAMTO	2011	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	1.741.667,00	0,00	1.741.667,00	800.000,00		800.000,00	941.667,00	0,00	941.667,00
29	APRINA	2011	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	3.241.000,00	400.000,00	3.641.000,00				3.241.000,00	400.000,00	3.641.000,00
30	M.MUZAMIR	2012	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
31	YURLINA	2012	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
32	ALAN NURI	2012	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00				4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
33	BU SUDIN	2012	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
34	ALEX CANDRA	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
35	KHOLDUN	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
36	CIK IMA	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00				915.000,00	0,00	915.000,00
37	SAHRIAL GERABATAN	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
38	RAFLES TAISSON	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
39	BUNADI	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	833.334,00	0,00	833.334,00				833.334,00	0,00	833.334,00
40	EXRONI	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
41	SUMARDI	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	916.667,00	0,00	916.667,00				916.667,00	0,00	916.667,00
42	SANUSI	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
43	BUDI SANTOSO	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	583.335,00	0,00	583.335,00				583.335,00	0,00	583.335,00
44	AMSIR	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
45	ARDINAL	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
46	ISKANDAR	2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00				532.000,00	0,00	532.000,00
47	DEDI	2012	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
48	RISWANDI	2012	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00				8.450.000,00	0,00	8.450.000,00
49	SUPIYAH	2012	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00				2.198.000,00	0,00	2.198.000,00

No	NASABAH	TAHUN PENGGLIR AN	PIUTANG POKOK PENGGLIRAN			PIUTANG S.D. 31 DES 2022			ANGSURAN TAHUN 2023			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023		
			POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL
1	2	3	8	9	10	20 = (14-17)	21 =(15-18)	22 = (20+21)	23	24	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)
50	Mawardi Badri (Pengurus Ketu	2012	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
51	Yesi M. Syarif	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
52	Widodo	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
53	Ali Muktarom	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
54	Zainal Hasan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
55	Mahendra	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
56	Syapan Aliwarsah	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
57	Dedi Aprizani	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
58	Desmeri	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
59	Izal. A	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
60	Yanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
61	Hendri. D	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
62	Susianto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
63	Munanain	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
64	Warsito	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
65	Sanani	2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
66	Lukman	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
67	Rismanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
68	Erwandi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
69	Sukiman	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
70	Ari	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
71	Cuproni	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
72	Ruskan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
73	Dahlia	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
74	Naperwan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
75	Asmani	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
76	Mursal (Ketua Kel	2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
77	Rohimi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
78	Edi Kurniawan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
79	Hendri Yusef	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
80	Johan Samsi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
81	Muryani	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
82	Rahmanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
83	Efendi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
84	Zamil Hasan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
85	Abdul Mutolib	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
86	Munzir	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
87	Sudiono	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
88	Hermansyah	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
89	Mirzan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
90	Nandang Setiawan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
91	Mariono	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
92	Ali Yaman (Ketua Kel.	2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
93	Rudi Yanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
94	Romiadi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
95	Meri Andika	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
96	Riduan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
97	Ridwan	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
98	Samsun	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99	Mutadin	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
100	Sumintak	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
101	Sopwan Nuri	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
102	Darmanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
103	Mashuri	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

No	NASABAH	TAHUN PENGGULIRAN	PIUTANG POKOK PENGGULIRAN			PIUTANG S.D. 31 DES 2022			ANGSURAN TAHUN 2023			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023		
			POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL
1	2	3	8	9	10	20 = (14-17)	21 =(15-18)	22 = (20+21)	23	24	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)
104	Pirjon	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
105	Johan Wahyudi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
106	Parizal Hakim	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
107	Tahmarulloh	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
108	Devi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
109	Ambri Arbi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
110	A. Purnama (Ketua Kel)	2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00				200.000,00	0,00	200.000,00
111	Muslani	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
112	Mat Januri	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
113	Irawansyah	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
114	Andes Saputra	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
115	Zarkoni(Pengurus)	2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
116	Nahrawi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
117	Munir	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
118	Mauladi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
119	Sangkut	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
120	Nur Yanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00				300.000,00	0,00	300.000,00
121	Andri	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
122	Kapzani	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
123	Yut Im (Ketua Kel.)	2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
124	Ponijo	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
125	Zuwandi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
126	Was Yanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
127	Masud	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
128	Sodikin	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
129	Nasrin Silalahi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
130	Samsu rizal	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
131	Herman Efendi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
132	Winardi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
133	Supri Yanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
134	Yutra Muryalis	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00				900.000,00	0,00	900.000,00
135	Nasrun Silalahi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
136	Maryati	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
137	Maslaini	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00				1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
138	Yulyana	2012	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00				2.062.500,00	0,00	2.062.500,00
139	Pramono	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
140	Jali Walis Diyanto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
141	Mansyur	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00	0,00	500.000,00
142	Sunarto	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
143	Romadi	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
144	Guswinarso	2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
145	SAMSIR	2013	17.000.000,00	2.040.000,00	19.040.000,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00				5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
146	IRIANTO	2013	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00				15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00
147	Suarman Maratin	2013	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
148	Yusmeli	2013	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00				800.000,00	0,00	800.000,00
149	Yuniar	2013	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00
150	Karnain	2013	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
151	Hakim Sidik	2014	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00				17.200.000,00	0,00	17.200.000,00
152	Sopia/Zamzami	2014	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00				1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
153	Ratna Hayani/Pangku	2014	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	13.125.000,00	1.575.000,00	14.700.000,00				13.125.000,00	1.575.000,00	14.700.000,00
154	Sangkut	2014	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	4.866.665,00	0,00	4.866.665,00				4.866.665,00	0,00	4.866.665,00
155	Masyati	2015	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	4.116.000,00	775.000,00	4.891.000,00				4.116.000,00	775.000,00	4.891.000,00
156	Sumyati. AR	2015	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00				6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
157	Noverawati	2016	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	15.000.000,00	800.000,00	15.800.000,00				15.000.000,00	800.000,00	15.800.000,00

No	NASABAH	TAHUN PENGGLIIR AN	PIUTANG POKOK PENGGULIRAN			PIUTANG S.D. 31 DES 2022			ANGSURAN TAHUN 2023			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023		
			POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL
1	2	3	8	9	10	20 = (14-17)	21 =(15-18)	22 = (20+21)	23	24	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)
158	Sumiyati	2016	12.000.000,00	1.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
159	Cundra Wati	2016	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	5.370.027,00	400.000,00	5.770.027,00				5.370.027,00	400.000,00	5.770.027,00
160	Ernawati	2016	7.500.000,00	900.000,00	8.400.000,00	2.925.000,00	50.000,00	2.975.000,00				2.925.000,00	50.000,00	2.975.000,00
161	Elda Lina	2016	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
162	Sopian Mujahidin	2016	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	9.050.000,00	650.000,00	9.700.000,00				9.050.000,00	650.000,00	9.700.000,00
163	Nani Soliyah	2017	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
164	Idawati	2017	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00				10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00
165	Dawakyah	2017	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
166	Nana Linda wati	2017	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
167	Azman	2017	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	11.400.000,00	1.000.000,00	12.400.000,00	10.950.000,00	1.000.000,00	11.950.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
168	AEP s. Ferdian	2017	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00				5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
169	Ermiami	2017	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	9.200.000,00	1.100.000,00	10.300.000,00				9.200.000,00	1.100.000,00	10.300.000,00
170	Siti Julaiha	2017	7.500.000,00	900.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
171	Ida Yuliza	2018	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	11.800.000,00	1.500.000,00	13.300.000,00				11.800.000,00	1.500.000,00	13.300.000,00
172	Selamattion	2018	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	17.000.000,00	1.600.000,00	18.600.000,00				17.000.000,00	1.600.000,00	18.600.000,00
173	Dwi Renita Sari	2018	12.000.000,00	1.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
174	Kor'ah	2018	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	18.600.000,00	1.300.000,00	19.900.000,00	18.600.000,00	1.300.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00
175	Rindawanah	2018	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	12.125.000,00	1.075.000,00	13.200.000,00				12.125.000,00	1.075.000,00	13.200.000,00
176	Andri	2018	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
177	Lasmi	2018	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	19.150.000,00	1.050.000,00	20.200.000,00				19.150.000,00	1.050.000,00	20.200.000,00
178	Samsiar Wati	2018	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
179	Ahmadi	2019	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	17.200.000,00	1.000.000,00	18.200.000,00			0,00	17.200.000,00	1.000.000,00	18.200.000,00
180	Suminem	2019	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
181	Mulyono	2019	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00			0,00	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
182	Dawakyah	2019	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
183	Mujiyanto	2019	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	4.600.000,00	200.000,00	4.800.000,00			0,00	4.600.000,00	200.000,00	4.800.000,00
184	Supriyadi	2019	20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00				20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00
185	Sartini	2019	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
186	Rizky Saputra	2019	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00				15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00
187	Busairi/Edi Bubuk Kopi	2019	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	15.000.000,00	725.000,00	15.725.000,00				15.000.000,00	725.000,00	15.725.000,00
188	Eva Nurvida	2019	7.000.000,00	840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
189	Wahyu Anggoro w	2020	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	13.700.000,00	700.000,00	14.400.000,00	1.000.000,00			12.700.000,00	700.000,00	13.400.000,00
190	Marino	2020	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00				17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
191	Nurman	2020	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
192	Arnawati	2020	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	6.900.000,00	450.000,00	7.350.000,00	500.000,00		500.000,00	6.400.000,00	450.000,00	6.850.000,00
193	Maysaroh	2020	7.000.000,00	420.000,00	7.420.000,00	7.000.000,00	420.000,00	7.420.000,00				7.000.000,00	420.000,00	7.420.000,00
194	Rika Fitriana	2020	7.000.000,00	420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
195	Rukmana	2020	7.000.000,00	420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
196	Veni Yuniska	2020	7.000.000,00	840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
197	Yudi Suryanto	2020	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00				20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00
198	Ahmad Masykur	2020	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00				20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00
199	Sugino	2020	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
200	Duwi Yanto	2020	10.000.000,00	600.000,00	10.600.000,00	8.300.000,00	500.000,00	8.800.000,00				8.300.000,00	500.000,00	8.800.000,00
201	Rian Junaidi	2020	7.000.000,00	420.000,00	7.420.000,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00				4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
202	Ahmad Mulyadi	2021	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	13.200.000,00	2.400.000,00	15.600.000,00	13.200.000,00	2.400.000,00		0,00	0,00	0,00
203	Ratih Purwasih	2021	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	9.567.003,00	1.100.000,00	10.667.003,00	9.567.003,00	1.100.000,00	10.667.003,00	0,00	0,00	0,00
204	Lilis Handayani	2021	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Linda Astuti	2021	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	8.125.000,00	900.000,00	9.025.000,00	8.125.000,00		8.125.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
206	Mad Husni	2021	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	9.100.000,00	650.000,00	9.750.000,00	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	6.400.000,00	350.000,00	6.750.000,00
207	Piutang Tidak Teridentifikasi		82.925.000,00	0,00	82.925.000,00	76.119.331,00		76.119.331,00				76.119.331,00		76.119.331,00
	Jumlah		1.636.675.000,00	219.180.000,00	1.855.855.000,00	965.661.194,00	70.190.000,00	1.035.851.194,00	79.742.003,00	6.100.000,00	68.242.003,00	885.919.191,00	64.090.000,00	950.009.191,00
	% Penyisihan													
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih													

Pada UPTD PP-KUKM Dinas Koperin
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR ANALISIS UMUR DANA BER
PER 31 DESEMBER 2023

No	NASABAH	KETERANGAN	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto	Kualitas dan Umur PiutangJasa				Penyisihan Piutang	Piutang Neto	
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan			
1	2	29	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 36)	38	39	40	41	42			
1	LKM Cempaka	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PK Rasyid	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PK Mat Nuri	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00
4	PK Iin Sukmiasih	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	PK Yanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LKM. PURWAMANDIRI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
7	LKM. SUTRA PESAGI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
8	PK. SUROSO	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00
9	PK. KASTUMI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
10	PK Zururi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
11	PK Sarjak	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
12	PK AHMAD TOHIR	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	KOP. SINAR TERATE	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00
14	LKM BINA USAHA TERAMPIL	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00
15	PK GUSTAM	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PK WATI AYU	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	LKM Tunggal Jaya	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00
18	PK Dihon Maryanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Koperasi Wanita Delima	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.583.331,00	1.583.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PK Siti Maisyarah	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
21	PK PD Latansa	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PK Suseno	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PK Gatot Sukoco	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SRI YUNI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DARWIN	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	AKSAHADI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.564.666,00	1.564.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EDI SRIANTO	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	3.671.668,00	3.671.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
28	SUKAMTO	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	941.667,00	941.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	APRINA	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	3.241.000,00	3.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
30	M.MUZAMIR	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	YURLINA	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ALAN NURI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BU SUDIN	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ALEX CANDRA	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KHOLDUN	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CIK IMA	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SAHRIAL GERABATAN	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RAFLES TAISON	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BUNADI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	833.334,00	833.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EXRONI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SUMARDI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	916.667,00	916.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SANUSI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BUDI SANTOSO	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	583.335,00	583.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	AMSIR	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ARDINAL	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ISKANDAR	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DEDI	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RISWANDI	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SUPIYAH	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	NASABAH	KETERANGAN	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto	Kualitas dan Umur PiutangJasa				Penyisihan Piutang	Piutang Neto	
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan			
1	2	29	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 36)	38	39	40	41	42			
50	Mawardi Badri (Pengurus Ketu	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Yesi M. Syarif	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Widodo	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ali Muktarom	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zainal Hasan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Mahendra	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Syapan Aliwarsah	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedi Aprizani	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Desmeri	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Izal. A	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Yanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Hendri. D	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Susianto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Munanain	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Warsito	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Sanani	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Lukman	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Rismanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Erwandi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Sukiman	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ari	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Cuproni	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Ruskan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dahlia	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Naperwan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Asmani	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Mursal (Ketua Kel)	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Rohimi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Edi Kurniawan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Hendri Yusef	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Johan Samsi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Muryani	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Rahmanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Efendi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zamil Hasan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Abdul Mutolib	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Munzir	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sudiono	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Hermansyah	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Mirzan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Nandang Setiawan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Mariono	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Ali Yaman (Ketua Kel.)	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Rudi Yanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Romiadi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Meri Andika	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Riduan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Ridwan	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Samsun	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Mutadin	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sumintak	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Sopwan Nuri	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Darmanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Mashuri	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	NASABAH	KETERANGAN	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto	Kualitas dan Umur PiutangJasa				Penyisihan Piutang	Piutang Neto	
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan			
1	2	29	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 36)	38	39	40	41	42			
104	Pirjon	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Johan Wahyudi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Parizal Hakim	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Tahmarulloh	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Devi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Ambri Arbi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	A. Purnama (Ketua Kel)	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Muslani	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Mat Januri	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Irawansyah	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Andes Saputra	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Zarkoni(Pengurus)	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Nahravi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Munir	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Mauladi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Sangkut	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Nur Yanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Andri	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Kapzani	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Yut Im (Ketua Kel.)	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Ponjo	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zuwandi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Was Yanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Masud	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Sodikin	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Nasrin Silalahi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Samsu rizal	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Herman Efendi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Winardi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Supri Yanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Yutra Muryalis	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Nasrun Silalahi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Maryati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Maslaini	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Yulyana	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Pramono	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Jali Walis Diyanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Mansyur	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Sunarto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Romadi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Guswinarso	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SAMSIR	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	IRIANTO	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
147	Suarman Maratin	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Yusmeli	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Yuniar	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Karnain	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Hakim Sidik	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Sopia/Zamzami	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Ratna Hayani/Pangku	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
154	Sangkut	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	4.866.665,00	4.866.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Masyati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	4.116.000,00	4.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
156	Sumyati. AR	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Noverawati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

No	NASABAH	KETERANGAN	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto	Kualitas dan Umur PiutangJasa				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan			Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	29	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 36)	38	39	40	41	42		
158	Sumiyati	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Cundra Wati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	5.370.027,00	5.370.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
160	Ernawati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
161	Elda Lina	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Sopian Mujahidin	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
163	Nani Soliyah	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Idawati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
165	Dawakyah	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Nana Linda wati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Azman	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	AEP s. Ferdian	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Ermiasi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
170	Siti Julaiha	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Ida Yuliza	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
172	Selamattion	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
173	Dwi Renita Sari	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Kor'ah	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Rindawanah	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
176	Andri	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Lasmi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
178	Samsiar Wati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Ahmadi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
180	Suminem	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Mulyono	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Dawakyah	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Mujiyanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
184	Supriyadi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
185	Sartini	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Rizky Saputra	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
187	Busairi/Edi Bubuk Kopi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00
188	Eva Nurvida	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Wahyu Anggoro w	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
190	Marino	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Nurman	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Arnawati	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
193	Maysaroh	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
194	Rika Fitriana	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Rukmana	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Veni Yuniska	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Yudi Suryanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
198	Ahmad Masykur	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
199	Sugino	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Duwi Yanto	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
201	Rian Junaidi	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Ahmad Mulyadi	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Ratih Purwasih	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Lilis Handayani	LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Linda Astuti	BELUM LUNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	90.000,00	810.000,00
206	Mad Husni	BELUM LUNAS	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	640.000,00	5.760.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	35.000,00	315.000,00
207	Piutang Tidak Teridentifikasi	BELUM LUNAS				76.119.331,00	76.119.331,00	0,00					0,00	0,00
	Jumlah		0,00	6.400.000,00	0,00	879.519.191,00	880.159.191,00	5.760.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	62.840.000,00	62.965.000,00	1.125.000,00
	% Penyisihan		5,00%	10,00%	50,00%	100,00%			5,00%	10,00%	50,00%	100,00%		
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0,00	640.000,00	0,00	879.519.191,00			0,00	125.000,00	-	62.840.000,00		



LAMPIRAN

18

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH – LO TA 2023



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN PENDAPATAN HIBAH - LO
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST No. 400.8.1.2/511/SES tgl 25 Januari 2023 Rp. 40.728.000,00	40.728.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST No. 471.13/08/V.11/2023 tgl 31 Maret 2023 Rp. 21.142.000,00	21.142.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST No. 471.13/14/V.11/2023 tgl 12 Mei 2023 Rp. 10571.000,00	10.571.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST No. 471.13/23/V.11/2023 tgl 30 Mei 2023 Rp. 5.285.500,00	5.285.500,00
5	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST No. 471.13/30/V.11/2023 tgl 20 Juni 2023 Rp.21.142.000,00	21.142.000,00
6	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST No. 471.13/37/V.11/2023 tgl 14 Juli 2023 Rp.10.571.000,00	10.571.000,00
7	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST 400.8.1.2/4100/SES tgl 14 September 2023 Rp.20.364.000,00	20.364.000,00
8	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST 400.8.1.2/5554/SES tgl 14 September 2023 Rp.61.092.000,00	61.092.000,00
9	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat berupa Blanko KTP Elektronik untuk Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital bagi Perekam KTP El Pemula, Rubah Status serta Rusak dan Kehilangan sesuai BAST400.8.1.2/5554/SES tgl 14 Desember 2023 Rp.10.182.000,00	10.182.000,00
10	Pendapatan hibah dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Dinas pendidikan (SD Negeri Tanjung Raya Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat) Berupa Uang sesuai BAST No. 23255/2/A2/KU.07.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 Rp. 35.000.000,00	35.000.000,00
11	Pendapatan Hibah dari Pengurus Mushola As-Syifa ke RSUD Alimuddin Umar berupa uang untuk Konstruksi Tambahan (Pemasangan jaringan listrik, instalasi air, pembuatan tanggal tempat wudhu, pemlasteran dinding mushola luar dalam, pemasangan kusen pintu dan jendela stanless) sesuai BAST No. 000/1433/III.02/2023 tanggal 31 Juli 2023 Rp. 54.000.000,00	54.000.000,00
12	Pendapatan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berupa barang persediaan Untuk memenuhi persediaan berupa Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Obat Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai BAST No. 11/IFP/PKD/XI/2023 tanggal 28 November 2023 Rp. 19.205.112,00	19.205.112,00
13	Pendapatan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berupa barang persediaan Untuk memenuhi persediaan berupa Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Obat Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai BAST No. 11/IFP/PROG/XI/2023 tanggal 28 November 2023 Rp. 270.319.613,00	270.319.613,00
14	Pendapatan Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 22 Desember 2023 No BAST 030/473.a/IV.01/2023 berupa Barang Milik Negara Balai Prasarana Pemukiman yang dibangun di kabupaten lampung barat dengan menggunakan DIPA TA 2028, 2019, dan 2021 senilai Rp. 21.326.455.259,00 terdiri dari:	
	a. Penataan Kebun Raya Liwa TA 2018 Rp. 8.060.745.000,00	8.060.745.000,00
	b. Penataan Kebun Raya Liwa TA 2019. Rp. 9.008.764.259,00	9.008.764.259,00
	c. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana SMP Satap 2 Balik Bukit TA 2021 Rp. 2.132.509.000,00	2.132.509.000,00
	d. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana SDN 3 Fajar Bulan TA 2021 Rp. 2.124.437.000,00	2.124.437.000,00
15	Penerimaan Hibah Persediaan Obat-Obatan (obat program) dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Lambar total sebesar Rp1.147.670.738,00, terdiri atas :	
	Penerimaan Obat-obatan, BAST No.12/IFP/V/2023	466.200.000,00
	Penerimaan Obat-obatan, BAST No.23/IFP/II/2023	119.240,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.343/IFP/IX/2023	14.053.500,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.343/IFP/IX/2023	50.100.000,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.443/305/III.10.3/XII/2023	26.537.820,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.443/291/III.10.3/XI/2023	6.178.720,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.443/310/III.10.3/XII/2023	14.890.792,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.443/254/III.10.3/IX/2023	6.267.512,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.146/IFP/V/2023	1.885.844,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.342/IFP/V/2023	1.546.750,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.242/IFP/III/2023	39.306.240,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.443/194/III.10.3/VII/2023	177.380.000,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.443/165/III.10.3/IV/2023	101.360.000,00
	Penerimaan Obat-obatan, SBBK No.443/213/III.10.3/VIII/2023	241.844.320,00
	JUMLAH	23.053.728.222,00



LAMPIRAN

19

DAFTAR TAGIHAN JANGKA PANJANG - TGR



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**DAFTAR TAGIHAN JANGKA PANJANG - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
TAGIHAN JANGKA PANJANG - RGR					3.508.157.928,39
1	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Ir. Okmal) OK	7.942.000,00
2	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Ardvanto Adhar) AA	24.587.500,00
3	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Ardy Nugraha) AN	9.675.000,00
4	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Arifal Sahdat) AS	47.150.000,00
5	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Aswin) AW	20.400.000,00
6	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Ayu Maulidya) AM	20.400.000,00
7	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Bertha Sandria) BS	19.350.000,00
8	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Darmivanti) DY	19.350.000,00
9	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Darwin Sugandi) DS	19.350.000,00
10	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Dona Persada) DP	20.400.000,00
11	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Dwi Deasy) DD	27.462.500,00
12	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Evi Oktavia) EO	47.150.000,00
13	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Febry Ledvani) FL	47.150.000,00
14	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Hadi Siswono) HD	20.400.000,00
15	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Himaya Saputra) HS	47.150.000,00
16	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Imam Darmadi) IDSE	47.150.000,00
17	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Jonis Andrian Davit) JADS	3.737.500,00
18	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Jonis Andrian Davit) JADS	1.462.500,00
19	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Jumidi) JMD	47.150.000,00
20	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Kusmira) KS	47.150.000,00
21	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Mavasari) MY	47.150.000,00
22	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Muhammad Nusinwan) MNW	19.350.000,00
23	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Mustiko) MS	47.150.000,00
24	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Nuryanti) NR	30.700.000,00
25	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Parida) PRD	47.150.000,00
26	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Polmaria Hutajulu) PH	47.150.000,00
27	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Ria Aprianti Rahmadani) RAR	19.350.000,00
28	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Rifki Yufriza) RYA	19.350.000,00
29	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Riska Hairunnisa) RC	9.675.000,00
30	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Samsurizal) SM	47.150.000,00
31	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Selawati) SEL	47.150.000,00
32	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Sodik Ashar Anas) SAA	20.400.000,00
33	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Sofvan) SFY	19.350.000,00
34	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Tuti Riyanti) TR	47.150.000,00
35	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Untung Suprasojo)	47.150.000,00
36	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Uswatun Hasanah)	47.150.000,00
37	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Winarno) WWN	19.350.000,00
38	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : YS	19.350.000,00
39	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : YDP	44.412.500,00
40	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Yudi Patoni) YPS	47.150.000,00
41	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/L/HP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : (Yulina) YLN	19.350.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
89	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DS	760.000,00
90	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : MNW	760.000,00
91	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : WNO	760.000,00
92	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : NR	4.800.000,00
93	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : (AAN KARTINI) AKS	1.140.000,00
94	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : (DYAH SHINTAR) DS	3.600.000,00
95	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : (MUSADAT HUSI) MUSH	2.040.000,00
96	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : (DARMIN LANGA) DL	2.040.000,00
97	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : (INDRA GUNAWA) IGN	2.400.000,00
98	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : (AKHMAD HASYA) AHK	2.400.000,00
99	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : MNT	4.560.000,00
100	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : NYA	6.840.000,00
101	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : ET	6.840.000,00
102	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : DWD	2.850.000,00
103	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : PWN	2.280.000,00
104	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : KHD	2.280.000,00
105	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : IA	6.840.000,00
106	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : ODR	6.840.000,00
107	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : SNK	6.840.000,00
108	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : RUHA	6.840.000,00
109	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : AFA	6.840.000,00
110	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : YU	6.840.000,00
111	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : RXY	2.565.000,00
112	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : YI	2.280.000,00
113	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : DRW	2.280.000,00
114	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : HDAMD	3.420.000,00
115	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : NHA	3.420.000,00
116	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : RSSK	3.420.000,00
117	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Jumikem (JMK)	4.230.000,00
118	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Meiriani (MRN)	2.520.000,00
119	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Dina Safitri (DST)	3.660.000,00
120	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Jumikem (JMK)	6.510.000,00
121	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Daria (DRIA)	3.090.000,00
122	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Neli Kesuma (KES)	6.510.000,00
123	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Rodina (RDN)	6.510.000,00
124	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Svafrida (FRID)	6.510.000,00
125	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Yulyanis (YLY)	3.090.000,00
126	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : M. Nur rahmad Dani (MNR)	2.520.000,00
127	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Ferdiansyah putra (FERD)	1.950.000,00
128	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Dina Safitri (DST)	1.950.000,00
129	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : Metra Hermawan (MHE)	1.950.000,00
130	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : THT	2.250.000,00
131	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : HZA	1.900.000,00
132	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : MHP	2.000.000,00
133	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : KFK	4.560.000,00
134	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : ABK	6.840.000,00
135	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : ALR	6.960.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
277	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ARI SISKA SUFIANTI) ASS	530.000,00
278	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ASLENI) ASLN	1.000.000,00
279	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ASLENI) ASLN	430.000,00
280	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (IIN NITA DIANA) IINNITA	3.400.000,00
281	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	1.980.000,00
282	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	1.510.000,00
283	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	1.980.000,00
284	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	570.000,00
285	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	405.000,00
286	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (RIFKI ANDRIANSYAH) RND	940.000,00
287	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (RIFKI ANDRIANSYAH) RND	170.000,00
288	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (RIFKI ANDRIANSYAH) RND	202.500,00
289	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (RYSKY MARLINDA) MAR	432.500,00
290	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (SOFIAN) SOFN	600.000,00
291	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (WIJI LESTARI) WIJ	5.250.000,00
292	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (WIJI LESTARI) WIJ	440.000,00
293	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (MIFTAHUL KHOIRI) MKH	2.710.000,00
294	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ROHANIHA) ROH	3.140.000,00
295	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ELMAYATI) ELM	3.420.000,00
296	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (MIFTAHUL KHOIRI) MKH	3.740.000,00
297	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ELMAYATI) ELM	3.420.000,00
298	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ELMAYATI) ELM	2.850.000,00
299	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (ELMAYATI) ELM	3.420.000,00
300	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (NURLIANA) ANA	3.320.000,00
301	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (SUDIYEM) SDM	740.000,00
302	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (SUDIYEM) SDM	300.000,00
303	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (RISNAWATY) WATY	800.000,00
304	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	380.000,00
305	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	880.000,00
306	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : (KUSMAWATI) KSM	880.000,00
307	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Wahyu Marvati) WMY	6.690.000,00
308	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Apryani) APY	6.690.000,00
309	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Endriyani) ENDY	685.000,00
310	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Yulidar) YDS	685.000,00
311	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Aqung Kurniawan) AGK	6.690.000,00
312	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Endriyani) ENDY	1.040.000,00
313	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Marico S Tambunan) MST	920.000,00
314	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Wahyu Marvati) WMY	3.320.000,00
315	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Yulidar) YDS	3.320.000,00
316	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Aqung Kurniawan) AGK	780.000,00
317	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Bon Ben Bela Aqung) BBBA	4.410.000,00
318	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Bon Ben Bela Aqung) BBBA	1.040.000,00
319	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Nasruddin) DIN	1.040.000,00
320	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Apryani) APY	1.610.000,00
321	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : (Nopiansyah) NOP	1.100.000,00
322	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : INUR	912.000,00
323	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : (MISYAR) MYR	3.420.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
418	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ERZ	6.840.000,00
419	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ERZ	3.420.000,00
420	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : EVAS	1.710.000,00
421	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : GUNN	6.840.000,00
422	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : GUNN	3.420.000,00
423	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : JAHR	1.710.000,00
424	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : LDR	2.280.000,00
425	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : LDR	570.000,00
426	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : MKT	6.840.000,00
427	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ZAB	2.280.000,00
428	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : TRIS	1.140.000,00
429	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : TRIS	3.420.000,00
430	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : TRIS	2.280.000,00
431	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : RYO	6.840.000,00
432	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : RYO	2.565.000,00
433	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ZRH	3.420.000,00
434	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Marjohan, SH, MM) MJH	8.160.000,00
435	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Fahrurrozi, ST) FAH	9.120.000,00
436	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Rudi Agus Hermawan, S.Si) RAHS	9.120.000,00
437	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Suhas Rizal, S.IP) SRS	3.420.000,00
438	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Anton Kurniawan, SE) ANK	3.420.000,00
439	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Angga Satria Perdana) ASP	9.120.000,00
440	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Suhas Rizal, S.IP) SRS	2.850.000,00
441	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Nugroho Harvanto, S.IP) NHS	3.420.000,00
442	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Muhammad Nasir, S.IP) MNS	3.420.000,00
443	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Hervani, S.IP) HYN	6.840.000,00
444	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Herlinda) HRLN	4.560.000,00
445	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Oktaviani, S.IP) VIA	3.420.000,00
446	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Suhas Rizal, S.IP) SRS	2.280.000,00
447	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : (Demotrius Okto Winardi, S.IP) DOWS	2.565.000,00
448	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : (Marlush Akbar, SH) MASH	5.000.000,00
449	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : (Suhas Rizal, S.Ip) SRS	1.000.000,00
450	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : (Euis Safitri, ST, MM) ESSTM	5.000.000,00
451	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : SRS	2.280.000,00
452	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : (Euis Safitri, ST, MM) ESSTM	3.420.000,00
453	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : YSO	2.700.000,00
454	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : (Budi Arsedo Tri Putra, SH) BATPS	2.280.000,00
455	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : ESSTM	6.840.000,00
456	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : SRS	6.840.000,00
457	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : (Hernita) HENR	4.000.000,00
458	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : (yumeta Setya Dewi Hutapea) YSD	1.900.000,00
459	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : LDH	342.000,00
460	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : (Feri Irawan) WAN	2.920.000,00
461	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : KRI	3.420.000,00
462	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : SIM	1.710.000,00
463	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : KRI	3.420.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
464	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : WAN	3.420.000,00
465	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : RAS	6.840.000,00
466	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : MHF	3.420.000,00
467	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : LOL	3.420.000,00
468	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : SKRS	2.280.000,00
469	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : WAN	1.140.000,00
470	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : MHF	855.000,00
471	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : KRI	760.000,00
472	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : PIT	760.000,00
473	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : PIT	4.560.000,00
474	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : FAR	1.140.000,00
475	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : YAN (SURYANI)	6.270.000,00
476	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : RWD (SUSAN NURWIADI)	2.200.000,00
477	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : MYT (MIFTAHUL HAYATI)	2.613.000,00
478	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : SAU (SEFTI AULIA)	6.270.000,00
479	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : MYT (MEFTAHUL HAYATI)	6.270.000,00
480	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : RSKA (RISKAWULANDARI)	2.090.000,00
481	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : LDYN (LINDA YANA)	3.712.500,00
482	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : MYT (MARYATI)	2.933.000,00
483	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : RYA (NURYATI)	2.933.000,00
484	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : AHW (AHMAD WIDADI)	3.990.000,00
485	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : AHW AHMAD WIDADI)	6.460.000,00
486	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : EDIS	342.000,00
487	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : JUN	4.560.000,00
488	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : MALI	4.560.000,00
489	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : ENWT	4.560.000,00
490	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : RUL	1.900.000,00
491	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : HAM	2.280.000,00
492	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : SMR	4.560.000,00
493	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : NER	1.520.000,00
494	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : ENWT	2.280.000,00
495	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : IMADE	1.947.500,00
496	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jawa : JUN	1.995.000,00
497	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : MRU	4.800.000,00
498	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : FAU	4.560.000,00
499	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : DAM	4.800.000,00
500	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : ARD	3.600.000,00
501	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : FAU	4.560.000,00
502	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : DAM	4.200.000,00
503	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : ARD	4.200.000,00
504	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : DEWIP	912.000,00
505	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Dian Saputra (DSPT)	4.100.000,00
506	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Ramot Simanjuntak (SIM)	4.100.000,00
507	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Suwandi (WAN)	4.340.000,00
508	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Erni Karnita (NIKA)	1.150.000,00
509	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Suwandi (WAN)	1.940.000,00
510	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Emilia Kontesa (EMKO)	1.590.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
511	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Oktarina (TAR)	4.100.000,00
512	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Emilia Kontesa (EMKO)	1.640.000,00
513	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Karto Suwiryo (KRY)	1.820.000,00
514	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : Imam Rosadi (IROS)	1.440.000,00
515	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (ERMAYANI) ERMYN	2.060.000,00
516	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (RUSTAM) TAM	2.060.000,00
517	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (BEDDY APRIANSYAH) BEDD	2.300.000,00
518	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (SAIPUL) PUL	1.650.000,00
519	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (GALIH JOKO FURNOMO) GALH	1.400.000,00
520	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (MASWATI) MSW	340.000,00
521	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (LISBAHAWAN) LBH	380.000,00
522	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (LISBAHAWAN) LBH	1.020.000,00
523	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (ASBAHANI) ASBH	1.250.000,00
524	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (HAWARI) HWRS	1.400.000,00
525	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : (SAIPUL) PUL	400.000,00
526	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : CHER	1.520.000,00
527	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : LKI	4.560.000,00
528	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : ERNU	1.900.000,00
529	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : BUDH	4.560.000,00
530	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : SHRM	4.800.000,00
531	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : ARD	4.560.000,00
532	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : DEW	4.800.000,00
533	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : ASPR	342.000,00
534	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : TMI	342.000,00
535	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : SHRM	2.100.000,00
536	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : ARO	2.100.000,00
537	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : LKI	2.280.000,00
538	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : WAN	2.280.000,00
539	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Pairivanto (PAJ)	4.340.000,00
540	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Yulina (YLN)	4.320.000,00
541	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Supardi (SUP)	1.300.000,00
542	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Albizar (ABZ)	2.060.000,00
543	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Herwanda (HWNDA)	1.880.000,00
544	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Ahyanul Aziza (AAS)	1.775.000,00
545	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Yuliyana Ruska (YR)	1.680.000,00
546	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Derekson Eka Putra (DES)	2.060.000,00
547	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : Samsuar (SMSR)	4.580.000,00
548	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : LKY	4.560.000,00
549	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : ROT	4.560.000,00
550	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : AUP	1.520.000,00
551	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : AUP	1.900.000,00
552	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : OKD	4.800.000,00
553	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : HST	2.280.000,00
554	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : OKD	2.400.000,00
555	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : ALP	1.995.000,00
556	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : MJN	2.100.000,00
557	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : SLTN	4.560.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
605	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : PRZ	1.995.000,00
606	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : SHN	2.100.000,00
607	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : SHN	2.400.000,00
608	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : HRNT	2.280.000,00
609	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lumbo Semining : YUK	4.800.000,00
610	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lumbo Semining : RYD	4.800.000,00
611	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lumbo Semining : YUK	1.600.000,00
612	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lumbo Semining : RYD	2.400.000,00
613	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lumbo Semining : HWN	2.000.000,00
614	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lumbo Semining : HWN	2.400.000,00
615	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lumbo Semining : RYD	4.800.000,00
616	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : DKPT	900.000,00
617	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ELD	760.000,00
618	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ROS	3.600.000,00
619	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : RWT	3.420.000,00
620	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ROS	1.200.000,00
621	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : MHL	3.420.000,00
622	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ASH	3.420.000,00
623	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ELD	1.140.000,00
624	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : YZR	1.140.000,00
625	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : MHL	6.120.000,00
626	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : DKPT	3.600.000,00
627	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : SMRLN	3.420.000,00
628	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : DKPT	800.000,00
629	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ELD	4.560.000,00
630	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : (Arif Rahman) AR	7.600.000,00
631	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : (Yuni Susilawati) YR	7.600.000,00
632	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : (Rina Elfira) RT	5.700.000,00
633	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : (Ariyansah) AT	5.700.000,00
634	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : (Tigo Mustajab) TI	9.120.000,00
635	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : (Ariyansah)	5.700.000,00
636	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Dinas Koperindaq	9.195.000,00
637	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Kelebihan Pembayaran biaya langsung personel sebesar Rp7.200.000,00 An. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.200.000,00
638	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Kelebihan Pembayaran CV MCP sebesar Rp25.608.000,00 An. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.608.000,00
639	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Kekurangan Volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp320.572.974,90 atas delapan pekerjaan jalan pada Dinas PUPR An. CV. Putra Sarana Konstruksi (PSK)	46.032.258,17
640	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Kekurangan Volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp320.572.974,90 atas delapan pekerjaan jalan pada Dinas PUPR An. CV. Anak Gunung (AG)	29.845.063,57
641	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Kekurangan Volume Sebesar Rp11.563.037,73 An. Dinas Lingkungan Hidup	11.563.037,73
642	BPKD	16 May 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP05/2023	Kekurangan Volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak atas pekerjaan Gedung Bangunan pada Dinas Kesehatan An. CV. Sukau Jaya Indonesia (SJI)	107.848.568,92



LAMPIRAN

20

DAFTAR AGING SCHEDULE PIUTANG



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**AGING SCHEDULE PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2023**

No	URAIAN	Piutang	Kualitas dan Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Piutang Netto Per 31 Des 2023
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-8
1.	Dinas Kesehatan							
	Lain-lain PAD yang Sah							
	Pendapatan BLUD							
	- Puskesmas Sumberjaya	35.363.530,00	35.363.530,00	0,00	0,00	0,00	176.817,65	35.186.712,35
	- Puskesmas Kebun Tebu	16.329.100,00	16.329.100,00	0,00	0,00	0,00	81.645,50	16.247.454,50
	- Puskesmas Gedung Surian	25.262.195,00	25.262.195,00	0,00	0,00	0,00	126.310,97	25.135.884,03
	- Puskesmas Air Hitam	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	11.840.500,00
	- Puskesmas Fajar Bulan	40.534.760,00	40.534.760,00	0,00	0,00	0,00	202.673,80	40.332.086,20
	- Puskesmas Sekincau	18.669.490,00	18.669.490,00	0,00	0,00	0,00	93.347,45	18.576.142,55
	- Puskesmas Pagar Dewa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.383.000,00
	- Puskesmas Batu Ketulis	18.691.910,00	18.691.910,00	0,00	0,00	0,00	93.459,55	18.598.450,45
	- Puskesmas Kenali	30.892.720,00	30.892.720,00	0,00	0,00	0,00	154.463,60	30.738.256,40
	- Puskesmas Batu Brak	10.279.180,00	10.279.180,00	0,00	0,00	0,00	51.395,90	10.227.784,10
	- Puskesmas Bandar Negeri Suoh	5.458.000,00	5.458.000,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	5.430.710,00
	- Puskesmas Srimulyo	11.697.500,00	11.697.500,00	0,00	0,00	0,00	58.487,50	11.639.012,50
	- Puskesmas Buay Nyerupa	30.386.180,00	30.386.180,00	0,00	0,00	0,00	151.930,90	30.234.249,10
	- Puskesmas Lombok	7.015.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00	0,00	35.075,00	6.979.925,00
	Sub Jumlah	265.879.565,00	265.879.565,00	0,00	0,00	0,00	1.329.397,82	264.550.167,18
2.	RSUD Alimuddin Umar							
	Lain-lain PAD yang Sah							
	- Pendapatan BLUD	2.091.053.809,00	2.091.053.809,00	0,00	0,00	0,00	9.381.878,05	2.081.671.930,95
	Sub Jumlah	2.091.053.809,00	2.091.053.809,00	0,00	0,00	0,00	9.381.878,05	2.081.671.930,95
3.	Diskominfo							
	Retribusi Daerah :							
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.680.356,00	0,00	0,00	1.200,00	25.679.156,00	25.679.756,00	600,00
	Sub Jumlah	25.680.356,00	0,00	0,00	1.200,00	25.679.156,00	25.679.756,00	600,00
4.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag							
	Lain-lain PAD yang Sah :							
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Jasas Pengguliran	64.090.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	62.840.000,00	62.965.000,00	1.125.000,00
	Sub Jumlah	64.090.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	62.840.000,00	62.965.000,00	1.125.000,00
5.	BPKD							
	Pajak Daerah :							
	- Pajak Restoran dan Sejenisnya	21.871.896,00	12.192.350,00	0,00	9.509.546,00	170.000,00	4.985.734,75	16.886.161,25
	- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	29.864.050,00	29.864.050,00	0,00	0,00	0,00	149.320,25	29.714.729,75
	- Pajak Parkir	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	3.532.250,00
	Retribusi Daerah :							
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	16.127.500,00	0,00	0,00	16.502.500,00	1.750.000,00	10.001.250,00	6.126.250,00
	Lain-lain PAD yang Sah							
	- Pendapatan Denda PBBP2	1.180.349,24	0,00	0,00	1.180.349,24	0,00	590.174,62	590.174,62
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	62.510.851,56	0,00	0,00	0,00	62.510.851,56	62.510.851,56	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.000.000,00	0,00	4.000.000,00	13.000.000,00	0,00	6.900.000,00	10.100.000,00
	Sub Jumlah	152.179.646,80	45.606.400,00	4.000.000,00	40.192.395,24	64.505.851,56	85.230.081,18	66.949.565,62
6.	PPKD							
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :							
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	1,54	306,46

No	URAIAN	Piutang	Kualitas dan Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Piutang Netto Per 31 Des 2023
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-8
	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	112.941.910,00	112.941.910,00	0,00	0,00	0,00	564.709,55	112.377.200,45
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	5,48	1.091,52
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	4,43	880,57
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	6,74	1.340,26
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :		0,00					
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.340.200.970,00	3.840.677.844,00	4.820.220.784,00	3.679.302.342,00	0,00	2.340.876.638,62	9.999.324.331,38
	- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.028.302.719,00	2.168.077.824,00	2.399.649.040,00	2.460.575.855,00	0,00	1.481.093.220,62	5.547.209.498,38
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.812.496.882,00	9.132.369.816,00	8.835.050.626,00	16.845.076.440,00	0,00	9.351.705.131,68	25.460.791.750,32
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	369.138.944,00	107.714.081,00	112.735.027,00	148.689.836,00	0,00	86.156.991,10	282.981.952,90
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.991.838.697,00	3.991.838.697,00	0,00	0,00	0,00	19.959.193,49	3.971.879.503,51
	Sub Jumlah	58.654.923.759,00	19.353.623.809,00	16.167.655.477,00	23.133.644.473,00	0,00	13.280.355.903,25	45.374.567.855,75
	Jumlah Total	61.253.807.135,80	21.756.163.583,00	16.172.905.477,00	23.173.838.068,24	153.025.007,56	13.464.942.016,30	47.788.865.119,50



LAMPIRAN

21

RINCIAN ASET TETAP PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

RINCIAN ASET TETAP PER PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	249.622.513.781,49	245.952.588.769,67	3.669.925.011,82	1,49
2	Sekretariat DPRD	18.182.279.393,02	17.975.290.704,02	206.988.689,00	1,15
3	Inspektorat	1.338.919.433,33	1.229.851.433,33	109.068.000,00	8,87
4	BPKD	9.831.488.238,00	9.494.133.038,00	337.355.200,00	3,55
5	BAPPEDA	3.811.661.225,00	3.811.661.225,00	0,00	0,00
6	Balitbang	935.729.911,00	903.344.911,00	32.385.000,00	3,59
7	BKPSDM	1.749.144.358,00	1.807.384.358,00	(58.240.000,00)	(3,22)
8	BPBD	16.402.073.697,00	15.356.804.067,00	1.045.269.630,00	6,81
9	Kantor Kesbangpol	899.721.668,00	685.254.168,00	214.467.500,00	31,30
10	Sat. Pol PP	12.416.499.839,00	12.384.999.839,00	31.500.000,00	0,25
11	Dinas Dikbud.	713.608.737.808,55	684.742.745.606,55	28.865.992.202,00	4,22
12	Dinas Kesehatan	19.274.572.966,78	19.292.968.966,78	(18.396.000,00)	(0,10)
13	Dinas PUPR	2.384.755.868.490,34	2.328.009.003.751,34	56.746.864.739,00	2,44
14	Disduk dan Capil	4.542.172.128,00	4.456.266.128,00	85.906.000,00	1,93
15	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisata	69.741.394.321,00	71.320.073.960,82	(1.578.679.639,82)	(2,21)
16	Diskop,UKM, Perindag	52.586.563.530,00	43.213.822.311,00	9.372.741.219,00	21,69
17	Dinas PP, KB, PP,&PA	13.754.064.630,00	13.626.984.630,00	127.080.000,00	0,93
18	Dinas Ket. Pangan	4.324.166.016,00	4.324.166.016,00	0,00	0,00
19	Dinas TPH	60.780.221.987,00	50.255.543.067,00	10.524.678.920,00	20,94
20	Dinas Bun & Nak	17.430.053.589,63	17.246.773.589,63	183.280.000,00	1,06
21	Dinas Perikanan	22.424.998.319,80	22.424.998.319,80	0,00	0,00
22	Dinas PMP	4.007.089.125,00	3.772.414.125,00	234.675.000,00	6,22
23	Dinas LH	84.085.390.274,72	65.532.051.015,72	18.553.339.259,00	28,31
24	Dinas PM, PTSP, & Naker	1.116.623.932,00	1.113.023.932,00	3.600.000,00	0,32
25	Dinas Sosial	3.843.901.845,00	3.826.614.845,00	17.287.000,00	0,45
26	Dinas Perhubungan	21.453.023.911,00	21.296.423.911,00	156.600.000,00	0,74
27	Dinas Kominfo	5.963.360.662,00	5.878.664.512,00	84.696.150,00	1,44
28	Dinas Perpus&Arsip	6.810.851.503,00	6.746.065.503,00	64.786.000,00	0,96
29	RSUD Liwa	113.114.616.935,77	111.410.102.446,77	1.704.514.489,00	1,53
30	Kec. Balik Bukit	839.203.103,67	839.203.103,67	0,00	0,00
31	Kec. Belalau	1.603.638.100,00	1.584.438.100,00	19.200.000,00	1,21
32	Kec. Sumberjaya	5.936.765.650,00	5.737.262.650,00	199.503.000,00	3,48
33	Kec. Way Tenong	1.435.822.283,00	1.435.822.283,00	0,00	0,00
34	Kec. Sekincau	2.363.492.637,00	2.354.992.637,00	8.500.000,00	0,36
35	Kec. Suoh	1.819.653.800,00	1.819.653.800,00	0,00	0,00
36	Kec. Batubrak	1.464.407.700,00	1.457.407.700,00	7.000.000,00	0,48
37	Kec. Sukau	1.167.423.894,00	826.342.894,00	341.081.000,00	41,28
38	Kec. Gedung Surian	1.280.609.637,00	1.258.109.637,00	22.500.000,00	1,79
39	Kec. Kebun Tebu	1.742.017.375,00	1.702.930.375,00	39.087.000,00	2,30
40	Kec. Air Hitam	1.747.490.775,00	1.715.090.775,00	32.400.000,00	1,89
41	Kec. Pagar Dewa	1.654.960.275,00	1.644.960.275,00	10.000.000,00	0,61
42	Kec. Batu Ketulis	1.902.992.125,00	1.884.992.125,00	18.000.000,00	0,95
43	Kec. BNS	1.737.461.975,00	1.719.461.975,00	18.000.000,00	1,05
44	Kec. Lumbok Seminung	1.841.672.525,00	1.851.057.525,00	(9.385.000,00)	(0,51)
45	Kel. Pasar Liwa	3.553.774.313,00	3.239.211.063,00	314.563.250,00	9,71
46	Kel. Way Mengaku	2.510.741.786,00	2.214.767.570,00	295.974.216,00	13,36
47	Kel. Sekincau	2.932.923.385,00	2.669.696.730,00	263.226.655,00	9,86
48	Kel. Fajar Bulan	3.110.450.072,69	2.911.239.439,69	199.210.633,00	6,84
49	Kel. Tugu Sari	2.680.376.868,00	2.472.713.740,00	207.663.128,00	8,40
50	Puskesmas Liwa	22.144.988.513,84	21.902.240.314,84	242.748.199,00	1,11
51	Puskesmas Kenali	14.034.623.697,54	13.762.768.571,54	271.855.126,00	1,98
52	Puskesmas Sumber Jaya	16.092.022.005,53	16.008.136.505,53	83.885.500,00	0,52
53	Puskesmas Fajar Bulan	17.134.700.587,37	17.000.430.587,37	134.270.000,00	0,79
54	Puskesmas Sekincau	13.289.707.638,66	12.594.592.327,66	695.115.311,00	5,52

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
55	Puskesmas Srimulyo	17.845.830.642,00	17.787.023.142,00	58.807.500,00	0,33
56	Puskesmas Batu Brak	13.563.438.683,62	13.320.321.183,62	243.117.500,00	1,83
57	Puskesmas Buay Nyerupa	15.311.791.910,54	15.202.008.910,54	109.783.000,00	0,72
58	Puskesmas Gedung Surian	12.784.687.392,00	12.715.863.392,00	68.824.000,00	0,54
59	Puskesmas Kebun Tebu	14.007.173.665,00	13.840.431.665,00	166.742.000,00	1,20
60	Puskesmas Air Hitam	13.932.558.218,00	13.893.682.218,00	38.876.000,00	0,28
61	Puskesmas Pagar Dewa	19.221.375.853,42	19.164.674.403,42	56.701.450,00	0,30
62	Puskesmas Batu Ketulis	17.877.570.127,56	17.789.120.545,56	88.449.582,00	0,50
63	Puskesmas BNS	16.848.032.156,62	16.654.126.156,62	193.906.000,00	1,16
64	Puskesmas Lumbok Seminung	12.921.555.621,00	12.733.884.121,00	187.671.500,00	1,47
65	Pengelola Barang	1.930.590.000,00	3.241.590.000,00	(1.311.000.000,00)	(40,44)
	JUMLAH	4.201.074.228.511,49	4.067.040.267.592,49	134.033.960.919,00	3,30



LAMPIRAN

22

DATA BIDANG TANAH BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

DATA BIDANG TANAH BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
1	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Komplek Perkantoran 1991/08040408400007	Sertipikat
2	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas Guru SD 2005/08050401400012	Sertipikat
3	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.04.003	Tanah Lapangan Pemancar Lainnya	Tower 2003/08.05.07.04.4.00001	Sertipikat
4	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.11.003	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	Tugu Perbatasan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
5	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Desa Sukajaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat	Hibah
6	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Desa Sukajaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat	Hibah
7	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Desa Sukajaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat	Hibah
8	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	Perumahan Seranggas 2007/08.05.04.01.4.00029	Sertipikat
9	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	Perumahan Pantau 2010/08.05.04.08.1.00012	Sertipikat
10	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.04.003	Tanah Lapangan Pemancar Lainnya	Lokasi Seismograf 2006/08.05.04.03.4.00040	Sertipikat
11	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong	Eks. BUMD Pesagi Mandiri (Sekincau)/08.05.08.02.1.0008	Sertipikat
12	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong	Jalan Adhyaksa Way Mengaku Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
13	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong	Jalan Gajah Mada Pasar Liwa Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
14	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong	Jalan Melati Way Mengaku Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
15	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor PD Pesagi Mandiri Perkasa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
16	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Bangunan Bekas Mess Bina Marga Prov Lampung/Jalan Raden Intan Kelurahan Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
17	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Lapas 2007/08051101400002/Jalan Desa, Desa Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
18	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	Rumah Dinas Muspida dan karyawan Pemda/Jalan Imam Bonjol, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
19	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas Anggota DPRD/Jalan Teuku Umar, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
20	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.04.005	Kebun Raya	Kebun Raya Liwa/Jalan Teuku Umar, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
21	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Kota/Jalan Raden Intan, Kelurahan Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
22	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Bunga/Jalan Teuku Umar, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
23	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Yayasan Bumi Adi Guna (BPN)/Jalan Teuku Umar, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
24	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Kosong/Jalan Teuku Umar, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
25	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Tanah Kosong Sebarus/Jalan Jend. Sudirman, Desa Sebarus, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
26	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor BPP BNS/Jalan Wisata Suoh, Desa Gunung Ratu, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
27	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor BPP Gedung Surian/Jalan Raya Pura Mekar, Desa Pura Mekar, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
28	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Masjid Padang Tambak 1995/08.05.01.26.1.00142/Jalan Raya Liwa, Desa Tambak Jaya, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
29	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Pekarangan Pantau Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit	Akta Jual Beli
30	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Asrama Mahasiswa 2015/08011706400010	Sertipikat
31	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bangunan Rumdin Ketua	Belum Ada Bukti Kepemilikan
32	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bangunan Rumdin Wk Ketua I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
33	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bangunan Rumdin Wk Ketua II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
34	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Bangunan Mess DPRD	Belum Ada Bukti Kepemilikan
35	Sat Pol PP	1.3.1.01.01.04.018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Bangunan Pos Terpadu 2004/08051109400003	Sertipikat
36	Sat Pol PP	1.3.1.01.01.04.018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
37	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
38	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Lombok Semining	Belum Ada Bukti Kepemilikan
39	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tri Budi Syukur 2010/08.05.06.07.3.00005	Sertipikat
40	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Way Petai 2008/08.05.06.03.3.00009	Sertipikat
41	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Way Mengaku 2006/08.05.04.03.4.00034	Sertipikat
42	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Way Empulau Ulu 2023/08.05.04.06.4.00006-ABH639834	Sertipikat
43	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tapak Siring 2020/08051104400007	Sertipikat
44	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tri Mulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
45	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Kenali 2023/08.05.05.01.4.00012-ABH639724	Sertipikat
46	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Kota Besi 2010/08.05.10.06.3.00003	Sertipikat
47	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Kembanghng 2023/08.05.10.01.4.00006-ABH639708	Sertipikat
48	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
49	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bakhu 2010/08.05.05.08.3.00001	Sertipikat
50	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bandar Baru 2020/08.05.11.11.4.00003	Sertipikat
51	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Banding Agung 2020/08.05.04.09.4.00001	Sertipikat
52	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Banding Agung (Kls. Jauh)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
53	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Purajaya 2010/08050606300003	Sertipikat
54	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pura Mekar 2023/08.05.15.03.4.00005-ABH639710	Sertipikat
55	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pura Laksana 2010/08050702300008	Sertipikat
56	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sekincau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
57	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pampangan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
58	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sebarus 2006/08050405400006	Sertipikat
59	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
60	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Pura Laksana 2010/08050702300009	Sertipikat
61	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pekon Balak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
62	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tugu Sari 2023/08.05.06.11.4.00016-ABH639726	Sertipikat
63	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tri Mulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
64	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Fajar Bulan 2023/08.05.07.01.4.00020-ABH639835	Sertipikat
65	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Padang Tambak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
66	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Gunung Terang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
67	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Sekincau 2015/08.05.08.02.4.00009	Sertipikat
68	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bahway 2020/08.05.04.11.4.00001	Sertipikat
69	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Hanakau 2020/08.05.11.02.4.00004	Sertipikat
70	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Air Hitam 2020/08.05.19.07.4.00001	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
71	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
72	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Tugu Sari/ 08.05.06.11.4.00011	Sertipikat
73	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Sukaraja 2015/08.05.07.07.4.00002	Sertipikat
74	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tanjung Raya (kls Induk)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
75	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tanjung Raya (kls Jauh)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
76	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Sumber Jaya 2006/08050601400010	Sertipikat
77	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
78	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Padang Tambak 2023/08.05.07.08.4.00005-ABH639712	Sertipikat
79	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Dharma Wanita Belau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
80	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pagar Dewa 2010/08051109300005	Sertipikat
81	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Jaga Raga/ 08.05.11.05.4.00002	Sertipikat
82	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Karang Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
83	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Liwa 2006/08050402400027	Sertipikat
84	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Padang Cahya 2006/08050404400002	Sertipikat
85	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tanjung Raya 2020/08.05.11.11.4.00002	Sertipikat
86	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tri Budi Syukur 2010/08050607300006	Sertipikat
87	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tebalokh 2020/08051011400001	Sertipikat
88	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Negeri Pembina Liwa 1998/08.05.03.03.4.00027	Sertipikat
89	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
90	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Muara Jaya II 2010/08050608300004	Sertipikat
91	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Cipta Waras	Belum Ada Bukti Kepemilikan
92	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
93	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Mekar Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
94	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Fajar Bulan 2010/08050701300011	Sertipikat
95	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Padang Tambak/ 08.05.07.08.4.00001	Sertipikat
96	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pura Laksana 2010/08050702300007	Sertipikat
97	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Gunung Terang 1995/08.05.01.27.1.00189	Sertipikat
98	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Giham Suka Maju 2010/08050805400010	Sertipikat
99	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pampangan 2010/08050801300005	Sertipikat
100	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
101	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Bedudu 2010/08050505300002	Sertipikat
102	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kenali 08.05.05.01.4.00008	Sertipikat
103	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Bakhu 2010/08050507300001	Sertipikat
104	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Luas 2010/08050508300002	Sertipikat
105	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kota Besi 2020/08.05.01.08.4.00003	Sertipikat
106	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kembahang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
107	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Liwa 2001/08050301400021	Sertipikat
108	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Liwa 2006/08050402400028	Sertipikat
109	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Bahway 2023/08.05.04.11.4.00004-ABJ300712	Sertipikat
110	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Padang Cahya 2006/08050404400001	Sertipikat
111	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Buay Nverupa 2010/08051303300004	Sertipikat
112	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pagar Dewa 2010/08051109300004	Sertipikat
113	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Jaga Raga 2010/08051105300002	Sertipikat
114	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Hanakau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
115	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kagungan 2010/08051107300003	Sertipikat
116	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Lombok Timur 2010/08051107300004	Sertipikat
117	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Lombok 2010/08051107300002	Sertipikat
118	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Suoh 2004/08050903400001	Sertipikat
119	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Banding Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
120	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD Dinas Pendidikan Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
121	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sindang Pagar 2020/08050610400010	Sertipikat
122	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
123	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Simpang Sari 2021/08.05.06.01.4.00014	Sertipikat
124	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tugu Sari 2023/08.05.06.11.4.00018-ABH639714	Sertipikat
125	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukapura 2010/08050102300026	Sertipikat
126	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukapura	Belum Ada Bukti Kepemilikan
127	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Way Petai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
128	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sinar Luas 2008/08050604300001	Sertipikat
129	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Purajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
130	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pura Wiwitan 2023/08.05.18.02.4.00002-ABH639725	Sertipikat
131	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pura Mekar	Belum Ada Bukti Kepemilikan
132	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Mekar Jaya 2010/08051505300001	Sertipikat
133	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Way Tenong 2023/08.05.07.06.4.00005-ABJ300711	Sertipikat
134	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Karang Agung 215/08.05.07.03.4.00001	Sertipikat
135	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Mutar Alam 2015/08.05.07.04.4.00001	Sertipikat
136	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
137	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tambak Jaya 2000/08.05.01.28.7.00009	Sertipikat
138	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
139	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Fajar Bulan 2010/08050701300012	Sertipikat
140	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukananti 2010/08050706400001	Sertipikat
141	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukananti	Belum Ada Bukti Kepemilikan
142	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukaraja way tenong 2015/0805070400001	Sertipikat
143	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Semarang Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
144	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sidodadi, Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
145	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sri Menanti 2023/08.05.19.06.4.00002-ABH639741	Sertipikat
146	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Sekincau 2003/08050806400001	Sertipikat
147	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tiqajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
148	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Waspada	Belum Ada Bukti Kepemilikan
149	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sekincau 2023/08.05.08.05.4.00012-ABH639729	Sertipikat
150	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Giham Suka Maju 2010/08050223300002	Sertipikat
151	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukajaya 2020/08.05.21.07.4.00001	Sertipikat
152	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sidomulyo 2020/08.05.21.04.4.00001	Sertipikat
153	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Pahayu Jaya 2023/08.05.21.01.4.00006-ABH639713	Sertipikat
154	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Suka Mulya 2020/ 08.05.21.10.4.00001	Sertipikat
155	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Marga Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
156	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kejadian 2010/08050502300002	Sertipikat
157	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Hujung /08.05.05.07.4.00001	Sertipikat
158	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukarame 2020/08.05.05.06.4.00001	Sertipikat
159	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Turgak 2023/08.05.05.04.4.00002-ABH639343	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
160	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Bumi Agung 08.05.05.03.4.00001	Sertipikat
161	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Suka Makmur 2023/08.05.05.14.4.00007-ABH639717	Sertipikat
162	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
163	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Campang Tiga 2020/08.05.20.20.4.00001	Sertipikat
164	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Way Ngison 2020/0805200740000	Sertipikat
165	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kubu Liku Jaya/ 08.05.20.08.4.00001	Sertipikat
166	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Batu Kebayan 2020/08.05.20.02.4.00008	Sertipikat
167	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Batu Brak 1994/08050215400005	Sertipikat
168	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukabumi 2010/08051006400004	Sertipikat
169	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Canggu 2020/08.05.10.07.4.00004	Sertipikat
170	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kegeringan 2021/08.05.10.03.4.00003	Sertipikat
171	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukaraja Batu Brak 2015/08.05.10.09.4.00001	Sertipikat
172	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pekon Balak 2020/08.05.10.05.4.00004	Sertipikat
173	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Kota Besi 2023/08.05.10.08.4.00004-ABH639744	Sertipikat
174	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kubu Perahu 2006/08050402400030	Sertipikat
175	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Wates 2020/08.05.04.08.4.00018	Sertipikat
176	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Gunung Sugih 1995/08.05.03.08.1.00052	Sertipikat
177	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sedampah Indah 2020/08.05.04.12.4.00002	Sertipikat
178	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Liwa 2006/08050402400026	Sertipikat
179	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukarami 2023/08.05.04.10.4.00001-ABH639752	Sertipikat
180	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukarame 1997/08.05.03.15.1.00006	Sertipikat
181	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sebarus 2006/08050405400007	Sertipikat
182	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Way Mengaku 2006/08050403400035	Sertipikat
183	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SKB LAMPUNG BARAT 2020/08.05.04.06.4.00004	Sertipikat
184	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Sukau 2020/08.05.11.03.4.00006	Sertipikat
185	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Bandar Baru 2020/08.05.11.11.4.00002	Sertipikat
186	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Buay Nyerupa 2020/08.05.11.03.4.00005	Sertipikat
187	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tapak Siring 2020/08.05.11.04.4.00008	Sertipikat
188	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Hanakau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
189	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Heni Arong 2023/08.05.23.02.4.00002-ABH639753	Sertipikat
190	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 SB Ujung Rembung 2020/08.05.23.08.4.00002	Sertipikat
191	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tembelang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
192	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Hantatai 2023/08.05.22.05.4.00005-ABH639749	Sertipikat
193	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Bandar Agung 2023/08.05.22.03.4.00003-ABH639751	Sertipikat
194	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tri Mekar Jaya 2023/08.05.22.10.4.00001-ABH639743	Sertipikat
195	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Jadi 2023/08.05.22.01.4.00002-ABJ300651	Sertipikat
196	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Suka Maju	Belum Ada Bukti Kepemilikan
197	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sumber Agung 2010/08050508300002	Sertipikat
198	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Marga 2015/08.05.09.01.4.00001	Sertipikat
199	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tugu Ratu 2020/08.05.09.03.4.00001	Sertipikat
200	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Mulya Sukau 2020/08051110400001	Sertipikat
201	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Tanah Eks SDN 3 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
202	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Bangunan Sekretariat Kwarcab 2006/08050401400025	Sertipikat
203	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Gedung Surian 2004/08050611400001	Sertipikat
204	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukaraja	Belum Ada Bukti Kepemilikan
205	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
206	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Way Suluh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
207	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Peristiwa 2006/08.05.04.01.4.00014	Sertipikat
208	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Negeri Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
209	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bedudu 2023/08.05.05.05.4.00004-ABH639746	Sertipikat
210	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 1 Lombok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
211	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 2 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
212	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Padang Dalam 2020/08050409400004	Sertipikat
213	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Tugu Sari 2020/08050611400013(SDN 5 Simpang Sari)	Sertipikat
214	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Way Petai 2020/08050603400012	Sertipikat
215	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Way Petai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
216	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Fajar Bulan 2010/08050701300014	Sertipikat
217	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Padang Tambak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
218	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Air Hitam 2023/08.05.19.07.4.00002-ABJ300652	Sertipikat
219	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Argomulyo 2015/08052001400001	Sertipikat
220	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Liwa 2007/08050403400037	Sertipikat
221	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Liwa 2006/08050401400023	Sertipikat
222	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Way Mengaku 2021/08050403400044	Sertipikat
223	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Way Umpulau Ulu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
224	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Tenah Eks SDN 4 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
225	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Pahpahan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
226	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 2 Sukau 2020/08051114000001	Sertipikat
227	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
228	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 1 Sukau 2020/08051104400009	Sertipikat
229	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Air Hitam 2023/08.05.19.06.4.00003-ABH639836	Sertipikat
230	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
231	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Sumber Agung / 08050904300006	Sertipikat
232	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Cipta Mulya 2023/08.05.18.08.4.00001-ABH639831	Sertipikat
233	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Sukau 2020/08051110400002	Sertipikat
234	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Sumberjaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
235	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Padang Cahya 2020/08050404400006	Sertipikat
236	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Negeri Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
237	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Sukau 2020/08051105400003	Sertipikat
238	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 2 Lombok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
239	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Way Tenong 2020/08050708400003	Sertipikat
240	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 1 Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
241	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Sekincau 2021/08050808400005	Sertipikat
242	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Bandar Negeri Suoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
243	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Kebun Tebu 2020/08051802400001	Sertipikat
244	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN 2 Pekon Balak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
245	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Sukau 2021/08051111400004	Sertipikat
246	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Way Tenong 2020/08050707400007	Sertipikat
247	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Sumberjaya 2023/08.05.06.11.4.00017-ABH639715	Sertipikat
248	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Suoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
249	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Tuğu Sari	Belum Ada Bukti Kepemilikan
250	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Lombok Seminung 2020/08052307400002	Sertipikat
251	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Belalau 2020/08050501400010	Sertipikat
252	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Bandar Negeri Suoh 2023/08.05.22.01.4.00001-ABH639833	Sertipikat
253	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Muara Baru	Belum Ada Bukti Kepemilikan
254	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Teba Liokh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
255	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SMPN Satu Atap 1 Lombok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
256	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Karang Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
257	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Teba Perinq Raya 2021/08051113400001	Sertipikat
258	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kali Pasir	Belum Ada Bukti Kepemilikan
259	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Basungan 2020/08052102400002	Sertipikat
260	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 4 Liwa 2019/08050409400002	Sertipikat
261	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Negeri 1 Pagar Dewa 2021/08052102400003	Sertipikat
262	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Negeri 1 Gedung Surian 2020/08051503400003	Sertipikat
263	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tapak Siring (Kls Jauh)/Jalan Desa, Desa Tapak Siring, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
264	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukajadi/Jalan Desa, Desa Sukajadi, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
265	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Banding Agung Suoh/Jalan Sukbumi-Sanggi, Desa Banding Agung, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
266	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sidodadi/Pagar Dewa 2020/08.05.21.05.4.00002/Jalan Desa, Desa Sidodadi, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
267	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Batu Ketulis 2023/08.05.20.01.4.00002-ABH639754/Jalan Lintas Srengit-Argomulyo, Desa Argomulyo, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
268	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Buay Nyerupa 2010/08051303300005/Jalan Raya Liwa-Muara Dua, Desa Buay Nyerupa Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
269	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Atar Bawang 1999/08.05.02.36.7.00001/Jalan Lintas Pekon Atar Bawang, Desa Atar Bawang, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
270	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Fajar Agung 2020/08050510400001/Jalan Lintas Barnasi-Fajar Agung, Desa Fajar Agung, Kec. Belalau, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
271	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Negeri Ratu/Jalan Bawang Bakung, Desa Negeri Ratu, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
272	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Bandar Baru/Jalan Sukajadi-Bandar Baru, Desa Bandar Baru, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
273	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tawan Suka Mulya 2020/08.05.23.10.4.00001/Jalan Sepahit Lidah, Desa Tawan Suka Mulya Kec. Lombok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
274	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Banjar 2010/08051106300001/Jalan Keramat Dengi, Desa Suka Banjar, Kec. Lombok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
275	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 BN Suoh 2006/08050907400001/Jalan Raya Pekon Bandar Agung, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
276	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 BN Suoh 2005/08050908400001/Jalan Desa, Desa Bandar Negeri, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
277	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Gunung Ratu/Jalan Wisata Suoh-Gunung Ratu, Desa Gunung Ratu, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
278	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Palang Merah/Jalan Desa, Desa Palang Merah, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
279	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Pagar Dewa 2020/08.05.21.01.4.00003/Jalan Simpang Bungin, Desa Pahayu Jaya, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
280	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Ujung 2020/08052308400001/Jalan Lombok-Heni Harong, Desa Ujung, Kec. Lombok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
281	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Ex SMAN 2 Sumber Jaya/Jalan Raya Tribudi Syukur, Desa Muara Jaya 2, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
282	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Kebun Tebu/Jalan Talang Agusnan, Desa Muara Jaya I, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
283	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SDN 1 Muara Jaya 1 2008/08.05.06.04.3.0001/Jalan Desa, Desa Muara Jaya I, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
284	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Rumah Dinas Guru SDN Sukabumi 2010/08.05.10.06.4.00002/Jalan Way Salang, Desa Sukabumi, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
285	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Perluasan SDN 3 Way Petai 2020/08.05.06.03.4.00012/Jalan Selingkut, Desa Way Petai, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
286	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMPN Satu Atap 1 Pagar Dewa 2020/08.05.21.04.4.00002/Jalan Talang Joyo, Desa Sidomulyo, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
287	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Negeri 2 Sukau/Jalan Mawar Pemasaran, Desa Tanjung Rava, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
288	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Negeri Atar Kuwau/Jalan Lingkungan, Desa Atar Kuwau, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
289	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMP ROWOREJO SUOH	Belum Ada Bukti Kepemilikan
290	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Sumber Jaya 2023/08.05.06.10.4.00011-ABH639707	Sertipikat
291	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Perluasan SMPN 2 Batu Ketulis 2023/08.05.20.01.4.00003-ABH300235	Sertipikat
292	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satap 1 Balik Bukit 2023/08.05.04.12.4.00004-ABJ300653	Sertipikat
293	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.010	Tanah Jembatan	Jembatan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
294	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.010	Tanah Jembatan	Jembatan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
295	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Lembiran Jalan dan Jembatan	Stabilisasi Lereng	Belum Ada Bukti Kepemilikan
296	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.007	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Drainase Kejadian Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
297	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.05.002	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	Sekuting 2010/08.05.04.08.4.00005	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
298	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Mesjid	Sekuting 2007/08.05.04.08.4.00001	Sertipikat
299	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Mesjid	Sekuting	Belum Ada Bukti Kepemilikan
300	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.007	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pembangunan Drainase	Belum Ada Bukti Kepemilikan
301	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMP Sekuting Terpadu 2019/08050408400016	Sertipikat
302	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Jalan	Jalan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
303	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.10.001	Pengadaan Tanah SPAM IKK	Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
304	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukabumi - Kembahang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
305	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Batu Brak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
306	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kota Besi - Sukabumi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
307	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kota Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
308	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Serdang - Serdang 2023/08.05.04.03.4.000047-ABJ300500_08.05.04.03.4.00049-ABJ327566	Sertipikat
309	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Watas - Komplek Korpri	Belum Ada Bukti Kepemilikan
310	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sebarus - Empulau Ulu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
311	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sebarus - Padang Dalam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
312	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Penataran - Sukarame	Belum Ada Bukti Kepemilikan
313	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Gunung Sugih - Sukamarga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
314	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Komplek Perumahan Pemda 2023/08.05.04.03.4.00048-ABJ300953, 08.05.04.02.4.00032-ABJ300976	Sertipikat
315	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Tanah Erfacht 2023/08.05.04.03.4.00046-ABJ300507	Sertipikat
316	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Padang Dalam - Sekuting	Belum Ada Bukti Kepemilikan
317	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukarame - Bahway 2023/08.05.04.10.4.00002-ABJ300527, 08.05.04.11.4.00005-ABJ300526	Sertipikat
318	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Seblat - Sukarame 2023/08.05.04.10.4.00003-ABJ300525	Sertipikat
319	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pekon Balak - Sedampah	Belum Ada Bukti Kepemilikan
320	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Liwa - Hanakau 2023/08.05.04.01.4.00036-ABJ300508, 08.05.11.02.4.00002-ABJ300518	Sertipikat
321	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pemuka Raya - Way Menjadi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
322	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Sukau 2023/08.05.11.11.4.00005-ABJ300528	Sertipikat
323	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Seblat - Sedampah	Belum Ada Bukti Kepemilikan
324	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tambak Jaya 2020/08050709400001	Sertipikat
325	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.10.001	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Bak	Reservoir Air Bersih BNS	Belum Ada Bukti Kepemilikan
326	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Fajar Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
327	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukananti - Sidomakmur 2023/08.05.07.06.4.00006-ABJ307421, 08.05.07.05.4.00003-ABJ307422, 08.05.07.08.4.00008-ABJ327568, 08.05.07.06.4.00007-ABJ307414	Sertipikat
328	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukaraja - Rangau 2023/08.05.0707.4.00010-ABJ300981	Sertipikat
329	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukaraja - Tambak Jaya 2023/08.05.07.07.4.00009-ABJ300954, 08.05.07.08.4.00007-ABJ307419	Sertipikat
330	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Karang Agung - Rangau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
331	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pasar Senen - SMAN 1 Way Tenong 2023/08.05.07.01.4.00023-ABJ300985, 08.05.07.01.4.00021-ABJ307423	Sertipikat
332	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Way Tenong 2023/08.05.07.04.4.00008-ABJ307420	Sertipikat
333	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Cengkaan - Mutar Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
334	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tambak Jaya - Pesantren 2023/ 08.05.07.09.4.00002-ABJ327571	Sertipikat
335	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tanjung Raya - Air Putih	Belum Ada Bukti Kepemilikan
336	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Puralaksana - Rangau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
337	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tanjung Raya - Padang Tambak 2023/08.05.07.05.4.00004-ABJ300982, 08.05.07.06.4.00008-ABJ300945, 08.05.07.07.4.00011-ABJ300973, 08.05.07.08.4.00006-ABJ307435	Sertipikat
338	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Padang Tambak - Air Panas	Belum Ada Bukti Kepemilikan
339	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Padang Tambak - Cempedak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
340	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sidorejo - Air Putih	Belum Ada Bukti Kepemilikan
341	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Pampangan 2023/08.05.08.01.4.00003-ABJ307417	Sertipikat
342	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kebas - Giham 2023/08.05.08.05.4.00015-ABJ300944, 08.05.08.08.4.00012-ABJ300963	Sertipikat
343	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sekincau - Waspada 2023/08.05.08.05.4.00014-ABJ327037, 08.05.08.06.4.00003-ABJ327410	Sertipikat
344	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tiga Jaya - Waspada 2023/08.05.08.07.4.00003-ABJ327402, 08.05.08.06.4.00002-ABJ327409	Sertipikat
345	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sekincau - Talang Sepakat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
346	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Sekincau 2023/08.05.08.05.4.00018-ABJ327567	Sertipikat
347	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Giham Balak - Pampangan 2023/08.05.08.08.4.00013-ABJ300964, 08.05.08.01.4.00004-ABJ300965	Sertipikat
348	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Giham 2023/08.05.08.08.4.00014-ABJ300962	Sertipikat
349	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tambak Jaya - Sekincau 2023/08.05.08.05.4.00016-ABJ300972	Sertipikat
350	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
351	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Luas - Hujung 2023/08.05.20.05.4.00003-ABJ307427, 08.05.05.07.4.00005-ABJ327523	Sertipikat
352	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Kenali 2023/08.05.05.01.4.00014-ABJ307434	Sertipikat
353	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Bumi Agung - Serungkuk	Belum Ada Bukti Kepemilikan
354	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukarame - Bedudu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
355	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kenali - Hujung 2023/08.05.05.01.4.00016-ABJ327407, 08.05.05.08.4.000020-ABJ327404	Sertipikat
356	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Serungkuk - Fajar Agung 2023/08.05.05.08.4.00003-ABJ327405	Sertipikat
357	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Hujung - Suka Makmur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
358	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kenitu - Hujung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
359	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Kembahang - Negeri Ratu 2023/08.05.10.01.4.00008-ABJ300505, 08.05.10.02.4.00001	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
360	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukarame - Pahiton	Belum Ada Bukti Kepemilikan
361	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kegeirangan - Turgak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
362	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Bumbon - Teba Liokh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
363	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Bunguyan - Teba Liokh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
364	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pekon Awi - Kabong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
365	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukabumi - Landos	Belum Ada Bukti Kepemilikan
366	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kegeirangan - Sukabumi 2023/08.05.10.06.4.00009-ABJ300521	Sertipikat
367	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Komplek Korpri	Belum Ada Bukti Kepemilikan
368	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Seranggas	Belum Ada Bukti Kepemilikan
369	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Candik - Bawang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
370	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukamarga - Negeri Ratu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
371	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Penataran - Candik	Belum Ada Bukti Kepemilikan
372	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pasar Liwa - Sebarus 2023/08.05.04.05.4.00023-ABJ327570	Sertipikat
373	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sebarus - Seranggas	Belum Ada Bukti Kepemilikan
374	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sedampah Indah - Talang Delapan 2023/08.05.04.04.4.00007-ABJ300533	Sertipikat
375	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Serbaya - SMPN 1 Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
376	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Bedeng - Atar Nanakan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
377	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sampot - Bedeng	Belum Ada Bukti Kepemilikan
378	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Buay Nyerupa - Jagaraga 2023/08.05.11.03.4.00009-ABJ300510, 08.05.11.12.4.00001-ABJ300511, 08.05.11.04.4.00010-ABJ300509, 08.05.11.13.4.00004-ABJ300530, 08.05.11.05.4.00004-ABH300519	Sertipikat
379	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pagar Dewa - Karet 2023/08.05.11.09.4.00008-ABJ300522	Sertipikat
380	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Bahway - Jeawi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
381	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Bahway - Sarhum	Belum Ada Bukti Kepemilikan
382	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Jagaraga - Lanqkat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
383	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukumulya - Perbatasan Oku Selatan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
384	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pagar Dewa - Jagaraga 2023/08.05.11.09.4.00006-ABJ300532	Sertipikat
385	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kota Sumber Jaya 2023/08.05.06.11.4.00019-ABJ307415	Sertipikat
386	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Bungin - Gunung Terang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
387	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Petai - Ogan Jaya 2023/08.05.06.03.4.00014-ABJ300977	Sertipikat
388	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Bodong - Suka Utama 2023/08.05.06.09.4.00008-ABJ300978	Sertipikat
389	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Mutar Alam - Gunung Terang 2023/08.05.07.04.4.00009-ABJ300947, 08.05.07.01.4.00022-ABJ300966, 08.05.19.02.4.00005-ABJ327546, 08.05.19.03.4.00002-ABJ300984, 08.05.19.07.4.00003-ABJ300948, 08.05.19.04.4.00002-ABJ300968	Sertipikat
390	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sindang Situ - Talang Bandung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
391	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Suka Jaya - Basungan 2023/08.05.06.09.4.00007-ABJ300970, 08.05.06.10.4.00012-ABJ300958	Sertipikat
392	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pura Jaya - Muara Jaya 2023/08.05.18.01.4.00006-ABJ300951, 08.05.18.08.4.00002-ABJ300952, 08.05.18.07.4.00011-ABJ300961, 08.05.18.10.4.00003-ABJ327035, 08.05.18.04.4.00001-ABJ300957	Sertipikat
393	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Purawiwitan - Muarajaya II 2023/08.05.18.02.4.00003-ABJ327572	Sertipikat
394	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tribudisukur - Muarajaya II 2023/08.05.18.03.4.00006-ABJ307426, 08.05.18.06.4.00006-ABJ327573, 08.05.18.05.4.00003-ABJ300971, 08.05.18.05.4.00002-ABJ300980, 08.05.18.05.4.00004-ABJ300950	Sertipikat
395	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pasar Way Petay 2023/08.05.06.03.4.00013-ABJ300975	Sertipikat
396	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Rungau - Pahayu Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
397	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tribudisukur - Muara Jaya 2023/08.05.18.03.4.00005-ABJ307430, 08.05.18.01.4.00007-ABJ327569	Sertipikat
398	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Ciptamulya - Purajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
399	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Purawiwitan - BBI	Belum Ada Bukti Kepemilikan
400	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Dadapan - Talang Panjang 2023/08.05.15.01.4.00001-ABJ307416	Sertipikat
401	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Trimulyo - Talang Panjang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
402	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Gunung - Terang Trimulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
403	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Sekayan - Mekar Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
404	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Gedung Surian Ciptawaras	Belum Ada Bukti Kepemilikan
405	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Puramekar - Mekar Jaya 2 2023/08.05.15.05.4.00002-ABJ327412, 08.05.15.03.4.00006-ABJ307433	Sertipikat
406	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukajadi - Sukadamai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
407	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Gunung Terang - Rigus Jaya 2023/08.05.19.08.4.00001-ABJ300983	Sertipikat
408	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Puramekar - Mekar Jaya 1 2023/08.05.15.03.4.00008-ABJ307418, 08.05.15.05.4.00001-ABJ307429	Sertipikat
409	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Mekar Jaya - Ciptawaras	Belum Ada Bukti Kepemilikan
410	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Gedung Surian - Dadapan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
411	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sidodadi - Mangarai 2023/08.05.19.01.4.00002-ABJ300967, 08.05.19.10.4.00001-ABJ327038	Sertipikat
412	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Puramekar - Air Ringkih 2023/08.05.15.03.4.00008-ABJ300959	Sertipikat
413	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Air Hitam - Sidomakmur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
414	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Semarang Jaya - Sumber Alam 2023/08.05.19.02.4.00004-ABJ300969, 08.05.19.03.4.00001-ABJ300979	Sertipikat
415	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Air Hitam - Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
416	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sumber Alam - Trimulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
417	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Srimenanti - Kembalu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
418	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Kabul - Srimenanti	Belum Ada Bukti Kepemilikan
419	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Giham - Pahayu Jaya 2023/08.05.08.08.4.00011-ABJ300960	Sertipikat
420	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Gelar (Sinar Wangi) - Waspada 2023/08.05.08.06.4.00001-ABJ327403	Sertipikat
421	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sekincau - Tigajaya 2023/08.05.08.05.4.00017-ABJ327522, 08.05.08.07.4.00002-ABJ307424	Sertipikat
422	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pampangan - Serengit	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
423	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pahayu Jaya - Sidodadi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
424	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Serengit (Sidomulyo) - Basungan 2023/08.05.21.05.4.00005-ABJ307431, 08.05.21.02.4.00006-ABJ307432	Sertipikat
425	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pahayu Jaya - Basungan , 2023/08.05.21.01.4.00009-ABJ327545, 08.05.21.09.400002-ABJ307425, 08.05.21.06.4.00002-ABJ327411	Sertipikat
426	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Batu Kebayan - Waypada	Belum Ada Bukti Kepemilikan
427	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Luas - Argomulyo 2023/08.05.20.05.4.00002-ABJ307428, 08.05.20.04.4.00002-ABJ327544, 08.05.20.01.4.00004-ABJ327036	Sertipikat
428	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Ngison - Waspada 2023/08.05.20.07.4.00002-ABJ300956	Sertipikat
429	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Serengit - Argomulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
430	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kubuliku - Pampangan 2023/08.05.20.08.4.00006-ABJ300949	Sertipikat
431	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Ngison - Pahiton 2023/08.05.20.07.4.00003-ABJ300974	Sertipikat
432	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Campang - Campang Tiga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
433	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Argomulyo - Mulyo Tukung 2023/08.05.20.01.4.00005-ABJ327406	Sertipikat
434	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Atar Bawang - Tebalioh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
435	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kenali - Kembang 2023/08.05.05.01.4.00015-ABJ300516, 08.05.05.03.4.00002-ABJ300514, 08.05.05.04.4.00003-ABJ300513, 08.05.10.09.4.00003-ABJ300512, 08.05.10.01.4.00007-ABJ300515	Sertipikat
436	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sekuting - Sukarame	Belum Ada Bukti Kepemilikan
437	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Tebapring - Sedampah 2023/08.05.11.13.4.00002-ABJ300517	Sertipikat
438	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Buay Nyerupa - Bandar Baru	Belum Ada Bukti Kepemilikan
439	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lumbok - Sukabanjar 2023/08.05.23.09.4.00003-ABJ300506, 08.05.23.03.4.00004-ABJ300504	Sertipikat
440	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lumbok - Heni Harong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
441	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Pagar Dewa - Lumbok 2023/08.05.11.09.4.00007-ABJ300537, 08.05.11.05.4.00005-ABJ300535, 08.05.11.13.4.00003-ABJ300534, 08.05.23.06.4.00001-ABJ300502, 08.05.23.07.4.00004-ABJ300536, 08.05.23.01.4.00003-ABJ300501	Sertipikat
442	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukabanjar - Ujung Rembun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
443	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Ling. Wisata Lumbok	Belum Ada Bukti Kepemilikan
444	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Way Heni 2023/08.05.22.06.4.00004-ABJ300955	Sertipikat
445	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Heni - Sukajadi 2023/08.05.22.06.4.0005-ABJ327547, 08.05.22.01.4.00003-ABJ327548	Sertipikat
446	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukajadi - Banding Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
447	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukamarga - Kalibata	Belum Ada Bukti Kepemilikan
448	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukamarga - Tugu Ratu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
449	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Srimulyo - Bandar Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
450	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Banding Agung - Akses SMK Suoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
451	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukajadi - Ringin Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
452	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Way Heni - Sukamarga 2023/08.05.22.06.4.00006-ABJ327549	Sertipikat
453	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.010	Tanah Jembatan Way Ais	Dinas PUPR	Belum Ada Bukti Kepemilikan
454	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pama Blidang	Pekon Sidomakmur Kec. Air Hitam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
455	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sukamenanti	Pekon Srimenanti Kec. Air Hitam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
456	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Seabuy	Pekon Way Empulu Ulu Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
457	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Sebarus	Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
458	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Lampai Tengah	Pekon Way Mengaku Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
459	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulu Ulu Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
460	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Negeri Ratu	Pekon Kembang Kec. Batu Brak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
461	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Lakak/Pulan Petakh	Pekon Kejadian Kec. Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
462	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Bumbon	Pekon Teba Lioh Kec. Batu Brak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
463	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sebarus I	Pekon Bumi Agung Kec. Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
464	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sebarus II	Pekon Bumi Agung Kec. Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
465	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Ringkih II	Pekon Puramekar Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
466	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Ringkih III	Pekon Puramekar Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
467	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Lempaung I	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
468	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Ringkih I	Pekon Puramekar Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
469	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Lingkaran II	Pekon Cipta Waras Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
470	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pakuan II	Pekon Puramekar Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
471	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Cabang III	Pekon Mekar Jaya Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
472	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pakuan	Pekon Puramekar Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
473	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pauh II	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
474	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Lempaung II	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
475	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Durian	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
476	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Tenong PWT	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
477	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pura Jaya II	Pekon Cipta Mulya Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
478	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Muara Jaya I, II	Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
479	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pura Jaya	Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
480	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Cilamaya	Pekon Tri Budisukur Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
481	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sawah Lega	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
482	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Besai II	Pekon Muara Jaya II Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
483	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Anak Besai I	Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
484	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Bumi Asih	Pekon Tri Budisukur Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
485	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Tri Budi Sukur	Pekon Tri Budisukur Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
486	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Purawiwitan	Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
487	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sindang Raja	Pekon Tugu Mulya Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
488	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Gunung Raya	Pekon Muara Baru Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
489	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sebukau I	Pekon Lumbok Timur Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
490	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pepuh I	Pekon Lumbok Timur Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
491	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pama Upang	Pekon Suka Banjar Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
492	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Kelahok	Pekon Kagungan Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
493	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Pepuh II	Pekon Lumbok Timur Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
494	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Tandok	Pekon Lumbok Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
495	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Bangkenol	Pekon Jaga Raga Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
496	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Uluhan Liwa	Pekon Tapak Siring Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
497	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Penyelan	Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
498	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Litak	Pekon Sukamulya Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
499	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Palakia	Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
500	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Kawitan Bandung	Pekon Tapak Siring Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
501	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Uluhan II	Pekon Bumi Jawa Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
502	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Leuwi Monyet	Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
503	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Selingkut	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
504	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Beton	Pekon Tugu Sari Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
505	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Tenam Bandung	Pekon Sukajaya Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
506	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Petai	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
507	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sukajaya I	Pekon Sukajaya Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
508	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Sindang Pagar	Pekon Sindang Pagar, Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
509	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Nangka	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
510	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Jati Wangi	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
511	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Campang Limau	Pekon Sukananti Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
512	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Cempedak	Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
513	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Serut	Pekon Tanjung Raya Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
514	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Padang Tambak	Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
515	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi Way Campang Kanan	Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
516	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Lembiran Jalan dan Jembatan	Stabilisasi Lereng/Jalan Way Rebok, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lamoung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
517	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.04.026	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Tanah Workshop Dinas PU Bahway/Jalan Desa, Desa Bahway, Kec. Balik Bukit, Kab. Lamoung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
518	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.05.003	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	Tanah MAN Internasional (Tanah GOR Ajsaka & Stadion)2010/08.05.04.08.4.00002/Jalan Jend. Sudirman, Desa Watas, Kec. Balik Bukit, Kab. Lamoung Barat	Sertipikat
519	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kumpai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
520	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Cengkaan Kelat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
521	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Bernung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
522	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kubu Perahu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
523	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Sukamenanti	Belum Ada Bukti Kepemilikan
524	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Ketuban	Belum Ada Bukti Kepemilikan
525	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Limau Kunci	Belum Ada Bukti Kepemilikan
526	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Sukaraja	Belum Ada Bukti Kepemilikan
527	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Muul	Belum Ada Bukti Kepemilikan
528	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Bedudu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
529	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Gintungan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
530	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Lingkaran I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
531	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Pauh I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
532	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Dingin	Belum Ada Bukti Kepemilikan
533	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Anak Besay li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
534	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Gunung Raya li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
535	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Pura Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
536	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Warkuk	Belum Ada Bukti Kepemilikan
537	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kawitan Uluhan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
538	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Sepalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
539	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
540	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Tapak Siring	Belum Ada Bukti Kepemilikan
541	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Sukajaya li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
542	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Ogan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
543	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Talang Bandung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
544	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Talang Bandung li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
545	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Seluangan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
546	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Campang Kiri	Belum Ada Bukti Kepemilikan
547	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kabul I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
548	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
549	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Cangkaan I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
550	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kabul Iii	Belum Ada Bukti Kepemilikan
551	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Cangkaan li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
552	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Gadingan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
553	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Air Putih	Belum Ada Bukti Kepemilikan
554	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kabul li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
555	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Campang Kanan Kecil	Belum Ada Bukti Kepemilikan
556	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Sidomulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
557	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Semangka Hantatai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
558	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Semangka	Belum Ada Bukti Kepemilikan
559	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Srimulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
560	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Haru Sekunvir	Belum Ada Bukti Kepemilikan
561	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Gunung Sari	Belum Ada Bukti Kepemilikan
562	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Haru I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
563	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Heni	Belum Ada Bukti Kepemilikan
564	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Maja I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
565	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Hantatai li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
566	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Hantatai I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
567	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kerung I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
568	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kerung li	Belum Ada Bukti Kepemilikan
569	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Petai Cina	Belum Ada Bukti Kepemilikan
570	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Jelatong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
571	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kali Bening	Belum Ada Bukti Kepemilikan
572	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Kejadian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
573	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Bawang Ujung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
574	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Samang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
575	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Sukamarga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
576	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Tulung Sekanda	Belum Ada Bukti Kepemilikan
577	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Sumber Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
578	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Suluh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
579	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Rowo Rejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
580	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Tembelang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
581	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Giham	Belum Ada Bukti Kepemilikan
582	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Pahayu Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
583	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Irigasi	Way Luas	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
584	Dispora	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Rest Area Puncak Sumber Jaya/08.05.01.21.4.00001	Sertipikat
585	Dispora	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Wisata Danau Ranau 2003/08.05.11.07.2.00001	Sertipikat
586	Dispora	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Arung Jeram 2002/08.05.01.20.4.00005	Sertipikat
587	Dispora	1.3.1.01.03.01.014	Tanah Lapangan Cross	Lapangan Cross	Belum Ada Bukti Kepemilikan
588	Dispora	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Untuk Taman Lainnya	Tanah Destinasi Wisata Bukit Bawang Bakung/Jalan Desa, Desa Negeri Ratu, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
589	Dispora	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Untuk Taman Lainnya	Tanah Destinasi Wisata Curup Cengkaan/Jalan Desa, Desa Way Petai, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
590	Dispora	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Untuk Taman Lainnya	Tanah Destinasi Wisata Rest Area/Jalan Raya Liwa, Desa Sindang Pagar, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
591	Dispora	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Wisata Lombok	Belum Ada Bukti Kepemilikan
592	Dispora	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Bangunan Wisma Sindy Lapai 2006/08.05.04.01.4.00026	Sertipikat
593	Dispora	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Pengembangan Wisma Sindy Lapai 2006/08.05.04.01.4.00028	Sertipikat
594	Dispora	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Kawasan Wisata Terpadu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
595	Dispora	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
596	Dispora	1.3.1.01.03.01.014	Tanah Lapangan Cross	Perluasan Motor Cross	Belum Ada Bukti Kepemilikan
597	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Giham 2006/0805080400004	Sertipikat
598	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Inpres Liwa 2005/08050401400021	Sertipikat
599	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas Koperindag	Belum Ada Bukti Kepemilikan
600	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Simpang Sari 2010/08050616300007	Sertipikat
601	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Senin 2008/08050701300012	Sertipikat
602	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Ruko Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
603	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Ruko Pasar Kenali 2006/08050501400010	Sertipikat
604	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Perluasan Pasar Liwa 2006/08050401400027	Sertipikat
605	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Ruko Pasar Liwa 2005/08050401400020	Sertipikat
606	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Sekincau 2004/08050805400008	Sertipikat
607	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kenali	Belum Ada Bukti Kepemilikan
608	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Seblat Tanjung Raya 2006/08051101400001	Sertipikat
609	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
610	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Pura Jaya 2023/08.05.18.01.4.00005-ABH639345	Sertipikat
611	Dinas Koperindag	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Dekranasda 2022/08.05.04.08.01832/08.05.04.08.01832	Sertipikat
612	Dinas Koperindag	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Perluasan Pasar Pagar Dewa/Jalan Raya Liwa-Muara Dua, Desa Pagar Dewa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
613	DKP	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor DKP/Jalan Piere Tendean, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
614	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor BPP Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
615	Dinas TPH	1.3.1.01.02.03.001	Tanah Kebun Entres Giham Balak	Giham Balak Kecamatan Sekincau	Hibah
616	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Gedung Kantor BPP	Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
617	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Gedung Kantor BPP	Sukau/Jalan Pemangku Sidung, Desa Buay Nyerupa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
618	Dinas TPH	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas BPP Balik Bukit/Jalan Piere Tendean, Desa Sebarus, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
619	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Gedung Kantor BPP	Pagar Dewa/Desa Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
620	Disbunak	1.3.1.01.02.03.001	Tanah Kebun Entres Tanjung Raya	Tanjung Raya Kecamatan Sukau	Hibah
621	Disbunak	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Padang Tambak Kecamatan Way Tenong	Hibah
622	Disbunak	1.3.1.01.03.03.024	Tanah Bangunan Industri Lainnya	Giham Lunik Kecamatan Sekincau	Hibah
623	Disbunak	1.3.1.01.02.03.001	Tanah Perkebunan Kopi	Kebun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
624	Disbunak	1.3.1.01.02.03.001	Tanah Perkebunan Kopi	Kebun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
625	Disbunak	1.3.1.01.01.04.012	Tanah Bangunan Kandang/Potong Hewan	Rumah Potong Hewan 2006/08.05.04.03.4.00038	Sertipikat
626	Disbunak	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Lokasi Penanaman Rumput	Belum Ada Bukti Kepemilikan
627	Disbunak	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan Produksi	Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
628	Disbunak	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan Produksi	Produksi Sumberjaya - Sukajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
629	Dinas Perikanan	1.3.1.01.01.04.013	Tanah Bangunan Pembibitan	Balai Benih Ikan (BBI) Sumber Jaya 2004/08.05.06.03.4.00008	Sertipikat
630	Dinas Perikanan	1.3.1.01.01.02.008	Tanah Bangunan Dermaga	Lumbok Seminung/Jalan Tawan-Sukamulya, Desa Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
631	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Tugu Selamat datang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
632	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Kota Hamtebiu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
633	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman PKK	Belum Ada Bukti Kepemilikan
634	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Median Dua Jalur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
635	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Median Dua Jalur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
636	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Tugu Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
637	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Nomenclature Selamat datang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
638	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Nomenclature Taman Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
639	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Lapangan Merdeka	Belum Ada Bukti Kepemilikan
640	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Nomenclature Hamtebiu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
641	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Median Dua Jalur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
642	DLH	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	TPA Bahway 2006/08050411400001	Sertipikat
643	DLH	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	TPA Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
644	DLH	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Perluasan Taman Kota	Belum Ada Bukti Kepemilikan
645	DLH	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	Perluasan TPA Bahway 2022/08.05.04.11.01713	Sertipikat
646	DLH	1.3.1.01.03.03.003	Tanah TPA Kubuliku	Pekon Kubuliku Kec. Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
647	DLH	1.3.1.01.03.03.003	Tanah TPA Kubuliku	Pekon Kubuliku Kec. Batu Ketulis/08.05.20.08.4.0004	Sertipikat
648	DLH	1.3.1.01.03.03.003	Tanah TPA Kubuliku	Pekon Kubuliku Kec. Batu Ketulis/08.05.20.08.4.0005	Sertipikat
649	DLH	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Untuk Taman Tebing	Tanah Eks Alm Irsyad (Talud Hotel Darsono) 2006/08.05.04.01.4.00013/Jalan Raya Liwa, Kel. Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
650	DLH	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	TPA Simpang sari 2006/08050601400011	Sertipikat
651	Dinsos	1.3.1.01.03.12.001	Tanah Kuburan Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
652	Dinsos	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Gedung Loka Bina Karya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
653	Dishub	1.3.1.01.01.02.007	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Liwa 2006/08050401400024	Sertipikat
654	Dishub	1.3.1.01.01.02.007	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Sekincau 2003/08050805400004	Sertipikat
655	Dishub	1.3.1.01.01.04.021	Tanah Bangunan Gedung Pengujian Kelaikan	Gedung Uji Kendaraan Bermotor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
656	Dishub	1.3.1.01.01.02.008	Tanah Bangunan Dermaga	Kantor Perhubungan Lombok 2010/08051107300005/Jalan Wisata Lumbok, Desa Kagungan, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
657	Diskominfo	1.3.1.01.01.04.019	Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler	Pekon Pancur Mas Kec. Lumbok Seminung/Jalan Raya Pecur Mas, Desa Pancur Mas, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lamung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
658	RSUD Alimuddin Umar	1.3.1.01.01.04.003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Rumah Sakit 1996/08050302400017	Sertipikat
659	Kec. Balik Bukit	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan 2006/08.05.04.02.4.00024	Sertipikat
660	Kec. Balik Bukit	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas Camat 2005/08.05.04.02.4.00024	Sertipikat
661	Kec. Balik Bukit	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perluasan Eks Rumah Dinas Camat Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
662	Kec. Belalau	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Belalau 2006/08.05.05.01.4.00008	Sertipikat
663	Kec. Belalau	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas 2006/08.05.05.01.4.00007	Sertipikat
664	Kec. Belalau	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Barak Pegawai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
665	Kec. Belalau	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola 2006/08.05.05.01.4.00011	Sertipikat
666	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Sumber Jaya 2006/08.05.06.15.4.00002	Sertipikat
667	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Lama 2008/08.05.06.11.3.00006	Sertipikat
668	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Perumahan Camat/Rudis Camat 2006/08.05.06.15.4.00001	Sertipikat
669	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Pekarangan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
670	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.01.004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Perumahan Bandes	Belum Ada Bukti Kepemilikan
671	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Manunggal 2008/08.05.06.11.3.00005	Sertipikat
672	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tugusari Kecamatan Sumber Jaya	Hibah
673	Kec. Way Tenong	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Way Tenong 2006/08.05.07.04.4.00003	Sertipikat
674	Kec. Way Tenong	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Mutar Alam dan Terminal 2006/08.05.07.04.4.00002	Sertipikat
675	Kec. Way Tenong	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD Mutar Alam Way Tenong 2006/08.05.07.04.4.00002/Jalan Puting Marge, Desa Mutar Alam, Kec. Way Tenong, Kab. Lamung Barat	Sertipikat
676	Kec. Sekincau	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan Sekincau 2010/08.05.08.01.4.00003	Sertipikat
677	Kec. Sekincau	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas Camat Lama 2010/08050801300007	Sertipikat
678	Kec. Sekincau	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Perumahan Kantor Kecamatan Sekincau 2021/08.05.08.08.4.00006/Jalan Raya Pampangan, Desa Giham Sukamaju, Kec. Sekincau, Kab. Lamung Barat	Sertipikat
679	Kec. Suoh	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
680	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan Batu Brak 2006/08.05.10.05.4.00001	Sertipikat
681	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas 2006/08.05.10.05.4.00002	Sertipikat
682	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Kecamatan/Pekon Balak 2006/08.05.10.05.4.00004	Sertipikat
683	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola SDN Sukabumi 2010/08.05.10.06.4.00003	Sertipikat
684	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola SDN I Kembahang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
685	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Untuk Kehutanan 2006/08.05.10.05.4.00005	Sertipikat
686	Kec. Sukau	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan 2006/08.05.11.03.4.00002	Sertipikat
687	Kec. Sukau	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas 2006/08.05.11.03.4.00003	Sertipikat
688	Kec. Sukau	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola /08.05.05.01.4.00011	Sertipikat
689	Kec. Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2010/08.05.15.02.3.00001	Sertipikat
690	Kec. Gedung Surian	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Rumah Dinas Camat Gedung Surian 2010/08.05.15.02.3.00002/Jalan Desa, Desa Gedung Surian, Kec. Gedung Surian, Kab. Lamung Barat	Sertipikat
691	Kec. Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2023/08.05.18.01.4.00002-ABH639704	Sertipikat
692	Kec. Air Hitam	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2023/08.05.19.02.4.00003-ABH639718	Sertipikat
693	Kec. Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2023/08.05.21.02.4.00005-ABH639748	Sertipikat
694	Kec. Batu Ketulis	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Peninggaman Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
695	Kec. Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
696	Kec. Landar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
697	Kec. Lumbok Seminung	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
698	Kel. Pasar Liwa	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Eks Rumah Dinas Camat Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
699	Kel. Pasar Liwa	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Pasar Liwa 2005/08.05.04.01.4.00015	Sertipikat
700	Kel. Way Mengaku	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Way Mengaku	Belum Ada Bukti Kepemilikan
701	Kel. Sekincau	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Sekincau 2010/08050805400009	Sertipikat
702	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Minggu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
703	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Lokasi Kesenian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
704	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan 2008/08.05.07.01.3.00011	Sertipikat
705	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Kelurahan Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
706	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.02.03.001	Tanah Perkebunan Kopi	Bengkok 2008/08.05.07.01.3.00010	Sertipikat
707	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Fajar Bulan 2008/08.05.07.01.3.00013	Sertipikat
708	Kel. Tugu Sari	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Tugu Sari 2008/08.05.06.11.3.00004	Sertipikat
709	Kel. Tugu Sari	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Kelurahan Tugu Sari 2008/08.05.06.11.3.00003	Sertipikat
710	Kel. Tugu Sari	1.3.1.01.02.01.003	Kolam Air Tawar	Kolam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
711	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Liwa/Jalan Letjend. Soeprato, Desa Sebarus, Kec. Balik Bukit, Kab. Lamung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
712	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sampot	Belum Ada Bukti Kepemilikan
713	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Bahway 2023/08.05.04.11.4.00003-ABH639832	Sertipikat
714	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Penataran 2015/08050409400001	Sertipikat
715	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Padang Cahya 2008/08050404300004	Sertipikat
716	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Way Mengaku 2006/080504034000031	Sertipikat
717	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Way Empulau Ulu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
718	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Gunung Sugih 2010/08050407400001	Sertipikat
719	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Kubu Perahu 2010/080504024000031	Sertipikat
720	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Padang Dalam 2010/08050409400001	Sertipikat
721	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sedampah Indah 2023/08.05.04.12.4.00003-ABH639829	Sertipikat
722	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Tanah Eks Posyandu Pasar Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
723	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Belalau 2006/08050501400009	Sertipikat
724	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Hujung 2021/08050507400004	Sertipikat
725	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Turgak 2021/08050504400001	Sertipikat
726	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Bedudu 2008/08050505300001	Sertipikat
727	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	POSKEDES SUKAMAKMUR 2023/08.05.05.14.4.00006-ABH639723	Sertipikat
728	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Dokter Gigi Puskesmas Kenali 2023/08.05.05.01.4.00013-ABH639728	Sertipikat
729	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Induk Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
730	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
731	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Suka Pura	Belum Ada Bukti Kepemilikan
732	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sindang Pagar 2010/08050614300003	Sertipikat
733	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Simpang Sari	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
734	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Way Petai Kecamatan Sumber Jaya 2020/08050603400011	Sertipikat
735	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukananti 2008/08050705300001	Sertipikat
736	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Induk Way Tenong 2006/08050703400001	Sertipikat
737	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Fajar Bulan/2021/08.05.07.03.4.00006	Sertipikat
738	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
739	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
740	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Karang Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
741	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pura Laksana	Belum Ada Bukti Kepemilikan
742	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tambak Jaya 2008/08050709300001	Sertipikat
743	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sumber Agung Way Tenong 2021/08050703400005	Sertipikat
744	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Padang Tambak 2023/08.05.07.08.4.00004-ABH639703	Sertipikat
745	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	PERUMAHAN PUSKES KARANG AGUNG 2023/08.05.07.03.4.00007-ABH639747	Sertipikat
746	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	PERUMAHAN PUSKES MUTAR ALAM 2023/08.05.07.04.4.00007-ABH639823	Sertipikat
747	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Sekincau 2015/08050805400004	Sertipikat
748	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pampangan 2006/08050801400002	Sertipikat
749	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Waspada 2006/08050806400002	Sertipikat
750	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Tiga Jaya 2020/08050807400001	Sertipikat
751	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Betung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
752	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	PUSTU SEKINCAU 2023/08.05.08.05.4.00013-ABH639716	Sertipikat
753	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Perumahan Puskesmas Suoh 2008/08.05.09.04.3.0005/Jalan Lintas Sanggi Pekon Bandar Agung, Desa Srimulyo, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
754	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Perumahan Puskesmas Suoh 2008/08.05.09.04.3.0004/Jalan Lintas Sanggi Pekon Bandar Agung, Desa Srimulyo, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
755	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sumber Agung Suoh/Jalan Raya Suoh, Desa Sumber Agung, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
756	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Induk Suoh 2006/08050904400001	Sertipikat
757	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Suoh 2006/08050904400002	Sertipikat
758	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Suoh 2006/08050904400003	Sertipikat
759	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tugu Ratu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
760	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Rowo Rejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
761	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Bandung agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
762	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sukamarga / Suoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
763	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sidorejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
764	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Perawat Puskesmas (Sumber Agung)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
765	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Sukabumi 2010/08.05.21.09.4.00001/Jalan Desa, Desa Sukabumi, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
766	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Batu Brak 2006/08051005400003	Sertipikat
767	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tebaliokh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
768	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pekon Balak 2010/08051005300006	Sertipikat
769	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Kembang 2010/08051001300003	Sertipikat
770	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Negeri Ratu 2010/08051002300001	Sertipikat
771	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Suka Raja 2023/08.05.10.09.4.00002-ABH639346	Sertipikat
772	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Kota Besi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
773	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Suka Bumi 2023/08.05.10.06.4.00008-ABH639347	Sertipikat
774	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Buay Nyerupa/Jalan Raya Liwa-Muara Dua, Desa Buay Nyerupa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
775	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sulung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
776	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Sukau/Eks Puskesmas Buay Nyerupa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
777	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
778	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Perluasan Puskesmas Buay Nyerupa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
779	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Perluasan Puskesmas Buay Nyerupa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
780	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Hanakau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
781	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Jaqaraga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
782	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sukamulya 2023/08.05.11.04.4.00003-ABH639766	Sertipikat
783	Puskesmas Gedung Suria	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Trimulyo 2020/08051504400001/Jalan R. Sumadi, Desa Trimulyo, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
784	Puskesmas Gedung Suria	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pura Mekar 2021/08051503400004	Sertipikat
785	Puskesmas Gedung Suria	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Cipta Waras 2021/08051504400002	Sertipikat
786	Puskesmas Gedung Suria	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Bunqin	Belum Ada Bukti Kepemilikan
787	Puskesmas Gedung Suria	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
788	Puskesmas Gedung Suria	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Cipta Waras 2010/08051504300003	Sertipikat
789	Puskesmas Gedung Suria	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Mekar Jaya 2010/08051505300002	Sertipikat
790	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Kebon Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
791	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Purawiwitan 2010/08050605300003	Sertipikat
792	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Muara Jaya I 2010/08050604300002	Sertipikat
793	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Tribudi Sukur 2023/08.05.18.03.4.00004-ABH639711	Sertipikat
794	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Muara Jaya II 2010/08050608300003	Sertipikat
795	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Kebun Tebu 2020/08051801400001	Sertipikat
796	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	PUSTU PURA JAYA KEBUN TEBU 2023/08.05.18.01.4.00004-ABH639709	Sertipikat
797	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan 2023/08.05.18.01.4.00003-ABH639705	Sertipikat
798	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik	Poskesdes Gunung Terang 2010/08.05.07.17.3.0001/Jalan Pasar Baru, Desa Gunung Terang, Kec. Air Hitam, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
799	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
800	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Semarang Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
801	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Air Hitam 2007/08050714100501	Sertipikat
802	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sri Menanti 2010/08050710300001	Sertipikat
803	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Pagar Dewa 2021/08.05.21.09.4.00001/Jalan Desa, Desa Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
804	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukajaya 2008/08050609300006	Sertipikat
805	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Basungan Pagar Dewa 2020/08052102400001	Sertipikat
806	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Mekarsari 2023/08.05.21.03.4.00001-ABH639742	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
807	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pahayu Jaya 2021/08052101400005	Sertipikat
808	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sidodadi 2010/08050810300001	Sertipikat
809	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Pahayu Jaya 2023/08.05.21.01.4.00007-ABH639722	Sertipikat
810	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Pagar Dewa 2023/08.05.21.02.4.00004-ABH639721	Sertipikat
811	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sidodadi Pagar Dewa 2023/08.05.21.05.4.00004-ABH639706	Sertipikat
812	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Batu Api 2020/08052108400001	Sertipikat
813	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	POSKESDES MARGA JAYA 2023/08.05.21.06.4.00001-ABH639727	Sertipikat
814	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Kubu Liku Jaya 2021/08.05.20.08.4.00002/Jalan Raya Liwa, Desa Kubu Liku, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
815	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Luas	Belum Ada Bukti Kepemilikan
816	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Baku 2023/08.05.20.06.4.00007-ABH639344	Sertipikat
817	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Argomulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
818	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Argomulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
819	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Campang 3	Belum Ada Bukti Kepemilikan
820	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Puskesmas Way Ngison	Belum Ada Bukti Kepemilikan
821	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Batu Kebayan 2010/08050510300003	Sertipikat
822	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sumber Rejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
823	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
824	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Perluasan Puskesmas Batu Ketulis 2022/08.05.20.02.01074	Sertipikat
825	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	POSKESDES ATAR KUAW 2023/08.05.20.10.4.00003-ABH639719	Sertipikat
826	Puskesmas Bandar Negeri	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Hantatai/Jalan Raya Suoh, Desa Bumi Hantatai, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
827	Puskesmas Bandar Negeri	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Bandar Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
828	Puskesmas Bandar Negeri	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukajadi 2015/08052201400500	Sertipikat
829	Puskesmas Bandar Negeri	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Bandar Negeri Suoh 2015/0805220400001	Sertipikat
830	Puskesmas Bandar Negeri	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Bumi Hantatai 2015/08052205400001	Sertipikat
831	Puskesmas Bandar Negeri	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Ringin Jaya 2023/08.05.22.04.4.00001-	Sertipikat
832	Puskesmas Lombok Semi	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Lombok 2023/08.05.23.07.4.00003-ABH639750	Sertipikat
833	Puskesmas Lombok Semi	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukabanjar 2006/08051106400001	Sertipikat
834	Puskesmas Lombok Semi	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Heniarong 2023/08.05.23.02.4.00001-ABH 639720	Sertipikat
835	Puskesmas Lombok Semi	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Ujung Rembun 2023/08.05.23.05.4.00004-ABH639745	Sertipikat
836	Puskesmas Lombok Semi	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Pancur Mas 2023/08.05.23.11.4.00003-ABH639740	Sertipikat
837	PPKD	1.3.1.01.01.01.003	Tanah Perumahan Eks PU Pengairan	Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
838	PPKD	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Gedung Kantor Palang Merah Indonesia (P	08.05.04.05.4.00015/Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Sertipikat



LAMPIRAN

23

RINCIAN AT TANAH PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

RINCIAN ASET TETAP TANAH PER PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	153.230.049.420,00	153.737.563.420,00	(507.514.000,00)	(0,33)
2	Sekretariat DPRD	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00
3	Sat Pol PP	93.724.250,00	93.724.250,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan&Kebud	49.103.073.250,00	48.991.742.500,00	111.330.750,00	0,23
5	Dinas Kesehatan	0,00	18.396.000,00	(18.396.000,00)	(100,00)
6	Dinas PUPR	376.674.538.160,00	376.674.538.160,00	0,00	0,00
7	Dinas Porapar	28.961.116.200,00	28.575.102.200,00	386.014.000,00	1,35
8	Dinas Koperindag	5.211.506.000,00	5.211.506.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00	0,00
10	Dinas TPH	2.712.110.000,00	2.712.110.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Bunnak	2.807.097.000,00	2.807.097.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Perikanan)	909.800.000,00	909.800.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	6.111.142.750,00	6.111.142.750,00	0,00	0,00
14	Dinas Sosial	156.760.000,00	156.760.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	1.038.120.000,00	1.038.120.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Kominfo	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
17	RSUD Alimuddin Umar	2.232.000.000,00	2.232.000.000,00	0,00	0,00
18	Kec. Balik Bukit	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00
19	Kec. Belalau	521.974.000,00	521.974.000,00	0,00	0,00
20	Kec. Sumberjaya	850.276.000,00	850.276.000,00	0,00	0,00
21	Kec. Way Tenong	593.760.000,00	593.760.000,00	0,00	0,00
22	Kec. Sekincau	778.400.000,00	778.400.000,00	0,00	0,00
23	Kec. Suoh	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00
24	Kec. Batu Brak	593.160.000,00	593.160.000,00	0,00	0,00
25	Kec. Sukau	357.600.000,00	357.600.000,00	0,00	0,00
26	Kec. Gedung Surian	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	0,00
27	Kec. Kebun Tebu	143.550.000,00	143.550.000,00	0,00	0,00
28	Kec. Air Hitam	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
29	Kec. Pagar Dewa	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
30	Kec. Batu Ketulis	362.583.000,00	362.583.000,00	0,00	0,00
31	Kec. Bandar Negeri Suoh	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	0,00
32	Kec. Lumbok Seminung	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
33	Kel. Pasar Liwa	41.730.000,00	41.730.000,00	0,00	0,00
34	Kel. Way Mengaku	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
35	Kel. Sekincau	944.841.000,00	944.841.000,00	0,00	0,00
36	Kel. Fajar Bulan	1.032.100.000,00	1.032.100.000,00	0,00	0,00
37	Kel. Tuğu Sari	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	0,00
38	Puskesmas Liwa	7.106.750.000,00	7.106.750.000,00	0,00	0,00
39	Puskesmas Kenali	120.936.000,00	102.540.000,00	18.396.000,00	17,94
40	Puskesmas Sumber Jaya	397.590.000,00	397.590.000,00	0,00	0,00
41	Puskesmas Fajar Bulan	542.474.000,00	538.078.000,00	4.396.000,00	0,82
42	Puskesmas Sekincau	150.065.000,00	150.065.000,00	0,00	0,00
43	Puskesmas Srimulyo	785.117.000,00	785.117.000,00	0,00	0,00
44	Puskesmas Batu Brak	159.908.000,00	159.908.000,00	0,00	0,00
45	Puskesmas Buay Nyerupa	215.088.950,00	215.088.950,00	0,00	0,00
46	Puskesmas Gedung Surian	278.145.000,00	278.145.000,00	0,00	0,00
47	Puskesmas Kebun Tebu	811.271.000,00	745.009.000,00	66.262.000,00	8,89
48	Puskesmas Air Hitam	527.430.000,00	527.430.000,00	0,00	0,00
49	Puskesmas Pagar Dewa	142.639.450,00	142.639.450,00	0,00	0,00
50	Puskesmas Batu Ketulis	849.020.000,00	849.020.000,00	0,00	0,00
51	Puskesmas BNS	118.368.250,00	115.078.250,00	3.290.000,00	2,86
52	Puskesmas Lumbok Seminung	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00
53	Pengelola Barang	1.630.000.000,00	2.941.000.000,00	(1.311.000.000,00)	(44,58)
	JUMLAH	652.395.963.680,00	653.643.184.930,00	(1.247.221.250,00)	(0,19)



LAMPIRAN

24

MUTASI KURANG PENGHENTIAN ASET TETAP



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI KURANG PENGHENTIAN ASET TANAH

No	SKPD	KODE BARANG ASET TETAP	KODE BARANG ASET LAINNYA	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	Luas (M2)	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Komplek Perkantoran 1991/08040408400007	1991	1350	121.500.000,00	Penilaian	Hibah Ke Pemerintah Provinsi Lampung
2	PPKD	1.3.1.01.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.001.	Tanah Gedung Kantor Palang Merah Indonesia (PMI)	08.05.04.05.4.00015/Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	2020	1311	1.311.000.000,00	Penilaian II 2022	Hibah Ke Palang Merah Indonesia
JUMLAH								1.432.500.000,00		



LAMPIRAN

25

RINCIAN AT PERALATAN DAN MESIN PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

RINCIAN ASET PERALATAN DAN MESIN PER PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	37.029.987.734,00	36.905.770.925,00	124.216.809,00	0,34
2	Sekretariat DPRD	11.460.384.304,00	11.316.339.067,00	144.045.237,00	1,27
3	Inspektorat	1.068.370.433,33	959.302.433,33	109.068.000,00	11,37
4	BPKD	7.065.378.169,00	6.728.022.969,00	337.355.200,00	5,01
5	Bappeda	2.834.147.225,00	2.834.147.225,00	0,00	0,00
6	Balitbang	796.739.911,00	764.354.911,00	32.385.000,00	4,24
7	BKPSDM	1.389.028.807,00	1.447.268.807,00	(58.240.000,00)	(4,02)
8	BPBD	6.455.712.930,00	5.761.063.630,00	694.649.300,00	12,06
9	Kantor Kesbangpol	730.794.668,00	516.327.168,00	214.467.500,00	41,54
10	Sat Pol PP	10.179.876.239,00	10.148.376.239,00	31.500.000,00	0,31
11	Dinas Dikbud.	126.040.840.973,00	115.918.844.305,00	10.121.996.668,00	8,73
12	Dinas Kesehatan	14.692.350.759,83	14.692.350.759,83	0,00	0,00
13	Dinas PUPR	5.790.089.878,57	5.973.537.378,57	(183.447.500,00)	(3,07)
14	Disdukcapil	3.135.794.128,00	3.049.888.128,00	85.906.000,00	2,82
15	Dinas Porapar	6.885.303.000,00	7.094.353.000,00	(209.050.000,00)	(2,95)
16	Dinas Koperasi,UKM,Perindag	7.602.784.716,00	5.168.402.239,00	2.434.382.477,00	47,10
17	Dinas PP, KB, PP, dan PA	7.135.112.540,00	7.008.032.540,00	127.080.000,00	1,81
18	Dinas Ketahanan Pangan	1.344.954.860,00	1.344.954.860,00	0,00	0,00
19	Dinas TPH	3.621.082.690,00	3.560.342.690,00	60.740.000,00	1,71
20	Dinas Bun & Nak	3.651.768.092,00	3.468.488.092,00	183.280.000,00	5,28
21	Dinas Perikanan	6.085.588.540,00	6.085.588.540,00	0,00	0,00
22	Dinas PMP	959.606.475,00	959.606.475,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	24.283.752.507,00	23.179.582.507,00	1.104.170.000,00	4,76
24	Badan PM, PTSP, & Naker	891.305.500,00	887.705.500,00	3.600.000,00	0,41
25	Dinas Sosial	2.030.299.256,00	2.037.546.256,00	(7.247.000,00)	(0,36)
26	Dinas Perhubungan	12.797.754.311,00	12.641.154.311,00	156.600.000,00	1,24
27	Dinas Kominfo	5.522.543.512,00	5.437.847.362,00	84.696.150,00	1,56
28	Dinas Perpustakaan&Arsip	3.585.513.325,00	3.540.741.325,00	44.772.000,00	1,26
29	RSUD Alimuddin Umar	84.371.064.499,77	82.975.651.010,77	1.395.413.489,00	1,68
30	Kec. Balik Bukit	214.420.103,67	214.420.103,67	0,00	0,00
31	Kec. Belalau	252.628.100,00	233.428.100,00	19.200.000,00	8,23
32	Kec. Sumberjaya	285.751.650,00	285.751.650,00	0,00	0,00
33	Kec. Way Tenong	258.009.283,00	258.009.283,00	0,00	0,00
34	Kec. Sekincau	245.963.637,00	237.463.637,00	8.500.000,00	3,58
35	Kec. Suoh	346.222.800,00	346.222.800,00	0,00	0,00
36	Kec. Batu Brak	196.616.700,00	189.616.700,00	7.000.000,00	3,69
37	Kec. Sukau	290.133.094,00	248.395.094,00	41.738.000,00	16,80
38	Kec. Gedung Surian	185.042.637,00	162.542.637,00	22.500.000,00	13,84
39	Kec. Kebun Tebu	376.770.375,00	337.683.375,00	39.087.000,00	11,58
40	Kec. Air Hitam	385.324.775,00	352.924.775,00	32.400.000,00	9,18
41	Kec. Pagar Dewa	370.974.775,00	360.974.775,00	10.000.000,00	2,77
42	Kec. Batu Ketulis	319.055.375,00	301.055.375,00	18.000.000,00	5,98
43	Kec. Bandar Negeri Suoh	435.617.475,00	417.617.475,00	18.000.000,00	4,31
44	Kec. Lombok Seminung	397.015.775,00	406.400.775,00	(9.385.000,00)	(2,31)
45	Kel. Pasar Liwa	188.097.963,00	178.097.963,00	10.000.000,00	5,61
46	Kel. Way Mengaku	80.491.500,00	95.367.500,00	(14.876.000,00)	(15,60)
47	Kel. Sekincau	281.252.000,00	262.102.000,00	19.150.000,00	7,31
48	Kel. Fajar Bulan	125.487.900,00	125.487.900,00	0,00	0,00
49	Kel. Tugu Sari	182.061.000,00	172.061.000,00	10.000.000,00	5,81
50	Puskesmas Liwa	4.410.168.672,00	4.347.315.973,00	62.852.699,00	1,45
51	Puskesmas Kenali	4.390.404.796,00	4.321.990.670,00	68.414.126,00	1,58
52	Puskesmas Sumber Jaya	4.696.712.093,00	4.612.826.593,00	83.885.500,00	1,82
53	Puskesmas Fajar Bulan	6.849.378.324,30	6.719.504.324,30	129.874.000,00	1,93
54	Puskesmas Sekincau	6.378.530.045,00	6.307.975.045,00	70.555.000,00	1,12
55	Puskesmas Srimulyo	5.844.193.315,00	5.785.385.815,00	58.807.500,00	1,02
56	Puskesmas Batu Brak	3.572.772.497,00	3.491.746.497,00	81.026.000,00	2,32
57	Puskesmas Buay Nyerupa	6.248.605.377,30	6.138.822.377,30	109.783.000,00	1,79
58	Puskesmas Gedung Surian	3.590.785.048,00	3.521.961.048,00	68.824.000,00	1,95
59	Puskesmas Kebun Tebu	3.563.871.952,00	3.463.391.952,00	100.480.000,00	2,90
60	Puskesmas Air Hitam	3.720.199.505,00	3.681.323.505,00	38.876.000,00	1,06
61	Puskesmas Pagar Dewa	6.523.792.671,30	6.467.091.221,30	56.701.450,00	0,88
62	Puskesmas Batu Ketulis	4.657.028.294,00	4.622.336.012,00	34.692.282,00	0,75
63	Puskesmas BNS	5.726.707.808,62	5.702.477.808,62	24.230.000,00	0,42
64	Puskesmas Lombok Seminung	3.133.823.239,00	3.116.823.239,00	17.000.000,00	0,55
	JUMLAH	478.161.840.538,69	459.892.185.651,69	18.269.654.887,00	3,97



LAMPIRAN

26

MUTASI PERALATAN DAN MESIN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI ASET PERALATAN DAN MESIN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JLH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
1	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.2.07.01.01.007.	Lampu Sorot/Tindakan	Puskesmas Liwa	2023	1	1.853.000,00	APBD
2	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.07.01.01.007.	Lampu Sorot/Tindakan	Puskesmas Air Hitam	2023	1	1.853.000,00	APBD
3	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Brak	1.3.2.07.01.01.007.	Lampu Sorot/Tindakan	Puskesmas Batu Brak	2023	1	1.853.000,00	APBD
4	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.07.01.01.007.	Lampu Sorot/Tindakan	Puskesmas Pagar Dewa	2023	1	1.853.000,00	APBD
5	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.2.07.01.01.007.	Lampu Sorot/Tindakan	Puskesmas Kenali	2023	1	1.853.000,00	APBD
6	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.07.01.01.007.	Lampu Sorot/Tindakan	Puskesmas Batu Ketulis	2023	1	1.853.000,00	APBD
7	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.2.07.01.05.039.	Tampon Tang Bengkok	Puskesmas Liwa	2023	1	636.000,00	APBD
8	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.07.01.05.039.	Tampon Tang Bengkok	Puskesmas Air Hitam	2023	1	636.000,00	APBD
9	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Brak	1.3.2.07.01.05.039.	Tampon Tang Bengkok	Puskesmas Batu Brak	2023	1	636.000,00	APBD
10	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.07.01.05.039.	Tampon Tang Bengkok	Puskesmas Pagar Dewa	2023	1	636.000,00	APBD
11	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.2.07.01.05.039.	Tampon Tang Bengkok	Puskesmas Kenali	2023	1	636.000,00	APBD
12	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.07.01.05.039.	Tampon Tang Bengkok	Puskesmas Batu Ketulis	2023	1	636.000,00	APBD
13	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.2.07.01.01.087.	Tempat Tampon	Puskesmas Liwa	2023	1	1.137.000,00	APBD
14	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.07.01.01.087.	Tempat Tampon	Puskesmas Air Hitam	2023	1	1.137.000,00	APBD
15	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Brak	1.3.2.07.01.01.087.	Tempat Tampon	Puskesmas Batu Brak	2023	1	1.137.000,00	APBD
16	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.07.01.01.087.	Tempat Tampon	Puskesmas Pagar Dewa	2023	1	1.137.000,00	APBD
17	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.2.07.01.01.087.	Tempat Tampon	Puskesmas Kenali	2023	1	1.137.000,00	APBD
18	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.07.01.01.087.	Tempat Tampon	Puskesmas Batu Ketulis	2023	1	1.137.000,00	APBD
19	Sekretariat Daerah	BPKD	1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus	Toyota/KF 70 Standar /BE 1047 MZ	2003	1	82.500.000,00	Penilaian
20	Sekretariat Daerah	Badan Kesbangpol	1.3.2.02.01.02.003.	Minibus	Toyota/Rush 1.5 G/BE 1033 MZ	2012	1	182.082.500,00	APBD
21	Sekretariat Daerah	Badan Kesbangpol	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki/KLX 150 G/BE 6309 MZ	2016	1	32.385.000,00	APBD
22	BKPSDM	Dinas TPH	1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus	Daihatsu/Taruna/BE 1738 MZ	2001	1	58.240.000,00	Penilaian
23	Kec. Lumbok Seminung	Balitbang	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kawasaki/KLX 150 G/BE 6313 MZ	2016	1	32.385.000,00	APBD
24	Dinsos	PPKD	1.3.2.02.03.02.002.	Perahu Dolphin	Dolpin/ -	2002	1	5.700.000,00	Penilaian
25	Dinsos	PPKD	1.3.2.02.03.03.004.	Mesin Perahu 25 PK	BLK	2002	1	17.500.000,00	Penilaian
26	Dinsos	PPKD	1.3.2.02.03.03.004.	Mesin Perahu 25 PK	BLK	2002	1	17.500.000,00	Penilaian
27	Sekretariat Daerah	Dinas PUPR	1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus	Daihatsu/F520RV/BE 2153 MZ	2001	1	66.560.000,00	Penilaian
28	Sekretariat Daerah	Disbunak	1.3.2.02.01.02.003.	Mobil Minibus	Toyota/kijang/BE 1726 MZ	2001	1	82.500.000,00	Penilaian
29	Sekretariat Daerah	Dinas PP, KB, PP & PA	1.3.2.02.01.02.003.	MiniBus	Nissan/Terrano Spirit/BE 1051 MZ	2005	1	159.200.000,00	Penilaian
30	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.04.004.	ac split	Asrama Mahasiswa	2016	1	4.000.000,00	APBD
31	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.01.04.002.	Belanja modal pengadaan almari	Kantor Perwakilan	2016	1	2.500.000,00	APBD
32	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.01.04.002.	Almari pakaian	Asrama Mahasiswa	2016	17	62.450.000,00	APBD
33	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.01.05.005.	White Board	Asrama Mahasiswa	2016	1	700.000,00	APBD
34	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.06.059.	Gorden	Asrama Mahasiswa	2016	86	169.820.000,00	APBD
35	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.010.	tempat tidur tingkat	Asrama Mahasiswa	2016	24	88.960.000,00	APBD
36	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.010.	tempat tidur standar (single)	Asrama Mahasiswa	2016	9	28.460.000,00	APBD
37	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.025.	Kasur	Asrama Mahasiswa	2016	48	56.910.000,00	APBD
38	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.048.	Belanja modal pengadaan sofa	Asrama Mahasiswa	2016	1	5.750.000,00	APBD
39	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.004.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	Asrama Mahasiswa	2016	2	6.000.000,00	APBD
40	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.05.009.	Belanja modal pengadaan tabung gas	Asrama Mahasiswa	2016	3	2.850.000,00	APBD
41	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.05.002.	Belanja modal pengadaan kompor gas	Asrama Mahasiswa	2016	3	1.950.000,00	APBD
42	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.05.015.	Belanja modal pengadaan rak piring	Asrama Mahasiswa	2016	3	1.500.000,00	APBD
43	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.06.070.	Belanja modal pengadaan jemuran	Asrama Mahasiswa	2016	1	5.000.000,00	APBD
44	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.028.	Meja Makan (2 Kursi)	Asrama Mahasiswa	2016	2	5.370.000,00	APBD
45	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.028.	Meja Makan (4 Kursi)	Asrama Mahasiswa	2016	2	14.012.000,00	APBD
46	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.01.05.003.	Plang Nama	Kantor Perwakilan Lampung Barat	2018	1	4.000.000,00	APBD

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JLH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
47	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.01.05.002.	CCTV SPC	Asrama Bandar Lampung	2020	1	10.000.000,00	APBD
48	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.06.077.	Sprei laken no.1	Kantor Perwakilan	2021	16	12.000.000,00	APBD
49	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.06.070.	Jemuran Baju	Kantor Perwakilan	2022	5	12.500.000,00	APBD
50	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.07.001.	Tabung Pemadam	Asrama Putri	2022	6	4.800.000,00	APBD
51	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.06.038.	Dispenser	Kantor Perwakilan	2022	1	3.000.000,00	APBD
52	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.2.10.02.03.003.	Printer Epson L 3110	Asrama Bandar Lampung	2020	1	3.000.000,00	APBD
53	PPKD	BPKD	1.3.2.02.03.02.002.	Perahu Dolphin	Dolpin/ -	2002	1	5.700.000,00	Penilaian
54	PPKD	BPKD	1.3.2.02.03.03.004.	Mesin Perahu 25 PK	BLK	2002	1	17.500.000,00	Penilaian
55	PPKD	BPKD	1.3.2.02.03.03.004.	Mesin Perahu 25 PK	BLK	2002	1	17.500.000,00	Penilaian
JUMLAH								1.304.540.500,00	



LAMPIRAN

27

RINCIAN AT GEDUNG DAN BANGUNAN PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	41.010.121.398,82	36.967.228.696,00	4.042.892.702,82	10,94
2	Sekretariat DPRD	5.955.609.030,02	5.905.764.637,02	49.844.393,00	0,84
3	Inspektorat	260.058.000,00	260.058.000,00	0,00	0,00
4	BPKD	2.678.414.959,00	2.678.414.959,00	0,00	0,00
5	Bappeda	954.502.000,00	954.502.000,00	0,00	0,00
6	Balitbang	125.100.000,00	125.100.000,00	0,00	0,00
7	BKPSDM	356.669.551,00	356.669.551,00	0,00	0,00
8	BPBD	1.687.746.437,00	1.687.746.437,00	0,00	0,00
9	Kantor Kesbangpol	159.668.000,00	159.668.000,00	0,00	0,00
10	Sat Pol PP	1.154.161.000,00	1.154.161.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Dikbud.	449.518.086.360,16	436.755.762.261,16	12.762.324.099,00	2,92
12	Dinas Kesehatan	4.354.317.606,95	4.354.317.606,95	0,00	0,00
13	Dinas PUPR	109.568.785.745,00	109.481.650.745,00	87.135.000,00	0,08
14	Disdukcapil	1.388.964.000,00	1.388.964.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Porapar	30.648.572.039,00	33.478.932.741,82	(2.830.360.702,82)	(8,45)
16	Dinas Koperasi.UKM.Perindag	38.421.805.207,00	31.483.446.465,00	6.938.358.742,00	22,04
17	Dinas PP, KB, PP, &PA	6.479.054.929,00	6.479.054.929,00	0,00	0,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	1.350.624.156,00	1.350.624.156,00	0,00	0,00
19	Dinas TPH	7.834.137.364,00	7.834.137.364,00	0,00	0,00
20	Dinas Bun & Nak	7.543.873.000,00	7.543.873.000,00	0,00	0,00
21	Dinas Perikanan	9.441.017.392,80	9.441.017.392,80	0,00	0,00
22	Dinas PMP	384.554.350,00	384.554.350,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	28.257.029.343,72	23.002.315.413,72	5.254.713.930,00	22,84
24	Dinas PM, PTSP,&Naker	216.280.432,00	216.280.432,00	0,00	0,00
25	Dinas Sosial	762.495.589,00	737.961.589,00	24.534.000,00	3,32
26	Dinas Perhubungan	6.223.054.800,00	6.223.054.800,00	0,00	0,00
27	Dinas Kominfo	378.553.150,00	378.553.150,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	1.873.144.700,00	1.873.144.700,00	0,00	0,00
29	RSUD Alimuddin Umar	23.627.121.436,00	23.131.220.436,00	495.901.000,00	2,14
30	Kec. Balik Bukit	316.700.000,00	316.700.000,00	0,00	0,00
31	Kec. Belalau	827.673.000,00	827.673.000,00	0,00	0,00
32	Kec. Sumberjaya	4.798.002.000,00	4.598.499.000,00	199.503.000,00	4,34
33	Kec. Way Tenong	583.973.000,00	583.973.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Sekincau	1.334.773.000,00	1.334.773.000,00	0,00	0,00
35	Kec. Suoh	1.300.300.000,00	1.300.300.000,00	0,00	0,00
36	Kec. Batu Brak	674.451.000,00	674.451.000,00	0,00	0,00
37	Kec. Sukau	518.943.000,00	219.600.000,00	299.343.000,00	136,31
38	Kec. Gedung Surian	858.067.000,00	858.067.000,00	0,00	0,00
39	Kec. Kebun Tebu	1.221.697.000,00	1.221.697.000,00	0,00	0,00
40	Kec. Air Hitam	1.222.166.000,00	1.222.166.000,00	0,00	0,00
41	Kec. Pagar Dewa	1.212.485.500,00	1.212.485.500,00	0,00	0,00
42	Kec. Batu Ketulis	1.221.353.750,00	1.221.353.750,00	0,00	0,00
43	Kec. BNS	1.223.194.500,00	1.223.194.500,00	0,00	0,00
44	Kec. Lumbok Seminung	1.373.156.750,00	1.373.156.750,00	0,00	0,00
45	Kel. Pasar Liwa	1.664.210.700,00	1.559.210.700,00	105.000.000,00	6,73
46	Kel. Way Mengaku	420.635.000,00	420.635.000,00	0,00	0,00
47	Kel. Sekincau	500.331.000,00	500.331.000,00	0,00	0,00
48	Kel. Fajar Bulan	513.644.532,69	513.644.532,69	0,00	0,00
49	Kel. Tugu Sari	942.873.950,00	942.873.950,00	0,00	0,00
50	Puskesmas Liwa	9.056.122.041,84	8.876.226.541,84	179.895.500,00	2,03
51	Puskesmas Kenali	8.012.012.101,54	7.826.967.101,54	185.045.000,00	2,36
52	Puskesmas Sumber Jaya	9.970.656.112,53	9.970.656.112,53	0,00	0,00
53	Puskesmas Fajar Bulan	7.444.524.430,07	7.444.524.430,07	0,00	0,00
54	Puskesmas Sekincau	5.611.433.682,66	5.207.716.682,66	403.717.000,00	7,75
55	Puskesmas Srimulyo	9.122.256.693,00	9.122.256.693,00	0,00	0,00
56	Puskesmas Batu Brak	9.149.104.953,62	8.987.013.453,62	162.091.500,00	1,80
57	Puskesmas Buay Nyerupa	7.206.832.083,24	7.206.832.083,24	0,00	0,00
58	Puskesmas Gedung Surian	7.404.173.344,00	7.404.173.344,00	0,00	0,00
59	Puskesmas Kebun Tebu	8.054.901.513,00	8.054.901.513,00	0,00	0,00
60	Puskesmas Air Hitam	8.250.982.213,00	8.250.982.213,00	0,00	0,00
61	Puskesmas Pagar Dewa	10.813.390.632,12	10.813.390.632,12	0,00	0,00
62	Puskesmas Batu Ketulis	10.901.696.333,56	10.847.939.033,56	53.757.300,00	0,50
63	Puskesmas BNS	9.508.694.998,00	9.342.308.998,00	166.386.000,00	1,78
64	Puskesmas Lumbok Seminung	8.220.062.000,00	8.049.390.500,00	170.671.500,00	2,12
65	Pengelola Barang	300.590.000,00	300.590.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	934.369.585.791,34	905.618.832.827,34	28.750.752.964,00	3,17



LAMPIRAN

28

REKLAS BM GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET PERALATAN DAN MESIN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET PERALATAN DAN MESIN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Sekretariat DPRD	1.3.2.05.02.01.006.	Kursi Tunggu	Mushola	15 December 2023	2023	2	4.316.650,00	8.633.300,00
2	Sekretariat DPRD	1.3.2.05.02.06.064.	Alat Pengering Tangan	Mushola	15 December 2023	2023	1	2.661.937,00	2.661.937,00
3	BPBD	1.3.2.06.03.20.001.	Menara Komunikasi	Kantor BPBD	19 December 2023	2023	1	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Dispora	1.3.2.05.02.06.077.	Lampu Taman	Kebun Raya Liwa	04 July 2023	2023	24	7.490.375,00	179.769.000,00
5	Dispora	1.3.2.18.01.02.001.	Rambu-rambu petunjuk arah ODTW	Kebun Raya Liwa	04 July 2023	2023	10	4.987.600,00	49.876.000,00
6	Disbunak	1.3.2.05.01.05.070.	Portal	Sekolah Kopi	20 June 2023	2023	2	10.000.000,00	20.000.000,00
7	Dinsos	1.3.2.05.01.05.003.	Plang Spanduk TMP	Jln. Lingkar Dua Kubu Perahu	23 May 2023	2023	1	11.753.000,00	11.753.000,00
JUMLAH									372.693.237,00



LAMPIRAN

29

REKLAS BM GEDUNG DAN BANGUNAN KE JIJ



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI KURANG REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Sekretariat DPRD	1.3.4.02.06.05.008.	Tower Air	Mushola	15 December 2023	2023	1	13.099.059,00	13.099.059,00
2	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	Jamban	SDN NEGERI JAYA	17 October 2023	2023	1	152.581.600,00	152.581.600,00
3	Dinas PUPR	1.3.4.02.04.05.007.	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Penahan Tebing Gedung Panca	27 September 2023	2023	1	199.503.000,00	199.503.000,00
4	Dispora	1.3.4.02.06.05.007.	Toilet	Kebun Raya Liwa	06 September 2023	2023	1	329.822.000,00	329.822.000,00
JUMLAH									695.005.659,00



LAMPIRAN

30

REKLAS BM GEDUNG DAN BANGUNAN KE KDP



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI KURANG REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	RSUD Alimuddin Umar	1.3.6.01.01.01.003.	Pembangunan Mushola Tahap 2	RSUD Alimuddin Umar	06 December 2023	Semester II	2023	1	205.940.000,00	205.940.000,00
JUMLAH										205.940.000,00



LAMPIRAN

31

REKLAS BM GEDUNG DAN BANGUNAN KE EXTRACOMPTABLE



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI KURANG REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET EXTRA COMPTABLE

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Sekretariat DPRD	Ekstrakomptable	Tempat Tisu	Mushola	Semester II	2023	1	194.250,00	194.250,00
2	Dinas Perikanan	Ekstrakomptable	Rehab Gedung	UPT BBI	Semester II	2023	1	6.085.000,00	6.085.000,00
3	Dinas Perikanan	Ekstrakomptable	Rehab Gedung	UPT Kawasan Perairan Umum Lumbok	Semester II	2023	1	6.114.000,00	6.114.000,00
4	Dinas Perikanan	Ekstrakomptable	Rehab Gedung	Kantor Dinas Perikanan	Semester II	2023	1	6.641.000,00	6.641.000,00
5	Dinsos	Ekstrakomptable	Gapura TMP	Jln. Lingkar Dua Kubu Perahu	Semester I	2023	1	3.736.000,00	3.736.000,00
6	Dinsos	Ekstrakomptable	Rehab Tangga TMP	Jln. Lingkar Dua Kubu Perahu	Semester I	2023	1	5.877.000,00	5.877.000,00
JUMLAH									28.647.250,00



LAMPIRAN

32

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI BM KE ASET GEDUNG DAN BANGUNAN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN KE ASET GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Dinas Koperindag	1.3.3.01.01.01.001.	Backdrop	Gedung Promosi Sentra IKM	Semester II	2023	6	7.104.000,00	42.624.000,00
2	Dinas Koperindag	1.3.3.01.01.01.001.	Backdrop Lobby	Gedung PLUT	Semester II	2023	1	610.500,00	610.500,00
3	Dinas Koperindag	1.3.3.01.01.01.001.	Frame Pembatas Coworking Space	Gedung PLUT	Semester II	2023	1	5.938.500,00	5.938.500,00
JUMLAH									49.173.000,00

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA KE ASET GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Dinas Koperindag	1.3.3.01.01.01.001.	Backdrop Lobby PLUT	Gedung PLUT	Semester II	2023	1	19.702.500,00	19.702.500,00
2	Dinas Koperindag	1.3.3.01.01.01.001.	Backdrop UMKM Naik Kelas & Logo Lambar	Gedung Promosi Sentra IKM	Semester II	2023	1	18.925.500,00	18.925.500,00
JUMLAH									38.628.000,00

Total**87.801.000,00**



LAMPIRAN

33

MUTASI TAMBAH ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DARI MUTASI SKPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI TAMBAH ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DARI MUTASI SKPD

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
1	Sekretariat Daerah	Dispora	1.3.3.01.01.11.004.	Lapangan Tennis Guest House	Perumahan Dinas Taman Indah	2002	1	24.347.714,00	Penilaian
2	Sekretariat Daerah	Dispora	1.3.3.01.01.11.004.	Lapangan Tennis, Volly, Basket	Komplek Pemda Way Mengaku	2002	1	199.073.826,00	Penilaian
3	Sekretariat Daerah	Dispora	1.3.3.01.01.13.010.	Bangunan Gazebo Lapangan Tennis	Komplek Pemda Way Mengaku	2002	1	6.500.000,00	Penilaian
4	Sekretariat Daerah	Dispora	1.3.3.01.01.11.004.	Bangunan Gedung Lapangan Tennis	Komplek Pemda Way Mengaku	2002	1	89.700.000,00	Penilaian
5	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Puskesmas Kenali	2023	1	185.045.000,00	APBD
6	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lombok Seminung	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Puskesmas Lombok	2023	1	170.671.500,00	APBD
7	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Puskesmas Liwa	2023	1	179.895.500,00	APBD
8	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Brak	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Puskesmas Batu Brak	2023	1	162.091.500,00	APBD
9	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Puskesmas Batu Ketulis	2023	1	53.757.300,00	APBD
10	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Puskesmas Sekincau	2023	1	212.089.000,00	APBD
11	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Pustu Betung	2023	1	191.628.000,00	APBD
12	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.3.01.01.06.010.	Rehab Gedung Puskesmas	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	2023	1	166.386.000,00	APBD
13	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.01.36.001.	Nomenklatur Taman Asrama Mahasiswa	Dispora	2017	1	24.950.000,00	APBD
14	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.02.05.001.	Asrama Mahasiswa	Bandar Lampung	2015	1	3.957.414.242,82	APBD
15	Dispora	Sekretariat Daerah	1.3.3.04.01.04.001.	Pagar Asrama Mahasiswa	Dispora	2017	1	50.000.000,00	APBD
16	PPKD	DLH	1.3.3.01.01.33.001.	Tempat Parkir Motor & Mobil	Kebun Raya Liwa	2019	1	1.160.744.475,00	Hibah
17	PPKD	DLH	1.3.3.01.01.13.001.	Gerbang Entrance	Kebun Raya Liwa	2019	1	160.095.776,00	Hibah
18	PPKD	DLH	1.3.3.01.01.32.005.	Tribun	Kebun Raya Liwa	2019	1	1.132.085.632,00	Hibah
19	PPKD	DLH	1.3.3.01.01.32.002.	Area Bermain Anak	Kebun Raya Liwa	2019	1	1.432.836.516,00	Hibah
20	PPKD	DLH	1.3.3.01.01.32.002.	Area Playground	Kebun Raya Liwa	2019	1	872.150.559,00	Hibah
21	PPKD	DLH	1.3.3.01.01.12.001.	Plaza Utama	Kebun Raya Liwa	2019	1	496.800.972,00	Hibah
22	PPKD	Dinas Pendidikan	1.3.3.01.01.10.001.	Bangunan Pendidikan	SMP Satap 2 Balik Bukit	2021	1	2.132.509.000,00	Hibah
23	PPKD	Dinas Pendidikan	1.3.3.01.01.10.001.	Bangunan Pendidikan	SDN 3 Fajar Bulan	2021	1	2.124.437.000,00	Hibah
24	Dinas PUPR	Kec. Sumber Jaya	1.3.3.01.01.33.002.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Parkiran GSG Sumber jaya	2023	1	199.503.000,00	APBD
25	Dinas PUPR	Kec. Sukau	1.3.3.01.01.01.001.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rehabilitasi Kantor Camat Sukau	2023	1	299.343.000,00	APBD
26	Dinas PUPR	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.02.01.001.	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris D	2023	1	295.074.000,00	APBD
27	Dinas PUPR	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.01.01.001.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rehabilitasi Kantor Bupati Lampung Ba	2023	1	139.076.000,00	APBD
JUMLAH								16.118.205.512,82	



LAMPIRAN

34

RINCIAN AT JALAN, IRIGASI,
DAN JARINGAN PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	18.007.109.253,67	17.996.779.753,67	10.329.500,00	0,06
2	Sekretariat DPRD	172.128.059,00	159.029.000,00	13.099.059,00	8,24
3	Inspektorat	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00
4	BPKD	87.649.750,00	87.649.750,00	0,00	0,00
5	Bappeda	22.569.000,00	22.569.000,00	0,00	0,00
6	Balitbang	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	0,00
7	BKPSDM	3.446.000,00	3.446.000,00	0,00	0,00
8	BPBD	7.982.522.920,00	7.907.994.000,00	74.528.920,00	0,94
9	Kantor Kesbangpol	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00	0,00
10	Sat Pol PP	821.662.350,00	821.662.350,00	0,00	0,00
11	Dinas Pendidikan & Bdyan	22.383.131.418,00	22.203.499.818,00	179.631.600,00	0,81
12	Dinas Kesehatan	226.231.000,00	226.231.000,00	0,00	0,00
13	Dinas PUPR	1.891.210.998.298,77	1.834.367.821.059,77	56.843.177.239,00	3,10
14	Disdukcapil	17.414.000,00	17.414.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Porapar	2.390.635.082,00	1.315.918.019,00	1.074.717.063,00	81,67
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	1.347.117.607,00	1.347.117.607,00	0,00	0,00
17	Dinas PP, KB, PP, dan PA	8.999.000,00	8.999.000,00	0,00	0,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	3.587.000,00	3.587.000,00	0,00	0,00
19	Dinas TPH	46.612.878.933,00	36.148.940.013,00	10.463.938.920,00	28,95
20	Dinas Bun & Nak	3.384.827.297,63	3.384.827.297,63	0,00	0,00
21	Dinas Perikanan	5.891.395.387,00	5.891.395.387,00	0,00	0,00
22	Dinas PMP	2.662.928.300,00	2.428.253.300,00	234.675.000,00	9,66
23	Dinas Lingkungan Hidup	25.257.245.674,00	13.062.790.345,00	12.194.455.329,00	93,35
24	Dinas PM, PTSP, & Naker	9.038.000,00	9.038.000,00	0,00	0,00
25	Dinas Sosial	894.347.000,00	894.347.000,00	0,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	1.393.654.800,00	1.393.654.800,00	0,00	0,00
27	Dinas Kominfo	54.864.000,00	54.864.000,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan&Karsp	23.295.000,00	23.295.000,00	0,00	0,00
29	RSUD Alimuddin Umar	2.882.931.000,00	2.855.945.000,00	26.986.000,00	0,94
30	Kec. Belalau	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
31	Kec. Sekincau	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
32	Kel. Pasar Liwa	1.637.797.250,00	1.438.234.000,00	199.563.250,00	13,88
33	Kel. Way Mengaku	1.939.242.886,00	1.648.392.670,00	290.850.216,00	17,64
34	Kel. Sekincau	1.191.499.385,00	947.422.730,00	244.076.655,00	25,76
35	Kel. Fajar Bulan	1.429.217.640,00	1.230.007.007,00	199.210.633,00	16,20
36	Kel. Tugu Sari	1.450.241.918,00	1.252.578.790,00	197.663.128,00	15,78
37	Puskesmas Liwa	1.571.526.200,00	1.571.526.200,00	0,00	0,00
38	Puskesmas Kenali	1.510.849.200,00	1.510.849.200,00	0,00	0,00
39	Puskesmas Sumber Jaya	1.026.642.200,00	1.026.642.200,00	0,00	0,00
40	Puskesmas Fajar Bulan	2.298.323.833,00	2.298.323.833,00	0,00	0,00
41	Puskesmas Sekincau	1.149.254.011,00	928.410.700,00	220.843.311,00	23,79
42	Puskesmas Srimulyo	2.093.842.034,00	2.093.842.034,00	0,00	0,00
43	Puskesmas Batu Brak	681.231.633,00	681.231.633,00	0,00	0,00
44	Puskesmas Buay Nyerupa	1.641.265.500,00	1.641.265.500,00	0,00	0,00
45	Puskesmas Gedung Surian	1.511.162.400,00	1.511.162.400,00	0,00	0,00
46	Puskesmas Kebun Tebu	1.577.129.200,00	1.577.129.200,00	0,00	0,00
47	Puskesmas Air Hitam	1.433.946.500,00	1.433.946.500,00	0,00	0,00
48	Puskesmas Pagar Dewa	1.741.553.100,00	1.741.553.100,00	0,00	0,00
49	Puskesmas Batu Ketulis	1.469.825.500,00	1.469.825.500,00	0,00	0,00
50	Puskesmas BNS	1.493.839.500,00	1.493.839.500,00	0,00	0,00
51	Puskesmas Lumbok Seminung	1.509.148.782,00	1.509.148.782,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.064.141.579.802,07	1.981.673.833.979,07	82.467.745.823,00	4,16



LAMPIRAN

35

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI ASET PERALATAN DAN MESIN KE ASET JIJ



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI ASET PERALATAN DAN MESIN KE ASET JALAN, IIRIGASI, DAN BANGUNAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	ESTER PEROLEHAN	TUN PEROLEHAN	JMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Sekretariat Daerah	1.3.4.02.06.05.008.	Tandon Air 1000 Liter	Rumah Sekda	Semester II	2023	2	2.200.000,00	4.400.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.3.4.02.06.05.008.	Tandon Air 2000 Liter	Rumah Wakil	Semester II	2023	1	5.929.500,00	5.929.500,00
3	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren air	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATU BRAK	Semester I	2023	1	1.600.000,00	1.600.000,00
4	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tandon air	SMP NEGERI SEKUTING TERPADU	Semester I	2023	1	1.900.000,00	1.900.000,00
5	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Belanja Toren Air/Tandon Air	SMPN 1 BATU KETULIS	Semester I	2023	1	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tower Air	SDN 1 UJUNG	Semester I	2023	1	1.750.000,00	1.750.000,00
7	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tandon Air	SMP Negeri 1 Batu Brak	Semester I	2023	1	2.500.000,00	2.500.000,00
8	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tandon Air	SMPN 2 LIWA	Semester II	2023	1	1.950.000,00	1.950.000,00
9	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Air/Tandon Air	SDN 3 Way Mengaku	Semester II	2023	2	3.000.000,00	6.000.000,00
10	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toron Air	SDN HENI ARONG	Semester II	2023	1	1.800.000,00	1.800.000,00
11	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren air	SDN 2 TRIBUDISYUKUR	Semester II	2023	1	1.800.000,00	1.800.000,00
12	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Air/Tandon Air	SDN 3 TUGUSARI	Semester II	2023	1	1.500.000,00	1.500.000,00
13	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Air/Tandon Air	SMPN 4 Liwa	Semester II	2023	1	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tandon Air	SMPN 1 GEDUNG SURIAN	Semester II	2023	1	1.650.000,00	1.650.000,00
15	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	toren air	SMPN 1 SUMBER JAYA	Semester II	2023	1	1.100.000,00	1.100.000,00
16	DLH	1.3.4.03.03.04.001.	Container Sampah	Arm Roll Container Sampah Kap 6 M3	Semester II	2023	3	149.800.000,00	449.400.000,00
17	RSUD Alimuddin Umar	1.3.4.02.06.05.008.	Tower air kapasitas 12000	RSUD AU	Semester I	2023	1	8.500.000,00	8.500.000,00
18	RSUD Alimuddin Umar	1.3.4.02.06.05.008.	Toren air	IPSRs	Semester I	2023	1	1.950.000,00	1.950.000,00
19	RSUD Alimuddin Umar	1.3.4.02.05.05.001.	Bak ipal mesin incenerator	rsud	Semester II	2023	1	7.856.000,00	7.856.000,00
20	RSUD Alimuddin Umar	1.3.4.03.06.03.001.	panel listrik	CSSD	Semester II	2023	1	8.680.000,00	8.680.000,00
JUMLAH									513.765.500,00



LAMPIRAN

36

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI BM GEDUNG & BANGUNAN KE ASET JIJ



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN
1	Sekretariat DPRD	1.3.4.02.06.05.008.	Tower Air	Mushola	Semester II	2023	1	13.099.059,00
2	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	Jamban	SDN NEGERI JAYA	Semester II	2023	1	152.581.600,00
3	Dinas PUPR	1.3.4.02.04.05.007.	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Penahan Tebing Gedung Pancasila	Semester II	2023	1	199.503.000,00
4	Dispora	1.3.4.02.06.05.007.	Toilet	Kebun Raya Liwa	Semester II	2023	1	329.822.000,00
JUMLAH								695.005.659,00



LAMPIRAN

37

MUTASI TAMBAH MUTASI SKPD ATAS ASET JIJ



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI TAMBAH MUTASI SKPD ATAS ASET JALAN, IIRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
1	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.4.02.04.05.007.	Bronjong	Puskesmas Sekincau	2023	1	220.843.311,00	APBD
2	BPBD	Dinas TPH	1.3.4.02.01.03.004.	Rehabilitasi Dam Parit	DAM Parit Srimulyo	2023	1	7.020.656.707,00	APBD
3	BPBD	Dinas TPH	1.3.4.02.01.03.003.	Rehab Irigasi	Way Muara Jaya Kebun Tebu	2023	1	1.071.438.213,00	APBD
4	BPBD	Dinas PUPR	1.3.4.02.01.03.003.	Rehab Irigasi	Way Cipta Mulya	2023	1	2.702.531.383,00	APBD
5	BPBD	Dinas PUPR	1.3.4.02.04.04.002.	Drainase	Ruas Jalan Luas - Argomulyo	2023	1	2.392.362.308,00	APBD
6	PPKD	DLH	1.3.4.02.04.05.007.	Bronjong	Kebun Raya Liwa	2018	1	3.929.622.791,00	Hibah
7	PPKD	DLH	1.3.4.01.01.05.001.	Jalan Lingkungan	Kebun Raya Liwa	2019	1	7.389.128.563,00	Hibah
8	PPKD	DLH	1.3.4.02.04.05.007.	Bronjong	Kebun Raya Liwa	2019	1	408.967.274,00	Hibah
9	PPKD	DLH	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	Kebun Raya Liwa	2019	1	87.076.701,00	Hibah
10	PPKD	Dinas TPH	1.3.4.01.01.09.001.	Jalan Usaha Tani	Pembangunan PSD dan Jalan Poros Kawasan Sukau	2016	1	1.186.192.000,00	Hibah
11	PPKD	Dinas TPH	1.3.4.01.01.09.001.	Jalan Usaha Tani	Pembangunan PSD dan Jalan Poros Kawasan Pagar Dewa	2016	1	1.185.652.000,00	Hibah
JUMLAH								27.594.471.251,00	



LAMPIRAN

38

MUTASI KURANG PENGHENTIAN ASET JIJ



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI KURANG PENGHENTIAN ASET JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD	KODE BARANG ASET TETAP	KODE BARANG ASET LAINNYA	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA
1	DLH	1.3.4.03.03.04.001.	1.5.4.01.01.01.004.	Container Sampah	DLH	Semester I	2019	2	69.740.000,00	APBD
JUMLAH									69.740.000,00	



LAMPIRAN

39

MUTASI KURANG MUTASI SKPD ATAS ASET JIJ



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI KURANG MUTASI SKPD ATAS ASET JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
1	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.4.02.04.05.007.	Bronjong	Puskesmas Sekincau	2023	1	220.843.311,00	APBD
2	BPBD	Dinas TPH	1.3.4.02.01.03.004.	Rehabilitasi Dam Parit	DAM Parit Srimulyo	2023	1	7.020.656.707,00	APBD
3	BPBD	Dinas TPH	1.3.4.02.01.03.003.	Rehab Irigasi	Way Muara Jaya Kebun Tebu	2023	1	1.071.438.213,00	APBD
4	BPBD	Dinas PUPR	1.3.4.02.01.03.003.	Rehab Irigasi	Way Cipta Mulya	2023	1	2.702.531.383,00	APBD
5	BPBD	Dinas PUPR	1.3.4.02.04.04.002.	Drainase	Ruas Jalan Luas - Argomulyo	2023	1	2.392.362.308,00	APBD
6	PPKD	DLH	1.3.4.02.04.05.007.	Bronjong	Kebun Raya Liwa	2018	1	3.929.622.791,00	Hibah
7	PPKD	DLH	1.3.4.01.01.05.001.	Jalan Lingkungan	Kebun Raya Liwa	2019	1	7.389.128.563,00	Hibah
8	PPKD	DLH	1.3.4.02.04.05.007.	Bronjong	Kebun Raya Liwa	2019	1	408.967.274,00	Hibah
9	PPKD	DLH	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	Kebun Raya Liwa	2019	1	87.076.701,00	Hibah
10	PPKD	Dinas TPH	1.3.4.01.01.09.001.	Jalan Usaha Tani	Pembangunan PSD dan Jalan Poros Kawasan Sukau	2016	1	1.186.192.000,00	Hibah
11	PPKD	Dinas TPH	1.3.4.01.01.09.001.	Jalan Usaha Tani	Pembangunan PSD dan Jalan Poros Kawasan Pagar Dewa	2016	1	1.185.652.000,00	Hibah
JUMLAH								27.594.471.251,00	



LAMPIRAN

40

RINCIAN AT LAINNYA
PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN ASET TETAP LAINNYA PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	345.245.975,00	345.245.975,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	411.658.000,00	411.658.000,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	7.255.000,00	7.255.000,00	0,00	0,00
4	BPKD	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00
5	Bappeda	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
6	Sat Pol PP	167.076.000,00	167.076.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	66.563.605.807,39	60.872.896.722,39	5.690.709.085,00	9,35
8	Dinas Kesehatan	1.673.600,00	1.673.600,00	0,00	0,00
9	Dinas PU	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Porapar	855.768.000,00	855.768.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Koperasi,UKM,Perindag	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00
12	Dinas PP, KB, PP, dan PA	130.898.161,00	130.898.161,00	0,00	0,00
13	Dinas TPH	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Perkebunan & Nak	42.488.200,00	42.488.200,00	0,00	0,00
15	Dinas Perikanan	97.197.000,00	97.197.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	176.220.000,00	176.220.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan & Arsip	1.328.898.478,00	1.308.884.478,00	20.014.000,00	1,53
19	RSUD Alimuddin Umar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
20	Kec. Balik Bukit	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
21	Kec. Belalau	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00
22	Kec. Sumberjaya	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00
23	Kec. Way Tenong	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
24	Kec. Sekincau	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
25	Kec. Suoh	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00
26	Kec. Batu Brak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
27	Kec. Sukau	747.800,00	747.800,00	0,00	0,00
28	Kel. Pasar Liwa	21.938.400,00	21.938.400,00	0,00	0,00
29	Kel. Way Mengaku	28.372.400,00	8.372.400,00	20.000.000,00	238,88
30	Kel. Sekincau	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
31	Kel. Fajar Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
32	Puskesmas Liwa	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
33	Puskesmas Kenali	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
34	Puskesmas Sumber Jaya	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
35	Puskesmas Sekincau	424.900,00	424.900,00	0,00	0,00
36	Puskesmas Srimulyo	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
37	Puskesmas Batu Brak	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
38	Puskesmas Gedung Surian	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
39	Puskesmas BNS	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
40	Puskesmas Lumbok Seminung	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
	JUMLAH	70.217.802.881,39	64.487.079.796,39	5.730.723.085,00	8,89



LAMPIRAN

41

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI ASET TETAP LAINNYA



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI/KOREKSI 1 ASET TETAP LAINNYA

NO	SKPD	KODE BARANG BARU	KODE BARANG LAMA	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL
1	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.002.	1.3.2.08.03.09.004.	Atlas Indonesia dan Dunia	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	2.166.615,00	APBD
2	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.002.	1.3.2.08.03.09.004.	Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	1.203.700,00	APBD
3	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.003.	1.3.2.08.03.09.004.	Bola Dunia	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	2.460.000,00	APBD
4	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Dunia	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	2.046.240,00	APBD
5	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Indonesia	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	134.170,00	APBD
6	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Asean	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	750.000,00	APBD
7	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Afrika	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	150.000,00	APBD
8	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Australia & Selandia Baru	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	150.000,00	APBD
9	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Eropa	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	500.000,00	APBD
10	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Indonesia Wawasan Nusantara	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	500.000,00	APBD
11	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Penyebaran Agama Islam	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	125.390,00	APBD
12	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Penjelajahan Samudra	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	125.390,00	APBD
13	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Wilayah Kerajaan Sriwijaya	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	125.390,00	APBD
14	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.001.	1.3.2.08.03.09.004.	Peta Wilayah Kerajaan Majapahit	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	125.390,00	APBD
15	Dinas Pendidikan	1.3.5.01.03.01.012.	1.3.2.08.03.09.004.	Poster Atmosfer	SMPN 1 Batu Brak	2012	1	125.390,00	APBD
								10.687.675,00	



LAMPIRAN

42

RINCIAN ASET TETAP KDP



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	OPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AKHIR TAHUN 2023
1	BPBD	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehab Pengaman Sungai	Way Warkuk	Semester II	2023	92.005.680,00
2	BPBD	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehab Pengaman Sungai	Way Uluhan	Semester II	2023	92.027.880,00
3	BPBD	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehab Pengaman Sungai	Way Palakia	Semester II	2023	92.057.850,00
4	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Studi Kelayakan Jembatan Sekuting-Sukarame	Dinas PUPR	Semester I	2008	352.000.000,00
5	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Teknis Air Bersih	Dinas PUPR	Semester I	2008	178.199.000,00
6	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Peningkatan Jembatan	Dinas PUPR	Semester I	2009	10.000.000,00
7	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Pengembangan sistem Dist.Air Minum	Dinas PUPR	Semester I	2010	144.490.000,00
8	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Peningkatan Jalan	Dinas PUPR	Semester I	2010	94.048.106,00
9	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR	Semester I	2011	12.118.968,00
10	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.003.	Pengembangan Perumahan	Dinas PUPR	Semester I	2012	269.780.000,00
11	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Penataan Kawasan Kota Liwa	Dinas PUPR	Semester I	2013	395.340.000,00
12	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Penyusunan Database Jalan Lingkungan (Balik Bukit, Pesisir Tengah, Sumberjaya)	Dinas PUPR	Semester I	2013	55.388.334,00
JUMLAH							1.787.455.818,00



LAMPIRAN

43

RINCIAN ATB PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN ASET TAK BERWUJUD PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0
2	Bappeda	774.896.091,00	774.896.091,00	0,00	0
3	Dinas Lingkungan Hidup	53.376.900,00	53.376.900,00	0,00	0
4	BKPSDM	399.875.000,00	399.875.000,00	0,00	0
5	Dinas PMP	168.800.000,00	168.800.000,00	0	0
6	Dinas Kesehatan	57.601.040,00	57.601.040,00	0,00	0
7	BPKD	1.124.143.000,00	921.962.500,00	202.180.500,00	21,93
8	RSUD Alimuddin Umar	40.110.000,00	40.110.000,00	0,00	0
9	Badan PM, PTSP, dan Naker	122.732.000,00	122.732.000,00	0,00	0
10	Dinas Kominfo	241.325.000,00	241.325.000,00	0,00	0
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.690.200,00	149.690.200,00	0,00	0
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	118.947.140,00	118.947.140,00	0,00	0
13	Balitbang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0
14	Dinas Perhubungan	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	0
	JUMLAH	3.667.996.371,00	3.465.815.871,00	202.180.500,00	5,83



LAMPIRAN

44

RINCIAN ASET LAIN2 PER OPD



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**RINCIAN ASET LAIN-LAIN PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2023	1 Januari 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	2.686.097.439,00	2.809.847.439,00	(123.750.000,00)	(4,40)
2	Sekretariat DPRD	962.692.600,00	978.251.800,00	(15.559.200,00)	(1,59)
3	Inspektorat	24.000.466,67	24.000.466,67	0,00	0,00
4	BPKD	5.500.000,00	669.000.050,00	(663.500.050,00)	(99,18)
5	Bappeda	152.314.579,00	157.984.579,00	(5.670.000,00)	(3,59)
6	BKPSDM	5.212.621,00	5.212.621,00	0,00	0,00
7	Kantor Kesbangpol	5.298.333,00	5.298.333,00	0,00	0,00
8	Sat Pol PP	96.313.666,00	96.313.666,00	0,00	0,00
9	Dinas Dikbud.	26.759.630.018,00	26.759.630.018,00	0,00	0,00
10	Dinas Kesehatan	1.035.623.750,00	1.035.623.750,00	0,00	0,00
11	Dinas PUPR	165.919.452.397,00	127.601.100.410,00	38.318.351.987,00	30,03
12	Disdukcapil	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Porapar	31.399.000,00	31.399.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	158.065.500,00	158.065.500,00	0,00	0,00
15	Dinas PP, KB, PP, dan PA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16	Dinas TPH	13.226.350.762,00	13.226.350.762,00	0,00	0,00
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.055.978.300,00	1.055.978.300,00	0,00	0,00
18	Dinas Perikanan	839.025.390,00	839.025.390,00	0,00	0,00
19	Dinas PMP	26.557.400,00	26.557.400,00	0,00	0,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	318.442.283,00	318.442.283,00	0,00	0,00
21	Badan PM, PTSP, dan Naker	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00
22	Dinas Sosial	3.826.000,00	3.826.000,00	0,00	0,00
23	Dinas Perhubungan	979.144.000,00	1.578.921.600,00	(599.777.600,00)	(37,99)
24	RSUD Alimuddin Umar	2.156.887.900,00	2.598.758.900,00	(441.871.000,00)	(17,00)
25	Kec. Balik Bukit	9.628.333,33	9.628.333,33	0,00	0,00
26	Kec. Belalau	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00
27	Kec. Sumberjaya	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00
28	Kec. Way Tenong	4.123.200,00	4.123.200,00	0,00	0,00
29	Kec. Sekincau	281.865.000,00	281.865.000,00	0,00	0,00
30	Kec. Suoh	7.437.000,00	7.437.000,00	0,00	0,00
31	Kec. Batu Brak	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00
32	Kel. Sekincau	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
33	Puskesmas Liwa	26.599.992,00	26.599.992,00	0,00	0,00
34	Puskesmas Kenali	192.015.850,00	192.015.850,00	0,00	0,00
35	Puskesmas Sumber Jaya	15.045.000,00	15.045.000,00	0,00	0,00
36	Puskesmas Fajar Bulan	18.748.049,00	18.748.049,00	0,00	0,00
37	Puskesmas Sekincau	121.070.000,00	121.070.000,00	0,00	0,00
38	Puskesmas Srimulyo	65.313.569,00	65.313.569,00	0,00	0,00
39	Puskesmas Batu Brak	109.156.000,00	109.156.000,00	0,00	0,00
40	Puskesmas Buay Nyerupa	8.024.502,00	8.024.502,00	0,00	0,00
41	Puskesmas Gedung Surian	37.993.000,00	37.993.000,00	0,00	0,00
42	Puskesmas Kebun Tebu	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
43	Puskesmas Air Hitam	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
44	Puskesmas Batu Ketulis	2.103.400,00	2.103.400,00	0,00	0,00
45	Puskesmas BNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
46	Puskesmas Lumbok Semining	43.090.000,00	43.090.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	217.471.012.300,00	181.002.788.163,00	36.468.224.137,00	20,15



LAMPIRAN

45

MUTASI TAMBAH PENGHENTIAN ASET LAIN-LAIN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

**MUTASI TAMBAH PENGHENTIAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	SKPD	KODE BARANG ASET TETAP	KODE BARANG ASET LAINNYA	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN KIB	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.02.02.001.	1.5.4.01.01.02.003.	Gedung R.D.Jabatan Kadis	Jl.Otto Iskandar Dinata	Semester I	2001	1	54.000.000,00	Penilaian	BANGUNAN GEDUNG	Proses Penghapusan
2	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.02.02.002.	1.5.4.01.01.02.003.	Gedung R.D Pegawai	Jl.Otto Iskandar Dinata	Semester I	2001	1	50.000.000,00	Penilaian	BANGUNAN GEDUNG	Proses Penghapusan
3	Dinas Pendidikan	1.3.3.01.01.09.001.	1.5.4.01.01.02.003.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Pramuka	Dinas Pendidikan	Semester I	2003	1	166.800.000,00	Penilaian	BANGUNAN GEDUNG	Proses Penghapusan
4	Dinas PP, KB, PP & PA	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125/BE 5649 MZ	Semester I	2007	1	12.420.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
5	Dinas PP, KB, PP & PA	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5841 MZ	Semester I	2008	1	12.908.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
6	Dinas PP, KB, PP & PA	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5851 MZ	Semester I	2008	1	12.908.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
7	Dinas PP, KB, PP & PA	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5855 MZ	Semester I	2008	1	12.908.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
8	Dinas PP, KB, PP & PA	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5882 MZ	Semester I	2008	1	12.908.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
9	Dinas PP, KB, PP & PA	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5891 MZ	Semester I	2008	1	12.908.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
10	DLH	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5029 MZ	Semester I	1996	1	2.850.000,00	Penilaian	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
11	DLH	1.3.2.02.01.06.006.	1.5.4.01.01.01.002.	Truck Tangki Air	Isuzu/Eif/B 8465 DP	Semester I	1999	1	84.300.000,00	Penilaian	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
12	DLH	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Honda/GL 160 D/BE 5473 MZ	Semester I	2007	1	16.476.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
13	DLH	1.3.2.02.01.05.002.	1.5.4.01.01.01.002.	Kendaraan Roda Tiga	Tossa/TSZ200-2/BE 6146 MZ	Semester I	2012	1	24.855.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
14	DLH	1.3.2.02.01.05.002.	1.5.4.01.01.01.002.	Kendaraan Roda Tiga	Tossa/TSZ200-2/BE 6147 MZ	Semester I	2012	1	24.855.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
15	DLH	1.3.2.02.01.05.002.	1.5.4.01.01.01.002.	Motor Pengangkut Sampah	KAISAR/TRISEDA/BE 6194 MZ	Semester I	2014	1	30.667.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
16	DLH	1.3.2.02.01.05.002.	1.5.4.01.01.01.002.	Motor Pengangkut Sampah	KAISAR/TRISEDA/BE 6190 MZ	Semester I	2014	1	34.790.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
17	DLH	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Jialing/JH200/BE 6016 MZ	Semester I	2011	1	21.775.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
18	DLH	1.3.4.03.03.04.001.	1.5.4.01.01.01.004.	Container Sampah	DLH	Semester I	2019	2	69.740.000,00	APBD	INSTALASI	Proses Penghapusan
19	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Kantor	Komplek Perkantoran 1991/08040408400007	Semester I	1991	1350	121.500.000,00	Penilaian	TANAH	Proses Penghapusan
20	PPKD	1.3.1.01.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.001.	Tanah Gedung Kantor Palang Merah Indonesia (PMI)	08.05.04.05.4.00015/Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Semester I	2020	1311	1.311.000.000,00	Penilaian II 2022	TANAH	Proses Penghapusan
21	Sekretariat DPRD	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5246 MZ	Semester I	2003	1	10.350.000,00	Penilaian	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
22	Kel. Way Mengaku	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Honda/GL160 D/BE 5675 MZ	Semester I	2007	1	16.476.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
23	BPKD	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5120 MZ	Semester I	1995	1	5.300.000,00	Penilaian	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
24	BPKD	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Honda/MCB WIN/BE 5308 MZ	Semester I	2005	1	10.500.000,00	Penilaian	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
25	BPKD	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Suzuki/TS 125/BE 5324 MZ	Semester I	2005	1	14.694.800,00	Penilaian	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
26	Dinas Pendidikan	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Honda/GL 100/BE 5127 MZ	Semester I	1995	1	3.000.000,00	Penilaian	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
27	Dinas Pendidikan	1.3.2.02.01.04.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5388 MZ	Semester I	2006	1	12.300.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
28	Dinas PUPR	1.3.2.02.01.03.002.	1.5.4.01.01.01.002.	Double Cabin	Mitsubishi/L200/BE 8004 MZ	Semester I	2007	1	265.000.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
29	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.02.01.06.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Mobil Ambulance	KIA/Travelo/BE 9380 MZ	Semester II	2015	1	367.065.000,00	APBD	ALAT ANGKUTAN	Proses Penghapusan
30	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.06.03.10.003.	1.5.4.01.01.01.002.	Parabola	Balik Bukit	Semester I	2014	1	1.000.000,00	APBD	ALAT STUDIO, KOMUN	Proses Penghapusan
31	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.14.001.	1.5.4.01.01.01.002.	EKG	RSUD Alimuddin Umar	Semester II	2015	4	322.325.000,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
32	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.08.024.	1.5.4.01.01.01.002.	Nebulizer	Balik Bukit	Semester I	2009	1	18.319.000,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
33	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.10.01.02.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Komputer + Print	Balik Bukit	Semester I	2009	2	15.760.000,00	APBD	KOMPUTER	Proses Penghapusan
34	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.10.01.02.001.	1.5.4.01.01.01.002.	Komputer set	Balik Bukit	Semester I	2010	2	16.450.000,00	APBD	KOMPUTER	Proses Penghapusan
35	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.10.01.02.002.	1.5.4.01.01.01.002.	Laptop + printer	Balik Bukit	Semester I	2010	1	20.790.000,00	APBD	KOMPUTER	Proses Penghapusan
36	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.14.001.	1.5.4.01.01.01.002.	EKG	Balik Bukit	Semester I	2007	1	24.875.000,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
37	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.14.001.	1.5.4.01.01.01.002.	EKG 12 Chanel	Balik Bukit	Semester I	2010	1	77.000.000,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
38	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.14.001.	1.5.4.01.01.01.002.	EKG	Balik Bukit	Semester I	2011	2	65.408.000,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
39	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.08.024.	1.5.4.01.01.01.002.	Nebulizer	Balik Bukit	Semester I	2008	2	36.100.000,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
40	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.08.024.	1.5.4.01.01.01.002.	Nebulizer	Balik Bukit	Semester I	2011	2	76.310.000,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
41	RSUD Alimuddin Umar	1.3.2.07.01.08.024.	1.5.4.01.01.01.002.	Nebulizer	Balik Bukit	Semester I	2013	2	40.927.200,00	APBD	ALAT KEDOKTERAN D	Proses Penghapusan
JUMLAH									3.510.518.000,00			



LAMPIRAN

46

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN KARENA RUSAK BERAT



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN KARENA RUSAK BERAT

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1	RSUD Almuddin Umar	1.5.4.01.01.01.003	Bangunan Kesehatan	Rawat Inap Anak & NICU	2008	1	441.871.000,00	APBD	Pemusnahan
2	Sekretariat Daerah	1.5.4.01.01.01.001	Pemerintah	1991/08040408400007	1991	1	121.500.000,00	Penilaian	Pemindahtanganan/Hibah
3	PPKD	1.5.4.01.01.01.001	Tanah Gedung Kantor Palang Merah Indonesia (PMI)	08.05.04.05.4.00015/Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Baik Bukit, Kab. Lampung Barat	2020	1	1.311.000.000,00	Penilaian II 2022	Pemindahtanganan/Hibah
4	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.01.002	Double Cabin	Mitsubishi/L200/BE 8004 MZ	2007	1	265.000.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
5	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Truck Tangki Air	Isuzu/EIH/B 8465 DP	1999	1	84.300.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
6	RSUD Almuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Mobil Ambulance	KIA/Travelo/BE 9380 MZ	2015	1	367.065.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
7	Sekretariat Daerah	1.5.4.01.01.01.002	Mobil Ambulance	Toyota/Kijang KF60/BE 2863 AZ	2000	1	123.750.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
8	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5029 MZ	1996	1	2.850.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
9	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Honda/GL 160 D/BE 5473 MZ	2007	1	16.476.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
10	Dinas PP, KB, PP & PA	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5841 MZ	2008	1	12.908.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
11	Dinas PP, KB, PP & PA	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5855 MZ	2008	1	12.908.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
12	Dinas PP, KB, PP & PA	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5851 MZ	2008	1	12.908.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
13	Dinas PP, KB, PP & PA	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5882 MZ	2008	1	12.908.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
14	Dinas PP, KB, PP & PA	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha Vega R/BE 5891 MZ	2008	1	12.908.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
15	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5120 MZ	1995	1	5.300.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
16	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Honda/GL 100/BE 5042 MZ	2005	1	6.500.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
17	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Suzuki/TS 125 /BE 5126 MZ	1995	1	7.500.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
18	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Suzuki/TS 125/BE 5324 MZ	2005	1	14.694.800,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
19	Sekretariat DPRD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5246 MZ	2003	1	10.350.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
20	Sekretariat DPRD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Suzuki/TS 125/BE 5320 MZ	2005	1	15.559.200,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
21	Dinas Pendidikan	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115/BE 5388 MZ	2006	1	12.300.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
22	Dinas Pendidikan	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Honda/GL 100/BE 5127 MZ	1995	1	3.000.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
23	Bappeda	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Suzuki/L100/BE 5080 MZ	1992	1	2.380.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
24	Bappeda	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Honda/GL Pro/BE 5131 MZ	1994	1	3.290.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
25	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Honda/MCB WIN/BE 5308 MZ	2005	1	10.500.000,00	Penilaian	Penjualan/Lelang
26	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Honda/GL/BE 5665 MZ	2007	1	16.476.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
27	Kel. Way Mengaku	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Honda/GL 160 D/BE 5675 MZ	2007	1	16.476.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
28	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Jialing/JH200/BE 6016 MZ	2011	1	21.775.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
29	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Kendaraan Roda Tiga	Tossa/TSZ200-2/BE 6146 MZ	2012	1	24.855.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
30	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Kendaraan Roda Tiga	Tossa/TSZ200-2/BE 6147 MZ	2012	1	24.855.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
31	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Hidrolik	KAISAR/TRISEDA/BE 6190 MZ	2014	1	34.790.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
32	DLH	1.5.4.01.01.01.002	Motor Pengangkut Sampah	KAISAR/TRISEDA/BE 6194 MZ	2014	1	30.667.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
33	Dinas PP, KB, PP & PA	1.5.4.01.01.01.002	Sepeda Motor	Suzuki/FD 125/BE 5649 MZ	2007	1	12.420.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
34	DLH	1.5.4.01.01.01.004	Container Sampah	DLH	2019	2	69.740.000,00	APBD	Penjualan/Lelang
35	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Brankas / Peti Uang	BPKD	1992	1	104.000,00	Penilaian	Pemusnahan
36	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Tik	BPKD	1992	1	184.000,00	Penilaian	Pemusnahan
37	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Tamu	BPKD	1992	1	9.000,00	Penilaian	Pemusnahan
38	BPKD	1.5.4.01.01.01.005	Gambar Struktur	BPKD	1992	1	1.000,00	Penilaian	Pemusnahan
39	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Zice	BPKD	1992	1	1.000,00	Penilaian	Pemusnahan
40	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	1992	1	1.000,00	Penilaian	Pemusnahan
41	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Tamu	BPKD	1992	1	173.000,00	Penilaian	Pemusnahan
42	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lemari Arsip	BPKD	1992	1	32.000,00	Penilaian	Pemusnahan
43	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	1992	1	1.000,00	Penilaian	Pemusnahan
44	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Kayu	BPKD	1992	2	35.000,00	Penilaian	Pemusnahan
45	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Tik	BPKD	1992	1	184.000,00	Penilaian	Pemusnahan
46	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Tik	BPKD	1992	1	184.000,00	Penilaian	Pemusnahan
47	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	AC Unit	BPKD	1994	2	354.000,00	Penilaian	Pemusnahan
48	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Hydrant Kebakaran	BPKD	1994	1	71.000,00	Penilaian	Pemusnahan
49	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Penghisap Debu	BPKD	1994	1	129.000,00	Penilaian	Pemusnahan
50	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Plastik	BPKD	1994	37	262.000,00	Penilaian	Pemusnahan
51	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	BPKD	1994	1	225.000,00	Penilaian	Pemusnahan
52	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	BPKD	1994	7	225.000,00	Penilaian	Pemusnahan
53	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tambang	BPKD	1994	1	40.000,00	Penilaian	Pemusnahan
54	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kabel	BPKD	1994	1	12.000,00	Penilaian	Pemusnahan
55	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	1994	2	2.000,00	Penilaian	Pemusnahan
56	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	1994	1	1.000,00	Penilaian	Pemusnahan
57	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Tulis	BPKD	1994	1	17.000,00	Penilaian	Pemusnahan
58	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Racun Api	BPKD	1994	1	113.000,00	Penilaian	Pemusnahan
59	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	1994	5	5.000,00	Penilaian	Pemusnahan
60	BPKD	1.5.4.01.01.01.005	Keyboard/HD	BPKD	1994	7	41.000,00	Penilaian	Pemusnahan
61	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Potong Rumpit	BPKD	1995	1	221.000,00	Penilaian	Pemusnahan
62	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Rak	BPKD	1995	2	110.667,00	Penilaian	Pemusnahan
63	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Putar	BPKD	1995	3	116.000,00	Penilaian	Pemusnahan
64	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Rak Arsip	BPKD	1995	1	13.000,00	Penilaian	Pemusnahan
65	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Rak	BPKD	1995	1	55.333,00	Penilaian	Pemusnahan
66	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lemari Arsip	BPKD	1995	1	116.000,00	Penilaian	Pemusnahan
67	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Tulis	BPKD	1997	1	21.000,00	Penilaian	Pemusnahan
68	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Pingpong	BPKD	1998	1	51.000,00	Penilaian	Pemusnahan
69	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lemari Kayu	BPKD	1999	1	202.000,00	Penilaian	Pemusnahan
70	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	AVR	BPKD	2000	1	18.000,00	Penilaian	Pemusnahan
71	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Konsumsi	BPKD	2000	2	141.000,00	Penilaian	Pemusnahan
72	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kabel	BPKD	2000	1	28.000,00	Penilaian	Pemusnahan
73	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Pimpinan Rapat	BPKD	2000	1	117.000,00	Penilaian	Pemusnahan
74	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	2000	2	5.000,00	Penilaian	Pemusnahan
75	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Pembolong Kertas	BPKD	2000	1	7.000,00	Penilaian	Pemusnahan
76	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Telepon	BPKD	2000	1	47.000,00	Penilaian	Pemusnahan
77	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Pembolong Kertas	BPKD	2000	1	16.000,00	Penilaian	Pemusnahan
78	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	2000	1	2.000,00	Penilaian	Pemusnahan
79	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Pembolong Kertas	BPKD	2000	1	7.000,00	Penilaian	Pemusnahan
80	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	2000	1	2.000,00	Penilaian	Pemusnahan
81	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Kecil	BPKD	2000	1	42.000,00	Penilaian	Pemusnahan
82	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Keranjang Sampah	BPKD	2000	2	2.000,00	Penilaian	Pemusnahan

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN PENGHAPUSAN
83	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Pembolong Kertas	BPKD	2000	1	7.000,00	Penilaian	Pemusnahan
84	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	2000	3	7.000,00	Penilaian	Pemusnahan
85	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	VCD Player	BPKD	2000	1	235.000,00	Penilaian	Pemusnahan
86	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	BPKD	2000	82	2.616.620,00	Penilaian	Pemusnahan
87	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Pemotong Kertas	BPKD	2001	1	71.000,00	Penilaian	Pemusnahan
88	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kotak Sampah	BPKD	2001	2	13.000,00	Penilaian	Pemusnahan
89	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Keranjang sampah	BPKD	2001	1	3.000,00	Penilaian	Pemusnahan
90	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Pembolong Kertas	BPKD	2002	1	9.000,00	Penilaian	Pemusnahan
91	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Keranjang Sampah	BPKD	2003	1	13.000,00	Penilaian	Pemusnahan
92	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kabel Gulung	BPKD	2003	1	20.000,00	Penilaian	Pemusnahan
93	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kotak Sampah	BPKD	2003	1	13.000,00	Penilaian	Pemusnahan
94	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Keranjang Sampah	BPKD	2003	1	13.000,00	Penilaian	Pemusnahan
95	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kemoceng	BPKD	2003	1	20.000,00	Penilaian	Pemusnahan
96	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Stempel	BPKD	2003	6	89.000,00	Penilaian	Pemusnahan
97	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Dudukan Stempel	BPKD	2003	1	21.000,00	Penilaian	Pemusnahan
98	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tempat Sampah	BPKD	2003	1	20.000,00	Penilaian	Pemusnahan
99	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Rapat	BPKD	2003	2	802.000,00	Penilaian	Pemusnahan
100	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kabel Gulung	BPKD	2003	1	20.000,00	Penilaian	Pemusnahan
101	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	BPKD	2003	1	2.564.000,00	Penilaian	Pemusnahan
102	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lap Top	BPKD	2003	1	6.900.000,00	Penilaian	Pemusnahan
103	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	BPKD	2004	1	145.000,00	Penilaian	Pemusnahan
104	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Rak Piring	BPKD	2004	1	36.000,00	Penilaian	Pemusnahan
105	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Piring	BPKD	2004	6	109.000,00	Penilaian	Pemusnahan
106	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gelas	BPKD	2004	2	36.000,00	Penilaian	Pemusnahan
107	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tatakan Gelas	BPKD	2004	2	127.000,00	Penilaian	Pemusnahan
108	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tutup Gelas	BPKD	2004	2	11.000,00	Penilaian	Pemusnahan
109	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Teko Plastik	BPKD	2004	2	73.000,00	Penilaian	Pemusnahan
110	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Teko Listrik	BPKD	2004	1	36.000,00	Penilaian	Pemusnahan
111	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Nampan	BPKD	2004	1	11.000,00	Penilaian	Pemusnahan
112	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kotak Sampah	BPKD	2004	1	55.000,00	Penilaian	Pemusnahan
113	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kotak Sampah	BPKD	2004	1	55.000,00	Penilaian	Pemusnahan
114	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kotak Sampah	BPKD	2004	2	109.000,00	Penilaian	Pemusnahan
115	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Asbak	BPKD	2004	2	7.000,00	Penilaian	Pemusnahan
116	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kotak Sampah	BPKD	2004	1	55.000,00	Penilaian	Pemusnahan
117	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mistar	BPKD	2004	1	7.000,00	Penilaian	Pemusnahan
118	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	BPKD	2004	1	145.000,00	Penilaian	Pemusnahan
119	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Aktif Speaker	BPKD	2004	2	152.000,00	Penilaian	Pemusnahan
120	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kompor Minyak	BPKD	2005	1	116.000,00	Penilaian	Pemusnahan
121	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Jerigen Minyak	BPKD	2005	1	17.000,00	Penilaian	Pemusnahan
122	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Pompa Minyak	BPKD	2005	1	9.000,00	Penilaian	Pemusnahan
123	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gantungan Kain	BPKD	2005	1	9.000,00	Penilaian	Pemusnahan
124	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Ember Air	BPKD	2005	1	4.000,00	Penilaian	Pemusnahan
125	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tempayan	BPKD	2005	1	48.000,00	Penilaian	Pemusnahan
126	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kemoceng	BPKD	2005	1	8.000,00	Penilaian	Pemusnahan
127	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kabel Gulung	BPKD	2005	2	13.000,00	Penilaian	Pemusnahan
128	BPKD	1.5.4.01.01.01.005	Gambar Presiden/Wapres	BPKD	2005	1	41.460,00	Penilaian	Pemusnahan
129	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lap Top	BPKD	2006	1	18.200.000,00	APBD	Pemusnahan
130	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lap Top	BPKD	2006	1	13.000.000,00	APBD	Pemusnahan
131	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Speaker Aktif	BPKD	2007	1	600.000,00	APBD	Pemusnahan
132	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Display Billboard	BPKD	2008	6	47.700.000,00	APBD	Pemusnahan
133	BPKD	1.5.4.01.01.01.005	Software Gaji	BPKD	2008	1	37.200.000,00	APBD	Pemusnahan
134	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer Notebook	BPKD	2008	1	15.000.000,00	APBD	Pemusnahan
135	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Leges	BPKD	2009	46	276.000,00	APBD	Pemusnahan
136	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik	Baik Bukit	1992	1	184.000,00	Penilaian	Pemusnahan
137	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Jam Dinding	Baik Bukit	1992	1	2.000,00	Penilaian	Pemusnahan
138	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Sofa	Baik Bukit	1992	1	173.000,00	Penilaian	Pemusnahan
139	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Kayu	Baik Bukit	1992	1	17.000,00	Penilaian	Pemusnahan
140	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Baik Bukit	1992	1	161.000,00	Penilaian	Pemusnahan
141	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Baik Bukit	1992	2	322.000,00	Penilaian	Pemusnahan
142	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Baik Bukit	1992	1	161.000,00	Penilaian	Pemusnahan
143	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Baik Bukit	1992	1	69.000,00	Penilaian	Pemusnahan
144	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Jam Dinding	Baik Bukit	1994	1	5.000,00	Penilaian	Pemusnahan
145	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Hydrant Kebakaran	Baik Bukit	1994	1	71.000,00	Penilaian	Pemusnahan
146	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Stabiliser	Baik Bukit	1994	1	9.000,00	Penilaian	Pemusnahan
147	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Putar	Baik Bukit	1994	1	51.000,00	Penilaian	Pemusnahan
148	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Komputer	Baik Bukit	1997	1	41.000,00	Penilaian	Pemusnahan
149	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Meja Komputer	Baik Bukit	1998	1	51.500,00	Penilaian	Pemusnahan
150	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Hitung	Baik Bukit	2000	1	1.989.000,00	Penilaian	Pemusnahan
151	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Televisi	Baik Bukit	2000	1	282.000,00	Penilaian	Pemusnahan
152	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Pejabat Eselon III	Baik Bukit	2000	1	235.000,00	Penilaian	Pemusnahan
153	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2000	6	191.460,00	Penilaian	Pemusnahan
154	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2000	6	191.460,00	Penilaian	Pemusnahan
155	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Putar	Baik Bukit	2000	3	281.250,00	Penilaian	Pemusnahan
156	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Putar	Baik Bukit	2000	2	188.000,00	Penilaian	Pemusnahan
157	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Putar	Baik Bukit	2000	1	94.000,00	Penilaian	Pemusnahan
158	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Baik Bukit	2001	1	257.500,00	Penilaian	Pemusnahan
159	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Baik Bukit	2001	1	257.500,00	Penilaian	Pemusnahan
160	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Baik Bukit	2001	1	257.500,00	Penilaian	Pemusnahan
161	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik	Baik Bukit	2003	1	938.500,00	Penilaian	Pemusnahan
162	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik	Baik Bukit	2003	1	938.500,00	Penilaian	Pemusnahan
163	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Penghisap Debu	Baik Bukit	2004	1	1.236.000,00	Penilaian	Pemusnahan
164	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kompor Gas	Baik Bukit	2004	1	931.000,00	Penilaian	Pemusnahan
165	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Putar	Baik Bukit	2004	2	218.000,00	Penilaian	Pemusnahan
166	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Putar	Baik Bukit	2004	1	109.000,00	Penilaian	Pemusnahan
167	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	2	364.000,00	Penilaian	Pemusnahan
168	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	1	182.000,00	Penilaian	Pemusnahan
169	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	1	182.000,00	Penilaian	Pemusnahan
170	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	1	182.000,00	Penilaian	Pemusnahan

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN PENGHAPUSAN
171	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	6	1.089.000,00	Penilaian	Pemusnahan
172	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	3	545.000,00	Penilaian	Pemusnahan
173	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	2	363.000,00	Penilaian	Pemusnahan
174	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	1	181.500,00	Penilaian	Pemusnahan
175	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	3	545.000,00	Penilaian	Pemusnahan
176	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	5	910.000,00	Penilaian	Pemusnahan
177	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Gordyn	Baik Bukit	2004	3	546.000,00	Penilaian	Pemusnahan
178	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Televisi	Baik Bukit	2005	1	905.000,00	Penilaian	Pemusnahan
179	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	LCD Projector	Baik Bukit	2005	1	12.000.000,00	Penilaian	Pemusnahan
180	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	AVR	Baik Bukit	2007	1	250.000,00	APBD	Pemusnahan
181	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	AVR	Baik Bukit	2007	1	250.000,00	APBD	Pemusnahan
182	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi	Baik Bukit	2007	1	800.000,00	APBD	Pemusnahan
183	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	5	1.250.000,00	APBD	Pemusnahan
184	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	7	1.750.000,00	APBD	Pemusnahan
185	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	4	1.000.000,00	APBD	Pemusnahan
186	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	1	250.000,00	APBD	Pemusnahan
187	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	1	250.000,00	APBD	Pemusnahan
188	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	2	500.000,00	APBD	Pemusnahan
189	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	12	3.000.000,00	APBD	Pemusnahan
190	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kursi Lipat	Baik Bukit	2007	5	1.250.000,00	APBD	Pemusnahan
191	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik	Baik Bukit	2008	4	8.840.000,00	APBD	Pemusnahan
192	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Hitung Elektronik	Baik Bukit	2011	5	625.000,00	APBD	Pemusnahan
193	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik	Baik Bukit	2012	2	4.110.000,00	APBD	Pemusnahan
194	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kalkulator	Baik Bukit	2013	6	1.350.000,00	APBD	Pemusnahan
195	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tustel	Baik Bukit	2000	1	70.000,00	Penilaian	Pemusnahan
196	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Receiver Digital	Baik Bukit	2005	1	557.000,00	Penilaian	Pemusnahan
197	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Kamera Digital	Baik Bukit	2007	1	5.000.000,00	APBD	Pemusnahan
198	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer	Baik Bukit	2003	1	1.656.000,00	Penilaian	Pemusnahan
199	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer	Baik Bukit	2003	1	1.656.000,00	Penilaian	Pemusnahan
200	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer	Baik Bukit	2003	1	1.682.000,00	Penilaian	Pemusnahan
201	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2003	1	1.682.000,00	Penilaian	Pemusnahan
202	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2003	1	2.318.000,00	Penilaian	Pemusnahan
203	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2003	1	444.000,00	Penilaian	Pemusnahan
204	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2003	1	1.656.000,00	Penilaian	Pemusnahan
205	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2003	1	444.000,00	Penilaian	Pemusnahan
206	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2003	1	3.312.000,00	Penilaian	Pemusnahan
207	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2003	1	3.312.000,00	Penilaian	Pemusnahan
208	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2003	1	276.000,00	Penilaian	Pemusnahan
209	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2003	1	276.000,00	Penilaian	Pemusnahan
210	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2003	1	250.000,00	Penilaian	Pemusnahan
211	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	CPU	Baik Bukit	2004	1	2.689.000,00	Penilaian	Pemusnahan
212	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2004	1	2.474.000,00	Penilaian	Pemusnahan
213	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2004	1	2.439.000,00	Penilaian	Pemusnahan
214	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2004	1	2.689.000,00	Penilaian	Pemusnahan
215	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2004	1	218.000,00	Penilaian	Pemusnahan
216	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2004	1	145.000,00	Penilaian	Pemusnahan
217	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2004	1	145.000,00	Penilaian	Pemusnahan
218	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2004	1	145.000,00	Penilaian	Pemusnahan
219	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2004	1	193.000,00	Penilaian	Pemusnahan
220	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2004	1	145.000,00	Penilaian	Pemusnahan
221	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2004	1	250.000,00	Penilaian	Pemusnahan
222	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2004	1	215.000,00	Penilaian	Pemusnahan
223	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2004	1	250.000,00	Penilaian	Pemusnahan
224	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2004	1	350.000,00	Penilaian	Pemusnahan
225	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lap Top	Baik Bukit	2006	1	6.900.000,00	APBD	Pemusnahan
226	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lap Top	Baik Bukit	2006	1	18.200.000,00	APBD	Pemusnahan
227	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Lap Top	Baik Bukit	2006	1	13.000.000,00	APBD	Pemusnahan
228	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2007	1	6.000.000,00	APBD	Pemusnahan
229	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2007	1	6.000.000,00	APBD	Pemusnahan
230	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2007	1	6.000.000,00	APBD	Pemusnahan
231	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2007	1	6.000.000,00	APBD	Pemusnahan
232	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2007	1	6.375.000,00	APBD	Pemusnahan
233	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU	Baik Bukit	2007	1	6.000.000,00	APBD	Pemusnahan
234	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / CPU/Monitor	Baik Bukit	2007	1	8.500.000,00	APBD	Pemusnahan
235	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Hub	Baik Bukit	2007	1	75.000,00	APBD	Pemusnahan
236	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2007	1	550.000,00	APBD	Pemusnahan
237	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2007	25	12.500.000,00	APBD	Pemusnahan
238	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2007	1	550.000,00	APBD	Pemusnahan
239	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2007	1	550.000,00	APBD	Pemusnahan
240	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Baik Bukit	2007	1	550.000,00	APBD	Pemusnahan
241	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	1	850.000,00	APBD	Pemusnahan
242	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	25	21.250.000,00	APBD	Pemusnahan
243	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	1	850.000,00	APBD	Pemusnahan
244	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	1	850.000,00	APBD	Pemusnahan
245	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	1	850.000,00	APBD	Pemusnahan
246	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	1	850.000,00	APBD	Pemusnahan
247	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	1	850.000,00	APBD	Pemusnahan
248	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor	Baik Bukit	2007	1	850.000,00	APBD	Pemusnahan
249	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor (LCD)	Baik Bukit	2007	1	1.400.000,00	APBD	Pemusnahan
250	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Monitor Nathans	Baik Bukit	2007	1	1.500.000,00	APBD	Pemusnahan
251	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / PC (Server)	Baik Bukit	2008	1	12.000.000,00	APBD	Pemusnahan
252	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / PC	Baik Bukit	2008	2	12.000.000,00	APBD	Pemusnahan
253	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer Notebook	Baik Bukit	2008	1	17.500.000,00	APBD	Pemusnahan
254	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer / PC	Baik Bukit	2009	2	12.000.000,00	APBD	Pemusnahan
255	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer Notebook	Baik Bukit	2009	2	25.000.000,00	APBD	Pemusnahan
256	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer Set	Baik Bukit	2010	1	6.000.000,00	APBD	Pemusnahan
257	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Komputer Set	Baik Bukit	2010	2	21.857.600,00	APBD	Pemusnahan
258	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Laptop / Notebook	Baik Bukit	2010	2	30.000.000,00	APBD	Pemusnahan

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN PENGHAPUSAN
259	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Laptop / Notebook	Balik Bukit	2010	2	31.920.000,00	APBD	Pemusnahan
260	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	LCD Monitor	Balik Bukit	2010	1	1.620.000,00	APBD	Pemusnahan
261	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Laptop / Notebook	Balik Bukit	2011	1	15.000.000,00	APBD	Pemusnahan
262	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Laptop / Notebook	Balik Bukit	2011	2	21.000.000,00	APBD	Pemusnahan
263	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Balik Bukit	2012	1	3.120.000,00	APBD	Pemusnahan
264	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Balik Bukit	2012	2	8.600.000,00	APBD	Pemusnahan
265	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Balik Bukit	2012	3	23.760.000,00	APBD	Pemusnahan
266	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	LED Monitor	Balik Bukit	2012	1	1.400.000,00	APBD	Pemusnahan
267	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Notebook Toshiba Satellite C55	Note book	2015	1	11.500.000,00	APBD	Pemusnahan
268	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Notebook	Note book	2015	1	9.750.000,00	APBD	Pemusnahan
269	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Telepon	Balik Bukit	1999	1	55.000,00	Penilaian	Pemusnahan
270	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Microphone	Balik Bukit	2000	1	143.700,00	Penilaian	Pemusnahan
271	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tiang Microphone	Balik Bukit	2000	1	10.000,00	Penilaian	Pemusnahan
272	BPKD	1.5.4.01.01.01.002	Tiang Microphone Meja	Balik Bukit	2000	1	4.000,00	Penilaian	Pemusnahan
273	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Parabola	Balik Bukit	2014	1	1.000.000,00	APBD	Pemusnahan
274	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	EKG	RSUD Alimuddin Umar	2015	4	322.325.000,00	APBD	Pemusnahan
275	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Nebulizer	Balik Bukit	2009	1	18.319.000,00	APBD	Pemusnahan
276	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Komputer + Print	Balik Bukit	2009	2	15.760.000,00	APBD	Pemusnahan
277	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Komputer set	Balik Bukit	2010	2	16.450.000,00	APBD	Pemusnahan
278	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Laptop + printer	Balik Bukit	2010	1	20.790.000,00	APBD	Pemusnahan
279	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	EKG	Balik Bukit	2007	1	24.875.000,00	APBD	Pemusnahan
280	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	EKG 12 Chanel	Balik Bukit	2010	1	77.000.000,00	APBD	Pemusnahan
281	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	EKG	Balik Bukit	2011	2	65.408.000,00	APBD	Pemusnahan
282	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Nebulizer	Balik Bukit	2008	2	36.100.000,00	APBD	Pemusnahan
283	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Nebulizer	Balik Bukit	2011	2	76.310.000,00	APBD	Pemusnahan
284	RSUD Alimuddin Umar	1.5.4.01.01.01.002	Nebulizer	Balik Bukit	2013	2	40.927.200,00	APBD	Pemusnahan
JUMLAH							4.490.068.250,00		



LAMPIRAN

47

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET LAIN2



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN KARENA TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PEMERINTAHAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1	Dishub	1.5.4.01.01.02.002.	Truck	Mitsubishi/FE74HD/BE 8049 MZ	2009	1	295.000.000,00	APBD	Pemindahtanganan
2	Dishub	1.5.4.01.01.02.002.	Pick Up	Isuzu/TBR 54 Turbo /BE 8058 MZ	2010	1	145.043.000,00	APBD	Pemindahtanganan
3	Dishub	1.5.4.01.01.02.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 8015 MZ	2013	1	159.734.600,00	APBD	Pemindahtanganan
4	Sekretariat Daerah	1.5.4.01.01.02.003.	Gedung R.D.Jabatan Kadis	Jl.Otto Iskandar Dinata	2001	1	54.000.000,00	Penilaian	Pemindahtanganan
5	Sekretariat Daerah	1.5.4.01.01.02.003.	Gedung R.D Pegawai	Jl.Otto Iskandar Dinata	2001	1	50.000.000,00	Penilaian	Pemindahtanganan
6	Dinas Pendidikan	1.5.4.01.01.02.003.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Pramuka	Dinas Pendidikan	2003	1	166.800.000,00	Penilaian	Pemindahtanganan
JUMLAH							870.577.600,00		



LAMPIRAN

48

MUTASI KURANG MUTASI OPD ASET LAIN-LAIN



Jalan Raden Intan II No. 01 Way
Mengaku, Liwa 34811
Lampung Barat



Telp. (0728) 21747
Fax. (0728) 21139



koinfo.lambar@gmail.com



<https://www.lampungbaratkab.go.id>

MUTASI KURANG MUTASI OPD ASET LAIN-LAIN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
1	PPKD	Dinas PU	1.5.4.01.01.02.004.	Banpro Penyehatan	PDAM Limau Kunci	Semester I	2023	1	1.013.993.900,00	Hibah
2	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM MBR	Giham Sekincau	Semester I	2023	1	651.259.000,00	Hibah
3	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM MBR IKK	Sekincau	Semester I	2023	1	917.288.000,00	Hibah
4	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM MBR	PDAM Limau Kunci	Semester I	2023	1	829.681.000,00	Hibah
5	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	Optimalisasi MBR	PDAM Limau Kunci	Semester I	2023	1	1.728.057.000,00	Hibah
6	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM MBR	Tugu Mulya	Semester I	2023	1	2.224.490.000,00	Hibah
7	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM IKK	Sukau II	Semester I	2023	1	6.051.356.000,00	Hibah
8	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM MBR IKK	Sukau II	Semester I	2023	1	1.452.357.000,00	Hibah
9	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM IKK	Sukau II IPA IV	Semester I	2023	1	5.304.830.000,00	Hibah
10	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM IKK	Sukau II IPA III	Semester I	2023	1	7.562.637.000,00	Hibah
11	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM IKK	Fajar Bulan II	Semester I	2023	1	6.981.539.587,00	Hibah
12	PPKD	Dinas PUPR	1.5.4.01.01.02.004.	SPAM IKK	Sekincau	Semester I	2023	1	3.600.863.500,00	Hibah
	JUMLAH								38.318.351.987,00	